



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

II. Kompleks Perkantoran III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat





DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	6
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	9
1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kutai Barat	9
1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD Kutai Barat	10
1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	10
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	5
2.1.2.1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	5
2.1.2.2. Tanaman Perkebunan	7
2.1.2.3. Peternakan	10
2.1.2.4. Perikanan	13
2.1.2.5. Kehutanan	16
2.1.2.6. Pertambangan	17
2.1.2.7. Pariwisata	19



2.1.3. WILAYAH RAWAN BENCANA	20
2.1.4. Kondisi Demografi	20
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	24
2.2.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi	24
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2.1.2. Inflasi	32
2.2.1.3. PDRB Perkapita	35
2.2.1.4. Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan	37
2.2.1.5. Kemiskinan	39
2.2.1.6. Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas	42
2.2.1.7. Pembangunan Ekonomi Inklusif	44
2.2.2. Kesejahteraan Sosial	47
2.2.2.1. Pendidikan	47
2.2.2.2. Kesehatan	51
2.2.2.3. Ketenagakerjaan	54
2.2.3. Seni, Budaya, Dan Olah Raga	57
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	62
2.3.1. Pealayanan Urusan Wajib	62
2.3.1.1. Urusan Pendidikan	62
2.3.1.2. Urusan Kesehatan	70
2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77
2.3.1.4. Perumahan dan Permukiman	85
2.3.1.5. Urusan Perencanaan Pembangunan	86
2.3.1.6. Urusan Perhubungan	88
2.3.1.7. Urusan Lingkungan Hidup	89
2.3.1.8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	92



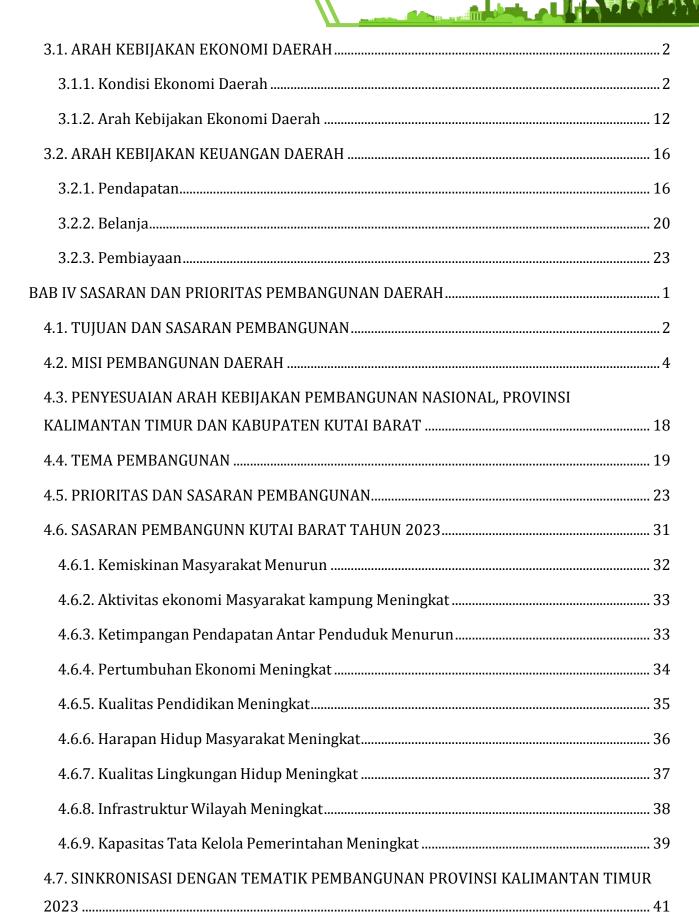
	The board
2.3.1.9. Urusan Pemberdayaan Perempuan	95
2.3.1.10. Urusan Sosial	98
2.3.1.11. Urusan Ketenagakerjaan	102
2.3.1.12. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	107
2.3.1.13. Urusan Pemerintahan Umum	108
2.3.1.14. Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa	110
2.3.2. Pelayanan Urusan Pilihan	112
2.3.2.1. Urusan Pertanian	112
2.3.2.2. Urusan Kehutanan	113
2.3.2.3. Urusan Pariwisata	115
2.3.2.4. Urusan Industri dan Perdagangan	118
2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Alam	123
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	125
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	125
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	128
2.4.2.1. Daya Saing Infrastruktur	128
2.4.2.2. Daya Saing Sumber Daya Alam	129
2.4.3. Iklim Investasi	129
2.4.4. Sumber Daya Manusia	132
2.4.5. Ketahanan Pangan	136
2.5. KONDISI UMUM HASIL CAPAIAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN INI	DIKATOR

A. Hasil Capaian Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kutai Barat140

B. Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan KLHS RPJMD Kutai

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH......1









4.7.1. Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan	41
4.7.2. menuju kaltim berdaulat	42
4.8. SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM	I) 43
4.9. SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJU	JTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)	45
4.10. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KUTAI BARAT	45
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
5.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS	1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
BAB VII PENUTUP	1
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat	3
Tabel 2. 2 Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2021	4
Tabel 2. 3 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2021	8
Tabel 2. 4 Peta Potensi Wilayah di Bidang Pertanian	8
Tabel 2. 5 Perbandingan Hasil Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	9
Tabel 2. 6 Potensi Sumberdaya Peternakan Tahun 2021	. 10
Tabel 2. 7 Potensi Sumberdaya Peternakan Tahun 2020-2021	. 11
Tabel 2. 8 Potensi Unggas Tahun 2021	. 12
Tabel 2. 9 Potensi Unggas Kutai Barat Tahun 2020-2021	. 12
Tabel 2. 10 Potensi Produksi Perikanan (ton)	. 13
Tabel 2. 11 Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 s.d 2021	. 14
Tabel 2. 12 Jumlah Perusahaan dan Luas Area HPD dan HTI Tahun 2020	. 16
Tabel 2. 13 Perusahaan Tambang Batu bara dan Jumlah Produksi Tahun 2018	. 18
Tabel 2. 14 Realisasi Penjualan Perusahaan Tambang Batu Bara Tahun 2018	. 18
Tabel 2. 15 Perkembangan Produksi Emas, Perak, dan Batu Bara Tahun 2015-2018	. 19
Tabel 2. 16 Junjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Tahun 2013-2021	. 19
Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020	. 21
Tabel 2. 18 Tingkat Kepadatan Penduduk 2020	. 22
Tabel 2. 19 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2020	. 23
Tabel 2. 20 Rata-rata Pertumbuhan 2010-2020 dan Pertumbuhan PDRB 2020	. 25
Tabel 2. 21 Perbandingan PDRB ADHK dan LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan	
Timur	. 28
Tabel 2. 22 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku 2016-2020	. 29
Tabel 2. 23 PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier 2010-2020	. 31
Tabel 2. 24 Perkembangan Laju Inflasi Lapangan Usaha Dengan Deflator PDB Tahun 2011-	
2020	. 34
Tabel 2. 25 Perbandingan PDRB Perkapita di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rp)
	. 36

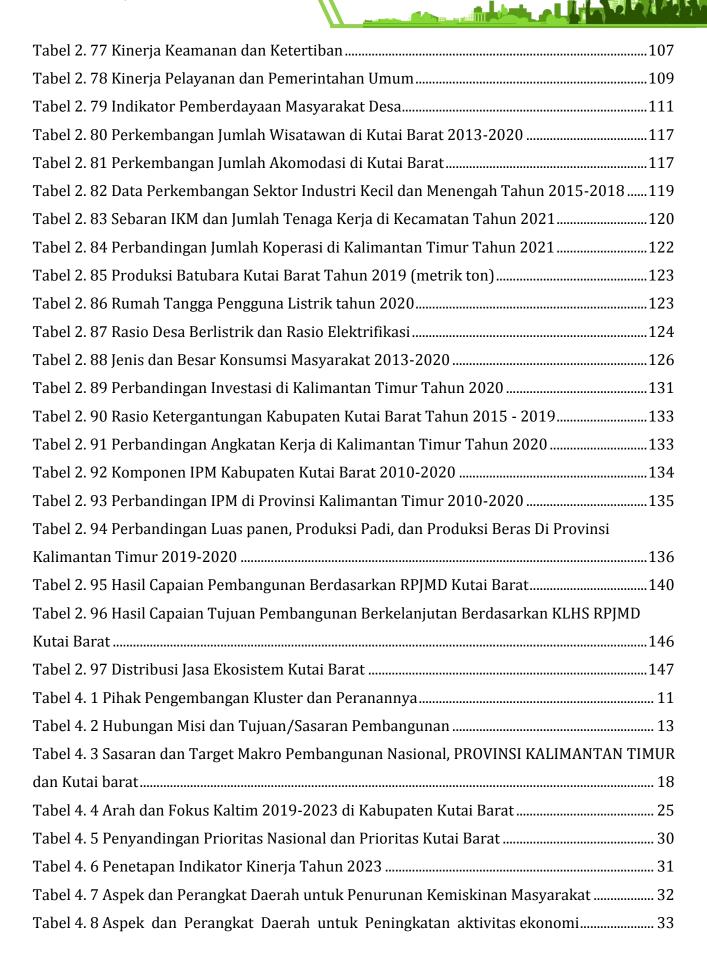


Tabel 2. 26 Perbandingan Nilai Indeks Gini Antar Daerah, 2011-2020	38
Tabel 2. 27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan, Garis Kemiskinan, dan Indeks Kemiskinan	
Antar Daerah 2017-2020	40
Tabel 2. 28 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, 2013-2020	46
Tabel 2. 29 Penduduk Usia Sekolah dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2021	49
Tabel 2. 30 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Antar Daerah Tahun 2012-2020	50
Tabel 2. 31 Jumlah dan Rasio Posyandu Terhadap Dengan Jumlah Balita di Kab. Kutai Bara	t
Tahun 2015 – 2019	52
Tabel 2. 32 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik di Kab. Kutai Ba	arat
Tahun 2016 – 2020	53
Tabel 2. 33 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Timur, Tahun 20	15-
2021	55
Tabel 2. 34 Kondisi Ketenagakerjaan Kutai Barat 2020	55
Tabel 2. 35 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tahun 20202020	56
Tabel 2. 36 Upah Minimum Regional 2016-2020	57
Tabel 2. 37 Jumlah Grup Kesenian Di Kecamatan Tahun 2020	59
Tabel 2. 38 Jenis Upacara Adat Masyarakat Kabupaten Kutai Barat	60
Tabel 2. 39 Data Pokok Pendidikan Kutai Barat Tahun 2021	62
Tabel 2. 40 Rasio Pendidikan di Kalimantan Timur, Tahun 2016/2017-2019/2020	63
Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Pendidikan Kutai Barat 2016-2021	65
Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2016-2020	65
Tabel 2. 43 Perbandingan Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Kemampuan	
Membaca dan Menulis di Kalimantan Timur Tahun 2019	66
Tabel 2. 44 Perbandingan Pendudukan Usia 7-24 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikar	n di
Kalimantan Timur, Tahun 2019	66
Tabel 2. 45 Perbandingan Akreditasi Sekolah di Kalimantan Timur Tahun 2019	67
Tabel 2. 46 Tingkat Pendidikan Guru di Kabupaten Kutai Barat Tahun 202120	69
Tabel 2. 47 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kutai Barat 2018	70
Tabel 2. 48 Fasilitas Kesehatan Kutai Barat 2019-2020	72
Tabel 2. 49 Perbandingan Umur Harapan Hidup (Tahun)	73
Tabel 2. 50 Indikator Kesehatan Kutai Barat 2015-2021	74
Tabel 2. 51 Perbandingan Imunisasi Balita di Kalimantan Timur Tahun 20192019	76













Tabel 4. 9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Ketimpangan	. 34
Tabel 4. 10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	35
Tabel 4. 11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	36
Tabel 4. 12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat	36
Tabel 4. 13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Peran Serta	37
Tabel 4. 14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	38
Tabel 4. 15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah	. 39
Tabel 4. 16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	
Pemerintahan	40
Tabel 4. 17 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kutai Barat 2022	43
Tabel 4. 18 Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan	46
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 - 2021	1





DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023	5
Gambar 1. 2 Hubungan Atar Dokumen	9
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kutai Barat	2
Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan	
Indonesia (2018-2020)	27
Gambar 2. 3 Laju Inflasi Kabupaten Kutai Barat dengan Pendekatan Inflasi Provinsi	
Kalimantan Timur, 2014-2020	32
Gambar 2. 4 Laju Inflasi Kabupaten Kutai Barat dengan Pendekatan PDRB Deflator, 2011-	
2020	33
Gambar 2. 5 Grafik PDRB Perkapita ADHB Tahun 2010 - 2020 (Juta Rp)	35
Gambar 2. 6 Indeks Gini Kabupaten Kutai Barat, 2011-2020	37
Gambar 2. 7 Tingkat Kemiskinan Kutai Barat 2009-2020 (%)	40
Gambar 2. 8 Grafik Perkembangan Kamtibmas	44
Gambar 2. 9 Grafik Komponen Pilar 1, 2, dan 3 IPEI Kabupaten Kutai Barat, 2011-2020	47
Gambar 2. 10 Kualifikasi Guru di Kutai Barat 2019/2020	70
Gambar 2. 11 Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2020	75
Gambar 2. 12 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kutai Barat Tahun 2016 - 2021 (Dalam Persen)	84
Gambar 2. 13 Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD Kabupater	n
Kutai Barat Tahun 2016 - 2020	87
Gambar 2. 14 Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha, 2019	105
Gambar 2. 15 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Latar	
Belakang Pendidikan, 2017-2019 (%)	106
Gambar 2. 16 Derajat Keterbukaan Ekonomi Kutai Barat 2010-2018	126
Gambar 2. 17 Ekspor Netto Kutai Barat 2010-2018	127
Gambar 2. 18 Perkembangan Nilai Investasi PMA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 202	20
	130





Gambar 2. 19 Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016	
Gambar 2. 20 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Barat 2010-2020	
Gambar 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kab Kutai Bar	
Tahun 2017-2021	
Gambar 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapa	
Usaha Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021	_
Gambar 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Peng	
Kab Kutai Barat Tahun 2016-2021	
Gambar 3. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut	
Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2018-2021	6
Gambar 3. 5 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Me	
Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2016-2021	
Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021	
Gambar 3. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Kutai Barat Tahun 2016-2020 Tanpa Bat Gambar 3. 8 Indek Harga Konsumen Menurut Bulan Tahun 2021	
Gambar 3. 9 Indek Harga Konsumen Menurut Bulan Tahun 2021	
Gambar 3. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
Gambar 3. 11 Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2020	
-	
Gambar 3. 13 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2021 dan Penetapan APBD 2	
Gambar 3. 14 Realisasi Target Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022	
Gambar 3. 15 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023	
Gambar 3. 16 Realisasi dan Penetapan Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. 2022	
Gambar 3. 17 Belanja Wajib Mengikat	
Gambar 3. 18 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2023	
Gambar 3. 19 Proyeksi Pembiayaan	
Gambar 4. 1 Konsep Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berkelan	
Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal	
Gambar 4. 2 Sumber Dana dan Skema Pendanaan Kluster	
Gambar 4. 3 Konsep Pengembangan SDM	
Gambar 4. 4 Konsep Kelembagaan Kluster	12





Gambar 4. 10 Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah.......38

Gambar 4. 11 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan........... 40





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang, dimulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kutai Barat Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026. Selanjutnya RPJPD dan Ranwal RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan, yaitu RKPD untuk tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 - 2026 yang tentunya akan disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Rancangan awal RKPD Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua atau berada pada fase awal perencanaan jangka menengah untuk Periode RPJMD Kutai Barat Tahun 2021-2026. Oleh karena itu RKPD Tahun 2023, mempunyai arti penting dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kutai Barat sebagai Skenario untuk Membangun di atas fondasi dasar yang kokoh yang telah diletakkan pada periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih periode 2021 – 2024.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan





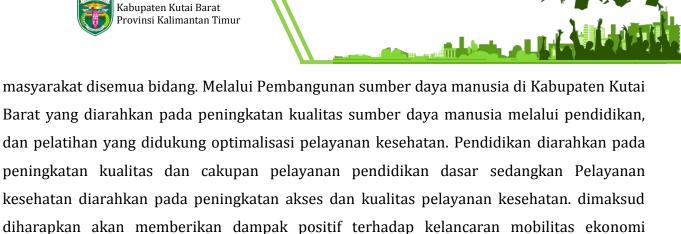
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019* tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah selanjutnya berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD diharapkan dapat secara optimal melibatkan para *stake-holder* pembangunan daerah sesuai dengan keterkaitannya dengan mempertimbangkan beberapa hal penting sebagai berikut : (1) Evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian kinerja RKPD Tahun 2023; (2) Evaluasi capaian kinerja terhadap Program dan Target pada RPJMD Tahun 2021-2026; (3) Penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah; (3) Perumusan dan penetapan program / kegiatan prioritas untuk mencapai target kinerja RKPD Tahun 2023 berdasarkan Visi dan Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Hal itu berarti, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan tetap mengacu pada Sasaran Prioritas dan Program Strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. RKPD juga akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun 2023.

Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 yang akan datang menitikberatkan pada upaya dengan fokus pembangunan pada upaya Peningkatan mutu bidang pendidikan dan Peningkatan mutu bidang kesehatan serta Peningkatan pelayanan





untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkulitas". Prioritas pembangunan Kutai Barat tahun 2023 relevan dan sinergis dengan Prioritas Nasional pada RPJMN dan prioritas pada RPJMD%.

ekonomi masyarakat dalam berusaha serta upaya percepatan pemulihan ekonomi sebagai

dampak pandemic covid-19. Seiring dengan terjadinya Pandemi Covid-19 di tanah air dan

dunia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,

sehingga Rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengusung tema

pembangunan daerah untuk tahun 2023 "Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 didasarkan pada kombinasi beberapa metode pendekatan perencanaan yaitu:

- 1. *Top-down* dan *Bottom-Up*, yaitu pendekatan perencanaan menurut jenjang pemerintahan yang dilaksanakan melalui musyawarah baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kampung sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan dan rencana pembangunan daerah.
- 2. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan perencanaan sehingga diharapkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lebih banyak terjaring.
- 3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



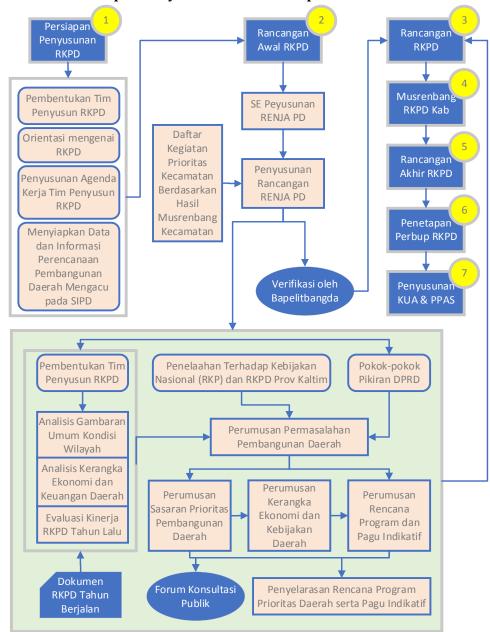


- 1. Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023; Meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD);
- 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023; Disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, rancangan awal RKPD Provinsi 2023, RKP Nasional 2023, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
- 3. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023; Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 yang disempurnakan berdasarkan Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, RKP Nasional 2023 dan program strategis nasional;
- 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023;
 Dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, menyepakati prioritas pembangunan Daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi serta penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023;
 Proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, yang disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023;
- 6. Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023;
 Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan ke Kepala
 Daerah untuk meminta persetujuan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati
 tentang RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.



Lebih jelasnya, tahapan penyusunan dokumen RKPD Kutai Barat Tahun 2023 ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023







1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);





- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);





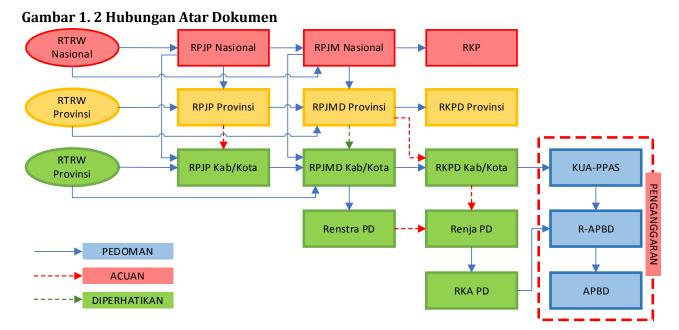
- 19. Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kutai Barat Tahun 2005–2025;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 32);
- 25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 217) NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR: 64.07/III/37/4/2022. DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2021





1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen tersebut ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kutai Barat

RPJMD Kutai Barat 2021 – 2026 merupakan bagian dari pencapaian RPJPD Kutai Barat 2005 - 2025. RPJMD 2021 – 2026 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2016 - 2021 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh kepala daerah. Secara substantif, isi RPJMD 2021 - 2026 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kutai Barat pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kutai Barat. Berbagai evaluasi RJPMD sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD 2021 - 2026.





1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD Kutai Barat

RPJMD Kutai Barat 2021 - 2026 menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjabarkan visi dan misi serta RPJPD. Implementasi dari RPJMD dituangkan melalui masing - masing OPD dalam bentuk *Rencana Strategis PD* (Renstra PD) sesuai garis - garis besar RPJMD, yang difokuskan pada bagian - bagian sebagaimana yang menjadi tupoksi PD. *Rencana Strategis PD* (Renstra PD) disusun untuk jangka waktu lima tahun yaitu 2021 - 2026. Penjabaran RPJMD kedalam *Rencana Strategis PD* (Renstra PD) dituangkan kedalam program - program yang disusun oleh masing - masing PD, berdasarkan RPJMD.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Implementasi RPJMD setiap tahun dijabarkan dalam bentuk RKPD. Masing - masing PD menyusun prioritas program tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif. RKPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek disusun berdasarkan pertimbangan hasil Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang.

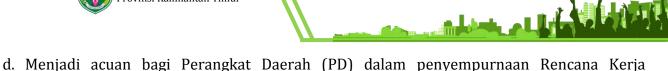
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 20233 yaitu :

- a. Sinergisasi sasaran dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur (RKPD) Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 dalam upaya mewujudkan hasil pembangunan yang efektif dan memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kutai Barat;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023;





- d. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyempurnaan Rencana Rerja Tahunan (RENJA) PD Tahun 2023;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Barat.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika penyusunan dokumen *Rencana Kerja Pemerintah Daerah* **(RKPD)** 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menyajikan uraian ringkas tentang Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 baik yang berskala nasional maupun lokal tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RKP/ program strategis nasional Tahun 2023, dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD





Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahindikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menyajikan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling





dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 - 2026 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat yang berisi uraian umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Barat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi





permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator berdasarkan RPJMD Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kutai Barat 2021 – 2026. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kutai Barat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Barat 2023, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.





BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Secara simbolis kabupaten ini telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan secara operasional diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 05 Nopember 1999 di Sendawar.

Namun pada Tahun 2013 terjadi pemekaran yang menyebabkan Luas Wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah kampung berubah. Berdasarkan UU No.02 Tahun 2013 Kabupaten Kutai Barat di mekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Barat sendiri merupakan wilayah kabupaten terluas ke-empat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau. Luas Kabupaten Kutai Barat dengan 16 kecamtaman adalah 20.384,6 Km² dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan 5 kecamatan 15.315 Km².

Secara Geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°45'26,09" sampai dengan 116°31'16,39" Bujur Timur serta diantara 00°38'52,50" Lintang Utara dan 1°09'15,17" Lintang Selatan. Adapun wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat adalah Kabupaten Mahakam Ulu di sebelah Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara di sebelah Selatan dan untuk sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

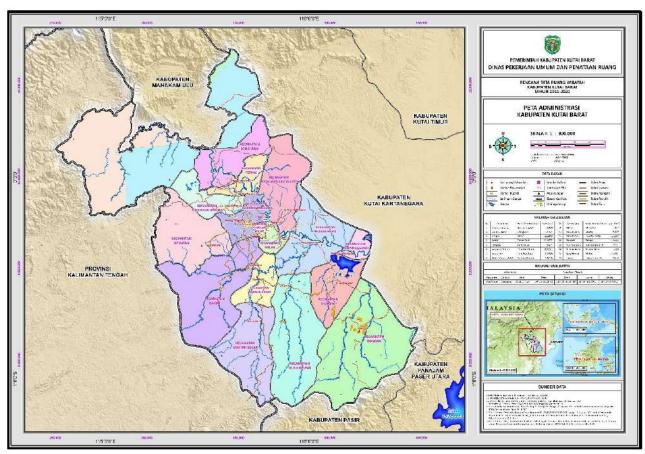
Topografi Kabupaten Kutai Barat didominasi dengan topografi wilayah yang bergelombang ringan sampai dengan berat, dari kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 0 sampai dengan > 40 persen. Terdiri dari topografi sangat curam (17,20%) dan curam (18,32 %). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07





ha atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan, terdapat 28 gunung di Kutai Barat yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Bongan merupakan kecamatan yang memiliki gunung paling banyak, yaitu 9 buah gunung. Terdapat 2 dengan ketinggian di atas 1.000 meter, yaitu Gunung Beratus dengan ketinggian 1.225 meter serta Gunung Konut dengan ketinggian 1.149 meter. Kedua gunung tersebut berada di Kecamatan Bongan. Selain pegunungan, Kutai Barat juga memiliki sungai-sungai besar sebanyak 14 sungai dengan panjang puluhan kilometer. Sungai yang terpendek adalah Sungai Barong sepanjang 28,5 km dan sungai terpanjang adalah Sungai Mahakam sepanjang 229,42 km.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Kutai Barat memiliki 16 kecamatan dengan 194 wilayah kampung dan kelurahan, yaitu 190 kampung/desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kampung paling banyak yaitu 21 kampung sedangkan kecamatan dengan jumlah kampung paling sedikit adalah Kecamatan Melak dan Penyinggahan yang





masing-masing memiliki 6 kampung. Kutai Barat menjadi daerah di Kalimantan Timur, yang memiliki persentase jumlah desa terbanyak di daerah lembah atau daerah aliran sungai. Sebelum pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah Kutai Barat lama berdasarkan data BPS 2010, sebanyak 158 desa/kampung atau 66,39% desa berlokasi di daerah aliran sungai, kemudian 64 desa/kampung atau 26,89% desa berlokasi di dataran, dan sisanya 16 desa/kampung atau 6,72% desa berlokasi di lereng pegunungan atau bukit. Kondisi wilayah dengan topografi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya alami berupa gerakan tanah baik dalam volume besar (longsor) atau pun volume kecil (tanah retak). Besar-kecilnya volume gerakan tanah tersebut dipengaruhi *surface runoff* yang dipengaruhi oleh besar curah hujan, jenis tanah, serta besar kemiringan lereng.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat

No	Vasamatan	Luas Jumlah Kampi	Jumlah Kampung dan	
No.	Kecamatan	Km ²	%	Kelurahan
1.	Long Iram	2.499,50	12,26	11
2.	Melak	179,2	0,88	6
3.	Barong Tongkok	405,9	1,99	21
4.	Damai	2.027,50	9,95	17
5.	Muara Lawa	436,7	2,14	8
6.	Muara Pahu	1.110,60	5,45	12
7.	Jempang	744,5	3,65	12
8.	Bongan	2.305,30	11,31	16
9.	Penyinggahan	192,1	0,94	6
10.	Bentian Besar	1.856,10	9,1	9
11.	Linggang Bigung	2.299,10	11,28	11
12.	Nyuatan	1.343,30	6,59	10
13.	Siluq Ngurai	1.629,10	7,99	16
14.	Mook Manaar Bulatn	2.964,60	14,54	16
15.	Tering	341,8	1,68	16
16.	Sekolaq Darat	49,4	0,24	8
Luas Kabupa	ten Kutai Barat	20.384,60	100%	194

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kampung terbanyak yang berada di dataran yaitu 17 desa/kampung dari 21, sedangkan Kecamatan Siluq Ngurai merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kampung terbanyak yang berlokasi di lembah/DAS yaitu 16 desa/kampung. Beberapa kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di lembah/DAS adalah Penyinggahan, Muara Pahu, dan Siluq Ngurai. Sementara itu kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di dataran semua adalah Sekolaq Darat. Dari aspek ketinggian di atas permukaan laut, daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di





kawasan danau dan kawasan sepanjang sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30 persen terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah untuk jenis komoditi yang diusahakan masyarakat. Di samping itu kondisi geografi dan topografi juga membuat Kutai Barat memiliki keterbatasan dalam pengembangan perkotaan, akibat kondisi kemiringan lereng.

Dalam aspek klimatologi, unsur iklim yang utama adalah curah hujan, temperatur, kecepatan angin dan kelembapan udara. Iklim di Kabupaten Kutai Barat adalah iklim tropika humid yang ditandai dengan intensitas hujan yang tinggi dan nilai curah hujan yang besar. Daerah beriklim tropika humid tidak mempunyai batas yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Temperatur berkisar antara 22°-30°. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Januari sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim angin barat hujan turun sekitar sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim timur hujan relatif kurang, hal ini terjadi pada sekitar bulan April sampai bulan September. Pada tahun 2021 rata-rata jumlah hujan pada bulan Februari memiliki angka terrendah dan pada bulan September memiliki angka tertinggi.

Tabel 2. 2 Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	247.00	13	68.10
Februari	91.80	11	66.47
Maret	135.50	16	61.90
April	176.50	19	65.54
Mei	224.70	19	44.88
Juni	172.60	25	34.38
Juli	148.00	23	36.41
Agustus	228.70	27	43.79
September	282.50	26	40.00
Oktober	170.00	24	44.96
November	185.30	19	43.41





Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Desember	117.90	25	41.73

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2022

Dengan keragaman curah hujan pada berbagai wilayah, akan menjadikan daerah ini semakin kaya dengan potensi jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Secara geografis wilayah Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 4 tipe daerah hujan yaitu:

- 1). Kawasan dengan curah hujan antara 2.000 2.500 mm/ tahun. Kawasan ini terletak pada ujung bagian timur Kabupaten Kutai Barat di sepanjang wilayah Kecamatan Penyinggahan, Tanjung Isui dan Muara Kedang.
- 2). Kawasan dengan curah hujan antara 2.500 3.000 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di bagian tengah meliputi daerah sekitar Kecamatan Melak, Muara Pahu, Damai, Muara Lawa, Jempang dan Bongan.
- 3). Kawasan dengan curah hujan antara 3.000 3.500 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di sebelah barat Melak meliputi Kecamatan Barong Tongkok sampai bagian selatan Kecamatan Barong Tongkok.
- 4). Kawasan dengan curah hujan antara 3.500 4.000 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di wilayah Kecamatan Long Iram.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pertanian merupakan sektor andalan Kabupaten Kutai Barat setelah pertambangan dan penggalian, serta untuk mengganti ketergantungan perekonomian pada batubara. Dengan demikian luas lahan dan hasil produksi pertanian perlu mendapat perhatian lebih serius dan focus. Di Kabupaten Kutai Barat terdapat pada tahun 2021 untuk luasan panen dan produksi tanaman padi sawah dan padi ladang secara umum mengalami penurunan, untuk jenis komoditi padi sawah mengalami penurunan dari 1.190,8 Ha menjadi 1.071,6 Ha, hal ini dikarenakan adanya bencana banjir di beberapa lokasi sentra tanaman padi sawah seperti di kecamatan Muara Pahu dan Penyinggahan serta terjadinya tanggul jebol di kecamatan Bongan, menurunnya luasan panen komoditi padi sawah otomatis berpengaruh terhadap produksi padi sawah yang juga mengalami penurunan dari 3.986,8 ton menjadi 2.516,1 ton. Begitu pula untuk jenis luas panen komoditi padi ladang juga mengalami





penurunan luasan areal panen dari 3.359,8 Ha menjadi 3.273,5 Ha. Menurunnya luasan areal padi ladang dikarenakan adanya edararan larangan untuk mengumpulkan masa di beberapa kampung dikarenakan wabah pandemi covid 19 dan adanya larangan untuk tidak membakar lahan sesuai undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurunnya luasan areal panen komoditi padi ladang otomatis berdampak juga terhadap nilai produksi yang dihasilkan hal ini terbukti dengan adanya penurunan produksi padi ladang dari sebesar 9.719,9 ton menjadi 9.470,2 ton.

3.7		0	Tah	iun		
No	Uraian	Satuan	2020	2021		
LUAS	LUAS LAHAN (Ha)					
A.	Padi					
1	Padi Sawah	На	1.190,8	1.071,6		
2	Padi Ladang	На	3.359,8	3.273,5		
B.	Palawija (Ha)					
1	Jagung	На	456,3	529,6		
2	Kedelai	На	1,0	-		
3	Kacang Tanah	На	37,0	29,2		
4	Kacang Hijau	На	4,0	-		
5	Ubi kayu	На	298,9	321,5		
6	Ubi Jalar	На	99,6	95,3		
PRO	PRODUKSI PERTANIAN (TON)					
A.	Padi (Ton)					
1	Padi Sawah	Ton	3.986,8	2.516,1		
2	Padi Ladang	Ton	9.719,9	9.470,2		
B.	Palawija (Ton)					
1	Jagung	Ton	2.197,1	2.903,3		
2	Kedelai	Ton	-	-		
3	Kacang Tanah	Ton	33,2	32,9		
4	Kacang Hijau	Ton	4,0	-		
5	Ubi kayu	Ton	6.423,1	6.920,0		
6	Ubi Jalar	Ton	1.051,8	1.430,4		
PRO	PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)					
A.	Padi					
1	Padi Sawah	Kw/Ha	33,48	23,48		
2	Padi Ladang	Kw/Ha	28,93	28,93		
B.	Palawija					
1	Jagung	Kw/Ha	48,15	54,82		
2	Kedelai	Kw/Ha	-	-		
3	Kacang Tanah	Kw/Ha	8,98	11,28		



4

5

Ubi Jalar

	- 77					
Kacang Hijau		Kw/Ha	10,00	-		
Ubi kayu		Kw/Ha	214,89	215,24		

105,60

Kw/Ha

150,09

Untuk jenis Tanaman Holtikultura, tanaman yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Barat antara lain terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Produksi tanaman sayuran untuk Kutai Barat rata-rata mengalami penurunan seperti cabai rawit pada tahun 2020 dari 2.918 kwintal menjadi 2.221 kwintal begitu pun Produksi tomat juga turun dari 2.076 kwintal menjadi 1.121 kwintal. Hal ini dikarenakan adanya gagal panen yang disebabkan oleh faktor curah hujan yang tinggi di sentra penghasil tanaman cabai rawit dan tomat seperti kecamatan tering, dan barong tongkok.

Investasi untuk buah-buahan seperti Durian dalam jumlah besar memerlukan pengkajian mendalam terutama menyangkut segmen pasar produk yang akan dihasilkan. Produksi Durian dari tahun 2021 mengalami peningkatan, yakni dari 9.796 kwintal menjadi 81.360 kwintal. Buah durian pada tahun 2021 paling banyak diproduksi di Kecamatan mook Manaar Bulant dengan produksi 78.000 kwintal

2.1.2.2. Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan yang diunggulkan masih sama dengan tahun sebelumnya antara lain komoditi Karet dengan luasan dari 35.529,28 Ha untuk luasan areal tanaman karet pada tahun 2021 tidak mengalami penambahan dikarenakan tidak adanya dukungan dari APBD Kabupaten Kutai Barat untuk kegiatan perluasan tanaman karet, akan tetapi untuk jumlah produksinya meningkat dari 25.838,99 ton menjadi 32.022,63 ton hal ini dikarenakan adanya bantuan dukungan APBD berupa bantuan pupuk dan peningkatan atau pembukaan jalan tani. Untuk komoditi Aren luasannya 33.605,30 Ha dengan produksi 39,53 ton. Untuk komoditi Kemiri luas areal tidak mengalami peningkatan luas areal dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 543.71 ha dengan nilai produksi 65,72 ton, sedangkan untuk komoditi kelapa luas arealnya 1.067,98 ha dengan produksi 214,92 ton. Penurunan luas areal ini disebabkan karena penebangan kelapa yang tidak produktif dan alih fungsi lahan non perkebunan. Komoditi Kopi untuk luasan arealnya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 944,75 Ha menjadi 808,38 ha, sedangkan untuk produksi Kopi relatif konstan 27,50 ton. Dalam perjalanannya luasan areal perkebunan rakyat di Kabupaten Kutai





Barat banyak yang mengalami pengurangan yang disebabkan konversi lahan oleh masyarakat ke berbagai kebutuhan publik seperti lahan untuk pemukiman penduduk, pembuatan akses jalan dan lain sebagainya. Komoditi unggulan di Kabupaten Kutai Barat masih bertumpu pada Karet karena dianggap punya nilai ekonomi yang tinggi, perkembangan harga karet di Kutai Barat terus bergerak naik membuat para petani kembali bersemangat dan termotivasi untuk mengolah dan mengusahakan tanamannya serta berubahnya pola pengolahan karetnya menjadi karet bersih.

Tabel 2. 3 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2021

	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao	Lada
Tahun 2020						
Luas (Ha)	35529,28	1061,98	8551,50	808,38	505,06	219,24
Produksi (ton)	25838,99	202,14	7404,70	25,70	18,85	20,43
Tahun 2021						
Luas (Ha)	35529,28	1061,98	8551,50	808,38	505,06	219,24
Produksi (ton)	32022,63	214,92	7404,70	91,57	20,43	4,99

Sumber: Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

Kecamatan yang memiliki luas areal tanaman kelapa sawit paling luas di Kabupaten Kutai Barat adalah Kecamatan Jempang dengan luas areal mencapai 2.300 ha dengan total produksi sekitar 2.175 ton. Kecamatan yang memiliki luas areal tanaman karet paling luas di Kabupaten Kutai Barat adalah Kecamatan Barong Tongkok dengan luas areal mencapai 7.950 ha dengan total produksi sekitar 9.787,68 ton. Secara umum, peta potensi wilayah Kutai Barat di pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Peta Potensi Wilayah di Bidang Pertanian

NO.	JENIS KOMODITI	JENIS KOMODITI SENTRA PRODUKSI	
	Tanaman Pangan		
1.	Padi	Damai, Nyuatan, Bongan, Barong Tongkok	
2.	Jagung	Siluq Ngurai, Damai, Tering, Barong Tongkok	
3.	Kedelai	Bongan, Barong Tongkok, Long Iram	
4.	Kacang Tanah	Siluq Ngurai, Bongan, Barong Tongkok, Damai	
5.	Ubi Kayu	Damai, Nyuatan, Bongan, Siluq Ngurai, Jempang	
6.	Ubi Jalar	Siluq Ngurai, Bongan, Damai, Nyuatan, Barong Tongkok	





	Tanaman Buah-buahan	
1.	Buah Naga	Sekolaq Darat
2.	Durian	Barong Tongkok, Linggang Bigung, Nyuatan
3.	Pisang	Muara Pahu, Penyinggahan, Bongan
4.	Langsat	Mook Manor Bulatn, Barong Tongkok
5.	Jeruk	Tering
6.	Nanas	Jempang, Damai, Barong Tongkok
7.	Nangka/Cempedak	Barong Tongkok, Linggang Bigung
	Tanaman Hias	
1.	Anggrek Hitam	Sekolaq Darat
	Tanaman Perkebunan	
1.	Kelapa	Barong Tongkok, Bongan, Jempang, Melak, Penyinggahan
2.	Корі	Barong Tongkok, Damai, Linggang Bigung
3.	Kemiri	Barong Tongkok, Damai, Mook Manor Bulatn
4.	Aren	Muara Lawa, Damai, Mook Manor Bulatn
5.	Kapuk	Barong Tongkok, Muara Pahu, Mook Manor Bulatn, Bongan
6.	Kakao	Linggang Bigung, Tering

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2018-2021, diolah.

Kondisi tahun 2021 untuk sektor perkebunan menunjukkan bahwa luas panen kelapa sawit di Kutai barat adalah 145.175 ha dengan produksi sebesar 1.021.680 ton atau 6,11% dari total produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk produksi kelapa, tahun 2020 adalah 224 ton dari luas area 1.010 ha. Dari beberapa jenis tanaman perkebunan, Kutai Barat memiliki keunggulan dalam produksi tanaman karet yaitu 45.262 ton di tahun 2020 dan ini merupakan produksi karet terbesar dibadningkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur..

Tabel 2. 5 Perbandingan Hasil Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

	Kelapa	a Sawit	Ke	lapa	Karet		Kakao	
Kabupaten/Kota	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
1. Paser	183 575	2 183 672	2 543	1 114	13 843	9 941	125	7
2. Kutai Barat	145 175	1 021 680	1 010	224	45 262	37 315	517	22
3. Kutai	231 958	3 134 442	8 358	5 483	21 003	13 368	112	66





	Kelapa	a Sawit	Ke	lapa	Ка	ret	Ka	kao
Kabupaten/Kota	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
Kartanegara								
4. Kutai Timur	459 593	7 237 808	1 396	1 061	18 754	1 285	3 595	1 665
5. Berau	135 092	2 161 834	2 443	1 540	6 173	180	1 625	1 165
6. Penajam Paser Utara	49 689	851 545	4 300	2 290	6 671	4 267	10	4
7. Mahakam Ulu	21 740	115 839	30	6	1 763	-	1 499	371
8. Balikpapan	36	427	996	535	4 480	3 758	5	2
9. Samarinda	1 308	9 700	264	198	789	568	20	5
10. Bontang	72	307	32	17	35	-	-	-
Kalimantan Timur	1 228 238	16 717 254	21 372	12 468	118 773	70 682	7 508	3 307

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

2.1.2.3. Peternakan

Daya dukung ketersedian lahan – lahan keaneka ragaman vegetasi alam yang memadai di Kabupaten Kutai Barat sangat berpotensi bagi perkembangan usaha peternakan yang berskala besar, terutama ternak Sapi, Kerbau dan ternak kecil seperti Kambing dan Babi. Potensi lahan konvensional untuk peternakan yang terdiri dari lahan terbuka, padang rumput, lahan pertanian, danau dan rawa kurang lebih seluas 208.031 Ha dari lahan tersebut mampu menyediakan pakan hijauan sebanyak 2.924.700 ton per tahun.

Tabel 2. 6 Potensi Sumberdaya Peternakan Tahun 2021

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
Bongan	461	101	0	447	1.305
Jempang	312	344	0	217	2.318
Penyinggahan	166	37	0	90	0
Muara Pahu	203	50	0	95	535
Muara Lawa	437	35	0	133	1.603
Damai	310	26	0	133	2.748
Barong Tongkok	1.070	35	0	867	6.110
Melak	406	14	0	158	835
Long Iram	493	14	0	298	735





Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
Bentian Besar	164	105	0	92	1.690
Linggang Bigung	831	21	0	585	3.345
Siluq Ngurai	354	81	0	113	2.312
Nyuatan	272	21	0	144	2.013
Sekolaq Darat	755	15	0	700	3.377
M. Manaar Bulatn	188	29	0	50	2.097
Tering	684	11	0	430	1.865
Kutai Barat	7.106	939	0	4.552	32.888

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat 2021

Untuk populasi ternak pada tahun 2021 Kabupaten Kutai Barat secara umum mengalami penurunan terutama populasi ternak babi yang mengalami penurunan secara signifikan yaitu dari 38.646 ekor menjadi 32.888 ekor hal ini dikarenakan banyak ternak babi yang mati terserang virus African Swine Fever (ASF), Virus ASF adalah penyakit pada ternak babi yang sangat menular, menimbulkan berbagai perdarahan pada organ internal dan dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100 % sehinggga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk pencegahan penyakit ASF. Untuk populasi ternak sapi juga mengalami penurunan dari 7.267 ekor menjadi 7.106 penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pemotongan ternak sapi, Kerbau dari 996 ekor menjadi 939 ekor, populasi ternak Kambing dari 5.346 ekor menjadi 4.552 ekor. Dengan demikian dari analisa potensi dan jumlah populasi ternak tersebut, memberikan gambaran yang jelas bahwa peluang untuk mengembangkan usaha peternakan dalam skala besar sangat terbuka luas.

Tabel 2. 7 Potensi Sumberdaya Peternakan Tahun 2020-2021

	2020	0	2021		
Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Produksi Daging (kg)	Populasi (ekor)	Produksi Daging (kg)	
Sapi	7.267	110.974	7.106	116.343	
Kerbau	996	6.832	939	6.294	
Kambing	5.346	8.084	4.552	7.863	
Babi	38.646	168.181	32.888	100.238	

Sumber: Statistik Peternakan Distan Kabupaten Kutai Barat 2020-2021





Untuk unggas pada tahun 2021 Kutai Barat didominasi oleh unggas jenis ayam pedaging yang mencapai 2.589.339 ekor sementara ayam kampung mencapai 226.147. Untuk unggas jenis itik populasinya tergolong sangat sedikit yaitu sekitar 21.000 pada tahun 2021. Unggas jenis ayam kampong sebagian besar berpusat di Kecamatan Barong Tongkok dan Bongan sedangkan ayam potong di Kecamatan Melak dan Linggang Bigung.

Tabel 2. 8 Potensi Unggas Tahun 2021

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Potong	Itik/Itik Manila
Bongan	22.165	285.167	1.238
Jempang	12.540	14.500	1.165
Penyinggahan	8.150	5.600	635
Muara Pahu	9.215	7.000	572
Muara Lawa	11.460	23.000	1.022
Damai	12.765	22.000	1.165
Barong Tongkok	25.855	621.120	3.155
Melak	20.325	580.350	1.320
Long Iram	11.870	145.332	1.240
Bentian Besar	10.065	8.500	650
Linggang Bigung	14.830	476.140	2.330
Siluq Ngurai	14.175	10.500	1.232
Nyuatan	11.590	8.500	1.135
Sekolaq Darat	13.920	336.640	2.245
M. Manaar Bulatn	12.845	15.000	1.368
Tering	14.377	30.000	1.30
Kutai Barat	226.147	2.589.339	21.782

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat 2021

Di tahun 2021 populasi ayam kampung menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020, namun populasi itik menunjukkan sedikit penurunan tidak secara signifikan. Sedangkan untuk populasi ayam potong terjadi kenaikan yaitu dari 2.588.834 menjadi 2.589.339.

Tabel 2. 9 Potensi Unggas Kutai Barat Tahun 2020-2021

Jonis Unggas 2020		20	2021		
Jenis Unggas	Populasi	Produksi (Kg)	Populasi	Produksi (Kg)	



•	
	A LAND

Ayam kampung	222.347	83.628	222.347	83.628
Ayam pedaging	2.588.834	318.576	2.588.834	318.576
Itik	24.340	5.665	24.340	5.665

2.1.2.4. Perikanan

Perikanan juga merupakan subsektor yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kutai Barat, dengan luas areal penangkapan ikan seluas 19.841,3 Ha pada tahun 2020 yang meliputi sungai, danau, rawa dan waduk. Sehingga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai produsen ikan. Berdasarkan harga dan jumlah serta produksinya, ikan yang diunggulkan di Kutai Barat adalah jenis ikan Jelawat dan Patin yang harga dan pasarnya relatif stabil. Untuk produksi ikan di perairan tangkap pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.485,72 ton yang signifikan dibandingkan produksi ikan di tahun 2020 yang hanya 1.412,27 ton.

Kecamatan yang menunjukkan peningkatan produksi ikan selama 2016-2017 adalah Muara Lawa, Melak, Long Iram, Linggang Bigung, Manoor Bulatn, serta Tering sementara kecamaan yang lai menunjukkan penurunan produksi ikan peraran umum. Budidaya perikanan dilakukan melalui kolam dan keramba, belum ada budidaya tambak yang dilakukan oleh maKecamatan yang menunjukkan peningkatan produksi ikan selama 2020-2021 adalah Muara Pahu, Penyinggahan, Long Iram, Linggang Bigung, Manoor Bulatn, serta Damai. sementara kecamatan yang lain menunjukkan penurunan produksi ikan peraran umum. Budidaya perikanan dilakukan melalui kolam dan keramba, belum ada budidaya tambak yang dilakukan oleh masyarakat.

Tabel 2. 10 Potensi Produksi Perikanan (ton)

Kecamatan	2020	2021
Bongan	20,69	6,67
Jempang	382,58	362,92
Penyinggahan	221,21	283,28
Muara Pahu	215,98	243,94
Muara Lawa	10,06	22,84
Damai	41,38	65,01
Barong Tongkok	0,81	18,20





Kecamatan	2020	2021
Melak	72,82	68,22
Long Iram	63,36	85,57
Bentian Besar	5,82	7,7
Linggang Bigung	1,92	3,78
Siluq Ngurai	52,91	13,44
Nyuatan	7,16	9,53
Sekolaq Darat	3,02	6,89
M. Manaar Bulatn	160,15	179,38
Tering	152,39	108,35
Kutai Barat	1.412,27	1.485,72

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2021

Potensi perikanan Perairan Umum terdapat di 4 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Jempang, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Penyinggahan dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn sedangkan Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Kutai Barat terdiri dari budidaya ikan di air tawar. Potensi budidaya ikan di air tawar menyebar di hampir semua wilayah kecamatan dengan komoditas utama jenis ikan Mas, Toman, Gabus, Baung, Nila, Patin, Jelawat dan Lele. Usaha budidaya ikan air tawar banyak dilakukan di Kolam dan Keramba. Luas daerah potensi perikanan di Kabupaten Kutai Barat belum semua termanfaatkan secara optimal dan jika dikelola dengan baik dan berwawasan lingkungan, maka produktivitas perairan umum dan usaha budidaya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat khususnya nelayan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya.

Indikator kinerja pada sektor perikanan dapat diukur melalui produksi perikanan yang dicapai sejak tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 s.d 2021

No	Indikator	Catuan	Tahun				
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.209,7	1.330	1.360	1.412,27	1.485,72
2	Produksi Perikanan Budidaya :						
	a. Kolam	Ton	172,3	281,4	304,92	338,57	389,52
	b. Keramba	Ton	835,1	1.341,9	1.506,81	1.545,96	1.665,89
	c. Keramba Jaring Apung	Ton	7,6	13,2	45	104,41	122,05

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat, 2021





Pada tahun 2020 produksi perikanan sebesar 3.296,8 ton, terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 1.412,27 ton dan budidaya sebesar 1.988,94 ton. Pada tahun 2021 produksi ikan di perairan tangkap mengalami peningkatan sebesar 1.485,72 ton meningkat sebesar 5,20 % atau meningkat sebesar 73,45 ton dari tahun 2020 yang sebesar 1.412,27 ton. Dan pada produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2021 sebesar 2.177,46 meningkat sebesar 9,48 % atau meningkat sebesar 188,52 ton dari tahun 2020 yang sebesar 1.988.94 ton. Untuk produksi ikan Budidaya tahun 2021 ini terdiri dari Budidaya ikan dalam keramba dengan produksi sebesar 1.665,89 ton, produksi Ikan Budidaya dalam Kolam sebesar 389,52 ton dan produksi budidaya ikan dalam Keramba Jaring Apung (KJA) sebesar 122,05 ton.

Untuk mendongkrak usaha perikanan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Kutai Barat di tahun 2020 pada tahap awal menghibahkan 30 unit keramba demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat sebagai sarana budidaya ikan air tawar disungai untuk tiga kelompok pembudidaya perikanan di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering.

Kedua kecamatan tersebut diserahkan masing-masing 10 unit keramba, kepada kelompok budidaya didanau Gap, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram. Lalu 10 unit keramba diberikUntuk mendongkrak usaha perikanan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Kutai Barat di tahun 2021 pada tahap awal menghibahkan 54 unit keramba, Kolam Terpal 18 unit, Kolam bioflok 11 unit demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat sebagai sarana budidaya ikan air tawar disungai dan perairan umum daratan, yang diserahkan pada 8 kelompok pembudidaya di 5 kecamatan. Pada 1 Kelompok Pembudidaya di kecamatan Penyinggahan kampung Loa Deras diserahkan 10 unit keramba, di Kecamatan Melak kampung Melak Ilir diserahkan sebanyak 10 unit keramba dan kampung Muara Bunyut mendapat 8 unit keramba lengkap beserta benih ikan nila, Kemudian di kecamatan Muara Pahu Kampung Muara Beloan diserahkan sebanyak 32 unit keramba yang diterima oleh dua kelompok pembudidayaan kepada kelompok di Kampung Muyup Ilir dan Kampung Jelemuq Kecamatan Tering.

Dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha budidaya hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan benih yang dibutuhkan dalam usaha budidaya ikan terutama budidaya ikan dalam kolam dan keramba. Berkaitan dengan hal tersebut guna menunjang ketersediaan benih bagi pembudidaya ikan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat juga diberikan





bantuan hibah berupa Unit Pembenihan Rakyat (UPR) berupa bangunan UPR beserta sarana penunjang antara lain kolam, indukan ikan, blower dan sarana pendukung pembenihan lainnya. UPR ini diserahkan kepada 2 kelompok pembenih yaitu pada kampung Barong Tongkok kecamatan Barong Tongkok dan kampung Loa Deras Kecamatan Penyinggahan.

Selain itu bantuan hibah perahu ketinting beserta sarana tangkap sebanyak 101 unit untuk 14 kelompok nelayan pada 5 kecamatan yaitu 2 kelompok di Kecamatan Penyinggahan, 3 kelompok di kecamatan Melak, 4 kelompok di kecamatan Muara Pahu, 4 kelompok di kecamatan Jempang dan 1 kelompok di kecamatan Muara Lawa.

2.1.2.5. Kehutanan

Dilihat dari perbandingan luasan hutan produksi dengan total luas hutan yang dialokasikan untuk IUPHHK dan HTI hampir sama, maka dapat dikatakan bahwa prospek investasi untuk sektor kehutanan relatif terbatas. Karena itu tahapan berikutnya yang sangat krusial adalah rehabilitasi dan pengendalian kerusakan lahan melalui pemanfaatan dana reboisasi (DR).

Potensi Kehutanan di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Hutan Lindung seluas 211.973,82 Ha, Hutan Suaka Alam dan Provinsi Kalimantan Utara seluas 13.855,833 hektar, yang dirinci menurut fungsi dan luas sebagai berikut:

- 1) Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas 1.704,666 hektar;
- 2) Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas 2.848,243 hektar;
- 3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas 5.045,879 hektar;
- 4) Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas 4.077,346 hektar; dan
- 5) Kawasan Hutan Produksi yan dapat dikonversi (HPK), seluas 179,699 hektar.

Pada tahun 2020 jumlah perusahaan IUPHHK-HA (HPH) di Kutai Barat adalah 10 perusahaan dengan luas HPH 452.605 Ha sementara jumlah perusahaan IUPHHK-HT (HTI) sebanyak 7 perusahaan dengan luas area 143.035 Ha. Luas area HPH tersebut adalah 11,53% dari total luas HPH di Provinsi Kalimantan Timur, sementara luas HTI adalah 8,82%.

Tabel 2. 12 Jumlah Perusahaan dan Luas Area HPD dan HTI Tahun 2020

Kabupaten/Kota	ІИРННК-НА (НРН)	ІИРННК-НТ (НТІ)
----------------	-----------------	-----------------





	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
1. Paser	-	-	2	30 216
2. Kutai Barat	10	452 605	7	143 035
3. Kutai Kartanegara	4	232 810	9	494 681
4. Kutai Timur	12	883 115	15	409 806
5. Berau	16	885 765	6	279 752
6. Penajam Paser Utara	-	-	-	-
7. Mahakam Ulu	13	1 022 660	-	-
8. Balikpapan				
9. Samarinda	-	-	-	-
10. Bontang	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-
Lintas Kabupaten/Across Regency	5	447 615	5	263 322
Kalimantan Timur	60	3 924 570	44	1 620 813

2.1.2.6. Pertambangan

Berdasarkan yang tercatat pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2018 terdapat 5 perusahaan tambang batu bara terbesar di Kabupaten Kutai Barat yang memegang ijin "Perjanjian Karya Pengusahaan Batu bara (PKP2B)" PT. Gunung Bayan Pratama Coal, PT. Firman Ketaun Perkasa, PT. Teguh Sinar Abadi, PT. Trubaindo Coal Mining, PT. Bharinto Ekatama dan dua perusahaan tambang pemegang ijin IUPK-PMA yaitu; PT. Bina Insan Sukses Mandiri dan PT. Kedap Sayaaq dan terdapat juga 168 perusahaan batu bara yang memegang ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi di Kutai Barat, sedangkan dalam tahun 2018 terdapat 75 perusahaan pemegang ijin IUP-operasi produksi batu bara di Kutai Barat.

Sampai tahun 2018 terdapat 5 perusahaan tambang batu bara pemegang IUP daerah dan 6 perusahaan pemegang ijin pusat (PKP2B/IUPK) yang telah berproduksi dengan total volume produksi 13.288.742,09 MT produksi yang dihasilkan lebih besar dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 12.999.281,45 MT.





Tabel 2. 13 Perusahaan Tambang Batu bara dan Jumlah Produksi Tahun 2018

Tabel	Fabel 2. 13 Perusahaan Tambang Batu bara dan Jumlah Produksi Tahun 2018							
No.	Nama Perusahaan	Izin Usaha	Jumlah Produksi Batubara s/d Desember 2018 (MT)					
1	Gunung Bayan Pratama Coal	PKP2B/IUPK	311,079					
2	Trubaindo Coal Mining	PKP2B/IUPK	4.180.000					
3	Teguh Sinar Abadi	PKP2B/IUPK	976.421					
4	Firman Ketaun Perkasa	PKP2B/IUPK	1.469.802					
5	Bharinto Ekatama	PKP2B/IUPK	1.900.000					
6	Bina Insan Sukses Mandiri	IUPK-PMA	1.761.734					
7	PT. Harindi Wahana	IUP Daerah	144.384					
8	PT. Kedap Sayaaq	IUPK-PMA	240.230					
9	PT. Gunung Bara Utama	IUP Daerah	2.115.713					
10	PT. Bangun Olah Sarana Sukses	IUP Daerah	189.379,09					
	Jumlah	13.288.742,09						

Sumber: Bagian SDA Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018

Tabel 2. 14 Realisasi Penjualan Perusahaan Tambang Batu Bara Tahun 2018

No.	Nama Perusahaan	Izin Usaha	Jumlah Produksi Batu bara s/d Desember 2018 (MT)
1	Gunung Bayan Pratama Coal	PKP2B/IUPK	280.809
2	Trubaindo Coal Mining	PKP2B/IUPK	466.933
3	Teguh Sinar Abadi	PKP2B/IUPK	1.031.046
4	Firman Ketaun Perkasa	PKP2B/IUPK	1.578.474
5	Bharinto Ekatama	PKP2B/IUPK	2.952.705
6	Bina Insan Sukses Mandiri	IUPK-PMA	1.765.820
7	PT. Harindi Wahana	IUP Daerah	5.392.128
8	PT. Kedap Sayaaq	IUPK-PMA	281.496
9	PT. Gunung Bara Utama	IUP Daerah	1.865.457
10	PT. Bangun Olah Sarana Sukses	IUP Daerah	156.554
	Jumlah	15.771.422	





Tabel 2. 15 Perkembangan Produksi Emas, Perak, dan Batu Bara Tahun 2015-2018

No.	Jenis	Tahun 2015 (MT)	Tahun 2016 (MT)	Tahun 2017 (MT)	Tahun 2018 (MT)
1	Emas	-	-	-	-
2	Perak	-	-	-	-
3	Batu bara	12.075.063,10	11.648.158,20	12.999.281,45	13.288.742,09

2.1.2.7. Pariwisata

Di bidang pariwisata, Kutai Barat memiliki potensi baik wisata alam maupun wisata budaya. Pariwisata di Kutai barat yang terletak di Hulu sungai Mahakam mempunyai prospek yang baik dan masih dapat dikembangkan secara lebih optimal. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beragam, antara lain Air Terjun, Danau, Lamin, Riam serta Hutan Anggrek. Berdasarkan Kutai Barat Dalam Angka 2021, tercatat 19 objek wisata dimana didominasi oleh objek wisata alam baik dikelola oleh Dinas Pariwisata maupun swasta.

Ditinjau dari akomodasi penunjang pariwisata, pada tahun 2021 terdapat 66 usaha akomodasi hotel/penginapan di Kutai Barat dan 161 usaha restoran sebagai penunjang pariwisata di Kabupaten Kutai Barat. Dilihat perkembangan tamu (wisatawan) yang berkunjung ke Kutai Barat pada tahun 2021, masih didominasi tamu wisatawan domestik. Total kunjungan wisatawan pada tahun 2019 merupakan kunjungan terbanyak sepanjang tahun 2013-2021, yaitu sebanyak 66.008 orang, 65.652 orang diantaranya wisatawan domestik. Tahun 2021, kunjungan wisatawan mengalami penurunan menjadi 10.876 orang. Hal tersebut dikarenakan adanya penutupan obyek wisata dan pelarangan bagi WNA untuk memasuki wilayah Republik Indonesia dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

Tabel 2. 16 Junjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Tahun 2013-2021

Tahun	Wisatawan Mancanegara Wisatawan Domestik		Jumlah
2013	174	33 405	33 579
2014	182	26 475	26 657
2015	137	24 350	24 487
2016	243	21 776	22 019





Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2017	390	28 584	28 974
2018	279	32 205	32 484
2019	356	65 652	66 008
2020	28	25 929	25 957
2021	5	10.871	10.876

Sumber: Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

2.1.3. WILAYAH RAWAN BENCANA

Berdasarkan peta bahaya lingkungan yang dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL tahun 1999, sebagian besar wilayah di Kabupaten Kutai Barat potensial terjadi bahaya tanah longsor karena mempunyai jenis tanah dengan tekstur berlempung, curah hujan yang tinggi, dan kemiringan lereng yang besar. Keberadaan bahaya alami berupa gerakan tanah tersebut dapat mengancam keberadaan sarana-prasarana yang dibangun di Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, dilihat dari banyaknya desa/kampung yang terletak di DAS serta tingginya curah hujan, Kutai Barat juga tergolong rawan bencana alam banjir terlebih dengan kondisi hutan yang semakin buruk di mana banyak terjadi penebangan liar, maka kemungkinan terjadinya banjir tersebut semakin besar. Sebagai contoh, pada bulan April 2005, terjadi banjir besar yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Mahakam. Akibat banjir tersebut terdapat sekitar 3.500 rumah di Kabupaten Kutai Barat yang terendam air. Pada tahun 2020 terjadi 71 kejadian banjir dengan frekuensi terbesar di Kecamatan Tering sejumlah 11 kejadian dan Kecamatan Long Iram 10 kejadian. Selain banjir, bencana tanah longsor juga sempat terjadi pada tahun 2020 di empat kecamatan yaitu Bongan, Muara Pahu, Barong Tongkok, dan Melak.

2.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 sejumlah 163.142 jiwa dan naik pada tahun 2020 menjadi 165.938 jiwa. Dengan demikian secara keseluruhan selama terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.71%. Selama 2018-2019 Kecamatan Barong Tongkok menunjukkan pertumbuhan penduduk yang tertinggi yaitu 4.51% dan kecamatan Long Iram menunjukkan penurunan pertumbuhan paling tinggi yaitu -2.17%.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar tahun 2020 adalah Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebesar 30.746 jiwa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk





paling sedikit adalah Kecamatan Bentian Besar yaitu sebesar 3.213 jiwa. Namun secara umum jumlah penduduk di Kutai Barat relatif menyebar cukup merata di semua kecamatan, kecuali di Kecamatan Barong Tongkok, Linggang Bigung, dan Melak yang ketiganya menunjukkan jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding kecamatan lain. Bila dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya maka dapat diperoleh Kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kutai Barat adalah berkisar 8.14 jiwa/Km².

Dari sisi rasio jenis kelaminnya, di semua kecamatan menunjukan angka di atas 1. Dengan demikian, di semua kecamatan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2020 sebesar 1.09 yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 laki-laki. Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Jempang yaitu sebesar 1,16 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Melak sebesar 1,06.

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020

		20	18	201	19	20	20	Laju Pertı	ımbuhan
No	Kecamatan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	2018- 2019	2019- 2020
1	Bongan	9,771	1.15	9,771	1.15	10,449	1.11	3.43	3.89
2	Jempang	10,875	1.12	10,875	1.12	11,211	1.16	0,71	2.36
3	Penyinggahan	3,966	1.08	3,966	1.08	3,815	1.10	-2.02	-1.83
4	Muara Pahu	8,457	1.11	8,457	1.11	8,344	1.09	-0.11	-1.23
5	Muara Lawa	6,799	1.07	6,799	1.07	7,033	1.07	2.15	1.27
6	Damai	10,226	1.11	10,226	1.11	10,549	1.11	1.35	1.79
7	Barong Tongkok	29,935	1.08	29,935	1.08	31,746	1.07	1.47	4.51
8	Melak	14,491	1.08	14,491	1.08	15,041	1.06	0.10	3.69
9	Long Iram	7,436	1.14	7,436	1.14	7,184	1.11	-1.25	-2.17
14	Bentian Besar	3,250	1.15	3,250	1.15	3,213	1.11	-0.86	-0.28
15	Linggang Bigung	15,566	1.1	15,566	1.1	15,843	1.09	0.35	1.43
16	Siluq Ngurai	5,607	1.13	5,607	1.13	5,880	1.13	3.35	1.47
17	Nyuatan	6,291	1.14	6,291	1.14	6,357	1.10	1.32	-0.27
18	Sekolaq Darat	10,150	1.1	10,150	1.1	10,301	1.08	-0.76	2.26
19	Manor Bulatn	8,583	1.14	8,583	1.14	8,409	1.13	-0.96	-1.08



* - * *	

		2018		2019		2020		Laju Pertumbuhan	
No	Kecamatan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	2018- 2019	2019- 2020
20	Tering	10,796	1.13	10,796	1.13	10,513	1.10	-1.54	-1.10
	Jumlah	162,199	1.11	162,199	1.11	165,938	1.09	0.58	1.71

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2019 dan 2021

Tahun 2020 secara keseluruhan terjadi peningkatan kepadatan penduduk, yaitu menjadi 8.14 jiwa/Km². Kecamatan Sekolaq Darat pada tahun 2020 menunjukkan tingkat kepadatan tertinggi 208,95 jiwa/Km². Sementara Kecamatan Bentian Besar pada tahun 2020 masih menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu 1,73 jiwa/Km². Pembangunan sarana dan prasarana yang kurang seimbang menjadi salah satu penyebab perpindahan penduduk antar kecamatan sehingga menyebabkan perubahan dalam tingkat kepadatan.

Tabel 2. 18 Tingkat Kepadatan Penduduk 2020

Kecamatan	2019	2020
01. Bongan	4.38	4.55
02. Jempang	14,71	15.06
03. Penyinggahan	20.23	19.86
04. Muara Pahu	7.61	7.51
05. Muara Lawa	15.90	16.10
06. Damai	5.11	5.20
07. Barong Tongkok	74.84	78.21
08. Melak	80.95	83.93
09. Long Iram	2.94	2.87
10. Bentian Besar	1.74	1.73
11. Linggang Bigung	6.79	6.89
12. Siluq Ngurai	3.56	3.61
13. Nyuatan	4.75	4.73
14. Sekolaq Darat	204.32	208.95
15. Manor Bulatn	2.87	2.84
16. Tering	31.10	31.76





Kecamatan	2019	2020			
Kutai Barat	8.00	8.14			

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kutai Barat 2021

Berdasarkan kelompok usia, penduduk usia muda berumur 0-14 tahun memiliki proporsi yaitu 26,78%, sedangkan kelompok usia produktif berumur 15-64 tahun memiliki proporsi 69,24%, dan kelompok usia tua berumur 65 tahun ke atas memiliki proporsi 3.98%. Hal tersebut merupakan kondisi yang cukup menguntungkan untuk Kabupaten Kutai Barat karena memiliki penduduk dengan usia produktif yang cukup tinggi. Dari informasi kelompok usia ini akan diperoleh informasi angka ketergantungan. Angka ketergantungan ini sangat penting dalam studi ekonomi, karena angka ketergantungan ini menunjukkan jumlah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Angka ketergantungan Kutai Barat tahun 2020 tercatat 44,417 persen berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebig 44,4 orang penduduk tidak produktif.

Penduduk usia kerja masih terbagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2020 mencapai 72.552 orang atau 67,28% dari jumlah seluruh penduduk. Dengan demikian penyediaan lapangan kerja masih harus diantisipasi oleh Kutai Barat.

Tabel 2. 19 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penduduk tidak	Jumlah penduduk	Persei	ntase (%)	Angka Beban
produktif (jiwa)		produktif (jiwa)	Penduduk produktif	Penduduk tidak produktif	Ketergantungan
2016	48.519	97.788	66,84	33,16	49,62
2017	48.745	98.253	66,84	33,16	49,61
2018	48.943	98.655	66,84	33,16	49,61
2019	49.080	98,940	66.84	33.16	49.61
2020	51.035	114.903	69,24	30,75	44,42

Sumber Data: BPS Kutai Barat





2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kutai Barat pada tahun 2019 mencapai 5,67% dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi turuncukup tajam menjadi -2,92% akibat kondisi pandemic Covid yang melumpuhkan perekonomian. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 sebesar 4,18 % dari target 4,5 – 5,5 % . Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi minus 2,92 %. Laju pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target disebabkan: Pandemi covid – 19 yang berdampak pada semua sektor; Tingkat konsumsi masyarakat menurun atau daya beli masyarakat menurun; Nilai investasi menurun. Tindak lanjut untuk tahun berikutnya agar laju pertumbuhan naik adalah Menyusun program/kegiatan/sub kegiatan yang menstimulus pertumbuhan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM; Program perlindungan sosial baik dalam bentuk subsidi maupun uang tunai atau bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan nilai investasi.

Sektor atau lapangan usaha yang pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan positif adalah sektor pengadan listrik dan gas (13,06%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (2,39%), sektor perdagangan (1,03%), sektor informasi dan komunikasi (8,61%), sektor jasa keuangan (1,76%), sektor jasa Pendidikan (5,25%), serta sektor jasa Kesehatan dan kegiatan social yang menunjukkan pertumbuhan sangat tinggi yaitu 19,2%. Di tahun 2019, tidak ada satupun sektor yang mengalami pertumbuhan negative, sehingga situasi dan kondisi pandemic Covid yang terjadi di tahun 2019-2020 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Kutai Barat. Meskipun sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang positif, namun kontribusinya terhadap PDRB tergolong kecil, sehingga tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kutai Barat.

Bila dilihat rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun selama 2010-2020, perekonomian Kutai Barat mampu menghasilkan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4,89%. Sektor konstruksi merupakan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun





yang terkecil, yaitu 3,55% per tahun sedangkan sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor yang memilki rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu 13,74% per tahun.

Perbandingan antara PDRB ADHB dengan PDRB ADHK terlihat cukup besar. Hal ini mengindikasi adanya factor inflasi atau kenaikan harga sektoral, semakin jauh perbedaan keduanya mengindikasikan semkin besar pula factor kenaikan harga sektoral.

Tabel 2. 20 Rata-rata Pertumbuhan 2010-2020 dan Pertumbuhan PDRB 2020 *Atas Dasar Harga Konstan 2010*

Lapangan Usaha	Pertumbuhan 2020 (%)	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2020 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,99	4,43
Pertambangan dan Penggalian	-3,67	4,22
Industri Pengolahan	-3,96	5,73
Pengadaan Listrik dan Gas	13,06	13,68
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	2,39	4,74
Konstruksi	-5,24	3,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,03	9,24
Transportasi dan Pergudangan	-5,37	3,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,15	5,93
Informasi dan Komunikasi	8,61	8,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	4,41
Real Estat	-1,56	4,27
Jasa Perusahaan	-3,78	3,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,31	8,48
Jasa Pendidikan	5,25	12,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,20	13,74
Jasa lainnya	-1,92	5,71





Lapangan Usaha	Pertumbuhan 2020 (%)	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2020 (%)
Produk Domestik Regional Bruto	-2,92	4,89

Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	Pertumbuhan 2020 (%)	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2020 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,15	8,99
Pertambangan dan Penggalian	-14,79	5,27
Industri Pengolahan	7,96	10,72
Pengadaan Listrik dan Gas	13,18	16,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,67	6,51
Konstruksi	-4,79	9,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,10	13,63
Transportasi dan Pergudangan	-3,14	7,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,88	10,79
Informasi dan Komunikasi	8,93	10,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	8,51
Real Estat	-0,89	6,90
Jasa Perusahaan	-1,92	8,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,05	15,05
Jasa Pendidikan	7,95	18,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,53	20,57
Jasa lainnya	-0,26	12,02
Produk Domestik Regional Bruto	-6,58	7,86

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Barat 2010-2020, diolah

Perekonomian Kutai Barat sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor konstruksi. Hal tersebut nampak dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB. Sektor pertambangan dan penggalian misalnya, bila dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik selama 5 tahun terakhir yaitu 2016-2020 rata-rata memiliki kontribusi sebesar 48,82% untuk harga berlaku dan 54,72% untuk harga konstan. Dengan demikian peran sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian





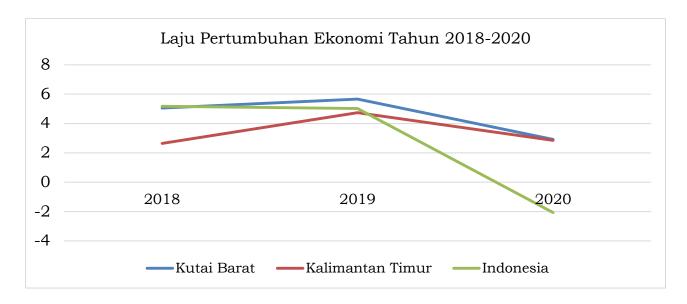
Kutai Barat sangat dominan. Demikian pula dengan peran sektor pertanian yang juga cukup besar, yang apaila dihitung dengan harga berlaku rata-rata sebesar 14,20% selama 2016-2020 dan sektor konstruksi yang besarnya rata-rata 11,66%. Kontribusi sektor konstruksi yang cukup tinggi ini menunjukkan besarnya pembangunan prasarana fisik yang terjadi di Kutai Barat, baik berupa jalan, jembatan, gedung, maupun lainnya. Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang memiliki kontribusi kecil terhadap PDRB Kutai Barat yaitu rata-rata hanya 0,02% selama 2016-2020, namun sektor ini memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi di tahun 2020 yaitu 13,06%. Beberapa sektor yang memiliki rata-rata kontribusi tinggi selama 2010-2020 dan sekaligus memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi. Kondisi ini menggambarkan cukup dinamisnya aktivitas perdagangan, industri, dan pembangunan fisik di Kutai Barat. Pengembangan sektor-sektor tersebut dapat memberikan efek multiplier yang cukup besar seperti penyerapan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, pengembangan akomodasi dan penginapan, dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam rangka mengurangi ketergantungan Kutai Barat terhadap sektor pertambangan dan penggalian.

Jika dibandingkan dengan perekonomian nasional dan provinsi, Kabupaten Kutai Barat memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada nasional dan provinsi selama kurun waktu 3 tahun (2018-2020). Pada tahun 2020, terjadi penurunan laju pertumbuhan yang cukup signifikan pada ketiga wilayah. Berikut merupakan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional. Laju Pertumbuhan ekonomi Kutai Barat Tahun 2021 sebesar 4,18 % dan PDRB Per kapita Tahun 2021 sebesar 184,46 Juta

Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia (2018-2020)







Jika dibandingkan dengan daerah lainnya atau sekitarnya, PDRB perkapita Kabupaten Kutai Barat menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Kutai Barat bersifat fluktuatif, namun di tahun 2020 menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 21 Perbandingan PDRB ADHK dan LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	PDRB Per	rkapita (ADHK) (Rp juta)	LPE (P	DRB ADHK	(%)
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Paser	122,732	124,967	119,135	3,69	3,97	2,77
Kutai Barat	136,24	143,553	139,118	5,06	5,67	2,92
Kutai Kartanegara	157,94	160,484	150,15	2,16	3,83	4,44
Kutai Timur	244,926	254,341	236,797	2,38	7,99	3,21
Berau	118,182	121,706	114,696	2,07	5,61	3,35
Penajam Paser Utara	41,348	42,026	40,636	1,28	2,61	2,34
Mahakam Ulu	63,586	67,004	66,554	5,4	5,49	0,26
Balikpapan	123,592	127,719	125,109	4,97	4,85	0,69
Samarinda	50,488	52,116	50,744	4,96	4,99	1,07
Bontang	237,168	227,452	216,958	4,08	2,16	2,76





Kalimantan Timur	127,354	130,787	124,662	2,64	4,74	2,85]
------------------	---------	---------	---------	------	------	------	---

Sumber: PDRB Kab/Kota di Prov. Kaltim (BPS Kaltim), 2021

Tabel 2. 22 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha (ADHB)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
Pertanian	3.341.473	15,20	3.757.554	14,65	3.837.023	13,53	3.895.089	13,35	4.056.840	14,88
Pertambangan dan Penggalian	10.324.199	46,95	12.882.822	50,22	14.702.467	51,85	14.554.173	49,88	12.402.259	45,50
Industri Pengolahan	1.304.703	5,93	1.606.468	6,26	1.612.477	5,69	1.651.474	5,66	1.782.974	6,54
Pengadaan Listrik, Gas	4.020	0,02	5.378	0,02	6.406	0,02	6.999	0,02	7.922	0,03
Pengadaan Air	7.184	0,03	7.942	0,03	8.161	0,03	8.622	0,03	8.852	0,03
Konstruksi	2.683.618	12,20	2.839.023	11,07	3.142.072	11,08	3.467.979	11,88	3.301.730	12,11
Perdagangan, Hotel, Restoran	1.633.657	7,43	1.754.648	6,84	1.951.494	6,88	2.188.234	7,50	2.234.135	8,20
Transportasi dan Pergudangan	338.160	1,54	376.808	1,47	422.981	1,49	472.302	1,62	457.493	1,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.735	0,32	79.107	0,31	88.385	0,31	99.274	0,34	93.432	0,34
Informasi dan Komunikasi	221.910	1,01	249.911	0,97	276.600	0,98	305.970	1,05	333.298	1,22
Jasa Keuangan	28.325	0,13	30.748	0,12	33.571	0,12	36.763	0,13	37.782	0,14
Real Estat	127.896	0,58	136.568	0,53	146.450	0,52	157.640	0,54	156.236	0,57
Jasa Perusahaan	14.160	0,06	15.512	0,06	16.912	0,06	18.388	0,06	18.036	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.283.237	5,84	1.237.966	4,83	1.349.464	4,76	1.469.683	5,04	1.424.895	5,23
Jasa Pendidikan	361.508	1,64	394.678	1,54	441.482	1,56	484.693	1,66	523.244	1,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.849	0,81	199.249	0,78	225.667	0,80	256.764	0,88	314.614	1,15
Jasa lainnya	66.759	0,30	78.220	0,30	91.559	0,32	106.552	0,37	106.270	0,39
Produk Domestik Regional Bruto	21.989.397	100,00	25.652.601	100,00	28.353.171	100,00	29.180.597	100,00	27.260.013	100,00

Atas Dasar Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha (ADHK)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
Pertanian	2.345.054	12,67	2.455.813	12,83	2.582.795	12,84	2.699.603	12,70	2.645.840	12,83
Pertambangan dan Penggalian	10.131.367	54,75	10.501.069	54,87	11.020.067	54,80	11.646.856	54,81	11.219.513	54,39
Industri Pengolahan	990.820	5,35	1.053.111	5,50	1.109.821	5,52	1.170.683	5,51	1.124.350	5,45
Pengadaan Listrik, Gas	4.079	0,02	4.503	0,02	5.139	0,03	5.563	0,03	6.289	0,03
Pengadaan Air	6.343	0,03	6.769	0,04	6.937	0,03	7.310	0,03	7.485	0,04
Konstruksi	1.874.598	10,13	1.898.652	9,92	1.946.563	9,68	2.051.425	9,65	1.943.892	9,42
Perdagangan, Hotel, Restoran	1.257.173	6,79	1.313.842	6,87	1.396.669	6,95	1.490.565	7,01	1.505.876	7,30





Lapangan Usaha (ADHK)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
Transportasi dan Pergudangan	267.425	1,45	286.332	.332 1,50 310.619 1,54 334.371		334.371	1,57	316.432	1,53	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.312	0,27	53.989	0,28	58.380	0,29	63.577	0,30	59.666	0,29
Informasi dan Komunikasi	210.724	1,14	228.565	1,19	247.687	1,23	268.823	1,27	291.982	1,42
Jasa Keuangan	21.354	0,12	22.492	0,12	23.711	0,12	25.276	0,12	25.720	0,12
Real Estat	109.922	0,59	113.625	0,59	118.518	0,59	123.713	0,58	121.783	0,59
Jasa Perusahaan	10.422	0,06	10.658	0,06	11.064	0,06	11.514	0,05	11.079	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	813.501	4,40	748.234	3,91	793.304	3,95	835.778	3,93	791.405	3,84
Jasa Pendidikan	247.856	1,34	261.529	1,37	285.451	1,42	305.644	1,44	321.701	1,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.866	0,64	126.893	0,66	136.261	0,68	147.340	0,69	175.629	0,85
Jasa lainnya	47.068	0,25	50.787	0,27	55.776	0,28	60.713	0,29	59.544	0,29
Produk Domestik Regional Bruto	18.505.884	100,00	19.136.862	100,00	20.108.762	100,00	21.248.754	100,00	20.628.184	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Barat 2010-2020, diolah.

Kontribusi sektor pertanian bila dilihat dari tahun ke tahun berdasarkan harga berlaku menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB mencapai 15,20%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 14,88%. Bila dihitung menggunakan harga konstan menunjukkan kenaikan dari 12,67% tahun 2016, menjadi 12,83% pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan adanya kenaikan output atau nilai tambah sektor pertanian selama periode 2016-2020 sehingga meski secara riil pertumbuhan output naik namun secara nominal terjadi sedikit penurunan akibat harga sektor pertanian yang mengalami penurunan. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal: (1) lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan semakin sedikit akibat pembangunan daerah, sehingga aktivitas di sektor pertanian semakin terbatas, namun terjadi peningkatan produktivitas di sektor pertanian selama 2016-2020, (2) harga-harga sektor pertanian cukup tertekan, sehingga meski secara riil ouput mengalami kenaikan namun secara nominal kenaikannya tidak sebesar output.

Sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor utama menunjukkan kontribusi kontribusi yang fluktuatif selama 2016-2020. Selama 2016-2018 kontribusi sektor ini menunjukkan kenaikan namun pada periode 2018-2020 terjadi tren penurunan yang cukup besar khususnya di tahun 2020. Pertambangan batubara, emas, dan perak merupakan jenis pertambangan yang utama. Meski demikian, mengingat pertambangan tersebut tidak dapat





diperbarui dan masih tingginya ketergantungan pada sektor tersebut, penting bagi Kutai Barat untuk mengembangkan sektor lain, seperti sektor industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya.

Bila menggunakan pendekatan 3 sektor utama yaitu primer, sekunder, dan tersier, akan terlihat bahwa di Kutai Barat mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran struktur ekonomi. Hal ini setidak-tidaknya terlihat dari 2 aspek, yaitu: (1) rata-rata pertumbuhan nilai output dan (2) rata-rata kontribusi sektoral. Dari sisi pertumbuhan nilai output, sektor primer selama 2010-2020 menunjukkan rata-rata pertumbuhan per tahun yang tertinggi, yaitu 4,26% berdasarkan harga konstan dan 6,06% atas dasar harga berlaku. Sementara itu sektor menunjukkan rata-rata pertumbuhan per tahun yang terbesar yaitu 9,02% berdasarkan harga konstan dan 15,05% berdasarkan harga berlaku. Dari aspek pertumbuhan kontribusi atau proporsi terhadap PDRB, berdasarkan harga berlaku sektor primer menunjukkan rata-rata pertumbuhan kontribusi yang negative, yaitu -1,67% sedangkan sektor sekunder sebesar 2,47% dan sektor tersier sebesar 6,67% per tahun. Hal ini menunjukkan gejala terjadinya transformasi struktural di Kutai Barat meski belum signifikan karena kecilnya proporsi sektor tersier. Sektor primer meskipun menunjukkan tren yang negatif, bagaimanapun masih menjadi sektor yang dominan terutama sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2. 23 PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier 2010-2020

Harga Berlaku	2010	(%)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
Primer	9.138.424	71,4%	13.665.673	62,15	16.640.376	64,87	18.539.490	65,39	18.449.262	63,22	16.459.099	60,38
Sekunder	3.021.611	23,6%	6.263.989	28,49	6.919.285	26,97	7.508.577	26,48	8.200.853	28,10	8.219.836	30,15
Tersier	635.470	5,0%	2.059.736	9,37	2.092.940	8,16	2.305.104	8,13	2.530.482	8,67	2.581.077	9,47
PDRB	12.795.505	100%	21.989.397	100,00	25.652.601	100,00	28.353.171	100,00	29.180.597	100,00	27.260.013	100,00

Harga Konstan	2010	(%)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)	
---------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	--





Primer	9.138.424	71,42	12.476.422	67,42	12.956.882	67,71	13.602.862	67,65	14.346.459	67,52	13.865.353	67,22
Sekunder	3.021.611	23,61	4.661.474	25,19	4.845.763	25,32	5.081.815	25,27	5.392.317	25,38	5.255.970	25,48
Tersier	635.470	4,97	1.367.988	7,39	1.334.217	6,97	1.424.084	7,08	1.509.978	7,11	1.506.861	7,30
PDRB	12.795.505	100,00	18.505.884	100,00	19.136.862	100,00	20.108.762	100,00	21.248.754	100,00	20.628.184	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Barat 2010-2020, diolah.

2.2.1.2. Inflasi

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan karena fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum.

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Laju inflasi di Kabupaten Kutai Barat bila dihitung dengan menggunakan pendekatan dengan angka inflasi Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa angka tersebut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, namun memiliki tren yang menurun selama 2014-2020. Inflasi paling tinggi berada pada tahun 2014 (7,66%) dan tahun 2020 hanya tercatat 0,78%. Rendahnya inflasi di tahun 2020 merupakan dampak Pandemi Covid yang menyebabkan turunya daya beli masyarakat, atau masyarakat menahan diri untuk konsumsi sebagai akibat ketidakpastian perekonomian.

Gambar 2. 3 Laju Inflasi Kabupaten Kutai Barat dengan Pendekatan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2020



Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur 2020, BPS Provinsi Kalimantan Timur





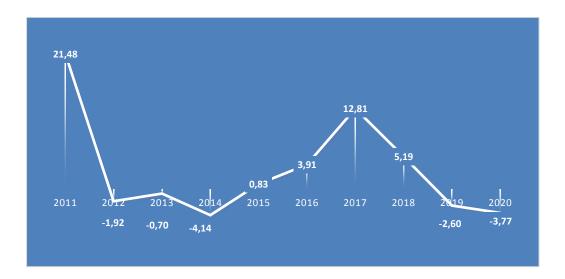
Inflasi di Kutai Barat dapat dihitung dengan menggunakan informasi indeks harga, sedangkan informasi indeks harga dihitung dengan menggunakan pendekatan *PDRB deflator*. PDRB deflator mengukur inflasi berdasarkan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri termasuk barang modal dan barang public, sedangkan indeks harga konsumen mengukur inflasi atas barang yang ada di tangan konsumen. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perbedaan laju inflasi, namun dalam hal data indeks harga konsumen tidak tersedia maka *PDRB deflator* dipergunakan sebagai *proxy*.

Berdasarkan informasi indeks harga yang dihitung dengan *PDRB deflator*, laju inflasi di Kutai Barat pada tahun 2020 adalah -3,77% atau terjadi deflasi di tahun 2020 tersebut sedangkan tahun 2019 terjadi deflasi sebesar -2,66%. Selama 2012-2014 Kutai Barat mengalami deflasi dan mulai tahun 2015 kembali terjadi inflasi akibat kenaikan harga pada sektor pengadan listrik dan gas. Sementara itu inflasi di tahun 2017 yang besarnya 12,81% lebih banyak disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor pengadaan listrik dan gas. Kenaikan indeks harga di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki dampak yang besar terhadap inflasi mengingat pangsa kedua sektor tersebut dalam PDRB sangat dominan.

Gambar 2. 4 Laju Inflasi Kabupaten Kutai Barat dengan Pendekatan PDRB Deflator, 2011-2020







Tabel 2. 24 Perkembangan Laju Inflasi Lapangan Usaha Dengan Deflator PDB Tahun 2011-2020

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian	10,83	3,05	1,89	16,62	-0,65	5,69	7,38	-2,91	-2,88	6,27
Pertambangan dan Penggalian	30,44	-6,46	-2,55	-13,20	-2,67	1,44	20,39	8,75	-6,34	- 11,54
Industri Pengolahan	11,03	2,64	1,73	7,24	-0,52	6,46	15,85	-4,75	-2,91	12,41
Pengadaan Listrik, Gas	-9,59	-7,09	-6,82	-4,18	25,26	4,94	21,17	4,37	0,93	0,11
Pengadaan Air	-2,17	2,04	3,86	1,52	2,94	4,52	3,60	0,28	0,25	0,27
Konstruksi	4,81	9,89	2,51	8,82	5,97	5,15	4,45	7,95	4,73	0,47
Perdagangan, Hotel, Restoran	7,13	2,42	1,93	3,08	5,86	6,49	2,77	4,62	5,07	1,06
Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,87	7,35	5,71	3,52	2,39	4,07	3,48	3,73	2,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	5,60	5,69	5,27	6,86	4,49	4,22	3,33	3,14	0,29
Informasi dan Komunikasi	0,48	0,62	0,58	0,82	0,87	1,82	3,83	2,13	1,92	0,29
Jasa Keuangan	5,70	7,53	7,28	2,77	2,89	2,88	3,06	3,57	2,73	1,00
Real Estat	3,13	1,08	2,80	1,84	4,13	2,38	3,30	2,81	3,12	0,68
Jasa Perusahaan	5,12	7,65	5,35	1,28	3,93	8,28	7,12	5,03	4,48	1,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,99	18,99	6,19	6,32	7,21	4,32	4,89	2,81	3,37	2,39
Jasa Pendidikan	20,17	0,99	4,06	4,07	6,63	4,07	3,47	2,48	2,53	2,57
Jasa Kesehatan	20,17	2,68	3,80	3,64	8,74	4,53	4,06	5,47	5,22	2,79



L,

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dan Kegiatan										
Sosial										
Jasa lainnya	3,11	4,00	3,37	7,84	9,21	8,65	8,59	6,58	6,91	1,69
Produk Domestik Regional Bruto	21,48	-1,92	-0,70	-4,14	0,83	3,91	12,81	5,19	-2,60	-3,77

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Barat 2010-2020, diolah

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB dan inflasi di atas dapat menggambarkan kondisi perekonomian Kutai Barat secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara umum berdasarkan PDRN atau pendapatan per kapita, yaitu PDRB atau pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun barangkali ukuran ini memiliki kelemahan, namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Capaian Pendapatan Per Kapita atau PDRB Kutai Barat Tahun 2021 sebesar 184,46 Juta dari target 186 Juta. indikator tidak mencapai target tetapi angka ini mengalami kenaikan dari target tahun 2020; capaian Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kutai Barat tidak mencapai target hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : Pandemi Covid – 19 dan Turunnya pendapatan rumah tangga. Faktor pendorong naiknya Pendapatan Per Kapita Kutai Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Konsumsi rumah tangga yang naik atau meningkat; Konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi didorong oleh akselerasi realisasi stimulus fiskal; Meningkatnya beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.

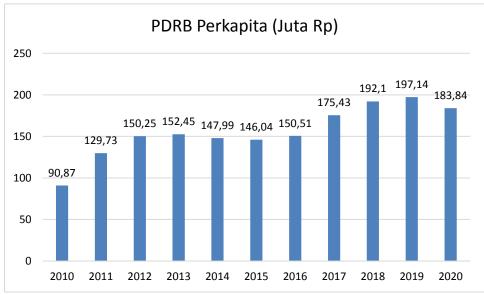
Berdasarkan perhitungan harga berlaku, pada tahun 2010 PDRB per kapita mencapai 90,87 juta. Jumlah PDRB per kapita mengalami peningkatan selama 2010-2013 dan pada tahun 2014 terjadi sedikit penurunan menjadi 147,99 juta. Pada tahun 2015 penurunan kembali terjadi, namun di tahun 2016-2018 terjadi peningkatan PDRB perkapita.

Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kutai Barat adalah sebesar 197,14 juta namun di tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita menjadi sebesar 183,84 atau turun sebesar -6,74%. PDRB Perkapita Tahun 2021 sebesar 184,46 Juta

Gambar 2. 5 Grafik PDRB Perkapita ADHB Tahun 2010 - 2020 (Juta Rp)







Sumber: BPS Provinsi Kalimantan

Timur

PDRB perkapita selama 2010-2020 cenderung fluktuatif, namun mulai tahun 2015 terlihat menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi yang demikian disebabkan antara lain oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengecil yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Pemekaran Mahakam Ulu menjadi kabupaten tersendiri tahun 2013 membawa dampak pada PDRB perkapita Kutai Barat.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, PDRB Perkapita Kutai Barat tergolong tinggi. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 meski termasuk cukup tinggi namun masih lebih tinggi penurunan di provinsi Kalimantan Timur yang mencapai -8,64%. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan PDRB Perkapita.

Tabel 2. 25 Perbandingan PDRB Perkapita di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rp)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Kenaikan 2019- 2020 (%)
Paser	139,01	160,30	171,64	167,96	148,63	-11,51
Kutai Barat	150,51	175,43	192,10	197,14	183,84	-6,75
Kutai Kartanegara	173,97	198,41	210,47	206,10	185,65	-9,92
Kutai Timur	285,34	346,12	353,74	355,99	296,16	-16,81
Berau	143,44	161,63	166,27	168,34	148,90	-11,55
Penajam Paser Utara	49,24	53,77	55,70	56,81	55,70	-1,95
Mahakam Ulu	82,11	88,87	95,32	103,04	104,60	1,51
Balikpapan	128,12	137,92	151,30	159,91	155,98	-2,46



Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Kenaikan 2019- 2020 (%)
Samarinda	63,56	69,29	74,08	77,57	75,04	-3,26
Bontang	331,04	345,15	337,45	328,24	312,15	-4,90
Kalimantan Timur	145,34	165,55	174,16	175,25	160,11	-8,64

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1.4. Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan

Dari sisi distribusi pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini menunjukkan bahwa kinerja distribusi pendapatan di Kutai Barat semakin menurun dalam arti tingkat ketimpangan cenderung semakin besar. Selama 2011-2020 terlihat tren Indeks Gini semakin tinggi. Meski demikian, angka tersebut masih dalam kelompok ketimpangan yang rendah karena di bawah 0,4. Pada tahun 2011, Indeks Gini Kutai Barat menunjukkan angka 0,2435, tahun 2012 meningkat cukup tajam menjadi 0,2967. Tahun 2018-2020 terlihat tren yang meningkat meskipun relative kecil. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, Indeks Gini Kutai Barat pada periode 2011-2014 relatif jauh lebih baik, namun selama periode 2018-2020 terlihat nilai Indeks Gini Kutai Barat tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Dengan demikian, dibalik keberhasilan pembangunan yang dilakukan, terdapat dampak berupa ketimpangan distribusi pendapatan dan tentu saja hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Capaian Indeks Gini Tahun 2021 sebesar 0,317 dari target 0,377–0,379 Indikator ini mengalami penurunan dari target yang direncanakan. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan rendah, tingkat ketimpangan rendah berarti semakin mendekati rata atau merata. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : Bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah lebih cepat dibanding penduduk kelompok lainnya. Penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami kenaikan terkecil; Di perdesaan tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah lebih cepat dibandingkan penduduk kelompok lainnya; Program pembangunan yang semakin merata terutama infrastruktur dasar sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat; Tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat.

Gambar 2. 6 Indeks Gini Kabupaten Kutai Barat, 2011-2020







Sumber: Indikator Penting Kalimantan Timur 2015 dan BPS Kalimantan Timur

Tabel 2. 26 Perbandingan Nilai Indeks Gini Antar Daerah, 2011-2020

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2018	2019	2020	
Paser	0,3119	0,3588	0,2755	0,3070	0,299	0,262	0,290	
Kutai Barat	0,2435	0,2967	0,2858	0,2855	0,311	0,334	0,338	0,317
Kutai Kartanegara	0,2992	0,2984	0,3072	0,3117	0,302	0,278	0,294	
Kutai Timur	0,2913	0,3099	0,3107	0,3047	0,326	0,346	0,325	
Berau	0,3190	0,3076	0,3305	0,3204	0,303	0,345	0,300	
Penajam Paser Utara	0,3046	0,3241	0,3264	0,3255	0,313	0,322	0,292	
Mahakam Ulu					0,334	0,302	0,259	
Balikpapan	0,3292	0,3608	0,3061	0,3370	0,356	0,302	0,311	
Samarinda	0,3066	0,3332	0,3115	0,3076	0,317	0,341	0,324	
Bontang	0,3694	0,3913	0,3564	0,3533	0,376	0,338	0,405	
Malinau	0,3303	0,3529	0,3257	0,3107				
Bulungan	0,3409	0,4032	0,2965	0,3025				
Nunukan	0,3356	0,3496	0,2478	0,3100				
Tana Tidung	0,3137	0,2955	0,2419	0,2722				
Tarakan	0,2679	0,3080	0,3349	0,3240				

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Kondisi nilai Indeks Gini di atas menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutai Barat membawa dampak pada peningkatan ketidakmerataan meski relatif kecil. Pengembangan sektor ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan merupakan salah





satu cara untuk mengurangi tingkat kesenjangan di Kutai Barat. Demikian pula dengan perluasan akses masyarakat dalam beraktivitas ekonomi serta akses ke pendanaan, akan terus diupayakan dalam rangka memperkecil tingkat ketimpangan yang ada.

2.2.1.5. Kemiskinan

Tujuan akhir dari pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dari berbagai aspek. Namun, seringkali pembangunan daerah termasuk di Kutai Barat mengalami berbagai tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Permasalahan yang seringkali muncul dalam pembangunan di berbagai daerah adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu muncul di setiap daerah termasuk negara dan setiap daerah akan selalu berusahan untuk mengatasi masalah tersebut. Kutai Barat pun menghadapi permasalahan yang sama dalam hal kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Kutai Barat menunjukkan tren kenaikan selama periode 2014-2020. Di tahun 2020 tingkat kemiskinan akibat kondisi Pandemi Covid adalah sebesar 9,29% sedangkan tahun 2019 adalah 9,09%. Angka ini tergolong besar bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Kenaikan tingkat kemiskinan yang terjadi selama 2019-2020 juga dialami oleh semua daerah di Kalimantan Timur.

Garis kemiskinan selama 2017-2020 juga menunjukkan kenaikan yang cukup besar, dan hal ini menandakan bahwa standar kemiskinan di Kutai Barat semakin tinggi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2017 masing-masing 0,906 dan 0,159 dan di tahun 2020, nilai indeks P1 dan P2 menunjukkan kenaikan 2020 masing-masing sebesar 1,230 dan 0,280. Semakin besarnya nilai indeks P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, sedangkan semakin besarnya indeks P2 menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita penduduk miskin yang satu dengan yang lain semakin timpang. Kenaikan Indeks P1 dan P2 ini perlu diwaspadai karena dalam jangka Panjang dapat menimbulkan permasalahan social lainnya. Meskipun nilai Indeks P1 dan P2 Kutai Barat bukan yang terbesar bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, namun angka-angka tersebut termasuk cukup besar.

Capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 sebesar 10,24 dari target 9,2 – 9,7 Capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Barat tidak mencapai target hal





Provinsi

ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : Pandemi Covid – 19; Turunnya pendapatan rumah tangga; Menurunnya produksi di semua kegiatan ekonomi; Pemberlakuan berbagai kebijakan selama pandemi yang membatasi pergerakan masyarakat/PPKM; Keterisolasian secara topografi sehingga akses infrastruktur yang kurang menunjang.

Tindak lanjut untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah Meningkatkan efektivitas bantuan sosial; Memperluas cakupan program-program perlindungan sosial yang telah ada, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang belum tercakup bantuan sosial mana pun; Memastikan tersalurkannya program bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat sasaran karena penyaluran bantuan menjadi kunci efektivitas program dalam menanggulangi penurunan kesejahteraan rumah tangga; Program percepatan vaksinasi; Pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas dan membuka keterisolasian daerah; Program pengembangan sektor unggulan pertanian dominasi masyarakat dari sektor pertanian dalam arti luas tetapi tidak memiliki produk unggulan dan penurunan produktivitas di sektor pertanian. Tingkat Kemisikinan Kutai Barat 2021 sebesar 10,24 %

Gambar 2. 7 Tingkat Kemiskinan Kutai Barat 2009-2020 (%)

Tabel 2. 27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan, Garis Kemiskinan, dan Indeks Kemiskinan Antar Daerah 2017-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan	Garis Kemiskinan	Indeks P1	Indoks D2
Kabupaten/ Kota	(%)	(Rp/kapita/bulan)	mueks F 1	mueks F2





	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2017	2020	2017	2020
Paser	9,28	9,03	8,95	9,23		433 823	455 635	477 440	515 414	1,321	1,040	0,268	0,210
Kutai Barat	8,72	9,15	9,09	9,29	10,24	485 551	517 621	542 393	583 532	0,906	1,230	0,159	0,280
Kutai Kartanegara	7,57	7,41	7,20	7,31		450 581	485 435	503 968	548 423	1,504	0,910	0,439	0,160
Kutai Timur	9,29	9,22	9,48	9,55		512 345	543 442	569 449	610858	1,263	2,020	0,254	0,630
Berau	5,41	5,04	5,04	5,19		496 385	502 564	526 615	568 500	0,489	0,700	0,070	0,170
PPU	7,63	7,40	7,18	7,36		426 111	447 539	466 918	499807	1,110	0,870	0,236	0,170
Mahakam Ulu	11,29	11,62	11,25	11,44		534 502	566 944	588 756	631 517	0,993	1,460	0,185	0,290
Balikpapan	2,82	2,64	2,42	2,57		530 710	545 971	572 108	613 622	0,235	0,380	0,028	0,120
Samarinda	4,77	4,59	4,59	4,76		594 645	616 365	658 307	719 710	0,681	0,720	0,127	0,210
Bontang	5,16	4,67	4,22	4,38		542 985	549 830	582 188	636 491	0,923	0,540	0,245	0,090

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi isu penting bagi pemerintah daerah mengingat kemiskinan bisa berdampak pada aspek social lainnya. Penurunan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat di beberapa sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran misalnya, menunjukkan dinamika yang cukup baik seiring dengan perkembangan perdagangan besar dan eceran. Pengurangan tingkat kemiskinan akan terus diupayakan melalui kegiatan ekonomi masyarakat seperti UBK, ADK, dan sebagainya uyang diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh pengangguran, sehingga dampak pengangguran dan kemiskinan dapat menimbulkan efek kriminalitas.

Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kutai Barat menunjukan kenaikan, dari 13.450 menjadi 13.780 orang atau naik sebesar 2,45% sementara berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Barat pertumbuhan penduduk selama 2019-2020 adalah 1,71% Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan yang terjadi di Kutai Barat.





2.2.1.6. Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas

Dalam upaya menjaga Kondusifitas Wilayah melalui kewaspadaan dini dan penanganan konflik, Badan Kesbangpol selalu berupaya meningkatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi penurunan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan. di tahun 2019 jumlah demo/ Unjuk Rasa terjadi 1 kali aksi, pada tahun 2020 dan 2021 menurun tanpa adanya demo/ unjuk rasa.

Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menekan Angka Kriminalitas melalui Program Pemahaman Aparatur dan Masyarakat mengenai Wawasan Kebangsaan dengan melakukan, Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyakit Masyarakat Serta Kewaspadaan Dini, Pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 118 kasus, Pada tahun 2020 menurun sedikit menjadi 106 kasus, pada tahun 2021 meningkat menjadi 121 kasus. jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang lebih tinggi adalah narkoba, sehingga pada tahun selanjutnya diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai barat harus lebih Fokus dalam upaya Penekanan Peredaran Narkoba melalui Sosialisasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait, guna menciptakan Kutai Barat bebas Narkoba.

No	Keterangan	Satuan	2019	2020	2021
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 10.000 Penduduk	118	106	121
2	Jumlah Demo/ Unjuk Rasa	Demo	1	-	-

Dengan melihat data Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat, data yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak pada tahun 2019 sebesar 80,93% karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 75% dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang pontensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih: Rendahnya kesadaran masyarakat





untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis); Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/ kelurahan; Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula).

Persentase Pembinaan terhadap LSM dan ORMAS pada tahun 2019 sebesar 34%, Pada Tahun 2020 tidak ada peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 34%, Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 26% dari tahun sebelumnya dengan realisasi 60% Peningkatan Pembinaan Terhadap Ormas dan LSM tidak Lepas dari Upaya Peningkatan Sosialisasi tentang Organisasi Kemasyarakatan, koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Barat tidak melakukan pendaftaran ormasnya dan Badan Kesbangpol memiliki tugas untuk tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan ormas yang belum terdaftar di setiap terdapat kegiatan dari ormas tersebut, ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada tahun 2018 pendaftaran ormas telah melalui Kemendagri melalui Ditjen Polpum.

Persentase Tingkat Pemantauan KOMINDA Kabupaten pada tahun 2018 sebesar 63%, Mulai tahun 2019 Persentase Tingkat Pemantauan KOMINDA tidak lagi dilaksanakan sesuai peraturan atau Undang-undang yang berlaku.

Kasus kriminalitas dan gannguan kamtibmas di Kutai Barat pada tahun pada tahun 2015 berdasarkan laporan sebanyak 319. Jumlah ini menurun cukup tajam di tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah mengupayakan pengamanan swakarsa warga dalam rangka membantu kepolisian melalui optimalisasi Linmas di tingkat kampung dan kecamatan. Berdasarkan data dari Polres Kutai Barat, kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang cukup tinggi. Pada tahun 2015 terdapat 33 laporan kasus narkoba, tahun 2016 meningkat dua kali lipat menjadi 66, dan tahun 2017 meningkat lagi 67. Pembangunan generasi muda perlu mendapatkan perhatian yang lebih banyak guna mengantisipasi kasus tersebut.





Gambar 2. 8 Grafik Perkembangan Kamtibmas



Sumber: Kutai Barat Dalam Anaka 2018

Dari sisi perhitungan angka kriminalitas, pada tahun 2017 angka kriminalitas di Kutai Barat adalah sebesar 82 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini menurun dibandingkan bila dibandingkan dengan angka kriminalitas tahun 2016 sebanyak 123 kasus per 100.000 penduduk.

Data dari Polres Kutai Barat menunjukkan selama tahun 2017 terjadi 144 kasus kriminalitas. Dari semua kasus tersebut tercatat sebanyak 101 kasus dapat diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyelidikan. Jumlah kriminalitas tahun 2017 menurun dari tahun 2016 dengan 209 kasus, mengalami penurunan sebanyak 65 kasus. Penurunan angka kriminalitas dalam tahun 2017 disebabkan semakin tegasnya aparat keamanan dalam penanganan kasus gangguan keamanan/kriminal.Dalam 5 tahun terakhir, angka kriminalitas di Kabupaten Kutai Barat mengalami fluktuasi. Angka kriminalitas terendah tercatat tahun 2017 yaitu 82 per 100.000 penduduk dari 144 kasus. Kemudian dilihat dari tingkat penyelesaian kasus, selama tahun 2013 - 2017 belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

2.2.1.7. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.





Untuk melihat ukuran inklusivitas pembangunan ekonomi, dipergunakan suatu indeks yang disebut dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

Pembangunan ekonomi inklusif memiliki 3 pilar yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut memiliki delapan sub-pilar utama serta 21 indikator yang terangkum menjadi IPEI. Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi inklusif pembangunan ekonomi yang dilaksanakan seyogyanya mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Nilai IPEI dikelompokkan menjadi 3: Kurang Memuaskan (skor 1-3), Memuaskan (skor 4-7), dan Sangat Memuaskan (skor 8-10).

IPEI di Kabupaten Kutai Barat selama 2013-2014 mengalami penurunan, namun setelah periode tersebut yaitu 2014-2019 menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Tahun 2019 nilai IPEI Kabupaten Kutai Barat sebesar 5,27 dan masuk dalam kategori "Memuaskan" namun dibanding daerah lain di Kalimantan Timur nilai ini masih tergolong rendah. Nilai IPEI Kutai Barat tersebut masih cukup jauh dari nilai IPEI Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Salah satu indikasi dari nilai ini adalah bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat meskipun mampu mendorong atau memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan, namun efek tersebut belum masih tergolong kecil. Dengan demikian dalam setiap implementasi perencanaan pembangunan ekonomi, perlu mempertimbangkan secara matang seberapa besar efeknya dalam mendorong perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, serta memperkecil tingkat kesenjangan.

Di tahun 2020 IPEI Kabupaten Kutai Barat menunjukkan penurunan dari 5.27 menjadi 5.16 atau mengalami penurunan 0,1 poin atau -2,09%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 tersebut juga terjadi di semua daerah di Kalimantan Timur, termasuk Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Penurunan IPEI tahun 2020 di Kabupaten Kutai Barat jauh lebih rendah bila dibandingkan provinsi maupun nasional, karena pada tahun 2020 terjadi penurunan IPEI sebesar -7,97% di Provinsi Kalimantan Timur dan -6,28% di tingkat nasional.





Tabel 2. 28 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, 2013-2020

KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	5.02	4.99	4.93	5.21	5.29	5.36	5.50	5.30
Kutai Barat	4.44	4.38	4.64	4.86	5.03	5.15	5.27	5.16
Kutai Kartanegara	5.03	4.98	5.03	5.20	5.28	5.31	5.44	5.34
Kutai Timur	4.62	4.69	4.86	4.82	5.01	5.03	5.23	5.04
Berau	5.06	5.00	5.13	5.16	5.30	5.36	5.48	5.35
Penajam Paser Utara	4.92	4.95	5.06	5.10	5.13	5.16	5.20	5.17
Mahakam Hulu							4.72	
Kota Balikpapan	5.76	5.76	6.05	6.04	6.06	6.07	6.19	6.03
Kota Samarinda	5.66	5.71	5.77	5.92	5.79	5.90	5.86	5.83
Kota Bontang	5.68	5.88	5.97	5.91	5.98	6.06	6.08	5.95
Kalimantan Timur	5.53	5.32	5.72	5.84	6.03	5.99	6.27	5.77
Nasional	5.09	5.23	5.41	5.64	5.75	5.75	5.89	5.52

Sumber: www.inklusif.bappenas.go.id

Bila dirinci pada setiap pilar yang ada, IPEI terbagi menjadi 3 pilar yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Pilar 1), pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (Pilar 2), serta pilar perluasan akses dan kesempatan (Pilar 3). Dari ketiga pilar tersebut, pilar 1 selama 2011-2020 terlihat konstan, pilar 2 menunjukkan tren penurunan, dan pilar 3 menunjukkan tren kenaikan. Selama 2019-2020 hanya pilar 3 yang menunjukkan kenaikan dari 5,93 menjadi 5,95 sedangkan pilar 1 dan pilar 2 menunjukkan penurunan. Penurunan yang terjadi pada pilar 1 dan pilar 2 di tahun 2020 disebabkan oleh situasi dan kondisi pandemic Covid-19 yang berdampak pada multi sektoral. Hal ini mendorong aktivitas ekonomi masyarakat menjadi sangat terbatas sehingga menyebabkan tertekannya perkonomian Kutai Barat. Kondisi ini menjadi salah satu sebab meningkatnya kemiskinan dan pengangguran sehingga APBD menjadi salah satu kunci untuk meminimalkan dampak yang terjadi akibat pandemic Covid tersebut. Intervensi pemerintah daerah melalui APBD ini menjadi salah satu pendorong meningkatnya pilar 3 serta meredam dampak yang lebih buruk pada pilar 1 dan pilar 2.



Gambar 2. 9 Grafik Komponen Pilar 1, 2, dan 3 IPEI Kabupaten Kutai Barat, 2011-2020

Sumber: www.inklusif. bappenas. go.id, diolah.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Peran pendidikan dalam pembangunan semakin diperkuat dengan adanya paradigma knowledge-based economy yang menegaskan arti penting pendidikan dalam pembangunan, pertama kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi semakin tampak dan penting, dan ketiga, penididikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural dalam jangka panjang. Menurut Tirtarahardja dan Sulo (2005)¹ sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya: (a) segi sasaran, pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat

_

¹ Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo (2005)."Pengantar Pendidikan". Edisi Revisi. Rineka Cipta: Jakarta.





menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi, (b) segi lingkungan, klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal), lingkungan masyarakat (pendidikan nonformal), ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan, (c) segi jenjang pendidikan, jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar (basic education), pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi, dan (d) pembidangan kerja, pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lainlain.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pendidikan secara jelas dinyatakan dalam UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerpan Standar Pelayanan Minimal, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 11 dan pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa *pertama*, pemerintah daerah harus menyelenggarakan program wajib belajar gratis untuk sekolah dasar, *kedua*, memberikan layanan, kemudahan, bimbingan, dan bantuan yang menjamin mutu pendidikan, *ketiga*, memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan, dan *keempat*, menyediakan pendanaan untuk pendidikan, dan *kelima*, melakukan evaluasi dan pengawasan.

Perhatian pemerintah termasuk pemerintah daerah secara lebih jauh dalam pendidikan bukanlah semata-semata adanya kegiatan belajar-mengajar secara formal di sebuah sekolah, namun harus mempertimbangkan kualitas proses dan output. Kualitas proses pendidikan diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk berbagai standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut prasarana, sarana, dan lulusan. Standar prasarana misalnya tertuang dalam Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2007, standar tentang tenaga pendidik diatur dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007, kemudian standar penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2007, serta masih banyak berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak dapat





diartikan secara fisik saja, namun juga harus memenuhi berbagai standar yang diperlukan sehingga output yang ada dapat terukur.

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS Kutai Barat jumlah penduduk usia 7-24 tahun yang bersekolah mencapai 73,88% dan angka ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2020 yang mencapai sekitar 73,63%. Jumlah yang tidak/belum sekolah pada tahun 2020 mencapai 0,12% dan terjadi penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,23%. Selanjutnya angka yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2021 menjadi 25,88% menurun dari tahun 2020 yang mencapai 26,25%. Jumlah penduduk yang berstatus tidak sekolah lagi meskipun menunjukkan penurunan dibandingkan tahun tahun sebelumnya, namun masih memiliki persentase yang cukup besar.

Tabel 2. 29 Penduduk Usia Sekolah dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2021

Kelompok Umur 7-24 tahun	•		Tidak Bersekolah Lagi
Laki-laki	0.12	73.79	26.09
Perempuan	0.36	73.98	25.66
Total	0.23	73.88	25.88

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat 2021

Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar alasan penduduk tidak/belum bersekolah serta tidak bersekolah lagi adalah karena faktor biaya (12,68%), karena bekerja atau mencari nafkah sebesar 25,10% dan karena faktor menikah atau mengurus rumah tangga sebesar 35,52%, serta lainnya. Selain factor di atas, kondisi dunia yang terserang pandemi corona virus (covid-19) juga mempengaruhi penurunan jumlah peserta didik dan mengakibatkan beberapa dampak finansial kepada seluruh masyarakat sehingga berpengaruh terhadap proses pendidikan.

Sementara usia SMP/sederajat yang tidak bersekolah lagi mencapai 0,52% dan SMA/sederajat mencapai 17,95%. Hal tersebut mengandung arti bahwa persentase penduduk usia SMA/sederajat yang tidak bersekolah di SMA/sederajat masih cukup tinggi. Dengan kata lain, cukup besar penduduk usia SMP/sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/sederajat dan banyak penduduk yang hanya berijazah SMA/sederajat saja.





Rata-rata lama sekolah (RLS) Kutai Barat tahun 2021 adalah 8,70 dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Kondisi ini jauh di bawah RLS Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 9,84. Tahun 2020 RLS Kutai Barat naik menjadi 8,59 dan menempati peringkat ketiga dari bawah setelah Mahakam Ulu dan PPU. Kenaikan RLS Kutai Barat selama 2012-2020 hanya 0,94; sama dengan kenaikan provinsi. Beberapa daerah di Kalimantan Timur memiliki kenaikan RLS di atas 1,0. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pendidikan merupakan salah satu layanan dasar dan menjadi prioritas nasional.

Tabel 2. 30 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Antar Daerah Tahun 2012-2020

Vahunatan /Vata		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)									
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Paser	7.78	7.96	7.99	8.12	8.19	8.2	8.22	8,54	8,55	8.79	
Kutai Barat	7.53	7.89	7.98	8.02	8.03	8.06	8.07	8,34	8,47	8.70	
Kutai Kartanegara	8.35	8.41	8.46	8.68	8.71	8.83	8.84	9,10	9,22	9.23	
Kutai Timur	8.39	8.56	8.6	8.69	8.72	9.06	9.08	9,18	9,19	9.43	
Berau	8.34	8.52	8.53	8.62	8.78	8.96	8.98	9,25	9,52	9.53	
PPU	7.09	7.3	7.46	7.59	7.6	7.95	8.03	8,16	8,28	8.36	
Mahakam Ulu	-	6.86	7.15	7.36	7.37	7.68	7.69	7,89	7,97	8.18	
Balikpapan	10.29	10.39	10.41	10.44	10.54	10.55	10.65	10,67	10,68	10.91	
Samarinda	10	10.2	10.26	10.31	10.33	10.34	10.46	10,47	10,48	10.49	
Bontang	10.28	10.34	10.35	10.38	10.39	10.7	10.72	10,73	10,79	10.80	
Kalimantan Timur	8.83	8.87	9.04	9.15	9.24	9.36	9.48	9,70	9,77	9.84	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Untuk meningkatkan kinerja rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk sekolah, perlu menyusun program yang diarahkan pada peningkatan kualifikasi guru terutama dalam pengembangan metodologi pengajaran. Upaya ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kab. Kutai Barat dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, kursus, lokakarya, studi banding, dan bentuk yang lainnya. Namun kegiatan tersebut memang akan optimal apabila disusun secara terstruktur dengan sasaran dan target yang lebih jelas.





2.2.2.2. Kesehatan

Aspek kesejahteraan yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat memiliki dimensi karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: "Indonesia Sehat 2025". Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Sejalan dengan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan berupaya mengawal berbagai pihak terutama komponen yang terlibat langsung dalam pembangunan kesehatan Kabupaten Kutai





Barat untuk menuju: "Terwujudnya Masyarakat Kutai Barat yang Sehat dan Berbudaya Hidup Sehat", serta mengupayakan terlaksananya pelayanan prima pada institusi pelayanan kesehatan yang didukung oleh tenaga kesehatan. Pada awalnya, pelayanan prima pada masyarakat masih belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat keterbatasan sarana peralatan kesehatan, kualitas SDM yang masih jauh dari profesional serta masih belum dilaksanakan dan dipahaminya SPM dan SOP yang ada. Namun sejalan dengan visi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, serta mengupayakan terlaksananya pelayanan prima pada institusi pelayanan kesehatan. Dari sisi kinerja layanan kesehatan, Kutai Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan layanan kesehatan seperti penyuluhan, kunjungan, layanan balita dan ibu hamil, imunisasi, dan sebagainya. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Barat yang sehat.

Permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian di Kutai Barat terutama masalah stunting dan epidemic filariasis (kaki gajah). Stunting lebih banyak disebabkan oleh faktor asupan atau gizi yang kurang. Tingginya kasus stunting (1.044 dari 19.200 atau 5,43%), menyebabkan Kutai Barat masuk ke peringkat 5 di Kalimantan Timur. Kasus stunting berlokasi di 30 kampung dari 12 kecamatan. Beberapa indikator tentang kesehatan disajikan adalah sebagai berikut:

1) Rasio Posyandu Terhadap Jumlah Balita

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayananpemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejakdalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Tabel 2. 31 Jumlah dan Rasio Posyandu Terhadap Dengan Jumlah Balita di Kab. Kutai Barat Tahun 2015 - 2019

No	No Urajan		Tahun							
NU	oraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Jumlah Posyandu	240	294	244	244	244	239			
2	Jumlah Balita	19020	19110	19188	13120	12867	11433			
3	Rasio	1:7925	1:6500	1:7863	1:5377	1:5273	1: 4783			
	Rasio Ideal			1:50						





Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat, 2021

Rasio posyandu terhadap jumlah balita idealnya adalah 1:50, di Kabupaten Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 rasionya 1: 4783, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posyandu di Kabupaten Kutai Barat belum madai dan perlu terus ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitas baik sara dan prasarana maupun pelayanan terintegrasi di Posyandu.

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik di Kab. Kutai Barat Tahun 2016 – 2020

I di	1 anun 2010 - 2020							
No	Uraian	Tahun						
	orum	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	171.317	146.998	147.598	148.020	165.938	150.302	
2	Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19	19	
	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	1:9.518	1:7.737	1:7.767	1:7.790	1:8.734	1:7910	
3	Jumlah Pustu	84	84	84	84	123	84	
	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	1:2.022	1:2.044	1:1.757	1:1.762	1:1.349	1:1789	
4	Jumlah Klinik	17	18	18	7	9	21	
	Rasio Klinik Per Satuan Penduduk	1:9.754	1:9.423	1:8.199	1:21.145	1:18.438	1:7157	

Sumber Data : Kutai Barat Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 telah dibangun fasilitas kesehatan berupa 1 unit Rumah Sakit Umum, 1 unit Rumah Sakit Swasta dan 1 unit Rumah Sakit Pratama Type D serta 19 Puskesmas, 84 Puskesmas Pembantu, 39 Unit Pos Kesehatan Masyarakat Kampung (PKMK), 3 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang tersebar di 16 Kecamatan dan 190 Kampung dan 4 Kelurahan. Sehingga rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat sebesar 1 : 7910, bila dibandingkan dengan standar ideal rasio Puskesmas terhadap satuan penduduk yaitu 1 :





16.000, maka standar pemenuhan Puskesmas telah terpenuhi, tetapi jika ditinjau dari aspek Geografis dan kondisi wilayah serta akses jalan di Kabupaten Kutai Barat masih belum memenuhi dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

3) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Saat ini hanya terdapat 2 buah rumah sakit milik Pemerintah di Kutai Barat yaitu RSUD Harapan Insan Sendawar dan Rumah Sakit Pratama dan 1 Rumah Sakit Swasta yaitu RS. Santa Famalia, namun hingga saat ini Rumah Sakit Pratama belum difungsikan karena fasilitas pendukung yang belum lengkap tersedia, namun dalam masa Pandemi Covid-19 digunakan sebagai Rumah Sakit Isolasi pasien Covid-19.

Dengan jumlah penduduk Kutai Barat yang berjumlah 165.938 jiwa maka rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 1 banding 165.938 jiwa artinya satu rumah sakit melayani 165.938 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Apabila Rumah Sakit Pratama yang berlokasi di Kecamatan Linggang Bigung sudah beroperasi maka rasio rumah sakit per satuan penduduk sudah terpenuhi di Kutai Barat. Tetapi bila melihat letak geografis akses jalan serta sarana transportasi yang ada di Kabupaten Kutai Barat, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih belum terpenuhi. Sebagai contoh untuk Kecamatan Bongan dan Kecamatan Penyinggahan jarang merujuk pasien ke RSUD. HIS tetapi ke RSU yang ada diwilayah Kabupaten Kutai Kertanegara atau langsung ke RSUD. Abdul Wahab Syahrani di Samarinda, ini dikarenkan akses jalan dan jarak lebih sulit ke RSUD HIS daripada ke Tenggarong atau Samarinda.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan ketenagakerjaan. Melalui pendidikan diharapkan kualitas SDM di Kutai Barat semakin meningkat sehingga kualitas tenaga kerja akan mampu secara nyata mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut kriteria BPS, penduduk secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke





atas. Penduduk usia kerja ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Barat selama 2015-2018 menunjukkan tren penurunan, namun di tahun 2019 kembali naik menjadi 5,08% namun tingkat pengangguran ini lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,09% pada tahun 2019.

Tabel 2. 33 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Timur, Tahun 2015-2021

Valuustan (Vata	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)							
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Paser	9.06	1	5.54	5	4.55			
Kutai Barat	11.7	ı	5.87	4.86	5.08	4,97	5,14	
Kutai Kartanegara	10.22	ı	5.72	5.96	5.98			
Kutai Timur	5.14	ı	4.61	5.93	5.53			
Berau	5.72	-	6.45	5.62	5.08			
Penajam Paser Utara	7.28	-	4.75	4.76	6.26			
Mahakam Ulu	4.75	-	9.05	4.17	3.69			
Balikpapan	5.95	-	10.39	9.52	7.29			
Samarinda	5.61	-	6.19	6.16	5.87			
Bontang	12.07	-	12.44	9.61	9.19			
Kalimantan Timur	7.5	7.95	6.91	6.6	6.09			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Untuk tahun 2020, angkatan kerja Kutai Barat pada tahun 2020 mencapai 72.552 orang. Angkatan kerja ini didominasi penduduk bekerja dengan jumlah 68.868 jiwa dan pengangguran terbuka 3.684 jiwa. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja sejumlah 35.271 jiwa dan didominasi dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga yaitu sejumlah 21.570 jiwa.

Tabel 2. 34 Kondisi Ketenagakerjaan Kutai Barat 2020

Kegiatan Utama	/ Main Activity	Jenis Kelamin	/ Sex
mediate de carrier /	,	jeme meramin j	, 5011





Jenis Kelamin / Sex	Laki-Laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja / Economically Active	47 676	24 876	72 552
Bekerja / Working	44 988	23 880	68 868
Pengangguran Terbuka / Unemployment	2 688	996	3 684
Bukan Angkatan Kerja / Economically Inactive	9 751	25 520	35 271
Sekolah / Attending School	4 229	3 633	7 862
Mengurus Rumah Tangga / Housekeeping	1 802	19 768	21 570
Lainnya / Others	3 720	2 119	5 839
Jumlah / Total	57 427	50 396	107 823

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2021

Data 2020 menunjukkan pengangguran di Kutai Barat berjumlah 3.684 terdiri dari laki-laki 2.668 dan perempuan 996. Pengangguran di Kutai Barat didominasi oleh mereka yang berijazah SMA dan SMK yang berjumlah 57,43%. Faktor pendidikan dalam mengurangi tingkat pengangguran menjadi unsur penting di Kutai Barat. Strategi yang perlu dirumuskan adalah bagaimana meningkatkan keterampilan pencari kerja, mengembangkan pendidikan kejuruan sesuai potensi wilayah, serta meningkatkan persentase penduduk yang melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya pendidikan vokasi.

Tabel 2. 35 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

nganggaran beraasarkan renamanan ranan 2020					
Pendidikan	Jumlah				
SD	361				
SMTP	689				
SMTA	2.116				
PT	527				
Jumlah	3.684				

Sumber: Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

Banyaknya pengangguran yang berijazah SMTA ke bawah membawa implikasi antara lain pentingnya Kutai Barat untuk: (1) mengembangkan konsep *link and match* antara pendidikan dengan dunia kerja, (2) mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada keterampilan praktik agar lulusan lebih siap bekerja atau berwirausaha, (3) mengembangkan berbagai pendidikan informal yang beorientasi pada kebutuhan Kutai Barat.





Unsur penting lain kaitanya dengan tenaga kerja adalah balas jasa tenaga kerja yang berupa upah/gaji. Balas jasa ini menjadi penentu kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan pekerja atau secara luas masyarakat, ditetapkan standar acuan upah/gaji suatu daerah dalam bentuk Upah Minimum Regional yang terdiri dari Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang setiap tahun dilakukan evaluasi oleh masing-masing kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selama 2016-2020 nilai Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kutai Barat menunjukkan peningkatan, kecuali tahun 2016-2017 yang sedikit mengalami penurunan. Nilai UMR Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 adalah 3.386.593 sama dengan nilai UMR Kabupaten Berau, sehingga UMR di Kabupaten Kutai Barat ini merupakan UMR tertinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 36 Upah Minimum Regional 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	2 373 993	2 373 923	2 580 691	2 787 920	3.025.172
Kutai Barat	2 476 680	2 476 108	2 792 399	3 050 000	3.386.593
Kutai Kartanegara	2 495 163	2 495 163	2712491	2 930 304	3.179.673
Kutai Timur	2 464 108	2 464 108	2 678 731	2 893 833	3.140.000
Berau	2 657 538	2 657 536	2 889 009	3 120 996	3.386.593
Penajam Paser Utara	2 566 392	2 566 392	2 789 925	3 100 000	3.363.809
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
Balikpapan	2 408 563	2 408 563	2 618 348	2 868 083	3.069.315
Samarinda	2 442 190	2 442 181	2 654 895	2 868 083	3.112.156
Bontang	2 497 542	2 497 542	2715078	2 933 099	3.182.706
Kalimantan Timur	2 339 556	2 339 556	2 543 332	2 747 561	2.981.378

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai sumber

2.2.3. Seni, Budaya, Dan Olah Raga

Seni, budaya dan olah raga merupakan hal penting bagi Kutai Barat dalam rangka membangun dan melestarikan nilai-nilai positif masyarakat serta mengembangkan ciri khas dan karakter masyarakat. Kutai Barat beranggapan bahwa pembangunan seni, budaya, dan olah raga harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan





potensi guna mendukung pembangunan daerah, karena pembangunan daerah tidak sematamata pembangunan fisik semata.

Dalam aspek budaya, penduduk asli Kutai Barat di pedalaman hidup secara berpindah-pindah. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama mereka adalah berladang dan berburu yang dilakukan secara berpindah-pindah. Berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan sampai saat ini, telah menyebabkan terjadinya pergeseran pola pemukiman penduduk, tidak lagi berpidah-pindah, tetapi sudah menetap dengan berbagai mata pencaharian yang dilakukan sesuai dengan karakter daerah

Mayoritas penduduk Kutai Barat memeluk agama kristiani. Agama Kristen menempati kedudukan nomor satu dalam hal banyaknya penganut dan intensifnya penyebaran agama. Mula-mula penyiaran agama ini dilakukan para penginjil dari Jerman dan Swiss. Badan yang mengirimkan perutusan Injil dari Jerman adalah Rheinische Mission Gessellschaft zu Barmen (1863-1925), yang kemudian dilanjutkan oleh Evangelische Gessellschaft zu Basel dari Swiss serta badan-badan Kristen dan Katholik lainnya. Para pengikut agama Kristen dan Katholik sebagian besar adalah dari warga Dayak.

Sampai saat ini masih ada sebagian penduduk yang menganut kepercayaan asli setempat, mereka terutama adalah kelompok etnik Dayak yang masih sedikit mendapat pengaruh dari luar. Kepercayaan asli berpusat pada penyembahan roh-roh lain (animisme) serta percaya pada kekuatan yang tersembunyi dibalik benda-benda alam (dinamisme). Penganut kepercayaan ini memiliki berbagai macam upacara baik yang berhubungan dengan siklus hidup dan kehidupan manusia (kelahiran, kematian, perkawinan, sakit, dan sebagainya) dan upacara yang berkaitan dengan siklus pertanian. Dalam menyelenggarakan upacara-upacara ini, masing-masing etnik memiliki variasinya sendiri-sendiri. Namun secara umum masyarakat Kutai Barat memiliki sifat yang ramah tamah, jujur dan memiliki semangat gotong-royong yang tinggi. Tamu atau pendatang dari luar sangat dihormati. Masyarakatnya juga sangat religius dan memiliki rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi.

Pembangunan di bidang seni terutama meliputi seni tari dan seni musik. Masyarakat menunjukkan apresiasi yang cukup tinggi di bidang pembangunan kesenian, yang terlihat dari perkembangan jumlah orang yang terlibat. Seni tari pada tahun 2014 memiliki jumlah anggota 1.207 dari 90 kelompok kesenian. Seni musik memiliki anggota sebanyak 207 dengan jumlah kelompok seni sebanyak 18.





Perkembangan apresiasi seni masyarakat diharapkan mampu mendukung pembangunan karakter Kutai Barat, bahkan secara lebih jauh mampu mendukung program-program pemerintah seperti pengembangan pariwisata. Untuk itu, pemerintah juga memfasilitasi berbagai grup kesenian yang ada di Kutai Barat sebagai wadah penyaluran minat dan bakat masyarakat.

Hingga 2010, jumlah grup seni mengalami kenaikan jumlah yang sangat fantastis menjadi 66 grup seni. Demikian pula dengan jumlah anggota grup seni yang pada tahun 2010 naik menjadi 1.693. Tahun 2014 jumlah grup kesenian bertambah menjadi 108 namun jumlah anggota turun menjadi 1.414. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesenian merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan kehidupan seni masyarakat melalui berbagai aktivitas yang diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat khususnya perdagangan dan pariwisata. Berbagai *event* kesenian akan disusun secara terjadwal sehingga masyarakat luas mampu memahami perkembangan pembangunan kesenian sebagai upaya melestarikan budaya dan membangun karakter masyarakat.

Untuk tahun 2020 ada 95 sanggar seni yang telah terdaftar dan tersebar di beberapa Kecamatan antara lain: Kecamatan Barong Tongok 33 Sanggar Seni, Kecamatan Tering 8 Sanggar Seni, Kecamatan Long iram 5 Sanggar Seni, Kecamatan Melak 3 Sanggar Seni, Kecamatan Sekolaq Darat 8 Sanggar Seni, Kecamatan Linggang Bigung 11 Sanggar Seni, Kecamatan Nyuatan 4 Sanggar Seni, Kecamatan Bentian Besar 5 Sanggar Seni, Kecamatan Bongan 3 Sanggar Seni, Kecamatan Jempang 4 Sanggar seni, Kecamatan Siluq Ngurai 4 Sanggar Seni, Kecamatan Muara Lawa 5 Sanggar Seni dan Kecamatan Damai 2 Sanggar Seni.

Tabel 2. 37 Jumlah Grup Kesenian Di Kecamatan Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Grup	
1	Barong Tongkok	33 Sanggar Seni	
2	Tering	8 Sanggar Seni	
3	Long Iram	5 Sanggar Seni	
4	Melak	3 Sanggar Seni	
5	Sekolaq Darat	8 Sanggar Seni	
6	Linggang Bigung	11 Sanggar Seni	





No.	Nama Kecamatan	Jumlah Grup	
7	Nyuatan	4 Sanggar Seni	
8	Bentian	5 Sanggar Seni	
9	Bongan	3 Sanggar Seni	
10	Jempang	4 Sanggar Seni	
11	Siluq Ngurai	4 Sanggar Seni	
12	Muara Lawa	5 Sanggar Seni	
13	Damai	2 Sanggar Seni	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah serta nilai-nilai tradisional yang memperkuat jati diri daerah yang diwujudkan dengan terlaksananya beberapa upacara adat di beberapa kampung yang tersebar di Kabupaten Kutai Barat. Berikut perkembangan data upacara adat yang dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2014 s/d 2018, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 38 Jenis Upacara Adat Masyarakat Kabupaten Kutai Barat

No	Jenis Budaya	Etnis	Kecamatan	Keterangan
1	Melas anak kecil	Tunjung, Benuaq	Tering, Barong Tongkok, Lg. Bigung, Sekolaq Darat	Upacara pemberian nama anak kecil
2	Melas Tanah	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, Lg. Bigung, Sekolaq darat.	Upacara pamitan pembukaan lahan
3	Kenyau, Kwangkay	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, Lg. Bigung, Sekolaq Darat.	Upacara adat kematian 9 hari Upacara adat kematian 3x7 ha
4	Gugu Tautn	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, Lg. Bigung, M. Lawa.	Upacara adat memperbaiki hubungan alam dan cuaca.
5	Nebeq Rau /Laliq Ugaal	Bahau	Tering Lama/ Tering Baru	Upacara syukuran mengusir hama
6	Ngompokng	Tunjung, Benuaq	Nyuatan, M. Lawa, Barong Tongkok	Upacara perkawinan tingkat menengah
7	Negak Ngeruratn	Tunjung, Benuaq	Nyuatan, M. Lawa, Barong Tongkok	-Upacara perkawinan tingkat tinggi
8	Naik Ayun	Melayu	Melak, M. Pahu, Penyinggahan	Upacara anak kecil
9	Pakatn Talutn	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, Lg. Bigung, Sekolaq Darat.	Mohon izin pembukaan lahan
10	Tulaq Bala	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, M. Lawa, Sekolaq Darat, Lg. Bigung.	Upacara mengusir roh penyakit jahat.
11	Bersih Desa	Jawa	Barong Tongkok, Sekolaq, Lg. Bigung	Upacara membersihkan kampung
12	Mamat Bali Akang	Kenyah	Datah Bilang	Menyambut Panglima Perang
13	Nyengkokng	Tunjung, Benuaq	M. Lawa, Damai, Nyuatan	Mengobati anak yang masih kecil





No	Jenis Budaya	Etnis	Kecamatan	Keterangan
14	Beliatn Timeq	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, Lg. Bigung, Sekolaq Darat, M. Lawa	Mengobati orang sakit atau membayar hajat
15	Ngetimang amiin	Bahau	Tering Lama	Kasih makan hantu dapur atau ataang.
16	Naak Aran Anak	Bahau	Tering Lama	Upacara buat nama anak
17	Makan Tanaaq	Bahau	Tering Lama	Upacara Adat kasih makan hantu tanah
18	Beliatn sentiyu, bawo	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, Sekolaq, Lg. Bigung	Mengobati orang sakit atau membayar nazar
19	Pakatn Nyahuq Dapeq	Tunjung, Benuaq	Barong Tongkok, Nyuatan, Sekolaq Darat, Lg. Bigung, Damai.	Mohon izin pembangunan rumah.

Sumber: Dispora Kabupaten Kutai Barat

Upaya untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain yaitu pembinaan pemuda, dimaksudkan untuk mendorong peran pemuda dalam pembangunan terutama dalam bidang ekonomi yaitu terbentuknya pemuda yang mandiri, yang memiliki kepekan terhadap permasalahan sosial sekitarnya termasuk lingkungan alam. Disamping itu dilaksanakan pula pemilihan pemuda pelopor untuk memotivasi kreatifitas dan inovasi pemuda dalam peranannya sebagai penggerak pembangunan.

Selama tahun 2018 terdata sebanyak 48 kali (dimana masih penggabungan OPD dan ditambah masuknya kegiatan Marching Band tahun 2020) pelaksanaan kegiatan kepemudaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain Paskibraka, Marching Band, Jambore Pemuda Daerh (JPD), Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Gerakan Pemuda Peduli Lingkungan (PEPELINGASIH), Wirausaha Muda dan lain-lain. Jika melihat perkembangan selama 4 tahun terakhir secara umum menggambarkan bahwa kegiatan kepemudaan di Kutai Barat berjalan sesuai dengan seiringnya kondisi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 sejumlah 45 kegiatan kepemudaan digelar dan tahun 2020 sejumlah 44 kegiatan terselenggara.





2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Pealayanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan data yang bersumber dari *Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka Tahun* 2021 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kutai Barat, jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA dan yang sederajat pada tahun 2020 masing-masing mencapai 217, 68, dan 38. Dari aspek rasio guru terhadap jumlah sekolah, rata-rata untuk satu SD terdapat sekitar 11 guru. Bila dalam satu SD terdapat 6 kelas, jumlah ini sebenarnya sudah mencukupi. Namun, aspek pemerataan antar wilayah memang belum tergambarkan. Rasio SMP dan SMA bila diasumsikan setiap sekolah terdapat 3 kelas, jumlahnya dapat dikatakan ideal. Namun, umumnya untuk SMP dan SMA lebih dari 3 kelas dan kebutuhan guru juga per bidang studi atau kompetensi. Bila demikian, secara umum terlihat adanya kekurangan guru. Bila dikaitkan dengan bidang studi, situasi ini menggambarkan adanya guru yang mengampu lebih dari satu bidang studi atau pelajaran. Rasio jumlah murid terhadap guru menunjukkan bahwa jenjang SD memiliki rasio paling kecil yaitu 8,4. Hal ini mengandung arti bahwa satu guru menangani sekitar 8-9 siswa. Rasio untuk jenjang SMP dan SMA pun tergolong cukup kecil, masing-masing 9,43 dan 12,87.

Tabel 2. 39 Data Pokok Pendidikan Kutai Barat Tahun 2021

Jania Calvalah		Jumlah		Rasio				
Jenis Sekolah	Sekolah	Murid	Guru					
1	2	3	4	(4):(2)	(3):(2)	(3):(4)		
SD/Sederajat	203	20.653	2.089	10,26	101,74	9,92		
SMP/Sederajat	59	3.021	822	13,93	51,20	3,68		
SMA/Sederajat	36	3.121	576	16	86,69	5,42		
Jumlah	298	26.795	3.481	40,19	239,64	19,01		

Sumber: Kutai Barat dalam Angka 2021, diolah

Dibandingkan dengan daerah lain, berbagai indikator rasio di Kutai Barat termasuk kecil. Tahun 2019/2020 rasio murid terhadap sekolah untuk SD hanya 99 sementara SMP dan SMA masing-masing 137 dan 208. Rasio guru terhadap sekolah untuk SD adalah 10





sedangkan SMP dan SMA masing-masing 15 dan 18. Nilai rasio di Kutai Barat tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 40 Rasio Pendidikan di Kalimantan Timur, Tahun 2016/2017-2019/2020 TAHUN 2016/2017

No	Wilayah	Rasio Murid- Sekolah				Rasio (Guru-S	ekolah	l	Ra	Rasio Murid-Guru			
	J	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	
1	Kab. Kutai Kartanegara	191	215	293	269	13	15	18	18	15	14	16	15	
2	Kota Samarinda	403	412	384	412	19	23	23	27	21	18	16	16	
3	Kab. Kutai Timur	214	188	267	225	13	13	18	18	17	15	15	13	
4	Kab. Paser	146	156	271	343	10	12	20	25	14	13	13	14	
5	Kab. Kutai Barat	94	151	183	222	11	14	16	20	8	11	12	11	
6	Kota Balikpapan	378	440	540	464	17	21	29	27	23	21	19	17	
7	Kab. Berau	178	231	279	210	12	17	20	21	14	14	14	10	
8	Kab. Penajam Paser Utara	204	228	373	324	13	15	26	26	16	15	15	12	
9	Kota Bontang	348	288	359	298	17	18	28	26	20	16	13	11	
10	Kab. Mahakam Ulu	109	98	155	126	12	12	15	16	9	8	10	8	
	Kalimantan Timur	222	250	319	328	14	16	21	23	16	16	15	14	

TAHUN 2019/2020

No	Wilayah	Rasio Murid- Sekolah]	Guru-S	ekolah	Rasio Murid-Guru					
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kab. Kutai Kartanegara	185	209	285	295	11	13	17	17	16	16	17	17
2	Kota Samarinda	370	368	387	420	17	20	22	24	22	19	17	17
3	Kab. Kutai Timur	222	190	309	267	12	12	19	16	18	15	17	16
4	Kab. Paser	146	144	291	340	10	11	20	24	15	13	15	14
5	Kab. Kutai Barat	99	137	208	226	10	14	15	18	10	10	14	13





No	Wilayah	Rasio Murid- Sekolah				Rasio (Guru-S	ekolah	1	Rasio Murid-Guru			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
6	Kota Balikpapan	354	427	448	492	16	20	23	25	23	21	19	20
7	Kab. Berau	187	217	355	233	12	16	22	19	15	14	16	12
8	Kab. Penajam Paser Utara	201	224	405	382	12	15	25	26	17	15	16	15
9	Kota Bontang	340	298	390	279	17	18	26	23	20	17	15	12
10	Kab. Mahakam Ulu	103	122	156	86	11	19	14	11	10	7	11	8
	Kalimantan Timur	217	241	327	347	13	15	20	21	17	16	17	16

Sumber: Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, diolah.

Kinerja Angka Melek Huruf (AMH) dari 2016-2017 menunjukkan sedikit kenaikan dari 98,22% menjadi 98,49% dan tahun 2018 terjadi penurunan AMH menjadi 98,36%. Berdasarkan data yang bersumber dari *Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka* yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kutai Barat, tahun 2016 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD adalah 98,55; APM SMP 85,46; dan untuk jenjang SMA adalah 57,28. Hal ini berbeda dengan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa APM SD tahun 2016 adalah 95,69; APM jenjang SMP adalah 69,28; dan untuk SMA adalah 62,30. Pada tahun 2020, menurut BPS Kabupaten Kutai Barat, APM SD adalah 99,02; APM SMP 81,84; dan APM SMA adalah 59,94.

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SD selama 2020-2021 terjadi kenaikan dari 102,03 menjadi 102,49. Hal yang berbeda terjadi pada APK SMP yang menujukkan Penurunan dari 2020-2021 yaitu dari 103,66 menjadi 87,17. APK SMP sederajat mengalami penurunan dari tahun 2020 sekitar 16%. Penurunan ini bukan mengisyaratkan penurunan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Barat atau Kinerja Dinas pendidikan Dan Kebudayaan, namun dikernakan masa pandemi covid-19 serta adanya kebijakan zonasi, di mana peserta didik memilih sekolah yang berlokasi dalam kabupaten/kota yang sama dengan tempat tinggalnya sehingga persentase jumlah peserta didik dan jumlah penduduk hampir seimbang.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2019-2021 baik indikator APK mauun APM untuk SD dan SMP terlihat APK Kutai Barat masih di atas provinsi,





meski selisihnya kecil sedangkan untuk APK SMA kondisi Kutai Barat pada tahun 2019-2021 masih sedikit di bawah provinsi.

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Pendidikan Kutai Barat 2016-2021

Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Melek Huruf	%	98,22	98,49	98.36	-	-	99,00
APK PAUD	%	46,43	48,20	18,24	-	-	64,19
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	106,6	105,28	104,69	108,85	106,96	102,49
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	95,83	96,08	93,32	93,84	94,39	87,17
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	%	89,37	94,96	94,44	92,02	93,31	n/a
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	95,69	93,84	94,48	99,48	99,02	91,92
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	69,28	69,24	67,88	79,79	81,84	69,65
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	62,30	63,63	71,56	59,06	59,94	N/a

Sumber: apkapm.data.kemdikbud.go.id dan Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2016-2020

Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD	%	53,34	55,09	29,22	-	-
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	107,78	106,73	105,39	106,84	105,75
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	100,56	102,05	102,59	91,03	92,17
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	%	85,87	95,05	90,75	94,96	95,23
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	95,10	90,05	95,02	98,41	98,44
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	75,08	76,12	76	80,42	81,28
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	62,38	64,48	68,34	68,55	69,00

Sumber: apkapm.data.kemdikbud.go.id dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021





Dari aspek kemampuan membaca dan menulis, untuk penduduk yang berumur 10 tahun ke atas masih terdapat 0,98% yang tidak dapat membaca dan menulis atau buta huruf. Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 0,97% namun dibandingkan dengan beberapa daerah lain, Kutai Barat masih dalam posisi yang cukup baik.

Tabel 2. 43 Perbandingan Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kalimantan Timur Tahun 2019

Volumeton /Vote	Keman	npuan Membaca dar	ı Menulis	Buta
Kabupaten/Kota	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainya	Huruf
Kabupaten Paser	98,84	14,59	2,64	1,16
Kabupaten Kutai Barat	98,79	9,21	1,77	0,98
Kabupaten Kutai Kartanegara	98,68	16,30	1,42	1,31
Kabupaten Kutai Timur	98,84	42,72	5,25	0,98
Kabupaten Berau	98,59	33,40	3,30	1,33
Kabupaten Penajam Paser Utara	98,15	12,41	1,40	1,72
Kabupaten Mahakam Hulu	98,10	3,50	0,14	1,84
Kota Balikpapan	99,29	28,50	1,92	0,62
Kota Samarinda	98,85	35,10	2,80	0,69
Kota Bontang	99,36	17,62	5,30	0,64
Kalimantan Timur	98,86	26,01	2,61	0,97

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019.

Berdasarkan status pendidikannya, jumlah penduduk Kabupaten Kuai Barat usia 7-24 tahun yang *tidak bersekolah lagi* pada tahun 2019 mencapai 25,81%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 25,45%. Di sisi lain jumlah penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan angka 0,56% di tahun 2019, peringkat ketiga di bawah Penajam Paser Utara yang mencapai 0,63% dan jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan angka 0,21%. Pengertian tidak bersekolah lagi artinya mereka pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, namun saat dilakukan perhitungan di tahun 2019 mereka tidak lagi terdaftar atau tidak lagi aktif.

Tabel 2. 44 Perbandingan Pendudukan Usia 7-24 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan di Kalimantan Timur, Tahun 2019

Kabupaten/Kota Status Pendidikan





	Tidak/ Belum pernah sekolah	SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	Perguruan tinggi	Jumlah yang masih sekolah	Tidak bersekolah lagi
Kabupaten Paser	0,29	34,81	18,17	19,74	3,86	73,01	26,99
Kabupaten Kutai Barat	0,56	36,56	16,35	20,70	4,11	74,19	25,81
Kabupaten Kutai Kartanegara	0,09	36,88	16,15	19,95	5,43	99,91	0,09
Kabupaten Kutai Timur	0,17	35,61	14,96	17,81	3,03	68,55	31,45
Kabupaten Berau	0,81	38,69	14,83	18,57	4,19	72,9	27,10
Kabupaten Penajam Paser Utara	0,63	40,05	15,99	16,22	1,14	72,89	27,11
Kabupaten Mahakam Hulu	0,08	42,21	18,61	13,14	1,82	74,05	25,95
Kota Balikpapan	0,00	36,99	12,04	25,89	9,51	74,92	25,08
Kota Samarinda	0,18	35,10	11,75	31,45	17,20	78,47	21,53
Kota Bontang	0,29	42,98	16,22	19,31	3,48	78,8	21,20
Kalimantan Timur	0,21	36,74	14,37	23,22	8,19	74,55	25,45

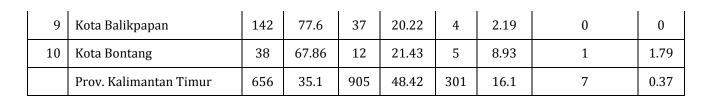
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019.

Berdasarkan kinerja sekolah yang tercermin dari akreditasnya, Sebagian sekolah di Kutai Barat masih didominasi oleh sekolah dengan Akreditasi C dan masih sedikit yang Terakreditasi A. Persentase sekolah yang Terakreditasi A di Kutai Barat termasuk yang terendah di Kalimantan Timur. Hal ini tentunya memerlukan perhatian sehingga mutu sekolah lebih meningkat. Meningkatnya mutu sekolah dalam jangka Panjang akan meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kutai Barat.

Tabel 2. 45 Perbandingan Akreditasi Sekolah di Kalimantan Timur Tahun 2019

Sekol	ah Dasar (SD)								
No.	Nama Wilayah	A	(%)	В	(%)	С	(%)	Tidak Terakreditasi	(%)
1	Kab. Paser	67	29.91	129	57.59	27	12.05	1	0.45
2	Kab. Kutai Kartanegara	125	26.65	263	56.08	79	16.84	2	0.43
3	Kab. Berau	30	20	100	66.67	20	13.33	0	0
4	Kab. Kutai Barat	26	12.44	80	38.28	102	48.8	1	0.48
5	Kab. Kutai Timur	104	48.83	79	37.09	28	13.15	2	0.94
6	Kab. Penajam Paser Utara	46	43.4	48	45.28	12	11.32	0	0
7	Kab. Mahakam Ulu	4	10.26	30	76.92	5	12.82	0	0
8	Kota Samarinda	74	33.64	127	57.73	19	8.64	0	0

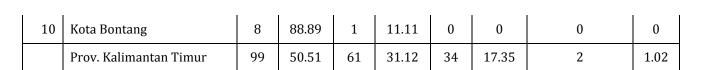




SMP									
No.	Nama Wilayah	A	(%)	В	(%)	С	(%)	Tidak Terakreditasi	(%)
1	Kab. Paser	25	32.89	26	34.21	25	32.89	0	0
2	Kab. Kutai Kartanegara	31	22.46	69	50	36	26.09	2	1.45
3	Kab. Berau	22	45.83	19	39.58	7	14.58	0	0
4	Kab. Kutai Barat	7	11.86	27	45.76	24	40.68	1	1.69
5	Kab. Kutai Timur	40	46.51	36	41.86	10	11.63	0	0
6	Kab. Penajam Paser Utara	10	31.25	19	59.38	3	9.38	0	0
7	Kab. Mahakam Ulu	5	33.33	4	26.67	6	40	0	0
8	Kota Samarinda	39	47.56	35	42.68	7	8.54	1	1.22
9	Kota Balikpapan	48	73.85	11	16.92	4	6.15	2	3.08
10	Kota Bontang	16	55.17	12	41.38	1	3.45	0	0
	Prov. Kalimantan Timur	243	38.57	258	40.95	123	19.52	6	0.95

MA									
No.	Nama Wilayah	A	(%)	В	(%)	С	(%)	Tidak Terakreditasi	(%)
1	Kab. Paser	10	55.56	1	5.56	6	33.33	1	5.56
2	Kab. Kutai Kartanegara	15	31.25	25	52.08	7	14.58	1	2.08
3	Kab. Berau	10	50	4	20	6	30	0	0
4	Kab. Kutai Barat	4	19.05	10	47.62	7	33.33	0	0
5	Kab. Kutai Timur	9	52.94	5	29.41	3	17.65	0	0
6	Kab. Penajam Paser Utara	1	50	0	0	1	50	0	0
7	Kab. Mahakam Ulu	0	0	1	100	0	0	0	0
8	Kota Samarinda	26	70.27	8	21.62	3	8.11	0	0
9	Kota Balikpapan	16	69.57	6	26.09	1	4.35	0	0





SMK									
No.	Nama Wilayah	A	(%)	В	(%)	С	(%)	Tidak Terakreditasi	(%)
1	Kab. Paser	7	63.64	2	18.18	2	18.18	0	0
2	Kab. Kutai Kartanegara	8	19.51	24	58.54	7	17.07	2	4.88
3	Kab. Berau	3	21.43	6	42.86	4	28.57	1	7.14
4	Kab. Kutai Barat	2	14.29	8	57.14	4	28.57	0	0
5	Kab. Kutai Timur	5	20	16	64	4	16	0	0
6	Kab. Penajam Paser Utara	3	30	5	50	2	20	0	0
7	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kota Samarinda	16	32.65	24	48.98	8	16.33	1	2.04
9	Kota Balikpapan	11	37.93	8	27.59	9	31.03	1	3.45
10	Kota Bontang	4	30.77	5	38.46	4	30.77	0	0
	Prov. Kalimantan Timur	59	28.64	98	47.57	44	21.36	5	2.43

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Permasalahan dalam pendidikan terletak pada aspek guru serta sarana dan prasarana pendidikan yang harus terus ditingkatkan sesuai perkembangan yang ada. Permasalahan pada guru terletak pada kuantitas dan kualitas. Kualitas sendiri dapat dilihat dari aspek jenjang pendidikan guru, kompetensi, serta sertifikasi profesi, sedangkan kuantitas selain jumlah guru secara keseluruhan, juga jumlah guru kaitanya dengan kompetensi mata pelajaran, yaitu kesesuaian mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan.

Tabel 2. 46 Tingkat Pendidikan Guru di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

	JENJANG		TINGKAT PENDIDIKAN								
NO	SEKOLAH	SLTA	D-2	D-3	S-1	S-2	S-3	JUMLAH			
1	1 PAUD		3	7	107	i	1	268			
2	TK/RA	214	8	8	160	-	-	390			
3	SD/MI	798	110	32	1.355	4	-	2.299			
4	SMP/MTs	22	6	36	955	11	-	1.030			
	JUMLAH	1.185	127	83	2.577	15	-	3.987			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubar 2021



Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga 2019/2020 masih ada guru yang berpendidikan di bawah D4/S1 dan Sebagian besar adalah guru PAUD dan SD. Untuk guru SMP terdapat 12,5% yang berpendidikan di bawah D4/S1 sedangkan untuk jenjang SMA terdapat 2,2% dan SMK masih ada 6,5%. Dari sisi sertifikasi profesi, Sebagian besar guru belum bersertifikasi profesi. Guru SD misalnya, hanya 18,6% yang bersertifikat sementara untuk SMP dan SMA masing-masing baru 21,8% dan 24,3% selanjutnya untuk SMK terdapat 11,6% yang belum bersertifikat. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan UU tentang Guru dan Dosen, kualifikasi guru di Kutai Barat masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan undang-undang.

KUALIFIKASI PENDIDIK PENDIDIK TERSERTIFIKASI 65.8 98,6% 100% 97,8% 93,5% 87,5% 65,79 PAUD SLB PAUD SMP SMA SMK SLB SMP SMA SMK ■≥D4/S1 ■<D4/S1 sudah belum

Gambar 2. 10 Kualifikasi Guru di Kutai Barat 2019/2020

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud R.I.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kutai Barat menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2018, meskipun dipandang masih sangat kurang. Peningkatan tersebut terjadi untuk sarana dan prasarana fisik seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta apotek. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kutai Barat dan luas wilayahnya, jumlah tersebut dipandang sangat kurang. Kekurangan tersebut juga terjadi di tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter yang sangat kurang. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk unsur tenaga kesehatan akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan penduduk.

Tabel 2. 47 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kutai Barat 2018





	JENIS SARANA	JUMLAH 2015 2016 2017 2018 2019 2020						
NO	PELAYANAN KESEHATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Puskesmas Puskesmas terdiri dari	19	19	19	19	19	19	19
	Puskesmas Perawatan dengan UGD	13	13	11	12	11	14	14
	Puskesmas Perawatan tanpa UGD	4	4	2	2	0	0	0
	Puskesmas non Perawatan dengan UGD	1	1	4 2	3 2	4	5 0	5
	Puskesmas non Perawatan tanpa UGD	1	1			2		0
2	Unit Pelayanan khusus (UPK) KM. Mook Manaar Bulatn	1	1	1	1	0	0	0
3	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	82	83	84	84	84	84	84
4	Puskesmas Keliling R 4	24	24	23	24	16	16	16
5	Puskesmas Keliling R 2	153	153	138	145	49	49	49
6	Puskesmas Keliling Air	15	15	16	16	0	6	6
7	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1	1	1
8	UPTD Gudang Farmasi Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1
9	UPTD Jamkesda	1	1	1	1	0	0	0
10	Poskesdes	3	3	3	3	3	3	3
11	Balai Pengobatan	19	19	39	18	2	0	0
12	РКМК	14	14	28	39	39	39	39
13	Polinkam	1	1	0	0	0	0	0
14	Apotik (berijin)	16	17	31	35	14	20	36
15	Toko Obat (berijin)	2	1	2	2	2	3	3
16	Posyandu	239	293	242	244	244	244	239
17	Desa Siaga Aktif	164	85	142	148	142	142	142
18	Praktek dokter Umum Perorangan (berijin)	87	48	85	30	60	67	67
19	Praktek dokter Gigi (berIjin)	7	5	10	11	11	16	16
20	Praktek dokter Sp. Kandungan (berijin)	1	2	2	2	2	3	3
21	Praktek dokter Sp. Anak (berijin)	1	1	2	1	2	3	3
22	Praktek dokter Sp. Bedah Umum (berijin)	1	1	1	1	2	2	2
23	Praktek dokter Sp. Fisik dan Rehabilitasi (Rehab Medik) (berijin)	1	1	1	1	1	1	1
24	Praktek dokter Sp. Anastesiologi dan terapi internsip (berijin)	1	1	1	1	1	1	1
25	Praktek Dokter Sp. Penyakit dalam (berijin)	1	2	1	3	1	1	1





NO	JENIS SARANA							
NO	PELAYANAN KESEHATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	Praktek Dokter Sp. Radiologi (berijin)	1	1	1	1	1	1	1
27	Praktek Dokter Sp. THT	0	0	0	1	1	1	1
28	Praktek Dokter Sp. Patologi Klinik	0	0	1	1		1	1
28	Praktek perawat ahli laboratorium medik (berijin)	2	2	25	23	25	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

Untuk kondisi 2019-2021 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tidak terdapat perubahan jumlah Puskesmas yaitu 19 unit, dan Puskesmas Pembantu di tahun 2021 sebanyak 84 unit, tetapi Dinas Kesehatan terus bekerjasama dengan Instansi terkait terutama Pemerintahan Kampung/Desa untuk membangun fasilitas kesehatan yang disebut Pos Kesehatan Masyarakat Kampung (PKMK) dan Pos Bersalin Kampung (Polinkam) dengan jumlah masing-masing 39 unit dan 3 unit.

Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk, sebaran penduduk, serta kondisi geografis Kutai Barat, jumlah ini dipadang masih belum memadai. Oleh karena itu pembangunan di bdaing kesehatan perlu diarahkan pada pemenuhan berbagai fasilitas Kesehatan agar pelayanan Kesehatan ke penduduk dapat berjalan lebih optimal.

Tabel 2. 48 Fasilitas Kesehatan Kutai Barat 2019-2020

Nama/Jenis	2019	2020	2021
Rumah Sakit	1	1	2
Poliklinik	11	9	21
Puskesmas	19	19	19
Puskesmas Pembantu	104	123	84
Apotek	14	20	36
Tenaga Kesehatan			
-Dokter	40	55	71



Nama/Jenis	2019	2020	2021
-Perawat	460	527	629
-Bidan	259	301	341
-Farmasi	59	69	95
-Ahli Gizi	23	31	35
-Tenaga SKM	46	50	53
-Tenaga Medis	66	85	106

Sumber: Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

Capaian Umur Harapan Hidup masyarakat di Kutai Barat pada tahun 2021 sebesar 73,10 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 72,89. Usia Harapan Hidup di Kutai Barat ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terjadi karena berbagai kendala bidang kesehatan yang dihadapi dalam meningkatkan usia harapan hidup, antara lain : ketersediaan sarana dan prasarana keseahtan yang memadai dan terjangkau, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan belum maksimal baik dari kualitas maupun kuantitas terutama ketersediaan tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis. Disamping itu peran serta masyarakat dan lintas sector belum terintegrasi dengan baik.

Perbandingan Usia Harapan Hidup di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur , dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 49 Perbandingan Umur Harapan Hidup (Tahun)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	71,8	71,83	71,85	71,86	71,88	71,98	72,02	72,05	72,28	72,52	72,62	
Kutai Barat	71,74	71,82	71,9	71,96	72,03	72,19	72,28	72,37	72,57	72,79	72,86	73,10
Kutai Kartanegara	71,41	71,44	71,46	71,48	71,5	71,6	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34	
Kutai Timur	72,08	72,16	72,23	72,3	72,37	72,39	72,45	72,51	72,76	73,03	73,16	
Berau	70,99	71,05	71,1	71,15	71,21	71,31	71,37	71,44	71,68	71,94	72,06	
Penajam Paser	70,28	70,34	70,4	70,43	70,48	70,53	70,8	70,82	71,05	71,3	71,41	





Utara												
Mahakam Ulu	70,83	70,91	70,98	71,05	71,12	71,13	71,19	71,25	71,56	71,9	72,10	
Balikpapan	73,9	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96	73,97	74,18	74,41	74,49	
Samarinda	73,49	73,53	73,56	73,59	73,63	73,65	73,68	73,71	73,93	74,17	74,27	
Bontang	73,63	73,65	73,66	73,67	73,68	73,69	73,71	73,72	73,94	74,18	74,28	
Kalimantan Timur	72,89	73,1	73,32	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	73,96	74,22	74,33	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Selain usia harapan hidup (UHH) indikator lain yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematia Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Balita umur 1-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup sebesar 13 di tahun 2015, dan naik menjadi 22 di tahun 2016. Namun, tahun 2017 dan 2018 AKABA menunjukkan penurunan menjadi 14 dan 13. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan, tetapi tren penurunan terjadi mulai tahun 2019 ke tahun 2021 dimana tahun 2019 AKB sebanyak 54, turun menjadi 44 tahun 2020 dan tahun 2021 mennjadi 30 kasus atau 14/1000 KH. Sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) belum menunjukan hasil yang memuaskan, pada tahun 2018 merupakan capaian terbaik Kabupaten Kutai Barat dengan 1 kasus kematian ibu, tetapi pada tahun 2019 naik menjadi 4 kasus dan tahun 2020 turun menjadi 3 kasus dan tahun 2021 naik menjadi 9 kasus. Kenaikan kasus kematian ibu tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya kasus Covid-19, sehingga dari 9 kasus 5 diantaranya disebabkan oleh karena Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kunjungi Ibu Hamil di Ke Fasilitas Kesehatan dan pertolongan persalinan oleh Nakes dengan capaian tahun 2021 masing-masih adalah 73,05 dan 62,71. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 50 Indikator Kesehatan Kutai Barat 2015-2021

NO	INDIKATOR KESEHATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Ibu Hamil K4	83,58%	74.15%	80.24%	82.52%	86,17	67,29	
	Cakupan ibu Haiiii K4	03,3070	74,1370	00,2470	02,3270			73,05
2	Pertolongan Persalinan	88,48%	73,31%		87,36%	86,60	68,60	62,71
	Normal	00,4070	73,3170	81,39%	07,30%			
3	Pelayanan Kunjungan Nifas	88,41%	76,58%	81,28%	87,36%	85,30	89,91	86,18





NO	INDIKATOR KESEHATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ibu Bersalin							
4	Angka Kematian Bayi	13/1000 KH	65 Kasus	38 Bayi	36 Bayi	54 Bayi	44 Bayi	30 Bayi
			22,2/1000	14,34/100	13,15/100	20,53/100	16,72	14/1000
			KH	0 KH	0 KH	0 KH	/1000 KH	KH
5	Angka Kematian Ibu	10 kasus	5 Kasus	3 kasus	1 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	9 Kasus
			202,82	113,25 /	36,55/	152,09	114,03/	418,99/
			/100.000	100.000	100.000	/100.000	100.000	100.000
			KH	KH	KH	KH	KH	KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Barat 2021

Angka kematian bayi pada tahun 2020 di Kutai Barat adalah sebanyak 44 kasus / 14,72 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini meningkat dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 54 kematian/ 20,53 per 1.000 kelahiran hidup. Menurunya Angka Kematian Bayi dalam tahun 2020 disebabkan sistem pendataan yang lebih baik sehingga kasus kematian bayi cepat terlacak. Dengan demikian Jika dibandingkan target Nasional tahun 2020 sebesar 38 Per 1000 Kelahiran Hidup, maka angka kematian Bayi di Kabupaten Kutai Barat dibawah target Nasional dan termasuk tinggi.

Gambar 2. 11 Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat

Dari sisi imunisais balita, hingga 2019 Kutai Barat memiliki kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. Capaian imunisasi balita tahun 2019 di Kutai Barat lebih tinggi dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk semua jenis imunisasi. Imunisasi Polio bahkan menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Balikpapan dan imunisasi BCG masuk peringkat ke 3 setelah Kabupaten Berau. Jenis imunisasi yang persentasenya masih ecil





adalah imunisasi campak/morbilli yaitu 73,41% namun kecilnya persentase imunisasi campak/morbilli ini juga terjadi di seluruh daerah di Kalimantan Timur.

Tabel 2. 51 Perbandingan Imunisasi Balita di Kalimantan Timur Tahun 2019

Walana at an /Wata			Jenis Imunisa	si	
Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/Morbili	Hepatitis B
Kabupaten Paser	89,29	84,66	89,46	69,45	84,65
Kabupaten Kutai Barat	92,05	89,47	94,83	73,41	88,97
Kabupaten Kutai Kartanegara	82,43	80,18	83,99	72,57	76,06
Kabupaten Kutai Timur	87,44	81,85	86,54	66,85	81,59
Kabupaten Berau	92,92	85,60	92,88	75,16	88,58
Kabupaten Penajam Paser Utara	90,88	86,07	93,74	74,80	87,57
Kabupaten Mahakam Hulu	85,48	85,84	85,61	68,24	81,52
Kota Balikpapan	93,72	90,18	95,73	75,40	93,10
Kota Samarinda	86,11	84,91	88,21	64,35	87,85
Kota Bontang	89,22	88,90	92,85	67,83	93,12
Kalimantan Timur	88,05	84,88	89,49	70,46	85,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019.

Indikator berikutnya untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah melalui angka kesakitan (morbiditas) yang menggambarkan keluhan kesehatan masyarakat. Indikator ini merupakan keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya.

Angka kesakitan di Kutai Barat tahun 2019 tergolong cukup tinggi yaitu 18,45% sementara di tingkat provinsi hanya 11,77%. Angka kesakitan di Kutai Barat tersebut adalah yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Dari Angka kesakitan tersebut, sebanyak 16,94% dan laki-laki 20,14%.

Tabel 2. 52 Persentase Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kalimantan Timur, Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Kabupaten Paser	5,84	9,87	7,73





Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Kabupaten Kutai Barat	16,94	20,14	18,45
Kabupaten Kutai Kartanegara	9,25	11,12	10,14
Kabupaten Kutai Timur	11,74	13,25	12,43
Kabupaten Berau	13,38	15,66	14,44
Kabupaten Penajam Paser Utara	8,10	10,39	9,20
Kabupaten Mahakam Ulu	8,18	9,03	8,58
Kota Balikpapan	8,28	9,16	8,70
Kota Samarinda	13,69	16,51	15,05
Kota Bontang	11,32	15,32	13,19
Kalimantan Timur	10,71	12,94	11,77

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019.

BOR Tahun 2020 mengalami penurunan dari target 75 % dan realisasi capaian 59 %. Disebabkan turunya jumlah kunjungan pasien rawat Inap ke Rumah Sakit yang disebabkan pada tahun 2020 munculnya keadaan bencana non alam yaitu pandemi covid-19 sehingga animo masyarakat mengunjungi fasilitas Kesehatan menjadi berkurang dengan alasan takut covid-19.

BOR Tahun 2021 juga masih mengalami penurunan dari target 61% dan capaian 56%. Jumlah kunjungan pasien rawat Inap pada tahun 2021 masih belum kembali membaik terkait pandemi covid-19 masih belum mereda disamping itu Rumah sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar juga membuka ruang pelayanan isolasi covid-19 sehingga ada pengurangan tempat tidur (BED) yang dibagi untuk menampung pasien covid-19

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi.

Perkuatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa penyediaan akses perumahan dan





permukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sedangkan infrastruktur ekonomi dengan prioritas pada konektivitas jalan untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dan transformasi digital juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan serta penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Infastruktur jalan menjadi prioritas utama yang terus dibangun di Kutai Barat. Kondisi jalan yang baik akan sangat mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada berjalannya roda perekonomian daerah dengan lancar. Pembangunan infrastruktur jalan di Kutai Barat, sesuai target RPJMD untuk mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi mantap. Menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang.

Tabel 2. 53 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2021 (dalam Km)

Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Kutai	Tahun						
Barat	2016	2017*	2018*	2019	2020	2021	
Baik (Mantap)	1.038	1.215	1.290	667,67	715,1	760,1	
Sedang (Mantap)	801	198	223	214,82	196,6	208,6	
Rusak Ringan	124	189	119	94	84,04	100,04	
Rusak Berat	79	223	193	111,25	100,9	92,9	
Tidak Terdata (tanah)	-			196,25	186,35	125,33	
Jumlah	2.042	1.825	1.825	1.283,99	1.286,97	1.286,97	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutai Barat, 2022

Dari tabel di atas jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 kondisi jalan mantap (baik dan sedang) sepanjang 968,7 Km. Pada tabel di atas data untuk tahun 2017 dan 2018 merujuk ke SK Gubernur Nomor 622/K.294/2018 tentang Fungsi Jalan Kalimantan Timur, terlihat adanya penurunan panjang





jalan di Kabupaten Kutai Barat. Hal ini terjadi setelah proses verifikasi dan penurunan tersebut dikarenakan sebagian ruas jalan yang terdata merupakan ruas jalan swasta atau milik perusahaan tambang, perusahaan kayu dan perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Pada tabel di atas juga terlihat adanya penurunan ruas jalan dengan kondisi rusak ringan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2017 ruas jalan dengan kondisi rusak adalah 189 Km menjadi 84,04 Km pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan ruas jalan dengan kondisi rusak ringan yaitu 100,04 Km. Sedangkan untuk ruas jalan dengan kondisi rusak berat terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 kondisi rusak berat 223 km dan menjadi 92,9 pada tahun 2021. Adapun Kabupaten Kutai Barat dalam proses penyusunan SK Bupati untuk Jalan Kabupaten pada tahun 2022, sehingga secara umum data jalan yang digunakan mengacu pada SK Gubernur Nomor 622/K.294/2018 tentang Fungsi Jalan Kalimantan Timur.

Pandemi Covid tahun 2019-2021 lalu menyebabkan adanya kebijakan realokasi anggaran sehingga perhatian pemerintah lebih diutamakan pada aspek kesehatan dan ekonomi. Selain itu kondisi geografis Kutai Barat serta jarak antar kecamatan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengerasan jalan. Prioritas pembangunan jalan adalah jalan yang mampu meningkatkan akses masyarakat antar wilayah, sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa di Kutai Barat. Selain itu, pembangunan jalan diharapkan mampu mengatasi keterisoliran beberapa kampung atau daerah yang terjadi selama ini. Kelancaran akses antar wilayah akan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga tingkat ketimpangan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang ada di antara wilayah dapat direduksi.

Infrastruktur pelayanan dasar untuk cakupan layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman menjadi prioritas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi kabupaten/kota sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Secara umum





dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Berdasarkan Permen PUPR nomor 29/PRT/M/2018 indikator capaian layanan air minum merupakan persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari minimal 60 liter/org/hari dari sisi kuantitas air. Sedangkan dari sisi kualitas memenuhi parameter fisik air berupa tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau. Berikut adalah data cakupan layanan air minum layak Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 – 2021.

Tabel 2. 54 Cakupan Layanan Air Minum Layak Tahun 2019 - 2021

NO	DATA INFRASTRUKTUR AIR MINUM	2019	2020	2021	Keterangan			
					PDAM dan Non			
1	Akses Layanan Air Minum Perpipaan	57,64%	67,37%	77,82%	PDAM (Pamsimas/			
					SPAM Pedesaan)			
2	Akses Layanan Air Minum Bukan Jaringan		4,82%	8,19%	Hydrant Umum/			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Perpipaan (BJP)	2,74%	4,02%	0,19%	SPAM Pedesaan			
Akses Air Minum Layak		60,38%	72,19%	86,02%				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutai Barat, 2022

Cakupan layanan air minum layak terdiri dari akses layanan air minum perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Capaian akses layanan tahun 2019 mencapai 60,38% dari 164.048 jiwa penduduk Kutai Barat, terdiri dari 57,64% dari layanan perpipaan PDAM dan Non PDAM serta 2,74% dari layanan bukan jaringan perpipaan berupa *Hydrant* Umum melalui layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan. Cakupan layanan penyediaan air minum layak tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 72,19 % dari 165.938 jiwa penduduk Kutai Barat. Cakupan layanan dari system perpipaan baik PDAM maupun Non PDAM sebesar 67,37% dan melalui layanan bukan jaringan perpipaan sebesar 4,82%. Capaian akses layanan air minum layak terus mengalami peningkatan menjadi 86,02 % pada tahun 2021 dari 170.871 jiwa penduduk Kutai Barat. Cakupan layanan dari system perpipaan baik PDAM maupun Non PDAM sebesar 77,82% dan melalui layanan bukan jaringan perpipaan sebesar 8,19%.





Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma dan standar. Dari sisi kuantitas, setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. Sedangkan dari sisi kualitas pelayanan dasar, meliputi:

- 1. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- 2. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Akses sanitasi aman merupakan cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat/ Terpadu, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan tangki septik komunal maupun individual yang memenuhi keriteria aman, yaitu kedap air. Kutai Barat telah memiliki 2 IPAL yang berada di kampung Engkuni Pasek dan Kampung Dempar, dan IPLT di TPA Belau. Operasional IPLT masih belum optimal disebabkan oleh belum adanya Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan tangki septik yang digunakan mayoritas bukan tangki septik kedap air. Selain itu, sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Kutai Barat didominasi oleh sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Hal ini dikarenakan kondisi administrasi dan kepadatan penduduk masih kecil, sehingga sistem yang efektif diterapkan adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS).

Berikut adalah data prosentase pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD) Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 – 2021.

Tabel 2. 55 Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 - 2021

NO	DATA INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH	2019	2020	2021	Keterangan
1	Akses Sanitasi Aman	0,95%	1,54%	1,86%	IPAL/ IPLT/ Septictank Komunal
2	Akses Sanitasi Layak	71,12%	77,10%	74,18%	Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), Jamban Sharing (JSH)
3	Akses Belum Layak	11,08%	5,92%	9,1%	Pengolahan air buangan bersifat tradisional/ sederhana
4	BABS (Tanpa Akses)	16,85%	15,44%	14,86%	Buang Air Besar Sembarangan





Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutai Barat, 2022

Akses sanitasi aman adalah akses sanitasi dengan tangki septik kedap air yang disedot setidaknya 5 tahun terakhir dan diolah dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Capaian akses sanitasi aman mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 capaian akses sanitasi aman sebesar 0,95%, 1,54% pada tahun 2020 dan 1,86% pada tahun 2021. Akses sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan dengan kepadatan > 25 jiwa/ Ha berupa tangki septik yang tidak kedap air dan tidak disedot. Akses layak khusus kawasan pedesaan dengan kepadatan < 25 jiwa/ Ha, bangunan bawah berupa lubang tanah. Berdasarkan data Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian Kesehatan untuk wilayah Kutai Barat, akses sanitasi layak tahun 2019 sebesar 71,12% dan 77,10% di tahun 2020 serta 74,18% pada tahun 2021. Adapun kategori sanitasi layak berupa Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), dan Jamban Sharing. Sedangkan akses sanitasi belum layak berupa pengolahan air buangan bersifat tradisional/ sederhana, misalnya di Kawasan perkotaan masih berupa lobang tanah. Akses belum layak di tahun 2019 sebesar 11,08% dan menurun menjadi 5,92% pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 9,1 %. Pelaku Buang Air besar Sembarang (BABS) di Kutai Barat tahun 2019 mencapai 16,85% dan menurun menjadi 15,44% di tahun 2020 serta menjadi 14,86 % di tahun 2021.

Sanitasi terdiri dari 2 sub sektor yaitu sub sektor air limbah dan sub sektor persampahan. Sub sektor persampahan yang melekat pada urusan Pekerjaan Umum berupa pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Sedangkan untuk pengelolaan sampah menjadi urusan Lingkungan Hidup.

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Kutai Barat masih didominasi oleh upaya penanganan sampah melalui kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat sebanyak 168.348 jiwa pada tahun 2021 dengan komposisi jumlah penduduk perkotaan sebanyak 74.159 jiwa dan penduduk perdesaan sebanyak 94.189 jiwa. Jumlah penduduk tersebut berbanding lurus dengan potensi timbulan sampahnya. Potensi timbulan sampah kawasan perkotaan adalah 29,59 ton/hari dan timbulan sampah perdesaan adalah sebesar 37,75 ton/hari. Komposisi sampah di Kabupaten Kutai Barat didominasi jenis sampah organik sebesar 70%, sampah non organik sebesar 28 % dan sampah B3 sebesar 2%.





Hasil capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Barat skala perkotaan sebesar 41,48 % untuk penanganannya di tahun 2021 sedangkan untuk capaian pengurangan sampah sebesar 1,81 % pada tahun 2021. Untuk capaian pengurangan sampah sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Kutai Barat belum memiliki prasarana pengurangan sampah.

Tabel 2. 56 Cakupan Layanan Persampahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 - 2021

No	Komponen	2019	2020	2021	Keterangan
1	Penanganan Sampah Perkotaan	32,00%	51,50%	41,48%	Wilayah Perkotaan Sendawar
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	0,00%	0,00%	1,81%	

Sumber: Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2022

Infrastruktur irigasi dan sumber daya air baku mendukung pengembangan sektor pertanian dan tanaman pangan dalam arti luas. Tahun 2021 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 293,24 Ha atau 1,94% dari luas irigasi kabupaten sebesar 15.149 Ha. Rasio tersebut masih sangat kecil dari luas irigasi kabupaten secara keseluruhan. Untuk mendukung kemandirian pangan dan mendukung Ibukota Negara baru, sektor irigasi masih perlu mendapat perhatian.

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

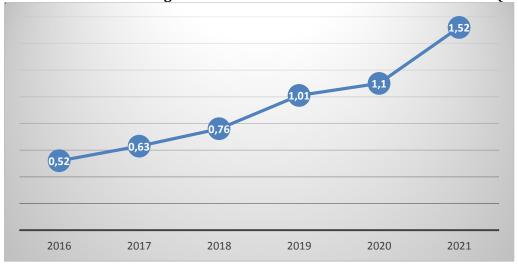
Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau adalah sebesar 30% dari luas wilayah sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007. Rasio Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Sendawar baru mencapai 11,2% atau seluas 693,34 Ha terhadap luas Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan sendawar yang diamanatkan dari luas wilayah perkotaan sendawar sebesar 20.591 Ha. Sedangkan untuk rasio Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaaan Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 13,95% persen atau seluas 3.356 Ha dari luas target yang ditetapkan pada tahun 2018 seluas 7.217,2 Ha. Upaya untuk meningkatkan rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Sendawar akan terus dilakukan melalui pembangunan Hutan Kota, alun-alun, pembangunan jalur hijau dan optimalisasi RTH Privat sejalan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sendawar.





Indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah tidak mengalami peningkatan dikarenakan pembangunan kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, masih dalam proporsi tata ruang yang diperuntukan untuk RTH dan belum ada penambahan kawasan baru. Saat ini salah satu masalah penggunaan lahan yang paling penting adalah masalah berkurangnya luasan hutan akibat konversi hutan menjadi perkebunan atau untuk area pembangunan sarana-prasarana seperti jalan raya.

Urusan penataan ruang lainya adalah masalah bangunan yang ber IMB. Setiap bangunan yang berdiri di Kutai Barat harus memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini harus dipenuhi agar bangunan yang berdiri sesuai dengan tata ruang yang ditentukan atau tersirat dalam Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Perlu juga diketahui, bahwa dengan membuat IMB maka secara langsung masyarakat telah memberikan kontribusi berupa retribusi bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tentunya turut berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Kutai Barat melalui dana retribusi tersebut.



Gambar 2. 12 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kutai Barat Tahun 2016 - 2021 (Dalam Persen)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kutai Barat, 2021

Sampai pada tahun 2021 jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 819 unit. Selama tahun 2021 terdapat penambahan 220 unit bangunan yang telah memiliki IMB dari sebelumnya 599 unit di tahun 2020 dari total bangunan 53.965 unit. Jika dilihat dari rasio bangunan ber-IMB maka sampai tahun 2021 hanya mencapai 1,52% persen.



RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk mendukung pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan implementasi di dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kabupaten Kutai Barat telah menyusun RDTR Perkotaan Sendawar, RDTR Kecamatan Linggang Bigung, dan RDTR Sendawar Timur. Adapun penyusunan RDTR Sendawar Timur dilaksanakan melalui anggaran pemerintah pusat dalam mendukung kabupaten/ kota dalam percepatan implementasi OSS untuk percepatan perizinan berusaha.

2.3.1.4. Perumahan dan Permukiman

Urusan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kutai Barat yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah terkait permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH). Tercatat masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kecamatan Barong, Sekolaq Melak, Damai. dan Muara Lawa. Untuk rumah tidak layak huni tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Berikut merupakan data luasan Kawasan permukiman kumuh dan jumlah RTLH di Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 2. 57 Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Jumlah RTLH 2021 di Kabupaten Kutai Barat

No	Jenis Data	Volume	Satuan	Keterangan
1	Luas Kawasan Permukiman	8.024,17	На	16 Kec
2	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	3.459,45	На	Barong, Sekolaq Melak
3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai Sk Bupati No. 592/K.425/2021 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	1.045,63	На	Barong, Sekolaq Melak, Damai. M.Lawa
4	Kumuh Perkotaan Sesuai Sk Bupati No. 592/K.425/2021 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	622,15	На	Barong, Sekolaq Melak
5	Kumuh Pedesaan Sesuai Sk Bupati No. 592/K.425/2021 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	423,48	На	Muara Lawa, Damai
6	Jumlah Rumah Se Kubar	33.326	Unit	16 Kec
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Sekubar	7.402	Unit	16 Kec
8	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	952	Unit	Barong, Sekolaq Melak

Sumber: Dinas Perkim Kutai Barat, 2021





2.3.1.5. Urusan Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bagi terdiri dari Sekretariat sebagai pelaksana penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian. Bidang Ekonomi sebagai pelaksana dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian dan Perikanan, Pertambangan dan energi, industri, perdagangan dan pariwisata serta pengembangan dunia usaha. Bidang Sosial Budaya sebagai pelaksana dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, kesejahteraan sosial, kependudukan dan ketenagakerjaan, pemerintahan dan aparatur. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagai pelaksana dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Penata Ruang dan Pemukiman, pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Bidang Penelitian, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan sebagai pelaksana dan mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan penelitian, pengumpulan data analisis penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengkajian wilayah dan pembiayaan pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Barat bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengganggaran, dan pengawasan serta menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif.

Misalnya dalam hal keselarasan antara RKPD yang sinergis dengan mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Pada pelaksanaan penyusunannya, dengan mempedomani RPJMD Kabupaten maka prioritas dan sasaran pembangunan tahunan pada RKPD diupayakan semaksimal mungkin selaras dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD sehingga rencana program serta kegiatan prioritas tahunan pada RKPD akan selaras dengan indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD.





Gambar 2. 13 Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2020



Dari 196 program yang termuat dalam RPJMD Kutai Barat Tahun 2016-2021, sejumlah 191 Program telah terakomodir dalam dokumen RKPD Kutai Barat tahun 2020. Artinya Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD telah tercakup sebesar 97,44 %. Hal ini menunjukkan konsistensi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kutai Barat dalam merealisasikan Program yang tercantum dalam RPJMD ke dalam RKPD. Dibalik pencapaian kinerja yang baik tersebut, masih terdapat beberapa Program yang berbeda dengan di RPJMD yang luput dari pengamatan BP3D. Oleh karena itu pada RKPD 2022 nanti BP3D akan lebih selektif lagi dalam mengamati Program yang diajukan SKPD dan menyesuaikan program-program dengan Rancangan Awal RPJMD 2021 - 2026.

Dalam pelaksanaan Evaluasi RKPD semester II Tahun 2021 terdapat keselarasan Program antara RPJMD dan RKPD adalah sebesar 95,5 %, hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMD Kutai Barat 2016 – 2021 masih memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga Bappeda harus menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Pada Tahun 2021 dilaksanakan penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Kutai Barat dan sudah mempedomani sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sudah dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2021 juga menyusun RKPD Kutai Barat Tahun 2022 dengan proses penyusunan dimulai dari Konsultasi Publik,





Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga menghasilkan dokumen RKPD Kutai Barat Tahun 2022. Pada akhir Tahun 2021 ada perubahan nomenkaltur terhadan Badan Perencanaan Penelitian Pengembagan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga ada sedikit perubahan dalam struktur organisasi.

2.3.1.6. Urusan Perhubungan

Dalam masa Pandemi Covid-19, dengan adanya edaran larangan bepergian dan penutupan sementara akses angkutan umum turut mereduksi jumlah penumpang angkutan umum dan jumlah barang yang terangkut melalui angkutan umum.

Tabel 2. 58 Perkembangan Angkutan Umum

Keterangan	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum:				
Laut/Sungai (Orang)	Org	144.771	87.465	97.375
Darat (Orang)	Org	34.952	10.885	7.826
Udara (Orang)	Org	58.205	13.653	2.954

Sumber: Dinas Hubkominfo Kutai Barat 2019-2021

Jumlah penumpang yang terangkut menggunakan angkutan umum sungai di tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 57.306 orang dari tahun 2019, dengan jumlah penumpang yang terangkut sebanyak 87.465 orang dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang terangkut sebanyak 97.375 orang. Jumlah penumpang angkutan umum yang menggunakan akses darat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 34.952 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 10.885 orang serta sebanyak 7.826 orang pada tahun 2021. Sedangkan jumlah penumpang yang menggunakan akses udara juga mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 58.205 orang menggunakan akses udara, sebanyak 13.653 orang pada tahun 2020 dan sebanyak 2.954 orang pada tahun 2021.





Tabel 2. 59 Arus Orang Ke dan Dari Wilayah Kutai Barat Tahun 2016 - 2020

., .	Tahun									
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020					
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum										
Sungai (orang)	86.610	54.620	124.906	144.771	87.465					
- Darat (orang)	11.611	8.598	37.811	34.952	10.885					
- Udara (orang)	33.075	25.002	29.715	58.205	13.653					

Sumber: Dinas Perhubungan 2021

Dalam hal perhubungan udara, saat ini hanya terdapat 1 maskapai penerbangan yang beroperasi di Kutai Barat yaitu Susi Air yang melayani penerbangan ke Melak – Samarinda/Datah Dawai PP dimana dalam seminggu hanya 2 hari beroperasi. Dalam hal perhubungan darat, permasalahan lainnya adalah pada belum tersedianya terminal tipe B maupun C yang representatif di Kabupaten Kutai Barat.

2.3.1.7. Urusan Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan dan perilaku dunia usaha disegala sektor akan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup baik positif maupun negatif. Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan memaksimalkan dampak positif dan meng-eliminir dampak negatif.

Berdasarkan karakteristik dan aktivitas manusia dan kegiatan usahanya diperkirakan akan mempengaruhi perubahan -perubahan sebagai berikut:

- a. Perubahan pada air permukaan;
- b. Perubahan pada kualitas udara;
- c. Perubahan pada Rona Awal Lingkungan Hidup;

Permasalahan lingkungan hidup timbul seiring dengan kemajuan segala bidang, termasuk kemajuan dunia usaha baik usaha rumah tangga, industri, pertambangan, pertanian dan perumahan sehingga mutlak memerlukan kesadaran dan partisipasi dari segala pihak. Saat ini dirasakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain masih terbatasnya data dan informasi lingkungan hidup. Pelaksanaan program strategis pada bidang Lingkungan hidup antara lain: Adipura, Menuju Indonesia Hijau dan PROPER. Tujuan yang ingin dicapai melalui urusan Lingkungan Hidup adalah:





- 1. Sumberdaya alam Kutai Barat dikelola secara terarah, terencana dan berkelanjutan.
- 2. Keseimbangan Lingkungan hidup terpelihara.
- 3. Pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan hidup yang handal akan terbentuk, untuk peningkatan mutu Lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan.
- 4. Sistem pengolahan Lingkungan hidup kondusif serta terbentuk kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelestarian Lingkungan hidup.
- 5. Tata ruang wilayah yang sesuai dengan kebutuhan akan terbentuk.

Usaha yang dilakukan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan Badan Lingkungan Hidup Kutai Barat, dilakukan dengan mengembangkan berbagai kebijakan kemudian dilaksanakan secara operasional melalui program-program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dapat berhubungan langsung dengan kebijakan, tetapi ada yang merupakan program inti Badan Lingkungan Hidup yang mendukung seluruh tujuan dan Visi dan Misi. Kebijakan penghijauan areal tambang misalnya, sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keseimbangan alam.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tahun 2014 mencapai 35%, dan tahun 2015 meningkat menjadi 38% berdasarkan rasio perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi terhadap seluruh perusahaan wajib AMDAL. Apabila jumlah perusahaan yang diawasi pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan 9 perusahaan atau 9,7% dari jumlah perusahaan wajib AMDAL (93 Perusahaan).

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh perusahaan tersebut diatas, dibutuhkan penambahan tenaga pengawas yang memiliki kompetensi dan bersertifikat, dan efektifitas pengawasan pelaksanaan AMDAL sehingga upaya mempertahankan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran semua stakeholder bahwa pengawasaan pelaksanaan AMDAL merupakan tanggung jawab semua pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing. AMDAL harus dilakukan secara sinergis dan terintegrasi terhadap ijin usaha dan kegiatan. Oleh kerena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan bimbingan teknis terhadap aparatur dan sosialisasi pelaksanaan AMDAL kepada 93 perusahaan tersebut.

Semua perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi sumber daya alam diklasifikan sebagai perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup baik itu perusahaan





tambang, kayu dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saat ini perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang wajib AMDAL sebanyak 127 perusahaan yang terdiri dari: 75 perusahaan tambang, 25 perusahaan perkebunan.

Dari semua perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan baru 93 perusahaan yang sebagian besar perusahaan tambang yang memiliki AMDAL, sedangkan pada tahun 2014 yang memiliki AMDAL 92 perusahaan atau meningkat sebesar 1,17%. Peningkatan yang relatif kecil tersebut perlu pengawasan lebih ketat terutama perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan pemberian sanksi penundaan perpanjangan izin operasi atau pencabutan izin operasi bisa menjadi langkah kebijakan tetap yang harus ditempuh.

Semakin tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Kutai Barat yang meliputi aktifitas perkebunan, pertambangan dan pemukiman serta semakin bertambahnya penduduk membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan. Dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan hidup tersebut kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada upaya untuk mewujudkan fungsi sumber daya dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan. Untuk menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) yang berkuallitas untuk menjamin tersedianya pembangunan daerah secara berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sebesar 76,47%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 78,58%.

Sejumlah 190 kampung di kutai Barat 60-70 % ber-interaksi dengan hutan sehingga peran kubar dalam menjaga paru paru dunia sangat diperhitungkan. Tata Kelola lahan dan Hutan yang masih lemah Menyebabkan Masalah alih fungsi lahan. Masalah alih fungsi lahan telah menimbulkan dampak munculnya konflik social masyarakat. Selain itu, masalah persampahan juga memerlukan perhatian di Kutai Barat.





2.3.1.8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam urusan kependudukan, pemerintah daerah memberikan pelayanan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan. Kegiatan tersebut dapat digambarkan dari beberapa indikator seperti kepemilikan KTP, akte, dan dokumen lainnya. Tingkat kepemilikian KTP pada tahun 2016 mencapai 82,93 % dan pada tahun 2017 naik menjadi 89,36%, Tahun 2018 95,07%, Tahun 2019 98,30 % dan tahun 2020 meningkat menjadi 99,08%. Indikator kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk menunjukkan kenaikan dari 197,090 di tahun 2016 menjadi 417,613 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 menunjukkan kenaikkan mencapai 440,747 .

Tabel 2. 60 Kinerja kependudukan dan Catatan Sipil

Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kepemilikan KTP	%	82,93	89,36	95,07	98,30	99,08	99,74
Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	31,157	34,789	53,942	62,680	69,298	440,747
Belum memiliki akta kelahiran per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	126,928	125,121	108,258	101,368	96,640	559,252
Persentase bayi berakte kelahiran	%	65,41	70,36	76,66	85,08	92,56	93,44
Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	11,73	13,39	21,35	41,63	75,81	47,31

Sumber: Dinas Dukcapil Kutai Barat 2020

Pada tahun 2021 kepemilikan akta kelahiran 44,07% dibandingkan Kondisi tahun 2020 menunjukkan sebanyak 42,00% penduduk telah memiliki akte kelahiran dan sebanyak 58,23% tidak memiliki akte kelahiran. Jumlah penduduk yang tidak memiliki akte tersebut tegolong cukup besar dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur.

Demikian pula dengan kepemilikan akte perkawinan yang tergolong masih 0% di tahun 2016 naik menjadi 22,00 % di tahun 2017 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 43,11%, kepemilikan akta perkawinan ditahun 2021 47,31%. Sosialisasi tentang pentingnya kepemilikian dokumen kependudukan masih perlu dilakukan secara intensif. Keterlibatan kampung dalam identifikasi kepemilikan dokumen perlu diintensifkan.





Tabel 2. 61 Perbandingan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2021

	Men	niliki	Tidak	Tidak		
Kabupaten/Kota	Dapat Tidak Dapat Ditunjukkan Ditunjukkan		Memiliki	tahu	Jumlah	
Kabupaten Paser	75,9	13,94	10,16	0	100	
Kabupaten Kutai Barat	44,07	-	55,92	-	100	
Kabupaten Kutai Kartanegara	80,79	12,07	7,12	0,02	100	
Kabupaten Kutai Timur	60,07	25,89	14,04	0	100	
Kabupaten Berau	68,23	26,4	5,37	0	100	
Kabupaten Penajam Paser Utara	58,27	39,93	1,8	0	100	
Kabupaten Mahakam Hulu	73,99	17,62	7,2	1,19	100	
Kota Balikpapan	72,43	25,34	2,23	0	100	
Kota Samarinda	73,5	20,11	5,67	0,72	100	
Kota Bontang	84,03	14,62	1,16	0,19	100	
Kalimantan Timur	73,21	20,16	6,42	0,21	100	

Sumber: Statistik Kesejahteran Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Dalam hal status Nomor Induk Kependudukan (NIK), di Kutai Barat sebanyak 94,56% telah memiliki NIK dan sisanya 5,44% belum memiliki NIK. Jumlah penduduk Kutai Barat yang belum memiliki NIK ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan daerah lain di Kalimanta Timur. Dengan demikian masalah administrasi kependudukan masih belum berjalan secara optimal.

Tabel 2. 62 Perbandingan Kepemilikan NIK Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Kabupaten Paser	98,23	97,32	97,8
Kabupaten Kutai Barat	94,52	94,61	94,56
Kabupaten Kutai Kartanegara	97,16	97,64	97,39
Kabupaten Kutai Timur	95,65	96,53	96,06
Kabupaten Berau	95,32	96,54	95,88
Kabupaten Penajam Paser Utara	98,54	97,9	98,24
Kabupaten Mahakam Hulu	95,5	96,28	95,87
Kota Balikpapan	97,55	98,31	97,92
Kota Samarinda	96,43	97,55	96,97





Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
Kota Bontang	99,29	99,4	99,34	
Kalimantan Timur	96,91	97,5	97,19	

Sumber: Statistik Kesejahteran Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Aspek kependudukan yang juga perlu dperhatikan adalah upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana. Pengendalian penduduk perlu dilakukan dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan bukan saja dari aspek ekonomi, namun juga dari aspek Kesehatan dan social.

Dalam hal penggunaan alat kontrasepsi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk, pada tahun 2020 sebagian besar wanita di Kabupaten Kutai Barat yang berumur 15-49 tahun menggunakan alat kontrasepsi berupa pil yaitu sebanyak 40,66%. Hal ini berbeda dengan di provinsi Kalimantan Timur yang Sebagian besar menggunakan suntik yaitu 38,83%. Metode kedua yang banyak dpergunakan adalah penggunaan suntik yang mencapai 39,6%. Persentase terkecil adalah yang menggunakan metode menyusui alami, yaitu 0% sementara pengguna kondom dan diafragma masing-masing hanya sekitar 1,55% dan 0,53%.

Tabel 2. 63 Jumlah Wanita 15-49 Tahun Berdasarkan Jenis Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Berau, 2020 (%)

Kabupaten/ Kota	Tubek tomi	Vasek tomi	Spiral	Suntik	Implan	Pil	Kondom	Kondom Wanita/ Diafragma	Metode Menyusui Alami	Kalender	Lainnya	Total
Kabupaten Paser	1,42	0,48	8,54	45,81	7	34,87	1,16	0	0,52	0,2	0	100
Kabupaten Kutai Barat	4,43	0,95	3,74	39,6	6,54	40,66	1,55	0,53	0	1,72	0,28	100
Kabupaten Kutai Kartanegara	3,11	0	7,57	32,64	2,8	34,47	2,19	0,69	14,75	1,61	0,17	100
Kabupaten Kutai Timur	2,25	0,11	2,77	55,14	6,95	25,06	1,39	0	1,63	4,45	0,25	100
Kabupaten Berau	2,22	0,49	12,04	46,3	6,24	30,44	0	0	0	2,27	0	100
Kabupaten Penajam Paser Utara	5,36	0	9,46	38,94	7,61	36,12	0,7	1,02	0	0	0,79	100
Kabupaten Mahakam Hulu	4,38	0,78	1,71	48,64	19,17	25,01	0,31	0	0	0	0	100
Kota Balikpapan	6,23	0,66	17,29	32,53	10,58	20,15	4,1	0	6,09	1,57	0,8	100





Kabupaten/ Kota	Tubek tomi	Vasek tomi	Spiral	Suntik	Implan	Pil	Kondom	Kondom Wanita/ Diafragma	Metode Menyusui Alami	Kalender	Lainnya	Total
Kota Samarinda	3,41	0	8,61	39,75	3,61	31,9	2,91	0,46	7,73	1,62	0	100
Kota Bontang	5,17	0	27,91	27,49	6,69	17,89	11,59	0	0,4	2,48	0,38	100
Kalimantan Timur	3,65	0,23	10,07	38,83	5,9	29,88	2,7	0,33	6,37	1,78	0,26	100

Sumber: Statistik Kesejahteran Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

2.3.1.9. Urusan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dan peran perempuan merupakan salah satu indikator dalam rangka pencapaian misi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di samping indikator beberapa indikator penting lainnya. Peran perempuan pada saat ini selalu diupayakan dalam berbagai momentum dan kegiatan sehingga diharapkan dapat berdampak positif secara universal dalam pembangunan baik secara mikro dan makro. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu rumusan dalam MDGs, yang meliputi poinpoin: (a) rasio anak perempuan di sekolah (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), (b) angka melek huruf perempuan, (c) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan, dan (d) keterwakilan perempuan dalam tugas-tugas sebagai wakil rakyat.

Pembangunan dengan pendekatan gender merupakan pendekatan pembangunan yang saat ini digunakan oleh Indonesia dan terumuskan dalam kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan hukum dan teknis. Pendekatan pembangunan ini dalam implementasinya menekankan pada proses penyusunan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peranan laki-laki dan perempuan di dalamnya, serta memperhatikan akses, manfaat dan dampak pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, pendekatan pembangunan pendekatan gender tidak hanya dilihat dalam arti peningkatan akses pada sumber daya dan perbaikan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menyangkut proses bagaimana manfaat pembangunan tersebut diperoleh. Artinya, bagaimana akses, manfaat, kontrol dan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya.

Sampai tahun 2021 data tentang PNS menunjukkan bahwa dari 7.315 PNS, sebanyak 3.515 PNS adalah perempuan, sehingga persentase PNS Perempuan telah mencapai 48,05 %





dari seluruh pegawai yang bekerja di pemerintahan. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 47,74%. Kondisi ini mencerminkan semakin berperannya perempuan dalam pemerintahan sehingga kesetaraan gender bisa dikatakan sudah tercapai. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berusaha merepresentasikan perempuan dalam mengambil keputusan pada lini OPD yaitu dengan menempatkan perempuan sebagai Kepala beberapa OPD.

Tabel 2. 64 Pemberdayaan Perempuan di Kutai Barat

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	47,1	47,74	48,05
Keterwakilan Perempuan Di DPRD	%	16	16	16
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	9,83	34,67	57,03
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	%			

Tabel 2. 65 Jabatan Eselon Perempuan di Kutai Barat Tahun 2021

		Gen	der	Total	
NO	Golongan dan Ruang	Laki - Laki	Perempuan	Total	
1	Fungsional Tertntu	534	389	923	
2	Fungsional Umum	178	226	404	
3	Struktural	755	893	1648	
4	Esselon IV	315	190	505	
5	Esselon III	114	63	177	
6	Esselon II	28	2	30	
7	Esselon I				
	Jumlah	1.924	1.763	3.687	

Keterwakilan perempuan di DPRD di Kutai Barat sampai tahun 2021 berjumlah 4 orang 16% dari jumlah semua anggota DPRD berjumlah 25 orang. Untuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kutai Barat, data yang ada menunjukkan bahwa TPAK perempuan tahun 2020 sebesar 34,67%, dan pada tahun 2021 naik menjadi 47,8%. Capaian ini sudah berada di atas rata-rata nasional Nasional yang besarnya adalah 40,80%.





Berdasarkan data tahun 2021, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kutai Barat adalah sebesar 84,28. Nilai IPG tahun 2021 tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang besarnya 83,87.

Tabel 2. 66 Indeks Pemberdayaan Gender 2010-2020

W-1/W-4-				I	ndeks Pe	embangu	nan Ge	nder (IP	G)			
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	65.78	66.44	66.86	67.82	68.58	68.66	-	69.78	70.64	71.41	71,15	
Kutai Barat	77.91	78.28	80.91	82.87	83.01	82.51	-	83.3	83.52	83.84	83,87	84.28
Kutai Kartanegara	72.98	73.29	74.92	76.13	76.92	77.22	-	78.54	78.83	79.14	78,90	
Kutai Timur	72.55	72.64	73.54	74.17	74.9	74.94	-	75.48	76.03	76.51	76,26	
Berau	81.82	83.49	85.76	86.27	87.23	87.37	-	87.77	87.92	87.93	87,61	
Penajam Paser Utara	82.01	82.05	82.87	84.71	85.97	86.26	-	86.31	86.34	86.22	86,39	
Mahakam Ulu	0	0	0	76.65	78.04	78.31	-	79.82	80.18	80.89	80,98	
Balikpapan	85.81	86.22	86.72	87.14	90.05	89.97	-	89.74	89.76	89.71	89,65	
Samarinda	87.65	87.82	88.03	88.71	89.26	89.44	-	89.26	89.42	89.41	89,27	
Bontang	79.76	82.17	84.25	85.47	86.31	85.84	-	86.44	86.61	86.72	86,87	
Kalimantan Timur	83	83.18	84.33	84.69	84.75	85.07	85.6	85.62	85.63	85.98	85,70	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dari aspek IPM Perempuan, tahun 2021 nilai IPM Perempuan Kutai Barat mencapai 65,16 meningkat dibandingkan dengan capaian 2020 yang besarnya 64,27. Nilai IPM Perempuan Kutai Barat sepanjang 2010-2021 lebih rendah dibandingkan dengan IPM Perempuan provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa isu gender di Kutai Barat cukup menonjol dan memerlukan kebjakan dan strategi.

Tabel 2. 67 IPM Perempuan 2010-2021

Vahunatan /Vata			Inde	ks Peml	oanguna	n Manus	ia (IPM) Perem	puan			
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	46.99	47.93	49.14	50.85	51.56	51.97	-	53.43	54.39	55.38	55,10	
Kutai Barat	55.77	56.73	59.05	60.87	61.68	61.95	-	63.18	63.72	64.7	64,27	65.16
Kutai Kartanegara	53.33	54.41	56.36	57.88	59.33	59.94	-	61.4	61.89	62.63	62,36	
Kutai Timur	52.63	53.49	54.86	55.77	56.58	57.1	-	58.42	59.28	60.36	59,79	
Berau	60.17	62.67	64.63	66.03	67.05	67.4	-	68.41	68.88	69.74	69,46	
Penajam Paser Utara	57.81	58.94	59.85	61.53	63.09	63.83	-	64.98	65.47	65.91	65,74	
Mahakam Ulu	0	0	0	53.57	56.61	57.16	-	58.54	59.23	60.28	59,81	





Vahunatan /Vata		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan										
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Balikpapan	68.53	69.73	70.68	71.76	74.33	74.6	-	75.43	76.16	76.45	76,33	
Samarinda	70.17	71.35	71.98	72.86	73.79	74.09	-	74.69	75.22	75.48	75,29	
Bontang	65.01	67.55	69.65	71.07	72.15	72.36	-	73.18	73.58	73.84	73,77	
Kalimantan Timur	63.18	64.01	65.58	66.39	66.94	67.41	68.02	68.52	69.21	70.14	69,69	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.3.1.10. Urusan Sosial

Aspek sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan dapat terjamin apabila permasalahan aspek sosial masyarakat dapat tertangani dengan baik. Aspek sosial ini antara lain menyangkut penanganan fakir miskin, orang jompo, anak jalanan, dan permasalahan social lainnya.

Dari sisi rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan social, di Kutai Barat masih sedikit rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan social dari berbagai sumber atau bentuk. Kondisi di Kutai Barat tersebut bahkan termasuk yang terendah di Provinsi Kalimantan Timur, tidak jauh berbeda dengan di Kabupaten Mahakam Ulu. Data yang digunakan untuk persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Tahun 2021 masih menggunakan data tahun 2020.

Tabel 2. 68 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020 (%)

Kabupaten/Kota	Jaminan Pensiun/ Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan / Asuransi Kematian	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja
Kabupaten Paser	7,99	11,5	14,58	12,48	7,24
Kabupaten Kutai Barat	5,26	4,71	7,82	5,8	3,39
Kabupaten Kutai Kartanegara	8,15	8,91	15,52	13,25	11,67
Kabupaten Kutai Timur	9,97	21,53	26,16	23,27	16,91
Kabupaten Berau	13	23,2	32,83	29,12	21,55
Kabupaten Penajam Paser Utara	10,16	12,81	19,56	14,95	12,67
Kabupaten Mahakam Hulu	6,38	5,39	3,82	3,97	1,87
Kota Balikpapan	12,47	13,69	15,41	14,01	5,73
Kota Samarinda	9,4	11,1	12,78	9,37	7,42



•

Kabupaten/Kota	Jaminan Pensiun/ Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan / Asuransi Kematian	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja
Kota Bontang	28,02	39,67	48,81	38,56	29,11
Kalimantan Timur	10,6	14,09	18,3	15,34	10,88

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020

Sementara itu rumah tangga di Kutai Barat yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera pada tahun 2021 masih menggunakan data pada tahun 2020 yang hanya mencapai 15,89% dan sebanyak 84,11% keluarga tidak memiliki kartu tersebut. Dibandingkan dengan daerah lain, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki kartu social tersebut adalah yang terkecil dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur dan juga lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur sendiri.

Tabel 2. 69 Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) Tahun 2021 (%)

Kabupaten/Kota	Memiliki, dapat menunjukkan Kartu	Memiliki, tidak dapat menunjukkan Kartu	Tidak Memiliki	Total
Kabupaten Paser	12,03	2,47	85,5	100
Kabupaten Kutai Barat	10,76	5,12	84,11	100
Kabupaten Kutai Kartanegara	6,25	2,05	91,7	100
Kabupaten Kutai Timur	6,3	2,73	90,98	100
Kabupaten Berau	4,24	2,16	93,6	100
Kabupaten Penajam Paser Utara	3,68	4,22	92,1	100
Kabupaten Mahakam Hulu	1,04	1,55	97,41	100
Kota Balikpapan	3,83	4,35	91,82	100
Kota Samarinda	3,36	2,96	93,68	100
Kota Bontang	5,18	1,12	93,7	100
Kalimantan Timur	5,44	2,96	91,6	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2021

Di sisi lain persentase banyaknya rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2021, masing-masing 89.87% dan 45.50% pada hal rumah tangga yang tercatat sebagai peserta PKH di Kutai Barat mencapai 89,87%. Penerima PKH di Kutai Barat adalah yang tertinggi di Kalimantan Timur





sedangkan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai menduduki peringkat ke 2 setelah Kabupaten Paser.

Tabel 2. 70 Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021

Vahunatan /Vata	Penerima Program Keluarga Harapan			Penerima Bantuan Pangan Non Tunai			Masih Tercatat Peserta PKH		
Kabupaten/Kota	Ya	Tidak	Jumlah	Ya	Tidak	Jumlah	Ya	Tidak	Tidak tahu
Kabupaten Paser	11,87	88,13	100	17,64	82,36	100	94,29	4,22	1,49
Kabupaten Kutai Barat	89.87	10.13	100	45.50	54,50	100	89,87	0	0
Kabupaten Kutai Kartanegara	7,26	92,74	100	10,68	89,32	100	90,24	1,89	7,87
Kabupaten Kutai Timur	8,37	91,63	100	10,19	89,81	100	95,6	1,46	2,94
Kabupaten Berau	3,58	96,42	100	3,32	96,68	100	95,04	4,96	0
Kabupaten Penajam Paser Utara	6,44	93,56	100	11	89	100	88,55	7,21	4,24
Kabupaten Mahakam Hulu	3,5	96,5	100	1,37	98,63	100	86,28	8,39	5,33
Kota Balikpapan	3,96	96,04	100	5,16	94,84	100	96,83	3,17	0
Kota Samarinda	6,34	93,66	100	7,02	92,98	100	97,53	2,47	0
Kota Bontang	5,38	94,62	100	9,79	90,21	100	95,41	4,59	0
Kalimantan Timur	6,73	93,27	100	8,92	91,08	100	93,87	2,73	3,4

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2021

Penanganan terhadap Fakir Miskin di Kutai Barat terbilang masih sangat rendah menurut data dari Dinas Sosial terdapat 14.997 Tahun 2019 yang merupakan data Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 14.889 KK, penambahan data Fakir Miskin ini di peroleh dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi yang kemudian menjadi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang dikelola oleh kementrian Sosial melalui Sistem Informasi kesejahteraan Sosial - Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG dan telah berkoordinasi dengan pemerintah Daerah.

Dan pada tahun 2021 terdapat 14.179 KK selanjutnya untuk proses verifikasi dan validasi data fakir miskin dan penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya akan terus dilakukan sesuai dengan mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan amanat Peraturan Meteri Sosial Republik





Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Tabel 2.71 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Votorongon	Satuan		Tahun		
NO.	Keterangan	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Fakir Miskin yang ditangani	KK		14,997	14,889	14.179
2	Jumlah Anak Terlantar yang ditangani	Orang	213	213	287	182
3	Jumlah Taman Anak Sejahtera (TAS) yang ditangani	Unit	1	1	1	1
4	Jumlah Lansia Terlantar yang ditangani	Orang	165	246	312	100
5	jumlah Gelandangan yang ditangani	Orang	-	11	11	10
6	Jumlah pengemis yang di tanangani	Orang	1	11	11	10
7	Jumlah Penangan Orang Terlantar yang ditangani	Orang	-	3	4	0
8	Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani	Orang	368	4521	1976	924
9	Jumlah Korban Bencana Sosial yang ditangani	Orang	449	92	102	204
10	Jumlah Penyandang disabilitas yang dibina	Orang	2	2	0	2
11	Jumlah penyandang disabilitas yang ditangani	Orang	1327	1238	1080	139
12	Jumlah BWBLP (Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan) yang ditangani	Orang	61	20	11	31
13	Jumlah Tuna Susila yang ditangani	Orang	84	115	169	173
14	Jumlah LKSLU (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) Yang dibina	Unit	-	1	1	1
15	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang	KK	5	20	0	30
13	memperoleh bantuan modal usaha	Jiwa	50	200	0	
16	Jumlah Anak Putus Sekolah yang dibina	Orang	4	5	5	2
17	Vomunitae Adat Tornoneil (VATa) wang dibandayahan	KK	177	177	177	177
17	Komunitas Adat Terpencil (KATs) yang diberdayakan	Jiwa				
18	Jumlah LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	Unit	2	2	2	2
10	juinian Livoa (Lenivaga Kesejanteraan susiai Anak)	Jumlah Asuhan	213	213	287	268

Sumber: Dinas Sosial Kutai Barat 2018 s.d 2021

Dalam hal KUBE, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga/keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang - orang / keluarga-keluarga kurang mampu (pra sejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin. KUBE umumnya beranggotakan 30 KK fakir





miskin yang telah terpilih melalui seleksi sebagai Keluarga Binaan Sosial (KBS). Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, Peningkatan pendapatan, Pengembangan usaha dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Penduduk yang masuk dalam kategori PMKS memerlukan perhatian khusus agar mereka juga menjadi bagaian dari pembangunan daerah. Kebijakan yang mengarah pada pembinaan mental serta kemandirian perlu ditangani secara dini sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan kegiatan produktif.

2.3.1.11. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang selalu ada dan terjadi akibat ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Permasalah tersebut akan semakin besar potensinya seiring dengan peningkatan angkatan kerja, yang tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Sementara penduduk pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 sebanyak 3.609 orang dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut: tidak tamat SD sebanyak 242 orang dan tamat SD sebanyak 130 orang, SMP 332 orang, SMU 1.243 orang, SMK 1.172 orang, DI 4 orang, DII 1 Orang, DIII 162 Orang, S1 320 orang serta S2 sebanyak 3 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 72 orang telah berhasil ditempatkan sebagai Tenaga Kerja di berbagai sektor lapangan usaha, dan yang belum ditempatkan sejumlah 3.537 orang. Jika dilihat dari kelompok usia, pencari kerja masih banyak didominasi angkatan kerja usia muda (usia 20 - 39 tahun) sekitar 2.676 orang (74%) dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai. Hal inilah yang menjadi persoalan dalam menempatkan pencari kerja tersebut pada pekerjaan yang diinginkan. Penempatan tenaga kerja hampir semuanya di sektor pertambangan.

Tabel 2. 72 Pencari Kerja Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2021

PENDIDIKAN	PENCARI KERJA						
PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH				
TIDAK TAMAT SD	214	28	242				
SD	109	21	130				





SLTP	275	57	332
SLTA	862	381	1.243
SMK	836	336	1.172
DIPLOMA I	3	1	4
DIPLOMA II	0	1	1
DIPLOMA III	66	96	162
S1	169	151	320
S2	3	0	3
TOTAL	2.537	1.072	3.609

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kutai Barat 2021

Tabel 2. 73 Komposisi Umur Pencari Kerja Tahun 2021

A A	PENCARI KERJA			
4	L	P	JUMLAH	
15 - 19	380	274	654	
20 - 24	843	421	1.264	
25 – 29	556	224	780	
30 - 34	290	65	355	
35 - 39	225	52	277	
40 - 44	126	20	146	
45 - 49	89	14	103	
50 - 54	19	2	21	
55 +	9	0	9	
TOTAL	2.537	1.072	3.609	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kutai Barat 2021

Tabel 2. 74 Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2021

SEKTOR USAHA		PENEMPATAN	
SERTOR USAHA	L	P	JUMLAH
PERTANIAN	28	15	43
PERTAMBANGAN	2.265	741	3.006
INDUSTRI PENGOLAHAN	15	3	18
LISTRIK, GAS DAN AIR	1	1	2
BANGUNAN	5	0	5
PERDAGANGAN BESAR	4	2	6





SEKTOR USAHA		PENEMPATAN	
SERTOR USANA	L	P	JUMLAH
PEMERINTAHAN	88	163	251
ANGKUTAN	4	1	5
LEMBAGA KEUANGAN	10	26	36
JASA LAINNYA	117	120	6
TOTAL	2.537	1.072	3.609

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kutai Barat 2021

Untuk kondisi 2021 selama Pandemi Covid, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2020-2021 menunjukkan penurunan sekitar 4%. Dari jumlah tersebut terjadi peningkatan pada kelompok penduduk bukan angkatan kerja yaitu naik sekitar 1%, dan yang tergolong penduduk angkatan kerja mengalami peningkatan sekitar 5%.

Dalam dua tahun terakhir (2020-2021) jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sedangkan pengangguran terlihat mengalami penurunan, di tahun 2021 penduduk yang bekerja meningkat sekitar 58% dan pengangguran menurun sekitar 28%.

TPAK Kutai Barat juga mengalami penurunan dari 67,88% di tahun 2020 menjadi 65,34% di tahun 2021.

Tabel 2. 75 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2019-2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Paser	66,17	67,88	65,34
Kutai Barat	66,76	71,02	72,53
Kutai Kartanegara	65,74	61,98	64,46
Kutai Timur	68,85	68,96	67,97
Berau	66,49	67,40	65,55
Penajam Paser Utara	64,33	69,04	66,85
Mahakam Ulu	69,91	76,22	74,83
Balikpapan	65,44	62,90	64,29
Samarinda	64,77	65,16	64,29
Bontang	68,06	69,24	66,63
Kalimantan Timur	65,96	65,50	65,49

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur





Dari sisi besarnya Upah Minimum Regional (UMR), di tahun 2021 UMR Kutai Barat sebesar 3.310.000. Nilai UMR tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi yang mencapai 2.981.379. UMR Kutai Barat tahun 2021 tersebut peringkat ke 3 tertinggi setelah Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser Utara. UMR tahun 2021 terlihat sedikit naik dibandingkan tahun 2020 yang besarnya 3.309.304.

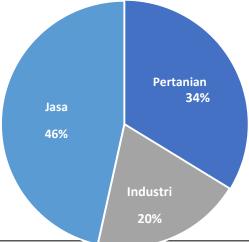
Tabel 2. 76 Upah Minimum Regional 2019-2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Paser	2 787 920	3 025 172	3 050 000
Kutai Barat	3 050 000	3 309 555	3 310 000
Kutai Kartanegara	2 930 304	3 179 673	3 179 673
Kutai Timur	2 893 833	3 140 098	3 140 098
Berau	3 120 996	3 386 593	3 412 331
Penajam Paser Utara	3 100 000	3 363 810	3 363 810
Mahakam Ulu	-	3 309 555	-
Balikpapan	2 868 083	3 069 316	3 069 316
Samarinda	2 868 083	3 112 156	3 112 156
Bontang	2 933 099	3 182 706	3 182 706
Kalimantan Timur	2 747 561	2 981 379	2 981 379

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Penduduk Kutai Barat pada tahun 2019 sebagain besar bekerja di sektor jasa yaitu 46%. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 34% dan di sektor industri adalah 20%. Bila dikaitkan dengan struktur PDRB, sektor jasa di PDRB Kutai Barat memiliki kontribusi yang relative kecil namun penduduk yang penduduk yang bekerja di sektor jasa justru memiliki proporsi terbesar.

Gambar 2. 14 Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha, 2019



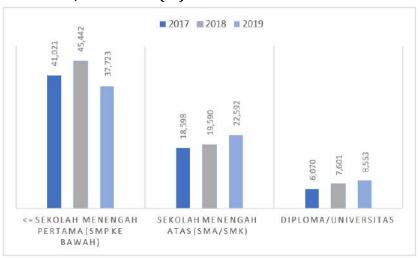




Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2017-2019, BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dari sisi latar belakang Pendidikan penduduk yang bekerja, terlihat bahwa penduduk yang bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP sederajat dan sedikit yang berpendidikan perguruan tinggi (diploma hingga sarjana). Tahun 2019 penduduk berkerja yang berpendidikan SMP sederajat mencapai 37,72% sementara yang berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi masing-masing sebesar 22,59% dan 8,55%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kutai Barat merupakan *unskilled labor* sehingga menjadi tantangan yang perlu dipecahkan karena pendidikan pekerja berkaitan erat dengan jenis pekerjaannya.

Gambar 2. 15 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, 2017-2019 (%)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2017-2019, BPS Provinsi Kalimantan Timur

Hal lain dari data di atas yang memerlukan perhatian adalah sebagian besar orientasi pendidikan penduduk belum sampai ke jenjang perguruan tinggi. Penduduk berharap mendapatkan pekerjaan setelah mereka menamatkan pendidikan SMA/SMK. Pendidikan di Kutai Barat perlu diarahkan pada pendidikan vokasi yang lebih menitikbertakan pada keterampilan praktik, seperti politeknik, akademi, atau SMK karena mereka yang berlatar pendidikan seperti ini justru dibutuhkan. Berbagai pelatihan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di samping itu, pengembangan kewirausahaan juga menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui perubahan mental dan pola pikir masyarakat. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah





dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi penduduk untuk menambah bekal keterampilan praktis yang dibutuhkan.

2.3.1.12. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi penciptaan kondisi Kutai Barat yang tertib, aman, dan terkendali. Situasi ini sangat berpengaruh pada dinamika kehidupan masyarakat. Dengan suasana yang kondusif masyarakat akan menjalankan aktivitas dengan tenang dan nyaman. Di samping itu situasi seperti ini diharapkan pula mampu menarik minat para pelaku ekonomi dari luar Kutai Barat untuk menjalankan aktivitas ekonominya di Kutai Barat.

Kesatuan bangsa dan politik yang kondusif ditandai antara lain dengan minimnya gejolak masyarakat, unjuk rasa anarkis, tingkat kriminalitas dalam berbagai bentuk, kemaksiatan, dan sebagainya. Pemerintah daerah telah melakuka pelatihan untuk satuan perlindungan masyarakat di masing-masing kecamatan sejak tahun 2007. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga suasana tenang dan terkendali, serta kesadaran untuk melakukan kontrol atas situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Setiap kali pelatihan, rata-rata setiap wilayah mengikutsertakan 20-25 petugas.

Untuk menunjang keamanan dan ketertiban, di setiap desa memiliki setidak-tidaknya dua poskmaling. Selain itu jumlah linmas per 10.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 183, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 180 dan jumlah ini Kembali bertambah pada tahun 2021 menjadi 190. Meski demikian faktanya sering dijumpai sebagian besar pos siskamling di kampung tidak dijalankan dengan aktif. Keberadaan pos siskamling biasanya difungsikan secara temporary saja, misalnya ketika frekuensi kasus kriminal yang meningkat seperti maraknya kasus pencurian di wilayah bersangkutan dan pada saat berlangsungnya pesta demokrasi. Bahkan saat ini semakin banyak siskamling yang aktif tidak lagi menerapkan sistem piket bergilir, namun menggunakan sistem upah atau iuran.

Tabel 2. 77 Kinerja Keamanan dan Ketertiban

Keterangan	Satuan	2019	2020	2021
Angka Kriminalitas	Kasus per	118	106	121





Keterangan	Satuan	2019	2020	2021
	10.000 Penduduk			
Jumlah Demo	Demo	1	-	-
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan		2	2	2
Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk	Orang per 10.000 Penduduk	180	183	190
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Orang	483	494	524
Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten / Kota	%	20	45	100
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)	%	20	90	100

Sumber: Badan Kesbangpol Linmas Kutai Barat 2021

Masalah keamanan dan ketertiban sulit untuk diprediksi, namun tetap harus diantisipasi. Untuk itu keterlibatan semua elemen masyarakat dalam keamanan lingkungan masing-masing sangat penting untuk dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam masalah ini dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendorong minat masyarakat mengembangkan pos siskamling secara kuantitatif maupun kualitatif.

2.3.1.13. Urusan Pemerintahan Umum

Tugas dan peran pemerintah daerah adalah melayani masyarakat dalam rangka pembangunan daerah di segala bidang. Tugas tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui semua unsur OPD yang ada. Pelayanan yang prima akan mampu mendorong produktivitas masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pembangunan.

Otonomi daerah semakin memperbesar peran pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta kecenderungan di masa mendatang. Untuk menjalankan otonomi daerah, kualitas pelayanan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Kualitas tersebut dapat terukur melalui beberapa aspek, seperti kelengkapan OPD, kualitas SDM aparatur, berbagai peraturan daerah, mekanisme pengawasan pembangunan daerah, dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam otonomi daerah diperlukan reformasi birokrasi menuju efisiensi dan efektivitas pelayanan. Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu,





kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia aparatur (SDM Aparatur), penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan system pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial, dan dunia usaha.

Pelayanan pemerintahan umum untuk aspek perijinan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 tingkat kepuasan masyarakat sebesar 78,336 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2013 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 81,80. Searah dengan prinsip *Good Governance* dan instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang dipercayakan kepadanya harus berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. LAKIP merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kebijakan kepada stakeholder, sebagai umpan pengambilan keputusan pihak terkait sebagai alas perbaikan manajemen ke pemerintahan dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2015 dari 51 OPD yang wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 96,08% atau 49 OPD telah menyampaikan. Masih terdapat 2 OPD yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LAKIP yaitu 1 Kantor Kecamatan dan 1 Kantor Kelurahan. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 76,79%, namun bukan merefleksikan keberhasilan pencapaian pada indikator ini karena idealnya seluruh OPD harus menyampaikan LAKIP. Tinggi persentase OPD yang menyampaikan LAKIP karena ada *punishment* yang diberikan oleh Pemerintah Kutai Barat berupa pemotongan anggaran OPD. Selama 5 tahun terakhir persentase OPD yang telah menyampiakan LAKIP meningkat setiap tahunnya namun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2, 78 Kineria Pelayanan dan Pemerintahan Umum

Keterangan	Satuan	2013	2014	2015
Indeks kepuasan masyarakat dalam proses	skor	78,208	78,336	81.80
Pelayanan Perijinan	SKUI	70,200	70,330	01,00





Keterangan	Satuan	2013	2014	2015
Persentase SKPD yang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	%	62,49	76,79	96,08
Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	%	22,22	30,7	47,09
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	23,33	22,2	100
Persentase Jumlah temuan pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	%	59,65	70,2	84,97
Jumlah Bidang yang telah memiliki SPM	Bidang	4	4	4

Dalam hal pengaduan masyarakat yag ditangani, terlihat menunjukkan hasil yang masih kurang sesuai harapan. Pada tahun 2013 terdapat 30 pengaduan masyarakat dan hanya 7 yang ditindaklanjuti atau 23,33%. Tahun 2014 terdapat 27 penganduan dan hanya 6 yang ditangani atau 22,2%. Demikian pula dengan persentase jumlah temuan pemeriksaan reguler yang ditindaklanjuti, meski terdapat kenaikan dari tahun 2013 ke 2014 yaitu dari 59,65% menjadi 70,2%.

2.3.1.14. Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara melembaga, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan ini, maka pemerintah pusat maupun daerah, bahkan seluruh institusi pengelola pembangunan berkewajiban menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang dalam pelaksanaan pembangunannya berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial budaya. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Kutai Barat dalam aktivitas sosial hampir sebagian kegiatannya berhubungan dengan masyarakat.





Kinerja pembinaan terhadap aparatur Kampung agar tertib menjalankan administrasi Pemerintahan Kampung terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini tercermin dari semakin banyak Kampung yang dinilai tertib menjalankan administrasi pemerintahannya, dimana pada tahun 2011hanya 110 Kampung/Kelurahan yang melaksanakan adminitrasi dengan baik, jumlahnya terus meningkat menjadi 121 Kampung/Kelurahan di tahun 2012, 130 Kampung/ Kelurahan di tahun 2013, 152 Kampung/ Kelurahan di tahun 2014 dan 194 Kampung/Kelurahan di tahun 2015,dan pada tahun 2014, 194 Kampung/Kelurahan.

Untuk urusan LSM, berdasarkan hasil pendataan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Barat saat ini terdapat sebanyak 16 buah LSM namun hanya 6 LSM yang aktif, disebabkan banyak yang tidak memiliki pondasi finansial yang kuat sehingga tidak mampu membiayai rutinitas operasional organisasinya atau aktivitas tidak berjalan. Selain itu LSM di Kabupaten Kutai Barat mayoritas hanya menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial saja, hanya ada beberapa saja yang mempunyai aktivitasnya sebagai pendidik, lingkungan, keagamaan, ekonomi dan lain-lain. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pengawasan LSM di Kutai Barat adalah ditemukan banyak LSM tidak memiliki legalitas, maksudnya LSM yang tidak terdaftar di Badan Kesbangpol atau tidak segera memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Oleh karena itu pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran data Ormas dan LSM . Dari kegiatan tersebut akhirnya baru diketahui banyak LSM yang berstatus ilegal dan tidak beraktivitas lagi.

Tabel 2. 79 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keterangan	Satuan	2013	2014	2015
Persentase Kampung/Kelurahan yang tertib administrasi	%	80	80	100
Jumlah LSM yang aktif	Buah	7	6	10
Persentase Posyandu aktif	%	57,24	60	51,88
Persentase PKK aktif	PKK	90,38	92,48	89,69
Persentase Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai peruntukkannya	%	97,50	100	99,47
Persentase capaian keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	%	100	100	

Dalam hal kegiatan alokasi ADK, tahun 2015 seluruh ADK telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. jumlah kampung penerima ADK di wilayah Kabupaten Kutai Barat





sebanyak 190 kampung pada 16Kecamatan yang masing-masing menerima dan ADK sebesar Rp. 150.000.000,00 per kampung dengan total alokasi sebesar Rp. 28.500.000.000,00.

Untuk mengendalikan dan mengarahkan penggunaan ADK agar sesuai dengan peruntukannya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membuat dua tahapan penyaluran ADK, tahap pertama 60% dan tahap kedua 40% dicairkan jika tim ADK tingkat kampung telah menyelesaikan kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahap pertama untuk diverifikasi oleh tim Fasilitasi ADK tingkat kecamatan sebagai dasar pemberian rekomendasi pencairan.

2.3.2. Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kutai Barat. Dari sisi kontribusinya terhadap perekonomian, sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Sektor ini merupakan sektor yang paling banyak dikelola oleh masyarakat sehingga pengelolaan sektor pertanian menjadi sangat penting.

Pembangunan di wilayah Kutai Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, begitu juga dengan realisasi penerimaan daerahnya cenderung meningkat. Salah satu sektor yang terus dikembangkan adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting, selain dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dalam rangka memenuhi dan menjaga stabilitas ketahanan pangan baik nabati maupun hewani di wilayah Kutai Barat.

Jenis komoditi pertanian yang dikembangkan pada sub sektor tanaman pangan meliputi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan pada sub sektor perkebunan terdapat tiga komoditi unggulan yaitu karet, kakao dan kelapa sawit. Untuk sub sektor peternakan, terdapat empat jenis ternak yang dominan dikembangkan yaitu ternak sapi, kerbau, kambing dan babi. Selain itu, jenis unggas yang dibudidayakan antara lain ayam buras, ayam pedaging, dan itik. Berikutnya adalah sub sektor perikanan, Kabupaten Kutai Barat hanya memiliki potensi perikanan Perairan Umum yaitu sungai, danau dan rawa di mana meliputi aktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, akan tetapi kegiatan





perikanan yang paling dominan adalah perikanan tangkap karena terdapat hampir di seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagian danau dan rawa.

Pengembangan sektor pertanian telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) pengembangan peralatan teknologi tepat guna, (2) peningkatan kualitas perbenihan, (3) penyuluhan pertanian, (4) peningkatan ketahanan pangan, dan (5) pengendalian hama penyakit. Dalam kenyataannya, sektor ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: (1) alih fungsi lahan dari sektor pertanian tanaman pangan ke sektor lain seperti perkebunan di mana lahan yang dulunya potensi padi ladang dialihkan menjadi kebun karet, kakao ataupun kelapa sawit dan juga pertambangan serta pemukiman dan pembangunan infrastruktur jalan, (2) minat masyarakat bekerja di sektor pertanian tanaman pangan makin berkurang, (3) terjadinya penurunan produksi beberapa tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau setiap tahunnya disebabkan penurunan luas panen komoditi tersebut. Sedangkan jenis tanaman palawija lainnya seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar produksinya cenderung fluktuatif.

2.3.2.2. Urusan Kehutanan

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan potensi sumberdaya alam (SDA). Potensi sumberdaya alam seperti hutan alam dan pertambangan batubara dan emas merupakan salah satu modal dasar untuk melaksanakan roda pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Hutan merupakan Hutan Alam yang sebagian besar didominasi kelompok *Dipterocarpaceae* atau kelompok Meranti. Selain itu ditemui tumbuhan seperti ulin, medang, benuang, panlajau dan nyatoh dan juga rotan, bambu, pakis, nipah dan anggrek. Disamping tumbuhan, juga dijumpai fauna seperti orangutan, owa-owa, kelempiau, bekantan, trenggiling, landak, babi hutan, rusa, kijang, ikan, pesut, dan berbagai jenis burung (enggang, punai, mutai batu, ayam hutan/sakang, selang, dan lain-lain).

Dalam pengelolaannya, hutan dan kehutanan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001. Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ini dalam administrasi Kehutanan pada orde baru meliputi tiga Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang





pada saat itu merupakan bagian dari struktur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu CDK Mahakam Ulu, CDK Balikpapan dan CDK Mahakam Tengah.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ini bertugas melaksanakan kewenangan otonomi dalam rangka desentralisasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang Kehutanan yang masih menjadi tanggung jawabnya serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya. Kelembangaan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat yang masih baru ini, kiranya masih banyak penataan yang perlu dilakukan baik sistem, manajerial maupun teknis dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Kutai Barat dengan mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang ada. Sekalipun demikian, berbagai kendala/persoalan (isu) masih terjadi dan merupakan tantangan untuk mengatasinya.

Untuk menjaga kelestarian hutan pihak Pemerintah Daerah dan perusahaan telah melakukan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, melalui kelompok tani. Luas lahan yang direhabilitasi pada tahun 2015 mencapai luas 1.140 ha. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan reboisasi sebagaimana petunjuk pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, harus dilaksanakan oleh kelompok tani dengan berbagai persyaratan yang menyertainya dan sebagian besar hanya dapat dilaksanakan rancangan teknis rehabilitasi sehingga serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan maksimal akibat berbagai kendala teknis di lapangan.

Kabupaten Kutai Barat yang sarat akan potensi sumberdaya hutan alam telah lama dilakukan eksploitasi oleh barbagai investor, pada kenyataannya hasilnya belum dapat terdistribusi kepada masyarakat sekitar hutan yang ada. Hal ini perlu dilakukan reorientasi dan renovasi secara bertahap kepada pengelolaan yang bersifat kelembagaan adat dengan suatu pengaturan dari proses produksi hingga pasar, di mana masing-masing mempunyai peran dan posisi yang saling menghormati dalam satu kesatuan pembangunan kehutanan di Kabupaten Kutai Barat.

Dalam bidang reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat dalam setiap tahunnya telah dilakukan. Sementara laju deforestasi di Kabupaten Kutai Barat lebih besar dari kegiatan reboisasi. Kondisi ini, perlu mendapat perhatian secara seksama, penting dan strategis dalam pelestarian hutan dan lahan serta kelestarian usaha. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal yang dibebani hak pengusahaan hingga saat ini belum





dilakukan pengendalian secara mantap melalui tahapan pembinaan hingga tahap penegakan hukum (*law enforcement*) yang terpadu dan berkesinambungan. Kelemahan dalam pengendalian produksi kayu dan rehabilitasinya perlu diseimbangkan melalui berbagai upaya program-program rehabilitasi hutan dan lahan dalam mendukung Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (GN-RHL/GERHAN).

2.3.2.3. Urusan Pariwisata

Kutai Barat memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik wisata budaya dan maupun wisata alam. Obyek wisata di Kutai Barat tersebar hampir di semua kecamatan, sehingga setiap kecamatan juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayahnya. Sektor pariwisata berkaitan erat dengan sektor ekonomi kain khususnya perdagangan, hotel, dan restoran. Pengembangan sektor pariwisata akan berdampak pada pengembangan perdagangan masyarakat di obyek wisata. Selain itu, pengembangan pariwisata akan memacu tumbuhnya usaha penginapan serta rumah makan dan restoran. Berdasarkan jenisnya, Obyek Wisata di Kutai Barat terbagi menjadi Obyek Wisata Alam dan Obyek Wisata Budaya.

Obyek wisata alam diantaranya adalah:

- Anggrek Hitam, Kersik Luay (20 ha), Kec. Sekolaq Darat
- Anggrek Hitam Kerbangan (5 ha), Kec. Sekolaq Darat
- Air Terjun Inar (25 m), Hutan Mukuq Kec. Dempar
- Air Terjun Mapan, Kecamatan Linggang Bigung
- Air Terjun Gemuruh, Kec. Sekolag Darat
- Air terjun Gancir (15 m), Kec. Barong Tongkok
- Danau Aco (50 m, 5 ha) diatas puncak Gunung, Kec. Linggang Bigung
- Danau Belug diatas Gunung (150 m, 25 ha) Kec. Dempar
- Danau Jempang (3-7 m depth), 15000 ha) Kec. Jempang
- Danau Barong, Kec. Melak
- Gunung Enoh, Hutan Adat Jaras, Kec. Linggang Bigung

Obyek Wisata Budaya diantaranya adalah:

- Lamin enam Etnis di Taman Budaya Sendawar
- Lamin Mancong (40 th), Kec. Jempang





- Lamin Tolatn (80 th), Kec. Muara Lawa
- Lamin Benung (70 th), Kec. Damai
- Lamin Sakaq Lotoq (60 th), Kec. Mook Manaar Bulatn
- Lamin Geleo (60 th), Kec. Barong Tongkok
- Lamin Eheng (60 th), Kec. Barong Tongkok
- Situs-Situs Bunker peninggalan kolonial Belanda
- Beliatn Bawo
- Beliatn Sentiuw
- Beliatn Nalitn Tautn
- Tari Gantar
- Berbagai Upacara Adat

Obyek wisata yang telah berkembang (potensial) adalah obyek-obyek wisata yang khas dan ditunjang oleh sarana dan prasarana, yaitu:

- 1. Obyek wisata Danau Aco yang terletak di Kecamatan Linggang Bigung tepatnya terletak di Kampung Linggang Melapeh merupakan daerah kunjungan wisata yang menyajikan keindahan alam dipuncak gunung, serta panorama alam yang indah ditunjang dengan fasilitas berupa perahu karet untuk menikmati keindahan di atas danau dan sarana prasarana lainnya.
- 2. Wisata Danau Jempang yang menawarkan keindahan alam dan dapat menikmati matahari terbit dan matahari terbenam.
- 3. Wisata budaya yang meliputi: Taman Budaya Sendawar yang terletak di (Kecamatan Barong Tongkok) terdapat Lamin Adat 6 etnis budaya yang ada di Kutai Barat serta kegiatan kegiatan upacara adat, pentas seni dan hiburan rakyat, serta festival tahunan yaitu Festival Dahau Sendawar yang berlangsung setiap dua tahun sekali dengan agenda kegiatan sebagai berikut : tarian kolosal 6 etnis Kutai Barat, Perlombaan olahraga tradisional, Menyumpit, Belogo, Begasing, Behempas yang secara rutin dilaksanakan serta olahraga tradisonal lainnya,Lomba tarian daerah, lomba lagu daerah serta lomba busana adat daerah.

Sebagian besar potensi pariwisata berkaitan erat dengan budaya masyarakat lokal. Dalam perspektif ini, potensi/investasi sebaiknya diarahkan pada pariwisata budaya yang berbasis pada kekuatan masyarakat. Berbeda dengan pariwisata massal, pariwisata budaya





didasarkan pada investasi berskala kecil dengan melibatkan masyarakat sebagai penyedia akomodasi dan pelayanan.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara di Kabupaten Kutai Barat selama 2013-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tahun 2018-2019 jumlah wisatawan naik sangat tajam yaitu lebih dari dua kali lipat, dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang jauh lebih besar akibat Pandemi Covid. Upaya-upaya untuk mendorong pariwisata tidaklah mudah dalam situasi seperti ini, karena adanya kebijakan dari pemerintah tentang pembatasan mobilitas penduduk. Meskipun demikian, Langkah strategis untuk mendorong pariwisata di Kutai Barat perlu segera dirumuskan sehingga saat situasi dan kondisi Kembali normal sudah terumuskan berbagai Langkah strategis yang akan akan diambil.

Tabel 2. 80 Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kutai Barat 2013-2020

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2013	174	33 405	33 579
2014	182	26 475	26 657
2015	137	24 350	24 487
2016	243	21 776	22 019
2017	390	28 584	28 974
2018	279	32 205	32 484
2019	356	65 652	66 008
2020	28	25 929	25 957

Sumber: Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

Dilihat dari jumlah fasilitas akomodasi yang ada di Kabupaten Kutai Barat saat ini menunjukan adanya kemajuan, namun baru terkonsentrasi dibeberapa kawasan saja seperti di Melak, Barong Tongkok dan Linggang Bigung, Tering, Jempang dan Muara Lawa. Sebaran fasilitas akomodasi di enam Kecamatan tersebut relatif banyak sebagai dampak dari pengembangan kegiatan pusat pemerintahan dan pariwisata yang cukup pesat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 81 Perkembangan Jumlah Akomodasi di Kutai Barat

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Bongan	3	3	3	3	3





Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Jempang	2	2	2	2	2
Penyinggahan	-	-	-	-	-
Muara Pahu	-	-	-	-	-
Siluq Ngurai	1	1	1	1	1
Muara Lawa	7	7	7	7	7
Bentian Besar	-	-	-	-	-
Damai	1	1	1	1	1
Nyuatan	-	-	-	-	-
Barong Tongkok	18	18	27	27	27
Linggang Bigung	2	2	2	2	2
Melak	14	12	16	16	16
Sekolaq Darat	-	-	1	1	1
M. Manaar Bulatn	-	-	-	-	-
Long Iram	2	2	2	2	2
Tering	4	4	4	4	4
Jumlah	54	52	66	66	66

Sumber: Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

2.3.2.4. Urusan Industri dan Perdagangan

Peranan lapangan Industri pengolahan di Kutai Barat periode 2019 sampai dengan 2021 ada kecenderungan konstan dan menurun dimana dampak Covid 19 Tahun cukup berdampak terhadap Produktivitas Industri Pengolahan diantara Industri Kerajinan dimana terjadinya penurunan nilai produksi dan pemasaran produk sementara untuk Industri Pangan masih cukup baik pertumbuhannnya dimana dimasa Pandemi ini Industri-industri makanan tetap berjalan cukup baik, Pada Tahun 2021 secara umum lapangan Industri Pengolahan memberi share positif terhadap ekonomi Kutai Barat. Penyumbang peranan terbesar (dominan) pada kategori Industri Pengolahan adalah Lapangan Usaha Industri Makanan dan minuman yaitu yang ditopang oleh kegiatan Industri CPO, diikuti oleh Industri Kayu. Sementara itu industri lainnya yang terdapat di Kutai Barat khususnya yang dikelolah oleh IKM tetap memberi pengaruh namun tidak signifikan mengingat dominasi kontribusi Industri Pengolahan dari Sektor CPO masih cukup besar dibandingkan dengan Komoditi Industri lainnya. Dalam





perhitungan PDRB Sektor Industri Pengolahan tentunya dipengaruhi oleh sektor sektor lainnya khususnya Industri Pertambangan yang merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Kutai Barat.

Nilai pertumbuhan IKM selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2019 sebesar 1451 IKM atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,10% dibanding tahun 2018, kemudian pada Tahun 2020 jumlah IKM meningkat menjadi 1809 IKM atau meningkat sebesar 18.62% atau melebihi target yang telah ditargetkan sebesar 3% dan pada Tahun 2021 terus mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni meningkat menjadi 2.113 IKM atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pertumbuhan Jumlah IKM ini cukup banyak di sektor makanan dimana dimasa Pandemi ini semakin banyak Industri pengolahan makanan yang dilakoni oleh masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada saat ini, dimana sebagian pelaku IKM ini adalah yang dulunya kurang aktif, korban PHK, bahkan belum memiliki usaha, namun dimasa pandemi ini terpacu dengan kondisi ekonomi sehingga harus produktif dan memanfaat melihat peluang usaha yang dapat dilakoni mengelolah Industri Rumah tangga yang bergerak di Industri pengolahan makanan, termasuk industri gula merah dan industri kreatif lainnya.

Untuk mengembangkan IKM Disdakop dan UMKM melakukan pelatihan dan pengembangan SDM termasuk memberi bantuan peralatan industri yang dapat mempercepat proses produksi untuk peningkatan nilai tambah produk IKM. Peningkatan kualitas SDM pelaku IKM dalam upaya peningkatan nilai tambah produk IKM, memberikan suport dalam memberi dukungan Pemasaran Produk IKM Pengembangan Pola Kemitraan dan Kerjasama Pemasaran Peningkatan Promosi Produk IKM; Upaya terwujudnya OVOP serta Pemerintah memberikan kemudahan dalam berusaha khsusunva Industri bagi Pengolahan (Manufacturing) dimana Industri ini diharapkan kedepan dapat mendorong industri pengolahan produk turunan dari masing-masing komoditi sehingga akan semakin memaksimalkan nilai tambah yang diperoleh masyarakat Kutai Barat dan memacu multiplayer efect bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 2. 82 Data Perkembangan Sektor Industri Kecil dan Menengah Tahun 2015-2018

NO	TAHUN	JUMLAH IKM	JUMLAH TENAGA KERJA
----	-------	------------	---------------------





NO	TAHUN	JUMLAH IKM	JUMLAH TENAGA KERJA
1	2015	1.129	2.077
2	2016	1.218	2.272
3	2017	1.401	2.572
4	2018	1.401	2,572
5	2019	1.425	2.727
6	2020	1.809	3.038
7	2021	2.113	3.357

Sumber Data: LKJIP Disdagkop & UKM Kab Kutai Barat 2021

Tabel 2.83 Sebaran IKM dan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKM	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Long Iram	156	206
2	Melak	122	226
3	Barong Tongkok	382	616
4	Damai	135	237
5	Muara Lawa	67	107
6	Muara Pahu	127	204
7	Jempang	294	413
8	Bongan	39	74
9	Penyingggahan	207	261
10	Bentian Besar	57	149
11	Linggang Bigung	149	308
12	Nyuatan	46	61
13	Siluq Ngurai	41	68
14	Mook Manaar Bulatn	117	162
15	Tering	133	192
16	Sekolaq Darat	41	73
	JUMLAH	2.113	3.357

IKM atau UKM merupakan salah satu basis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. UKM memliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Statistik UKM,





kontribusi UKM pda PDB Nasional mencapai lebih dari 50%. Demikian pula dengan penyerapan tenaga kerja, UKM mampu meyerap tenaga kerja lebih dari 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa peran UKM secara nasional sangat signifikan.

Bagi IKM pangan yang belum memiliki Izin edar (P-IRT) dapat mengurus perijinan terkait dengan mengikuti Penyuluhan Pangan yang difasilitasi oleh di Dinas Kesehatan, selain itu menjalin kemitraan antar instansi terkait dalam mendorong agar percepatan penyiapan IKM pangan yang ada melalui kerjasama dengan Pemerintah Kampung dalam mengalokasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan pangan melalui dana ADK (pemberdayaan ekonomi kerakyatan) dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan agar semakin banyak IKM Pangan Kutai Barat yang mengikuti Penyuluhan Pangan dan mengurus P-IRT yang selanjutnya dapat difasilitasi oleh Disdagkop & UKM untuk pengurusan Sertifikasi Halalnya kedepan.

Untuk meningkatkan kesadaran Pemilik Toko/Pelaku Usaha mengenai beredarnya Bahan Berbahaya dan tidak layak edar serta memberikan perlindungan dan pengawasan perdagangan terhadap konsumen pada tahun 2021 dilakukan melalui Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P- B2) dan Melalui Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program ini difokuskan untuk memberikan perlindungan dan pengawasan perdagangan terhadap konsumen. Pada tahun 2021 program ini dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Layak Edar. Kegiatan ini sebagai upaya Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha agar menjual barang yang layak edar, layak konsumsi dan ber - SNI (Standar Nasional Indonesia). Hal-hal yang menjadi focus pengawasan adalah Tanggal Kadaluarsa (Expire Date) Produk Makanan dan Minuman di Toko-toko dan Pengawasan ini bekerja sama dengan Balai Besar POM Kota Samarinda yang dilaksanakan di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Melak dan Kecamatan Bongan.

Dalam upaya pembangunan Pasar Rakyat Disdagkop dan UKM telah melakukan kegiatan berupa: Pembangunan pasar rakyat serta penyiapan lahan Pasar Induk sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten dalam upaya agar pasar lokal tetap eksis dalam menopang roda perekonomian.





Menurut Bank Dunia pembangunan ekonomi lokal yang memberdayakan UKM atau IKM seyogyanya: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarkat dan pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, (5) membangun daya saing lokasi.

Untuk koperasi di Kutai Barat, berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur, jumlah koperasi di Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 mencapai 760 koperasi dan dari jumlah tersebut hanya 353 atau 46,45% yang berstatus koperasi aktif dan tahun 2021 jumlah koperasi aktif 367 atau 46,93 % dari total 782 koperasi. Dari sisi persentase koperasi yang aktif, jumlah yang ada di Kutai Barat ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah lain, termasuk dibandingkan dengan Provinsi alimantan Timur yang mencapai 50%. Kebijakan dan srategi untuk menjadikan koperasi sebagai "soko guru" perekonomian khususnya masyarakat perlu dilaksanakan secara lebih inovatif dengan manajemen yang lebih modern. Pemberdayaan koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perlu dilaksanakan secara sistematis sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat keberadaan koperasi

Tabel 2.84 Perbandingan Jumlah Koperasi di Kalimantan Timur Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Persentase
1. Paser	228	298	76,51
2. Kutai Barat	367	782	46,93
3. Kutai Kartanegara	520	685	75,91
4. Kutai Timur	606	1107	54,74
5. Berau	213	396	53,79
6. Penajam Paser Utara	63	259	24,32
7. Mahakam Ulu	24	123	19,51
8. Balikpapan	436	557	78,28
9. Samarinda	242	1253	19,31
10. Bontang	68	72	94,44
Kalimantan Timur	41	78	52,56
Jumlah/Total	2794	5588	50,00





Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Alam

Sektor Pertambangan merupakan salah satu sektor unggulan bagi perekonomian Kabupaten Kutai Barat, khususnya tambang batubara. Setelah beberapa tahun terakhir kondisi pertambangan batubara tertekan seiring dengan fluktuasi harga batubara yang tidak menentu di pasar global pada periode 2015-2016. Tahun 2019 tercatat produksi batubara dari perusahaan PKP2B yaitu sebesar 10.227704,00 ton dan dari perusahaan IUP sebesar 5.789.202,81 ton. Angka ini meningkat dibandingkan produksi tahun 2018.

Tabel 2. 85 Produksi Batubara Kutai Barat Tahun 2019 (metrik ton)

Produksi	Perusahaan PKP2B	Perusahaan IUP
2016	9.947.532,07	742.328,23
2017	9.671.838,04	776.605,45
2018	9.271.842,80	4.583.610,25
2019*	10.227.704,00	5.789.202,81

Sumber: Statistik Daerah Kutai Barat 2020

Listrik adalah komoditas penting bagi keberlangsungan sendi kehidupan manusia saat ini. Tanpa pasokan energi listrik, hamper dipastikan banyak dunia usaha, rumah tangga maupun sektor yang lain terganggu. Sebagian besar sumber energi listrik di Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Umum Listrik Negara.

Tahun 2020 jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN mencapai 80,26% dan listrik non PLN sebesar 18,99%. Banykanya rumah tangga yang menggunakan energi dari non listrik adalah 0,75%. Angka rumah tangga pengguna listrik PLN di Kutai Barat ini lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 95,46%.

Tabel 2. 86 Rumah Tangga Pengguna Listrik tahun 2020

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Kabupaten Paser	93,92	4,98	1,1	100
Kabupaten Kutai Barat	80,26	18,99	0,75	100
Kabupaten Kutai Kartanegara	98,54	1,34	0,12	100
Kabupaten Kutai Timur	80,77	16,98	2,25	100
Kabupaten Berau	94,53	5,01	0,46	100





Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Kabupaten Penajam Paser Utara	94,51	5,49	0	100
Kabupaten Mahakam Hulu	62,82	32,96	4,22	100
Kota Balikpapan	100	0	0	100
Kota Samarinda	99,6	0,18	0,22	100
Kota Bontang	98,13	1,87	0	100
Kalimantan Timur	95,46	4,06	0,48	100

Sumber: Statistik Kesejahteran Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020

Di tahun 2020 rasio desa berlistrik di Kutai Barat mencapai 100% yang artinya semua desa sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan baik lisrik PLN maupun non PLN. Di sisi lain, rasio elektrifikasi di Kutai Barat mencapai angka 93,74%. Rasio elektrifikasi adalah rasio antara rumah tangga yang menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN dengan jumlah total seluruh rumha tangga. Dengan demikian masih terdapat 6,26% rumah tangga di Kutai Barat yang pada tahun 2020 belum memiliki listrik. Angka rasio elektrifikasi tersebut adalah tertinggi kedua setelah Kota Samarinda, dan lebih tinggi dibandingkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 90,21%.

Tabel 2. 87 Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi

Kabupaten/Kota	Rasio Desa Berlistri	Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Regency		
1. Paser	100,00	84,80
2. Kutai Barat	100,00	93,74
3. Kutai Kartanegara	100,00	84,55
4. Kutai Timur	100,00	85,46
5. Berau	100,00	91,76
6. Penajam Paser Utara	100,00	82,11
7. Mahakam Ulu	100,00	90,80
Kota/Municipality		
1. Balikpapan	100,00	90,18
2. Samarinda	100,00	100,00
3. Bontang	100,00	88,85
Kalimantan Timur	100,00	90,21





Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu komponen dalam aspek daya saing daerah. Beberapa ukuran yang dapat dipergunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat antara lain daya beli masyarakat, pendapatan per kapita, pola konsumsi masyarakat, dan beberapa ukuran lain. Suatu keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat diamati dari besar-kecilnya tingkat pendapatan suatu rumah tangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan suatu rumahtangga dapat dilihat dari tingkat pengeluaran rumahtangga tersebutper kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat adalah sulit, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Metode estimasi yang digunakan dalam memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumahtangga dilakukan secara langsung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan penduduk Kutai Barat tahun 2013 tercatat sebesar Rp888.712, terbagi menjadi konsumsi makanan Rp451.413 dan konsumsi bukan makanan Rp437.299. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2013 mengalami kenaikan Rp69.274 dari tahun 2012 sebesar Rp819.438 dengan persentase kenaikan sebesar 16,21%.

Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan adalah Rp782.784 dan non makanan Rp747.011. Komposisi pengeluaran untuk makanan dan non makanan ini berbeda dengan tahun 2019. Di tahun 2019, komposisi pengeluaran untuk makanan lebih rendah dibandingkan dengan non makanan, namun di tahun 2020 komposisi pengeluaran makanan lebih besar dibandingkan dengan non makanan.





Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan cenderung semakin berkurang proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk makanan dan semakin meningkat proporsi pengeluaran untuk bukan makanan.

Tabel 2. 88 Jenis dan Besar Konsumsi Masyarakat 2013-2020

Urajan	Tahun						
Oraiaii	2013	2014	2017	2018	2019	2020	
Konsumsi Makanan	451.413	451.413	645.504	631.511	720.616	782.784	
Konsumsi Bukan Makanan	437.299	437.299	513.795	666.949	774.000	747.011	
TOTAL	888.712	888.712	1.160.299	1.298.641	1.494.616	1.529.795	

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat

Konsumsi pengeluaran kelompok non pangan adalah sewa, barang tahan lama, BBM, komunikasi, listrik dan konsumsi non pangan lainnya. Dari hasil Suseda dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran non pangan cenderung lebih besar terjadi pada daerah yang berada di sekitar ibukota Kabupaten seperti Melak, Barong Tongkok, Sekolaq Darat dan Linggang Bigung dibanding daerah yang berada jauh dari pusat ibukota Sendawar. Di daerah yang jauh dari keramaian (perkampungan) gap antara konsumsi makanan dan non makanan terlihat lebar sementara untuk daerah perkotaan gap/perbedaannya hanya sedikit sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di sekitar ibukota Kabupaten cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkampungan yang jauh dari pusat ibukota.

Aspek daya saing daerah juga dapat diamati dari derajat keterbukaan ekonomi. Ukuran ini dipergunakan untuk melihat sejauh mana tingkat keterbukaan ekonomi Kutai Barat dalam aktivitas ekonomi. Derajat keterbukaan ekonomi merupakan rasio antara penjumlahan ekspor dan impor dengan PDRB. Semakin tinggi nilainya menggamparkan semakin terbukanya perekonomian Kutai Barat.

Selama 2010-2018 terlihat derjat keterbukaan ekonomi Kutai Barat menunjukkan tren yang terus menurun, hanya pada tahun 2012 saja mengalami kenaikan. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur PDRB Kutai Barat belum banyak ditopang oleh kegiatan eksporimpor, namun lebih banyak oleh aktivitas dalam wilayah, seperti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, serta investasi swasta. Meski demikian, neraca perdagangan Kutai Barat selama 2010-2018 menunjukkan angka yang selalu surplus.

Gambar 2. 16 Derajat Keterbukaan Ekonomi Kutai Barat 2010-2018







Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat, diolah

Nilai ekspor netto Kutai Barat selama 2010-2018 selalu mengalami surplus meskipun terlihat fluktuatif. Meski selama 2012-2015 sempat mengalami penurunan, namun dalam periode 2016-2018 menunjukkan tren kenaikan. Hal ini menggambarkan bahwa Kutai Barat mampu meningkatkan ekspor dan di sisi lain mampu menekan impor.

Gambar 2. 17 Ekspor Netto Kutai Barat 2010-2018



Sumber: BPS Kabupaten Kutai

Barat, diolah





2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Daya Saing Infrastruktur

Kutai Barat secara bertahap dan kontinyu terus berupaya memperbaiki kuantitas dan kualitas wilayah atau infrastruktur. Pembangunan jalan misalnya, terus berkembang dan menujukkan peningkatan yang signifikan.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang antar wilayah. Sehingga kondisi jalan yang baik akan berdampak pada semakin baiknya aktivitas ekonomi suatu daerah.

Pada tahun 2018, jalan di Kabupaten Kutai Barat berada di bawah pengelola Negara dan kabupaten. Panjang jalan terpanjang berada di bawah pengelola kabupaten, yaitu 3.511,41 km. Sedangkan untuk pengelola Negara ada 259,52 km.

Berdasarkan jenis permukaan jalan, pada tahun 2018 sebagian besar jalan di Kabupaten Kutai Barat sudah diaspal yaitu sepanjang 1.655,65 km, sedangkan sisanya masih bersifat tidak diaspal 764,72 km dan lainnya 1.351,68 km. Jika dilihat dari kondisinya, jalan di Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 sebagian besar sudah dalam kondisi baik yaitu sepanjang 3.070,68 km. Disamping infrastruktur jalan, jembatan juga menjadi salah satu penyokong infrastruktur jalan khususnya di wilayah Kutai Barat. Pada tahun 2018, jumlah jembatan secara keseluruhan tercatat 417 buah dengan panjang 11.586,55 meter.

Jalan Kabupaten dan Provinsi yang diaspal menunjukkan perkembangan yang cukup baik, seperti jalan Provinsi dari 430 km di tahun 2006 menjadi 563 km pada tahun 2010. Demikian pula dengan jalan Kabupaten dari 109 km di tahun 2006 menjadi 189,95 km di tahun 2010. Upaya memperbaiki jalan yang mampu menghubungkan antar wilayah terus dijalankan, yang pada tahap awal ini telah dilakukan pengerasan dengan batu dari 198 km menjadi 331,95 km. Hal ini akan mempermudah akses transportasi dan distribusi barang/jasa antar wilayah sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pada tahun 2006 jumlah pasar umum yang ada di Kabupaten Kutai Barat berjumlah 17 pasar yang berpusat pada 17 Kecamatan yang konsentrasi jumlah penduduknya lebih banyak,





dan pada tahun 2010 perkembangan pasar umum bertambah menjadi 24 pasar yang berpusat pada 17 Kecamatan, sehingga perkembangan pasar umum tahun 2006 dibandingkan pada tahun 2010 meningkat 29,17 % dan setiap tahun meningkat 7,29 %. Kondisi menunjukkan bahwa dinamika perekonomian di Kutai Barat berkembang cukup pesat terutama untuk sektor perdagangan kecil dan eceran.

2.4.2.2. Daya Saing Sumber Daya Alam

Kutai Barat memiliki sumberdaya alam yang besar untuk dikembangkan, khususnya dalam bidang pertambangan dan pertanian. Bidang pertambangan masih memungkinkan untuk dikembangkan dan bidang ini menguasai sekitar 50% PDRB di Kutai Barat, melalui tambang batu bara yang tergolong besar di Kalimantan Timur. Dari sektor pertanian, Kutai Barat merupakan penghasil karet dan kelapa sawit yang terkemuka di Kalimantan Timur. Demikian pula dengan hasil hutan terutama kayu meranti yang mampu memberikan kontribusi besar bagi Kutai Barat. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada investor di bidang perkebunan tersebut karena masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Sektor pertanian yang memiliki potensi besar adalah tanaman pangan yaitu padi, palawija, sayur, dan buah-buahan. Untuk perkebunan, terdapat tiga sektor potensial yaitu karet, kelapa sawit, dan kakao. Kutai Barat juga memiliki potensi dalam hal peternakan dan perikanan. Sektor peternakan yang potensial adalah terutama peternakan sapi dan babi.

Dengan luasnya daerah Kutai Barat, terdapat 45% yang masih memungkinkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, lokasi tersebut terutama di kecamatan Long Hubung, Damai, Muara Pahu, Barong Tongkok, Bentian, Melak, Jempang, Penyinggahan dan Bongan.

2.4.3. Iklim Investasi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta





pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi*, maka dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Pada tahun 2018, realisasi penamanan modal dalam negeri (PMDN) di Kutai Barat sebanyak 31 proyek dengan nilai investasi 3.000.858 juta rupiah, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.522 orang. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) realisasinya pada tahun 2018 tercatat 31 proyek, dengan nilai 43.957,6 ribu dollar US dan tenaga kerja 768 orang. Secara umum kondisi realisasi penanaman modal di Kutai Barat tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya cenderung menunjukkan tren positif khususnya dari sisi nilai investasi.

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 mencapai \$ 67,92 juta atau sekitar Rp. 950,880 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 39 paket dan menyerap tenaga kerja 18 orang TKI dan 818 TKA. Di sisi lain nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan jumlah PMDN yang terhimpun sebesar Rp. 243.093.000.000. Pertumbuhan investasi di Kutai Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

67.920.000 67.079.600 70.000.000 60.000.000 42.137.000 43.900.000 50.000.000 37.063.600 40.000.000 PMA (US\$) 30.000.000 20.000.000 10.000.000 2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2. 18 Perkembangan Nilai Investasi PMA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2020

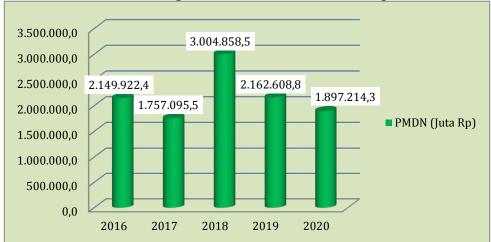
Sumber Data : DPMPTSP Kab. Kutai Barat, 2021

Kutut Durut, 2021





Gambar 2. 19 Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber Data: DPMPTSP Kab. Kutai Barat, 2021

Pada tahun 2020 nilai investasi di Kutai Barat untuk PMDN dan PMA masing-masing mencapai Rp1.897.214 juta dan US\$37.063,6 ribu. Nilai investasi tersebut untuk proyek PMDN sebanyak 156 dan PMA sebanyak 67. Nilai investasi PMDN dan PMA Kutai Barat adalah peringkat ke 4 di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 89 Perbandingan Investasi di Kalimantan Timur Tahun 2020

J	Jumlah	Proyek	Realisasi Investasi			
Kabupaten/Kota	PMDN	PMA	PMDN (Juta Rp)	PMA (ribu US\$)		
1. Paser	170	30	432 992,30	16 069,90		
2. Kutai Barat	156	67	1 897 214,30	37 063,60		
3. Kutai Kartanegara	466	135	2 284 878,70	63 190,10		
4. Kutai Timur	533	113	1 317 579,20	117 645,70		
5. Berau	249	87	3 615 380,50	16 223,30		
6. Penajam Paser Utara	114	22	487 048,20	5 870,00		
7. Mahakam Ulu	20	16	508 160,00	11 453,80		
8. Balikpapan	1 027	214	13 849 409,80	36 093,80		
9. Samarinda	822	82	659 902,80	18 803,70		
10. Bontang	367	12	881 443,00	55 613,30		





	Jumlah	Proyek	Realisasi Investasi		
Kabupaten/Kota	PMDN	PMA	PMDN (Juta Rp)	PMA (ribu US\$)	
Kalimantan Timur	3 924	778	25 934 008,80	378 027,20	

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021.

Dengan iklim investasi yang kondusif, dinamika perekonomian masyarakat akan berkembang dengan pesat. Kebijakan penyederhanaan yang lebih sederhana dan terpadu akan mendorong akses masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha, baik dari dalam maupun luar daerah Kutai Barat, akan meningkat.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kutai Barat masih lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh besaran rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 112,07 di tahun 2018. Hal ini berarti bahwa untuk setiap penduduk 100 perempuan, maka terdapat 112 orang penduduk laki-laki.

Untuk melihat komposisi penduduk Kabupaten Kutai Barat dapat digunakan piramida penduduk karena dapat menggambarkan kondisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Dari sisi komposisi penduduk terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, sementara itu jumlah penduduk tidak produktif yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014, komposisi penduduk usia 15-64 tahun sebesar 66,83 persen menjadi 66,84 persen pada tahun 2018, sementara itu komposisi penduduk usia 0-14 tahun menurun dari 29,63 persen menjadi 29,60 persen. Namun sebaliknya yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan dari 3,54 persen menjadi 3,55 persen. Hal tersebut menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Kutai Barat terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 49,625 menurun menjadi 49,61 pada tahun 2018, yang berarti setiap 100 penduduk produktif di Kutai Barat menanggung 49 hingga 50 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak (0-14tahun) dan lansia (65 tahun ke atas). Angka ketergantungan tahun 2019 masih sama bila dibandingkan tahun 2018 yaitu 49,61.





Tabel 2. 90 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 - 2019

	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk	Persent	tase (%)	Angka rasio ketergantungan	
Tahun	tidak produktif (jiwa)	produktif (jiwa)	Penduduk produktif	Penduduk tidak produktif		
2015	48.367	97.471	66,84	33,16	49,62	
2016	48.519	97.788	66,84	33,16	49,62	
2017	48.745	98.253	66,84	33,16	49,61	
2018	48.943	98.655	66,84	33,16	49,61	
2019	49.080	98,940	66.84	33.16	49.61	

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat

Dari sisi ketenagakerjaan, pada tahun 2018, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Kutai Barat sekitar 76.343 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai persentase TPAK, semakin besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja, begitu pula sebaliknya. TPAK Kutai Barat tahun 2018 tercatat sebesar 71,65 persen.

Di Tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kutai Barat mencapai 80.181 dengan TPAK sebesar 71,02 persen. TPAK Kutai Barat tersebut tertinggi kedua setelah Kabupaten Mahakam Ulu dan cukup jauh di atas TPAK Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kesempatan kerja tahun 2020 sebesar 97,74 tertinggi kedua setelah Kabupaten Mahakam Ulu dan lebih tinggi dibandingkan tingkat kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 91 Perbandingan Angkatan Kerja di Kalimantan Timur Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Bekerja	Pernah Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja	TPAK	Tingkat Kesempatan Kerja
1. Paser	136 131	2 823	3 614	6 437	142 568	67,88	97,47
2. Kutai Barat	76 195	2 175	1 811	3 986	80 181	71,02	97,74
3. Kutai Kartanegara	339 369	9 769	10 728	20 497	359 866	61,98	97,02
4. Kutai Timur	182 916	4 455	6 081	10 536	193 452	68,96	96,86
5. Berau	107 624	3 073	2 692	5 765	113 389	67,4	97,63
6. Penajam Paser Utara	76 902	2 715	2 389	5 104	82 006	69,04	97,09
7. Mahakam Ulu	14 499	192	333	525	15 024	76,22	97,78
8. Balikpapan	282 258	18 589	9 322	27 911	310 169	62,9	96,99



*	, Y,	A A A A	•

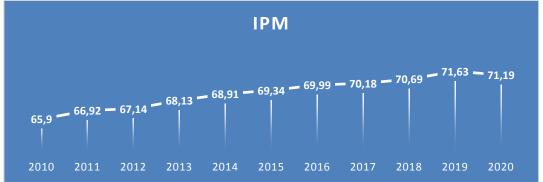
Kabupaten/Kota	Bekerja	Pernah Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja	TPAK	Tingkat Kesempatan Kerja
9. Samarinda	393 670	23 003	12 420	35 423	429 093	65,16	97,11
10. Bontang	83 232	5 553	3 147	8 700	91 932	69,24	96,58
Kalimantan Timur	1 692 796	72 347	52 537	124 884	1 817 680	65,5	97,11

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah indkator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

IPM Kabupaten Kutai Barat selama 2010-2019 menunjukkan tren yang terus naik, namun pada tahun 2020 IPM Kutai Barat mengalami penurunan dari 71,63 di tahun 2019 menjadi 71,19 pada tahun 2020 akibat dampak dari Pandemi Covid.

Gambar 2. 20 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Barat 2010-2020



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Bila dilihat dari komponen IPM, terlihat penyebab turunnya IPM Kutai Barat di tahun 2020 adalah turunnya komponen pengeluaran perkapita penduduk. Pada tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk adalah Rp10.338.000 namun di tahun 2020 pengeluaran perkapita turun cukup tajam menjadi Rp9.712.000 atau mengalami penurunan sebesar 6,45%. Untuk komponen IPM laiinya meskipun kecil namun menunjukkan kenaikan selama 2019-2020.

Tabel 2. 92 Komponen IPM Kabupaten Kutai Barat 2010-2020

Tahun	Pengeluaran Perkapita	Harapan Lama	Umur Harapan	Rata-rata Lama
Talluli	(Ribuan/kapita/tahun)	Sekolah (tahun)	Hidup (tahun)	Seolah (tahun)





1	l i	Í	 	
2010	8632	11,01	71,74	7,26
2011	8746	11,54	71,82	7,46
2012	8801	11,57	71,9	7,53
2013	9228	11,58	71,96	7,89
2014	9262	12,14	72,03	7,98
2015	9380	12,3	72,19	8,02
2016	9492	12,75	72,28	8,03
2017	9532	12,82	72,37	8,06
2018	9849	12,88	72,57	8,07
2019	10338	12,89	72,79	8,34
2020	9712	12,9	72,86	8,47
	V-1:			

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, IPM Kutai Barat pada tahun 2020 adalah terendah kedua setelah Kabupaten Mahakam Ulu. Nilai IPM Kutai Barat tahun 2020 tersebut juga cukup jauh di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur. Dari semua komponen IPM tersebut, IPM Kutai Barat yang cukup besar bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur adalah komponen umur harapan hidup, sementara komponen yang lain masih menduduki terendah kedua setelah Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2. 93 Perbandingan IPM di Provinsi Kalimantan Timur 2010-2020

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	66.54	67.11	68.18	69.61	69.87	70.3	71	71.16	71.61	72.29	72,04	
Kutai Barat	65.9	66.92	67.14	68.13	68.91	69.34	69.99	70.18	70.69	71.63	71,19	72.07
Kutai Kartanegara	67.45	68.47	69.12	70.71	71.2	71.78	72.19	72.75	73.15	73.78	73,59	
Kutai Timur	66.94	67.73	68.71	69.79	70.39	70.76	71.1	71.91	72.56	73.49	73,00	
Berau	69.16	70.43	70.77	72.02	72.26	72.72	73.05	73.56	74.01	74.88	74,71	
Penajam Paser	66.37	66.92	67.17	68.07	68.6	69.26	69.96	70.59	71.13	71.64	71,41	





Utara												
Mahakam Ulu	ı	ı	ı	63.81	64.32	64.89	65.51	66.09	66.67	67.58	67,09	
Balikpapan	75.55	76.02	76.56	77.53	77.93	78.18	78.57	79.01	79.81	80.11	80,01	
Samarinda	75.85	77.05	77.34	77.84	78.39	78.69	78.91	79.46	79.93	80.2	80,11	
Bontang	76.97	77.25	77.55	78.34	78.58	78.78	78.92	79.47	79.86	80.09	80,02	
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	75.83	76.61	76,24	

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2020.

2.4.5. Ketahanan Pangan

Pada tahun 2017, Kabupaten Kutai Barat memiliki luas panen padi sawah seluas 1.116 hektar dan luas panen padi ladang seluas 2.179.5 hektar. Luas panen padi sawah yang terluas terdapat di Kecamatan Bongan seluas 368.9 hektar kemudian diikuti oleh Kecamatan Manor Bulatn seluas 356 hektar. Sedangkan kecamatan yang tidak memiliki luas panen padi sawah adalah Kecamatan Penyinggahan, Muara Lawa, Bentian Besar, dan Sekolaq Darat. Luas panen padi ladang yang terluas terdapat di Kecamatan Tering seluas 434 hektar kemudian diikuti oleh Kecamatan Linggang Bigung seluas 281.5 hektar. Sedangkan kecamatan yang tidak memiliki luas panen padi ladang adalah Kecamatan Bongan dan Penyinggahan. Produksi padi ini dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Kutai Barat tidak memiliki ketergantungan terhadap daerah lain.

Meski demikian, cuaca yang tidak dapat diprediksi tekadang menyebabkan produksi padi tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman padi perlu didorong dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.

Pada tahun 2019-2020 luas panen padi di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari 292,91 ha taHun 2019 naik menjadi 518,34 ha atau naik sebesar 76,96%. Kenaikan luas panen tersebut diikuti dengan kenaikan produksi padi dari 962,88 ton di tahun 2019 menjadi 1.334,89 ton di tahun 2020 sehingga produksi beras juga menunjukkan kenaikan dari 557,18 ton di tahun 2019 menjadi 772,5 ton di taun 2020. Dengan demikian produktivitas padi adalah 3,29 ton/ha di tahun 2019 dan pada tahun 2020 produktivitas padi turun cukup besar menjadi 2,58 ton/ha.

Tabel 2. 94 Perbandingan Luas panen, Produksi Padi, dan Produksi Beras Di Provinsi Kalimantan Timur 2019-2020

Kabupaten/Kota Luas panen (Ha) Produksi (ton) Produksi Beras (ton)
--





	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Paser	13 012,74	11 595,54	48 251,88	44 909,14	27 922,00	25 987,67
2. Kutai Barat	292,91	518,34	962,88	1 334,89	557,18	772,5
3. Kutai Kartanegara	31 358,20	32 214,63	121 202,53	119 318,88	70 136,52	69 046,47
4. Kutai Timur	4 541,74	4 839,24	15 926,08	16 697,53	9 215,95	9 662,40
5. Berau	4 771,22	6 445,43	16 739,31	24 328,01	9 686,59	14 077,92
6. Penajam Paser Utara	13 138,93	13 712,86	41 622,32	46 497,76	24 085,68	26 906,94
7. Mahakam Ulu	470,25	523,36	1 521,06	1 340,94	880,19	776
8. Balikpapan	12,52	118,31	37,27	428,87	21,58	248,2
9. Samarinda	2 021,86	2 204,31	7 212,12	7 631,15	4 173,47	4 415,93
10. Bontang	87,38	80,76	342,92	368,38	198,45	213,2
Kalimantan Timur	69 707,75	72 252,78	253 818,37	262 855,55	146 877,61	152 107,09

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Perikanan dan peternakan juga merupakan faktor pendukung ketahanan pangan daerah. Sektor perikanan juga menjadi salah satu program strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kutai Barat. Produksi penangkapan ikan yang keseluruhan berada di perairan umum di Kutai Barat pada tahun 2017 mencapai 1.209,0 ton, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 1.202 ton dengan jumlah rumah tangga perikanan umum sebanyak 7.700 RT. Tahun 2018 produksi ikan dari perairan umum menunjukkan peningkatan menjadi 1.470 ton.

Di bidang peternakan, salah satu arah kebijakan yang diprogramkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas peternakan lima tahun kedepan yakni pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi komoditas ekspor. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, babi, dll, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, bebek, itik, kelinci dll.

Jika dilihat dari populasi ternak hewan besar di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2018, tercatat populasi terbesar yaitu babi dengan jumlah 35.824 ekor, diikuti sapi sebanyak





7.580 ekor, kambing 7.787 ekor dan kerbau 1.003 ekor. Sedangkan produksi daging yang dihasilkan ternyata ternak sapi yang terbesar yaitu 568,07 ton disusul babi dengan produksi 236,17 ton. Jika dilihat dari populasi daging hewan kecil seperti unggas di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2018, tercatat ayam kampung sebanyak 210.306 ekor, lalu ayam pedaging 3.010.836 ekor dan itik 20.425 ekor.

Dalam hal pengeluaran di bidang pangan, pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Barat cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan yang terbagi ke dalam 14 kelompok. Kelompok tersebut adalah padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayursayuran, kacang-kacangan, buahbuahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, serta tembakau dan sirih.

Menurut kelompoknya, pengeluaran rata-rata perkapita dibedakan menjadi pengeluaran rata-rata perkapita kelompok makanan dan pengeluaran ratarata perkapita kelompok bukan makanan. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk penduduk Kabupaten Kutai Barat menurut kelompok makanan pada tahu 2017 adalah sebesar Rp. 646,504,00 dan tahun 2018 turun menjadi Rp631.311. Pengeluaran ratarata perkapita makanan yang terkecil adalah umbi-umbian sebesar Rp.6,539,00 dan yang terbesar adalah makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 154, 711,00.

Pada tahun 2018 pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk penduduk Kabupaten Kutai Barat menurut kelompok bukan makanan adalah sebesar Rp666.949, naik cukup drastic dibandingkan tahun 2017 yang besarnya Rp. 513,795,00. Pengeluaran rata-rata perkapita bukan makanan terkecil adalah keperluan pesta dan upacara sebesar Rp. 13,116,00 dan yang terbesar adalah perumahan, bahan bakar, penerangan air sebesar Rp340,681,00.

Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran rumah tangga pada tahun 2017 sebesar Rp1.160.299 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp1.298.461. Pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Barat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi non makanan adalah 51,36 persen dari total pengeluaran rumahtangga sedangkan sisanya sebesar 48,64 persen untuk konsumsi makanan.

Pada tahun 2021 ketersediaa energi perkapita (kalori/kapita/hari) mengalamai penurunan dari tahun 2020 sebesar 2081,4 menjadi 2045,0 dengan jumlah penurunan sebanyak 34,4 hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah energi yang dikonsumsi oleh





masyrakat sehingga dengan menurunnya energi yang di konsumsi oleh masyarakat mempengaruhi penilaian capaian ketersediaa energi perkapita (kalori/kapita/hari) pertahunnya.

Pada tahun 2021 ketersediaa protein perkapita (gram/kapita/hari) mengalamai penurunan dari tahun 2020 sebesar 98,00 menjadi 61,4 dengan jumlah penurunan sebanyak 36.6 hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah protein yang dikonsumsi oleh masyrakat sehingga dengan menurunnya jumlah protein yang di konsumsi oleh masyarakat sangat mempengaruhi penilaian capaian ketersediaa energi perkapita (gram/kapita/hari) pertahunnya.

Pada tahun 2021 jumlah kampung rawan pangan mengalamai penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 jumlah kampung rawan pangan sebanyak 9 kampung dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6 kampung rawan pangan, hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang harus di konsumsi sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh.

Pada tahun 2021 jumlah skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 85 menjadi 90,29 dengan jumlah peningkatan sebesar 5,29 hal ini menunjukkan bahwa tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan didaerah, tersedianya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu, serta diberdayakannya kelompok lumbung di daerah agar mampu menyediakan cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saatmenghadapi paceklik.

Pada tahun 2021 jumlah skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 84 menjadi 84,8 dengan jumlah peningkatan sebesar 4,8 hal ini menunjukkan bahwa berhasilnya pelaksanaan promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diverisifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), serta berjalan baiknya kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai





konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

2.5. KONDISI UMUM HASIL CAPAIAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN INDIKATOR AGREGAT

A. Hasil Capaian Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kutai Barat

Berikut merupakan kondisi umum hasil pembangunan di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Indikator Agregat.

Tabel 2. 95 Hasil Capaian Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kutai Barat

2. 75 Hash Capalan I Chibangu		aasai Kai	IKPJMD	Kutai Da	ııaı			
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kinerja pada awal periode RPJMD	inerja pada awal eriode PJMD						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016						
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARA	KAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataa	an Ekonon							
Laju inflasi	3,39	3,15	3,15	3,24				4,24
PBRB per kapita	150,51	150,51	175,43	191,34	195,01	183,84	184,46	
Fokus Kesejahteraan Sosial								
Angka melek huruf				97,75 %		97,90%		98,2 %
Angka rata-rata lama sekolah	,			8 8 Tahun		8 47 Tahun		9 Tahun
ringka rata rata lama sekolan	Tahun	Tahun	Tahun	o,o ranan	Tahun	o, ii ranan	Tahun	o ranan
			ı			T		T
yang dibina	20	-	25	30	95	95	111	45
Persentase obyek kebudayaan yang dimajukan dan dilestarikan	50	50	65	70	74	80	85	85
lumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	-	10	10	12	-	-	15
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Pemerintah '	Wajib							
Pendidikan								
APK PAUD	67,31	67,31	69	75	85	85	64,19	92,34
APM PAUD	65	65	67,01	79	89	89	n/a	96,78
APK SD/MI	103,34	103,34	115,35	115,4	115	106,96	102,49	
APM SD/MI	98,79	98,79	98,82	99,28	99,55	99,02	91,92	99,89
APK SMP/MTs	103,9	103,9	104	105,25	106,5	103,85	87,17	110,25
APM SMP/MTs	72,76	72,76	73,49	79,9	86,45	81,84	69,65	98,62
Guru PAUD Bersertifikat dan Berkompentesi	41,07	41,07	41,67	45,85	48,25	48,25	n/a	58,33
	24,22	24,22	29.3	35,68	45,05	45.05	n/a	57,81
Guru SD/MI Bersertifikat dan	7,12	7,12	7,72	15,24	35,52	35,52	15,76	50
Guru SMP/MTs Bersertifikat dan Berkompentesi	32,16	32,16	40,46	44,91	48,97	48,97	9,49	59,07
	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARA Fokus Kesejahteraan dan Pemerataa Laju inflasi PBRB per kapita Fokus Kesejahteraan Sosial Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Fokus Seni Budaya dan Olahraga Jumlah pelaku dan grup kesenian yang dibina Persentase obyek kebudayaan yang dimajukan dan dilestarikan Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pendidikan APK PAUD APM PAUD APM SD/MI APM SD/MI APM SD/MI APK SMP/MTs Guru PAUD Bersertifikat dan Berkompentesi Guru PAUD Bersertifikat dan Berkompentensi Guru SMP/MTs Bersertifikat dan Berkompentensi Guru SMP/MTs Bersertifikat dan	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Periode RPJMD 2016 (2) (3) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonon Laju inflasi PBRB per kapita 150,51 Fokus Kesejahteraan Sosial Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Fokus Seni Budaya dan Olahraga Iumlah pelaku dan grup kesenian yang dibina Persentase obyek kebudayaan yang dimajukan dan dilestarikan Iumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pendidikan APK PAUD 65 APK SD/MI APM PAUD 65 APK SD/MI APM SD/MI APM SD/MI APM SD/MI APM SD/MI APM SD/MI APM SMP/MTS Guru PAUD Bersertifikat dan Berkompentesi Guru PAUD Berkualifikasi S-1 Guru SD/MI Bersertifikat dan Berkompentensi Guru SMP/MTs Bersertifikat dan Berkompentensi	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) (3) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Laju inflasi PBRB per kapita 150,51 150,51 150,51 150,51 150,51 150,51 Fokus Kesejahteraan Sosial Angka melek huruf 97,15 % 97,15 % 8,03 Tahun Fokus Seni Budaya dan Olahraga lumlah pelaku dan grup kesenian yang dibina Persentase obyek kebudayaan yang dimajukan dan dilestarikan lumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pendidikan APK PAUD 65 65 APK SD/MI 103,34 103,34 APM SD/MI 103,34 103,34 APM SD/MI 103,9 103,9 APM SMP/MTS Guru PAUD Bersertifikat dan Berkompentesi Guru PAUD Bersertifikat dan Berkompentensi Guru SMP/MTS Bersertifikat dan	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH POMBANGUNAN DAERAH POMB	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Laju inflasi 3,39 3,15 3,15 3,24 PBRB per kapita 150,51 150,51 175,43 191,34 Fokus Kesejahteraan Sosial Angka melek huruf 97,15 % 97,15 % 97,15 % 97,50 % 97,75 % 8,03 Tahun Tahun PANUN Fokus Seni Budaya dan Olahraga Iumlah pelaku dan grup kesenian yang dibina Pengentase obyek kebudayaan yang dibina Pengelibina Pengelibina Pengelibina Pengelibina Pengelibina Pengelibina Pengelidikan APK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pendidikan APK PAUD 65 65 65 67,01 79 APK SD/MI 103,34 103,34 115,35 115,4 APM SD/MI 98,79 98,79 98,82 99,28 APK SMP/MTs 103,9 103,9 104 105,25 APM SMP/MTs 103,9 103,9 104 105,25 APM SMP/MTs 103,9 103,9 104 105,25 GUTU PAUD Bersertifikat dan Berkompentesi Guru PAUD Bersertifikat dan Berkompentensi Guru SMP/MTs Bersertifikat dan Berkompentensi	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PEMB	Capaian Setiap Tahun	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINER A PEMBANGUNAN DAERAH PEMB





No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(0)
(1)	(2) Curu CD /MI Portuglifikasi C 1	(3)	0	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) 50
2.1.1.11 2.1.1.12	Guru SD/MI Berkualifikasi S-1 Guru SMP/MTs Berkualifikasi S-1	9 78,42	9 78,42	9,01 77,4	15,1 78,5	25,51 79,54	25,51 79,54	59,11 93,79	85,63
2.1.1.12	dui u SMF / MTS Dei Rudiilikasi 3-1	10,42	10,42	77,4	70,5	7 3,34	13,54	73,77	00,00
2.1.2	Kesehatan								
2.1.2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	4,78 per 1000 kel Hidup	4,78 per 1000 kel Hidup	2,36 per 1000 kel Hidup	4,00 per 1000 kel Hidup	3,8 per 1000 kel Hidup	2,8 per 1000 kelahiran Hidup		3,10 per 1000 kel Hidup
2.1.2.2	Angka harapan hidup	72,8 Tahun	72,28 Tahun	72.37 Tahun	72,57 Tahun	72,79 Tahun	72,86 Tahun	73,10 Tahun	74 Tahun
2.1.2.3	Persentase Balita gizi buruk	5,2 %		4,80 %	4,5 %	4,1 %		0,0898	
2.1.2.4	Rasio Posyandu per satuan Balita	0,2		0,1703	0,1771	0,1839	0,0189	2,09	0,1907
2.1.2.5	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,00490 %		0,55 %	0,61 %	0,67 %	0,67%	0,82%	0,73 %
2.1.2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0060 %		0,0012 %	0,0018 %	0,0018 %	0,0018 %	0,0066 %	0,0018 %
2.1.2.7	Bor (dlm %)	74 %	70 %	68 %	61 %	65 %	59%	56%	74 %
2.1.2.8	Akreditasi Rumah Sakit Edisi SNAR I sudah tercapai	Belum tercapai			MADYA	MADYA	MADYA	MADYA	MADYA
2.1.3									
2.1.3.1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	6,0 %	6,0 %	8,0 %	9,0 %	13,0 %	15%	1,94%	20,0 %
2.1.3.2	Rasio tempat pemakaman umum per – satuan penduduk	31,8 %	31,8 %	31,8 %	41,8 %	51,80%	51,80%	30%	87,0 %
2.1.3.3	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	60,0 %	60,0 %	62,0 %	65,0 %	67,0 %	67,0%	11,2%	75,0 %
2.1.3.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokum en	4 Dokumen
2.1.3.5	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	1,9 %	1,9 %	1,9 %	2,0 %	2,2 %	2,5%	1,52%	3,4 %
2.1.4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permu	ılriman							
2.1.4.1	Rasio Permukiman Layak Huni	0,00 %	0,00 %	58,79 %	62,06 %	67,81 %	72%	74,93	85,00 %
2.1.4.2	Cakupan Ketertiban Pengelolaan Dan Penataan Pertanahan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %		%	40 %
2.1.4.3	Persentase Jumlah Penduduk Bersanitasi	0 %	0 %	0 %	53 %	60 %	63%	74,18 %	65 %
2.1.4.4	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	20,00 %	20,00 %	25,00 %	30,00 %	35,00 %	45%	70	40,00 %
2.1.4.5	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dan Jembatan Permukiman Dalam Kondisi Mantap	20,00 %	20,00 %	-	25,00 %	30,00 %	35,00 %	62,24 %	40,00 %





No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			apaian Set				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	M 1	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan P Persentase Partisipasi Pemilih	erlindunga	in Masyarai	kat	1	<u> </u>	1		I
2.1.5.1	dalam Pemilu				75 %	75 %	75%	-	75 %
2.1.5.2	Persentase Pembinaan terhadap LSM dan ORMAS	32 %	32 %	32 %	32 %	34 %	34%	60%	45 %
2.1.5.3	Persentase Tingkat Pemantauan KOMINDA Kabupaten	44 %	44 %	63 %	63 %	63 %	63%		63 %
2.1.5.4	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	14 Orang/ 10.000 Penduduk	14 Orang/ 10.000 Penduduk	16 Orang/ 10.000 Penduduk	18 Orang/ 10.000 Penduduk	20 Orang/ 10.000 Penduduk	26 Orang/ 10.000 Penduduk		24 Orang/ 10.000 Penduduk
2.1.5.5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	-	-	-	89 %	92%		95 %
2.1.5.6	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	1 %	5 %	5 %	13 %	26 %	30%		52 %
0.4.7	Tanana Karia								
2.1.7 2.1.7.1	Tenaga Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	78,10 %	78,10 %	10 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	23 Kasus	6 Kasus	30 Kasus
2.1.7.2	Mewujudkan pengembangan wilayah transmigrasi lokal dan regional	85 %	85 %	85 %	90 %	95 %	-		95 %
2.1.8	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Per	ompuan D	an Dolindur	agan Anak					
2.1.8.1	Rata - rata anak dalam keluarga / TFR	2,2 Anak	2,2 Anak	2,2 Anak	2,2 Anak	2,2 Anak	2,2	1,43	2,2 Anak
2.1.8.2	Cakupan akseptor KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5%	76,49	66 %
2.1.0	Dangan								
2.1.9 2.1.9.1	Pangan Ketersediaan energi perkapita (kalori/kapita/hari)	2437,00	2437,00	2248,00	2400,00	2400,00	2081,4	2045,0	2400,00
2.1.9.2	Ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)	79,96	79,96	96,98	98,00	98,00	98,00	61,4	98,00
2.1.9.3	Jumlah Kampung Rawan Pangan	14	14	13	12	11	9	6	9
2.1.9.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
2.1.9.4.1	- Ketersediaan	75,64	75,64	80	83	85	85	90,29	90
2.1.9.4.2	- Konsumsi	73,8	73,8	76,39	79,79	83,19	84	84,8	89,99
2 1 10	Lingkungan Hidup								
2.1.10	Indeks Pencemaran Air (Indeks								
2.1.10.1	Kualitas Air)	n⁄a	n⁄a	83%	93	94	94,62%		95
2.1.10.2	Indeks Kualitas tutupan Lahan	45 %	45 %	47 %	49 %	51 %	51,65%		55 %
2.1.10.3	Indeks Kualitas Udara	n∕a	n⁄a	82	83	84	85		86
2.1.11	Administrasi Kependudukan Dan Catata	n Sinil							
2.1.11	Rasio penduduk ber KTP per	77,96 %	77,96 %	84,86 %	94,98 %	98,67 %	99,08%	99,74%	100 %
	radio penduduk bel Kil pel	,50 /0	,55 /6	0 1,00 /0	0 1,00 /0	00,01 /0	00,0070	, , 0	100 /0





No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	satuan penduduk								
2.1.11.2	Kepemilikan akta kelahiran anak (0 – 18 tahun)	58 %	58 %	76 %	90 %	92 %	92%	93,44 %	100 %
2.1.11.3	Rasio pasangan ber akte nikah	0,2 %	0,2 %	0,23 %	0,4 %	0,52 %	52%	47,31%	100 %
	•								
2.1.12	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampui	ng							
2.1.12.1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung	20.27 %	20.27 %	40.21 %	60 %	80 %	82%		100 %
2.1.12.2	Persentase Kampung dan Kelurahan yang memiliki pelayanan yang baik.	26.91 %	26.91 %	47.43 %	68.47 %	84.34 %	84,34%		100 %
2.1.12.3	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif.	21.51 %	21.51 %	41.14 %	60.77 %	80.40 %	80,40%		100 %
2.1.12.4	Tingkat Cakupan masyarakat kampung dalam proses pembangunan melalui penerapan TTG dan pengelolaan SDA	84,0 %	84,0 %	21.70 %	31,7 %	41,7 %	45%		61,7 %
2.1.12.5	Persentase Program Pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh DPMK yang selaras dengan Provinsi dan Pusat.	20 %	20 %	40 %	60 %	80 %	82%		100 %
2.1.12.6	Terlaksananya pengembangan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kampung.	15 %	15 %	36.25 %	20 %	25 %	28%		35 %
2.1.12.7	Persentase Kampung Maju	-	-	_	-	-	25%	33%	33%
2.1.12.8	Persentase BUMK Aktif	-	-	-	_	_	39%	44%	44%
-1111210							0370	1170	1170
2.1.13	Perhubungan								
2.1.13.1.	umlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	149.961 Orang	149.961 Orang	150.000 Orang	151.000 Orang	152.000 Orang	112.003 Orang		154.000 Orang
2.1.14	Komunikasi Dan Informatika			Γ	1	T	Г	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2.1.14.1	Persentase infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik			50 %	51 %	52 %	53%	60%	54 %
2.1.14.2	Meningkatnya kapasitas dan tersedianya media publik			0 %	50 %	51 %	52%	65%	53 %
2.1.14.3	Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi			45 %	45 %	47 %	48%	50%	49 %
2.1.14.4	Terpenuhinya standar dan regulasi layanan komunikasi dan informasi			60 %	61 %	62 %	63%	65%	64 %
2.4.4=									
2.1.15	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah				1	I		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2.1.15.1	Nilai distribusi dan nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB	7,26%	7,26%	6,80%	6,88%	7,5%	8,20%		7,4 %
2.1.15.2	Jumlah serapan tenaga kerja IKM (Orang)	2.272	2.272	2.501	2.602	2.785	2.785	3.357	3.189





No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016						2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)						(8)	(9)
2.1.16	Penanaman Modal				7——		\ - /	\ <u></u>	
2.1.16.1	Nilai investasi PMA (US \$)	67.079.600	67.079.600	42.137.000	43.900.000	67.920.000	37.063.600		330.935.251,81
2.1.16.2	Nilai investasi PMDN (Rp Juta)	2.149.922,4	2.149.922,4	1.757.095,5	3.004.585,5	2.162.608,8	1.897.214,30		2.800.000,00
2.1.17	Pemuda Dan Olahraga								
2.1.17	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	155	155	170	187	205	205		247
2.1.17.2	Jumlah organisasi pramuka	82	82	90	98	116	116		232
	Jan 22 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
2.1.18	Perpustakaan Dan Kearsipan								
2.1.18.1	Persentase jumlah arsip memiliki nilai guna yang diselamatkan	20 %	20 %	23 %	25 %	27 %	29%		35 %
2.1.18.2	Persentase SKPD yang menerapkan tertib administrasi dengan kategori baik	54,60 %	54,60 %	56,50 %	58,75 %	60 %	60%		65 %
2.0	D. J. J. J. San Damoniata k Dilila								
2.2 2.2.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilih	ian							
2.2.1	Kelautan Dan Perikanan Produksi Perikanan			Ī	Ī				I I
2.2.1.1		759	759	1.015	1.400	1.600	1.884,53	2.177,46	2.000
2.2.1.1.1	- Budidaya (ton/tahun) - Tangkap (ton/tahun)	1.235	1.235	1.015	1.302	1.352	1.664,53	1.485,72	1.452
2.2.1.1.2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	33	33	34	35	36	37	1.400,72	38
2.2.1.2	Ketersediaan Ikan (ton/tahun)	5.250	5.250	5.300	5.350	5.400	5.400		5.500
Z.Z. I.U	Keterseulaali ikali (toli) taliulij	0.200	0.200	3.300	0.000	J.400	ე.400		0.000
2.2.2	Pariwisata								
2.2.2.1	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kutai Barat	160	160	210	260	310	410	5	410
2.2.2.2	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kutai Barat	19.000	19.000	20.500	22.000	23.500	26.500	10.871	26.500
2.2.2.3	Rata-rata Lama tinggal wisatawan yang menggunakan hotel non bintang di Kabupaten Kutai Barat	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
2.2.3	Pertanian	ı	ı	1	1	l I			1
2004	Produktivitas Tanaman Pangan	2.40	2.40	2.24	0.50	2.25	0.05	2.25	
2.2.3.1	Produktivitas padi sawah (ton/Ha)	3,43	3,43	3,91	3,59	3,35	3,35	3,35	5
2.2.3.2	Produktivitas Padi ladang (ton/Ha)	1,59	1,59	3,48	2,10	2,89	2,89	2,89	3,5
2.2.3.3	Produktivitas Jagung (ton/Ha)	3,27	3,27	3,02	5,10	4,81	4,82	5,48	5
2.2.3.4	Produktivitas Ubi Kayu (ton/Ha)	6,67	6,67	38,31	42,88	21,5	21,5	21,52	25
2.2.3.5	Produktivitas Ubi Jalar (ton/Ha)	16,85	16,85	7,27	11,32	10,56	10,62	15,10	20
2000	Produktivitas Perkebunan	100	400	110	100	100	100	150	04.074.00
2.2.3.6	Produktivitas Karet (ton/Ha)	100	100	110	120	130	130	150	64.874,02
2.2.3.7	Produktivitas sawit (ton/Ha)	26.279	27.067,37	27.879,39	28.715,77	29.577,24	20.577,24	7.404	31.378,5
2.2.3.8	Produktivitas Kakao (ton⁄Ha)	0,54	0,54	0,56	0,58	0,60	0,60	1,17	16,89





No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 202						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Populasi Ternak Besar								
2.2.3.9	Populasi sapi potong (ekor)	7.297	7.764	8.260	8.788	9.350	9.350	7.106	10.584
2.2.3.10	Populasi Kerbau (ekor)	880	897	914	932	950	950	939	988
	Populasi Ternak Kecil							1	
2.2.3.11	Populasi Kambing (ekor)	5.914	6.032	6.152	6.275	6.400	6.400	4.552	6.658
2.2.3.12	Populasi babi (ekor)	29.410	29.990	30.580	31.190	31.810	31.810	32.808	33.080
	Populasi Unggas							1	
2.2.3.13	Populasi Ayam Buras (ekor)	183.004	186.664	190.397	194.204	198.088	198.808	226.14 7	206.089
2.2.3.14	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	14,5	14,5	14,7	15,1	15,3	14,88	11,93	15,7
	101111111111111111111111111111111111111								
2.3									
2.3.1									
2.3.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah di tetapkan dengan perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.2	Tersedianya dokumen perencaaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.3	Tersedianya dokumen perencaaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90 %	90 %	93 %	95 %	95 %	97%	95,5 %	95 %
2.3.1.5	Ferlaksananya penelitian, kerjasama dan pengembangan daerah yang berkelanjutan berserta data pendukungnya	60 %	60 %	62 %	64 %	66 %	70%		72 %
2.3.2				1 22 2/	7 24 24	T/	T 2=2/	1	7 3-0/
2.3.2.1	Persentase Data Aset Yang Akurat	92 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95%	<u> </u>	95 %
2.3.2.2	Persentase laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	80 %	80 %	82 %	84 %	86 %	87%		90 %
2.3.3									
2.3.3.1	Tercapainya Target Pendapatan	95,12 %	95,54 %	88,82 %	91,03 %	99,18 %	92,70%	I	99,00 %
2.3.3.1	rercapaniya rarget rendapatan	33,12 /0	33,34 /0	00,02 /0	31,03 /0	33,10 70	32,1070		99,00 76
3									
3.1									
3.1.1	Jumlah koperasi aktif	344	344	352	353	364	367	367	367
3.1.2	Jumlah UMKM	2.382	2.382	2.412	3.469	3.494	6.309	11.037	11.037
3.1.3	Jumlah IKM	1.218	1.218	1.401	1.451	1.525	1.809	2113	2113
3.2.									
3.2.1	Indeks Pengarustamaan Gender (IPG)	82 %	82 %	82 %	82 %	83,84 %	83,86	84,28	83 %





Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam mencapai tujuan dan sasaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang baru sejak tahun 2020 sebagaimana adanya penyesuaian peraturan perundangan yang berlaku dan pendampingan/coaching. Peningkatan peran serta aparat pemerintahan kampung, lembaga kemasyarakatan kampung dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi tujuan utama DPMK.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan pada "Indeks Desa Membangun (IDM)" yaitu Indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan kemajuan kemandirian desa dan dijadikan landasan Pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, maupun kampung/desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih baik, merata dan tepat sasaran. Adapun Dimensi Indeks Desa Membangun yang dijadikan Indikator dalam Penilaian meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021
Kampung Maju	%	25 (48 Kampung)	33 (68 Kampung)
BUMK Aktif	%	16	16

B. Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan KLHS RPJMD Kutai Barat

Berikut merupakan kondisi umum hasil tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan KLHS RPJMD Kutai Barat.

Tabel 2. 96 Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan KLHS RPJMD Kutai Barat

Nomor Tujuan TPB	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target	Belum dilaksanakan, belum mencapai target		Tidak ada di wilayah kajian	Jumlah
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	8	10	0	5	1	24
TPB 2. Tanpa Kelaparan	6	2	0	3	0	11
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16	4	0	14	0	34
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	7	4	0	2	0	13
TPB 5. Kesetaraan Gender	4	5	0	5	0	14
TPB. 6 Air Bersih	2	4	0	12	0	18
TPB 7. Akses Energi	0	0	0	2	0	2
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	5	8	0	6	0	19





Nomor Tujuan TPB	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target	Belum dilaksanakan, belum mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Jumlah
TPB 9. Inovasi Industri	4	2	0	4	3	13
Infrastruktur						
TPB 10. Berkurangnya	4	1	0	4	2	11
Kesenjangan	•	*	· ·	•	_	**
TPB 11. Kota dan Permukiman	7	1	0		5	13
Berkelanjutan	,	1	U		5	13
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	2	0	0	3	0	5
TPB 13. Perubahan Iklim	2	0	0	0	0	2
TPB 15. Ekosistem Daratan	0	1	0	3	0	4
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	9	2	0	10	0	21
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	7	0	3	5	1	16
Jumlah	83	44	3	78	12	220
Persentase	40%	21%	1%	38%		•
Kewenangan		208			1	

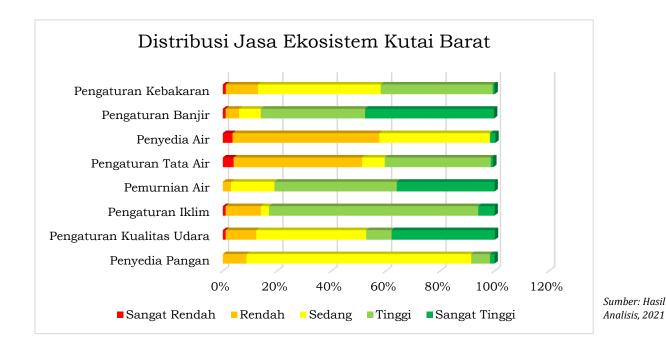
Sumber: KLHS RPJMD Kutai Barat, 2021

Selain hasil capaian pembangunan berkelanjutan, pada KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Barat juga menghasilkan analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Daerah, pengkajian TPB, perumusan Skenario dan Rekomendasi. Salah satu hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem adalah menghasilkan kategori jasa ekosistem. kategori ini merupakan representasi dari tinggi rendahnya nilai jenis-jenis jasa ekosistem pada suatu wilayah. Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara (sangat rendah) hingga (sangat tinggi), yang ditampilkan menurut administrasi dan ekoregion. Karena berbagai keterbatasan, maka jasa ekosistem yang digunakan dalam KLHS RPJMD Kutai Barat adalah penyedia pangan, penyedia air, pengaturan iklim, pengaturan kualitas udara, pengaturan pemurnian air, pengaturan tata air, pengaturan bencana banjir dan pengaturan bencana kebakaran. Analisis berikut ini merupakan gambaran distribusi jasa ekosistem di Kutai Barat.

Tabel 2. 97 Distribusi Jasa Ekosistem Kutai Barat







Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Berdasarkan analisis, jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Kutai Barat dapat dikategorikan kondisinya sedang (55,54%). Kondisi daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Kutai Barat sebagian besar adalah sedang (41%) dan rendah (54%), sehingga perlu adanya kepedulian dan kehati-hatian dalam memanfaatkan sumberdaya air sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, terutama dalam memanfaatkan dan menyediakan air bersih.

Target Sasaran dan Indikator RKPD Tahun 2021Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi Mantap (%)	67,20%	68,77 %
Meningkatnya Infrastruktur dasar di wilayah Kutai Barat	Cakupan Layanan Air Minum (%)	86,02%	77,64 %
Meningkatnya Kualitas	Rata rata lama sekolah	9,2 Tahun	





Sasaran	Indikator	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
pendidikan Masyarakat			8,70 Tahun
	Angka harapan lama sekolah	15,07 Tahun	13,02 Tahun
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	73 THN	73,10 Tahun
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB	В
	Opini BPK	WTP	WTP (Tahun 2020)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Nilai IKM	78	87,73
	Nilai EKPPD	3	2,9 (Tahun 2020)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor	Nilai PDRB sektor pertanian dlm arti luas	15,7 %	8,46 % (Triwulan III Tahun 2021 Wilayah Kaltim)
unggulan	Nilai PDRB industry pengolahan	6.90%	17,06 % (Triwulan III Tahun 2021 Wilayah Kaltim)
Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi (PMDN dan PMA) Rp Juta	2.800.000,00	1.870.025,98
Meningkatnya Pendapatan perkapita	PDRB perkapita	186 juta	184,46 Juta
Menurunnya tingkat pengagguran terbuka (angka pengagguran)	Angka pengangguran terbuka (Rasio penduduk yang bekerja (%)	13 %	5,14 %
Meningkatnya Kualitas Lingkugan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,63 %	74,15 %
Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan	93,20%	92,5 % (Angka sangat sementara)
			_
Meningkatnya keamanan dan	% konflik sosial / %angka konflik	80 %	78,4 %
ketertiban bagi masyarakat	% gangguan ketertiban yang terselesaikan K3	18,73 %	18,35 %
Meningkatnya kampung maju	Jumlah kampung maju	17 Kampung	65 Kampung
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Pemuda Berprestasi	100	20
Meningkatnya kesetaraan gender (IDG/IPG)	IPG/IDG	83 %	84,28

Target dan Realisasi Kondisi Makro Pembangunan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

No	Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-2,92 %	4,5 - 5,5 %	4,18 %
2.	Indeks Pembangunan Manusia	71,19	72,78- 72,90	72,07
3.	Angka Kemiskinan	9,29 %	9,2 - 9,7 %	10,24 %





4.	Pendapatan Per Kapita	183,84 Juta	186 Juta	184,46 Juta
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97 %	7,5 - 8,2 %	5,14 %
6.	Indeks Gini	0,338	0,377–0,379	0,317
7.	Angka Harapan Hidup	72,86 Tahun	73 tahun	73,10 Tahun





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2022, proyeksi Tahun 2023, yang memuat pendapatan, kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2022. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 merupakan tahun ke dua Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat periode pembangunan 2021-2026. Dalam mewujudkan arah kebijakan ekonomi daerah "Kutai Barat yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Dengan prioritas meliputi Optimalisasi Daya ungkit subsektor unggulan untuk peningkatan perekonomian masyarakat local, Peningkatan Infrastruktur penunjang Ekonomi Kerakyatan dan Konektivitas untuk Pemerataan dan Pemulihan Sosial Ekonomi, Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkulitas, Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan, Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber daya manusia, infrastruktur dan nilai tambah produk ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan kutai barat yang adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan. Maka perlu adanya struktur pendanaan yang efektif, efisien, akuntabel dan relevan dalam menyokong setiap program kegiatan pembangunan.

Pandemi virus corona (covid-19) yang masih berlangsung hingga tahun 2021 memberikan efek yang cukup besar kepada hampir seluruh sektor perekonomian yang ada di





Indonesia. Sejalan dengan itu upaya pengendalian pandemi covid-19 terus dilakukan pemerintah bersama stakeholder termasuk semua masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu upaya pengendalian ini perlahan dapat mulai kita rasakan dari semakin membaiknya perekonomian Indonesia, terutama di triwulan II hingga triwulan IV 2021. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen, ini merupakan capaian yang baik mengingat pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Tahun 2023 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari 2022, tetapi tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia, Sehingga: optimis tetapi harus realistis.

Berbagai arahan kebijakan dalam rangka pencegahan penuluaran COVID-19 telah diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur dan di Kabupaten Kutai Barat pada khususnya, diantaranya dengan menjalankan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), mengurangi interaksi dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta sistem kerja bekerja di rumah bagi ASN, belajar dirumah bagi mahasiswa dan pelajar, beribadah di rumah, meminimalisir pergerakan orang dari dan ke luar daerah.

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan antara lain potensi kemunculan varian baru Covid-19, isu disrupsi suplai dan volatilitas harga energi yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada stabilitas keuangan emerging markets. Selain itu, normalisasi kebijakan moneter negara maju dengan menaikkan suku bunga, tensi geopolitik yang masih tinggi, dan isu perubahan iklim juga menjadi risiko-risiko yang perlu diwaspadai ke depan.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur ekonomi suatu wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor





produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 yaitu sebesar 28,35 triliun rupiah, lalu di tahun 2019 sebesar 29,18 triliun rupiah dan memasuki tahun 2020 nilainya menurun menjadi 27,26 triliun rupiah. Pada Tahun 2021 sebesar 32,09 Trilyun. Tahun 2021 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan perekonomian secara global di Kutai Barat sudah mulai membaik karena covid-19 sudah mulai melandai.

35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 32.092.829,61 15.000.000,00 28.865.244,51 28.242.132,16 27.260.012,51 25.787.193,50 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2022

Jika dilihat distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2021, Terdapat empat sektor dominan yang berpengaruh terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan berperan (49,15 persen) terhadap perekonomi Kutai Barat; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,97 persen); Sektor Konstruksi (10,84 persen) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,23 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain seperti Sektor Industri Pengolahan berperan 6,38 persen; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,45 persen; Sektor Jasa





Pendidikan 1,78 persen; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,12 persen; Sektor Informasi dan Komunikasi 1,15 persen; dan untuk sektor-sektor lainnya hanya berperan kurang dari 1 persen.

R,S,T,U. Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Pengadaan Listrik dan dan Perikanan; -0,8 Penggalian; 5,73 Jasa Industri Pengolahai Gas; 2,92 Lainnya; 2,29 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, lasa Kesehatan dan imbah dan Daur Ulang Kegiatan Sosial; 15,92 4.34 Konstruksi; 4,11 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2,68 Transportasi dan Administrasi Pergudangan; 4,84 Jasa Informasi dan Pemerintahan. Keuangan; Komunikasi; 9,23 Pertahanan dan 7,24 Jaminan Sosial Wajib; Penyediaan Akomodasi 4.57 dan Makan Minum: 3,36 Jasa Perusahaan; 1,29 Real Estate; -1,73

Gambar 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2022

Diketahui bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling banyak menyumbangkan perannya pada PDRB Kutai Barat, yaitu sebesar 49,15 persen. Hal ini tidak lah bagus dikarenakan kabupaten Kutai Barat masih sangat tergantung dengan hasil alamnya lebih dari setengahnya. Pada Tahun 2021 hampir semua sektor mengalami penurunan walaupun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh tren kenaikan batubara, sehingga menyebabkan kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan sebesar 3,47 persen. Tahun 2021 tren kenaikan harga komoditas batubara yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai negara eksportir batubara thermal terbesar untuk meningkatkan profitabilitas dan menguatkan pemenuhan dalam negeri.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2021 tetap tumbuh positif diharapkan akan terus terjadi dengan syarat pengelolaannya berjalan dengan terintegrasi dari hulu ke hilir. Lapangan usaha konstruksi juga mengalami perbaikan yang didorong oleh





kembali menggeliatnya aktivitas konstruksi Pembangunan oleh Pemeritah Lapangan usaha industri pengolahan juga masih menunjukkan tren positif walaupun di kondisi pandemi Sementara itu, lapangan usaha perdagangan juga mengalami perbaikan sejalan dengan harga komoditas utama sebagai source of income yang masih berada pada level tinge. Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mencatat kecenderungan terus bertumbuh meskipun lambat, kondisi mobilitas yang terbatas sejalan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat masyarakat cenderung menahan untuk melakukan konsumsi. Begitu pula pada komponen lainnya juga mengalami tren peningkatan sehingga pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,18 persen.

Gambar 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kab Kutai Barat,2021

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat atas dasar harga Konstan menurut Pengeluaran pada tahun 2018 yaitu sebesar 20,11 triliun rupiah, lalu di tahun 2019 sebesar 21,25 triliun rupiah dan memasuki tahun 2020 nilainya menurun menjadi 20,63 triliun rupiah; memasuki Tahun 2021 nilainya mengalami kenaikan menjadi 21,50 triliun rupiah.





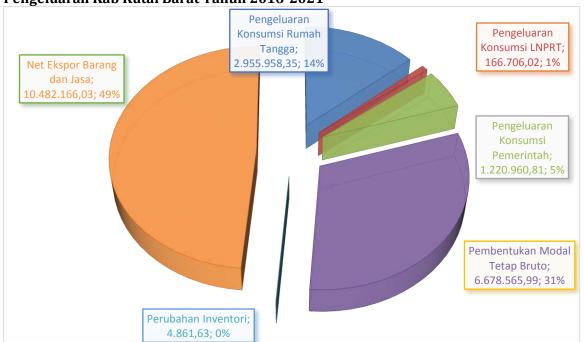
Gambar 3. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Kab Kutai Barat, 2021

Jika dilihat distribusi PDRB ADHK menurut Pengeluaran tahun 2021, masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 10,48 triliun, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,67 triliun, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,95 triliun, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,22 Triliun dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 166,71 Miliar.

Gambar 3. 5 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2016-2021







Sumber: BPS Kab Kutai Barat, 2021

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi dari barang dan jasa tersebut.

Perekonomian Kabupaten Kutai Barat yang salah satunya diukur dari besaran Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benarbenar murni disebabkan oleh kenaikan produksi seluruh sektor produksi. Selama periode 2016-2021 PDRB Kutai Barat cenderung menunjukkan trend yang positif, namun memasuki tahun 2020 penurunan, sedangkan Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2016 tercatat sebesar - 0.83 persen, di tahun 2017 tumbuh positif menjadi 3,64 persen dan 5,06 di tahun 2018. Di tahun 2019 kembali tumbuh menjadi 5,67 persen namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi -2,92 persen, tahun 2021 menjadi 4,18 persen.

35.000.000,00 7 5,67 6 5.06 30.000.000,00 5 3,64 4 25.000.000,00 3 20.000.000,00 2 15.000.000.00 0 10.000.000,00 -1 -2 5.000.000,00 -3 27.260.012,51 32.092.829,61 28.242.132,16 28.865.244,51 25.787.193,50 0,00 -4 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021





Sumber: BPS Kab Kutai Barat, 2021

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021, jika komoditas batubara dan galian diabaikan (PDRB Tanpa Batubara), maka perekonomian Kutai Barat juga mengalami pertumbuhan yang positif. Dari 5,21 persen pada tahun 2018 menjadi 5,65 persen pada tahun 2019, namun terkoreksi cukup dalam pada tahun 2020 menjadi -1,89 persen. Dan Tahun 2021 meningkat menjadi 2,28 % . Hal ini disebabkan perekonomian di Kutai Barat sudah membaik karena covid-19 sudah mulai melandai.

5,65 6 5,21 5 4 3 2 1 0 2017 2018 2019 2021 2020 -1 1,89 -2 -3

Gambar 3. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Kutai Barat Tahun 2016-2020 Tanpa Batubara

Sumber: BPS Kab Kutai Barat, 2022

c. Inflasi

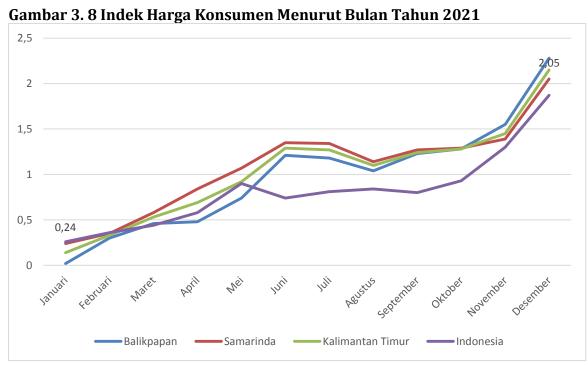
Indeks Harga Konsumen (IHK)merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga. Di Kalimantan Timur, pengukuran IHK hanya dilakukan di daerah perkotaan, yaitu di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan untuk Kabupaten Kutai Barat belum tersedia data untuk inflasi karena belum pernah dilakukan Survey Biaya Hidup sebagai dasar dalam penghitungan inflasi, oleh karena itu nilai inflasi di Kutai Barat mengacu inflasi Kota Samarinda, karena hampir sebagian besar barang-barang disuplai dari daerah tersebut.

Pada tahun 2021 Inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda Bulan Desember 2021 sebesar 2,05 persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing tercatat sebesar 1,49 persen dan 0,86 persen. Provinsi Kalimantan





Timur (Gabungan Kota Samarinda dan Kota Balikpapan) pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,68 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender 2,15 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,15 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,78 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 1,39 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,06 persen; dan kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok yang menunjukkan penurunan yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,90 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,24 persen.



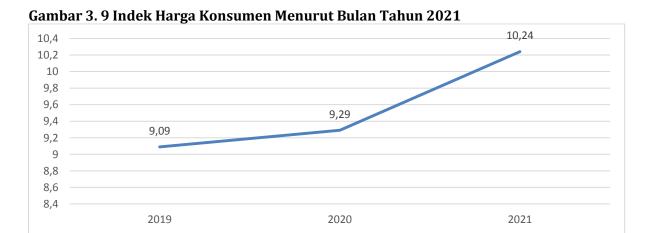
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022





d. Kemisikinan

Berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 sebanyak 15,38 ribu jiwa atau 10,24 persen dari total penduduk. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1,6 ribu jiwa atau 0,95 persen poin. Apabila dilihat berdasarkan data selama 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat cenderung mengalami kenaikan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan. Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 598.037,- perkapita/bulan meningkat 2,48 persen atau Rp 14.505 perkapita/bulan dibanding tahun 2020. Hal ini merupakan signal bahwa taraf perekonomian masyarakat Kabupaten Kutai Barat semakin baik

e. Ketenagakerjaan

Penduduk dikelompokkan dalam kelompok usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja sendiri dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan mencari kerja, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya. Pada tahun 2020, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Kutai Barat sekitar 80.181 orang.

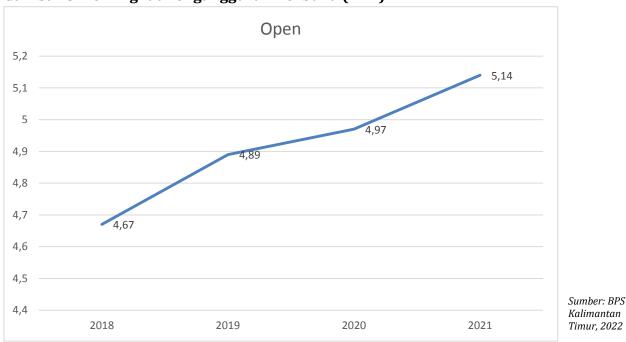
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam bentuk persentase. Semakin





tinggi nilai persentase TPAK, semakin besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja, begitu pula sebaliknya. TPAK Kutai Barat tahun 2020 tercatat sebesar 71,02 persen.

Gambar 3. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Selain TPAK, Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan ketenagakerjaan. Di tahun 2020 TPT Kabupaten Kutai Barat mencapai 4,97 persen; pada tahun 2021 TPT Kabupaten Kutai Barat mencapai 5,14 persen. Jika penduduk bekerja di kelompok menurut lapangan usaha, ternyata di tahun 2020 penduduk Kutai Barat dominan bekerja pada lapangan usaha Sektor Jasa yaitu 44,55 persen, diikuti Sektor Pertanian (39,25 persen) dan sisanya pada Manufaktur (16,20 persen).





16%

16%

16%

19 Jasa

Pertanian

Manufaktur

Gambar 3. 11 Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

RKPD tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang sangat strategis yang menjadi pembuka pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Oleh karena itu, rumusan kebijakan ekonomian dan keuangan daerah harus berkualitas dan tepat sasaran untuk optimalisasi dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam perumusannya, perlu diterapkan efisiensi dan efektifitas kebijakan anggaran pembangunan. Paradigma penggunaan anggaran harus digeser dari yang bersifat money follow functions menjadi money follow programs yang didasarkan pada dasar kinerja yang dikenal dengan performance based budgeting. Selain itu evaluasi atas berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel, sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Barat tahun 2021-2026.

Pada Tahun 2023, ekonomi makro Kutai Barat diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Pemerintah optimis sasaran ekonomi makro pada Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:





Gambar 3. 12 Target Ekonomi Makro Daerah

NO	URAIAN	TARGET 2022	TARGET 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,03	4,24
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,46
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,17	9,11
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,3	72,86
5	Indeks Gini	0,333	0,333
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	193,35	198,29
7	IKLH	75,76	75,95

Sumber Bapplitbang Kab. Kutai Barat

Pada Tahun 2022, merupakan periode perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2021 setelah diterpa pandemi COVID-19. Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan mampu tumbuh positif. Tahun 2023 juga diharapkan mampu tumbuh positif, Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara, beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

Arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi :

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.





3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Perbaikan perekonomian tahun 2023 diharapkan terus berlangsung dan memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat ditempuh melalui :

- 1. Meningkatan hasil Pertanian dalam arti luas, yang mencakup pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi guna mempercepat munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada masing-masing komoditas unggulan.
- 2. Perbaikan dan peningkatan iklim investasi, daya saing dan pengembangan kawasan industri
- 3. Peningkatan kontribusi pariwisata, penguatan struktur ekonomi, transportasi, informasi dan pengembangan UKM, koperasi dan kewirausahaan
- 4. peningkatan kapasitas SDM dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan vokasi dan menengah.

Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan dengan membentuk kluster-kluster sebagai upaya peningkatan pembangunan kawasan dan intensifikasi lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang produktif melalui peningkatan kinerja penyuluh pertanian, optimalisasi sistem pengairan, fasilitasi pemilihan bibit unggul, pengendalian hama dan penyakit, dsb. Peningkatan produktifitas pertanian,





perikanan, peternakan dan perkebunan diharapkan nantinya akan terus dikembangkan, diutamakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kutai Barat dan sebagian diolah sebagai industri hilir yang mampu bersaing dengan produk dari luar Kutai Barat dan sebagai penyangga ekonomi (hinterland) Ibu Kota Negara (IKN).

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, juga diharapkan dari peran serta sektor pariwisata, berdasarkan hasil inventarisasi potensi-potensi pariwisata seperti Jantur (air terjun), Danau, flying fox, outbond, kolam pemancingan, dsb, yang ada di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa sektor ini sebenarnya dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat sekitar. Namun, tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan sektor ini cukup berat. Hal ini disebabkan bahwa lokasi potensi pariwisata yang ada sebagian besar masih dimiliki secara individu oleh masyarakat atau kampung sekitar, sehingga dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata tersebut perlu dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Untuk itu, perlu dikembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat/kampung, seperti yang dilakukan di Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok, Tempat Rekreasi Air Alami Batu Bura Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan, Tempat Rekreasi, Pemancingan dan Sawah Pasang Surut di Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu, pengolahan dan pengelolaan tanaman Doyo menjadi kain Doyo di Kecamatan Jempang, dimana masyarakat juga digandeng untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada diwilayah dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Pengembangan pemasaran hasil produksi, terutama hasil UKM dan UMKM dilakukan dengan meningkatkan promosi melalui event-event yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Timur maupun diluar provinsi melalui koordinasi Dinas Perdagangan maupun Dinas Pariwisata. Demikian pula perlunya peran Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Barat membentuk jaring pemasaran yang potensial. Pengembangan ini juga terkait dengan peningkatan SDM pelaku UKM/UMKM melalui pelatihan yang intensif dan inovatif, kemudahan akses permodalan, ketersediaan sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta ketersediaan jaring Informasi dan Telekomunikasi.

Melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi daerah yang kondusif, diharapkan simpul-simpul kegiatan





ekonomi masyarakat dapat terintegrasi secara efisien dan efektif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kampung dan pinggiran. Sehingga pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kutai Barat pun semakin meningkat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Pendapatan

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kutai Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- 1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU diasumsikan sama dengan Tahun 2021
- 3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan

Untuk meningkatan Pendapatan Daerah di Kutai Barat, terus dilakukan pengembangan dan dilakukan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:





- Meningkatkan sistem informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan perluasan obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3. Pendayagunaan aset daerah;
- 4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 pemerintah Kutai Barat terus memunculkan inovasi sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna meningkatkan PAD. Adapun beberapa kegiatan intensifikasi yang di identifikasi dapat dilakukan, antara lain:

A. Pajak Daerah

Pajak Hotel, Rumah Makan, Penjualan Sarang Burung Walet, PBB, BPHTP dll:

- 1. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan
- 2. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan
- 3. Sosialisasi intensif terhadap Wajib Pajak yang baru maupun yang lama.
- 4. Peningkatan pengawasan.

B. Bidang Retribusi Daerah

- 1. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan;
- 2. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran;
- 3. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- 4. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi;
- 5. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait;
- 6. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.





Gambaran perkembangan Realisasi Pendapatan dituangkan dalam tabel 3.13

Gambar 3. 13 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 - 2021 dan Penetapan APBD 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	Penetapan APBD	
				(Audited)	2022	
PENDAPATAN	1.975.733.677.203,51	2.560.434.052.380,71	2.187.759.660.515,13	1.943.393.925.868,28	2.659.632.188.625,00	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.737.634.670,51	168.905.593.788,33	147.339.901.867,13	124.027.387.010,28	231.068.942.156,00	
Pajak Daerah	18.449.914.099,44	43.144.177.445,27	52.944.613.731,99	33.148.456.687,70	50.000.000.000,00	
Retribusi Daerah	4.155.130.290,61	6.040.316.279,69	3.724.233.162,07	4.859.985.710,52	7.480.515.402,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.185.496.936,82	4.293.410.614,62	2.653.916.808,58	3.396.899.483,87	5.649.637.918,00	
Lain-lain PAD yang Sah	61.947.093.343,64	115.427.689.448,75	88.017.138.164,49	82.622.045.128,19	167.938.788.836,00	
DANA PERIMBANGAN	1.692.665.379.533,00	2.020.749.624.065,00	1.634.104.714.947,00	1.523.123.693.236,00	2.204.226.979.469,00	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.657.915.379.533,00	2.006.210.459.065,00	1.599.174.102.947,00	1.493.039.191.236,00	2.177.200.606.469,00	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	789.684.012.217,00	1.074.459.081.974,00	913.939.084.955,00	671.658.428.870,00	1.320.899.314.469,00	
Dana Alokasi Umum	600.687.747.000,00	618.522.771.000,00	555.082.677.000,00	543.254.275.965,00	555.082.677.000,00	
Dana Alokasi Khusus - Non DR/Fisik	119.348.431.316,00	81.450.168.569,00	130.152.340.992,00	48.237.564.072,00	34.715.904.000,00	
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	-	58.680.603.522,00	-	48.865.971.729,00	109.311.147.000,00	
Alokasi Dana Desa	148.195.189.000,00	173.097.834.000,00	-	181.022.950.600,00	157.191.564.000,00	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	34.750.000.000,00	14.539.165.000,00	34.930.612.000,00	30.084.502.000,00	27.026.373.000,00	
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
Dana Penyesuaian/DID	34.750.000.000,00	14.539.165.000,00	34.930.612.000,00	30.084.502.000,00	27.026.373.000,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	194.330.663.000,00	370.778.834.527,38	406.315.043.701,00	296.242.845.622,00	224.336.267.000,00	
Hibah	-	-	4.238.000.000,00	27.186.938.522,00	27.278.000.000,00	
Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	145.380.663.000,00	217.261.718.988,00	130.204.578.370,00	171.816.068.000,00	197.058.267.000,00	
Bantuan Keuangan Provinsi	48.950.000.000,00	127.241.179.400,00	93.750.000.000,00	97.239.839.100,00		
Penerimaan Lain- Lain (BOSNAS/ADD)	-	26.275.936.139,38	178.122.465.331,00			

Sumber: BKAD dan Bapenda,Data diolah Keterangan: *) Realisasi Belum hasil Audit





Gambar 3. 14 Realisasi Target Pendapatan Daerah Tahun 2018 - 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021 (Audited)	APBD 2022
PENDAPATAN	100	100	100	100	100
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,49	6,60	6,73	6,38	8,69
Pajak Daerah	0,93	1,69	2,42	1,71	1,88
Retribusi Daerah	0,21	0,24	0,17	0,25	0,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,21	0,17	0,12	0,17	0,21
Lain-lain PAD yang Sah	3,14	4,51	4,02	4,25	6,31
DANA PERIMBANGAN	85,67	78,92	74,69	78,37	82,88
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	83,91	78,35	73,10	76,83	81,86
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39,97	41,96	41,78	34,56	49,66
Dana Alokasi Umum	30,40	24,16	25,37	27,95	20,87
Dana Alokasi Khusus - Non DR/Fisik	6,04	3,18	5,95	2,48	1,31
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	-	2,29	-	2,51	4,11
Alokasi Dana Desa	7,50	6,76	-	9,31	5,91
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1,76	0,57	1,60	1,55	1,02
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian/DID	1,76	0,57	1,60	1,55	1,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	9,84	14,48	18,57	15,24	8,43
Hibah	-	-	0,19	1,40	1,03
Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	7,36	8,49	5,95	8,84	7,41
Bantuan Keuangan Provinsi	2,48	4,97	4,29	5,00	-
Penerimaan Lain-Lain (BOSNAS/ADD)	-	1,03	8,14	-	-

Sumber: BKAD dan Bapenda,Data diolah Keterangan : *) Realisasi Belum hasil Audit

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar -0,38 persen, Penurunan ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah yang menurun sebesar -0,25 persen dan turunnya pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar -0,45 persen. Proporsi Pendapatan Transfer pada tahun 2023 masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 92,72 persen

Gambar 3. 15 Proveksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

- 4		 1	
	Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2023





		(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	2.117.570.475.364	100,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.951.835.944	6,00
4.1.01	Pajak Daerah	31.136.319.422	1,47
4.1.02	Retribusi Daerah	5.899.655.247	0,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	0,24
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.915.861.275	4,01
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.963.340.639.420	92,72
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.763.340.639.420	83,27
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.763.340.639.420	83,27
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.218.717.664.420	57,55
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	544.622.975.000	25,72
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.000.000.000	9,44
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	200.000.000.000	9,44
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.278.000.000	1,29
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	27.278.000.000	1,29

Sumber: Bapenda,Data diolah

3.2.2. Belanja

Fluktuasi pendapatan daerah berpengaruh langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Kutai Barat. Belanja daerah selama lima tahun terakhir (2018-2021) cenderung menurun sejalan dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah yang bergantung tambahan anggaran pada komponen DAU, DAK, DID, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sebagai upaya pemenuhan Belanja Daerah agar tidak mengalami defisit di tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyusun arah kebijakan belanja daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.





- Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatory Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarannya sudah diatur oleh UndangUndang (UU) yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah.
- Prioritas Pemenuhan Belanja SPM Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.
- Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (Major Project) Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan (dedicated) Kepala Daerah. Terdapat 55 program major project dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.
- Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, Penangangan Pandemi Covid 19 peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.

Gambar 3. 16 Realisasi dan Penetapan Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. 2022

		JUMLAH			
NO	URAIAN	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Penetapan Tahun
		2019	2020	2021 (Audited)	2022
II	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI	1.318.807.561.708,44	1.250.153.188.171,71	1.218.435.332.453,13	1.636.474.920.396,00
1.1.1	Belanja Pegawai	445.964.809.404,00	420.954.155.124,00	456.692.199.778,00	643.248.770.730,00
1.1.2	Belanja Barang dan	750.143.376.369,44	702.067.552.239,71	707.551.549.496,87	919.422.367.818,00
1.1.2	Jasa	730.143.370.303,44	102.001.332.239,11	707.331.349.490,07	919.422.307.010,00
1.1.3	Belanja Subsidi	567.432.000	-	-	-





			JUMLAH			
NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021 (Audited)	Penetapan Tahun 2022	
1.1.4	Belanja Hibah	68.391.934.957,00	96.951.449.725,00	49.255.811.678,26	59.808.251.328	
11 1 5	Belanja Bantuan Sosial	53.740.008.978,00	30.180.031.083,00	4.935.771.500,00	13.995.530.520	
2.2	BELANJA MODAL	560.110.512.733,82	460.556.595.202,05	575.371.693.421,12	464.520.046.581,00	
17. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.440.000,00	19.282.491.944,00	11.180.033.718,00	117.655.441.604,00	
1//	BELANJA TRANSFER	330.396.867.419,00	340.592.712.898,00	300.931.230.172,20	432.981.780.044,00	
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.209.815.381.861,26	2.070.584.988.215,76	2.105.918.289.764,45	2.651.632.188.625,00	

Sumber: BKAD, Data diolah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Gambar 3. 17 Belanja Wajib Mengikat

No	Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2023
NO	belanja wajib mengikat	(Rp)
	BELANJA MENGIKAT	1.463.973.710.560
1	Belanja Pegawai	635.271.142.609
2	Belanja Barang dan Jasa	467.258.013.990
3	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.343.307.571
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	767.182.448
5	Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD)	176.334.063.942
6	Belanja Tidak Terduga	115.000.000.000
	BELANJA WAJIB	600.530.077.723
	Belanja Mandatory sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	600.530.077.723
	TOTAL	2.064.503.788.283

Sumber: BKAD Data diolah

Gambar 3. 18 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2023

	<u> </u>	
No	Uraian	Tahun 2023



	Mark Control	
ام بادنارات	THE WAR	

		(Rp)
1	Pendapatan	2.117.570.475.362
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
	Total Penerimaan	2.117.570.475.362
	Dikurangi	
4	Belanja dan Pengeluaraan Pembiayaan Wajib dan Mengikat	2.064.503.788.283
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	53.066.687.079

Sumber: Bapplitbang Data diolah

3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pengembalian dana bergulir, dan penerimaan kembali piutang. Pengeluran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah akan dilakukan secara hati-hati dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Defisit anggaran daerah sedapat mungkin akan ditekan pada tingkat yang aman dan tidak mengganggu likuiditas daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan belanja penggunaaan dana SiLPA menutup defisit anggaran hanya dilakukan untuk





membayar utang kepada Pihak Ketiga, yang mungkin terjadi pada tahun berkenaan dan dilakukan dalam upaya penghematan, efisiensi dan efektivitas anggaran. Demikian pula SiLPA yang disebabkan oleh masih adanya sisa DBH-DR, yang harus dilaksanakan program dan kegiatannya secara cermat dan hati-hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dalam RKPD tahun 2023, dalam komponen proyeksi Penerimaan Pembiayaan, SiLPA di asumsikan masih nol.

Gambar 3. 19 Proyeksi Pembiayaan

	JENIS PENERIMAAN	_	JUMI	.AH	
NO	DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
	DAERAH	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)
1	2	3	4	5	6
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	574.244.387.560,00	709.014.888.391,13	538.523.530.951,22	2.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	572.966.050.465,63	708.014.888.391,13	536.523.530.951,22	0
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.278.337.094,37	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00	10.175.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	10.175.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	222.348.896.974,18	559.244.387.560,00	696.839.888.391,13	-8.000.000.000,00

Sumber: Bappelitbangda Data diolah

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah akan diupayakan dengan cara mengoptimalisasi dan





mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, swasta, maupun masyarakat. Arah kebijakan pembiayaan di Tahun 2023 akan diarahkan pada:

- a) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas; Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
- b) Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR)





BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah Kutai Barat disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- 1. RKPD merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD;
- 2. RKPD merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBD; dan
- 3. RKPD berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD.

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kutai Barat Tahun 2023, mengacu kepada :

- 1. Permasalahan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;
- 2. Kondisi makro ekonomi daerah dalam tahun sebelumnya;
- 3. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021;
- 4. Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dalam RKPD Provinsi Kaltim 2023;
- 5. Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
- 6. Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global); dan pokok pikiran DPRD.

Selain memperhatikan kelima aspek tersebut, rumusan prioritas pembangunan Kutai Barat Tahun 2023 juga berpedoman kepada kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Barat Tahun 2011-2031.





4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diturunkan dari visi dan misi. Visi Kutai Barat untuk perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah:

"Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera, Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 - 2026 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Kutai Barat. Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut: mengandung makna bahwa pada akhir tahun 2026 mendatang, kehidupan masyarakat Kutai Barat akan:

a. Semakin Adil

Semakin adil diartikan bahwa secara bertahap dan pasti berbagai kesenjangan (*gap*) atau disparitas hasil-hasil pembangunan akan semakin berkurang dan hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya secara lebih meluas dan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kutai Barat, tidak lagi terfokus di pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja. Sehingga, pembangunan merata pada semua wilayah menuju kesejahteraan yang merata.

b. Semakin Mandiri

Semakin mandiri diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan semakin mampu untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan serta daya inovasi masyarakat dan daerah, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar serta sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah.

c. Semakin Sejahtera

Semakin sejahtera diartikan bahwa di masa mendatang dapat terciptanya kualitas hidup masyarakat Kutai Barat pada semua aspek kehidupan, pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan



masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan memiliki pendapatan yang lebih baik.

Aspek kehidupan disini antara lain meningkatnya mutu sumber daya manusia yang disertai kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial budaya. Mutu sumber daya manusia yang tinggi ditandai oleh ukuran-ukuran tingkat kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur dengan rendahnya tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang mantap serta terjaganya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Sedangkan kesejahteraan sosial budaya dicirikan berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang-orang rentan, kemantapan kesehatan rohani, toleransi dalam kehidupan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

d. Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan

Berbasiskan ekonomi kerakyatan diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan Sumber Daya alam secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi lokal, melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dengan demikian diharapkan:

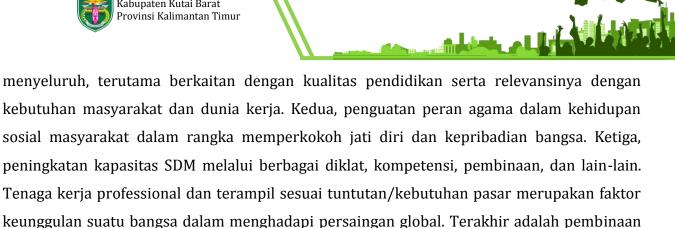
- 1) Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
- 2) Berkembangnya ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan lokal di wilayah masing-masing.
- 3) Masyarakat semakin kreatif dan inovatif serta mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi produk unggulan sehingga memiliki daya saing tinggi.

e. Peningkatan Kualitas SDM

Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat namun juga mendukung pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini, terhadap beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas SDM antara lain: *Pertama*, sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut makan diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan yang





Karakterisik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global terutama dalam era Revolusi Industri 4.0.

dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda atau generasi milenial, sebagai

penopang utama dalam roda pembangunan di Kutai Barat, pemberdayaan generasi

diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

4.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan empat (4) misi pembangunan Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan;
- 3) Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel; dan
- 4) Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.

Berikut merupakan penjelasan untuk masing-masing misi pembangunan daerah:

MISI 1: Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan

Dalam periode lima (5) tahun mendatang, pendekatan pengembangan ekonomi kerakyatan menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dipadukan dengan konsep pengembangan kawasan (kluster). Kedua pendekatan tersebut diharapkan menciptakan pekerjaan yang beragam, sesuai dengan keterampilan masyarakat lokal dan berkelanjutan.

Konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL) atau local economic development (LED)



muncul untuk menjawab kekurangan konsep pengembangan dari atas yang banyak menimbulkan kesenjangan dan konsep pengembangan dari bawah yang banyak menuai kritik. Konsep pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep yang bertumpu pada kekuatan endogenous (kekuatan dari dalam wilayah). Konsep ini merupakan sebuah proses kerjasama antara pemerintah setempat, kelompok berbasiskan masyarakat, dan sektor swasta untuk mengelola sumber daya, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Ciri utama dalam konsep ini adalah pada endogenous development, yaitu menggunakan sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal akan tercapai jika standar hidup masyarakat bisa dipertahankan dan ditingkatkan melalui proses pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik dalam prinsip keadilan dan keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, secara lebih rinci konsep pengembangan ekonomi lokal menekankan pada:

- a. Pengembangan ekonomi lokal menetapkan sebuah standar hidup minimum yang terus ditingkatkan;
- b. Pengembangan ekonomi lokal mengurangi ketidakadilan;
- c. Pengembangan ekonomi lokal mendorong dan mempromosikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan baik dalam produksi dan penggunaan yang merupakan tujuan dalam pembangunan ekonomi hijau sebagai upaya semakin memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat melalui keseimbangan dengan pendekatan paradigma pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Konsep kawasan (*kluster*) merupakan sebuah konsep pengembangan wilayah yang membahas tentang adanya konsentrasi geografis antara institusi dan perusahaan yang saling berhubungan pada suatu sektor tertentu. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan dan saling melengkapi karena dalam pembentukan *kluster* tidak hanya terdiri dari industri yang sama namun juga memiliki keterkaitan antar industri melalui komponen-komponen penting lainnya baik dalam hal produksi hingga pemasaran seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. *Kluster* adalah konsentrasi geografis dari berbagai perusahaan yang memiliki interkoneksi, *supplier* yang terspesialisasi dan penyedia jasa, perusahaan yang terkait dengan industri-industri, dan institusi yang berasosiasi dapat terdiri dari universitas dan asosiasi pedagang. Konsentrasi tersebut terdiri dari bidang yang saling berkompetisi dan bekerjasama.

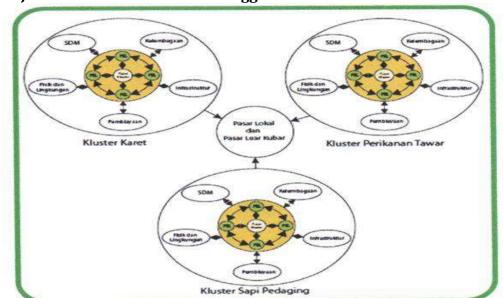




Di Kabupaten Kutai Barat pemilihan kosep PEL sebagai pendekatan pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan program Dana Desa, dimana desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan sendiri sesuai dengan karakter lokalnya. Pendekatan kawasan (*kluster*) digunakan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperpanjang rantai pasok. Industri-industri yang diprioriataskan adalah industri kecil dan menengah. Dengan gabungan konsep tersebut diharapkan keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan karakteristik wilayah, komoditas unggulan lokal, dan beberapa isu eksternal Kabupaten Kutai Barat, setidaknya terdapat tiga (3) kawasan (*kluster*) yang dapat dikembangkan. Ketiga *kluster* tersebut meliputi:

- **a.** *Kluster* **Karet**, meliputi Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Damai, dan Kecamatan Sekolaq Darat;
- **b.** *Kluster* **Perikanan Tawar**, meliputi Kecamatan Jempang, Kecamatan Penyinggahan, dan Kecamatan Muara Pahu; dan
- **c.** *Kluster* **Sapi Pedaging**, meliputi Kecamatan Melak, Kecamatan Siluq Ngurai dan Kecamatan Muara Lawa.



Gambar 4. 1 Konsep Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berkelanjutan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal

Struktur APBD Kutai Barat sangat bergantung pada Dana Perimbangan Pusat terutama



yang berasal dari Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Batu Bara. Mengingat harga batu bara yang berfluktuasi maka disaat terjadi penurunan harga komoditas batu bara di dunia berimbas terhadap menurunnya dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kutai Barat. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, pembiayaan *kluster* selain bersumber dari APBD, juga diharapkan diperoleh dari sumber pendanaan lain seperti APBN, Dana Desa, BUMK, dan swasta.

Gambar 4. 2 Sumber Dana dan Skema Pendanaan Kluster

Sumber Dana	Arah Pendanaan							
APBN	PRUKADES (Program Unggulan Kawasan Perdesaan)							
APBD	Operasional OPD terkait, infrastruktur antar kecamatan							
Dana Desa Pengembangan SDM di tingkat kampung, Sarpras Kampung kewenangan kampung, bantuan usaha pertanian CSR Bantuan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Kampung								
							BUMKam	BUMKam Permodalan, Alsintan, Koperasi

Kluster lain yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Barat adalah Kluster Pariwisata. Dari sejumlah kluster dalam RIPARDA 2019-2033, Kluster Sendawar-Melak (sesuai penamaan dalam RIPARDA) merupakan kluster terkuat. Kekuatan kluster tersebut terletak pada obyek daya tarik wisata yang unik baik secara lokal bahkan sampai tingkat internasional. Selain itu kemudahan transportasi, ketersediaan akomodasi, dan sarana pendukung lainnya merupakan nilai tambah tersendiri. Pariwisata Kutai Barat diperkirakan akan menggeliat dengan berkembangan kota-kota di sekitar. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah PPU dan Kutai Kertanegara yang relative dekat dapat menjadi katalisator peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kutai Barat.

Meningat celah fiskal pada beberapa tahun mendatang diperkirakan cukup sempit, pengembangan pariwisata *Kluster* Sendawar-Melak akan coba diwujudkan namun hanya fokus pada tahap persiapan. Kecamatan Melak difokuskan sebagai pusat kuliner Kutai Barat, Lamin Taman Budaya Sendawar ditingkatkan selain sebagai pusat pementasan budaya dan juga sebagai pusat layanan nformasi pariwisata serta penguatan kelompok sadar wisata (pokdarwis).





MISI 2: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan Kesehatan

Manusia merupakan objek sekaligus subjek/pelaku pembangunan. Pelestarian lingkungan, perlawanan terhadap kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan sebagainya merupakan upaya mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Selain sebagai objek, manusia juga sebagai pelaku pembangunan. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan pembangunan.

Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan SDM berkualitas, maka niscaya pembangunan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu terus mempertahankan dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, dan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Di samping itu penyedijaan anggaran pendidikan tetap mengacu pada Undang-Undang Pendidikan.

Selain pendidikan kesehatan juga merupakan bagian penting dalam memajukan Sumber Daya Manusia. Bagaimana masyarakat mampu untuk berkatifitas jika dalam kondisi yang tidak sehat dan bugar. Untuk itu peningkatan pelayanan kesehatan juga merupakan sesuatu yang harus ditingkatkan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, promosi kesehatan, kompetensi dan keahlian tenaga kesehatan, akses pelayanan yang cepat, murah dan mudah dijangkau.

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan. Pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan dasar. Pelayanan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Khusus pelatihan, difokuskan pada peningkatan keterampilan masyarakat yang sesuai dengan arah pengembangan ekonomi, yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan Misi 1. Peningkatan keterampilan masyarakat berbeda-beda mengikuti arah pengembangan *kluster* dan isu-isu yang melekat.

Di samping itu, upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat Kutai Barat akan





disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Salah satu tuntutan yang mau tidak mau harus diikuti adalah perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang yang dikenal dengan istilah era digital. SDM Kutai Barat harus melek digital atau IT, karena masyarakat yang tertinggal dari pemanfaatan teknologi informasi, dipastikan akan mengalami ketertinggalan aspek lainnya. Pusat-pusat pelayanan publik dan pusat-pusat informasi harus sudah berbasis IT atau digital dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Pada *kluster* karet, pengingkatan keterampilan masyarakat diarahkan pada keterampilan *on farm* meliputi upaya intensifikasi dan teknik budidaya. Selain budidaya pengetahuan masyarakat akan tanaman karet juga ditingkatkan, mulai dari pengetahuan pemilihan bibit karet unggul, pengetahuan pengaturan jarak tanam, pengetahuan jenis penyakit karet, hingga pengetahuan tata cara pegolahan pasca panen. Dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memegang peranan yang penting dalam mentransfer ilmu ke petani karet tentang bagaimana bercocok tanam karet yang benar, menguatkan kelembagaan kelompok tani dan membantu pemasaran hasil produksi karet.

Pada kluster perikanan keterampilan masyarakat lebih difokuskan pada penanganan perikanan budidaya, yaitu budidaya karamba dan budidaya kolam. Agar nilai tambah produk perikanan meningkat, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan mengolah hasil perikanan budidaya. Untuk itu masyarakat pada kluster perikanan akan diberikan keterampilan pembuatan ikan asin, pembuatan *salai* (pengasapan ikan), pembuatan abon, keterampilan pembuatan pakan ikan dan produk olahan lainnya. Untuk meningkatkan daya saing produk, masyarakat akan diberikan pengetahuan dan keterampilan pengemasan yang baik (*packaging*).

Pada Kluster Sapi Pedaging, peningkatan keterampilan masyarakat diarahkan pada pengetahuan dan keterampilan budidaya sapi pedaging, keterampilan pengolahan kotoran sapi (pupuk kandang), pembuatan pakan konsentrat dan keterampilan pengolahan hasil produksi seperti pembuatan abon sapi, dendeng sapi dan sebagainya.

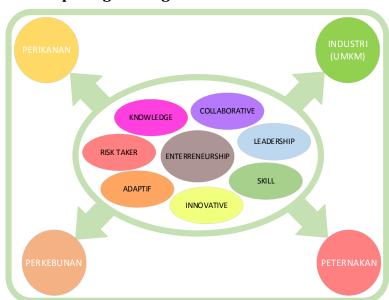
Selain keterampilan, masyarakat lokal pada tiap kluster juga dibekali dengan kemampuan wirausaha. Pengembangan jiwa kewirausahaan dilakukan dengan pendampingan oleh OPD terkait, kemitraan dan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak perguruan tinggi. Untuk menjaga keberlanjutan kawasan, tiap-tiap kluster akan darahkan menggunakan konsep pertanian terpadu dengan pendekatan *zero waste*.





Pendekatan tersebut menekankan pada pengolahan limbah, misalnya limbah ikan dapat dijadikan pelet ikan, kotoran sapi dijadikan pupuk kandang yang dapat dijadikan pupuk karet atau dijual, daun/batang sisa panenan dijadikan pupuk kompos. Untuk itu masarakat lokal akan diberikan pengetahuan dan keterampilan pengolahan limbah.

Selain masyarakat lokal, keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Balai Benin Ikan (BBI) juga harus ditingkatkan fungsi dan kinerjanya. Pada tingkat kampung SDM Pengelola BUMK juga ditingkatkan agar BUMK menjelma menjadi lembaga profesional yang bergerak pada berbagai bidang usaha sesuai arah pengembangan kluster.



Gambar 4. 3 Konsep Pengembangan SDM

MISI 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel

Visi Kutai Barat dapat dicapai dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama dapat terjadi ketika ada rasa saling percaya dan peduli antara pemerintah dan masyarakat pemerintah daerah perlu menunjukan bahwa kepedulian ditunjukan dengan pelayanan yang cepat dan murah.

Di sisi lain, upaya penyediaan pelayanan publik yang semakin cepat (*faster*), murah (*cheaper*), dan mudah (*easier*) merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah akan semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi. Suatu daerah akan sangat tertinggal jika tidak mampu





beradaptasi dengann perkembangan teknologi informasi ini. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk menciptakan masyarakat yang melek teknologi informasi akan semakin ditingkatkan dalam lima tahun mendatang.

Arah penguatan tata kelola pemerintahan Kutai barat diarahkan pada peningkatan kinerja penyelenggaraan, mulai tingkat kabupaten sampai tingkat kampung. Pada tingkat kabupaten akan dilakukan pembenahan berbagai aspek. Peningkatan kinerja pemerintahan diupayakan melalui peningkatan nilai evaluasi SAKIP, nilai LPPD dan mempertahankan opini WTP. Peningkatan kinerja pelayanan ke masyarakat dpaat dilihat dari pencapaian target penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tingkat kampung akan dilakukan penguatan kelembagaan pemerintahan kampung, pernaikan administrasi dan pengelolaan keuangan kampung.

OPD-OPD maupun unit teknis yang berhubungan dengan kluster pada Misi 1 akan diperkuat untuk mendukung pengembangan kluster. BPP berperan untuk melakukan penyuluhan pertanian dalam arti luas secara komperhensif dan intensif. BUMK diperkuat dan diarahkan menjadi unit usaha berorientasi profit sesuai dengan kebutuhan *kluster*. Berikut indikasi beberapa para pihak yang terlibat dalam kelembagaan *kluster*.

Tabel 4. 1 Pihak Pengembangan Kluster dan Peranannya

Para Pihak	Peran					
BAPPELITBANGDA	Penggerak utama kluster (aktor kunci)					
	• Fasilitator akses/jejaring kluster terhadap OPD terkait, Perbankan, Perguruan tinggi, Ormas dan Swasta					
	Pengembangan Inovasi hulu hingga hilir					
	Melakukan penelitian komperhensif terkait dengan kluster					
DINAS PU	Menyediakan Infrastruktur yang dibutuhkan kluster					
DISDAGKOP	Meningkatkan daya saing produk					
	Membantu pemasaran produk					
DINAS PENDIDIKAN	Meningkatkan mutu pendidikan					
	Pembentukan karakter mencintai dan melestarikan budaya lokal sejak usia sekolah melalui kurikulum muatan lokal					
DINAS LH	 Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dalam skema jasa lingkungan melalui pengelolaan hutan dan lahan dengan praktik- praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan berbasis masyarakat lokal 					



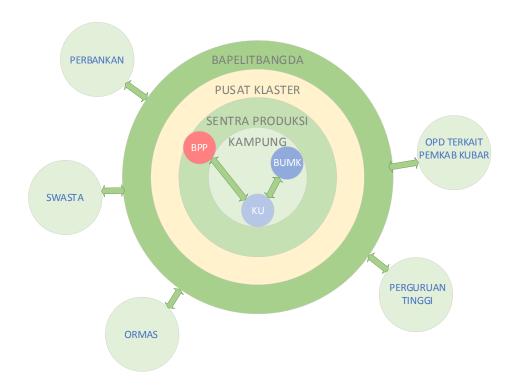


Para Pihak	Peran							
	Penyediaan regulasi hijau							
DINAS PARIWISATA	Penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata dalam upaya mempersiapkan masyarakat untuk menjadi tuan rumah di bidang pariwisata							
DISKOMINFO	Menegmbangkan aplikasi untuk membantu proses pemasaran							
DINAS PERTANIAN dan DINAS PERIKANAN	Bantuan Teknis Produksi (on farm) dan peningkatan SDM petani/nelayan melalui penyuluhan							
DPMK	Penguatan Pemerintahan Kampung dan BUMK							
PERGURUAN TINGGI	Memberikan kajian-kajian pengembangan ekonomi lokal yang saling menguntungkan							
SWASTA	Penanam ModalProgram Pemberdayaan Masyarakat (CSR)							
ORMAS	Pemberdayaan Kelompok Usaha, Pembinaan mental dan spiritual							
KAMPUNG	Menyediakan infrastruktur dan fasilitasi lainnya sesuai dengan kewenangannya, melakukan kerjasama antar desa							
вимк	 Permodalan Input produksi lainnya (Pupuk, Saprotan dll) Pengepul hasil produksi 							
KU (Kelompok Usaha)	Penggerak Kegiatan Usaha							

Gambar 4. 4 Konsep Kelembagaan Kluster







MISI 4: Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan

Infrastruktur atau sering disebut sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan. Infrastruktur merupakan modal pembangun. Beberapa penelitian menunjukan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan, listrik, merupakan modal penting untuk mencapai pertumbuhan perekonomian wilayah yang tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan perekonomian wilayah sekaligus perekonomian masyarakat. Kebijakan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan.

Infrastruktur dasar meliputi transportasi jalan raya, bangunan – bangunan perkantoran dan sekolah, telekomunikasi, rumah, peribadatan, sarana air bersih, sanitasi dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur ekonomi kerakyatan difokuskan pada penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kebutuhan kluster. Dari segi pembiayaan, infrastruktur antar kecamatan dibiayai oleh APBD melalui program pemberdayaan masyarakt oleh pihak perusahaan (CSR)

Tabel 4. 2 Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

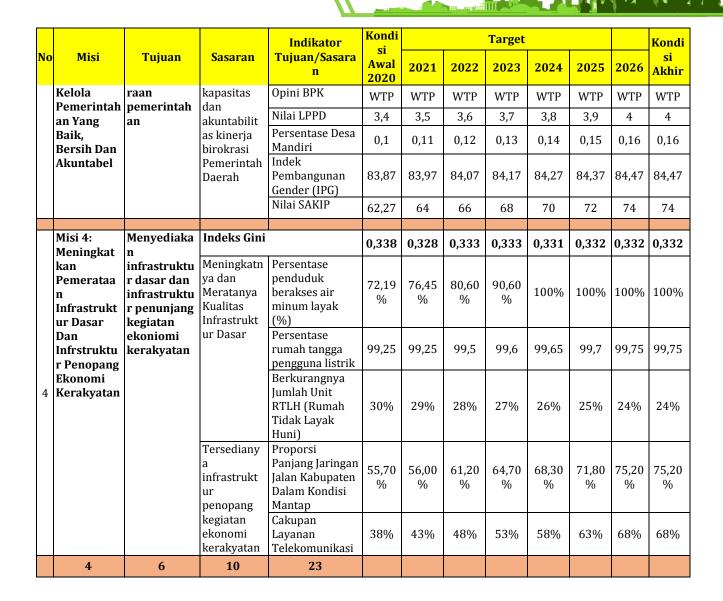
	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasara n	Kondi	Target						Kondi
No					Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	si Akhir





				Indikator	Kondi si			Target				Kondi
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasara n	Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	si Akhir
	Misi 1.	Meningkatk	Laju Pertun	nbuhan Ekonomi	-2,92	0,56	4,03	4,24	4,55	5,01	5,76	5,76
	Meningkat kan Perekonom ian Masyarakat	stabilias	Meningkatn ya peran sektor unggulan	sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	14,89	15,04	15,2	15,36	15,52	15,68	15,85	15,85
	Melalui Pengemban gan Ekonomi	yang	daerah berbasis kluster terhadap	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	na	0,5	0,525	0,55	0,575	0,625	0,675	0,675
	Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarak		Perekonom ian Daerah (PDRB)	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	na	0,35	0,375	0,4	0,425	0,475	0,55	0,55
	an Potensi Unggulan Lokal	Menurunka n Angka Kemiskinan	hidup di bav kemiskinan		9,29 %	9,23 %	9,17 %	9,11 %	9,06 %	9,00 %	8,94%	8,94%
1	Secara Berkelanju tan		Terciptany a lapangan kerja baru	Tingkat pengangguran terbuka	4,97	4,8	4,63	4,46	4,31	4,16	4,01	4,01
			dan Wirausaha wan lokal baru	Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil	na	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	2,64%
			Meningkatn ya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	PDRB Per Kapita	183,8 4	188,5 4	193,3 5	198,2 9	203,3 5	208,5 5	213,87	213,87
		Menjaga keberlanjut	Indeks Kual Hidup	itas Lingkungan	75,39	75,58	75,76	75,95	76,14	76,32	76,51	76,51
		an Kawasan Dalam	Terjaganya kelestarian	Indeks Kualitas Air	62	62,1	62,2	62,3	62,4	62,5	62,6	62,6
		Skema Pembangun	dan keberlanjut	Indeks Kualitas Udara	93	93,24	93,34	93,44	94,54	93,64	93,74	93,74
		an Ekonomi Hijau	an lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lahan	66	66,06	66,55	67,04	67,53	68,02	68,51	68,51
	Misi 2:	Meningkatk	Indek Pemb	angunan	F1.40	E4 E4	70.00	72.04	FO 40	72.00	5455	74.55
	Peningkata	an Kualitas	Manusia		71,19	71,74	72,30	72,86	73,42	73,99	74,57	74,57
	n Sumber Daya	Sumber Daya	Meningkatn ya akses	Rata-rata lama sekolah	8,47	8,49	8,5	8,52	8,55	8,6	8,7	8,7
	Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan	Manusia	dan kualitas pelayanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,9	12,91	12,95	12,98	13	13,03	13,05	13,05
2	Dan Pelatihan Yang Didukung Optimalisa si Pelayanan Kesehatan		Meningkatn ya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,86	72,96	73,05	73,15	73,25	73,35	73,44	73,54
	Misi 3:	Meningkatk	Indeks Refo	rmasi Birokrasi	E1 17	53	E.C	59	62	4 F	67	67
	Meningkat kan Tata	an kinerja penyelengga	Meningkatn ya	T	51,16 81,44	81,50	56 82	82,50	62 83	65 83,50	67 84	84



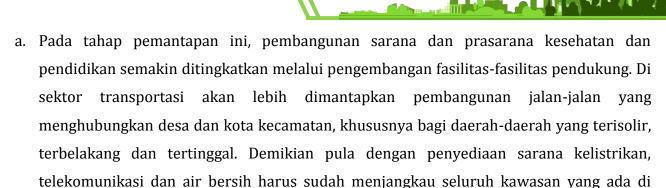


Di dalam konteks perencanaan pembangunan , tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Barat disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Barat (RPJPD Kubar) Tahun 2005 -2025, sehingga Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dengan Tema RKPD Tahun 2023 dapat dimaknai seperti berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai barat Tahun 2023 merupakan Tahap ke Lima (2021-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai barat Tahun 2005 -2025. Sedangkan tahapan kelima tersebut memiliki Prioritas



Kutai Barat.



- b. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan terus dimantapkan melalui peningkatan berkelanjutan pada sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan, perbaikan dan modernisasi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, akses masyarakat miskin dan daerah terpencil terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin mudah dan berkualitas.
- c. Pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada lebih kuatnya keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang terisolir dan tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunan nya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian block grant ke kampung-kampung, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, dan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.
- d. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan sekaligus sebagai entrepreneurship di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
- e. Upaya untuk menerapkan berbagai kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban umum, sosial, hukum, budaya, adat istiadat dan nilai yang berkembang di masyarakat serta upaya untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang asri dan lestari semakin dimantapkan. Hal ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan upaya penciptaan lingkungan sosial dan fisik yang semakin kondusif dalam mendukung aktivitas dunia usaha dan aktivitas masyarakat pada umumnya.



f. RPJPD Kutai Barat Tahun 2005 -2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode RPJMD Kutai Barat 2021-2026 yang memasuki masa tahun kedua pada tahun 2023.

Penjabaran tersebut kemudian dirumuskan dalam pendekatan tematik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 mendatang ialah sebagai berikut,

- Mengatasi Ketimpangan Wilayah
- Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
- Peningkatan infrastruktur Pendukung ekonomi kerakyatan
- Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta

Dengan mempertimbangkan Penjabaran yang telah dirumuskan didalam RPJPD Kutai Barat 2005 -2025 dan tema indikatif pada RKPD Provinsi Tahun 2023 sebagai pilihan tema indikatif. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan Agenda pembangunan Nasional, Tema RKP 2023 dan fokus tematik RPJMD Provinsi Kaltim, sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2023 di Kabupaten Kutai Barat dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Pilihan Tema indikatif Tema RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut,

"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas"

Tema RKPD Kutai Barat 2023 tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu sebagai berikut:

- kesejahteraan masyarakat lokal,
- kemiskinan,
- disparitas,
- kinerja subsektor unggulan yeng menyentuh langsung ke masyarakat lemah (lokus kewilayahan).
- Pemulihan pasca Covid





4.3. PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan Kutai Barat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan Kutai barat

	Indikator		JMN '	TAHL 2024			Indikator Pem	Reali sasi			RUBAHA IM 2019-		Indikator	Reali sasi	RPJI	MD KA	BUPAT 2021		TAI BA	RAT
No	Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024	bangunan	2020	2021	2022	2023	2024	Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertum ouhan Ekonomi (%)	5,8	6,7	7,1	8	8,5	Laju Pertum buhan ekonomi	-2,85	-1,00	3,5 ± 1	3,5 ± 1		Laju Pertum ouhan ekonomi	- 2,92	0,56	4,03	4,24	4,55	5,01	5,76
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	5,25	4,66	4,11	3,35	Tingkat Kemiskinan	6,64	6,05	6,00	5,90		Persentase penduduk yang nidup di bawah garis kemiskinan	9,29	9,23	9,17	9,11	9,06	9	8,94
3	Tingkat Pengang guran Terbuka (%)	6,20	6,00	5,80	5,40		Tingkat Pengang guran Terbuka	6,87	6,81	6,75	6,50		Tingkat Pengang guran terbuka	4,97	4,8	4,63	4,46	4,31	4,16	4,01
4	Indek Pem bangunan Manusia						Indek Pem bangunan Manusia	76,24	76,75	77,25	77,75		ndek Pem bangunan Manusia	71,19	71,74	72,30	72,86	73,42	73,99	74,57
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp)						PDRB Per Kapita (Juta Rp)	160,11	167,50	170,00	175,00		PDRB Per Kapita (Juta Rp)	183,84	188,54	193,35	198,29	203,35	208,55	213,87
6	Indeks Reformasi Birokrasi						Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)		Indeks Reformasi Birokrasi	51,16	53	56	59	62	65	67
7	LPE Non Migas dan Batubara (%)						LPE Non Migas dan Batubara (%)	-1.56	1.5	2	2,50		LPE Non Migas dan Batubara (%)							
8	Indeks Gini						Indeks Gini	0,328	0,313	0,313	0,308		Indeks Gini	0,338	0,328	0,333	0,333	0,331	0,332	0,332
9	Nilai Tukar Petani						Nilai Tukar Petani	111,65	112	113	114		Nilai Tukar Petani							
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,95	75,95	76,05	76,15		ndeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,39	75,58	75,76	75,95	76,14	76,32	76,51

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017-2022 dan RPJMD

Kutai Barat 2017-2022





Keterangan: a) Exercise internal Bappenas

Target yang tertera dalam tabel di atas tercantum dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Perubahan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 dan RPJMD Kutai Barat 2021-2026. Di tahun 2020 dengan ditetapkannya *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) sebagai pandemi global semenjak tanggal 11 Maret 2020, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sampai saat ini cukup terdampak, menyebabkan dilakukan penyesuaian dalam penentuan target pembangunan.

4.4. TEMA PEMBANGUNAN

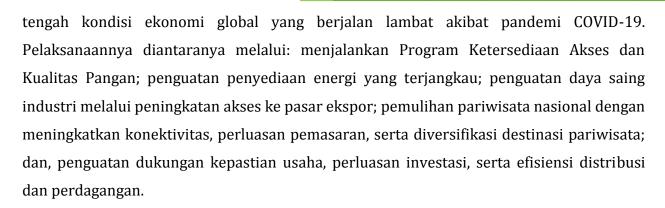
Kebijakan pada RKPD Kutai Barat Tahun 2023 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Mempunyai visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah : Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan tema pembangunan Tahun 2023 di Kabupaten Kutai Barat menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 yang dalam hal ini memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam RKP 2023 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Dan PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Lebih lanjut terdapat tujuh agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di





- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang





lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2022, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2020-2024). Dalam hal ini





tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah Kabupaten yang dalam hal ini adalah Kabupaten Kutai Barat. Pada proses penyusunan RKPD KABUPATEN KUTAI BARAT 2022, Kabupaten Kutai Barat menginternalisasikan tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional, serta agenda pembangunan nasional maupun agenda pembangunan bidang sektoral.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang tercantum pada perubahan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun 2023, yaitu "'Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat''". dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
- Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
- Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
- Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan
- Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Dengan mempertimbangkan Penjabaran yang telah dirumuskan didalam RPJPD Kutai Barat 2005 -2025 dan tema indikatif pada RKPD Provinsi Tahun 2023 sebagai pilihan tema indikatif. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan Agenda pembangunan Nasional, Tema RKP 2023 dan fokus tematik RPJMD Provinsi Kaltim, sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2023 di Kabupaten Kutai Barat dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Pilihan Tema indikatif Tema RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkulitas, dengan fokus pembangunan pada:

- 1. Peningkatan mutu bidang Pendidikan
- 2. Peningkatan mutu bidang Kesehatan
- 3. Peningkatan pelayanan masyarakat disemua bidang".

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:





- 1. *Peningkatan kualitas sumber daya manusia*, dimaknai sebagai upaya mewujudkan kondisi terbaik bagi masyarakat kutai barat, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun sosial ekonominya.
- 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkulitas, dimaknai dimaknai sebagai upaya meningkatkan perekonomian yang menggerakkan pembangunan Kutai Barat dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada subsektor subsektor yang langsung menyentuh pada masyarakat pada sektor pertanian dalam arti luas untuk pengembangan kluster karet, perikanan dan sapi pedaging

4.5. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan RPJMD, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan





Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan di atas, yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sedangkan Prioritas pembangunan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tahun 2023 adalah:

- Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
- Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
- Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
- Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan Pendukung IKN; dan
- Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Sedangkan Fokus dan lokus Pembangunan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR memperhatikan





Tematik Pembangunan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yaitu:

Tabel 4. 4 Arah dan Fokus Kaltim 2019-2023 di Kabupaten Kutai Barat

Arah Kebijakan	Fokus
Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan	Intensifikasi dan Pengamanan Kawasan Pertanian Pangan Produktif
Perkebunan	Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan melalui Pola Kemitraan
Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan	Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan Karet Rakyat
Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui Pola Kemitraan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan, utamanya dikawasan 3 danau
Pemberian Akses Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat Sekitar Hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
Peningkatan Layanan Infrastruktur	Peningkatan Layanan Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi, Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Perluasan Infrastruktur Air Bersih dan Jalan Produksi
Pengembangan Industri Pariwisata	Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Ekowisata Kawasan 3 Danau
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Akreditasi Puskesmas
Peningkatan Layanan	Peningkatan Layanan Pendidikan Vokasi





Arah Kebijakan	Fokus			
Pendidikan				
Peningkatan Ekonomi Desa	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa			
Pengembangan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	Pengembangan Industri Hulu Agro dan Aneka			

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2023, maka prioritas pembangunan Kutai Barat untuk Tahun 2023 yaitu:

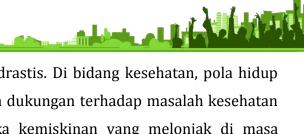
- 1. Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi;
- 2. Peningkatan Infrastruktur infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan;
- 3. Peningkatan sektor sektor unggulan dan potensial;
- 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kutai Barat diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan timur. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB Kabupaten dan penurunan angka Kemiskinan yang dilihat dari pendapatan perkapita, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun





2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemic Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kutai Barat menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasaan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

- 2. Peningkatan Infrastruktur infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan yang berkelanjutan ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pengembangan kluster Karet, Kluster Perikanan dan kluster sapi pedaging secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait pemenuhan layanan infrastruktur dasar serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Pembangunan dilakasanakan untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kutai Barat. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, dan kualitas Lahan yang terintegrasi dengan pemnafaatan Ruang sesuai RTRW, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung konektivitas masyarakat dengan kemudahan keterhubungan jalan yang menghubungkan antar kampung, dan jaringan komunikasi untuk pemeraataan cakupan layanan komunikasi
- 3. Peningkatan sektor sektor unggulan dan potensial diarahkan pada peningkatan kegiatan subsektor pertanian dalam arti luas dalam hal ini perikanan, pertanian sebagai pemantik aktifitas ekonomi Kutai Barat. Pertanian dalam arti luas memiliki share yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kutai Barat tahun 2020 setelah sektor penggalian. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai titik ungkit baru Perekonomian





Wilayah yang mendukung pengembangan tiga kluster Kutai Barat diupayakan untuk meningkatan pendapatan masyarakat. Prioritas pada subsektor pertanian dalam arti luas ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam pengembangan tiga kluster pada Kawasan secara berkelanjutan, baik sebagai pusat pengembangan kluster berbasis wilayah, kemandirian UMKM dan kelembagaan dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan kluster , menjadi kekuatan kutai barat untuk meningkatkan aktifitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di kutai barat. Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku subsektor pertanian.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kutai barat yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stake holder pembangunan yaitu pemerintah, perusahaan besar swasta dan filantrhopy dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan subsektor pertanian dalam arti luas

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kutai Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Kemiskinan masyarakat menurun;
- 2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;

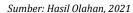


- 4. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
- 5. Kualitas pendidikan meningkat;
- 6. Harapan hidup masyarakat meningkat;
- 7. aktivitas ekonomi masyarakat kampung meningkat;
- 8. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
- 9. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
- 10. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kutai Barat berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 5 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kutai Barat PRIORITAS PROVINSI SASARAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI BARAT 1. Memperkuat Ketahanan 1. Pengembangan angkatan 1. Pemberdayaan SDM Kemiskinan masyarakat Ekonomi untuk kerja yang kompetitif dan yang berkualitas (sehat menurun Pertumbuhan yang berpendidikan berdaya saing Berkualitas dan Berkeadilan Aktivitas ekonomi masyarakat meningkat 2. Mengembangkan dengan tingginya Wilayah untuk Mengurangi persentase pengeluaran Keseniangan dan Meniamin dari PDRB Pemerataan 2. Peningkatan 3. Meningkatkan SDM Ketimpangan wilayah Berkualitas dan Berdaya 2. Penguatan ekonomi Infrastruktur dasar dan menurun Saing kerakyatan dan infrastruktur mendukung kewirausahaan masyarakat ekonomi kerakyatan secara Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 4 Revolusi Mental dan meningkat Pembangunan Kebudayaan Kualitas pendidikan 3. Peningkatan sektor 3. Peningkatan meningkat Infrastruktur untuk sektor unggulan dan produktivitas kawasan Mendukung industri pengolahan potensial Harapan hidup masyarakat Pengembangan Ekonomi meningkat dan Pelayanan Dasar Kualitas lingkungan hidup 6. Membangun Lingkungan 4. Pemerataan dan meningkat Hidup, Meningkatkan pemantapan konektivitas Ketahanan Bencana, dan antar daerah dan kawasan Perubahan Iklim pendukung IKN Infrastruktur wilayah meningkat 5. Pengembangan 7. Memperkuat Stabilitas kemandirian birokrasi Polhukhankam dan 4. Pemantapan Kinerja Kapasitas tata kelola untuk kebijakan publik yang Transformasi Pelayanan Aparatur dan Birokrasi pemerintahan meningkat berpihak pada kedaulatan daerah







Prioritas Kutai Barat telah selaras dengan Prioritas Nasional. Keselarasan dari masing masing Prioritas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 5 Penyandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Kutai Barat

	ei 4. 5 Penyandingan Prioritas	Prioritas	1 1 1011000 Hutui Bui ut
No	Prioritas Nasional	Kutai Barat	Sasaran
1	PN-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 2:	Kualitas lingkungan hidup meningkat Infrastruktur wilayah meningkat
		Prioritas 3:	Aktivitas ekonomi masyarakat kampung meningkat ditandai dengan tingginya pengeluaran perkapita penduduk kampung kampung Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Pertumbuhan ekonomi meningkat
2	PN-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2:	Kualitas lingkungan hidup meningkat Infrastruktur wilayah meningkat
		Prioritas 3:	Aktivitas ekonomi masyarakat kampung meningkat ditandai dengan tingginya pengeluaran perkapita penduduk kampung kampung Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Pertumbuhan ekonomi meningkat
3	PN-3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 1:	Kemiskinan masyarakat menurun Aktivitas ekonomi masyarakat kampung Kualitas pendidikan meningkat Harapan hidup masyarakat meningkat
4	PN-4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 1:	Kemiskinan masyarakat menurun Aktivitas ekonomi masyarakat kampung Kualitas pendidikan meningkat Harapan hidup masyarakat meningkat
5	PN-5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 2:	Kualitas lingkungan hidup meningkat Infrastruktur wilayah meningkat
6	PN-6: Membangun Lingkungan	Prioritas 3: Prioritas 2:	Aktivitas ekonomi masyarakat kampung meningkat ditandai dengan tingginya pengeluaran perkapita penduduk kampung kampung Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Pertumbuhan ekonomi meningkat Kualitas lingkungan hidup meningkat





No	Prioritas Nasional	Prioritas Kutai Barat	Sasaran
	Hidup, Meningkatkan Ketahanan		Infrastruktur wilayah meningkat
	Bencana, dan Perubahan Iklim		
		Prioritas 3:	Aktivitas ekonomi masyarakat kampung meningkat ditandai dengan tingginya pengeluaran perkapita penduduk kampung kampung Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Pertumbuhan ekonomi meningkat
	PN-7: Memperkuat Stabilitas	Prioritas 4:	Kapasitas tata kelola pemerintahan
	Polhukhankam dan Transformasi		meningkat
	Pelayanan Publik		

Sumber: Hasil Olahan, 2021

4.6. SASARAN PEMBANGUNN KUTAI BARAT TAHUN 2023

Target sasaran pembangunan Kutai Barat pada tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4. 6 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Prosentase penduduk miskin	9,11%
		Tingkat pengangguran terbuka	4,46
		Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil	0,44%
2	aktivitas ekonomi masyarakat	PDRB Perkapita	
	meningkat dengan tingginya persentase	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap	
	pengeluaran dari PDRB meningkat	PDRB	198,29
		Kontribusi sektor Pariwisata	
		terhadap PDRB	
		Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil	0,44%
3	Ketimpangan pendapatan antar	Indeks ketimpangan Pendapatan	0.222
	penduduk menurun	(Gini Ratio)	0,333
4	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Laju pertumbuhan ekonomi	4,24
		Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap	15,36
		PDRB	13,30
5	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	8,52
		Angka harapan lama sekolah	12,98
6	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	73,15
7	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Air	62,3
		Indeks Kualitas Udara	93,44





No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
		Indeks Kualitas Lahan	67,04
8	Infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi wilayah meningkat pendukung ekonomi kerakyatan meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	
		Persentase penduduk berakses air minum layak (%)	90,60%
		Persentase rumah tangga	99,6
		pengguna listrik	27%
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	64,70%
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	53%
9	Kapasitas tata kelola pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	59
	meningkat	Indek Kepuasan Masyarakat	82,50
		Opini BPK	WTP
		Nilai LPPD	3,7
		Persentase Desa Mandiri	0,13
		Indek Pembangunan Gender (IPG)	84,17
	DDWD K D	Nilai SAKIP	68

Sumber: RPJMD Kutai Barat 2021-2026; Hasil Analisis, 2021

Dalam pencapaian 9 sasaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi perangkat daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran 1-9. Perangkat daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi untuk menggandeng aktor pembangunan lainnya Kabupaten, korporasi, komunitas dan kampung untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran.

4.6.1. Kemiskinan Masyarakat Menurun

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kemiskinan Masyarakat Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
1.	Kemiskinan	Perlindungan Sosial	Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	masyarakat menurun	Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan





Infrastruktur dasar dar sosial	Dinas PUPPR; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan
Peningkatan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
Pendapatan	Dinas Sosial; Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	dan Transmigrasi
Penguatan Data dan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian; Bappeda;
Informasi	Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Keria dan Transmigrasi
Penguatan TKPK	Bappeda; 16 kecamatan; 190 kampung; 4 kelurahan
Pemberdayaan masyarakat kampung	Dinas Pertanian. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, DPMK, Dinas Pariwisata

Sumber: RPJMD Kutai Barat 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.2. Aktivitas ekonomi Masyarakat kampung Meningkat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah aktivitas ekonomi Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan aktivitas ekonomi

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
	Masyarakat kampung	Masyarakat berbasis Kampung	DP3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; BPBD; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Dinas PUPPR;16 kecamatan; 190 kampung; 4 kelurahan
			DP3AP2KB, DPMK, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan; Dinas Ketahanan Pangan
		9	DP3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			DPNPK, DP3AP2KB; Bagian Tata Pemerintahan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.3. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Ketimpangan Pendapatan Antar





Penduduk Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Ketimpangan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
	Ketimpangan pendapatan antar	Konektivitas	Dinas PU
	pendapatan antar penduduk menurun	o .	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
		_	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB; Bagian Kesejahteraan Rakyat;
			Dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan; Dinas pariwisata, Disdagkop 16 Kecamatan; Dinas PUPKP

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.4. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Sasaran daerah Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.

Peningkatan Ekonomi
Sektor Jasa Pariwisata

Peningkatan Ekonomi
Sektor Perdagangan

PERTUMBUHAN
EKONOMI

Peningkatan Ekonomi
Sektor Industri

Perizian dan Penanaman
Modal

Gambar 4. 6 Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

Peningkatan Infrastruktur

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Pertumbuhan Ekonomi Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.





Tabel 4. 10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
_		Peningkatan Ekonomi Sektor pertanian dalam	Dinas Pariwisata; Dinas pertanian, Dinas perikanan, Dinas ketahanan Pangan, Dinas perdagangan indutri dan koperasi;
	ekonomi mennigkat	arti luas	16 kecamatan 190 kampung
		Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan
		Peningkatan Ekonomi Sektor Industri	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
		Peningkatan Infrastruktur	Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan
		Perizinan dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPKP
		Stabilitas Keamanan	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.5. Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran daerah Kualitas Pendidikan Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4. 7 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan



Sumber: RPJMD Kutai Barat 2021-2026 dan Hasil Analisis, 2021

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kualitas Pendidikan Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.





Tabel 4. 11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
•	Pendidikan SD	Dinas Pendidikan
meningkat	Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan; 16 kecamatan
	Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan; DP3AP2KB
	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
	Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dinas Pendidikan; Dinas PUPKP
S .		Dinas Pendidikan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pengembangan Budaya Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	dan Pelatihan sesuai kebutuhan Kebutuhan	Dinas Pendidikan, Dinas pertanian, Dinas perikanan; Dinas ketahanan pangan
	Sasaran Daerah Kualitas pendidikan meningkat	Kualitas pendidikan meningkat Pendidikan SMP Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Inklusi Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan Penguatan Data dan Informasi Pengembangan Budaya Literasi Pendidikan Masyarakat dan Pelatihan sesuai

Sumber: RPJMD Kutai Barat 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.6. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran daerah Harapan Hidup Masyarakat Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4. 8 Kerangka Logis untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat



Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Harapan Hidup Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat





No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
	•	O	Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; 14 Kecamatan
	meningkat	Masyarakat	
		Peningkatan Layanan	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit
		Kesehatan	
		Pencegahan dan	Dinas Kesehatan
		Pengendalian penyakit	
		Regulasi Bidang	Dinas Kesehatan
		Kesehatan	
		Pengembangan Data dan Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja da	
		Sistem Informasi	Transmigrasi; DP3AP2KB
		Pemerataan Tenaga	Dinas Kesehatan
	Kesehatan		
		Pemenuhan Sarana dan	Dinas Kesehatan; DPUPKP; 16 kecamatan
		Prasarana Kesehatan	

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

Tabel 4. 13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Peran Serta

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
9.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan	Pelestarian Budaya Benda (Tangible)	Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas PUPKP; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Perpustakaan
	dan pelestarian budaya meningkat	Pelestarian Budaya Tak Benda (Intangible)	dan Kearsipan Dinas Pendidikan; Dinas Pemuda dan Olah Raga; Dinas Pariwisata; 16 Kecamatan

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.7. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup memiliki Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung dengan formula:

30% Indeks Kualitas Udara (IKU)

30% Indeks Kualitas Air (IKA)

40% Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)

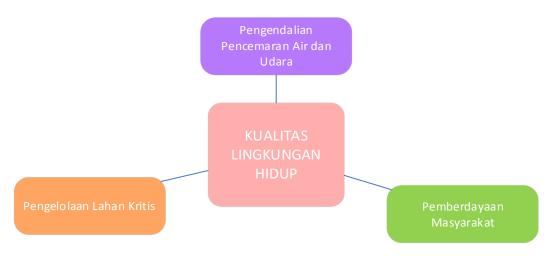
IKLH





Gambar berikut memperlihatkan kerangka logis untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Gambar 4. 9 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber: RPJMD Kutai Barat 2021-2026 dan Hasil Analisis, 2021

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
	hidup meningkat	Pencemaran Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas pertanian; Dinas perikanan
		Masyarakat	Dinas Kesehatan; 14 Kecamatan 190 kampung; Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.8. Infrastruktur Wilayah Meningkat

Sasaran daerah Infrastruktur Wilayah Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4. 10 Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah



Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Infrastruktur Wilayah Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
	Infrastruktur	- C	Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan
	wilayah meningkat	Infrastruktur Pekerjaan Umum	Hidup
		Peningkatan Infrastruktur	Dinas PUPKP
		Permukiman	Disco De la la como
		Peningkatan Infrastruktur Perhubungan	Dinas Perhubungan
		_	BPBD; Dinas Pemadam
		Infrastruktur Kebencanaan	Kebakaran dan Penyelamatan
		Partisipasi	16 kecamatan
		Masyarakat	

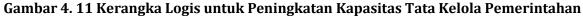
Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.6.9. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut :









Sumber: RPJMD Kutai Barat 2021-2026 dan Hasil Analisis, 2021

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
13.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Administrasi dan Keuangan; Sekretariat, Semua OPD
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BPKAD; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah; Dinas PUPKP
		Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Organisasi
		Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Penataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum; Sekretariat DPRD



10 miles	

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
		Peningkatan Kualitas	Dinas Dukcapil; Dinas Kominfo dan Persandian; Bagian
	Layanan Publik		Organisasi; Bagian Umum dan Protokol; 16 kecamatan
	Penguatan Inovasi		Bappeda
	Pengembangan E-Gov		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: RPJMD Kutai Barat2017-2022 dan Hasil Analisis, 2021

4.7. SINKRONISASI DENGAN TEMATIK PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2023

Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat

4.7.1. Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Tingkat kesejahteraan yang mewadahi kegiatan pembangunan yang menyasar penurunan ketimpangan (pemerataan, peningkatan insfrastruktur) di PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, didukung oleh program kegiatan yang direncanakan Kutai Barat di tahun 2023. Dukungan ini tetap dilaksanakan di Kutai Barat, dengan mengupayakan pemerataan pembangunan di wilayah kutai barat untuk menciptakan *ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat di 16 kampung*

Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa pengelolaan dan pengembangan pemenuhan cakupan pelayanan dasar; perbaikan rumah tidak layak huni; penyelenggaraan jalan termasuk jembatan; penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; penyelenggaraan penataan ruang; pengelolaan lahan kritis serta pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dukungan tersebut dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian juga dukungan lainnya untuk mengurangi ketimpangan dalam *Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan* berupa peningkatan aktivitas ekonomi; pengembangan kluster karet,perikanan dan sapi pedaging peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta pengelolaan perikanan budidaya oleh Dinas Perikanan dan Pangan; selain itu juga dengan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta dilakukan pula oleh Dinas





Perdagangan dengan peningkatan saranadasar dan pendukung ekonomi kerakyatan untuk distribusi perdagangan, serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Selain itu di seluruhan wilayah, 16 Kecamatan dan 190 kampung juga melakukan upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; pembangunan sarana dan prasarana; serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memajukan wilayah. Tematik pembangunan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kutai Barat

4.7.2. menuju kaltim berdaulat

Dukungan Kutai Barat terhadap kemandirian wilayah berada dalam kegiatan pembangunan yang menyasar pada penurunan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program yang langsung menyasar pada penduduk miskin, kemiskinan serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Beberapa Perangkat Daerah yang mengampu adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dengan melaksanakan pemberdayaan sosial; rehabilitasi social; perlindungan dan jaminan social; pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan upaya perlindungan perempuan dan anak, pembinaan Keluarga Berencana (KB), program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS). Selain itu Dinas Pendidikan melaksanakan pengelolaan pendidikan; Dinas Kesehatan dengan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; Dinas pertanian dengan pengembangan kluster, serta didukung pula dengan upaya yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian dari dinas Dinas Pertanian dan Pangan, dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta dinas Perdagangan.

Tematik pembangunan PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kutai Barat yaitu

- 1. Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi;
- 2. Peningkatan Infrastruktur infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan;
- 3. Peningkatan sektor sektor unggulan dan potensial;





4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

4.8. SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2021, Kutai Barat melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 17 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kutai Barat 2022

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kutai Barat	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	 Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan 	Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	 Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 	Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi	Dinas Kesehatan





Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kutai Barat	Perangkat	
			Daerah	
	12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif			
Pekerjaan Umum	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Peningkatan Infrastruktur infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			
Perumahan Rakyat	/kota	Peningkatan Infrastruktur infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah			
Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi	Satpol PP	
r rady ar arrac	2. Pelayanan informasi rawan bencana		BPBD	
	3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana			
	5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
	3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti			
	 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 			
	Perumahan Rakyat Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 2. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Sosial 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana 5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran Sosial 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial	risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif Pekerjaan Umum a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan Pelindungan Masyarakat Pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Ketenteraman ketertiban umum Pelindungan Masyarakat 2. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum SDM yang berkualitas {sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi 2. Pelayanan penyelamatan bencana 3. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana 4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran Sosial 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial	

Sumber: Hasil Analisis, 2021





4.9. SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

- Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan yang tidak termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kutai Barat adalah tujuan 14 Ekosistem Lautan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kutai Barat 2021-2026 dan turut menjadi pedoman penyusunan prioritas pembangunan tahun 2023.

4.10. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KUTAI BARAT



Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2023 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

4.10.1. Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kutai Barat 2023;
- 2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- 3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kutai Barat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kutai Barat; dan
- 4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kutai barat yang lebih baik

Tabel 4. 18 Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
masyarakat	n Prosentase Meningkatkar		Penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan secara holistik dan integratif; Peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi atau kebutuhan lapangan kerja dan membekali keterampilan penduduk sebelum bekerja; Optimalisasi peran IT dalam mengkomunikasikan dan memberikan informasi dan pelayanan terkait lapangan kerja dan pencari kerja; Peningkatan kerja sama dengan stakeholders dan penguatan kerja sama dengan variasi stakeholders lain dalam teknis kegiatan peningkatan kesempatan kerja; Peningkatan peran hubungan industrial dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
			Optimalisasi fungsi BUMKAM (bidang usaha pertanian) bagi petani dan pelaku industri sebagai wadah pengembangan agroindustri Optimalisasi peran perusahaan besar swasta dalam menyediakan Kesempatan dan peluang berusaha yang sesuai dengan potensi unggulan lokal dan kemampuan masyarakat lokal berbasis Kawasan berkelanjutan pada kampung-Kampung disekitar perusahaan melalui kegiatan kegiatan pada PPM (Program Pemberdayaan masyarakat) untuk Meningkatkan Status IDM (indeks Desa Membangun) pada





Arah Kebijakan Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		korban PHK	kampung kampung disekitar Perusahaan dalam upaya meningkatkan Status Kampung Status Kampung dari Kategori Desa tertinggal, berkembang dan Maju menuju kategori Desa Mandiri pada seluruh kampung disekitar Perusahaan. Peningkatan keterampilan SDM usia produktif dan korban PHK melalui Balai Latihan Kerja (BLK); Peningkatan kompetensi dasar dan kapasitas adaptasi SDM UMKM, petani dan pelaku industri dalam menghasilkan produk yang
			berkualitas dan kontinu secara kuantitas, dengan menggunakan teknologi tepat guna Mendorong kolaborasi SDM SDM wirausahawan lokal, pelaku industri dan pelaku IKM dengan berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas melalui fasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha huluhilir dengan pihak lain untuk pengembangan produk serta Fasilitasi kerjasama usaha dengan perusahaan mitra;
			Meningkatkan kapasitas inovasi SDM SDM wirausahawan lokal, petani dan pelaku industri untuk menghasilkan produk unggulan melalui Fasilitasi untuk peningkatan kemampuan SDM SDM wirausahawan lokal, petani, pelaku industri dan IKM (industri kecil Menengah) dalam berinovasi dan menggunakan teknologi informasi dalam menghasilkan produk unggulan.
	Prosentase penduduk miskin	jumlah pelaku UMKM berbasis komoditas unggulan yang	Optimalisasi peran perusahaan besar swasta dalam menyediakan Kesempatan dan peluang berusaha yang sesuai dengan potensi unggulan lokal dan kemampuan masyarakat lokal berbasis Kawasan berkelanjutan pada kampung-Kampung disekitar perusahaan melalui kegiatan kegiatan pada PPM (Program Pemberdayaan masyarakat) untuk Meningkatkan Status IDM (indeks Desa Membangun) pada kampung kampung disekitar Perusahaan dalam upaya meningkatkan Status Kampung dari Kategori Desa tertinggal, berkembang dan Maju menuju kategori Desa Mandiri pada seluruh kampung disekitar Perusahaan.
			Pembinaan kepada pelaku UMKM dan IKM, terutama dalam mendorong inovasi produk dan proses produksi; Kemudahan dalam proses perijinan usaha bagi UMKM dan IKM; Fasilitasi kerjasama usaha UMKM dengan perusahaan mitra; Peningkatan wawasan peluang usaha bagi calon pelaku usaha UMKM
			dan IKM; Melakukan percepatan penyerapan izin usaha pelaku UMKM dan industri (IKM) serta pemberian stimulus modal bantuan usaha melalui Fasilitasi permodalan bagi UMKM dan IKM;
			Pengembangan variasi prduk yg mampu merespon dinamisasi pasar melalui workshop utk pengembangan variasi prduk & kualitas produk dari sisi produksi, branding, pengemasan & pemasaran Pengembangan fasilitas produk produk berskala nasional melalui pameran berskala nasiona yang menampilkan produk industri lokal Promosi dan fasilitasi pemasaran produk UMKM dan IKM;
Aktivitas Ekonomi-		Peningkatan produksi dan	Bimbingan manajemen UMKM dan IKM. Pengawasan dan pengendalian illegal Fishing (penggunaan racun, dan setrum);
Ekonomi Masyarakat Kampung Meningkat		produktivitas komoditas sub sektor perikanan	Pengembangan kelembagaan yang efektif dan tangguh melalui Pembentukan, penguatan dan pembinaan kelompok, Pemberdayaan dan penguatan penyuluh lapangan Penguatan lembaga usaha dalam sistem agribisnis perikanan, Pembinaan teknik produksi budidaya ikan.





Arah Kebijakan Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		berkelanjutan	Pengembangan Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI);
			Pengembangan unit kolam air deras;
			Integrasi pengelolaan hutan gunduk di sekitar DAS Mahakam dan
			Penegakan aturan sepadan sungai dan danau.
			Pengembangan jumlah pembudidaya ikan, Pengembangan kapasitas dan kapabilitas pembudidaya ikan
			Pengembangan teknologi perikanan yang ramah lingkungan meliputi Teknologi benih, Teknologi pakan, Teknologi pengelolaan kualitas air, Teknologi dan manajemen kesehatan ikan, Teknologi pascapanen. Bantuan pemasaran hasil budidaya ikandan Pengembangan industri pengolahan perikanan;
			Pengembangan infrastruktur produksi guna mendukung usaha perikanan yang tangguh melalui Pembangunan dan pengembangan hatchery ikan dan unit pembenihan/pendederan rakyat (UPR), Pembangunan dan pencetakan kolam, Pengembangan karamba apung
			dan karamba tancap, Pengembangan pabrik pakan, Pembangunan dan pengembangan pasar ikan higienis
			Pengembangan sarana produksi yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat harga yang mencakup Pengembangan benih, Pengembangan pakan, Pengembangan obat-obatan ikan, Pengembangan peralatan perikanan. Pemberian bantuan/stimulan berupa bibit ikan berkualitas, pakan ikan, peralatan dan perlengkapan
			budidaya ikan);
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	destinasi ekowisata budaya yang berkualitas,	Peningktan kualitas SDM pelaku wisata; Peningkatan upaya promosi dan pemasaran objek wisata; Pengkaitan kalender wisata kabupaten; Pengadaan kegiatan event, festival, gelar seni dan budaya; Peningkatan akomodasi dan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan; dan Peningkatan kerjsama dengan agen wisata di luar Kutai Barat. Mengembangkan media promosi pariwiata terpadu dengan pariwisata
		mendorong	Provinsi Kalimantan Timur dan Integrasi kalender wisata kabupaten; Mengembangkan promosi pariwisata berbasis tema ekowisata budaya
		pelestarian adat, budaya,	lokal dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju baik dalam kegiatan event, festival, gelar seni dan budaya;
		alam, yang	Peningkatan akomodasi dan sarana dan prasarana pendukung
		dan bersinergi	kepariwisataan; dan Mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
			dengan dunia usaha untuk membentuk usaha pariwisata melalui peningkatan kerjsama dengan agen wisata
			Membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata Kabupaten Kutai Barat yang berbasis kemitraan, beridentitas lokal, kredibel, dan berwawasan lingkungan;
			Mengembangkan basis data & penelitian pasar wisatawan Kabupaten
			Kutai Barat yang berkesinambungan dengan melakukan research
			pasar terlebih dahulu disetiap manajemen promosi wisata
			Penyediaan sarana prasarana pendukung ekowisata kawasan 3 (tiga) danau; dan
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam upaya mendukung pengembangan ekowisata 3 (tiga) danau.
			Peningktan kualitas SDM pelaku wisata; Peningkatan upaya promosi
			dan pemasaran objek wisata; Pengkaitan kalender wisata kabupaten; Pengadaan kegiatan event, festival, gelar seni dan budaya; Peningkatan akomodasi dan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan; dan
	<u> </u>		Peningkatan kerjsama dengan agen wisata di luar Kutai Barat.





Arah Kebijakan Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Mengembangkan media promosi pariwiata terpadu dengan pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dan Integrasi kalender wisata kabupaten;
	PDRB perkapita	Meningkatkan produktivitas	Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani/koperasi petani sebagai suatu badan usaha ekonomi yang memenuhi syarat untuk
	meningkat	karet	memperoleh HGU lahan. Perluasan kebun karet rakyat diarahkan hanya pada wilayah- wilayah yang sesuai dan tersedia serta masyarakatnya telah mengetahui
			budidaya karet secara baik Penyediaan dana untuk pembangunan kebun karet rakyat; secara aktif memberikan fasilitasi agar petani yang tergabung dalam kelompok
			tani/koperasi petani dapat memperoleh dana dari program revitalisasi perkebunan.
			Perluasan areal tanaman produktif dengan peremajaan kebun karet rakyat tanaman tua/tanaman rusak.
			Memberikan dukungan/bantuan alsinta, dan saprodi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha petani karet untuk Peningkatan kemampuan petani dalam mengadakan sarana produksi sesuai standar dengan Ketersediaan Bibit karet unggul bersertifikat, pupuk
			anorganik, herbisida, dan pestisida; Akses permodalan usaha bagi petani karet;
			Pembinaan teknik good agricultural practices=GAP dan manajemen
			dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha dan mutu karet melalui Peningkatan pengetahuan petani tentang budidaya karet yang
			baik dengan peningkatan intensitas penyuluhan. Keberadaan BPP didukung oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) yang berkompeten di bidang budidaya karet dan peningkatan kualifikasi pendidikan PPL ke tingkat yang lebih tinggi untuk peningkatan kapasitas BPP.
			Penguatan bargaining position petani karet melalui penguatan karet melalui penguatan kelompok tani karet; menumbuhkan penangkar-penangkar bibit karet unggul bersertifikat di wilayah sentra produksi karet,memanfaatkan kebun-kebun entres karet unggul yang sebagai sumber perbanyakan bibit.
			Membina kelompok tani karet untuk dapat menyusun RDKK sehingga mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi (Urea, SP-36, ZA, NPK), dan mendorong tumbuhnya distributor pupuk serta kios pengecer di
			wilayah Kutai Barat . Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani/koperasi petani sebagai suatu badan usaha ekonomi yang memenuhi syarat untuk
			memperoleh HGU lahan. Peningkatan nilai tambah produk karet melalui mendorong petani
			meningkatkan mutu lum (harus bersih dari ampuran kotoran) sehingga tidak terkena rafaksi/potongan pada saat penjualan. Maningkatkan jumlah PRS untuk investasi pahrik pangalahan korat di
			Meningkatkan jumlah PBS untuk investasi pabrik pengolahan karet di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
		sarana dan	Penyediaan bibit ternak/ bakalan ternak, peningkatan kualitas bibit ternak melalui manajemen reproduksi, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak untuk mewujudkan skala usaha yang lebih
		Pengembangan	besar. Peningkatan ketahanan pangan produk peternakan, melalui
		Pedaging	pengembangan model kawasan perbibitan untuk Peningkatan kualitas bibit ternak, (b) pengembangan fasilitas layanan peternakan, Perbaikan lahan penggembalaan, Pengembangan sumber hijauan
			makanan ternak, Peningkatan teknologi pakan, Pengembangan unsur penunjang agribisnis peternakan pada aspek





Arah Kebijakan Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			sumber daya manusia, fasilitas dan kelembagaan melalui Peningkatan SDM peternakan (peternak dan aparat) dan kelembagaan peternak, pengembangan teknologi pengolahan hasil ternak dan Pengembangan sistem pemasaran dan promosi Peningkatan produk nilai tambah dan daya saing peternakan melalui
			perbaikan dalam system pengelolaan produk melalui (a) pengembangan diversifikasi teknologi pasca panen, pengolahan produk dan limbah ternak, Pengembangan fasilitas pemotongan ternak (b) Pengembangan teknologi budidaya ternak (c) pengembangan teknologi pakan konsentrat, dan (d) pengembangan sistem transportasi dan pemasaran
			Peningkatan ksejahteraan pternak dgn upaya peningkatan kontribusi usaha ternak dalam ekonomi rmh tangga melalui Pengembangan pola usaha & Pengembangan iklim investasi & kemitraan
			Peningkatan ketahanan pangan produk ternak ruminansia dalam ketersediaan produk daging, distribusi dan kontribusi daging diversifikasi produk keanekaragaman pengolahan daging dan hasil ikutan kesehatan dan kehalalan produk daging dalam Pola ASUH (Aman, Sehat Utuh dan Halal)
			Pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif;
		kreatif melalui peningkatan	Percepatan pemulihan "lingkungan" usaha ekonomi kreatif; Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dan penguatan dampak pandemi dengan peningkatan kualitas SDM dan nilai tambah usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi;
		hak atas	Penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses oleh pelaku ekonomi kreatif;
		intelektual	Penguatan infrastruktur fisik dan digital dalam mendukung berkembangnya ekonomi kreatif;
17	T 1 1 · ·		Penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif;
	Indeks gini		Peningkatan anggaran kemitraan (CSR) dari dunia usaha;
pendapatan antar	rasio	masyarakat	Menciptakan paket-paket usaha pedesaan menuju kemandirian pedesaan, kelestarian lingkungan, ekowisata pedesaan.
penduduk menurun			Bantuan pinjaman modal usaha melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan
			Pengembangan motivasi bekerja dan berusaha melalui pelatihan Pelatihan keterampilan usaha ekonomi
			Optimalisasi fungsi BUMKAM (bidang usaha pertanian) bagi petani dan pelaku industri sebagai wadah pengembangan agroindustri untuk Pemberdayaan BUMDes dalam menopang perekonomian masyarakat pedesaan
			Mengembangkan sarana prasarana peningkatan keterampilan, kreativitas, inovasi dan keahlian
			masyarakat dalam upaya mendukung agroindustri kutai barat melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan kejuruan untuk meningkatkan SDM sertaTersedianya sarana creative center
			optimalisasi kolaborasi antara perusahaan Besar swasta dan masyarakat di sekitar perusahaan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Masyarakat Kampung
			disekitar Perusahaan untuk Meningkatkan Status IDM (indeks Desa Membangun) pada kampung kampung disekitar Perusahaan dalam upaya meningkatkan Status Kampung dari Kategori Desa tertinggal, berkembang dan Maju menuju kategori Desa Mandiri pada seluruh





Arah Kebijakan Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Pertumbuhan ekonomi meningkat	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan terutama pada industri hulu agro dan aneka	kampung disekitar Perusahaan. Optimalisasi kolaborasi Peran dan skema Pendanaan Pembiayaan Program Program Pemberdayaan yang telah teridentifikasi sesuai kebutuhan dan permasalahan Kampung disekitar Perusahaan untuk untuk Meningkatkan Status IDM (indeks Desa Membangun) pada kampung kampung disekitar Perusahaan dalam upaya meningkatkan Status Kampung dari Kategori Desa tertinggal, berkembang dan Maju menuju kategori Desa Mandiri pada seluruh kampung disekitar Perusahaan. Meningkatkan akses golongan masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi masyarakat produktif; Pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara tribina, yaitu: bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha; Membangun lembaga kredit mikro untuk masyarakat miskin; Peningkatan pengetahaun dan kesiapan peran petani dan pelaku industri dalam pengembangan agroindustri Optimalisasi fungsi BUMKAM (bidang usaha pertanian) bagi petani dan pelaku industri sebagai wadah pengembangan agroindustri Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi bagi petani dan pelaku industri dalam mengintegrasikan sistem pengelolaan agroindustri Meningkatkan kompetensi dasar dan kapasitas adaptasi SDM petani dan pelaku industri dalam mengintegrasikan produk yang berkualitas dan kontinu secara kuantitas, dengan menggunakan teknologi tepat guna Mendorong kolaborasi SDM petani dan pelaku industri dengan berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas Meningkatkan kapasitas inovasi SDM petani dan pelaku industri untuk menghasilkan produk unggulan Pengembangan sarana prasarana dasar yang tercukupi, merata, dan berkualitas baik Peningkatan kapasitas sarana prasarana dasar di kawasan industri besar yang tercukupi, merata, dan berkualitas baik Pengembangan sarana prasarana peningkatan keterampilan, kreativitas, inovasi dan keahlian masyarakat dalam upaya mendukung agroindustri Melakukan percepatan penyerapan izin usaha pelaku industri, Kemudahan ijin investasi industri hulu agro dan aneka; serta pemberian stimulus modal bantuan usaha
			Mengembangkan platform pemasaran digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Mengembangkan variasi produk yang mampu merespon dinamisasi pasar
pendidikan		akses dan kualitas pelayanan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak; Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya PAUD dan Pendidikan Dasar;
	Harapan Lama Sekolah 12,98	bagi seluruh lapisan	Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik & kependidikan, baik mlalui penyetaraan pendidikan formal maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna meningkatkan kualitas lulusan SD & SMP Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
hidup masyarakat	Hidup	Peningkatan akses dan kualitas	Peningkatan rasio pelayanan rumah sakit; Peningkatan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar nasional; Perbaikan manajemen pengelolaan kefarmasian; Peningkatan kualitas SDM kesehatan pada Pustu (khususnya pelatihan





Arah Kebijakan Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		kesehatan bagi	APN, MTBS, BBLR, SDIDTK dan sebagainya);
		seluruh lapisan	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pengelola program promkes;
			Perbaikan kondisi gedung rumah sakit dalam upaya pemenuhan
			persyaratan rumah sakit yang telah ditetapkan;
			Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan baik di level PKM
			maupun Rumah Sakit;
			Setifikasi dan peningkatan kualitas SDM pengelola peralatan kesehatan
			di rumah sakit;
			Peningkatan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan
			pelayanan kesehatan masyarakat, terutama upaya penanggulangan
			penyakit-penyakit tidak menular; dan
			Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS.

Sumber: Hasil Analisis, 2021





BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS

Pada tahun 2023 tahapan pembangunan Kabupaten Kutai Barat memiliki fokus/tema pembangunan yang pada hakekatnya memiliki satu tujuan yakni pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Namun seiring dengan terjadinya Pandemi Covid-19 di tanah air dan dunia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan langkah-langkah antisipasi guna percepatan pemulihan dari dampak tersebut.

Dalam rangka meyempurnakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan daerah sebagai pekerjaan utama/pokok (*ultimate job*) dari pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga perumusan program kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan.

Demi mencapai visi dan misi tersebut diperlukan sinkronisasi antar sektoral maupun antar waktu agar tahapan-tahapan pembangunan daerah dapat selaras antar periode. Jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan keluaran (outcome) yang positif, maka selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan dan program prioritas yang kurang tepat sasaran. Selain itu perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 harus merujuk pada program dan prioritas yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikian alur dokumen perencanaan tersebut menjadi selaras dan tidak tumpang tindih, sesuai dengan peruntukannya dokumen RKPD 2023 dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam rangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik





diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program pembangunan pemerintah daerah.

Dengan melihat beberapa hal penting ditas maka harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kapasitas pendanaan pembangunan Kabupaten Kutai Barat. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas berserta kebutuhan pendanaannya

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda Pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang secara langsung terkait dalam pencapaian RPJMD melalui rencana program dan kegiatan.

4 Prioritas Pembangunan Kutai Barat dalam RKPD 2023 yaitu:

- 1. Peningkatan Pemberdayaan SDM yang berkualitas / sehat berpendidikan dan mampu secara ekonomi
- 2. Peningkatan Infrastruktur infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang berkelanjutan
- 3. Peningkatan sektor sektor unggulan dan potensial
- 4. Pemantapan Kinerja aparatur dan birokrasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitik beratkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas dan penunjang lainnya, maka dijabarkan pada **32 Urusan** yang terdiri atas :





6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- 1. pendidikan;
- 2. kesehatan;
- 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- 6. sosial.

18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

tenaga kerja;
 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. pangan; 4. pertanahan;

5. lingkungan hidup;6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika;

11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal;

13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik;

15. persandian; 16. kebudayaan;

17. perpustakaan; dan 18. Kearsipan.

8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas:

kelautan dan perikanan;
 kehutanan;

3. pariwisata; 4. energi dan sumber daya mineral;

5. pertanian; 6. perindustrian; dan

7. perdagangan; 8. transmigrasi.

Dan 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

1. perencanaan;





- 2. keuangan;
- 3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 4. penelitian dan pengembangan; dan
- 5. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan lagi dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.

Berdasarkan alokasi tersebut diatas Program pada masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum;

4. Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Perhubungan;

6. Lingkungan;

7. Kependudukan;

8. Sosial;

9. Ketenagakerjaan;

10. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri;

11. Pemerintahan Umum:

12. Kepegawaian;

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

14. Kearsipan;

15. Penanaman Modal;

16. Pertanian;

17. Pertambangan;

18. Kehutanan;

19. Pariwisata;

20. Perindustrian.

Estimasi pendanaan pembangunan APBD tahun 2023 didasarkan pada perkembangan pendanaan APBD selama tahun 2021 dan 2022 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Perkembangan anggaran menunjukkan terjadinya fluktuasi meskipun tidak terlalu besar. Kecenderungan peningkatan terjadi pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD.

Dalam jangka panjang pembangunan Kabupaten Kutai Barat berupaya mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan





perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Kutai Barat.

Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Rancangan Prioritas Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2023 dapat dilihat dalam tabel pada Bagian Lampiran sesuai dengan kaidah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.





BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja utama pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan proporsi anggaran yang tersedia. Dokumen Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 - 2026 telah disusun Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja berskala outcome yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran-sasaran dalam RPJMD tersebut. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja ini, sasaran, indikator kinerja, dan target untuk periode 2021-2026 masih mengacu kepada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021.

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 - 2021

No	Indikator	Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
1	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi Mantap (%)	55,70%	56%	75,20%
2	Cakupan Layanan Air Minum (%)	72,19%	76,45%	100%
3	Rata rata lama sekolah	8,34 Tahun	8,57 Tahun	9,07 Tahun
4	Angka harapan lama sekolah	12,89 Tahun	13 Tahun	13,5 Tahun
5	Angka harapan hidup	72,79 TH	72,96 TH	73,54 THN
6	Nilai SAKIP	62,27	64	74
7	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
8	Nilai IKM	81,44	81,50	84





No	Indikator	Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
9	Nilai EKPPD	3,4	3,5	4
10	Nilai PDRB sektor pertanian dlm arti luas	14,89	15,04	15,85
11	Nilai PDRB industry pengolahan	6.80%	6.80%	6.90%
12	Nilai Investasi (PMDN PMDA) Rp Juta	1.897.214	2.093.518	3.204.972
13	PDRB perkapita	183,84 juta	188,54 juta	213,87 juta
14	Angka penggguran terbuka (Rasio penduduk yang bekerja (%)	4,97%	4,74%	4,01%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,39	75,58	76,51%
16	Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan	92,8%	93,2%	93,2%
17	% Konflik Sosial (Kesbangpol)/ %Angka Konflik	90%	90%	95%
18	% Gangguan ketertiban yang terselesaikan K3	70%	75%	95%
19	Jumlah Kampung Maju	25%	33%	89%
20	Pemuda Berprestasi	88	88	98
21	IPG/IDG	83,87%	83,97%	84,47%
22	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
23	Rasio Rumah Layak Huni	72	72	97
24	Cakupan Layanan Telekomunikasi	56%	56%	91%

Sumber : BP3D, Hasil Analisis, 2021





BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2021 - 2026. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung dalam *Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkulitas* melalui program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI KUTAI BARAT.

TTD

FX. YAPAN, SH, MH

BURSAN PPEMERINT ALIAN BIDANG KERIDAYAAN 229.093.286 CIRISAN PPEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 229.093.286 CIRISAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.582.01448 CIPT. Tannan Budaya KERIDAYAAN 2.399.000 CIPT. SANDER MERINTAHAN BIDANG KERIDAYAAN 2.399.000 CIPT. SANDER MERINTAHAN BIDANG KERIDAYAAN 2.399.000 DIBAS KERIDAYAHAN 1.141.895.484.50 BIDAS KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAAN 1.141.895.948.50 BIDAS KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAN 3.000.000.000 BIDAS KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAN 3.000.000.000 BIGA KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAN 3.000.000.000 BIDA SERBERAYAHAN 3.000.000.000 BIDA SERBERAYAHAN BIDANG KERBHATAN 3.000.000.000 BIDA BARDAR KERBHATAN 115.213.346.29 BIDA SEPAREJAH BIDANG KERBHATAN 115.213.346.29 BIDA SEPARA SERBAHAN BIDANG FEREBARAH LAHIM DAN PERATAAN RUANG 270.920.000.00 BIDA SEPARA SERBERAHAN LAHIM DAN PERATAAN RUANG 270.920.000.00 BIBISAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREBABAHAN LAHIM DAN PERATAAN RUANG 291.53.00 BIBISAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREBABAHAN LAHIM DAN PERATAAN RUANG 291.53.00 BIBISAN PEMERINTAHAN BIDA	Tahun 2023	
Page Institute (Rp.)	Livusan/ Ridang Livusan/ Program/ Kogiatan/ Sub-Kogiatan	_
BIESAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.050.000.000 PET. Sanggus Kegistan Belajar 220.003.280 PET. Sanggus Kegistan Belajar 230.000.000 PET. Sanggus Kegistan Belajar 230.000.000 PET. Sanggus Kegistan Belajar 230.000.000 PET. Sanggus Kegistan Belajar 230.000 PET. Sanggus Kegistan Belajar 230.00	Orusan/ Bidang Orusan/ Frogram/ Regiatan/ Sub Regiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
BURSAN PPEMERINT ALIAN BIDANG KERIDAYAAN 229.093.286 CIRISAN PPEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 229.093.286 CIRISAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.582.01448 CIPT. Tannan Budaya KERIDAYAAN 2.399.000 CIPT. SANDER MERINTAHAN BIDANG KERIDAYAAN 2.399.000 CIPT. SANDER MERINTAHAN BIDANG KERIDAYAAN 2.399.000 DIBAS KERIDAYAHAN 1.141.895.484.50 BIDAS KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAAN 1.141.895.948.50 BIDAS KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAN 3.000.000.000 BIDAS KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAN 3.000.000.000 BIGA KERIDAYAHAN BIDANG KERIDAYAN 3.000.000.000 BIDA SERBERAYAHAN 3.000.000.000 BIDA SERBERAYAHAN BIDANG KERBHATAN 3.000.000.000 BIDA BARDAR KERBHATAN 115.213.346.29 BIDA SEPAREJAH BIDANG KERBHATAN 115.213.346.29 BIDA SEPARA SERBAHAN BIDANG FEREBARAH LAHIM DAN PERATAAN RUANG 270.920.000.00 BIDA SEPARA SERBERAHAN LAHIM DAN PERATAAN RUANG 270.920.000.00 BIBISAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREBABAHAN LAHIM DAN PERATAAN RUANG 291.53.00 BIBISAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREBABAHAN LAHIM DAN PERATAAN RUANG 291.53.00 BIBISAN PEMERINTAHAN BIDA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	423.514.095.073
LUFT. Sunggar Kegistan Belajar 229.00.528 LURUSAN PEMBERNYAJANA BIDANG PENDIDIKAN 1.582.014.44 CRESAN PEMBERNYAJANA BIDANG KEBUDAYAAN 1.582.014.44 CRESAN PEMBERNYAJANA BIDANG KEBUDAYAAN 2.290.000 LIKISAN PEMBERNYAJAHA BIDANG KEBUDAYAAN 2.290.000 LIKISAN PEMBERNYAJAHA BIDANG KEBUDAYAAN 3.290.000 LIKISAN PEMBERNYAJAHA BIDANG KEBUDAYAAN 3.188.95.485.51 LIKISAN PEMBERNYAJAHA BIDANG KEBUDAYAAN 3.188.95.485.51 LIKISAN PEMBERNYAJAHA BIDANG KEBUDAYAAN 3.000.000.000 LIKISAN PEMBERNYAJAHA BIDANG KESULATAN 3.153.000 LIKISAN PEMBERNYAJAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.700.000.052 LIKISAN PEMBERNYAJAHAN BIDANG PEKERJANA UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.153.000 LIKISAN PEMBERNYAJAHAN BIDANG PEKERJANA UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.156.000 DIDAN PEMBERNYAJAHAN BIDANG PEKERJANA UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.156.000 DIDAN PEMBERNYAJAHAN BIDANG PERUMAHANA NAWASAN PERMIKIMAN 1.934.675.531 KERSAN PEMBERNYAJAHAN BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	420.413.087.383
LIELSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.582.014.46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.050.000.000
1.58.2014.46 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.58.2014.46 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBUDAYAAN 229.99.00 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBUDAYAAN 229.99.00 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBUDAYAAN 229.99.00 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBUDAYAAN 14.89.548.55 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBUDAYAAN 14.89.548.55 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULAYAN 14.89.548.55 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULATAN 15.00.00.00 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULATAN 16.00.00.00 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULATAN 16.12.13.64.24 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULATAN 16.12.13.64.24 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULATAN 16.12.13.64.24 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULATAN 17.12.13.64.24 IVEX.AN PEMERINTA ALAN BIDANG KEBULATAN BIDANG PERUMAHAN BANKAWASAN PERUMKINAN BIDANG KEBULATAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BANKAWASAN PERUMKINAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BANKAWASAN PERUMKINAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BANKAWASAN PERUMKINAN BIDANG KEBULATAN BIDANG PERUMAHAN BANKAWASAN PERUMKINAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BANKAWASAN PERUMKINAN BIDANG PERUMBANG KEBULATAN BIDANG PERUMBANG KEBULATAN BANKAWASAN PERUMBAN BANKAWASAN PERUMBAN BANKAWASAN BANKAWASAN PERUMBAN BANKAWASAN BANKAWA	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar	229.093.250
LEISAN PEMBERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 239,000,000 CRUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 229,000,000 DIBAS Keshelatan (18,885,948,856) LEISAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,000,000,000 LEISAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,000,000,000 REUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,000,000,000 LEUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PEKERAAN UMUM DAP PENATAAN RUANG 271,422,422,500 LEUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PEKERAAN UMUM DAP PENATAAN RUANG 9,01,546,900 LEUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMENIAN 1,706,215,900 LERISAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMENIANAN 1,706,215,910 LERISAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUH SEKTA PERUMUNAN 1,706,215,910 LERISAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERUMBANAN PENANGERINAKAN BERTAPERUMUNAN 1,706,215,910 LERISAN PEMBERINTAHAN BIDANG KETATERAWAHAN BERTARAN BERTAPERUMBANAN PERUMBANAN PERUMBANAN PER	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	229.093.250
UPT_MISSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAN	UPT. Taman Budaya Sentawar	1.582.014.440
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KERUAYAN 1418-9548-56 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.000.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.000.000.000 3.000.0000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.582.014.440
Dissa Kechatan 141,889,548,507 URUNAN PEMERINTAHIAN BIDANG KESHIATAN 3,306,000,000 URUNAN PEMERINTAHAN BIDANG KESHATAN 3,000,000,000 URUNAN PEMERINTAHAN BIDANG KESHATAN 115,213,346,224 URUNAN PEMERINTAHAN BIDANG KESHATAN 115,213,346,224 URUNAN PEMERINTAHAN BIDANG KESHATAN 115,213,346,224 URUNAN PEMERINTAHAN BIDANG FEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG 270,200,005,621 URUNAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG 501,535,690 URUNAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG 501,535,690 DIRIS PEMERUNTAHAN BIDANG PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG 501,535,690 DIRIS PEMERUNTAHAN BIDANG PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUNG 19,346,275,915 URUNAN PEMERUNTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN 1,709,627,5915 URUNAN PEMERUNTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERUNUNGAN 2,191,338,111 URUNAN PEMERUNTAHAN BIDANG PERUMAHAN BANG KETERTERANAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERUNUNGAN 1,191,339,111 URUNAN PEMERUNTAHAN BIDANG SERTA PERUNUNGAN 1,191,339,111 Badar Penanggulangan Becoma Doerali 1,121,508,734 URUNAN PEMERUNTAHAN BIDANG SOSIAL 1,073,152,242 URUNAN PEMERUNTAHAN BIDANG SOSIAL	UPT. Museum Etnografi Sendawar	239.900.000
URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.000.000.000 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.000.000.000 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 15.213.946.29 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 15.213.946.29 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 15.213.946.29 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 27.1422.42.59 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20.290.956.26 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.345.59 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.345.59 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.345.69 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERENJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.346.75 URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERENJAHAN UMUM SERJAHAN UMUM SERJAHAN PEMBURAN PEMBURAN PEMBURAN PEMBURAN PERENJAHAN BIDANG PERENJAHAN DAN KAHANAN PERENJAHAN UMUM SERJAHANAN PEMBURAN PEMBURAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PEMBURAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PEMBURAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PERENJAHANAN PEMBURAN PEMBURAN PEMBURAN PEMBURAN PERENJAHAN BIDANG PERBURAN PERENJAHAN PERENJAHANAN PERENJ	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	239.900.000
RSUD. Kels D Pratama Sendawar CRUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG KESHIATAN 3.000.000.000 RSUD. Harapan Lana Sendawar 115.13.046.29 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG KESHIATAN 115.13.046.29 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG KESHIATAN 27.14.24.25 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27.02.20.90.86.21 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.153.69 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.153.69 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.153.69 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.153.69 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PEREBAJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.153.69 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PEREBAJAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKHAN 17.462.75.919 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PERTANAHAN 22.000.000 URUSAN PEMBRUN TAILAN BIDANG PERTANAHAN BIDANG PEMBRUN BATANAHAN BIDANG KETA TERBURNAHAN BIDANG KETA TERBURNAHAN BIDANG KETA TERBURNAHAN BIDANG KETA TERBURNAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUN BATANAHAN BIDANG KETA TERBURNAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUN BATANAHAN BIDANG SOSIAL 10.7591.52.24 URUSAN PEMBRUN TAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUDANAH PERTANAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUDANAH BERNAHAN BIDANG PEMBRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAH BIDANG PENGRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAH BIDANG PENGRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAH BIDANG PENGRUDANAH PEMBRUDANAH BATANAH BIDANG PENGRUDANAH BATANAH BIDANG PENGRUDANAH BATANAH BIDANG PENGRUDANAH BATANAH BATANG PEMBRUDANAH BATANAH BIDANG PERHUBUNGAN BATANAH BATANG PERHUBUNGAN	Dinas Kesehatan	141.859.548.567
IRRISAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,000,000,000 RSUB Harapan Ibsan Sendawar 115,213,046,294 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 271,422,442,500 Diasa Pekerjana Umum dan Penatana Ruang 271,422,442,500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 501,536,500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 501,536,500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 501,536,500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19,342,750,150 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKHAN 17,096,275,915 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2,250,000,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Proja 2,191,389,111 KARIO PEMERINTAHAN BIDANG KELENTEKAMAN DAN KELEKI BAN UMUM SEKIA PEKIANDUNAN 21,91,389,111 KARSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELENTEKAMAN DAN KELEKI BAN UMUM SEKIA PEKIANDUNAN 10,121,585,74 KURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELENTEKAMAN DAN KELEKI BAN UMUM SEKIA PEKIANDUNAN 10,121,585,74 KURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10,759,132,24 Dinas Sentan Pemberdayan, Perempan dan Perlindungan Anak 3,312,10,57 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDANAN MAS PEMERDANAN ANA SERBARANAN BANG PEMBERDANG PEMBERDANAN ANA SERBARA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	138.859.548.567
INCLIDATE INCIDENTALISTA INCLIDATE INCLIDATE INCLIDATE INCLIDATE INCIDENTALISTA	RSUD. Kelas D Pratama Sendawar	3.000.000.000
RIUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 115,213,946,294	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.000.000.000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 271,422,442,536 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 270,209,095,201 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 501,55,600 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19,346,275,915 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREMAHAN DAN KAWASAN PERMUKHMAN 17,966,275,915 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIMAHAN DAN KAWASAN PERMUKHMAN 22,500,000,000 Kantor Satuan Pedidi Pamong Peria 21,913,811,117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIMAHAN DAN KAWASAN PEMERUKHMAN 21,913,811,117 KAROF SATUAN BIDANG PERIMAHAN DAN KAWASAN PEMERUKHMAN 21,913,891,117 KAROF SATUAN BIDANG PERIMAHAN DAN KAWASAN PEMERUKHMAN 21,913,891,117 RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KATENTEKAWAN DAN KETERTERAN UMUM SEKTA PEKULNDUNGAN 21,913,891,117 RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10,759,152,242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10,759,152,242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANK 8,331,210,753 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANK 8,332,210,753 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALAN PENGENDALAN PEMERINDUNGAN ANK 9,233,377,656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDAKAN P	RSUD Harapan Insan Sendawar	115.213.946.294
UPIL Laboratorium Konstruksi UPIL Laboratorium Konstruksi Solis56-000 UPIL Laboratorium Konstruksi Solis66-000 UPIL Lab	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	115.213.946.294
UPT. Laboratorium Konstruksi \$01,536,500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \$01,365,500 Dians Perumbainan dan Pertanahan \$19,346,275,131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \$17,096,275,015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \$2,250,000,000 KARIOT SABURA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN \$2,191,389,111 KARIOT SABURA PEMERINTAHAN BIDANG KETEN LERAWAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN \$1,191,389,111 KANAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL \$10,279,152,242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL \$10,799,152,242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \$3,312,157 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENERDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \$0,100,000 DIBBA SEGERINTAHAN BIDANG PENERDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \$9,323,377,65 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGERDALIAN PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL \$3,746,240,93 URUSAN PEMER	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271.422.442.520
DRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 501-536-390	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	270.920.905.620
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 19,346,275,915	UPT. Laboratorium Konstruksi	501.536.900
URUSAN PÉMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17.096.275.915 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.250.000.00 KARIOF SALBIN POBLÍS PARIOR PERJE 21.913.891.117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELETEKKWAN DAN KELEKTIBAN URUW NEKLA PERLINDUNGAN 21.913.891.117 HUKUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELENTEKKWAN DAN KELEKTIBAN URUW NEKLA PERLINDUNGAN 10.121.505.741 HUKUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELENTEKKWAN DAN KELEKTIBAN URUW NEKLA PERLINDUNGAN 10.121.505.741 HUKUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.759.152.242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.759.152.242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.331.210.578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.330.210.578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENCENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINCKUNGAN 9.323.377.656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINCKUNGAN HIDUP 21.978.308.75 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA 18.111.891.479 Dinas Pendadayaan Masyarakat dan Kam	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	501.536.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.250,000,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 21,913,891,117 MUSUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETEN FERAMAN DAN KETERTIBAN UNION SERTA PERUDUGAN 21,913,891,117 MASVA DAEAT 10,212,695,741 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10,121,695,741 HUKUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETEN ERAMAN DAN KETERTIBAN UNION SERTA PERUDUGAN 10,121,695,741 Binas Sosial 10,759,152,242 Binas Sosial 10,759,152,242 Binas Pemerintahan BiDANG SOSIAL 10,759,152,242 Dinas Pemerintahan BiDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8,331,210,578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8,332,210,578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 9,323,377,656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 21,978,308,75 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDAHAN 21,978,308,75 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21,978,308,75 Dinas Vemberdayaan Masyarakat dan Kampung 18,111,891,479 URUSAN PEMERINTAHA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.346.275.915
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 21,913,891,117 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 21,913,891,117 Badan Peanaggulangan Bencana Dacrah 10,121,505,741 KKINN PEZHEKI TAHAN BIDANG KETEN JERASHAN DAN KETERTIBAN UNUM SERTA PERLINDUNGAN 10,121,505,741 KKINN PEZHEKI TAHAN BIDANG SOSIAL 10,759,152,242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10,759,152,242 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak 8,331,210,578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8,30,210,578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9,323,377,656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9,323,377,656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21,978,930,875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21,978,930,875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,746,240,923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18,111,891,479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 35,956,035,566 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.096.275.915
RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERASHAN DAN KETERTIBAN UNIUM SERTA PERLINDUNGAN 21.913.891.117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.250.000.000
MARYLD MART 21,913,891,117 Badan Peanagulangan Bencana Daerah 10,121,1505,741 URUSAN PEMBERITAHAN BIDANG KETENTERASHAN DAN KETERTIBAN UNIUNI SERTA PERLINDUNGAN 10,121,505,741 Dinas Sosial 10,759,152,242 Dinas Pemgendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak 8,331,210,578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PERENPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8,330,210,578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 9,323,377,656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9,323,377,656 Dinas Lingkungan Hidup 21,978,393,875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21,978,393,875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,746,240,923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,746,240,923 Dinas Pemberdayaan Alayarakat dan Kampung 18,111,891,479 Dinas Perhubungan 35,966,035,568 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN		21.913.891.117
Badan Penanggulangan Bercana Dacrah 10.121.505.741 MCKUSAN PEDERINTAHAN BIDANG KELEN ERAMAN DAN KELEH BAN UMUN SEKIA PERLINDUNGAN 10.759.152.242 Dinas Sosial 10.759.152.242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.759.152.242 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak 8.931.210.578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.33.210.578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 9.323.377.656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.323.377.650 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.323.377.650 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978.930.875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978.930.875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA 18.111.891.479 Dinas Perhubungan 9.3598.035.568 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817.150.274 <td></td> <td>21.913.891.117</td>		21.913.891.117
Int.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.121.505.741
Dinas Sosial 10.759.152.242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.759.152.242 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak 8.331.210.578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.330.210.578 URUSAN PEMERINTAHAS BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 9.323.377.656 URUSAN PEMERINTAHAS BIDANG PANGAN 9.323.377.656 Dinas Lingkungan Hidup 21.978.930.875 URUSAN PEMERINTAHAS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978.930.875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAS BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.746.240.923 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 18.111.891.479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.111.891.479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 34.525.331.631 UPT. Pelabuhan 817.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.555.366 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 643.555.366 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG K		10.121.505.741
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 21.377.656 Dinas Lingkungan Hidup 21.978.930.875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978.930.875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.978.930.875 Dinas Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 21.978.930.875 Dinas Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 21.978.930.875 Dinas Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 21.978.930.875 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 21.978.930.875 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 21.978.930.875 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pencatatan Sipil 22.978.930.875 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberintahan Bidang Pembungan DIPT. Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1817.150.274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor G43.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1917.900.336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah		10.759.152.242
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 601.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 9.323.377.656 Dinas Ketahanan Pangan 121.978.930.875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.323.377.656 Dinas Lingkungan Hidup 121.978.930.875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978.930.875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.874.6240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.111.891.479 Dinas Perhubungan 135.986.035.568 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1977. Pelabuhan 1977. Pelabuhan 1977. Pengujian Kendaraan Bermotor 1977. Pengujian Kendaraan Bermotor 1978. Pengujian Kendaraan Bermotor 1979. Pengujian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.759.152.242
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Ketahanan Pangan 9,323,377,656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9,323,377,656 Dinas Lingkungan Hidup 21,978,930,875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,746,240,923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 9,197,930,875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,746,240,923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,746,240,923 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 9,18,111,891,479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18,111,891,479 Dinas Perhubungan 18,19,479 Dinas Perhubungan 18,19,479 Dinas Perhubungan 18,17,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18,17,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18,17,150,274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 18,17,150,274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 18,17,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 11,160,230,442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11,158,971,852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBANDIAN 10,10,230,442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBANDIAN 11,158,971,852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBANDIAN 10,0755,154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11,260,230,442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBAGANGAN 11,211,709,592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	8.931.210.578
Dinas Ketahanan Pangan 9.323,377,656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.323,377,656 Dinas Lingkungan Hidup 21.978,393,875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978,393,875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746,240,923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.746,240,923 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 18.111.891,479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.111.891,479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 35.986,035,316,630 UPT. Pelabuhan 817,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817,150,274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 643,555,366 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643,555,366 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.260,230,442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.158,971,852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60,755,154 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60,755,154 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13,286,062,935 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH <td>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</td> <td>8.330.210.578</td>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.330.210.578
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.323.377.656 Dinas Lingkungan Hidup 21.978.930.875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978.930.875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.746.240.923 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 18.111.891.479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.111.891.479 Dinas Perhubungan 35.986.035.568 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 31.525.331.630 UPT. Pelabuhan 817.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.158.971.852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 60.503.36 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.286.062.935	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	601.000.000
Dinas Lingkungan Hidup 21.978,930,875 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978,930,875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746,240,923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.746,240,923 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Binas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPT. Pelabuhan UPT. Pelabuhan 817,150,274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817,150,274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 643,553,664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 911,260,230,442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 911,260,230,442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 911,158,971,852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 960,755,154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1,211,709,592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1,211,709,592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1,929,940,727	Dinas Ketahanan Pangan	9.323.377.656
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 21.978.930.875 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.746.240.923 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.746.240.923 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 18.111.891.479 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.111.891.479 Dinas Perhubungan 25.986.035.586 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 27.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 28.17.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 29.17.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 40.353.664 Dinas Komunikasi dan Informatika 20.18.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.323.377.656
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Binas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIRILI.891.479 Dinas Perhubungan 35.986.035.568 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 34.525.331.630 UPT. Pelabuhan BIT.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BIT.150.274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor G43.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BIT.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIT.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIT.150.274 BIT.	Dinas Lingkungan Hidup	21.978.930.875
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Binas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Binas Perhubungan BI.111.891.479 Dinas Perhubungan BIT.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BIT.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BIT.150.274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor G43.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BIT.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN G43.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BIT.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN G43.553.664 Dinas Komunikasi dan Informatika BIL.260.230.442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIL.360.230.442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK BIDANG PERSANDIAN BIDANG PERDAGANGAN BIL.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN BIL.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BI.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BIL.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.978.930.875
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPT. Pelabuhan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN BIDANG PERSANDIAN BIDANG PERSANDIAN BIDANG PERSANDIAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.746.240.923
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPT. Pelabuhan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.746.240.923
Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPT. Pelabuhan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.436 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	18.111.891.479
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UPT. Pelabuhan UPT. Pelabuhan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.436 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERNDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.111.891.479
UPT. Pelabuhan 817.150.274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 817.150.274 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 643.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.158.971.852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.436 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18.639.422.846 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.286.062.935 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	Dinas Perhubungan	35.986.035.568
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN DIT. Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.158.971.852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.436 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	34.525.331.630
UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 643.553.664 Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	UPT. Pelabuhan	817.150.274
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.2211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	817.150.274
Dinas Komunikasi dan Informatika11.260.230.442URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA11.158.971.852URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK40.503.436URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN60.755.154Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah18.639.422.846URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH13.286.062.935URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN1.211.709.592URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN1.211.709.592UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah1.929.940.727	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	643.553.664
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.436 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	643.553.664
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.503.436 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.286.062.935 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.260.230.442
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 60.755.154 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.158.971.852
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.503.436
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.286.062.935 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	60.755.154
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.211.709.592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.639.422.846
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.211.709.592 UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.286.062.935
UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 1.929.940.727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.211.709.592
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.211.709.592
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.929.940.727	UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	1.929.940.727
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.929.940.727

Page Inditatif (Rp.) CRUSAN PEMERIYTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 50,000,000 CPU. Pasar 50,000,000 CRUSAN PEMERIYTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 50,000,000 Diana Pranamana Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pinia 12,399,300,2 Diana Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pinia 12,399,300,2 Diana Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pinia 12,399,300,2 Diana Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pinia 12,398,300,2 Diana Pemanda dan Ghirnaga 16,218,833,3 Diana Assip dan Perpadakana 16,218,833,3 Diana Assip dan Perpadakana 7,365,1940,3 Diana Assip dan Perpadakana 7,365,1940,3 Diana Assip dan Perpadakana 7,365,1940,3 Diana Pembaranan Manda Dang KERASIPAN 7,965,1940,3 Diana Pembaranan 7,365,1940,3 Diana Pembarananan 7,365,1940,3 Diana Pembarananan 7,365,1940,3 Diana Pembarananan 7,365,1940,3 Diana Pembaranananananananananananananananananana		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
REINSAN PPAMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN \$80,000.00	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
UPT_Pasr Senome	UPT. Metrologi Legal	500.000.000
URUSAN PEMERITAHAN BIDANC PERDAKANAN 1239-300.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	500.000.000
Dias Peranaman Model dan Pelayanan Terpode Sam Pintu 12,399,3002. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAI. 12,99,3002. Dias Permedi dan Olahraga 10,118833.9 Dias Permedi dan Olahraga 10,118833.9 DIBISAN PEMERINTAHAN BIDANG KIPPHIDAN DAN OLAHRAGA 10,11883.0 DIBISAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 7,09,1040. DIBIS SERIKAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 21,000,000. DIBIS PERISAN PEMERINTAHAN BIDANG KEALAUTAN DAN PERIKANAN 12,108,229.5 DIBIS PERISAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7,000,000. DIBIS PERISAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12,608,220.5 DIBIS PERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 7,000,000. DIBIS PERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 1,000,000. DIBIS PERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 6,000,000. DIBIS PERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 9,000,000. DIBIS PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 1,000,000. DIBIS PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 9,000,000.	UPT. Pasar	500.000.000
IRLINAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAHAN MODAL 12,993,902, Disas Pemelada dan Olahraga 10,218,833, Disas Araji dan Perpustakanan 7,345,194, Disas Araji dan Perpustakanan 7,345,194, Disas Perikanan 2,345,194, Disas Perikanan 2,346,000, Disas Perikanan 3,346,000, Disas Perikanan Perikanan 3,346,000, Disas Perik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	500.000.000
Dias Permin dan Olahrage	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.399.300.234
IRLINAN PEMBERINTAHAN BIDANG KEPENLIDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.399.300.234
Diass Arsip dan Perpustakaan 7.385,1940 LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSHPAN 27,505,1940 LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 21,000,192.5 Diass Perkiaman 21,000,192.5 RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 21,000,292.5 LUFI. Balai Bendi Isan (BBI Mentiwan 75,000,000 LURISAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 35,000,000 Dinas Pariwisatu 15,665,789.8 LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG FERLAUTAN DAN PERIKANAN 35,000,000 Dinas Pertawisatu 15,665,789.8 LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 68,921,487. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67,121,040 LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 69,531,99. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 69,531,99. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 94,946.0 Dinas Tennga Kerja dan Transwingrasi 87,726.0 LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 25,000,000 LRUSAN PEMERINTAHAN BID		10.218.833.983
REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIPAN 2,000,000		10.218.833.983
IRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 21.000.00 Dinas Perbianan 21.001.00 IRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 21.048.292.5 LEPT. Balai Benih Ikan (BBJ) Mentiwan 786.000.00 LERISAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 376.000.00 Dinas Pariwisata 15.665.789.8 LERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIWATA 6.892.148.7 Dinas Pertanian 6.892.148.7 LERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.7.121.04.0 LERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.95.119.0 LEPI. Agrobiania Pertanian Empas 7.949.46 LERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.95.119.0 LEPI. Agrobiania Pertanian Empas 7.949.46 LERISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 974.94.6 Dinas Tengga Kerja dan Transmigrasi 8.572.65.6 Dinas Tengga Kerja dan Transmigrasi 8.572.65.6 LEUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 94.94.6 Dinas Tengga Kerja dan Transmigrasi 8.572.65.6 LEUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.574.0 SEKRETARIAT DARAH 9.574.0 PERENCANAN 9.574.0		7.345.194.087
Dinos Perikanan 21,804,292.5 RRISAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 21,082,292.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 75,600,00 DEUSAN PEWISTIN AND BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 15,665,789.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 65,921,847. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67,792,104.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67,792,104.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 665,319.9 UPT. Revialisasi Perkebahan BiDANG PERTANIAN 665,319.9 UPT. Agrobiasis Perkebahan BiDANG PERTANIAN 79,494.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 79,494.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8,599.26.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENASHIGRAS 215,000.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENASHIGRAS 215,000.0 SEKRETARIAT DATRAH 25,394.26.0 SEKRETARIAT DATRAH 25,394.65.8 Badan Percencanan, Penditian dan Pengembangan Daerah 25,394.65.8 PERLELTIAN DAN PENGEMBANGAN 1,250.000.0 Badan Percencanan, Penditian dan Pengembangan Daerah 25,934.65.8 PERLELTHAN DAN PENGEMBANGAN 1,267.35.2		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 21.048.292.5 UPT. Rala Benih Bian (BBI) Mentiwan 76.000.00 Dias Pariwisata 15.66.789.8 Dinas Pertanian (68.592.418.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (70.000.00 Dias Pariwisata 15.66.789.8 Dinas Pertanian (68.592.418.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (71.02.100.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (71.02.100.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (71.02.100.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (74.934.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (74.934.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (74.946.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (75.946.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (75.946.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (76.946.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (77.947.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (77.947.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (78.938.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (78.938.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (79.948.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (79.948		
PT. Ralai Benih Ikan (RRI) Mentiwan 756,000.00 REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 756,000.00 REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15,665,789.8. REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15,665,789.8. REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 68,52418.7. REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67,102,104.00 REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 68,5319.0. REUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 68,5319.0. LPT. Revitalisasi Perkebunan 68,5319.0. LPT. Revitalisasi Perkebunan 68,5319.0. LPT. Agrobisnis Pertanian Empas 74,994.6. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 74,994.6. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 74,994.6. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGGA KERIA 8,859.265. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGGA KERIA 8,859.265. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGGA KERIA 9,843.832.2. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGGA KERIA 9,843.832.2. LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGGA KERIA 9,843.832.2. SEKRETARIAT DERBA 9,843.832.2. SEKRETARIA		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 15.66.789.8 Dinas Perivisata 16.8.521.418.7 Dinas Perivisata 16.8.521.418.7 Dinas Perivisata 16.8.521.418.7 Dinas Perivisata 16.8.521.418.7 DINAS PERIPISATAHAN BIDANG PERTANIAN 16.8.319.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 16.8.319.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 17.4.94.60 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.8.7.4.26.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 18.8.4.8.3.2.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.8.4.8.3.2.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.8.4.8.3.2.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.8.4.8.3.2.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.8.4.8.2.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.8.4.8.2.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.8.3.2.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.2 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI 18.9.4.3.3.3.3.3.3.3 SEKRETARIAT DERDI		
Dinas Pariwisata 15.665,789.8 URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 16.657,789.8 Dinas Pertanian 66.85,224,875. URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.12,114.0 URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 608,319.9 URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 79.494.6 URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 79.494.6 URUSAS NEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 79.494.6 DIBAS TENDAG KEPI dan Transmigrasi 8,774,265.0 URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8,599,265.0 URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9,484,382,32 URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 215,000,00 SEKKETARIAT DAERAH 9,484,382,32 SEKKETARIAT DAERAH 9,500,496,54 Badan Percencanan, Pembaganan, Pemelitian dan Pengembangan Daerah 22,519,301,58 PERELITIAN DAND PENGEMBANGA 1,250,000,00 Badan Keunagan dan Aset Daerah 488,729,737,3 KEUANGAN 488,729,737,3 Badan Keunagan dan Aset Daerah 21,640,187,7 KEUANGAN 21,640,187,7 Badan Kengayan dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 21,640,187,7		
URUSAN FEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15.665.789.8 Dinas Pertantian 68.592.418.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.312.104.0 UPT. Revitalisasi Perkebunan 605.312.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 605.312.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.874.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.879.266. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.879.266.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 94.843.223.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 215.000.0 Badan Perderintahan BIDANG TENAGA KERJA 215.000.0 Badan Permananan, Pembanganana, Pencilitian dan Pengembangan Daerah 25.000.0 PERENCANAN 125.000.0 Badan Kerjangan dan Act Daerah 488.727.373.3 KEUANGAN 1888.727.373.3 Badan Pengembangan Sumber Daya		
Dinas Pertanian 68.592.418.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.192.104.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 605.319.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 605.319.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.74.265.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENASA KERJA 215.000.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 215.000.0 SEKRETARIAT DAERAH 9.843.832.2 SEKRETARIAT DAERAH 9.843.832.3 SEKRETARIAT DARD 25.193.013.8 PERREICHTAN DAN PENGEMBANGAN 23.93.015.8 PERREICHTAN DAN PENGEMBANGAN 488.729.737.3 KEUANGAN 488.729.737.3 KEUANGAN 21.60.188.7 Budan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.3 KEUANGAN 21.60.188.7 Budan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 21.60.188.7 KEPEGAWAIAN 10.127.05.28 KEPEGAWAIAN 10.127.05.28 KEPEGAWAIAN 1.50.20.6 KECAMATAN JEMPANG		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.192.104.0 UBT. Revitalisasi Perkebunan 605.319.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 605.319.9 UPT. Agrobisnis Pertanian Empas 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.774.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.559.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 215.000.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 215.000.0 SEKRETARIAT DARAH 9.848.332.2 SEKRETARIAT DARAH 22.934.015.8 PERENCANAN 22.934.015.8 PERENCANAN 12.20.000.0 Badan Ferencinana, Pembangunan, Penclitian dan Pengembangan Daerah 12.50.000.0 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.3 BERULTIAN DAN PENGEMBANGAN 12.60.00.0 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.3 Bedan Pendepapatan Daerah 12.640.189.7 KEUANGAN 12.640.189.7 KEUANGAN 12.640.189.7 KEUANGAN 12.640.189.7 KEUANGAN 12.640.189.7 KEUANGAN 10.127.052.8 <t< td=""><td></td><td>68.592.418.740</td></t<>		68.592.418.740
UPT. Revitalisasi Perkebunan 605.319.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 695.319.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 Dinas Tenaga Kerja dan Trunsmigrasi 8.774.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.559.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENASMIGRASI 91.500.00 SEKRETARIAT DAERAH 94.843.832.2 SEKRETARIAT DAERAH 5.709.456.4 Badan Pernenanan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25.199.315.8 PERELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.259.000.0 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.3 KEUANGAN 488.729.737.3 Badan Fendapatan Daerah 1.264.01.89.7 Bedan Pendapatan Daerah 21.640.189.7 Bedan Pendapatan Daerah 12.640.189.7 Bedan Repegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.962.80 KEPEGAWALAN 10.127.052.8 PEPEDIDIKAN DAN PELATHIAN 2.500.000 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.1 KECAMATAN BURGAN 4.330.818.4 KECAMATAN BONGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 605.319.9 UPT. Agrobisnis Pertanian Empas 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.774.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.599.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 94.843.823.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGHIGRASI 121.600.0 SEKRETARIAT DARAH 94.843.823.2 SEKRETARIAT DPRD 57.094.965.4 Badan Perencanana, Pembangunan, Pencitian dan Pengembangan Daerah 25.193.015.8 PERENCANAN 1.250.000.0 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.250.000.0 BERDANGAN 488.729.737.3 BERDANGAN 488.729.737.3 Bedan Kengawaian dan Aset Daerah 21.640.189.7 Bedan Kengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11.270.022.80 KEPEGAWAIAN 10.1270.622.80 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.0 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.1 KECAMATAN JEMPEANG 4.913.856.4 KECAMATAN JEMPEANG 4.913.856.4 KECAMATAN MELAK LU 5.000.0		605.319.962
UPT. Agrobisnis Pertanian Empas 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHIAN BIDANG PERTANIAN 794.994.6 URUSAN PEMERINTAHIAN BIDANG TENAGA KERJA 8.754.265.0 URUSAN PEMERINTAHIAN BIDANG TENAGA KERJA 8.559.265.0 URUSAN PEMERINTAHIAN BIDANG TENAGA KERJA 94.843.823.2 URUSAN PEMERINTAHIAN BIDANG TRANSMIGRASI 91.500.00 SEKRETARIAT DAERAH 94.843.823.2 SEKRETARIAT DPRD 57.094.065.4 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25.193.105.8 PERENCANAAN 1.250.000.0 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.3 KEUANGAN 1.260.000.0 Badan Keuangan dan Aset Daerah 21.640.185.7 KEUANGAN 21.640.185.7 KEUANGAN 21.640.185.7 KEUANGAN 10.127.052.8 KEUANGAN 10.127.052.8 Badan Kengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 21.640.185.7 KEPEGAWATAN 10.127.052.8 PENDIDIKAN DAN PELATHHAN 2.500.000.0 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.5871. KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.4 K		605.319.962
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 794.994.66 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.774.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.559.265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 215.000.0 SEKRETARHAT DAREAH 94.843.832.5 SEKRETARHAT DERD 57.094.965.4 Badan Pernecamaan, Pembangunan, Penchitian dan Pengembangan Daerah 25.193.015.8 PERENCANAAN 1.250.000.0 PERENCANAAN 488.793.733. KEUANGAN 488.793.733. Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.7 KEUANGAN 488.793.733. Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.7 KEUANGAN 21.640.189.7 Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.7 KEUANGAN 10.127.052.8 KEPGAWAIAN 10.127.052.8 KEPGAWAIAN 10.127.052.8 KEPGAWAIAN 10.127.052.8 KEPGAWAIAN 10.127.052.8 KECAMATAN DAN PELATIHAN 10.127.052.8 KECAMATAN BONG PARHU 5.163.202.6 KECAMATAN BONGAN 4.806.038.1 KECAMATAN BULAK U.U </td <td></td> <td>794,994.696</td>		794,994.696
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.559,265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 215,000.0 SEKRETARIAT DAERAH 94,843,823.2 SEKRETARIAT DPRD 57,004,965.4 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25,193,315.8 PERENCANAAN 1,250,000,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488,729,737.3 KEUANGAN 488,729,737.3 Badan Pendapatan Daerah 21,640,189.7 KEUANGAN 21,640,189.7 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12,627,052.80 KEPEGAWAIAN 10,127,052.8 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,500,000,00 INSPEKTORAT DAERAH 18,517,887.1 KECAMATAN JEMPANG 4,913,865.4 KECAMATAN MUARA PAHU 5,163,202.6 KECAMATAN BONGAN 4,880,038.1 KECAMATAN BURGAK 1,283,659.2 KECAMATAN MELAK 1,283,659.2 KECAMATAN BURGAK 1,801,856.3 KECAMATAN BELAK LU 5,000,00 KELURAHAN BELAK LU 5,000,00 KELURAHAN BELAK LUR 5,000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	794.994.696
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.559,265.0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 215,000.0 SEKRETARIAT DAERAH 94,843,823.2 SEKRETARIAT DPRD 57,004,965.4 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25,193,315.8 PERENCANAAN 1,250,000,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488,729,737.3 KEUANGAN 488,729,737.3 Badan Pendapatan Daerah 21,640,189.7 KEUANGAN 21,640,189.7 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12,627,052.80 KEPEGAWAIAN 10,127,052.8 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,500,000,00 INSPEKTORAT DAERAH 18,517,887.1 KECAMATAN JEMPANG 4,913,865.4 KECAMATAN MUARA PAHU 5,163,202.6 KECAMATAN BONGAN 4,880,038.1 KECAMATAN BURGAK 1,283,659.2 KECAMATAN MELAK 1,283,659.2 KECAMATAN BURGAK 1,801,856.3 KECAMATAN BELAK LU 5,000,00 KELURAHAN BELAK LU 5,000,00 KELURAHAN BELAK LUR 5,000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.774.265.042
SEKRETARIAT DAERAH 94.843.823.22 SEKRETARIAT DAERAH 57.094.965.43 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25.193.015.83 PERENCANAAN 23.943.015.83 PERELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.250.000.00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.31 KEUANGAN 21.640.189.74 Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.74 KEUANGAN 21.640.189.74 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 25.000.00 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.12 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.200.00 KECAMATAN LONG IRAM 4.880.038.14 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.14 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN BARNOR TONGKOK 4.13.286.21.8 KECAMATAN BARNOR TONGKOK 4.15.61.6 KECAMATAN BARNOR TONGKOK 4.15.63.6 KELURAHAN SIMPANG RAYA 4.68.439.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.559.265.042
SEKRETARIAT DPRD 57.094.965.4 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25.193.015.8 PERENCANAAN 1.250.000.0 Budan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.3 KEUANGAN 21.640.189.7 Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.7 KEUANGAN 21.640.189.7 Badan Pendapatan Daerah 12.640.189.7 KEUANGAN 21.640.189.7 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 10.127.052.8 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.0 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.1 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.4 KECAMATAN BURGAN 4.913.865.4 KECAMATAN BURGAN 4.380.818.4 KECAMATAN BURGAN 12.835.799.2 KECAMATAN BURGAN 12.835.799.2 KECAMATAN BURGAN 12.835.799.2 KECAMATAN BURGAN 1.00.00 KECAMATAN BURGAHAN 4.10.947.4 KECAMATAN BURGAHAN 6.109.477.4 KECAMATAN BELAK ILIR 5.000.0 KECAMATAN BELAK ILIR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	215.000.000
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penclitian dan Pengembangan Daerah 25.193.015.81 PERENCANAAN 23.943.015.81 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.250.000.00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.31 KEUANGAN 448.729.737.31 Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.74 KEUANGAN 21.640.189.74 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 10.127.052.81 PENDIDIKAN DAN PELATHIAN 2.500.000.00 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.11 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN BONGAN 4.913.865.47 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4 KECAMATAN BONGAN 4.489.038.4 KECAMATAN BURAK 12.835.799.2 KELURAHAN MELAK LIL 5.000.00 KELURAHAN MELAK LILR 5.000.00 KELURAHAN MELAK LILR 5.000.00 KELURAHAN BARONG TONGKOK 11.328.012.8 KELURAHAN BARONG TONGKOK 11.328.012.8 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.6	SEKRETARIAT DAERAH	94.843.823.255
PERENCANAAN 23.943.015.81 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.250.000.0 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.31 KEUANGAN 21.640.189.77 Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.77 KEUANGAN 21.640.189.77 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 10.127.052.81 PENDIDIKAN DAN PELATHIAN 2.500.000.0 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.15 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4 KECAMATAN HELAK 12.835.799.2 KELURAHAN MELAK LIL 5.000.00 KELURAHAN MELAK LILR 5.000.0 KELURAHAN MELAK LILR 5.000.0 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.8 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.8 KELURAHAN BARONG TONGKOK 4.409.889.3 KELURAHAN BARONG TONGKOK 4.485.947.4 KELURAHAN BENTIAN BESAR 4.489.898.7 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.489.898.7 KECAMATAN BENTIA	SEKRETARIAT DPRD	57.094.965.459
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.250.000.00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.33 KEUANGAN 488.729.737.33 Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.74 KEUANGAN 21.640.189.74 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 10.127.052.81 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.01 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.15 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.45 KECAMATAN MUARA PAHIU 5.163.202.65 KECAMATAN HONG IRAM 4.896.038.16 KECAMATAN MELAK 12.835.799.2 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.45 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.45 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.85 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.66 KELURAHAN BARONG TONGKOK 416.849.90	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.193.015.888
Badan Keuangan dan Aset Daerah 488.729.737.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37	PERENCANAAN	23.943.015.888
KEUANGAN 488.729.737.31 Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.74 KEUANGAN 21.640.189.74 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.88 KEPEGAWAIAN 10.127.052.88 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.00 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.15 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN WUARA PAHU 5.163.202.66 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4 KECAMATAN BONGAN 4.896.038.16 KECAMATAN MELAK 12.837.792 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.4 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.4 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.071.8 KELURAHAN BARONG TONGKOK 11.328.071.8 KELURAHAN BARONG TONGKOK 416.630.0 KELURAHAN BARONG TONGKOK 416.843.0 KELURAHAN BENTIAN BESAR <t< td=""><td>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</td><td>1.250.000.000</td></t<>	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.250.000.000
Badan Pendapatan Daerah 21.640.189.70 KEUANGAN 21.640.189.70 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 10.127.052.80 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.00 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.18 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.202.60 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.44 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.18 KECAMATAN MELAK 12.835.799.2 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.4 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.96.93 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.96.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN BINTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	488.729.737.382
KEUANGAN 21.640.189.70 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 10.127.052.81 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.00 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.15 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN MURAP APHU 5.163.202.66 KECAMATAN BONGAN 4.380.3818.4 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.10 KECAMATAN MELAK 12.835.799.2 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.4 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.90 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.85 KECAMATAN BARONG TONGKOK 45.631.60 KELURAHAN BARONG TONGKOK 45.631.60 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN BURAR LAWA 44.409.988.90 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.70 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.25	KEUANGAN	488.729.737.382
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.627.052.80 KEPEGAWAIAN 10.127.052.81 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.00 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.11 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.202.60 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.44 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.10 KELURAHAN MELAK 12.835.799.20 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ULIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.41 KECAMATAN DAMAI 4.701.926.93 KECAMATAN BRONG TONGKOK 11.328.021.81 KECAMATAN BARONG TONGKOK 415.631.61 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.489.884.72 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.25	Badan Pendapatan Daerah	21.640.189.702
KEPEGAWAIAN 10.127.052.80 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.500.000.00 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.13 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.47 KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.202.66 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.44 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.14 KECAMATAN MELAK 12.835.799.2 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.47 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.81 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.61 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.72 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.25	KEUANGAN	21.640.189.702
PENDIDIKAN DAN PELATHAN 2.500.000.0 INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.19 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.49 KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.202.60 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.49 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.10 KECAMATAN MELAK 12.835.799.20 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.43 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.627.052.809
INSPEKTORAT DAERAH 18.517.587.11 KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.41 KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.202.62 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.44 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.10 KECAMATAN MELAK 12.835.799.22 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.43 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.25	KEPEGAWAIAN	10.127.052.809
KECAMATAN JEMPANG 4.913.865.4° KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.202.6° KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4° KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.1° KECAMATAN MELAK 12.835.799.2° KELURAHAN MELAK ULU 5.000.0° KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.0° KECAMATAN DAMAI 6.109.477.4° KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.9° KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.8° KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.0° KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.9° KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.7° KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.2°		2.500.000.000
KECAMATAN MUARA PAHU 5.163.202.6 KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.16 KECAMATAN MELAK 12.835.799.2 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.0 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.4 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.9 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.8 KEURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.6 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.0 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.9 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.885.984.7 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.2		18.517.587.159
KECAMATAN BONGAN 4.380.818.4 KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.10 KECAMATAN MELAK 12.835.799.23 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.43 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN SIMPANG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23		4.913.865.472
KECAMATAN LONG IRAM 4.896.038.10 KECAMATAN MELAK 12.835.799.23 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.43 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23		
KECAMATAN MELAK 12.835.799.23 KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.43 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23		
KELURAHAN MELAK ULU 5.000.00 KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.43 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23		
KELURAHAN MELAK ILIR 5.000.00 KECAMATAN DAMAI 6.109.477.44 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23		
KECAMATAN DAMAI 6.109.477.48 KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.98 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.69 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.28		
KECAMATAN PENYINGGAHAN 4.701.926.93 KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.83 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.73 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23		
KECAMATAN BARONG TONGKOK 11.328.021.82 KELURAHAN BARONG TONGKOK 415.631.63 KELURAHAN SIMPANG RAYA 468.439.00 KECAMATAN MUARA LAWA 4.409.988.94 KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.72 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23		
KELURAHAN BARONG TONGKOK415.631.69KELURAHAN SIMPANG RAYA468.439.00KECAMATAN MUARA LAWA4.409.988.94KECAMATAN BENTIAN BESAR4.485.984.73KECAMATAN LINGGANG BIGUNG5.327.325.23		11.328.021.822
KELURAHAN SIMPANG RAYA468.439.00KECAMATAN MUARA LAWA4.409.988.94KECAMATAN BENTIAN BESAR4.485.984.73KECAMATAN LINGGANG BIGUNG5.327.325.23		415.631.699
KECAMATAN MUARA LAWA4.409.988.94KECAMATAN BENTIAN BESAR4.485.984.73KECAMATAN LINGGANG BIGUNG5.327.325.24	KELURAHAN SIMPANG RAYA	468.439.000
KECAMATAN BENTIAN BESAR 4.485.984.72 KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.23	KECAMATAN MUARA LAWA	4.409.988.943
KECAMATAN LINGGANG BIGUNG 5.327.325.28	KECAMATAN BENTIAN BESAR	4.485.984.723
	KECAMATAN LINGGANG BIGUNG	5.327.325.286
KECAMATAN NYUATAN 4.820,239.3	KECAMATAN NYUATAN	4.820.239.365

Tanun 2025	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Didang Urusan/ Program/ Regiatan/ Sub Regiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
KECAMATAN SILUQ NGURAI	4.268.650.311
KECAMATAN NOOK MANAAR BULATN	4.493.379.608
KECAMATAN TERING	5.551.243.810
KECAMATAN SEKOLAQ DARAT	5.419.091.233
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.890.757.930
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.890.757.930
TOTAL PAGU INDIKATIF	2,117,570,475,364

Tahun 2023	
Uwasan/ Bidang Uwasan/ Duogwam/ Wagistan/ Sub-Wagistan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	423.514.095.073
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	420.413.087.383
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	377.733.197.383
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.479.890.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	200.000.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	900.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.050.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	450.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	250.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000
UPT. Sanggar Kegiatan Belajar	229.093.250
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	229.093.250 229.093.250
UPT. Taman Budaya Sentawar	1.582.014.440
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.582.014.440
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.582.014.440
UPT. Museum Etnografi Sendawar	239.900.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	239,900,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	239.900.000
Dinas Kesehatan	141.859,548,567
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	138.859.548.567
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.019.234.304
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.642.314.263
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	60.500.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	37.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100.000.000
RSUD. Kelas D Pratama Sendawar	3.000.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.000.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.000.000.000
RSUD Harapan Insan Sendawar	115.213.946.294
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	115.213.946.294
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.131.586.294
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.082.360.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Dinas Pakasisan Umum dan Panataan Panata	271.422.442.520
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	270.920.905.620
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.908.331.920
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.025.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.000.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.900.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.900.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	11.682.259.200
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	25.715.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	15.000.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	151.298.914.500
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.491.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.000.000.000
UPT. Laboratorium Konstruksi	501.536.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	501.536.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	501.536.900
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.346.275.915
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.096.275.915
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.315.235.815
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	499.999.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DDOCDAM DEDUMAHAN DAN KAWASAN DEDMUKIMAN KUMUH	2.099.712.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROCRAM PENINCKATAN PRASARANA SARANA DAN UTU ITAS UMUM (PSII)	800.000.000 3.381.329.100
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENINGKATAN PELATANAN SEKTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN KEGISTKASI DIDANG	3.361.349.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.250.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	2.230.000.000
AND OTHER PROPERTY IN THE POST OF THE POST	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	110,000,000
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	110.000.000 1.465.000.000

Tahun 2023	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Orusani/ Bidang Orusani/ Programi/ Regiatani/ Sub Regiatani	Pagu Indikatif (Rp.)
Trogram redistridusi tanah, serta ganti rerugian trogram tanah reledihan marsimum dan tanah Arcentee	-
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	355.000.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	320.000.000
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ukusan temerin tahan didang ketentekaman dan ketektidan umum sekta terlindungan	21.913.891.117 21.913.891.117
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.473.891.117
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.140.000.000
TROGRAM FENCEGAHAN, FENANGGULANGAN, FEN FELAMATAN REDARARAN DAN FEN FELAMATAN NON L'EDALLADAN	300.000.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ukusan tembannahan didang ketentekaman dan ketektidan umum sekta teklindungan	10.121.505.741
MACVADAVAT	10.121.505.741
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.148.433.233
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Dinas Sosial	973.072.508 10.759.152.242
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.759.152.242
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.259.152.242
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	500.000.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	500.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	165.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	335.000.000
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.931.210.578 8.330.210.578
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.730.210.578
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	300.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	75.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	120.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	65.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	601.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	180.000.000 321.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100.000.000
Dinas Ketahanan Pangan	9.323.377.656
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.323.377.656
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.039.167.656
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	161.650.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	670.700.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	220.860.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Lingkungan Hidup	231.000.000 21.978.930.875
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.978.930.875
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.598.930.875
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	379.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.072.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) I kogkam i engendalian dahan derdahata dan deracun (bj) dan limbah dahan derdahata dan	500.000.000
PROGRAM TEMBAH PAN DAN TENGAWASAN TEMBADAT IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN TEKLINDUNGAN DAN	158.000.000
DENCELOL LAN LINCUUNCAN HINID ØDLIN. I KUGRAM FENGAKUAN KEDEKADAAN MASTAKAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEAKIFAN LUKAL DAN HAK MHA TANG	260.000.000 210.000.000
TEDICAN DELCAN DELLI PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	99.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	240.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.362.000.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.746.240.923
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.746.240.923
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.206.290.923
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.000.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	169.950.000 120.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEFENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	30.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	18.111.891.479
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.111.891.479
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.939.154.158
PROGRAM PENATAAN DESA	300.000.000

Tahun 2023	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Olusani Bidang Olusani Ilogrami Regiatani Sub Regiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	200.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.172.737.321
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.500.000.000
Dinas Perhubungan	35.986.035.568
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	34.525.331.630
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.679.057.300
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.173.074.330
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.673.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	017 170 274
UPT. Pelabuhan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	817.150.274 817.150.274
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	817.150.274
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	017.130.274
UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	643.553.664
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	643.553.664
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	643.553.664
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
Dinas Komunikasi dan Informatika	11.260.230.442
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.158.971.852
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.528.459.518
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	271.762.026
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.358.750.308
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40.503.436
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	40.503.436
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	60.755.154 60.755.154
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.639.422.846
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.286.062.935
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.034.353.343
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	255.854.796
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	200.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	150.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	505.854.796
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	140.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.211.709.592
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PISTRIPUG PERDA CANGAN	225.854.796
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HADOA DADANG KEDUTUHAN DOVOK DAN DADANG BENTING	380.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	500.000.000 50.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	55.854.796
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.211.709.592
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	986.559.892
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	150.149.700
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	75.000.000
UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	1.929.940.727
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.929.940.727
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.614.300.727
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	315.640.000
UPT. Metrologi Legal LIDUSAN DEMEDINTAHAN DIDANG DEDDAGANGAN	500.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000 285.424.600
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	214.575.400
UPT. Pasar	500.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	500.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.399.300.234
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.399.300.234
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.130.800.234
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	266.500.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	247.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.301.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	248.000.000

Tahun 2023	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Orusan/ Didang Orusan/ Program/ Regiatan/ Sub Regiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	206.000.000
Dinas Pemuda dan Olahraga	10.218.833.983
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.218.833.983
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.630.833.983
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	500.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.088.000.000
Dinas Arsip dan Perpustakaan	7.345.194.087
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	7.095.194.087
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.886.786.087
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	138.408.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	60.000.000
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	10.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	250.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	220.000.000
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.000.000
Dinas Perikanan	21.804.292.516
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.048.292.516
	10.580.942.516
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.971.350.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN BERUKANAN	3.206.000.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	140.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	150.000.000
UPT. Balai Benih Ikan (BBI) Mentiwan	756.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	756.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	259.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	496.500.000
Dinas Pariwisata	15.665.789.840
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.665.789.840
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.098.449.102
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.220.000.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	647.340.738
I ROGRAM I ENGEMBANGAN ERONOMI RREATIF MELALUI I EMANFAATAN DAN I ERLINDUNGAN HAR RERATAAN INTELEMBER	150.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.550.000.000
Dinas Deutenias	
Dinas Pertanian	68.592.418.740
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	68.592.418.740 67.192.104.082
	67.192.104.082 32.260.104.082
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	67.192.104.082
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.192.104.082 32.260.104.082
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 794.994.696
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENAGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN DINAS TENAGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASA KERJA DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042 143.000.000 71.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASA KEPIS DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAN KAWASAN TRANSMIGRASI	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 605.319.962 347.000.000 794.994.696 390.244.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000 215.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATTAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASK KERJA DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASK KERJA DAN PENGEMBANGAN PENASARANA PERTANIAN DINAS TENASK KERJA DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG TENASMIGRASI PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PEMENANAN KAWASAN TRANSMIGRASI	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042 8.131.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000 215.000.000 85.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UTT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASS KETJA BAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASS KETJA BAN PENGEMBANGAN PENGERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TANSMIGRASI PROGRAM PENEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042 8.131.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000 215.000.000 85.000.000 60.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS TENASA KEPIJA DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASA KEPIJA DAN PENGEMBANGAN PENASARANA PERTANIAN DINAS TENASA KEPIJA DAN PENGEMBANGAN PENASARANA PERTANIAN DINAS TENASA KEPIJA DAN PENGEMBANGAN PENASARANA PERTANIAN DINAS TENASA KEPIJA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PENGERAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 8.774.265.042 8.559.265.042 8.131.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000 215.000.000 85.000.000 60.000.000 94.843.823.255
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PERGEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPAT	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 104.750.000 8.774.265.042 8.559.265.042 8.131.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000 215.000.000 70.000.000 85.000.000 60.000.000 94.843.823.255 27.208.541.107
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN BAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN UPT. Revitalisasi Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SHENCANA PERTANIAN UPT. Agrobisnis Pertanian Empas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS TENASA KETJA DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS TENASA	67.192.104.082 32.260.104.082 10.275.000.000 17.920.000.000 1.565.000.000 360.000.000 4.812.000.000 605.319.962 347.000.000 98.319.962 160.000.000 794.994.696 390.244.696 300.000.000 8.774.265.042 8.559.265.042 8.131.265.042 143.000.000 71.000.000 214.000.000 215.000.000 85.000.000 60.000.000 94.843.823.255

Tahun 2023	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Orusan/ Bidang Orusan/ Program/ Regiatan/ Sub Regiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.000.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.000.000.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.000.000.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.000.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.000.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.000.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	1.000.000.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.000.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.905.253.258
SEKRETARIAT DPRD	57.094.965.459
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.354.947.459
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.740.018.000
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.193.015.888
PERENCANAAN	23.943.015.888
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.083.015.850
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.900.000.038
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.960.000.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.250.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.250.000.000
Badan Keuangan dan Aset Daerah	488.729.737.382
KEUANGAN	488.729.737.382
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.183.003.098
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	431.200.734.284
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.346.000.000
Badan Pendapatan Daerah	21.640.189.702
KEUANGAN	21.640.189.702
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.615.189.702
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.025.000.000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.627.052.809
KEPEGAWAIAN	10.127.052.809
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.892.144.545
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.234.908.264
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.500.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.500.000.000
INSPEKTORAT DAERAH	18.517.587.159
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.973.121.459
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	883.168.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	661.297.700
KECAMATAN JEMPANG	4.913.865.472
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.500.235.002
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
KECAMATAN MUARA PAHU	413.630.470 5.163.202.633
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.885.306.913
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	277.895.720
RECAMATAN BONGAN	4.380.818.440
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.887.251.440
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	380.067.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.600.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.900.000
KECAMATAN LONG IRAM	4.896.038.161
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.446.616.748
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	449.421.413
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	_
KECAMATAN MELAK	12.835.799.232
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.513.399.232
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	292.400.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2/2,100,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINI AHAN DESA KELURAHAN MELAK ULU	5.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000
KELURAHAN MELAK ILIR	5.000.000
KELURAHAN MELAK ILIR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000
KELURAHAN MELAK ILIR	

1 ahun 2023	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Orusani/ Didang Orusani/ Programi/ Regiatani/ Sub Regiatani	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	294.843.700
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.610.000
KECAMATAN PENYINGGAHAN	4.701.926.981
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.539.883.836
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	162.043.145
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-
KECAMATAN BARONG TONGKOK	11.328.021.822
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.705.451.123
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	738.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-
KELURAHAN BARONG TONGKOK	415.631.699
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	278.632.079
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.999.620
KELURAHAN SIMPANG RAYA	468.439.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	368.439.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.000.000
RECAMATAN MUARA LAWA	4.409.988.943
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.066.512.543
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.100.000 73.536.400
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	69.840.000
KECAMATAN BENTIAN BESAR	4.485.984.723
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.278.084.723
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	150.400.000
KECAMATAN LINGGANG BIGUNG	5.327.325.286
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.938.147.606
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.117.434
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.960.246 237.100.000
KECAMATAN NYUATAN	4.820,239,365
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.562.239.365
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	258.000.000
KECAMATAN SILUQ NGURAI	4.268.650.311
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.841.053.511
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	427.596.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-
KECAMATAN NOOK MANAAR BULATN	4.493.379.608
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.105.216.388
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.443.220
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	268.720.000
KECAMATAN TERING	5.551.243.810
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.204.881.884
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	338.543.926
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.818.000
KECAMATAN SEKOLAQ DARAT	5.419.091.233
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.042.725.453
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.365.780
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.890.757.930
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DDOCDAM DENUNTANC LIDUSAN DEMEDINTAHAN DAEDAH KARUDATEN/KOTA	13.890.757.930
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	10.565.757.930 275.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	275.000.000
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.327.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	190.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	663.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	870.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF	2.117.570.475.364
TOTAL TABLE	2,117,070,470,004

					Сај	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL PAGU IN	DIKATIF			2.117.570.475.364		Nasional	Daeran	TOTOK CKUI	Target	3.702.472.763.324
		<u> </u>	<u> </u>								
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				423.514.095.073						577.165.656.30
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				420.413.087.383						567.465.656.30
1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Layanan yang Baik		100 %	377.733.197.383						417.650.556.30
1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik		100 %	177.419.269						625.000.00
1 1 2.01	l Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	I kali	27.419.269	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			150.000.0
1 1 2 01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen dan rapat koordinasi	Kelurahan		25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			125.000.0
1 1201	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		12 dokumen	25,000,000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 1 2.01	'	Jumlah Dokumen dan rapat koordinasi		4 dokumen		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			30.000.0
1 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Rapat Koordinasi		4 Dokumen	25.000.000	Hasil		dan Pendidikan			160.000.0
1 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Lintas OPD/Provinsi/Regional		12 Bulan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			30.000.00
1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Evaluasi dan Reward/Punishmen		4 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			130.000.0
1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Layanan Administrasi Keuangan Baik		100 %	241.932.428.408						300.500.000.0
1 1 2.02	l Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS Dimas dan Sekolah: 1,500 Orang Gaji P3K. 1,416, Uang Makan PNS dan TKK (PNS : 1,500 Orang, P3K: 1,416 Orang dan TKK: 3,575 Orang) Inseniif Pasat. Tamsil: 376 Orang, Tunjangan Profess Guru (TPG): 7.06 Orang, Tunjangan Rhusus Guru: 2,570 Orang, Tinjangan Professional Guru: 2,700 Orang, Hibah Honor Swasta Non PNS SMA Nawasi: 90 Orang, Tunjangan Esselon dan Non Esselon Museum - 50g, Uang Makan ASN = 5 Org, Non ASN = 18 Org; HIR = 18 Org. Junulah Gaji / Tunjangan Tersalur		Gaji FNS Dinas dan Sekolai 1.500 Orang Gaji FNA 1.416. Uang Makan FNS dan TKK (FNS: 1.500 Orang, FNS: 1.416. Uang Makan FNS dan TKK (FNS: 1.500 Orang, FNS: 1.416 Orang dan TKK 3.575 Orang) Insentif Fusat (3.575 Or	241.782.428.408	(PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			300.000.000.000
1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Berkas yang diuji Tahunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			100.000.00
1 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6 Bulan	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			100.000.00
1 1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Rakor, Dokumen Laporan Valid dan Tepat Waktu		4 kali	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			100.000.0
1 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Rakor dan Dokumen Laporan		i	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			100.000.0
				12 Bulan		(PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 1 2.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Rakor		6 Bulan	25.000.000	(PAD)		dan Pendidikan			100.000.0
1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Layanan Administrasi Kepegawaian Baik		100 %	150.000.000						661.250.0
1 1 2.05	l Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya perangkat Absen yang sesuai		1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			15.000.0
1 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		10 Pegawai	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			646.250.
1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Layanan Administrasi Kepegawaian Baik		100 %	926.058.000						981.058.
1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Kondisi Peralatan dan		9 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			95.000.0
1 1206	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perlengkapan Kantor	 		25.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			25.000.0
1 12.00		Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan/Penggadaan dan	 	1 Paket		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Distribusi		1 Paket	75.000.000	Hasil DENIDADATAN ASI I DAEDAH		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			10.000.0
1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Dokumen Rapat		12 Bulan	701.058.000	(PAD)		dan Pendidikan			701.058.
1 1 2.06	1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Updating Data	1	12 Bulan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			150.000.0
1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen		100 %	5.599.400.000						150.000.
1 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Ketersedian Mebel dan Kondisi	ĺ	40 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			75.000
1 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin dan Kondisi		1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			50.000.
1 1 2.07	0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Kantor yang Layak	1	10 UNIT	5.549.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			25.000
						nasu		dan Pendidikan			
1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah I Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa yang Tersedia dan Dokumen Distribusi Jumlah Dokumen Materai 3000 = 1000 Lembar, Materai 6000 = 1.500 Lembar Surat Kabar 4 Exp, Belanja Cetak		100 %	128.647.891.706 20.000.000	Dana Transfar Limum Dana Ragi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			114.573.248.3
1 1 2.08	en yearnen zuen Staat istellytiat	Foto Copy Berkas	ļ	1 Tahun	20.000.000	nasii		dan Pendidikan			13.000.0
1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang Tersedia dan Dokumen Distribusi Jasa Telepon, Fax, Speedy, Jasa Listrik, air TV Satelii Gaji 12 Bulan : 3.400 Orang Tenaga Non ASN (TKK Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan Gaji TKK		1 Tahun	102.399.976	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			28.000.4
1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	reinigir Feiniaux dani Feingia Kepteniauxani yalir Ugil TsA. DISDIK dengan SK RKD: S-1 = 00 Orang, D3 = 25 Orang, SMA = 80 Orang, SAIP = 4 Orang, SD = 6 Orang, Tambahan Pengapalisal Swasta Guru = 576 Orang, Tambahan Swasta TU dan Penjaga = 68 Orang, Gaji TKK Museum: S-110 Orang, SLTA = 17 Orang, dan Honor Pegawai Museium		12 Bulan	128.525.491.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			114.530.248.30

		Umany (Bildren Umany) Wadates (Sak Vadates		1 ahun 2023		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendana		n			ana Tahun 2024	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pasional Pa	rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
1 1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharan		100 %	300.000.000		Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 160.000.000
1 1	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas I alabatan	Jumlah Jasa dan biaya yang dibayarkan		33 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			120.000.000
1 1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Kantor yang Layak		1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			40.000.000
1 1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek huruf, Jumlah Sekolah SD baik, Jumlah Sekolah SMP baik, Jumlah Sekolah TK baik		100%	41.479.890.000						146.240.100.000
1 1	2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dasar Baik		100 %	18.666.100.000						76.550.000.000
1 1	2 2.01	2 Penambahan Ruang Kelas Baru	Tercapainya Penambahan Ruang Kelas Baru Tingkat SD Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	650.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tercapainya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tercapainya Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.01	5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tercapainya Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tercapainya Pembangunan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah	Tercapainya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.01	8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Tercapainya Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat SD Yang Baik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.01	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tercapainya Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru Kepala Sekolah Guru dan Penjaga Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.01	12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tercapainya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.01	14 Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Set	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tingkat SD Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			400.000.000
1 1	2 2.01	24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			600.000.000
1 1	2 2.01	25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		50 peserta	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			700.000.000

					Tahun 2023	Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1 1	2 2.01	26 Penyedisan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1.400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 1.500.000.000
1 1	2 2.01	28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		10 Sekolah	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			3.200.000.000
1 1	2 2.01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				13.941.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			70.000.000.000
1 1	2 2.01	30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
1 1	2 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dasar Baik		100 %	18.938.790.000						53.750.000.000
1 1	2 2.02	2 Penambahan Ruang Kelas Baru	Tercapainya Penambahan Ruang Kelas Baru Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	3.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tercapainya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.02	4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tercapainya Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah Tingka SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.02	5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tercapainya Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	6 Pembangunan Laboratorium	Tercapainya Pembangunan Laboratorium Tingkat SMP Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.02	7 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Tercapainya Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	8 Pembangunan Asrama Sekolah	Tercapainya Pembangunan Asrama Sekolah Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Tercapainya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.02	10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Tercapainya Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.02	11 Pembangunan Kantin Sekolah	Tercapainya Pembangunan Kantin Sekolah Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.02	12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tercapainya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1	2 2.02	14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tercapainya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-
1 1		20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Tercapainya Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tingkat SMP Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	25 Pengadaan Mebel Sekolah	Tercapainya Pengadaan Mebel Sekolah Tingkat SMP Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Set	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			-

					Tahun 2023	Car	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	n			Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024
1	Code	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
1 1	2 2.02	26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Tercapainya Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Tingkat SMP Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 1	2 2.02	27 Pengadaan Perlengkapun Sekolah	Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tingkat SMF Yang Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima Biaya personil peserta didik		192 orang	5.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			8.900.000.000
1 1	2 2.02	35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tercapainya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tingkat SMP Yang Baik dan Memadai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 1	2 2.02	36 Penyelengarnan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			600.000.000
1 1	2 2.02	37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.300.000.000
1 1	2 2.02	38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik		50 Peserta	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			750.000.000
1 1	2 2.02	39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.500.000.000
1 1	2 2.02	41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pembinaan		5 sekolah	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			700.000.000
1 1	2 2.02	42 Pengelolaan Duna BOS Sekolah Menengah Pertama				7.413.790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			40.000.000.000
1 1	2 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan PAUD Baik		100 %	3.200.000.000						13.500.000.000
1 1	2 2.03	I Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dak Fisik Paud Pembangunan gedung baru Paud Pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah Paud Pembangunan ruang kelas baru Paud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 4 Sekolah	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000.000
1 1	2 2.03	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan area bermain Paud Pembangunan pagar sekolah Paud	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah 2 Sekolah	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000.000
1 1	2 2.03	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi ruang guru dan ruang kepalas sekolah Paud Rehabilitasi ruang kelas Paud	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah 6 Sekolah	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	1		800.000.000
1 1	2 2.03	7 Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Meubelair Paud	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			200.000.000
1 1	2 2.03	9 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan perlengkapan bermain Paud dalam ruangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Sekolah	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			750.000.000
1 1	2 2.03	10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Penerima Buku Mewarnai dan Alat Menggambar Perjalanan Dinas Pendataan Siswa Orang Tua Kurang Mampu	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4000 Siswa 16 Kecamatan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			500.000.000
1 1	2 2.03	12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan APE Luar Siswa Paud	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			550.000.000
1 1	2 2.03	14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Pendampingan Akreditasi Lembaga Paud Pendampingan dan Monev Bosda, BOP Paud Sosialisasi BOSDA, BOP PAUD dan BOP KESETARAAN Sosialisasi Pendampingan DAK Fisik Paud Supervisi lembaga satuan pendidikan Paud Tim Manajemen BOSDA, BOP PAUD dan BOP Kesetaraar Visitasi dan verifikasi ijin lembaga Paud		50 Kali 16 Kecamatan 1 Kali 1 Kali 100 Kali 1 Tahun 20 Kali	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			850,000,000
1 1	2 2.03	17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dokumen Stunting Operasional Mobil Pintar Pelatihan Pengelolaan UKS PAUD dan Pemilihan UKS PAUD Terbaik Pembinaan Kelembagaan Satuan PAUD Peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Satuan Pendidikan Kelas Parenting Gebyar PAUD dan Tenu Wicara PAUD Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan PNF Sosialisasi Pendidahan Anak Anti Korupsi Sosialisasi Penyelanggaraan Dapodik PAUD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Tahun 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			850,000,000
Ш		1	Rekon Bosda PAUD	Kab. Kutai Barat, Semua	2 Kan	1		i	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	1	ı	,
1 1	2 2.03	18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan Siswa Penerima BOP PAUD Siswa Penerima BOSDA PAUD (PSB) Siswa Penerima BOSDA PAUD (SPP) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Kecamatan, Semua Kelurahan	5300 Siswa 3000 Siswa 5300 Siswa	2.400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pendidikan			6.000.000.000

				Tahun 2023					
Kode	Umana / Bidana Umana / Barana / Vanistas / Suk Vanistas	In dilutes Burney Venintes / Sub Venintes	Labari Outrast Vanistan		Caj	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana: I	n Prioritas	Prakiraan Maju R Target Capaian Kinerja	encana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
Koue	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Pembangunan Gedung Baru PKBM	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Gedung		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		
1 2 2.04 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru PKBM	Kelurahan	, and the second	200.000.000	(PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		500.000.000
1 2 2 04 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan pagar sekolah nonformal/kesetaraan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan. Semua	1 Ruang	100 000 000	(PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		500.000.00
	· ·	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan nProses Belajar	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	2 Sekolah		(PAD)	dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		
1 2 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Nonforma/Kesetaraanl Monitoring Lembaga LKP	Kecamatan, Semua Kelurahan	7 PKBM/SKB 11 LKP	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	dan Pendidikan		405.000.00
1 2 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Monitoring Lembaga PKBM Pendampingan dan Monev BOP Kesetaraan Rakor dan Konsultasi Kegiatan PAUD dan Dikmas Visitasi dan Verifikasi ijin Lembaga LKP dan PKBM Operasional Penwelengsaraan Pendidikan		7 PKBM 7 PKBM 8 kali 16 Kecamatan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		160.000.00
1 2 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Operasional Tenjeringganaan Tenjunian Nonformal Keaksaraan Pelatihan Tutor Paket A, B dan C Penyelenggaraan Dapodikmas Kesetaraan Siswa Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan paket A,B dan C	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Kecamatan 7 PKBM 7 PKBM 7 PKBM	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		375.000.00
1 2 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan 6 PKBM dan 1 SKB (Paket A, B, C)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	306 Siswa	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		500.100.00
1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah sekolah SD dan SMP mengembangkan muatan			200.000.000				1.175.000.00
1 3 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	lokai			100.000.000				800.000.00
1 3 2.01 1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		800.000.00
1 3 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Keluranan		100.000.000	Hasii			375.000.00
1 3 2.02 1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		375.000.00
1 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah guru SD berkualifikasi s1 dan memiliki serdik, Jumlah guru SMP berkualifikasi s1 dan memiliki serdik Jumlah guru Tk berkualifikasi s1 dan memiliki serdik Jumlah Kepsek SD bersertifikasi, Jumlah Kepsek SMP bersertifikasi, Jumlah Kepsek TK bersertifikasi	Keiuranan	15 % 7 % 12 % 85 % 93 % 3	900.000.000	[TIS51]			2.000.000.00
1 4 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan telah Mengikuti Peningkatan Kualitas dan Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan		100%	900.000.000				2.000.000.00
1 4 2.01 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	c c		600.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		1.500.000.00
1 4 2.01 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	n		300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		500.000.00
1 6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah sekolah yang menerapkan digitalisasi pengajaran, Jumlah sekolah yang mengembangkan literasi dan model pembelajaran bahasa dan sastra		40 Sekolah	100.000.000				400.000.00
1 6 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Literasi dan Digitalisasi Bahasa dan		100%	100.000.000				400.000.00
1 6 2 01 3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Publikasi Buku			100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		400.000.00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	a dollars brand	<u> </u>	3 Judul	1.050.000.000	Hasil	dan Pendidikan		9.700.000.00
22 2		Jumlah Kelompok Seni (POKSI) dan Budaya	1	luni :					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Masyarakat yang telah Mandiri Jumlah Acara Budaya yang dilaksanakan Masyarakat		16 Poksi	450.000.000				1.950.000.00
22 2 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Secara Mandiri		20 event	115.000.000				700.000.00
22 2 2.01 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kampung Budaya dan Lali Ugal		11 Kampung	115.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		700.000.00
22 2 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Kesenian Tradisional Masyarakat yang		100%	235.000.000				700.000.00
22 2 2.02 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tercapainya Pengembangan Kebudayaan Kab. Kutai Barat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		400.000.00
22 2 2.02 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya	Keuranan	5 Dokumen/Laporan	135.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		300.000.0
22 2 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Lembaga Adat yang dibina		100%	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		550.000.00
22 2 2.03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Sapras Yang disediakan Jumlah Kesenian yang Mandiri dan Aktif (Sekolah)		20 Unit 40 Sekolah	100.000.000	Hasil	dan Pendidikan		550.000.00 1.225.000.00
		Jumlah Sekolah Memiliki Kelompok Kesenian yang							
22 3 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina		40 sekolah	250.000.000			1	1.225.000.00
22 3 2.01 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan 21 Sekolah 10 SD/SMP 330 Orang Ikut Pelatihan, SD/SMP Karakter Budaya		21 Sekolah	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		825.000.00
22 3 2.01 2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Pelaku Seni Tersertifikasi		10 Orang/Pelaku Seni	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		75.000.00
22 3 2.01 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Video Dokumentasi Adat			50.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		325.000.00
72.01 3		Adat Istiadat, Jumlah Kampung Budaya, Ritus, Tradisi		1 Video		Hasil	dan Pendidikan		
22 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Lisan		2 Adat 3 Kampung 10 Ritus 8	150.000.000				625.000.00
22 4 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Budaya yang dibina		3 Kampung	150.000.000				625.000.00
		Batik Agit		20 Unit		D T 4 H D T 1	0 / 5 / 10 / 5 / 10		_
22 4 2.01 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Gong		10 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		300.000.00
		Set Gantar dan Tongkat Tarai	-	20 Unit 20 Unit					4
22 4 2.01 3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Video Dokumentasi Adat Istiadat		1 Video	75.000.000				325.000.000
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		100%	200.000.000				5.900.000.000

				Tahun 2023							
					Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		oritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
alaal slage	B (C B B L(V) (W)	L LLC B.L FIG.					Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 22 5 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan		30 Cagar Budaya	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		1	650.000.000
2 22 5 2.01 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Objek Cagar Budaya yang akan dibuat peringkatnya		40 Objek Cagar Budaya	100.000.000	Hasil	d	lan Pendidikan			650.000.000
2 22 5 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				100.000.000						5.250.000.000
2 22 5 2.02 1	Pelindungan Cagar Budaya	Objek Cagar Budaya yang akan dikenalkan dan manfaatkan		5 Objek Cagar Budaya	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			5.250.000.000
				5 Objek Cagar Budaya		Hasil	į d	lan Pendidikan			
	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar				229.093.250						698.782.984
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				229.093.250						698.782.984
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek huruf, Jumlah Sekolah SD baik, Jumlah			229.093.250						698.782.984
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah SMP baik, Jumlah Sekolah TK baik			229.093.230						096.762.984
1 1 2 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Non Formal		100%	229.093.250						698.782.984
1 1 1 1 1		Baik	Kab. Kutai Barat, Semua								
1 1 2 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Kecamatan, Semua		229.093.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			698.782.984
			Kelurahan			(PAD)	C	lan Pendidikan			
	UPT. Taman Budaya Sentawar				1.582.014.440						
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.582.014.440						
		T	1								
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Kelompok Seni (POKSI) dan Budaya Masyarakat yang telah Mandiri		16 Poksi	1.582.014.440						
2 22 2 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Acara Budaya yang dilaksanakan Masyarakat		20 event	1.582.014.440						
-1-2 2 2.01	е съдстояни теговинувни увид этворатакаст стакинув чатан Бастан казпиратен/КОЗ	Secara Mandiri		20 Cicin	1.302.014.440						
2 22 2 2.01 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan		100 %	1.582.014 440	PENDAPATAN ASLI DAERAH	[Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			1.302.014.440	(PAD)	d	lan Pendidikan			
	UPT. Museum Etnografi Sendawar				239,900,000						810.000.000
	er removam sanogran senuawai				239,900,000						610.000.000
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				239.900.000						810.000.000
2 22 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Koleksi Museum yang dimanfaatkan,		100 Koleksi	239.900.000						810.000.000
2 22 6 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	dikembangkan dan Kondisi Aman Jumlah Kunjungan Museum		250 Orang	239.900.000				_		810,000,000
2 22 6 2.01	rengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Junian Kunjungan Museum		250 Orang	239.900.000						810.000.000
2 22 6 2.01 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu					Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			160.000.000
						Hasil	· ·	ian rendidikan			
2 22 6 2 01 2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman					Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			225.000.000
2 22 0 2.01 2	i cinomaan dan i cinigkatan wutu dan kapastas Sumoci Daya Wandsia i ciniuscunan					Hasil	d	lan Pendidikan			223.000.000
								Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
2 22 6 2.01 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				239.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		lan Pendidikan			200.000.000
						Hasil	-				
2 22 6 2.01 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					Dana Transfer Umum - Dana Bagi	-	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			225.000.000
2 22 6 2.01 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-				225.000.000
2 22 6 2.01 4					141 859 548 56	Hassi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
2 22 6 2.01 4	Dinas Keschatan				141.859.548.567 138.859.548.667	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			651.030.434.468
2 22 6 2.01 4	Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang		1008/	138.859.548.567	Hassil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			651.030.434.468 651.030.434.468
2 22 6 2.01 4 1 2 1	Dinas Keschatan	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *		100%	138.859.548.567 108.019.234.304	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			651.030.434.468 651.030.434.468 156.200.507.843
2 22 6 2.01 4 1 2 1 1 2 1 2.01	Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100%	138.859.548.567	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	-	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			651.030.434.468 651.030.434.468
1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua	100%	138.859.548.56 ² 108.019.234.304 168.163.170	Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			651.030.434.468 651.030.434.468 156.200.507.843 1.410.475.000
1 2 1 2.01 1 2 1 2.01 1	Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dilaksanakan dengan baik *	Kecamatan, Semua		138.859.548.56 ² 108.019.234.304 168.163.170	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Hagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			651.030.434.468 651.030.434.468 156.200.507.843
2 22 6 2.01 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2.01 1 2 1 2.01 1	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD		100%	138.859,548,567 108.019,234,304 168.163.17(69.250.800	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 154,200,573 1,410,475,000 164,450,000
2 22 6 2.01 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2.01 1 2 1 2.01 1 1 2 1 2.01 2	Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD	Kecamatan, Semua	100%	138.859,548,567 108.019,234,304 168.163.17(69.250.800	Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,507,843 1,410,475,000
2 22 6 2.01 4 1 2	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	138.859,548,567 108.019,234,304 168.163.17(69.250.800	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 154,200,573 1,410,475,000 164,450,000
2 22 6 201 4 1 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD	Kecamatan, Semua	100%	138.859.548.561 108.019.234.304 168.163.170 69.250.800	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			651,030,434,468 651,030,434,684 154,200,573 1,410,475,000 164,450,000
1 2 1 2.01 1	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencananan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.561 108.019.234.304 168.163.170 69.250.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,507,843 1,410,475,000 164,450,000
1 2 1 2.01 1	Dinay Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanann, Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.561 108.019.234.304 168.163.170 69.250.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 115,020,073,000 144,450,000 107,525,000 69,575,000
1 2 1 2.01 1	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencananan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.561 108.019.234.304 168.163.170 69.250.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,507,843 1,410,475,000 164,450,000
1 2 1 2.01 1 1 2 1 2.01 2 1 2 1 2.01 3 1 2 1 2.01 4	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.56; 108.019.234.30: 168.163.17: 69.250.80: 13.275.15(15.277.21(Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,020,507,843 1,410,475,000 164,450,000 107,525,000 69,575,000
1 2 1 2.01 1 1 2 1 2.01 2 1 2 1 2.01 3 1 2 1 2.01 4	Dinay Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanann, Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.56; 108.019.234.30: 168.163.17: 69.250.80: 13.275.15(15.277.21(Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 115,020,073,000 144,450,000 107,525,000 69,575,000
1 2 1 2.01 1 1 2 1 2.01 2 1 2 1 2.01 3 1 2 1 2.01 4	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.56; 108.019.234.30: 168.163.17: 69.250.80: 13.275.15(15.277.21(Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,507,843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 69,575,000
1 2 1 2.01 1 1 2 1 2.01 2 1 2 1 2.01 3 1 2 1 2.01 4	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.56 ¹ 108.019.234.30 ¹ 168.163.17 69.250.800 13.275.150 15.277.210	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,507,843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 69,575,000
1 2 1 2.01 1 1 2 1 2.01 2 1 2 1 2.01 3 1 2 1 2.01 4	Dinay Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peroscananan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.56 ¹ 108.019.234.30 ¹ 168.163.17 69.250.800 13.275.150 15.277.210	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651.030.434.468 651.030.434.468 156.200.507.843 1.410.475.000 164.450.000 107.525.000 69.575.000 44.275.000
1 2 1 2.01 1 1 2 1 2.01 2 1 2 1 2.01 3 1 2 1 2.01 4	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUSIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen	138.859.548.56; 108.019.234.304 168.163.17 69.250.806 13.275.156 15.277.216 9.241.956	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,507,843 1,410,475,000 164,450,000 107,525,000 69,575,000 44,275,000
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 6	Dinay Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peroscananan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen 1 dokumen	138.859.548.56; 108.019.234.304 168.163.17 69.250.806 13.275.156 15.277.216 9.241.956	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,677,843 1.410,475,000 167,525,000 69,575,000 44,275,000 189,750,000
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 6	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUSIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen 1 dokumen	138.859.548.56; 108.019.234.304 168.163.17 69.250.806 13.275.156 15.277.216 9.241.956	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,677,843 1.410,475,000 167,525,000 69,575,000 44,275,000 189,750,000
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 7	Dinax Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peroucanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	138.859.548.56: 108.019.234.30: 168.163.17 69.259.80: 13.275.15(15.277.21(9.241.95(49.731.06(Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasii Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasii		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 1156,200,507,843 1,410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,5552,45,163
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 7	Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencananan, Penganggaran, dan Evalussi Kinerja Perangkat Daerah Renyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Derubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sikronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	138.859.548.56: 108.019.234.30: 168.163.17 69.259.80: 13.275.15(15.277.21(9.241.95(49.731.06(Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,507,843 1.410,475,000 164,450,000 69,575,000 44,275,000 44,275,000 790,625,000
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 7	Dinax Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peroucanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kemanan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	138.859.548.56 ¹ 108.019.234.30 ¹ 168.163.17 69.250.800 13.275.150 15.277.210 9.241.950 11.387.000 49.731.066 53.848.901.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 1156,200,507,843 1,410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,5552,45,163
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 7	Dinax Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peroucanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sikronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Keclurahan Kab Kutai Barat, Semua Keclurahan Kab Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kekarahan Keharahan Keharahan	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen	138.859.548.56 ¹ 108.019.234.30 ¹ 168.163.17 69.250.800 13.275.150 15.277.210 9.241.950 11.387.000 49.731.066 53.848.901.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 1156,200,507,843 1,410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,5552,45,163
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 6 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1	Binas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PENGGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dilaksanakan dengan baik * Terdaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terdaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau tunjangan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kemanan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua	100% 3 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	138.859.548.56; 108.019.234.304 168.163.17 69.250.806 13.275.156 15.277.216 9.241.956 49.731.066 53.848.901.758 53.796.291.438	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651.030.434.468 651.030.434.468 1156.200.507.843 1.410.475.000 164.450.000 107.525.000 44.275.000 44.275.000 189.750.000 790.625.000 83.585.245.163 73.751.027.663
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1	Binas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PENGGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dilaksanakan dengan baik * Terdaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terdaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau tunjangan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Keburahan Kab. Kutai Barat, Semua Kab. Kutai Barat, Semua	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen	138.859.548.56; 108.019.234.304 168.163.17 69.250.806 13.275.156 15.277.216 9.241.956 49.731.066 53.848.901.758 53.796.291.438	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651.030.434.468 651.030.434.468 1156.200.507.843 1.410.475.000 164.450.000 107.525.000 44.275.000 44.275.000 189.750.000 790.625.000 83.585.245.163 73.751.027.663
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PENGGRAM PEMUSIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Deyangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau tunjangan Cakupan ASN yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Keburahan Kab. Kutai Barat, Semua Kab. Kutai Barat, Semua	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen 90 persen	138.859.548.56: 108.019.234.30: 168.163.17 69.250.800 13.275.150 15.277.210 9.241.950 11.387.000 49.731.060 53.848.901.78 53.796.291.436	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 1156,200,577,843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PENGGRAM PEMUSIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Deyangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau tunjangan Cakupan ASN yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Keburahan Kab. Kutai Barat, Semua Kab. Kutai Barat, Semua	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen 90 persen	138.859.548.56: 108.019.234.30: 168.163.17 69.250.800 13.275.150 15.277.210 9.241.950 11.387.000 49.731.060 53.848.901.78 53.796.291.436	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 1156,200,577,843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pedaksanaan Penatusushaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau unjangan Cakupan ASN yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia Jumlah laporan akutansi keuangan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kechrahan Kah Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab Kutai Barat, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen 90 persen 100 dokumen	138.859.548.56: 108.019.234.30: 168.163.17 69.250.800 13.275.150 15.277.210 9.241.950 11.387.000 49.731.060 53.848.901.78 53.796.291.436	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 1156,200,675,843 1.410,475,000 164,450,000 407,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663
1 2 1 201 1 1 2 1 201 3 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1 1 2 1 202 3 1 2 1 202 4	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMUSIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatuusahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau iunjangan Cakupan ASN yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Keclurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kehurahan Kehurahan Kehurahan Kehurahan	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen 90 persen 100 dokumen 1 dokumen	138.859.548.567 108.019.234.304 168.163.171 69.250.800 13.275.154 15.277.216 9.241.956 11.387.000 49.731.066 53.848.901.788 53.796.291.438 25.000.000 14.632.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 115,200,673 1,410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 44,275,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663 9,519,221,250 103,083,750 30,318,750
1 2 1 201 1 1 2 1 201 2 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 5 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perabahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pedaksanaan Penatusushaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau unjangan Cakupan ASN yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia Jumlah laporan akutansi keuangan	Kecamatan, Semua Kehrahan Kah. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kah. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kah. Kutai Barat, Semua Kedurahan Kah. Kutai Barat, Semua Kedurahan Keburahan Kemana Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen 90 persen 100 dokumen	138.859.548.567 108.019.234.304 168.163.171 69.250.800 13.275.154 15.277.216 9.241.956 11.387.000 49.731.066 53.848.901.788 53.796.291.438 25.000.000 14.632.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 1156,200,677,843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663
1 2 1 201 1 1 2 1 201 3 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1 1 2 1 202 3 1 2 1 202 4	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau tunjangan Cakupan ASN yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 10056 100 persen 90 persen 10 dokumen 1 dokumen	138.859.548.567 108.019.234.304 168.163.171 69.250.800 13.275.154 15.277.216 9.241.956 11.387.000 49.731.066 53.848.901.788 53.796.291.438 25.000.000 14.632.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434.468 651,030,434.468 156,200,697.843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663 9,519,221,250 103,083,750 30,318,750 90,956,250
1 2 1 201 1 1 2 1 201 3 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1 1 2 1 202 3 1 2 1 202 4	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMUSIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatuusahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau iunjangan Cakupan ASN yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kenua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kedurahan Kelurahan Kenua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kabi Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kemua Kecamatan, Semua Kelurahan Kabi Kutai Barat, Barong Tongkok, Semua Kaburahan Kabi Kutai Barat, Barong Tongkok, Semua Kelurahan Kabi Kutai Barat, Barong Tongkok, Semua Kelurahan Kabi Kutai Barat, Barong Tongkok, Semua Kelurahan Tongkok, Semu	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 100 persen 90 persen 100 dokumen 1 dokumen	138.859.548.567 108.019.234.304 168.163.171 69.250.800 13.275.154 15.277.216 9.241.956 11.387.000 49.731.066 53.848.901.788 53.796.291.438 25.000.000 14.632.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,677,843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663 9,519,221,250 103,083,750 30,318,750
1 2 1 201 1 1 2 1 201 3 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1 1 2 1 202 3 1 2 1 202 4	Dinas Kesehatan URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMUSIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pedaksanaan Penatuusahan dan Pengujan/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyujanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau tunjangan Cakupan ASN yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	Kedurahan Kehrahan Kab. Kutai Barat, Semua Kemanatan, Semua Kedurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kedurahan Kehrahan Kehrahan Kehrahan Kab. Kutai Barat, Semua Kedurahan Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Semua Kehrahan Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Semua Kehrahan	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100°6 100 persen 100 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	138.859.548.56° 108.019.234.30° 168.163.170° 69.250.800° 13.275.150° 15.277.210° 9.241.950° 11.387.000° 49.731.060° 53.848.901.788° 53.796.291.438° 25.000.000° 14.632.600° 5.477.720°	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434,468 651,030,434,468 156,200,573,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663 9,519,221,250 103,083,750 90,956,250 24,255,000
1 2 1 201 1 1 2 1 201 3 1 2 1 201 3 1 2 1 201 4 1 2 1 201 6 1 2 1 201 7 1 2 1 202 1 1 2 1 202 1 1 2 1 202 3 1 2 1 202 4	Dinas Keschatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dilaksanakan dengan baik * Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan SKPD Jumkah Renstra dan Renja Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah dokumen RKA Dinas yang tersusun Jumlah Kinerja Dinas Kesehatan yang di evaluasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pegawai (ASN) yang menerima gaji atau tunjangan Cakupan ASN yang tersedia Jumlah bahan verifikasi yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 10056 100 persen 90 persen 10 dokumen 1 dokumen	138.859.548.56° 108.019.234.30° 168.163.170° 69.250.800° 13.275.150° 15.277.210° 9.241.950° 11.387.000° 49.731.060° 53.848.901.788° 53.796.291.438° 25.000.000° 14.632.600° 5.477.720°	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			651,030,434.468 651,030,434.468 156,200,697.843 1.410,475,000 164,450,000 107,525,000 44,275,000 44,275,000 189,750,000 790,625,000 83,555,245,163 73,751,027,663 9,519,221,250 103,083,750 30,318,750 90,956,250

				Tahun 2023	Car	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan					rioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				39.000.000						472.421.250
1 2 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD yang tersusun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			34.728.750
1 2 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Faskes yang bersertifikat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			275.625.000
1 2 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset yang dilakukan penilaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			46.305.000
1 2 1 2.03 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang diawasi dan dikendalikan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			46.305.000
1 2 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekon aset	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			34.728.750
1 2 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			34.728.750
1 2 1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Returanan		11.568.800						44.275.000
1 2 1 2.04 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				11.568.800						44.275.000
1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksnanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		100%	14.000.000						318.346.875
1 2 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			115.762.500
++			Kab. Kutai Barat, Semua			Hasil		dan Pendidikan			
1 2 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Atribut pakaian dinas yang disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	135 orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			28.940.625
1 2 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	24 dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			28.940.625
1 2 1 2.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi pegawai yang digunakan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	2 paket	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			57.881.250
1 2 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Peraturan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			46.305.000
1 2 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			40.516.875
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Umum Sesuai Regulasi		100%	626.225.000						5.969.240.092
1 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen listrik dan penerangan yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			258.049.738
1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			909.562.500
1 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	cakupan peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			182.330.292
1 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			546.118.909
1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 paket	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			192.378.653
1 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang tersedia	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			36.382.500
1 2 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase bahan/ material yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			181.912.500
1 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kegiatan, pertemuan, undangan, pelatihan yang diikuti	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	595.725.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			1.212.750.000
1 2 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang tertata baik	Keturanan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 dokumen	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			24.255.000
1 2 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase kegiatan yang berbasis elektronik	Keluranan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			2.425.500.000
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100%							7.914.212.459
1 2 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemerintah Daerah Jumlah Mobil Jabatan yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			1.331.000.000
1 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			1.931.092.459
1 2 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Rapat yang tersedia	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	50 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			665.500.000
1 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin/ peralatan lainnya	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			26.620.000
1 2 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di bangun	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			2.200.000.000
1 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			825.000.000
1 2 1207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang tersedia	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	5 unit		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			935.000.000
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kelurahan	100%	53.251.375.576	Hasıl		dan Pendidikan			54.312.344.545
			Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang terkirim	Kecamatan, Semua Kelurahan	800000 lembar	2.500.000	Hasil		dan Pendidikan			33.206.250

				Tahun 2023	Car	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	in			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023		Sumber Dana		rioritas		aian Kinerja	Kebutuhan Dana
				1 arget 2023	Pagu Indikatif (Rp.)		Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listirik,air dan internet yang terbayar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Token	615.142.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			817.075.795
2 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 unit	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			26.565.000
2 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tenaga yang tersedia	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	52.333.732.776	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			53.435.497.500
2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah	:	100%	60.000.000						2.203.947.459
2 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan jabatan yang dirawat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			199.650.000
2 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang terawat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			1.345.452.459
2 1 2.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah kursi yang diperbaiki	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			33.275.000
1 2 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			53.240.000
1 2 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terawat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			332.750.000
1 2 1 2.09 1	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor yang terawat dengan baik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			239.580.000
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bu per 100,000 kelahiran hidup, Cakupan DesAheurhan Liniversel Chiel Immunizatio (UCI), Cakupan Ketercediaan Ohat sesuai Kebutuhan, Cakupan pelayanan Kestentar qujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBG BTA, Jumlah Kampung STBM, Pengadaan Alat-alat Kesehatan Canggih (RSU) HIS, Peningkatan Pelayanan, Rasio Rumah Sakit per Sattan Penduduk (RSUD HIS). Persentase Alkey sang bisa diperbahil (%)(RSUD HIS). Persentase orang usia 15–50 tahun mendapatkan strining kesehatan sesuai standar, Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita diperbahil (%)(RSUD HIS). Persentasi yang bisa sentama penduduk, Rasio Humah Sakir per satuan penduduk, Usia Harapan Hidup (UHH)		5/1000 KH 2,00 95,00 95,00 94,50 % 100,00 50 % 75 % 75 % 85 % 77 % 100 11,027 11,027 11,027 17,325 %	30,642.314.263						396,289,301.625
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		100%	5.559.000.000						253.040.524.425
2 2 2.01	l Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		2 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			36.708.000.000
2 2 2.01	2 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Dilang Puti	2 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			28.238.792.400
2 2 2.01	3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Simpang Raya	2 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			38.304.000.000
2 2 2.01	4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			3.902.208.600
2 2 2.01	5 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			606.913.425
2 2 2.01	6 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		2 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			38.592.000.000
2 2 2.01	7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			6.128.640.000
2 2 2.01	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua	1 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			3.830.400.000
2 2 2.01	9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	220.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			4.788.000.000
2 2 2.01 1	0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			3.064.320.000
2 2 2.01 1	l Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			2.298.240.000
2 2 2.01 1	2 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	250.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			1.723.680.000
2 2 2.01 1	3 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Keluranan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			4.129.650.000
2 2 2.01 1	4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	reciuianan	600 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			17.619.840.000
+++		Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibras	i			Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	 		
1 2 2 2.01 1	5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		550 paket	500.000	Hasil		dan Pendidikan			8.618.400.000

					Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	i			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prie Nasional	oritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	oaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 2.01 16	6 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 paket	1.998.342.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	TOIOK CKUI	Target	9.216.900.00
2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kelurahan	1 paket	3.002.658.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			22.024.800.00
2 2.01 18	8 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			21.450.240.00
2 2.01 19	9 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Keluranan	20 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			598.500.0
2 2.01 20	0 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas		20 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			598.500.0
		Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang	Kab. Kutai Barat, Semua			Hasil D. T. C. H. D. D.		lan Pendidikan			
2 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kecamatan, Semua Kelurahan	21 unit	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	(Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			598.500.0
2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		100%	25.050.814.263						138.227.137.2
2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2633 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			1.459.260.0
2 2.02 2	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2514 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	(Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2394 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9698 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 5	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	l	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			583.704.0
2 2.02 6	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100687 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 7	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayana Kesebatan Sesuai Standar	1	17609 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			583.704.0
2 2.02 8	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13402 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 9	9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2200 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	,	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 10	D Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			389.136.0
2 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2913 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			389.136.0
2 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			194.568.0
2 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			194.568.0
2 2.02 15	S Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	63.157.710	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			2.918.520.0
2 2.02 16	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 17	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			583.704.0
2 2.02 18	8 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			291.852.0
2 2.02 20	D Pengelolaan Surveilans Keschatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			486.420.0
2 2.02 21	l Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172 orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			145.926.0
2 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 orang	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			486.420.0
2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			976.562.3
2 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			289.406.2
2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	c	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			4.957.031.2
2 2.02 26	6 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	14.850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			77.760.000.0
2 2.02 27	7 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	C	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan lan Pendidikan			583.704.0
2 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	(Fasyankes) dan bekotan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 specimen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	·	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ian Pendidikan			97.284.0
2 2 02 20	9 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	,	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			488.281.2

					Tahun 2023	Can	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	in	Prakiraan Maju R	encana Tahun 2024
Ko	ode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan				Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 2	2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Keschatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Keschatan yang Berkualitas	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		2.918.520.000
1 2 2	2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		972.840.000
1 2 2	2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		6.443.737.325
1 2 2	2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650 dokumen	9.119.156.553	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		23.348.160.000
1 2 2	2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Keschatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		2.281.312.500
1 2 2	2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		3.574.056.250
1 2 2	2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		45.626.250
1 2 2	2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini da Respon Wabah	n	5 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		76.043.750
1 2 2	2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		38.021.875
1 2 2	2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		42998 Keluarga	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		
1 2 2	2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		2692 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		
1 2 2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	wichuaparkan Pelayanan Sesuai Standar		·	7.500.000	riasii	dan Pendidikan		3.120.000.000
1 2 2	2.03 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		585.000.000
1 2 2	2.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		585.000.000
1 2 2	2.03 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan		13 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		1.950.000.000
1 2 2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten kota		100%	25.000.000	14691	Cont Characteris		1.901.640.000
1 2 2	2.04 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		53.820.000
1 2 2	2.04 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		53.820.000
1 2 2	2.04 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		1.704.300.000
1 2 2	2.04 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yanJumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		89.700.000
1 2 3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan kepada Masyarakat (RSID) * Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat (RSID) HIS/Cakupan Tenaga Kesehatan yang memenuhi Kompetensi Standar, Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi *, Rasio dokter per satuan penduduk *, Rasio tenaga medik per satuan penduduk *.	N. C.	100 % 80 % 96 % 96,00 % 01:37,1 01:54,2	60.500.000				96.196.875.000
1 2 3	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				10.500.000				937.500.000
1 2 3	2.01 1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		468.750.000
1 2 3	2.01 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			<u> </u>	5.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		468.750.000
1 2 3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayak Kabupaten / Kota		100%	25.000.000	11.51	uan i Chederan		92.915.625.000
1 2 3	2.02 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		351.562,500
1 2 3	2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2036 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		91.978.125.000
1 2 3	2.02 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		585.937.500
1 2 3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memikiki Kopetensi		100%	25.000.000				2.343.750.000
1 2 3	2.03 1	Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Propesionallitas Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		2.343.750.000
1 2 4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman * ,cangkuapan ketersediaan obat sesuai standar, cangkupan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar, cangkupan pengawasan makan dan minum sesuai standar		65 % 98 % 82 % 65 %	37.500.000				585.937.500
1 2 4	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal dan Umot		100 %	12.500.000				410.156.250
1 2 4	2.01 1	(LOMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dan Umot Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sert, Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	4.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		58.593.750

			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Reno							
,	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional I	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1 2	4 2.01 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Lzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 unit	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Tolok Ukur	Target	ragu Indikatii (Rp.) 58.593.750
1 2	4 2.01 3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	25 unit	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			58.593.750
1 2	4 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan	Memenuhi Komitmen Izin Persentase sarana produksi Alkes dan perbekalan	Kelurahan	19 PKM							117,187,500
1 2	4 2.02 1	Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	kesehatan rumah bangga yang bersertifikat. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Indak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Poduksi, untuk Produk Makanan Mimuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			58.593.750
1 2	4 2.02 2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			58.593.750
1 2	4 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi		60 %	5.000.000	,					58.593.750
1 2	4 2.03 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	I dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			58.593.750
1 2	4 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Denot Air Minum (DAM)	Persentase Industri Rumah Tangga yang memiliki		70 %	5.000.000)					58.593.750
		Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	sertifikat produksi yang dibina dan diawasi				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 2	4 2.04 1	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				5.000.000	Hasil		dan Pendidikan			58.593.750
1 2	4 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah stiker yang diterbitkan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta	Kab, Kutai Barat, Semua	50 %	5.000.000						58.593.750
1 2	4 2.05 1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		1 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			58.593.750
1 2	4 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase stiker yang diterbitkan yang diperiksa		50 %	10.000.000						117.187.500
1 2	4 2.06 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 paket	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			58.593.750
1 2	4 2.06 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			58.593.750
1 2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) *, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Rasio posyandu per satuan balita		60 % 70 % 1.17 %	100.000.000						1.757.812.500
1 2	5 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)		60 %	25.000.000)					742.187.500
1 2	5 2.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			742.187.500
1 2	5 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan pemerintah tentang Kabupaten sehat		60 %	50.000.000)					468.750.000
1 2	5 2.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			468.750.000
1 2	5 2.02 2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Keschatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat		42998 Keluarga	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			
1 2	5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM di Kabupaten yang di bina		85 %	25.000.000						546.875.000
1 2	5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			546.875.000
Ш					-			_				
		RSUD. Kelas D Pratama Sendawar				3.000.000.000)					
1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.000.000.000						
1 2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.000.000.000						
1 2	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang beroperasi		1 Rumah Sakit	3.000.000.000	D T 6 H					
1 2	2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			
		BCUD Hamman Lava Candanana				115.012.011.55						147.504.305.335
		RSUD Harapan Insan Sendawar				115.213.946.294						147.584.399.533
1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(RSUD HIS) Prosentase pelayanan perangkat daerah		100%	115.213.946.294 112.131.586.294						147.584.399.533 131.555.925.533
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	yang dilaksanakan dengan baik *			112.131.380.274						151.555.925.555
1 2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			2.200.000
1 2	-	<u> </u>		1		1	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			11.000.000
+++	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja		17 Laporan		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		dan Pendidikan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja		2 Dokumen	27.684.371.656	Hasil		dan Pendidikan			2.000.000 34.837.627.845
				Kab. Kutai Barat, Semua	170.0		D T C U D ALL :		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	178 Orang	27.300.731.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dan Pendidikan			34.119.759.045

				Tanun 2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Ren					
	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Priorita Nasional	Daerah	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1 2	1 2.02	2 Penye	ediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Administrasi		30 Orang	317.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan	TOIOK CKIII	rarget	717.868.80
							300.000.000	Umum	dan I	Pendidikan			565,656,813
1 2	1 2.07		adaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun		211.5	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan		ı	565.656.81
1 2	1 2.07			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun		2 Unit		Hasil	dan I	Pendidikan			
1 2	1 2.08		rediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan		cn i	28.664.350.000 2.797.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan		I	40.063.741.87 3.076.920.00
1 2	1 2.08			Listrik yang Dibayar Tiap Bulan		5 Rekening		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	dan I	Pendidikan timalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 2	1 2.08		rediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	25.867.150.000	Hasil	dan I	Pendidikan			36.986.821.8
1 2			eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				1.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Onti	timalisasi Pelayanan Kesehatan		ı	1.073.699.00
1 2	1 2.09	Jabata	lan	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92 Unit	75.000.000	Hasil	dan I	Pendidikan			110.000.00
1 2	1 2.09	6 Peme	eliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sensor Injektor Malfunction pada Alat dan Mesin		3 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Opti dan I	timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			66.000.00
1 2	1 2.09	9 Peme	eliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Direhab		3 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			732.699.0
1 2	1 2.09	11 Peme	eliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung		3 Unit	825.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan			165.000.0
1 2	1 2.10		ngkatan Pelayanan BLUD	Kantor atau Bangunan Lainnya			54.182.864.638	Hasil	dan l	Pendidikan			55.000.000.0
1 2	1 2.10	$\overline{}$	yanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate (CRR)		1 Tahun	54.182.864.638	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			55.000.000.0
1 2	2	PRO MAS	OGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN YARAKAT	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (RSUD HIS) Persentase Alkes yang bisa diperbaliki (%)(RSUD HIS), Persentase orang usia 15-50 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase peralatan yang bisa diperbaliki (%)(RSUD HIS		95 % 75 % 85 % 90 %	3.082.360.000	Hashi	Suit I	Teinfolkan			14.378.474.04
1 2	2 2.01	Peny	rediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3.082.360.000						13.311.474.00
1 2	2 2.01		bangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		3 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			
1 2	2 2.01	13 Peno	adaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Linen		1 Tahun	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		timalisasi Pelayanan Kesehatan			
+		++-		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas			1.500.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	dan I Opti	Pendidikan timalisasi Pelayanan Kesehatan			6.600.000.0
1 2	2 2.01	++-	adaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		10 Unit		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pendidikan timalisasi Pelayanan Kesehatan			
1 2	2 2.01	17 Penga	adaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		10 Paket	1.382.360.000	Hasil	dan I	Pendidikan			6.491.474.0
1 2	2 2.01	20 Peme	eliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		50 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			220.000.0
1 2	2 2.02	Peny	rediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1.067.000.0
1 2	2 2.02	17 Penge	elolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	dan I	timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			660.000.0
1 2	2 2.02	18 Penge	elolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan		5 Dokumen	,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			132.000.0
1 2	2 2.02	32 Opera	rasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Opti	timalisasi Pelayanan Kesehatan			275.000.0
1 2	3	PRO	IGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan kepada Masyarakat (RSUD) * ,Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat(RSUD HIS		100% 80%		Hasil	dan l	Pendidikan			1.650.000.00
1 2	3 2.03	Peng	tembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Tah Kabunaten/Kota										1.650.000.00
1 2	3 2.03	Penge	embangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah upaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		80 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		timalisasi Pelayanan Kesehatan Pendidikan			1.650.000.00
								ı	1			1	
		Dina	s Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				271.422.442.520						780.518.037.1
												<u> </u>	
1 3			ISAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase pelayanan perangkat daerah yang	ı		270.920.905.620						780.518.037.1
1 3	1	PRO	GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dilaksanakan dengan baik *		96%	26.908.331.920						22.818.442.9
1 3	1 2.01	Perei	ncanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun		96%	50.000.000						70.000.0
1 3	1 2.01	1 Penyi	usunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah		3 dok	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infra Ekor	nguatan Infrastruktur dasar dan astruktur Kluster Pengembangan nomi Lokal untuk Mengurangi impangan Wilayah			25.000.00
1 3	1 2.01	6 Koon	tdinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000		Infra Ekor	nguatan Infrastruktur dasar dan astruktur Kluster Pengembangan snomi Lokal untuk Mengurangi impangan Wilayah			25.000.0
1 3	1 2.01	7 Evalu	uasi Kincija Perangkat Daerah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infra Ekor	nguatan Infrastruktur dasar dan astruktur Kluster Pengembangan snomi Lokal untuk Mengurangi impangan Wilayah			20.000.0
1 3	1 2.02	Adm	inistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan		97%	17.232.564.304						13.230.000.0
1 3	1 2.02	Ш	ediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17.202.564.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infra Ekor	nguatan Infrastruktur dasar dan astruktur Kluster Pengembangan nomi Lokal untuk Mengurangi impangan Wilayah			13.200.000.0
1 3	1 2.02	5 Koon	rdinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Infra Ekor	nguatan Infrastruktur dasar dan astruktur Kluster Pengembangan nomi Lokal untuk Mengurangi impangan Wilayah			10.000.0

					Tahun 2023 Cap		aian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Renc			
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	
1 3	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Nasional	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	1 olok Ukur	Target	ragu indikatii (kp.)	
1 3	1 2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			10.000.000	
1 3	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		97%	275.000.000						775.000.000	
1 3	1 2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000	
1 3	1 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			125.000.000	
1 3	1 2.05 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000	
1 3	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilayani		95%	650.000.000						800.000.000	
1 3	1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000	
1 3	1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000	
1 3	1 2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000	
1 3	1 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000	
1 3	1 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000	
1 3	1 2.06	Penyediaan Bahan/Material				30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			30.000.000	
1 3	1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			350.000.000	
1 3	1 2.06 1	Dukungan Pelaksunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			120.000.000	
1 3	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan		94%	98.000.000						98.000.000	
1 3	1 2.07	Pengadaan Mebel				49.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			49.000.000	
1 3	1 2.07	Pengaduan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			49.000.000	
1 3	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan		100%	8.019.132.710						7.261.808.000	
1 3	1 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			5.000.000	
1 3	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			124.000.000	
1 3	1 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000	
1 3	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.590.132.710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			6.832.808.000	

				Tahun 2023	C-	naian Kinaria dan Karangka Bandana	an .			Prakiraan Maju Rei	neana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			paian Kinerja dan Kerangka Pendana:		rioritas	Target Ca	Prakiraan Maju Rei apaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	9		,g.	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan		100%	583.634.90						583.634.900
3 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				73.634.90	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			73.634.900
3 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			350.000.000
3 1 2.09	5 Pemeliharaan Mebel				30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			30.000.000
3 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000) (PAD) (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			30.000.000
3 1 2.09	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%), Rasio Jaringan Irigasi		10.57 %	11.025.000.000)					14.599.999.000
3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		8 %	2.475.000.000	9					3.852.419.000
3 2 2.01	0 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Turap		45 m	575.000.000	0			Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	513.267.000
3 2 2.01	El Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air lainnya		l Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	1.200.000.000
3 2 2.01	5 Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau		I unit	900.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	1.000.000.000
3 2 2.01	6 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai		15 km (di lima lokasi)	850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	989.152.000
3 2 2.01	il Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		8 Orang	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	150.000.000
3 2 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		8 %	8.550.000.000)					10.747.580.000
3 2 2.02	l Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		4 Dokumen	1.150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untul Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	1.471.280.000
3 2 2.02	2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Saluran Irigasi		1450 meter	3.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untul Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	1.880.500.000
3 2 2.02	8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan		2 km	3.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untul Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	5.645.800.000
3 2 2.02	l Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya bangunan dan saluran irigasi yang baik		2500 m	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untul Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	1.000.000.000
3 2 2.02	99 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawassan Rawa		4 Kawasan	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untul Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Persentase Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	2,5 %	750.000.000
3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum (%) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem		100%	10.000.000.000						13.749.595.285
3 3 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah		100%	10.000.000.000						13.749.595.285
3 3 2.01	l Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		3 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
3 3 2.01	2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimali sasi SPAM		l Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
3 3 2.01	4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		160 SR	3.000.000.001	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			8.890.000.000
	•			•		•		•	IAM	PIRAN Rancangan A	khir RKPD 2023 Kabupaten Kutai

Market M						Tahun 2023	Car	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	1			Prakiraan Maju Ren		
1		Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					Kebutuhan Dana	
	1 3	3 2.01	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			15 L/dt	5.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Nasional	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 3.500.000.000	
	1 3	3 2.01 1	Pembinian dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM			1 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			250.000.000	
1	1 3	3 2.01 1	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			216 KK	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			459.595.285	
Note 1	1 3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3.900.000.000						12.900.000.000	
	1 3	4 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		99%	3.900.000.000						12,900,000,000	
	1 3	4 2.01				3 Dokumen	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			200.000,000	
	1 3	4 2.01	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS		35877.24 KK	1.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			9.950.000.000	
	1 3	4 2.01	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang		8 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			200.000.000	
	1 3	4 2.01	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			6 Unit bak Sampah	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi				
	1 3	4 2.01	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan		2 Unit	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			2.500.000.000	
	1 3	4 2.01	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan		500 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			50.000.000	
Page	1 3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Layanan Sanitasi yang tertangani (%), Pengurangan			4.000.000.000						6.800.000.000	
Part	1 3	5 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		86%	4.000.000.000						6.800.000.000	
Variable	1 3	5 2.01		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD		2 Dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			500.000.000	
Sample S	1 3	5 2.01	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		1000 Rumah Tangga	3.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			4.000.000.000	
Variable	1 3	5 2.01	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		5 Kampung	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			200.000.000	
Variable	1 3	5 2.01	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem		20 Kelompok	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			250.000.000	
Various Vari	1 3	5 2.01	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik			10 Orang		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			220.000.000	
u v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	1 3	5 2.01 1.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja		1 Unit		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			750.000.000	
1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3	1 3	5 2.01 1	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja		200 Rumah Tangga	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			380.000.000	
1 S V PROGRAM FEAVELOUAND DAY	1 3	5 2.01	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT			l Paket	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi			500.000.000	
l a d 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 66% 3,900,000,000	1 3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	aliran air tidak tersumbat (%)		66%	3.900.000.000						9.500.000.000	
Radupaten Aota dalam Daerah Kabupaten Kota	1 3	6 2.01		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		66%	3,900,000,000						9.500.000.000	
LAMPIRAN Rancangan Akhir RKPD 2023 Kabu			Kabupaten Kota									DIDAN Des		

			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tahun 2023 Cap:		oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Ren	icana Tahun 2024	
	Code	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1 3	6 2.01	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Nasional	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	1 olok Ukur	Target	Fagu indikatif (kp.) 6.000.000.000
1 3	6 2.01 11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan		5 Orang		- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			250.000.000
1 3	6 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		900 Meter	1.900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.250.000.000
1 3	6 2.01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan		750 Meter		- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.000.000.000
1 3	6 2.01 14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi		500 Meter	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
1 3	6 2.01 15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan		5 Unit		- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
1 3	6 2.01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun		1 Dokumen		- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik		65%	11.682.259.200						8.000.000.000
1 3	7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		65%	11.682.259.200						8.000.000.000
1 3	7 2.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		5 Sistem Jaringan	11.682.259.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			7.400.000.000
1 3	7 2.01	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		5 Sistem Jaringan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
1 3	7 2.01 4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		5 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara yang berfungsi dengan baik, Rasio bangungan ber -IMB per satuan		63 % 3.7 %	25.715.000.000						56.500.000.000
1 3	8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Lein Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	bangunan Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		67%	25.715,000.000						56.500.000.000
1 3	8 2.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		60 Dokumen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
1 3	8 2.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		5 Dokumen	14.565.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			35.500.000.000
1 3	8 2.01	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kots yang Disusun		1 Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
1 3	8 2.01	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	8 2.01	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraar Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1	10 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	8 2.01	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan		1 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000
1 3	8 2.01	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis		l Pengelola		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	8 2.01 8	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif		1 Pengelola		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000

					1 ahun 2023	Cap	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kod	le	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
1 3 8 2.	:.01 9	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan		10 Unit	ragu munum (Np.)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 8 2.	.01 10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)		10 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000
1 3 8 2.	:.01 11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi		5 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3 8 2.	:.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		I Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000
1 3 8 2.	.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan		10 Unit	10.150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			19.600.000.000
1 3 9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Tempat Pemakaman Umum per-satuan penduduk		38 %	15.000.000.000						25.000.000.000
1 3 9 2.	.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		38%	15.000.000.000						25.000.000.000
1 3 92	.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Rota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
1 3 9 2.	:.01 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		2 Kawasan	13.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			14.000.000.000
1 3 9 2.	.01 4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		2 Kawasan	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			10.000.000.000
1 3 92.	:01 6	Monitoring Penataan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
1 3 10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		68.3 %	151.298.914.500						600.000.000.000
1 3 10 2.	.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jalan Kabupaten/Kota		68.3 %	151.298.914.500						600.000.000.000
1 3 10 2.	.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		15 dokumen	1.800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			3.350.000.000
1 3 10 2.	.01 4	Survey Kondisi Jalan/Jembutan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		1 dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			
1 3 10 2.	.01 5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		10 km	6.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			10.000.000.000
1 3 10 2.	.01 8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi		124 km	72.848.914.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			387.150.000.000
1 3 10 2.	:.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan		43 km	10.150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000.000
1 3 10 2.	.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan		17.5 km	7.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			7.500.000.000
1 3 10 2.	:.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		2 unit	50.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			175.000.000.000
1 3 10 2	:.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan		5 unit	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			2.000.000.000
1 3 11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Tenaga Terampil Konstruksi Bersertifikat		25 %	2.491.400.000						4.650.000.000
1 3 11 2.	.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		60 %	1.000.000.000						2.000.000.000
1 3 11 2.		Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen perencanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli		l Dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000

					1 ahun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
1 3	11 2.01	2 Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah instruktur/asesor/pelaksana pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analisis yang disiapkan		2 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 3	11 2.01	3 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis		1 dokumen	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.01	4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan		60 orang	425.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			600.000.000
1 3	11 2.01	5 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi		1 dokumen	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.01	6 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi		60 orang	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			600.000.000
1 3	11 2.01	7 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi		30 orang	220.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
1 3	11 2.01	8 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi		1 dokumen	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		75 %	635.400.000						1.200.000.000
1 3	11 2.02	l Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	85.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
1 3	11 2.02	2 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi		1 dokumen	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	3 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	jumlah orang yang mengikuti penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI		4 orang	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	4 Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	jumlah dokumen hasil data dan informasi		1 dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	S Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	jumlah data dan informasi potensi risiko infrastruktur		1 dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	6 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	jumlah data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha		1 dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	7 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	jumlah data dan informasi ketersediaan/penggunaaan material dan peralatan		1 dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	8 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		1 dok	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	9 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi			50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	0 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi			50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.02	l Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi			50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3	11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		75 %	306.000.000						900.000.000
1 3	11 2.03	l Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.		l dokumen	64.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000

					Tanun 2023	Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Ko	de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
1 3 11	2.03 2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan		1 dokumen	64.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 11	2.03 3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatar Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
1 3 11	2.03 4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatar Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional			60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
1 3 11	2.03 5	Pemantauan dan Evaluasi IUK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi			58.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3 11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		63 %	550.000.000						550.000.000
1 3 11	2.04 1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3 11	2.04 2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfiatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 laporan	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
1 3 11	2.04 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 laporan	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
1 3 12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RTRW dan Penyelesaian Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota		11 %	5.000.000.000)					6.000.000.000
1 3 12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		10 Dokumen	3.250.000.000	,					4.600.000.000
1 3 12	2.01 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
1 3 12	2.01 2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		7 Dokumen	2.450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			4.100.000.000
1 3 12	2.01 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		l Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
1 3 12	2.01 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		l Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
1 3 12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		6 Laporan	400.000.000						300.000.000
1 3 12	2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
1 3 12	2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3 12	2.02 3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000
1 3 12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		6 Laporan	600.000.000						500.000.000
1 3 12	2.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			250.000.000
1 3 12	2.03 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			250.000.000
1 3 12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		9 Laporan	750.000.000						600.000.000
1 3 12	2.04 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000

				Tahun 2023							
					Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana	ian			Prakiraan Maju Ren	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional P	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 12 2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		3 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi	1 olok Ukur	Target	ragu indikatii (Rp.)
1 3 12 2.04	3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan		l Kasus		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dan Menjamin Pemerataan Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Ketimpangan Wilayah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
1 3 12 2.04	4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		2 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
					,			_			
	UPT. Laboratorium Konstruksi				501.536.900						1.627.260.000
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				501.536.900						1.627.260.000
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				501.536.900						1.627.260.000
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4.000.000
1 3 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	2 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					4.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					D T (1)					4.000.000
1 3 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapor		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000
1 3 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000
1 3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Kutai Barat, Barong		99.540.000						125.000.000
1 3 1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan" Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong	1 Paket	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					25.000.000
1 3 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tongkok, Barong Tongkok	7 Orang	92.540.000	Hasil					100.000.000
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tongkok		155.000.000						368.000.000
\Box		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kab. Kutai Barat, Barong			Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
1 3 1 2.06	2 Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan" "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	1 Paket	35.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					57.000.000 36.000.000
1 3 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	1 Paket	10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
1 3 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan KonsultasiSkpd	Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	300 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					250.000.000
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.000.000						330.000.000
1 3 12.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	5 Unit	148.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					330.000.000
1 3 12.07	o rengadaan retahaan dan wesin Lamnya	Disediakan"	Tongkok, Barong Tongkok	3 Olik	148.000.000	Hasil					330.000.000
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		K I K . 'D . D		13.996.900					1	521.060.000
1 3 1 2.08	l Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Barong	1 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					3.000.000
1 3 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong	12 Laporan	11.996.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					12.000.000
1 3 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	yang Disediakan	Tongkok, Barong Tongkok	12 Laporan		Hasil					506.060.000
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Kutai Barat, Barong		85.000.000					ı	275.200.000
1 3 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong	1 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.200.000
1 3 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Tongkok, Barong Tongkok	8 Unit	75.000.000	Hasil					200.000.000
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				19.346.275.915						55.092.200.779
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				17.096.275.915						42.413.037.784
1 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah		100%	10.315.235.815						8.955.537.784
1 4 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	110.000.000			Pengingkatan Kapabilitas Sumber			113.800.500
1 4 1 2.01	l Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Kutai Barat, Semua	2 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas Pemantapan Tata Kelola			63.222.500
1 4 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			25.289.000
1 4 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah		100%	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			25.289.000 7.215.400.645
1 4 1 2.02	- Commission according an I Claughat Datian	Termisananya Kenangan Ferangkat Daeran	Kab. Kutai Barat, Semua	10076		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola		l	7.215.400.045
1 4 1 2.02	I Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	4.757.684.366	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			5.590.963.364

					Tahun 2023							
		The American Control of the Am				Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Prakiraan Maju Renc	
I	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	s Daerah	Target Cap Tolok Ukur	aian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1 4	1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		48 Dokumen	1.465.959.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema Peme	antapan Tata Kelola erintahan yang Baik, Bersih dan etabel	TOTAL UKUI	· get	1.580.447.531
1 4	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporat Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	48 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema Peme	antapan Tata Kelola erintahan yang Baik, Bersih dan etabel			21.994.875
1 4	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan			21.994.875
1 4	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	325.000.000						184.106.364
1 4	1 2.05	Il Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	36 Orang	325.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemer	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan			184.106.364
1 4	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan	100%	512.000.000			ıtabel			738.453.268
1 4	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemer	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan stabel			212.984.825
1 4	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Paket	54.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemer	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan itabel			56.004.855
1 4	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Paket	18.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan			56.004.855
1 4	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan			48.024.304
1 4	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	370.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema Pemer	antapan Tata Kelola erintahan yang Baik, Bersih dan etabel			365.434.429
1 4	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	2.833.591.549		Akun				433.160.980
1 4	1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Patrian -			15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemer	antapan Tata Kelola rrintahan yang Baik, Bersih dan tabel			46.547.959
1 4	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	35.373.513	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema Peme	antapan Tata Kelola rrintahan yang Baik, Bersih dan tabel			46.547.959
1 4	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	49 Laporan	2.783.218.036	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema Peme	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan			340.065.062
1 4	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kelurahan	100%	271.000.000		Akunt	itabei			270.616.027
1 4	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	13 Unit	211.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemer	antapan Tata Kelola erintahan yang Baik, Bersih dan			213.012.261
1 4	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	52 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema Peme	antapan Tata Kelola rintahan yang Baik, Bersih dan			38.399.347
1 4	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pema Peme	antapan Tata Kelola erintahan yang Baik, Bersih dan			19.204.419
1 4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Rumah	Kelurahan	85%	499,999,000		Akun	ıtabel			20.150.000.000
1 4	2 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Layak Huni Tersedianya Data bagi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		85%	271.999.800						1.520.000.000
1 4	2 2.01	l Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			350.000.000
1 4	2 2.01	2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	135.999.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			300.000.000
1 4	2 2.01	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	135.999.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			290.000.000
1 4	2 2.01	4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			200.000.000
1 4	2 2.01	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korbat Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			280.000.000
1 4	2 2.01	6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			100.000.000
1 4	2 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		85%							1.200.000.000
1 4	2 2.02	l Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			300.000.000
1 4	2 2.02	2 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infras Ekono	guatan Infrastruktur dasar dan struktur Kluster Pengembangan omi Lokal untuk Mengurangi npangan Wilayah			300.000.000

					1 ahun 2023	Caj	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
4 2 2.02	2 41	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	.,,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 300.000.000
4 2 2.02	2 51	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
4 2 2.03	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		85%		-					16.650.000.000
4 2 2.03	3 11	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			4.000.000.000
4 2 2.03	3 2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.000.000.000
4 2 2.03	3 31	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 На		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			4.150.000.000
4 2 2.03	3 41	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			3.000.000.000
4 2 2.03	3 51	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			3.500.000.000
4 2 2.03	3 60	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.000.000.000
4 2 2.04	4 1	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		85%							300.000.000
4 2 2.04	4 11	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
4 2 2.05	5 1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		85%							90.000.000
4 2 2.05	5 11	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Pengbuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			90.000.000
4 2 2.06	6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersedianya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		85%	227.999.200						310.000.000
4 2 2.06		Fasilitissi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			80.000.000
4 2 2.06	6 21	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggarian Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			80.000.000
4 2 2.06	6 31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	227.999.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
4 2 2.06	6 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susan Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
4 2 2.07	7	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Tersedianya Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		85%							80.000.000
4 2 2.07	7 11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			80.000.000
4 3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		26%	2.099.712.000						8.000.000.000
4 3 2.01	1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		27%	160.000.000						600.000.000
4 3 2.01	1 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			80.000.000
4 3 2.01	1 2	Penyusunan dan/utau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			440.000.000

				1 ahun 2023	Caj	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	icana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah		oaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4 3 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		2 Laporan	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 80.000.000
4 3 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		27%	95.000.000						1.400.000.000
4 3 2.02	l Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		10 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
4 3 2.02	2 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		l Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
4 3 2.02	3 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyaraka di Permukiman Kumuh	t	1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
4 3 2.02	4 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
4 3 2.02	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
4 3 2.02	6 Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
4 3 2.02	8 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi		2 Dokumen	95.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			400.000.000
4 3 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		27%	1.844.712.000						6.000.000.000
4 3 2.03	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permakiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		1 Dokumen	115.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
4 3 2.03	2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		180 Unit	1.729.712.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			2.700.000.000
4 3 2.03	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Permugaran Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		8 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			80.000.000
4 3 2.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			620.000.000
4 3 2.03	6 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		5 Ha		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			2.000.000.000
4 3 2.03	7 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani		2 %	800.000.000						2.000.000.000
4 4 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		2 %	800.000.000						2.000.000.000
4 4 2.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		45 Unit	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.000.000.000
4 4 2.01	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikar Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			800.000.000
4 4 2.01	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Perenajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		55%	3.381.329.100						2.756.250.000
4 5 2 01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya Urusan PSU Perumahan		55%	3.381.329.100						2.756.250.000

					Tahun 2023	Car	aian Kinerja dan Kerangka Pendana:	an	Prakiraan Maju Re	icana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan				Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 4	5 2.01	l Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	"Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan"	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		196.250.000
1 4	5 2.01	2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		10 Lokasi	3.381.329.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		2.500.000.000
1 4	5 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		60.000.000
1 4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan		15 %					551.250.000
1 4	6 2.01	KEKISI KASI BIJANU FERUMAKNYA KAWASAN FERUMAKNYA. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	teronisan tertaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prassarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		15%					551.250.000
1 4	6 2.01	l Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		551.250.000
2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.250.000.000				12.679.162.995
2 10		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Penyelesaian izin lokasi Tersedianya Izin Lokasi Dalam I (satu) Daerah		37%					104.186.250
2 10	2 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		37%					104.186.250
2 10	2 2.01	l Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokul untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		104.186.250
2 10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presenatse Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		37%	110.000.000				78.313.099
2 10	4 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		37 %	110.000.000				78.313.099
2 10	4 2.01	I Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	dalam Daerah Kabupaten/Kota		57.70		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		78.313.099
2 10	4 2.01	2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		
2 10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK	Presentase Penyelesaian kasus tanah Negara		37 %	1.465.000.000				6.798.376.130
2 10	,	PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan		37 76	1,403,000,000				0.798.370.130
2 10	5 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		37 %	1.465.000.000				6.798.376.130
2 10	5 2.01	l Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Duerah Kabupaten/Kota	Daeran Kaoupaten Kota				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		3.399.188.065
2 10	5 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.465.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokul untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		3.399.188.065
2 10	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Tingkat Cakupan Redistribusi tanah		23 % 23 %					3.552.624.702
2 10	6 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		23%					1.776.312.352
2 10	6 2.01	l Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		444.078.088
2 10	6 2.01	2 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		444.078.088
2 10	6 2.01	3 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokul untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		444.078.088
2 10	6 2.01	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		444.078.088
2 10	6 2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		23%					1.776.312.350
2 10	6 2.02	l Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah		888.156.175

					Tahun 2023	Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Re	
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 10 6 2.02	2 2	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Duerah Kabuputen Kota					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	1000k Ukur	Target	Pagu Indikatii (Rp.) 888.156.175
2 10 7		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Presentase cakupan penetapan tanah ulayat		23 %							612.521.499
2 10 7 2.01	1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		23%							612.521.499
2 10 7 2.01	1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			204.173.833
2 10 7 2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			204.173.833
2 10 7 2.01	1 3	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Indangan yang Berlaku					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			204.173.833
2 10 8		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tingkat cakupan pengelolaan tanah kosong		23 %							459.391.125
2 10 8 2.01		Penyelesaian Masslah Tanah Kosong Keordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		23%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			153.130.375 153.130.375
2 10 8 2.02	2	inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Tersedianya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah		23%							306.260.750
2 10 8 2.02		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	ROSSII				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			153.130.375
2 10 8 2.02		Pemanfaatan Tanah Kosong					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			153.130.375
2 10 9		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Penerbitan Izin Membuka Tanah	Presentase pengelolaan izin pembukaan lahan Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah		30%	355.000.000 355.000.000)					706.237.290 706.237.290
2 10 9 2.01		Coordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	355.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			353.118.645
2 10 9 2.01	1 2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			353.118.645
2 10 10	_	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase pengelolaan izin pembukaan lahan		30%	320.000.00						367.512.900
2 10 10 2.01	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		30%	320.000.000						367.512.900
2 10 10 2.01	1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			132.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			122,504.300
2 10 10 2.01	1 2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya			70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			122.504.300
2 10 10 2.01	1 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabuputen/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			118.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			122.504.300
		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA				21.913.891.11						40.728.945.070
1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				21.913.891.11						40.728.945.070
1 5 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran		90%	20.473.891.117						30.855.680.969
1 5 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	50.000.00						115.500.000
1 5 1 2.01	1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana		2 dokumen	25.000.000	Hasii		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			36.750.000
1 5 1 2.01	1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen	1	1 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			21.000.000
1 5 1 2.01	+	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen		l dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			21.000.000
1 5 1 2.01	1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Evaluasi	1	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel			36.750.000
1 5 1 2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.907.143.13						12.940.618.769
1 5 1 2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		36 orang	6.857.143.13	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		•	7.199.605.169
1 5 1 2.02	2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan		535 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		NIDAN B	5.657.013.600 khir RKPD 2023 Kabupaten Kutai

The content of the					Tahun 2023	Cap	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n	Prakiraan Maju Re	ncana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023			Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	1 2.02 5 Koo	oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan		-			Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da		Pagu Indikatif (Rp.) 31.500.000
Part	1 2.02 7 Koo	oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan		1 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	ın	31.500.000
	1 2.02 8 Pen	nyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen		l dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	ın	21.000.000
	1 2.03 Adr	lministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Akumaoer		
	1 2.03 5 Rek	konsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen		l dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	in .	
Part	1 2.05 Adr	lministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	70.000.000				1.085.700.000
	1 2.05 2 Pen	ngadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut dan perlengkapannya		1 Set		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	891.450.000
			-		526 orang		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	
Part	1 2.05 9 Pen	ndidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			3 orang		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	105.000.000
							Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	ın	89.250.000
	1 2.06 Adr	Iministrasi Umum Perangkat Daerah			100%	580.110.944		Pemantapan Tata Kelola		716.625.000
1	1 2.06 1 Pen	nyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang disediakan		10 Jenis	5.000.000	Hasil	Akuntabel	ın e	7.875.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2.06 2 Pen	nyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		17 Jenis	35.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in .	36.750.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2.06 4 Pen	nyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik		12 bulan	15.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	an .	63.000.000
	1 2.06 5 Pen	nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan		12 bulan	10.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	26.250.000
	1 2.06 6 Pen	nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan yang Sosialisasi		12 bulan	5.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	10.500.000
	1 2.06 7 Pen	nyediaan Bahan/Material	enis bahan/ material yang disediakan		2 kali	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	ın	36.750.000
No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2.06 9 Pen	nyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD		I kali	495.110.944	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	an .	535.500.000
Value Processing and Lapour Processing and Lapou	Ш							Akuntabel		
Part	1 2.07 Pen	ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2 00	15.000.000		B		1.474.200.000
Part	1 2.07 2 Pen	ngadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2 unit		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	787.500.000
S S S S S S S S S S	1 2.07 5 Pen	ngadaan Mebel			2 unit		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	31.500.000
Part	1 2.07 10 Pen	ngadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	in	655.200.000
S 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2	1 2.08 Pen	nyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	12.586.637.041				13.636.837.200
S 12 12 12 12 12 13 13 14 13 14 13 14 14	1 2.08 1 Pen	nyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diantar		12 Bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	8.400.000
S 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2	1 2.08 2 Pen	nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		12 Bulan	110.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	115.500.000
S 1 5 1 2 8 Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Balan 12.41.637 of Umum Kantor Pencinsibahan yang Baik, Bernh dan Akustabel	1 2.08 3 Pen	nyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	225.750.000
S 2 299 Pemelataran Baraga, Shink, Barah Pemeliharan, Biaya Pemeliharan dan Pajak Kendaran Puran Bagi Pementapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1 2.08 4 Pen	nyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	,		12 Bulan	12.451.637.041	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	ın	13.287.187.200
Pennatapan Tata Kelola	1 2.09 Pen	meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	265.000.000				886.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Junit	Jaba				1 unit	100 000 000		Pemerintahan yang Baik, Bersih da	in	120.750.000
Lapangan Lapangan Funit kendaraan dinas oprasional atau lapangan Tunit Juniah kendaraan dinas oprasional atau lapangan Juniah kend			Jumlah kendaraan dinas		12 bulan	100.000.000				120.730.000
Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangaan I8 unit Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangaan I8 unit Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangaan Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangaan Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangaan I8 unit Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangaan Jumlah kendaraan di	Pen; Lap	nyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau pangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan		1 unit					
Jumlah kendaran dinas oprasional atau lapangan 12 bulan Jumlah kendaran dinas oprasional atau lapangan 18 unit 1 5 1 2.09 6 Pemeliharan Penlatan dan Mesin Lainnya Jumlah perlatan dan mesin 12 bulan 5.00000 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Pemerindan yang Baik, Bersih dan Akunabel Pemantapan Tata Kelola Pemerindan yang Baik, Bersih dan Akunabel	1 2.09 2		Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan		7 unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	in	702.450.000
Penantapan Tata Kelola Penerintahan yang Baik, Bersih dan Akutubel Penantapan Tata Kelola Penerintahan yang Baik, Bersih dan Akutubel Penantapan Tata Kelola Penerintahan yang Baik, Bersih dan Akutubel Penantapan Tata Kelola			Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan		12 bulan					
1 5 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin 12 bulan 5,000,000 Hasil Tansier Umum - Dana Bagil Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akumbel Hasil Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akumbel Pemerintahan yang Baik Bersih dan Akumbel Pemerintahan yang Ba	\bot \bot		Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan		18 unit			Pemantanan Tata Kelola		
Dana Transfer Umum - Dana Bagi remanapan lata Kelola	1 2.09 6 Pen	meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin		12 bulan	5.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	5.250.000
1 5 1 2.9 yemeninaran kenantitasi uedung kantor dan Bangunan Lainnya human jenis sarana dan prasarana genung 1.2 dulan 10.00.00 fasai Akundabel Akundabel	1 2.09 9 Pen	meliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung		12 bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da	in	57.750.000

No.					Tahun 2023	Car	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın .		Prakiraan Maju Re	ncana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023			Pr		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Part	2 PF	ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-			Nasional	Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.) 7.282.764.101
Part	2 2.01 Pe	enanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelanggaraan Penanganan Ganguan Ketentraman		100 %	480.000.000					5.865.264.101
Part	2201 1 Pe	encegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang cegah melelui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan			140.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		511.419.101
			Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan PERDA dan PERKADA Melalui Penertiban		30 Kasus	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		604.275.000
Part			Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta		16 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		89.250.000
Value Process Proces	2 2.01 4 Pe	emberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan		16 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		472.500.000
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2 2.01 5 Pe		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindung Masyarakat termasuk dalam		35 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		787.500.000
	2 2.01 8 Pe	engadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum		16 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		3.400.320.000
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2 2.02 Pe	enegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati		100 %	610.000.000					1.050.000.000
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2.02 1 So	osialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	daerah dan Peraturan Bupati / Wakli Kota.		4 Iaporan	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		315.000.000
Procession of the Procession	2 2.02 2 Pe	engawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanan		48 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		367.500.000
	Pe 2 2.02 3	enanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			6 Laporan	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		367.500.000
Variable Process Pro					50 Kali		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		
Variable	2 2.03 Pe	embinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			100 %	50.000.000					367.500.000
Part			PPNS dalam Mendukung Penyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Perda		4 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		367.500.000
	PF PF	ENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kabupaten/Kota.		39 %	300.000.000					2.590.500.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Jumlah Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Jumlah Sosialisai Pencegahan Bahaya		100 %	300.000.000					2.000.500.000
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	4 2.01 1 Pe	encegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		0 laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		50.000.000
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	4 2.01 2 Pe	emadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			6 kasus	170.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		367.500.000
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	4 2.01 3 Pe	enyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kebakran		6 laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		63.000.000
S 2 20 Penthiaan Aparatar Penadam Kebakaran S crang Abantada	4 2.01 6 Pe	engadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			2 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		507.500.000
Part	4 2.01 7 Pe	embinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		2 kali	40.000.000			Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		262.500.000
S 2 20 S Pengelalan Sistem Komunkasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Sebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Sebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Superal Sepakaran Pengelatan Perteksi Kebakaran Saspeksi Perfaitatar Proteksi Kebakaran Saspera Proteksi			Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		93 orang						
S 4 202 Penlaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 2.01 8 Pe	engelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			0 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		750.000.000
S 4 20 2 Penlaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Is laporan Is l	4 2.02 In	nspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Perlalatan Proteksi Kebakaran		20 laporan				Pemantanan Tata Kelola		75.000.000
1 S 4 203 I Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitiain dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Dana Hinvestigasi Kejadian Kebakaran O Laporan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Pemantiphan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Rasil Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Dana Pengujian Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Dana Pengujian	4 2.02 2 Pe	enilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		15 laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		75.000.000
S 4 203 Investigas kejanian kenakaran, menjuni renjegahan kenakaran Gam Pengujian Pengejahan Gam P					15 laporan		Dana Tanasia Umma Dana Basi				90.000.000
S V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pembadayan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V V V V V V V V V	4 2.03 1 In	westigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		0 Laporan		Dana Transfer Omum - Dana Bagi Hasil				90.000.000
S 4 204 Pengeulangan Kendaran Melelui Sosialisai dan Edukasi Masyarakat 120 Dokumen 120	4 2.04 Pe	emberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kebakaran		120 dokumen				B		425.000.000
S 4 24 2 Fembertukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Dokumen Dok	4 2.04 1 Pe	emberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi asyarakat	Penggulangan Kebakaran Melelui Sosialisai dan Edukasii Masayarakat		120 Dokumen		Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		215.000.000
URISAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dilaksanakan dengan baik * 42 % 9.148.433.233	4 2.04 2 Pe	embentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			0 Dokumen				Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		210.000.000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.212-987-41 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik * 9 1.484-33.233	Ва	adan Penanggulangan Bencana Daerah				10.121.505.741					18.682.809.552
1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik * 42 % 9.148.433.233						10.121.505.741					18.682.809.552
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *		42 %	9.148.433.233					9.890.609.552
	1 2.01 Pe	erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dokumen	110.000.000					125.000.000
I 5 I 2.01 I Penyasanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 2.01 1 Pe	enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		30.000.000

					1 ahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	1	Prakiraan Maju Re	ncana Tahun 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Jumlah Laporan Capaian Kineria dan Ikhtisar Realisasi		Tanget 2020	r ngu munkum (rep.)	Dumber Dama	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 5 1 2.01	1 6 K	Coordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		45.000.000
1 5 1 2.01	1 7 E	evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		50.000.000
1 5 1 2.02	2 A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		1 dokumen	3.795.349.033				4.733.359.552
1 5 1 2.02	2 1 P	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.555.349.033				4.334.199.552
1 5 1 2.02	2 2 P	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		266.160.000
1 5 1 2.02	2 4 K	Coordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		55.000.000
1 5 1 2.02	2 5 K	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		18.000.000
1 5 1 2.02	2 7 K	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		40.000.000
1 5 1 2.02	2 8 P	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		20.000.000
5 1 2.03	3 A	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya laporan barang milik daerah		6 laporan	13.927.492		D		185.000.000
1 5 1 2.03	3 5 B	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		95.000.000
1 5 1 2.03	3 6 P	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.927.492	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		90.000.000
1 5 1 2.05	5 A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		45 orang	216.055.006				302.000.000
1 5 1 2.05	5 2 P	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		-
1 5 1 2.05	5 9 P	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			216.055.006	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		302.000.000
1 5 1 2.06	6 A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		5 Iaporan	484.285.006				715.250.000
5 1 2.06	6 2 P	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		80.000.000
1 5 1 2.06	6 3 P	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		60.000.000
1 5 1 2.06	6 4 P	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		60.000.000
1 5 1 2.06	6 5 P	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		70.000.000
5 1 2.06	6 7 P	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		60.000.000
1 5 1 2.06	6 9 P	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			319.285.006	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		385.250.000
1 5 1 2.07	7 F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik drah penunjang urusan pemerintah daerah		66 unit	65.000.000				400.000.000
ш			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola		
5 1 2.07	7 10 P	engadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung			50.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		200.000.000
1 5 1 2.07	7 11 P	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			15.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		200.000.000
5 1 2.08	8 F	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 laporan	4.233.816.696				2.910.000.000
1 5 1 2.08	8 1 P	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		25.000.000
1 5 1 2.08	8 2 P	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		46.178.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		55.000.000
5 1 2.08	8 4 P	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4.172.638.696	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantaban Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.830.000.000
1 5 1 2.09	9 F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		84 unit	230.000.000				520.000.000
1 5 1 2.09	9 1 P	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan	penonjang arusan pemerintan uaeran			200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		370.000.000
1 5 1 2.09	9 11 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		 		30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		150.000.000
1 5 3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana * Cakupan Penanggulangan Bencana Alam, Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, Persentase Daerah Rawan bencana yang di bina		100 % 16 Kecamatan 3 Kecamatan 61 %	973.072.508	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		8.792.200.000
1 5 3 2.01	, .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana		1600 orang	65.000.000				1.002.000.000
3 3 2.01	- 1		kabupaten/kota	Kab. Kutai Barat, Semua		55.000.000		Pemantapan Tata Kelola		
1 5 3 2.01	1 1 P	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kecamatan, Semua Kelurahan	7 dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		350.000.000

					Tahun 2023							
1	Kode	Livuran/ Didang Livuran/ Program/ Vogistan/ Sub-Vogistan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana: I	n Prio	ritas		Prakiraan Maju Ren paian Kinerja	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
1	Koue	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	munkator Frogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 5	3 2.01	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			65.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel		Ü	652.000.000
1 5	3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	tersedianya dokumen pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		1 dokumen	560.000.000						4.037.000.000
#	-		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
1 5	3 2.02	2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			65.000.000	Hasil		emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			562.000.000
1 5	3 2.02	3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			65.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			1.920.000.000
1 5	3 2.02	7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			1.025.000.000
1 5	3 2.02	9 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			65.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			170.000.000
1 5	3 2.02	10 Gladi Kesiapsingaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			65.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			360.000.000
1 5	3 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1 dokumen	266.822.508						3.453.200.000
1 5	3 2.03	2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			777.000.000
1 5	3 2.03	3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			85.572.508	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			1.751.200.000
1 5	3 2.03	5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			81.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			925.000.000
1 5	3 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Tata kelola Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1 dokumen	81.250.000						300.000.000
1 5	3 2.04	2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			81.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			300.000.000
1 5	3 2.04	6 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P Pe	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan ikuntabel			
_		<u>. </u>										
1 6		Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10.759.152.242 10.759.152.242						14.380.189.685 14.380.189.685
1 6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja		100%	9.259.152.242						8.513.739.685
1 6	1201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	di Dinas Sosial * Persentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD		100%	149.000.000						215.000.000
1 6	1 2.01	rerencanaan, renganggaran, dan Evaluasi Kinerja rerangkat Daeran	yang tepat waktu		10076							215.000.000
1 6			Jumlah dokumen nerencanaan nerangkat daerah yang				Dana Transfer I Imum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
$\vdash \vdash$	1 2.01	l Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po A P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola			40.000.000
1 6	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun		I Dokumen I Dokumen	35.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe A P P, A	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			40.000.000 25.000.000
1 6	1 2.01		disusun			35.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P, A A F P, P A P A A A A A A A A A A A A A A A A A	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			
1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi		1 Dokumen	35,000,000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P. A. A. P. P. P. A. A. P. P. P. A. A. P. P. P. P. A. A. P.	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pernantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			25.000.000
1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun		1 Dokumen	35.000.000 79.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P. A. P.	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			25.000.000 30.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dissusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disussun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disussun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disussun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan kinerja SKPD yang disvaluasi		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola mencintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			25.000.000 30.000.000 25.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dissusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan dissusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun		I Dokumen I Dokumen I Dokumen I Dokumen	79 000 000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dissusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan dissusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan kinerja SKPD yang dievaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	79 000 000 35 000 000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P. A A P P P P P P P P P P P P P P P P P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capsian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dissusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan dissusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan dissusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan dissusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang dissusun Jumlah Laporan kinerja SKPD yang disvaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terlaksana Jumlah Laporan Sily Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	79.000.000 35.000.000 4.513.094.690	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menerintahan yang Baik, Bersih dan Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pema			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN	disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disevaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terlaksana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Scitap Bulannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan		I Dokumen	79 000 000 35 000 000 4.513.094.690 4.468.094.690	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P. A A P.	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emenintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emenintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emenintahan yang Baik, Be			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324,339.685 3.119.119.685
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dissusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disussun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan kinerja SKPD yang dievaluasi Persentase Lapuran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terlaksana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sciap Balannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok		1 Dokumen	79 000 000 35 000 000 4.513.094.690 4.468.094.690	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan emerintahan ya			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324.939.685 3.119.119.685 1.185.820.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02 1 2.02 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang dievaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terdaksana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Scitap Bulannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Laporan Skup Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok		I Dokumen	79 000 000 35 000 000 4.513.094.690 4.468.094.690	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel Pemantapan Tata Kelola			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324,329.685 3.119.119.685 1.185.820.000 4.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Pelaksanaan Penatsusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dissusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disussun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disussun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disussun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang dievaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daurah Yang terlaksana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sciap Bulannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Dokumen Keuangan Yang Telah Diverikasi Jumlah Laporan Akutansi SKPD Baik Semesteran Maupun Tahunan		1 Dokumen	79 000 000 35 000 000 4.513.094.690 4.468.094.690	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emeniritahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emeniritahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emeniritahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emenintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emenin			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324.939,685 1.185.820.000 4.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capsian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	disusum Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusum Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang dievaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Vang terdakana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sciup Pollamiya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Laporan Keuangan Yang Telah Diverikasi Jumlah Laporan Akutansi SKPD Baik Semesteran Maupun Tahunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Dokumen Rengelolaan dan Penyiapan Bahan		I Dokumen I Laporan	79 000 000 35 000 000 4.513.094.690 4.468.094.690 10 000 000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola menitahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola menitahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan Merintahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan Merintahel Merintahe			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324,329.685 3.119.119.685 1.185.820.000 4.000.000 4.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Pelaksanaan Penatsusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Pengedolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemeriksaan 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	disusum Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusum Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan kinerja KPD yang disvaluasi Persentase Lapuran Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Yang tertaksana Jumlah Laporan Silp Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setiap Balanarya Jumlah Laporan Silp Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Sotiap Balanarya Jumlah Laporan Akutansi SKPD Baik Semesteran Maupun Tahunan Jumlah Laporan Akutansi SKPD Baik Semesteran Maupun Tahunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan TWL dan Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan TWL dan Semesteran SKPD		1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	79.000.000 35.000.000 4.513.094.690 4.468.094.690 10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel ementinahan yang Baik, Bersih dan kuntabel ementinahan yang Baik, Bersih dan kuntabel ementinahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel pang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel ementahan ya			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324.939.685 3.119.119.685 1.185.820.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keunngan Perangkat Daerah 1 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 3 Pelaksanaan Penatiusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunngan SKPD 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunngan Akhir Tahun SKPD 6 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keunngan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	disusum Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusum Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan kinerja KPD yang dievaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terdakana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Seitap Buliannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Laporan Akutansi SKPD Baik Semesteran Maupun Tahunan Jumlah Laporan Keuangan Yang Telah Diverikasi Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/TWL dan Semesteran SKPD Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/TWL dan Semesteran SKPD Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan		1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	79.000.000 35.000.000 4.513.894.699 4.468.094.690 10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola menrintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola merintahan yang Baik, Bersih dan kuntahel Pemantapan Tata Kelola Pemantapa			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324.939.685 3.119.119.685 1.185.820.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capsian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusun Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang dievaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Davrah Yang terlaksana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sciap Bulannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Laporan Keuangan Yang Telah Diverikasi Jumlah Laporan Akutansi SKPD Baik Semesteran Maupun Tahunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/TWL dan Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/TWL dan Semesteran SKPD Persentase peningkatan kompetensi pegawai Derdasarkan tingkat pendidikan		1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	79.000.000 35.000.000 4.513.094.690 4.468.094.690 10.000.000 35.000.000 50.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P. A. A. P. P. P. P. A. A. P.	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324,329.685 3.119,119.685 1.185.820.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 2.01 1 2.01 1 2.01 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02 1 2.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keunngan Perangkat Daerah 1 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN 3 Pelaksanaan Penatiusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunngan SKPD 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunngan Akhir Tahun SKPD 6 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keunngan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	disusum Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusum Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di koordinasi dan disusum Jumlah DPA-SKPD yang di Koordinasi dan disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun Jumlah Laporan Kenerja SKPD yang dievaluasi Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terlaksana Jumlah Laporan Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sciap Bulannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Sciap Bulannya Jumlah Laporan Slip Pembayaran Honor dan Tunjangan ASN Diluar Gapok Jumlah Laporan Akutansi SKPD Baik Semesteran Maupun Tahunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/TWL dan Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/TWL dan Semesteran SKPD Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatiahan peawai berdasarkan tingkat pendidikan		1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	79.000.000 35.000.000 4.513.894.699 4.468.094.690 10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P. A.	emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel emerintah			25.000.000 30.000.000 25.000.000 60.000.000 35.000.000 4.324.939.685 3.119.119.685 1.185.820.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

				Tahun 2023					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			oaian Kinerja dan Kerangka Pendana:	n Prioritas	Prakiraan M Target Capaian Kinerja	iju Rencana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
Roue	Otusani Buang Otusan Hugiani Kegiatan Sub Kegiatan	mukator Frogram Regiatan Sub Regiatan	Lokasi Output Regiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	
6 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan-Perlengkapan Kerja Kantor yang disediakan		l Paket	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	200.000.000
6 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		l Tahun	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	5.500.000
6 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan		1 Tahun	31.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	65.000.000
6 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dai Akuntahel	1	46.000.000
6 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan		1 Tahun	13.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dai Akuntabel	1	40.000.000
6 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan		1 Tahun	99.999.250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	200.000.000
6 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Perencanaan		100%	4.211.058.302		- William C		2.922.500.000
6 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar		1 Tahun	155.019.560	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	190.000.000
6 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		l Tahun	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	1	43.000.000
6 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKK/Tenaga Kebersihan/Keamanan/ Honorarium Pengumpul Data yang dibayar		l Tahun	4.036.038.742	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dai	1	2.689.500.000
6 12.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak		100%	111.100,000		Akuntabel		340,000,000
		fungsi Jumlah KenJumlah Kendaraan Perorangan			111.130.000		Pemantapan Tata Kelola		340.000.000
6 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang diurusaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang diurus		5 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	60.000.000
6 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		11 Kendaraan Dinas	31.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	200.000.000
6 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		l Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	30.000.000
6 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara		l Tahun	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	50.000.000
6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Partisipasi PSKS *		22%	500.000.000				845.000.000
6 2 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Warga KAT yang meningkat kualitas		50 keluarga	66.500.000				125.000.000
6 2 2.01 1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		40 Keluarga	66.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	45.000.000
6 2 2.01 2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Keluarga	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	80.000.000
6 2 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelengara UGB dan PUB yang tertib		5 dokumen	45.000.000		Akumater		40.000.000
6 2 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	aturan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan		6 Dokumen	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar	1	40.000.000
6 2 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Uang atau Barang Persentase PSKS yang mengikuti pengembangan dalam		685 psks	388,500,000		Akuntabel		680.000.000
6 2 2.03 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	pelayanan Kesos Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar	1	45.000.000
6 2 2.03 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat		20 Orang	127.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dai	1	225.000.000
++-+		Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya				Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
6 2 2.03 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Keluarga	100.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	1	210.000.000
6 2 2.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya		5 lembaga	48.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dai Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	1	50.000.000
6 2 2.03 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Sertifikat	73.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dai Akuntabel	1	150.000.000
6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Kasus warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang mendapatkan penanganan * Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak		16%	-				60.000.000
6 3 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kekerasan Dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangklan ke Desa /Kelurahan asal		8 orang					60.000.000
6 3 2.01 1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Duerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desar Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan		8 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dai Akuntabel	1	60.000.000
6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten/Kota Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan		17,42 %	500.000.000				1.599.450.000
6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial * Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar di Luar		350 orang	250.000.000				1.085.000.000
		Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan			50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da		215.000.000
6 4 2.01 1	Penyediaan Permakanan	Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal			30.000.000	Hasil	Akuntabel		
6 4 2.01 1 6 4 2.01 2	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang	Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	60.000.000

Kode	Umran/ Bidang Umran/ Pro/ V-sistes/ Cub V-sistes	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa		ritas	Target Co	Prakiraan Maju Ren paian Kinerja	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Prio	Daerah	Tolok Ukur	Target	Rebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
4 2.01 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		- Tanger	70.000
4 2.01 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Jukuntabel			80.000
4 2.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemisi dan Menyantak Kempanpan Kebupatan Keta			200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan ukuntabel			70.000
4 2.01 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			80.000
4 2.01 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Jemerintahan yang Baik, Bersih dan			45.000
4 2.01 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	kuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			50.000
4 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Jukuntabel			40.000
4 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			40.000
4 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Jukuntabel			205.000
4 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan		348 orang	250.000.000		A	kkuntaber			514.450
4 2.02 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Ukuntabel			44.450
4 2.02 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Jemerintahan yang Baik, Bersih dan			20.000
4 2.02 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	kuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Kuntabel			25.000
4 2.02 4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.000
4 2.02 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			48.00
4 2.02 6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.00
4 2.02 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			14.00
4 2.02 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Jemerintahan yang Baik, Bersih dan Lkuntabel			24.000
4 2.02 9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Indu Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	c		75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			33.000
4 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Jemerintahan yang Baik, Bersih dan Skuntabel			18.00
4 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Jemerintahan yang Baik, Bersih dan Jekuntabel			30.00
4 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Jemerintahan yang Baik, Bersih dan Jekuntabel			68.00
4 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangar Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Jemerintahan yang Baik, Bersih dan Jekuntabel			70.00
4 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			70.00
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dar Jaminan Sosial *		100%	165.000.000						2.050.00
5 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin, yang pengelolaannya melalui SIKS-NG		21.802 jiwa	165.000.000						2.050.00
5 2.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan Didata	5		20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			150.0
5 2.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			105.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Ukuntabel			650.0
5 2.02 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Jukuntabel			750.0
5 2.02 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	F Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Ukuntabel			500.0
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota *		100%	335.000.000		A				1.312.00
6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana		100%	215.000.000						1.079.00
1 I T	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan		2.6 Orang	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			220.00

Mathematical Process			T		Tahun 2023	6			ı	n w. n	T. 1. 2024	
		Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Suh Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Outnut Kegiatan				Prioritas	Target Ca		
Part		reduc	Ottomin Didning Ottomin Programs Out Regiment	munator Frogram regiman our regiman	Lokasi Output Regintan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
	1 6	6 2.01	2 Penyediaan Sandang	Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pascabencana Kewenangan		50 Orang	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			250.000.000
	1 6	6 2.01	3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			10 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			170.000.000
Part	1 6	6 2.01	4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			60 Orang	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			189.000.000
	1 6	6 2.01	5 Pelayanan Dukungan Psikososial			80 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			250.000.000
Part	1 6	6 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota		100%	120.000.000					233.000.000
1	1 6	6 2.02	I Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		8 Kampung	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			180.000.000
March Marc	1 6	6 2.02	2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan		10 Orang	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			53.000.000
March Marc							0.031.310.570	I	I	1		20 520 202 250
Part	2 0											
	2 8			Persentase pelayanan perangkat daerah yang	ı	l						
Value Company Compan	2 8	1		dilaksanakan dengan baik *								
Part	2 8	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	210.000.000					353.450.000
	2 8	1 2.01	l Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ť	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			102.050.000
	2 8	1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.250.000
Part	2 8	1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.250.000
	2 8	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			101.400.000
1 12 13 13 13 13 13 13	2 8	1 2.01			Kecamatan, Semua	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1	2 8	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	4.572.230.602					7.958.220.000
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	2 8	1 2.02	l Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Orang	4.195.471.602	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			7.309.000.000
Variable	2 8	1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	361.759.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			551.720.000
1	2 8	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan, Semua	1 Laporan	5.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			32.500.000
The contract of the contract	2 8	1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			32.500.000
Part	2 8	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Kecamatan, Semua	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			32.500.000
Part	2 8	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	40.000.000					287.500.000
Second Performance Process Pro	2 8	1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan, Semua Kelurahan	112 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			157.500.000
Part	2 8	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan, Semua	15 Orang	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			130.000.000
2 S V D D V Percyclians Romponen Instalas Listrik/Peneragan Banganan Kantor Ba	2 8	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	162.845.000					663.000.000
2 8 1 2 06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dischalan Material Dischalan Ma	2 8	1 2.06	l Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			13.000.000
2 8 1 206 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mamlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kecamatan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kematan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kematan, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kematan, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kematan, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Material yang Disediakan Kematan, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Material yang Disediakan Kematan, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Material yang Disediakan Kematan, Semua Kelurahan Mamlah Paket Bahan Material yang Disediakan Kematan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Kematan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Kelurahan Mamlah Paket Bahan Material yang Disediakan Kematan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Kelurahan Mamlah Paket Bahan Material yang Disediakan Kematan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Kelurahan Kematan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Kelurahan Mamlah Paket Bahan Material yang Disediakan Kematan, Semua Kelurahan Kelurahan Mamlah Mamla	2 8	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			130.000.000
2 S I 2 06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Amala Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Keamatan, Semua Kehrahan Amala Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Keamatan, Semua Kelurahan I paket I pak	2 8	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			19.500.000
2 8 1 206 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disdatan Kecamatan, Semua Kah Kota, Semua Kelurahan Selurahan	2 8	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	20.241.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			19.500.000
2 S I 2 06 7 Penyediaan Bahan Material Manufalerial Manufalerial yang Disediakan Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelarahan Kecamatan, Semua Kah Kota, Semua Kecamatan, Semua Kah Kota, Semua Kecamatan, Semua Manufalerial Manuf	2 8	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	7.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			13.000.000
2 8 1 2 06 Fasilitas Kunjungan Tamu Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kah Kondansi dan Konsultasi SKPD Aumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aumlah Laporan Penyelengaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aumlah Laporan P	2 8	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	10.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			19.500.000
2 S I 2 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Intanta Laponar (recycenggaraan Aqua Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi	2 8	1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.000.000
	2 8	1 2.06		Konsultasi SKPD	Kecamatan, Semua		50.604.000		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
	2 8	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%						2.025.000.000

				Tahun 2023	Са	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaai	1			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas			paian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 8 1 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	15 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Daerah ntapan Tata Kelola intahan yang Baik, Bersih dan	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 925.000.000
2 8 12.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		abel ntapan Tata Kelola intahan yang Baik, Bersih dan			500.000.000
2 8 12.07		Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua			Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akunta Peman	abel ntapan Tata Kelola			
2 8 1 2.07 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		Hasil	Pemeri Akunta	intahan yang Baik, Bersih dan abel			600.000.00
2 8 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua	100%	2.685.134.970	5	2	ntapan Tata Kelola			3.529.500.00
2 8 1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemeri Akunta	intahan yang Baik, Bersih dan abel		_	19.500.00
2 8 1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2.670.134.976	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peman Pemeri Akunta	ntapan Tata Kelola intahan yang Baik, Bersih dan abel			3.510.000.00
2 8 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaaan sarana dan prasarana apratur memedai		100%	60.000.00	D					169.000.00
2 8 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ntapan Tata Kelola intahan yang Baik, Bersih dan abel			130.000.00
2 8 1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	10.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ntapan Tata Kelola intahan yang Baik, Bersih dan abel			13.000.00
2 8 1 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peman Pemeri Akunta	ntapan Tata Kelola intahan yang Baik, Bersih dan abel			13.000.00
2 8 1 2.09 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Gedung		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peman	ntapan Tata Kelola intahan yang Baik, Bersih dan			13.000.00
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks pembangunan gender (IPG) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD		84,27 % 30 % 30 %	300.000.000	9	Akuna				1.015.000.00
2 8 2 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi,sinkronisasi dan Pendampingan PUG		1 Dokumen	100.000.000)					235.000.00
2 8 2 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			52.500.00
2 8 2 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		alisasi Pelayanan Kesehatan			32.500.00
2 8 2 2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				25.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optim	alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			97.500.00
2 8 2 2.01	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender		10 Perangkat Daerah	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optim	alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			52.500.00
2 8 2 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi kegiatan partisifasi		8 Kecamatan	100.000.000						195.000.00
2 8 2 2.02	Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Perempuan Sebanyak 3 kali Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Optim dan Per	alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			195.000.00
2 8 2 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan manajemen usaha dan		16 Kali	100.000.000)					585.000.00
2 8 2 2.03	Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pembinaan pelatihan kelompok usaha desa prima Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat		2 Lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			192.500.00
2 8 2 2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Advokasi dan Pendampingan Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		6 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			392.500.00
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		95%	40.000.00	0					216.995.49
8 3 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan program dan kegiatan perlindungan perempuan		5 kali%	40.000.00	D					77.317.50
8 3 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			50.700.00
2 8 3 2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perangkat Daerah		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			26.617.50
8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan dan mendapatkan pelayanan		100%							53.235.00
8 3 2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			53.235.00
8 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumblah koordinasi dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota		4 kali%							86.442.95
8 3 2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasirsa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			86.442.9
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak		84%	75.000.00	D					137.86
8 5 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan program dan kegiatan untuk ketersediaan data terpilah gender dan anak		83,50 %	75.000.00	D					137.86
8 5 2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			137.80
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak		88%	120.000.000)					371.800.00
2 8 6 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan kegiatan perlembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota		2 kali	70.000.000	0					169.000.00
2 8 6 2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Organisasi		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optim dan Per	alisasi Pelayanan Kesehatan ndidikan			84.500.000

				Tahun 2023						
	Kode	Umana / Bidana Umana / B.	Indilates Bassaco (F. 1997)	Labori Out		Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana: I	an Prioritas	Prakiraan Maju Target Capaian Kineria	Rencana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 8	6 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		84.500.000
2 8	6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota		4 kegiatan	50.000.000				202.800.000
2 8	6 2.02	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		101.400.000
2 8	6 2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		33.800.000
2 8	6 2.02	J Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		33.800.000
2 8	6 2.02	4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		33.800.000
2 8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum		95%	65.000.000				211.040.000
2 8	7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah Kabupaten/Kota		4 kegiatan	20.000.000				94.640.000
2 8	7 2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan lerhadap Anak Kewenangan Kabapaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewanagan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perangkat Daerah	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		94.640.000
2 8	7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase kasus kekerasan anak yang dilaporkan dan		95%	45.000.000				116.400.000
П		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapatkan pelayanan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang	Semua Kab/Kota, Semua						
2 8	7 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Layanan	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		30.420.000
2 8	7 2.02	3 Rengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		35.280.000
2 8	7 2.02	d Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		50.700.000
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				601.000.000				3.738.750.000
2 14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk		0,60%	180.000.000				520.000.000
2 14	2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk		100%	100.000.000				260.000.000
2 14	2 2.01	2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		260.000.000
2 14	2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1, Sinkronicasi Pendatasa Kelunga (PK), Laporan Dalap (Pengendalian Lapanga), Laporan Pékan Pelayanan Kontrasepol dan Laporan Umpan Balik: 12 balan dalam aplikasi New SfcA, 2) Penentatan dan Pelaporan dalam Aplikasi Statistik Rutin (SR) BKKBN; 3), Sewa Aplikasi zoom 12 bulan; Paker internet 12 bulan untuk 4 Pengelola dan RR Ti. Kah		12 Bulan	80.000.000				260.000.000
2 14	2 2.02	9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		65.000.000
2 14	2 2.02	11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		65.000.000
2 14	2 2.02	13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Dalap, Laporan Pelkon dan Laporan umpan balik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		65.000.000
2 14	2 2.02	14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		65.000.000
2 14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		79%	321.000.000				943.750.000
2 14	3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi dan KIE, Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang; Jumlah Penggerakan MUPEN		3 kegiatan	80.000.000				247.500.000
2 14	3 2.01	2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Keschatan dan Pendidikan		97.500.000
2 14	3 2.01	3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		75.000.000
2 14	3 2.01	4 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		75.000.000
2 14	3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB dalam Pencapaian Program Bangga Kencana		100%	140.000.000				325.000.000
2 14	3 2.02	l Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Organisasi	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		91.000.000
2 14	3 2.02	2 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		39.000.000
2 14	3 2.02	Benguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggenkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Kehurga Berencana Penyuluh Lapangan Kehurga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengeribangan Program Bangga Kencana (Penbangama Kelaurga, Kependudukan, dan Keliurga Berencana) untuk Petugas Kelaurga Berencanan Penyuluh Lapangan Kelaurga Berencana (PKB/PLKB)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	105.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		195.000.000
_			•		•			•		

			1 ahun 2023	Caj	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024		
K	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pı Nasional	rioritas Daerah	Target Cap Tolok Ukur	oaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 14	3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan faskes yang mendapatkan pendistribusian kebutuhan kontrasepsi dan mendapatkan pelayanan KB		100%	101.000.000		намона	Dati au	TOIGK CKUI	Target	306.250.000
2 14	3 2.03	3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5320 Orang	47.605.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			32.500.000
2 14	3 2.03	5 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dar Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KBan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	25.551.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			32.500.000
2 14	3 2.03	6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			97.500.000
2 14	3 2.03	10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			78.750.000
2 14	3 2.03	11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	27.844.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			65.000.000
2 14	3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pern serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dlam pelaksanaan pelayanan dan pembina kesejahteaan ber-KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan		100%							65.000.000
2 14	3 2.04	3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kampung KB		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			65.000.000
2 14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan Peserta KB Aktif (PA) Pada Keluarga miskin (KPS & KS 1)		100%	100.000.000						2.275.000.000
2 14	4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bina Keluarga 16 Kecamatan, UPPKA 16 Kecamatan, PIK Remaja 16 Kecamatan, Saka Kencana 16 Kecamatan, Expo UPPKA 1 Keg, Duta Genre 1 Kegiatan, Jambore Genre 1 Keg, Harganas Puasat, Provinsi dan Kabupaten 1 keg		70%							975.000.000
2 14	4 2.01	3 dan Penberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			325.000.000
2 14	4 2.01	5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 Kelompok		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			325.000.000
2 14	4 2.01	7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			325.000.000
2 14	4 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	rectuing gar CTT ACC)			100.000.000						1.300.000.000
2 14	4 2.02	Penguutan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi I Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Organisasi		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			325.000.000
2 14	4 2.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program 2 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisas Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargs (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			325.000,000
2 14	4 2.02	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Organisasi		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			325.000.000
2 14	4 2.02	4 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			325.000.000
		Dinas Ketahanan Pangan				9 323 377 650						18.528.444.472
2 9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.323.377.656						18.528.444.472
2 9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *		97,99 %	8.039.167.650						13.851.444.472
2 9	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun		97,99 %	260.638.329						295.000.000
2 9	1 2.01	l Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	34.999.850	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			35.000.000
2 9	1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	14.999.87	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000
2 9	1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokumen	14.999.886	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000
2 9	1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		1 Dokumen	14.999.972	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000
2 9	1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1 Dokumen	14.999.94	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000

					1 ahun 2023	Cap	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaai	1			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 9	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		3 Laporan	85.638.885	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 9	12.01	V NONTHIBES GAIL E COYUSHIAN E ESPORAN CAJAMIN KINE JA GAIL KANISSI KA	Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		З Lаролан	63.036.66	Hasil		Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah Penguatan Infrastruktur dasar dan			100.000.000
2 9	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	79.999.910	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 9	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan		97,99 %	4.231.880.145						7.550.000.000
2 9	1 2.02	1 Penyedisan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan		12 Bulan	4.080.880.904	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			6.000.000.000
2 9	1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium dan Uang Makan		l Dokumen	81.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			1.500.000.000
2 9	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan	34.999.548	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			25.000.000
2 9	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		2 Laporan	34.999.693	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			25.000.000
2 9	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD yang dilaksanakan		97,99 %							25.000.000
2 9	1 2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD		2 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			25.000.000
2 9	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				149.669.000						365.000.000
2 9	1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
2 9	1 2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000
2 9	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	74.950.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
2 9	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		20 Orang	74.719.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
2 9	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilayani		97,99 %	552.140.637						650.000.000
2 9	1 2.06	l Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		l Paket	9.978.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			10.000.000
2 9	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlangkapan Kantor yang Disediakan		l Paket	38.247.048	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			20.000.000
2 9	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		l Paket	9.995.550	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000
2 9	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	24.990.523	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			35.000.000
2 9	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	14.999.985	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000
2 9	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	103.999.560	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
2 9	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000
2 9	1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		l Laporan	49.978.971	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			45.000.000

					Tahun 2023	Car	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın .			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
I	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Toron+ 2022		Sumber Dana	P	rioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumper Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 9	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	249.951.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			350.000.000
2 9	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang		97,99 %	150.611.993						1.600.000.000
2 9	1 2.07	l Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		l Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			350.000.000
2 9	1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			400.000.000
2 9	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	24.974.183	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
2 9	1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	90.670.480	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
2 9	1 2.07	0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	34.967.331	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			350.000.000
2 9	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan		97,99 %	2.514.237.352						2.826.444.472
2 9	1 2.08	l Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		I Laporan	2.992.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			5.000.000
2 9	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	1 Laporan	42.495.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.000
2 9	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			20.000.000
2 9	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	2.448.749.252	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			2.726.444.472
2 9	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan		97,99 %	179.990.200						540.000.000
2 9	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		15 Unit	49.993.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 9	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarakan pajak dan Perizinannya		2 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 9	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	80.028.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			140.000.000
2 9	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi		25 Unit	14.989.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 9	1 2.09	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	14.980.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan		18 %	161.650.000						1.400.000.000
2 9	2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyediaan insfrastruktur pangan lainnya		18%	161.650.000	,					1.400.000.000
2 9	2 2.01	l Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia		2 Unit	120.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			600.000.000
2 9	2 2.01	2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang Tersedia		2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
2 9	2 2.01	3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	70	2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			250.000.000

					Tanun 2023	Caj	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
9 2 2.01	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastuktur Logistik		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 100.000.000
9 2 2.01	5 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur P	endukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan		I Dokumen	40.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KET	TAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari) Presentase ketersediaan informasi, pasokan, harga, dan akses pangan		2.096,2 Kkal 95 %	670.700.000						2.107.000.000
9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan La Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Ha	innya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Persentase pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lokal lainnya		94.65 %	280.000.000						1.000.000.000
9 3 2.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makan		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		l Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
9 3 2.01	2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.00
9 3 2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pe	kok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.00
9 3 2.01	4 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.00
9 3 2.01	5 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan		1 Unit	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			250.000.00
9 3 2.01	6 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan T	oko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		l Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.00
9 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupa	ten/Kota	Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah		20 Ton							575.000.00
9 3 2.02	l Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan K	abupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.00
9 3 2.02	3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Beras)		20 Ton		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			400.000.00
9 3 2.02	4 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		20 Ton		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			75.000.00
9 3 2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal y Pemerintah Provinsi	ang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	Jumlah Rakor penentuan harga minimum pangan lokal		1 Kali							50.000.0
9 3 2.03	l Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Panga	n Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		I Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.00
3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapi	ta/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)		2.096,20 kkal/kap/hari	390.700.000						482.000.0
9 3 2.04	l Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapit	a per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		l Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			67.000.00
9 3 2.04	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsum	si Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan		l Laporan	190.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			350.000.00
9 3 2.04	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsun	si per Kapita per Tahun	Jumlah Rakor Pemantauan dan evaluasi Target Konsumsi Pangan		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			65.000.00
9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		17,86 %	220.860.000						500.000.00
9 4 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Keca	matan	Kab. Kutai Barat		15 buku	56.200.000						100.000.00
9 4 2.01	l Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan K		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		2 Dokumen	56.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.00
9 4 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/	Kota	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		17.86%	164.660.000						400.000.00
9 4 2.02	l Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan K	abupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	60.080.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	17,86 %	50.000.00

					Tahun 2023							
						Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		apaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2025	r agu munkatii (Kp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 9	4 2.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencangkup dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	ı	l Dokumen	104.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	17,86 %	350.000.000
2 9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		78%	231.000.000						670.000.000
2 9	5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan		78%	231,000,000						670,000,000
2 9	5 2.01	1 Penguatan Kelembagaan Keumanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	segar Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina		1 Dokumen	85.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 9	5 2.01	2 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhar Daerah Kabupaten/Kota		1 Sertifikat		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			85.000.000
2 9	5 2.01	3 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		l Dokumen	56.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			90.000.000
2 9	5 2.01	4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		l Dokumen	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			95.000.000
2 9	5 2.01	5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			300.000.000
ш		Dinas Lingkungan Hidup				21.978.930.87	5					28.031.563.472
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				21.978.930.87	5					28.031.563.472
2 11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang		98%	16.598.930.87	5					19.792.563.472
2 11	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Meningkatnya Pelaporan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		97.99%	235.000.000)					280.000.000
2 11	1 2.01	l Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	2 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000
2 11	1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Barong	l dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000
2 11	1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong	l dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000
2 11	1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tongkok, Barong Tongkok Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong	l dokumen	15.000.00	Hasii					25.000.000
2 11	1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tongkok, Barong Tongkok	1 dokumen	20.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
2 11	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Iaporan	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000
2 11	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	5.573.619.40	,					8.298.252.004
2 11	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 bulan	5.343.619.40	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.431.050.004
2 11	1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.767.202.000
2 11	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	2 laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat		10 Orang	247.000.000						500.000.000
2 11	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					250.000.000
2 11	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	247.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					250.000.000
2 11	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	677.000.00						650.000.000
2 11	1 2.06	2 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 paket	194.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
2 11	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	_				50.000.000
2 11	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 paket	33.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
			•									

1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 Pemberjana Praceguaran danistas Kirawakan Lingkangan Hidap Kahupaten-Kasa Kadan Lingkangan Hidap Dalakanakan terbadap Dalakanakan Terbadap Mahila Dalamen Hingkangan Hidap Dalakanakan terbadap Dalakanakan Terbadap Mahila Dalamen Hingkangan Hidap Dalakanakan terbadap Dalakanakan Terbadap Mahila Dalamen Hingkangan Hidap Salamah Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Mahipaten Kasa Mingasi dan Adaptasi Perubahan Praceguaran danistas Kerawakan Lingkangan Hidap Mahipaten Kasa Mingasi dan Kabupaten Kasa Mingasi dan Kabupaten Kasa Mingasi dan Kabupaten Kasa Mingasi dan Kabupaten Kasa Mingasi dan Kerawakan Lingkangan Hidap pada Masyarakat Manganta di Kabupaten Kasa Mingasi dan Kerawakan Lingkangan Hidap Mahipaten Kasa Mingasi dan Kerawakan Lingkangan Hidap Mahipaten Kasa Mingasi dan Kerawakan Lingkangan Hidap Mahipaten Kasa Mingasi dan Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Kerawakan Lingkangan Hidap Kabupaten Kasa Mingasi dan Kerawakan Lingkangan Hidap Mahipaten Mingasi						Tahun 2023						n	T 1 2024
	,	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan					Prioritas	Target C		
Mathematical Content of the conten			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	v v v		Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah			Pagu Indikatif (Rp.)
Mathematical Content of the Conten	2 11	1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 laporan	360.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					250.000.000
No. Continue Con	ш				Kelurahan			Hasii					
1	2 11	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah	V I V I'D I D	12 Bulan	9.689.311.46	3				_	9.739.311.468
	2 11	1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tongkok, Barong	12 laporan	20.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000
Mathematical Content of the Conten	H	+									+		
Part	2 11	1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang Disediakan	Tongkok, Barong	12 laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
The content of the				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Barong			Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
	2 11	1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	yang Disediakan		12 Iaporan	9.519.311.46	Hasil					9.519.311.468
	2 11	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	177.000.000	P					325.000.000
No. Column Colu	2 11	1 2 09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		12 unit	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					100 000 000
	Ш	1	Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tongkok			Hasil					
Part	2 11	1 2.09 2			Tongkok, Barong	12 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					75.000.000
	+	+ +			Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			Dana Transfer Limum, Dana Ragi					
	2 11	1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 unit	37.000.00	Hasil					75.000.000
	2 11	1 2 09 9	Pemelibaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	Lunit	40,000,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75 000 000
	2111	1 2.09	r Chieman aan Renaumasi Ocuung Ramoi dan Bangunan Laminya	Dipelihara/Direhabilitasi		T unit	40.000.00	Hasil					75.000.000
No.	211	,	DDOCD AM DEDENC AN AAN I INCLUING AN HINDE			3 dokumon	379 000 000						650 000 000
	2111		I ROURAN I ERENCANAAN EENGRONGAN IIIDUI	dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten		3 dokumen	379.000.000						0.50.000.000
	2 11	2 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			1 dokumen	379.000.000						600.000.000
								Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
	2 11	2 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Kelurahan	I dokumen	259.000.00	Hasil					350.000.000
Part	2 11	2 2.01 2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			2 dokumen	120.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					250.000.000
1	ш			,				Hasil					
	2 11	2 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		K I K + 'P + C	1 dokumen						_	50.000.000
	2 11	2 2.02 3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan	Kecamatan, Semua	1 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
10 10 10 10 10 10 10 10	2 11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hidup yang Disusun Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kelurahan	70.88%	1.072.000.00)					1,625,000,000
The content of the	2 11	3 2.01		Jumlah Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan									
	ш							Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
10 10 10 10 10 10 10 10	2111	312.01 1			Kelurahan	26 Dokumen	360.000.000	Hasil					200.000.000
	2 11	3 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan			5 dokumen	144.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					100.000.000
1	Ш		Iklim	Hidup yang Dilaksanakan	Kelurahan			Hasil					
	2 11	3 2.01 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	Kecamatan, Semua	1 dokumen	194.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
No. 1					Kelurahan								
1	2 11	3 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	yang dilakukan penanggulangan di kabupaten Kutai Barat		4 kali	50.000.00	D					225.000.000
1	Ш			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan				Dana Transfer Limum - Dana Bagi					
1	2 11	3 2.02 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan		Hasil					75.000.000
1	+	+ +			Val. Vatal Danie Caman			Dana Transfer Ilmum - Dana Bagi					
1	2 11	3 2.02 2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Recamatan, Semua	4 lokasi	50.000.000	Hasil					50.000.000
No.	2 11	3 2 02 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidun			4 titik		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					100 000 000
The content of the	2	3,2.02	- Cigirinai - Ciccinaar darada Cerasikai Engadigai II dap	Hidup yang Dihentikan		Tille		Hasil					100.000.000
Part	2 11	3 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan pemulihan di kabunaten Kutai Barat		64%	324.000.000	o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					900.000.000
1													
Part	2 11	3 2.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah	Vacamatan Samua	10 dokumen	149,000 000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					100.000.000
Part					Kelurahan			Hasil					
To 1 2 1 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1						Dana Transfer Umum - Dana Bagi			1		
1 3 20 3 Koordinasi, Sinkroniasi dan Pelaksanaan Remodiasi Mediaman Remodiasi Pelaksanaan Remodiasi Pelaksanaa	2 11	3 2.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Kelurahan	4 dokumen	175.000.000	Hasil					200.000.000
Variable	2 11	3 2.03 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi			4 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					200.000.000
2 1 3 2 3 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Resbulitasi Pelaksanaan Res	${}+\!\!\!+\!\!\!\!+$	+ +			Kelurahan			Hasii			+	1	
S 20 3 20 3 5 Kordinani, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Mandah Dokumen Hasil Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Mandah Dokumen Hasil Kordinasi Mandah Pelaksanaan Restorasi Mandah Pelaksanaan Re	2 11	3 2.03 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Kecamatan, Semua	4 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
Pelaksanaan Restorasi Rest	+++				Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Rogi			+		
KEHATI Strong Kengelolaan Keanckaragaman Hayati Kahupaten/Kota Summa Keanckaragaman Hayati Kahupaten/Kota Summa Keanckaragaman Hayati Kahupaten/Kota Summa Kenana Induk Pengelolaan Keanckaragaman Hayati Kahupaten/Kota Summa Kenana Induk Pengelolaan Keanckaragaman Hayati Kahupaten/Kota Summa Keancharagaman Hayati Kahupat	2 11	3 2.03 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Pelaksanaan Restorasi		4 dokumen		Hasil					200.000.000
2 1 2 2 3 4 2 1 4 2 4 2 1 4 2 4	2 11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			64%	500.000.000						1.400.000.000
2 II 4 201 I Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanckaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehuti yar Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelindahan Kalaban Kata Kutu Barat, Semua Kelindahan Kalaban Kata Kutu Barat, Semua Kelindahan Kelin	2 11	4 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman		223 Kali	500,000,000						1.400.000.000
Dissum Reclamatant and Telephoran Kanakangaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Disasun Reclamatan, Semua Kata Kutai Barat, Semua Kelimban dingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Selamban Selam								Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 II 4 201 2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Lingku Kewanangan Hayati di Luar Kawasan Hutan Lingku Kewangan Hayati di Luar Kawasan Hutan Lingku Kewangan Hay	2 11	4 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Disusun	Recamatan, Semua	1 Dokumen	225.000.000	Hasil					200.000.000
Lingsup re-wengang Karlopaten Kota Kehrahan Kehrangang Anopaten Kota Kehrahan Kehrangang Anopaten Kota Laak Kehan Raya gang Dikelola Lingkap Kewenangang Kabupaten Kota Lingkap Kewenangang Kenantana, Semua Kenan	2 11	4 2.01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola		3 Ha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					300 000 000
2 11 4 2 01 3 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya Sundan Kebun	Щ	- L	MANIFE TOWN		Kelurahan			Hasil					500.000
Acturation	2 11	4 2.01 3	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua	5 Ha							50.000.000
	ш	1	l		Kelurahan	1	1	1	I	1	LAM	IPIRAN Rancangan Al	chir RKPD, 2023 Kahunaten Kutai

_					Tahun 2023							
	Code	F (B) F (B) (F) (C) F (C)				Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendana		Prioritas	Toward Co	Prakiraan Maju Ren paian Kineria	Cana Tahun 2024 Kebutuban Dana
,	Lode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 11	4 2.01 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	10 Ha	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				Tanga.	450.000.000
2 11	4 2.01 5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Ha	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
2 11	4 2.01 6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	200 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
2 11	4 2.01 7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	I unit	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN		Kelurahan								
2 11	5	BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola Sesuai Peraturan		95%	158.000.000						320.000.000
2 11	5 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase penyimpanan sementara limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha		95%	98.000.000						150.000.000
2 11	5 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					30.000.000
2 11	5 2.01 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 laporan	48.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					120.000.000
2 11	5 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000						170.000.000
2 11	5 2.02 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	5 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfiatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolana Limbah B3 dengan Pemeriatah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Penda Kabupaten Kola serat Pelaksaman Pengunyulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesual dengan Kewanangannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					120.000.000
2 11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan yang melakukan Ketaatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			260.000.000						250.000.000
2 11	6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH		50 Usaha dan/atau Kegiatan	260.000.000						250.000.000
2 11	6 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	6 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	6 2.01 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 11	6 2.01 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000
2 11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terfasilitasi dan terverifikasi serta telah mendapatkan penetapan hak		2 kegiatan	210.000.000						250.000.000
2 11	7 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,		1 dokumen	110.000.000						120.000.000
2 11	7 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	I Dokumen	110.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					120.000.000
2 11	7 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		3 kali	100.000.000						130.000.000
2 11	7 2.02 1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					130.000.000
2 11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah bimbingan teknis,pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup		6 kali	100.000.000						280.000.000
2 11	8 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6 kali	100.000.000						280.000.000
2 11	8 2.01 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					80.000.000
2 11	8 2.01 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					80.000.000
2 11	8 2.01 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					120.000.000
2 11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah masyarakat atau lembaga yang mendapatkan		3 Orang/Lembaga	99.000.000						150.000.000
2	0 2 01		penghargaan lingkungan hidup Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup		4 Kali	99,000,000						150,000,000
2 11	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Kah Kutai Barat Semua	7 Kall	99.000.000						150.000.000
2 11	9 2.01 1	Penilaian Kincija Masyanakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kecamatan, Semua Kelurahan	4 entitas	99.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
2 11 1	0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik		100%	240.000.000						350.000.000
2 11 1	0 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota		14 kali	240.000.000						350.000.000

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

	Kode	Livuran/Bidang Livuran/Program/Vogiatan/Sub Vogiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana		rioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
	Roue	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	indikator i rogram/ Regiatan/ Sub Regiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur		Pagu Indikatif (Rp.)
2 11	10 2.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daeran	1000k Ukur	Target	200.000.000
2 11	10 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	atau Melalui Pengadilan jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Persentase Kasus yang di selesaikan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
2 11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani		60%	2.362.000.000						2.964.000.000
2 11	11 2.01	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya persentase Pengelolaan Sampah		60 %	2.162.000.000						2.800.000.000
2 11	11 2.01	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Malakukan Pambatasan, Pendauran Lilang dan Pemanfaatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Iaporan	125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.000.000
211	1112.01	rengurangan Sampan dengan merakukan rembatasan, rendauran Orang dan remamaatan Kemban	Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kelurahan	i iapoian	123.000.000	Hasil					73.000.000
П		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut,	Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2111	11 2.01	Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kelurahan	9700000 ton	196.000.000	Hasil					225.000.000
2.11	11 2 01 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan Semua	2 kelompok	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					50.000.000
	11 2.01	- companier - con sera masyunan danin rengeronan renganpanan	Sampah Berbasis Masyarakat	Kelurahan	2 Keloliipok	70.000.000	Hasil					30.000.000
2 11	11 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi mangun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesui dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kelurahan	I dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000
2 11	11 2.01	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
2 1.	11 2.01	Banyadiaan Sarana dan Pracarana Bangalalaan Baryannabas Ji TD 4 /TDCT/CD 4 V-b	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk	Kab. Kutai Barat, Semua	3 unit	1.671.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					2.200.000.000
2 11	.12.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kecamatan, Semua Kelurahan	- unit	1.071.000.000	Hasil			I		2.200.000.000
2 11	11 2.02	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan	Jumlah Izin Pendaurulangan sampah oleh swasta		I izin usaha							29.000.000
	-	Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha	Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 11	11 2.02	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 rekomendasi		Hasil					29.000.000
2 11	11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah oleh Pihak Swasta		1 kali	200.000.000						135.000.000
2 11	11 2.03	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
2 11	11 2.03	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					35.000.000
2 11	11 2.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					75.000.000
			,			•		•	•			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				8.746.240.923	3					10.050.781.693
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.746.240.923	3					10.050.781.693
2 12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dengan Baik *		1 Tahun	8.206.290.923	5					8.526.681.693
2 12	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perenanaan dan evaluasi kinerja		1 Tahun	45,000,000						25,000,000
	1	,	perangkat daerah						Pemantapan Tata Kelola			-
2 12	1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			10.000.000
2 12	1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD		12 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.000.000
2 12	1 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16 Kecamatan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
2 12	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		26pns,78 tkk orang	4.362.201.516			- muddict			4.790.621.386
П			Tarradinya Gaji dan Tunjang ASM		26 DNC		Dana Transfer Umum - Dana					
2 12	1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaya Gaji dan Tunjangan ASN		26 PNS	3.810.901.516		4				3.810.901.516
Н	\vdash		Tersediaya Gaji dan Tunjangan ASN		78 TKK		Dana Transfer Umum - Dana	 		ļ		
2 12	1 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediaya Gaji dan Tunjangan ASN		26 PNS	531.300.000	Bagi Hasil					879.719.870
		<u> </u>	Tersediaya Gaji dan Tunjangan ASN		78 TKK			1				
2 12	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Kuangan akhir tahun tersusun		12 Bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana					50.000.000
2 12	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananyan Koordinasi dan Penyususnan Laporan		4 Semester	8.000.000	Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana					50.000.000
2 12	1 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat		1 Paket	115,000,000	Bagi Hasil					135,000,000
2 12	1 2.03		Daerah				Dana Transfer Umum - Dana					
2 12	1 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek Tugas Pokok dan Fungsi		1 kali	115.000.000	Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana		-			115.000.000
2 12		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		1 Paket		Bagi Hasil					20.000.000
2 12	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun	791.749.100						585.720.000
2 12	1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	537.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					70.000.000
2 12	1 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	1 Tahun	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					14.470.000
2 12	1 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan		1 Tahun	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					17.500.000
2 12	1 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		42 Eksemplar		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					8.000.000
2 12	1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	149.999.100	Dana Transfer Umum - Dana					460.750.000
Ш		<u> </u>	1	<u> </u>	l	,	Bagi Hasil	1	I .			

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

						Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:	n			Prakiraan Maju Ren	icana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target C: Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 12	1 2.06 1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1 Tahun	9.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Dacian	TOTOK CKIII	Target	15.000.000
2 12	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun	2.810.340.307	1					2.920.340.307
2 12	1 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat-menyurat / Dokumen Penting dan Pemerosesan SK Tenaga NON PNS BKPSDM		I Tahun	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.000.000
2 12	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	ŀ	1 Tahun	232.318.775	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					232.318.779
2 12	1 2.08						Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 12		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					60.000.000
2 12	1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemmeliharaan Barang Milik Daerah		1 Tahun	2.553.021.528	Hasil					2.553.021.528
2 12	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemmerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pajak Kendaraan		1 Tahun	82.000.000					ı	70.000.000
2 12	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 dan Roda 2		1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
2 12	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlekasananya Bahan Bakar Minyak / Gas/ Pelumas Pada Roda 4 dan 2		1 Tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.000.000
2 12	1 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Tahun	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000
2 12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk		1 Tahun	220.000.000						89.100.000
2 12	2 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Presentasi Penduduk di Kutai Barat		16 Kecamatan	220.000.000						89.100.000
2 12	2 2.01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					66.000.000
2 12	2 2.01	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan		1 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					23.100.000
2 12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		6 SDM	169.950.000					•	1.150.000.000
2 12	3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Alat Penunjang Pelayanan Pencatatan Sipil		1000 Display Box	135.000.000						570.000.000
2 12	3 2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		2300 Berkas	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					320.000.000
2 12	3 2.01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil (Kunjungan kerja, Akta Kelahiran 5.000, Akta Kematian 1.000, Akta Lainnya 500		3 Layanan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					250.000.000
2 12	3 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya inovasi pelayanan pencatatan sipil		16 Kecamatan	34.950.000						580.000.000
2 12	3 2.02	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah & Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dlm penertiban pelayanan pencatatan sipil		16 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
2 12	3 2.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan & pencatatan perstiwa penting terkait pencatatan sipil		8 Laporan	34.950.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					430.000.000
2 12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		I Tahun	120.000.000)					270.000.000
2 12	4 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan Dalam Bentuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan		1 Tahun							35.000.000
2 12	4 2.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		14 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					35.000.000
2 12	4 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		I Tahun	120.000.000						235.000.000
2 12	4 2.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					130.000.000
2 12	4 2.03	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan		5 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.000.000
2 12	4 2.03	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya "Penyajian Data Kependudukan Yang Akura	t	16 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					30.000.000
2 12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	dan Dapat Dipertanggungjawabkan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		1 Tahun	30.000.000	Hasil				<u>I</u>	15.000.000
2 12	5 2.01	Panyueunan Profil Kanandudukan	Terlaksananya Penysusunan Profil Kependudukan		1 Tahun	20,000,000						15 000 000
2 12	5 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Kabupaten Kutai Barat Terlaksananya Penysusunan Profil Kependudukan		1 Tahun	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi				1	15.000.000
2 12	5 2.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Kutai Barat		1 Dokumen	30.000.000	Hasil		1			15.000.000
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				18.111.891.479						25.111.031.800
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.111.891.479						25.111.031.800
2 13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan penganggaran dan			14.939.154.158						19.279.031.800
2 13	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	305.000.000						185.000.000
2 13	1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	\$0,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	45,000,000
2 13	1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersediunya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencamaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	25,000,000

					1 anun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pr Nasional	oritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 13	1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporar Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	***************************************	Janes and	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	20,000,000
2 13	1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	20.000.000
2 13	1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	20.000.000
2 13	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	30,000,000
2 13	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	25.000.000
2 13	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	9.232.333.738						15.044.031.800
2 13	1 2.02	I Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	9.108.833.738	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	14.997.031.800
2 13	1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	20,000,000
2 13	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	38.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	15,000,000
2 13	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	12.000.000
2 13	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Administarasi Perangkat Daerah		100%	200.000.000						115.000.000
												-hi- DVDD 2022 Kehester K-stei De

					Tahun 2023	Car	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan					rioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
				,	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 13	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	100 %	115.000.000
212	1 200	ALLE ST. B. LAB. I	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Umum		100%	645.000.000						445,000,000
2 13	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangakat Daerah		100%	645.000.000				Maninghathan		445.000.000
2 13	1 2.06	l Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	I Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan, Khusus IT	100 %	20.000.000
2 13	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	180.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan, Khusus IT	100 %	60.000.000
2 13	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	135.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan, Khusus IT	100 %	40.000.000
2 13	1 2.06	5 Penyediaan Burang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan, Khusus IT	100 %	25.000.000
2 13	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan, Khusus IT	100 %	300.000.000
2 13	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	4.366.820.420)					3.380.000.000
2 13	1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	9.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	10.000.000
2 13	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrib	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	70.000.000
2 13	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	4.287.820.420	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	3,300,000,000
2 13	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksnanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	190.000.000						110.000.000
	1 2.09		Penjanag Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan		16 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	65,000,000
2 13	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	20.000.000

					Tahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n	Prakiraan Maju Ren	icana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 13	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laimya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional Dacrah	Meningkatkan Pertairipasi Masyarakat Dalam Perecamaan, Pelaksaman dan Pengamasan Program Pemberdayaan Masyarakat	Pagu Indikatif (Rp.) 25 000 000
2 12	-	BROCK AM BEN'ATA AN DECA	n		200/	300,000,000				700,000,000
2 13	2 2 01	PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa	Prentase Tercapai nya Penataan Desa Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa		30% 30%	300.000.000				700.000.000
2 13	2 2.01		Terlaksananya Pembentukan ,Penghapusan , Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Desa		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Perangkat Kualitas SDM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Bidang Tata Kelola Desa, Kecuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung	150,000,000
2 13	2 2.01	2 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Desa		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Bidang Tata Kelola Desa, Keuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung	75.000.000
2 13	2 2.01	3 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksanaya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 Desa		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Budang Tata Kelola Desa, Kecuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung	\$0,000,000
2 13	2 2.01	4 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksanaya fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Desa	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Bidang Tata Kelola Disa, Keuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung	75,000,000
2 13	2 2.01	5 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Penetapan Kesatuun Masyarakat HUkum Ada dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Desa		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Budang Tata Kelola Desa, Kecuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung	50,000,000
2 13	2 2.01	6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasaana Desa		10 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Kampung Khasusnya Terkait Bidang Tata Keolai Desa, Kecuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung	300.000.000
2 13		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar Desa		12%	200.000.000				700.000.000
2 13	3 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksanya Fasilitasi Kerjama AntarDesa/ Kampung Terlaksannya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kab, Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.% 4 Dokumen	260,696,696 200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitus SIM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Bidang Tala Kolola Desa, Keungan dan Aset Desa dan Badan Usalan Milik Kampung (BiMKamp); dan	760.000.000 250.000.000

					1 ahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pric Nasional	oritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 1	3 3 2.01	2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfailitasinya Kerjasma Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Bidang Tata Kelola Desa, Keuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)t; dan	8%	250.000.000
2 1	3 3 2.01	3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ferfaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Kampung Khususnya Terkait Bidang Tata Kelola Desa, Keuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)l; dan	8 %	200.000.000
	3 4		Persentase Desa Maju Ferlaksannya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi		58 %	1.172.737.321						1.532.000.000
2 1	3 4 2.01	remonaan dan rengawasan renyetenggaraan Administrasi remerintahan Desa	Permerintahan Desai Kampung Ferlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Desa		190 Dokumen	1.172.737.321	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	1.532.000.000
2 1	3 4 2.01	2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Ferfaksnanya Falilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	130,000,000
2 1	3 4 2.01	3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Ferlakanya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	112,000,000
2 1	3 4 2.01	4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Ferlaksanya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 Dokumen	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	120,000,000
2 1	3 4 2.01	5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Ferlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	170,000,000
2 1	3 4 2.01	8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Ferlaksanyanya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa Jan Lembaga Kerjasama Antur Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	140,000,000

					1 ahun 2023	Cap	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	1			Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		oritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 13	4 2.01	9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Falilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa/Kampung	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 100.000.000
2 13	4 2.01	l Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Faliiitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	150.000.000
2 13	4 2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	150,000,000
2 13	4 2.01	4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapsitas Anggota BPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	150.000.000
2 13	4 2.01	8 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Falilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	200.000.000
2 13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		64 % 3.4 % 64 % 64 %	1.500.000.000						2.900.000.000
2 13	5 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Desa dan		100%	1,500,000,000						2.900.000.000
2 13	5 2.01	Pelakuwa Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota I Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Terlaksananya Identifikasi dan Iventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung	100 %	220,000,000
2 13	5 2.01	Fasiiltasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaa Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	n Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	176.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung	100 %	100.000.000
2 13	5 2.01	3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarun,) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 Orang	674.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung	100 %	1.670.000.000
2 13	5 2.01	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung	100 %	180.000.000

					Tahun 2023	Car	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	ı			Prakiraan Maju Ren	icana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas	Target Cap	aian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 13	5 2.01	6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah	Tolok Ukur Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 280.000.000
2 13	5 2.01	7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksanya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan 1 Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung	00 %	300.000.000
2 13	5 2.01	g Easilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggarnan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahternan Keluarga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan 1 Lembaga Adat dalam Pembangunan Kampung	00 %	150,000,000
		Dinas Perhubungan				35.986.035.568						25.232.901.742
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				34.525.331.630						25.232.901.742
2 15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah		98 %	11.679.057.300						14.432.822.202
2 15	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang telah disusun		98%	89.909.980						60.000.000
2 15	1 2.01	l Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.999.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		30.000.000
2 15	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			29.799.880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		
2 15	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.110.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					30.000.000
2 15	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang telah		100%	5.662.686.802	Hasii					6.895.086.972
215	112.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	lundek Orone vann Manaine Caii der Tunianen ASN			5 622 600 462	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					6.189.366.972
2 15	1 2,02	i Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			5.632.690.462	Dana Transfer Omum - Dana Bagi Hasil					6.189.366.972
2 15	1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporar				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					675.720.000
2 15	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			14.996.850	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000
2 15	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			14.999.490	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000
2 15	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakar	1	100%	50.000.000						60.000.000
2 15	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					60.000.000
2 15	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilayani		95%	530,384,980	Hasil					664.680.030
2 15	12.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				Dana Transfer Umum - Dana Bagi					234.680.030
2 13	12.00		Disediakan				Hasil					
2 15	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 15	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			20.763.270	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000
2 15	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			44.704.710	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					60.000.000
2 15	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			249.917.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000
2 15	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan		98%	5.095.724.168						6.458.055.200
2 15	1 2.08	l Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					3.000.000
2 15	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang Disediakan	3		59.968.560	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					60.000.000
2 15	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5.032.755.608	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.395.055.200
2 15	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan		90%	250.351.370						295.000.000
2 15	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			69.861.370	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					70.000.000
2 15	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			80.490.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					100.000.000
2 15	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
Ш						l	Hasil					

					Tahun 2023						
Ke	ıde	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			oaian Kinerja dan Kerangka Pendana: 	n Prioritas	Target Ca	Prakiraan Maju Ren paian Kinerja	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
K	iuc	Otusani Buang Otusani Hogranii Regiatani Sub Regiatani	inukatoi 110graii/ Regiatai/ Sub Regiatai	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 15 1	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				125.000.000
2 15 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat		97%	2.173.074.330					8.011.879.540
2 15 2		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ		27 Dokumen						300.000.000
2 15 2	2.01 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan I.I.AJ Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2 15 2	2.01 2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150.000.000
2 15 2	2.01 3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150.000.000
2 15 2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan		90%	1.668.074.330					1.941.879.540
2 15 2	2.02 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			958.074.330	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				388.394.040
2 15 2	2.02 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			710.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				393.485.500
2 15 2	2.02 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1.060.000.000
2 15 2	2.02 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi				100.000.000
2 15 2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan terminal tipe c		90%						1.750.000.000
2 15 2	2.03 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150.000.000
2 15 2	2.03 2	Pembangunan Gedung Terminal					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1.500.000.000
2 15 2	2.03 5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100.000.000
2 15 2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan		90%		Hasii				250.000.000
2 15 2	2.04 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolchan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembangunan Fasilitas Parkir				Dana Transfer Umum - Dana Bagi				150.000.000
2 15 2	2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					Hasil -Dana Transfer Umum - Dana Bagi				100.000.000
215 2	2.05	Kewenangan Kabupaten/Kota Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n		1000/		Hasil				2.250.000.000
2 15 2	2.05 1	rengujian Berkasa Kendaraan Bermotor Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya jumlah KIR		100%		Dana Transfer Umum - Dana Bagi				2.000.000.000
2 15 2	2.05 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Dana Transfer Umum - Dana Bagi				50.000.000
2 15 2	2.05 3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Dana Transfer Umum - Dana Bagi				50.000.000
2 15 2	2.05 6	tdentifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji					Dana Transfer Umum - Dana Bagi				50.000.000
2 15 2	2.05 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Dana Transfer Umum - Dana Bagi				50.000.000
2 15 2	2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Dana Transfer Umum - Dana Bagi				50.000.000
2 15 2	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jala		90%	397.500.000	Hasii				725.000.000
2 15 2	2.06 1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cittur Jai ingan Jaia				-Dana Transfer Umum - Dana Bagi				350.000.000
2 15 2	2.06 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi				-
2 15 2	2.06 3	uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi				150.000.000
2 15 2	2.06 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			397.500.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi				150.000.000
2 15 2	2.06 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi				75.000.000
2 15 2	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu		90%		Hasil				185.000.000
2 15 2	2.07 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Lintas				Dana Transfer Umum - Dana Bagi				50.000.000
2 15 2	2.07 2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi				100.000.000
2 15 2	2.07 4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					Hasil -Dana Transfer Umum - Dana Bagi				35.000.000
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Razia Kendaraan Muat Barang		98%	107.500.000	Hasil				510.000.000
ПП			Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan		,,,,						
2 15 2	2.08 1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kapasitasnya			107.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				390.000.000
\blacksquare		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	Persentase Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120.000.000
2 15 2	2.09	Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dan/atau Barang		96%						100.000.000

						Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Prakiraan Maju Rene	
1	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 15	2 2.09 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Sonat	Dati dii	TOTOR URIII	get	100.000.000
2 15	2 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		1 Dokumen		Hasil					
2 15	2 2.11 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Availi				Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase orang/ barang yang terangkut		98%	20.673.200.000	HäSII					1.788.200.000
2 15	3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin usaha angkutan laut		98%							75.000.000
2 15	3 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
2 15	3 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum - Dana Bagi					50.000.000
2 15	3 2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dermaga terbangun		96%		4.444/51					75.000.000
2 15	3 2.04 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 15	3 2.04 2	secaria глектовия. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota				-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.000.000
2 15	3 2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Penerbitan Ijin Usaha		98%		4.444/51					75.000.000
2 15	3 2.05 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.000.000
2 15	3 2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan lintas penyeberangan		6 dokumen		nasii					75.000.000
2 15	3 2.06 1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api					Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 15	3 2.06 2	Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.000.000
2 15	3 2.07	Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	jumlah dokumen lintas penyeberangan kapal		2 dokumen		Hasil					175.000.000
2 15	3 2.07 1	Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	J				Dana Transfer Umum - Dana Bagi					100.000.000
2 15	3 2.07 2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					75.000.000
2 15	3 2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan	iumlah dokumen rencana induk		2 dokumen		Hasil					
2 15	3 2.10 1	(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelaksanaan Penyusuan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal					Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 15	3 2.10 2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 15	3 2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pelabuhan		2 dokumen	750.000.000	Hasil					
2 15	3 2.11 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau			750.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
2 15	3 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase dermaga yg terbangun		98%	120.000.000	114511					450.000.000
2 15	3 2.12 2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun			120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					400.000.000
2 15	3 2.12 4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
2 15	3 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase pembangunan ponton pender parkir		98%	19.803.200.000						863.200.000
2 15	3 2.13 2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun			19.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
2 15	3 2.13 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara			503.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					403.200.000
2 15	3 2.13 4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					460.000.000
2 15		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen rencana induk perkeretaapian		7% I Dokumen							1.000.000.000 1.000.000.000
2 15 2 15	5 2.01 1	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian			1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					1.000.000.000
ш	1_1_			1			Hasil	l	1	1		
211		UPT. Pelabuhan				817.150.274						1.199.607.200
2 15 2 15	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				817.150.274 817.150.274						1.199.607.200 1.187.607.200
2 15	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										24.000.000
2 15	1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	3 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					14.000.000
2 15	1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000
2 15	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Kutai Barat, Semua			•					104.000.000
2 15	1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					90.000.000
2 15	1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					7.000.000

					Tahun 2023	Con	aian Kinerja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Rei	soana Tahun 2024
١,	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan				an .	Prioritas	Target C	ipaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 15	1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					7.000.000
2 15	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										15.000.000
2.15	112.05 11	Dimbinus Tahri, Indonestri Bentun Berndun Hadanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Barat, Semua	20		Dane Transfer Harris Dane Basi					15 000 000
2 15	112.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000
2 15	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				37.793.000						185.000.000
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab. Kutai Barat, Semua								
2 15	1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					57.000.000
				Kab. Kutai Barat, Semua			1111111					
2 15	1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					13.000.000
H			I IIII I CIL I D	Kab. Kutai Barat, Semua			Hasii					
2 15	1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan, Semua	3 Paket	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					12.000.000
+++	-			Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Hasil			-		
2 15	1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan, Semua	2 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					10.000.000
+++	-			Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Hasil					
2 15	1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan, Semua	12 Laporan	37.793.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					93.000.000
ш			Konsultasi SKPD	Kelurahan	-		Hasil					
2 15	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Val. Votsi Danet Canno		779.357.274					1	827.107.200
2 15	1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					3.500.000
ш				Kelurahan	· · · · · ·		Hasil					
2.15	1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	29.614.650	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					39.616.000
2 13	1 2.00	r Gryculaan Jasa Komunikasi, Sunioer Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan	12 Lapotan	29.014.030	Hasil					39.010.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kab. Kutai Barat, Semua								
2 15	1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					12.000.000
+++				Kab. Kutai Barat, Semua			114511					
2 15	1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kecamatan, Semua	12 Laporan	749.742.624	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					771.991.200
2 15	1 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kelurahan			Hasil				<u> </u>	32.500.000
2 13			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas								1	
2 15	1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					12.500.000
+++	-		†	Kab. Kutai Barat, Semua			Hasil			-		
2 15	1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Kecamatan, Semua	5 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					20.000.000
			petiterinaraan/tenabintasi	Kelurahan			Hasil					
2 15		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										12.000.000
2 15	3 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau										12.000.000
21.5	2012	n i nii i n	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua								12.000.000
2 13	3 2.13	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Sungai dan Dana	Kelurahan	5 Laporan	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					12.000.000
ш		UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor				643.553.664						3.560.040.000
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										3.560.040.000
2 15	-					643.553.664						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				643.553.664 643.553.664						2.349.040.000
2 15											ı	
2 15		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dana Transfer Umum - Dana Bagi					2.349.040.000
2 15	1 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000
2 15	1 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					2.349.040.000 60.000.000
2 15	1 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Hasil					2,349,040,000 60,000,000 20,000,000
2 15 2 15 2 15	1 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencianaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencianaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349,040,000 60,000,000 20,000,000 20,000,000
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencianan, Penganggaran, dan Evaluad Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Hasil					2,349,840,000 60,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencianaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencianaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349,040,000 60,000,000 20,000,000 20,000,000
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evaluak Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.849.800 68.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencianan, Penganggaran, dan Evaluad Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2,349,840,000 60,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349,640,000 66,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evaluak Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.849.800 68.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 1 2.01 1 1 2.01 6 1 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencianan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.800 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349,640,000 66,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 1 1 2.02 2 1 1 2.02 5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persenanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 1 2.01 1 1 2.01 6 1 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencianan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.800 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 1 2.01 1 1 2.01 6 1 1 2.02 1 1 2.02 2 1 1 2.02 5 1 1 2.02 7	PROGEAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Percenanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwalanan/Semesteran SKPD					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000 412.720.000 172.800.000 20.000.000 20.000.000
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persecanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 442.720.000 172.800.000 20.000.000 20.000.000 102.000.000
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 1 2.01 1 1 2.01 6 1 1 2.02 1 1 2.02 2 1 1 2.02 5 1 1 2.02 7	PROGEAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Percenanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwalanan/Semesteran SKPD					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000 412.720.000 172.800.000 20.000.000 20.000.000
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.02 1 1 2.02 2 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.05 1 1 2.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persecanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 442.720.000 172.800.000 20.000.000 20.000.000 102.000.000
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persecanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 442.720.000 172.800.000 20.000.000 20.000.000 102.000.000
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2 1 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Pengangaran, dan Evahand Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evahasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan/Triwalanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				643.583.664	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.800 66.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2 1 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.800 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2 1 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 1 2.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Pengangaran, dan Evahand Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evahasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan/Triwalanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				643.583.664	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.02 7 1 2.05 1 1 2.05 1 1 2.05 1 1 2.05 1 1 2.06 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah				643.583.664	Itasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01	PERGEAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perescananan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosinlisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Penlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor Peranekat Da-rah		3 Paket	643.583.664	Itasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.846.000 66.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01 1 1 2.01 6 1 2.01 7 1 2.02 1 1 2.02 2 1 2.02 5 1 2.02 7 1 2.02 7 1 2.05 1 1 2.05 1 1 2.05 1 1 2.05 1 1 2.06 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan logistik kantor Perangkat Daerah		3 Paket	643.583.664	Itasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.000 6.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARRAH KABUPATEN/KOTA Perescanasan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Perangkat			643.583.664	Itasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Dana Transfer Umum - Dana Bagi					2.349.840.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 2.01	PERGEAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perescananan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN Penyedinan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosinlisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Penlatan dan Perlengkapan Kantor			3 Paket	643.583.664	Itasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.000 66.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 201	PROGRAM PEXUSJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persenanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kroegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Perangkat Daerah,		2 Paket	643.583.664	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.000 66.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARRAH KABUPATEN/KOTA Perescanasan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Perangkat			643.583.664	Itasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Dana Transfer Umum - Dana Bagi					2.349.840.000 66.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 201	PERGEAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARRAH KABUPATEN/KOTA Persecanasan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Penlatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Perangkat Daerah, Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan		2 Paket 2 Paket	643.553.664 106.960.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 201	PROGRAM PEXUSJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persenanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cupaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kroegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Perangkat Daerah, Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		2 Paket	643.553.664 106.960.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.840.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15	1 201	PERGEAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARRAH KABUPATEN/KOTA Persecanasan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Penturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Penlatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Perangkat Daerah, Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan		2 Paket 2 Paket	643.553.664 106.960.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.349.040.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.00

_					1	Tahun 2023					1		
			ri (ni) ri (n. (r.) (n. r.)				Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana		rioritas	Townst Co	Prakiraan Maju Ren paian Kinerja	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
	Kode	le	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional		Tolok Ukur	Target	Rebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 16	1 1 2 (0.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				536.593.664		Nasionai	Daerah	1000k UKUF	Target	940.320.000
2 1.	3 1 2.0	.00	i enyemaan sasa i enunjang trusan i emerintanan baeran				330.373.00						940.320.000
2 15	5 1 2.0	.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000
2 15	5 1 2.0	.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik	3	12 Laporan	49.093.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					130.000.000
2 15	5 1 2.0	.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		3 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000
2 15	5 1 2.0	.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	487.499.864	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					505.320.000
2 15	5 1 2.0	.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										190.000.000
2 15	5 1 2.0	.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya		1 Unit		-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					90.000.000
2 15	5 1 2.0	.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000
2 15	5 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										1.211.000.000
2 15	5 2 2.0	.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										1.211.000.000
2 15	5 2 2.0	.05 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					531.000.000
2 15	5 2 2.0	.05 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
2 15	5 2 2.0	.05 5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					60.000.000
2 15	5 2 2.0	.05 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					240.000.000
2 15	5 2 2.0	.05 9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi					180.000.000
ш	1 1 .			L	l.	l	l	nasii	1	l	l .		
			Dinas Komunikasi dan Informatika				11.260.230.442	,					12.706.216.499
2 14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.158.971.852						
2 10	5	_		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan	1	ı							12.401.216.499
2 10	5 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan *		100%	9.528.459.518	3					8.737.216.499
2 10	5 1 2.0	.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		100%	42,000,000						115.000.000
			,	Kinerja Perangkat Daerah			12.000000						
2 16	5 1 2.0	.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja OPD)		2 Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			16.500.000
2 16	5 1 2.0	:.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPJ, TAPKIN, LKJIP)		5 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			57.000.000
2 16	5 1 2.0	:.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reforamasi Birokrasi		2 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			41.500.000
2 10	5 1 2.0	.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	5.723.596.000)					4.424.504.935
2 16	П	.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pengeluaran Rutin Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	5.687.596.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			4.358.504.935
2 16	5 1 2.0	.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			22.000.000
2 16	5 1 2.0	.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		l Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			22,000.000
2 16	5 1 2.0	.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			22.000.000
2 10	5 1 2.0	.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Sesuai dengan Aturan		100%	154.212.954						250.000.000
2 16	5 1 2.0	:.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai yang Diikuti		3 Kali	63.709.518	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 16		.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang Diikuti		5 Kali	90.503.430	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
2 10	5 1 2.0	.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	319.959.000						334.500.000
2 16	5 1 2.0	1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Jenis	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			22.000.000
					•	•	•	•	•				·

					Tahun 2023	Cu	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan					ioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 16	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		20 Jenis	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			16.500.000
2 16	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengeluaran Rutin Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			27.500.000
2 16	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan		5 Jenis	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			16.500.000
2 16	1 2.06	7 Penyediaan Bahan Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material		4 Kali	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			22.000.000
2 16	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		21 Kali	229.959.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			230.000.000
2 16	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	203.271.100						102.000.000
2 16	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10 Jenis	162.271.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			40.000.000
2 16	1 2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Laimnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10 Jenis	41.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			62.000.000
2 16	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.911.506.564						3.321.211.564
2 16	1 2.08	I Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		218 Materai	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			3.025.000
2 16	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengeluaraan Rutin Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	90.186.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 16	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengeluaran Rutin Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	2.820.320.564	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			3.218.186.564
2 16	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	173.913.900						190.000.000
2 16	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4 Triwulan	46.219.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			50.000.000
2 16	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		4 Triwulan	92.694.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			20.000.000
2 16	1 2.09	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		4 Triwulan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			45.000.000
2 16	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laimnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4 Triwulan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			45.000.000
2 16	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Sarana dar Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4 Triwulan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000
2 16	1 2.09	111 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Sarana dar Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Jenis	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			15.000.000
2 16	_	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebaran Informasi Publik Persentase Informasi, Dokumentasi Kegiatan		66%	271.762.020						1.659.000.000
2 16	2 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah yang Dipublikasi		66%	271.762.026						1.659.000.000
2 16	2 2.01	l Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		5 Dokumen	16.675.254	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			55.000.000
2 16	2 2.01	2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		1 Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			110.000.000

					Tanun 2023	Ca	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 16	2 2.01	4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Dokumen	130.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	TORK UKUF	Target	350.000.000
2 16	2 2.01	5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 16	2 2.01	6 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		5 Dokumen	15.853.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			220.000.000
2 16	2 2.01	7 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		2 Layanan	33.226.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			534.000.000
2 16	2 2.01	8 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		1 Dokumen	10.165.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			90.000.000
2 16	2 2.01 1	2 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Infomrasi Program atau Kebijakan		10 Dokumen	25.337.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			200.000.000
2 16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan secara online		40 %	1.358.750.308						2.005.000.000
2 16	3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang diselenggarakan secara online Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat		92%	1.257.491.718						770.000.000
2 16	3 2.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			160.000.000
2 16	3 2.01	3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		28 Unit	1.237.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			610.000.000
2 16	3 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Daerah		6%	101.258.590						1.235.000.000
2 16	3 2.02	2 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			100.000.000
2 16	3 2.02	3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	I Unit	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			150.000.000
2 16	3 2.02	4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			420.000.000
2 16	3 2.02	7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		I Unit	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			500.000.000
2 16	3 2.02 1	l Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		1 Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			65.000.000
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				40.503.430						110.000.000
2 20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalan menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	21%	40.503.436						110.000.000
2 20	2 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral		67%	40.503.430						110.000.000
2 20	2 2.01	l Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		l Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			55.000.000
2 20	2 2.01	2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		3 Orang	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			55.000.000
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				60.755.154						195.000.000
2 21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah		92%	60.755.154						195.000.000
2 21	2 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		100%	40.503.430						135.000.000
2 21	2 2.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		10 Dokumen	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			55.000.000
2 21	2 2.01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabuputen/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			80.000.000

					Tahun 2023	Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Re	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	ioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	npaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 21	2 2.02	2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota P	resentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan		100%	20.251.718		rasional	Datran	TOTOK UKUI'	rarget	Pagu Indikatif (Kp.)
2 21	2 2.02		rosedur Pengamanan Informasi umlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring omunikasi Sandi		5 Perangkat Daerah	20.251.718	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah			60.000.000
П		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				18.639.422.846						32.283.215.297
2 17	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.286.062.935						19.201.412.221
2 17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	leningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan		93 %	13.286.062.938						19.201.412.221
2 17	1 2.01	P	erkantoran erlaksanannya Perencanaan Penganggaran Perangkat		93 %	144.997.900						214.499.270
- 11	1 2.01	D	baerah		50 70	141,571,500			Penguatan Infrastruktur dasar dan	Capaian		214,477,270
2 17	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Je	umlah Dokumen Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	7 Dokumen	64.999.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tengadan minastukut dasar dari Infrastruktur Kluster Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	64.999.500
2 17	1 2.01	l 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ju	umlah Laporan Capaian	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 laporan	14.999.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	74.749.885
2 17	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ju	umlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Laporan	64.999.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	74.749.885
2 17	1 2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah P	ersentase administrasi keuangan yang dilaksanakan		100%	5.787.776.658						5.906.292.842
2 17	1 2.02	2 I Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Ju	umlah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Bulan	5.635.618.158	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	5.541.434.222
2 17	1 2.02	2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok		122.160.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	330.360.000
2 17	1 2.02		umlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan kir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Dokumen	14.999.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	17.249.310
2 17	1 2.02		umlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Laporan	14.999.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	17.249.310
2 17	1 2.05	5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pe	ersentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		93 %	150.000.000						150.000.000
2 17	1 2.05	U Simongan Teknis Imperientasi Ferantian Feruntang-Ontangan	umlah Bimbingan Teknisi Implementasi Perundang- indangan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	5 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	150.000.000
2 17	1 2.06	6 Administrasi Umum Perangkat Daerah P.	ersentase Peningkatan Pelayanan Administrasi erkantoran		97%	527.221.501						785.908.972
2 17	1 2.06	6 I Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ju	umlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Unit	6.984.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 Persen	8.033.900
2 17	1 2.06	6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Je	umlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	50 Unit	149.762.670	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 Persen	172.230.187
2 17	1 2.06	6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ju	umlah Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Bulan	38.996.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 Persen	200.100.000
2 17	1 2.06	6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ja	umlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	500 Lembar	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 Persen	13.800.000
2 17	1 2.06		umlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- ndangan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	720 Exempli	1.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 Persen	1.495.000
2 17	1 2.06	6 7 Penyediaan Bahan Material Ju	umlah Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Bulan	34,999.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 Persen	40.249.885
		- · ·					•			1444	DIDAN Deserted A	khir RKPD 2023 Kabupaten Kutai E

				1 ahun 2023	Car	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rene	cana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pr Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	npaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 17 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	10 Kali	283.178.431	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	. vastoum	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran		350,000,000
2 17 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan		93 %	5.266.596.532						4.441.961.028
2 17 1 2.08	I Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	90 Dokumen	6.982.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	8.035.740
2 17 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Unit	133.078.752	2 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	153.045.312
2 17 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	80.109.000
2 17 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Bulan	5.066.534.980	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	4.200.770.976
2 17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan		93 %	157.760.752						161.392.150
2 17 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	, Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	11 Unit	133.078.752	2 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	132.919.300
2 17 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabiltasi Gudang Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Unit	14.762.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	16.976.300
2 17 1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharnan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Unit	9.920.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	92 %	11.496.550
2 17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan Palayanan izin usaha simpan pinjam yang disetujui		5 koperas							189.700.000
2 17 2 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Koperasi		5 koperas							126.500.000
2 17 2 2.01	1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			126.500.000
2 17 2 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										63.200.000
2 17 2 2.02	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			63.200.000
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Jumlah Koperasi yang aktif		382 Koperasi	255.854.796						2.075.787.950
2 17 3 2.01	Wilavah Keangeotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		5 koperasi	255.854.796 155.854.796	5 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			2.075.787.950 1.037.893.975
2 17 3 2.01	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000			Pengembangan sentra-sentra			1.037.893.975
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP Koperasi sehat		5 koperasi		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		industri komoditas unggulan lokal			1.010.310.536
2 17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam		5 koperasi							1.010.310.536
2 17 4 2.01	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota				x	k Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			505.155.268
2 17 4 2.01	2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			505.155.268
		Jumlah Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan									
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	pelatihan		30 koperaso	200.000.000	<u> </u>				\	444.475.000

The content of the					1 ahun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
The content of the	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
Part	2 17 5 2.01	l Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	- VILAGORIA	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	1000 000	Tinget	444.475.000
The content of the	2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		5 koperasi	150.000.000						986.173.473
	2 17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Pemberdayaan Perlindungan		5 koperasi	150.000.000						986.173.473
Part	2 17 6 2.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	KUDETAN			150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan			986.173.473
	2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Aktif		0,88 %	505.854.796						2.378.648.500
	2 17 7 2.01		Meningkatnya Jumlah Lisaha Baru		15 Usaha Baru	505.854.796						2.378.648.500
Part	2 17 7 2.01		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	manajemen	0,44 %	792.882.833
1	2 17 7 2.01	2 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		l Unit Usaha	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	manajemen	0,44 %	396.441.416
1	2 17 7 2.01	3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		180 Unit Usaha	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	manajemen	0,44 %	396.441.417
1	2 17 7 2.01	4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan		40 Unit Usaha	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	manajemen	0,44 %	396.441.417
1	2 17 7 2.01	5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Sikronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam		1000 Orang	135.854.796	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	manajemen	0,44 %	396.441.417
Projection of Projection State Original State Ori	2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			0,44 %	140.000.000						456.262.500
Part	2 17 8 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			30 UMKM	140.000.000						456.262.500
3 3 3 7 7 7 7 7 7 7	217 02.01	serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM	,	30 Pelaku UMKM	140.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	manajemen	0,0044%	456.262.500
3 D 2 D 1 Penerbitan Zian Pener Rahyan, Pener Perhapian dan Zian Linda Techa Swalayan Pener Rahyan, Pener Perhapian Andrew Swalayan Pener Rahyan, Pener Perhapian Andrew Swalayan Maria Linda Swalayan menibal Linda Swalayan mengenda kala makin pengaba kala pengaba			I		I	***************************************						7.924.952.452
Second Performant Processing Performant Processing Performant Processing Performant Processing Performant Pe	3 30 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			25.000.000 Rupiah	225.854.796						1.374.264.950
2 2 2 1 Facilitasi Pencenhan Komimen Perdehan Petriman Bersakh Terintagrasi Secara Elektrenik 3 2 2 2 1 Facilitasi Pencenhan Komimen Perdehan Petriman Bersakh Terintagrasi Secara Elektrenik 3 2 2 2 2 Pencerbitan Tanda Daftar Godang 5 1 2 2 2 1 Facilitasi Pencenhan Komimen Perdehan Petriman Bersakh Terintagrasi Secara Elektrenik 5 2 2 2 2 2 Pencerbitan Tanda Daftar Godang 5 2 2 2 2 2 1 Facilitasi Pencenhan Komimen Perdehan Petriman Bersakh Terintagrasi Secara Elektrenik 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 30 2 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Pendataan Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki Ijin Gudang		10 Pelaku Usaha							57.500.000
3 d v 2 d v 2 d v 2 d v 2 d v 3 d v 2 d v 3 d v 3 d v 4 d v	3 30 2 2.01	I Easilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Junnan Feraku Osana yang memperoren izin pasar rakyat		5 Dokumen				industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	Perdagangan	25.000.000 rupiah	57.500.000
Pengembangan sentra-sentra industri komodinas unggulan lokal mari luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjuan Maralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Jumlah Dokumen Perizinan STPW 5 Dokumen Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pengembangan sentra-sentra industri komodinas unggulan lokal melabi ungelablama ketika ungukan pengkanan dan Pengawasan Barang Kekerdayanan Nonsumen (IKK) 10 IKK 255. 10 IKK	3 30 2 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tidak Layak Edar,dan Pendataan Perusahaan		1 SK							255.300.000
Solution Pengembangan sentra-sentra industri komodins unggulan lokal melalu pengelolanan skifu, dram dalam ari tusak yang berkelanjutan Pariwisata yang berk	3 30 2 2.02		Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang		9 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	Perusahaan,Index Keberdayaan	10 IKK	255,300.000
Terlaksananya Pengembangan sentra-sentra Industri koncultus ungguha Pengembangan Industri koncultus ungguha Pengembangan Industri koncultus ungguha Pengembangan Industri koncultus ungguha Pengembangan Industri	3 30 2 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negori			25 Sarana Pedagang							138.353.050
Long Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan	3 30 2 2.03	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara 1 Elektronik			5 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk penerima Waralaba dari Waralaba Dalam	5 Dokumen	138.353.050
3 30 2 2.05 Pencitian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Cuntuk Pengecer dan Penjual Langung Minum di Tempat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Jumlah Konsultasi dan Koordinasi yang dilaksanakan		2 konsultasi							
	3 30 2 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat										417.111.900

					Tahun 2023	Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaai	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pr Nasional	ioritas	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
3 30	2 2.05	l Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jurulah Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol Gol B dan C		10 Izin		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melahi pengelolan sektor pertania dalam arii luas, UMKM, dan Partwisata yang berkelanjutan	Totok Ukur Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung Minum di Tempat	Target	гади пинкант (кр.) 417.111.900
3 30	2 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				225.854.796				di Tempat		391.000.000
3 30	2 2.06	Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota I Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki tempat penyimpanan bahan berbahaya		12 pelaku usaha	20000179	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	25 Pelaku Usaha	115.000.000
3 30	2 2.06	2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		2 konsultasi		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Pengendalian fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	25 Pelaku Usaha	46,000,000
3 30	2 2.06	3 (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pelaku Usaha Yang diawasi		25 Pelaku Usaha	225.854.796	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Pengendalian fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	25 Pelaku Usaha	230.000.000
3 30	2 2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)										115.000.000
3 30	2 2.07	I Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Eksportir yang menggunakan SKA		1 Eksportir		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	1 Eksportir	115.000.000
3 30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik, Meningkatnya Volume Pedagang		2 Pasar	380.000.000						4.538.187.500
3 30	3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan Pasar		2 Unit	380.000.000						3.162.500.000
3 30	3 2.01	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan		1 Pasar	23.959.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah pasar dalam kondisi baik	1 Sarana Perdagangan	2,415.000.000
3 30	3 2.01	2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Database sarana perdagangan		1 database	356.040.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah pasar dalam kondisi baik	1 Sarana Perdagangan	747.500.000
3 30	3 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100%							1.375.687.500
3 30	3 2.02	2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Sarana distribusi Perdagangan		2 pasar		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	l pelatihan	1.375.687.500
3 30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengaduan Konsumen yang Terselesaikan		100 %	500.000.000						862.500.000
3 30	4 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		4 Pasar	200.000.000						287.499.999
3 30	4 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.331
3 30	4 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.335
3 30	4 2.01	3 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.333
3 30	4 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Stok Barang Kebutuhan Pokok,Serta Barang		7 Kali	300.000.000						287.500.002
3 30	4 2.02	Radupaten Aota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaba Distribusi Barang dalam I (satu) Kabupaten Kota	Penting Lainnya Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.334

					1 ahun 2023	Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaar	ı			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
1	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		ioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
3 30	4 2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Tolok Ukur Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Target 100 Persen	Pagu Indikatif (Rp.) 95.833.335
3 30	4 2.02	3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khussus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.333
3 30	4 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										287.499.999
3 30	4 2.03	l Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.333
3 30	4 2.03	2 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.333
3 30	4 2.03	3 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen	95.833.333
3 30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan (Karet dan Rotan)		2 Kali	50.000.000						345.000.000
3 30	5 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Presentasi Potensi Produk Ekspor Unggulan		92%	50.000.000						345.000.000
3 30	5 2.01	yang terdapat pada I (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibin.	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Produk	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	l Kali	57.500.000
3 30	5 2.01	2 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Pelaku Usaha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	1 Kali	57.500.000
3 30	5 2.01	3 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Pelaku Usaha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	1 Kali	57.500.000
3 30	5 2.01	4 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Pelaku Usaha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	l Kali	57.500.000
3 30	5 2.01	5 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Produk	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	1 Kali	57.500.000
3 30	5 2.01	6 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Pelaku Usaha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	1 Kali	57.500.000
3 30	6 2.01	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah		6 UTTP/Tera	55.854.796 55.854.796						575.000.001 575.000.001
3 30	6 2.01	retassanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang I Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	33.634.790	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	363 Alat UTTP	5/5.000.001 191.666.667
3 30	6 2.01	2 Pengawasan Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Orang	55.854.796	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	363 Alat UTTP	191.666.667
3 30	6 2.01	3 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	363 Alat UTTP	191.666.667
3 30	7 2.01	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Volume Pedagang Jumlah Promosi Pemasaran		100 Pedagang 2 Kali							230.000.001
3 30	7 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pemasaran Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pelaku Usaha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Meningkatnya Volume Pedagang	2500 Pelaku Usaha	230.000.001 76.666.667

						Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	in			Prakiraan Maju Ren	
1	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional P	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	npaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
3 30	7 2.01	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Pelaku Usaha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	ivasionai	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Meningkatnya Volume Pedagang	2500 Pelaku Usaha	76.666.667
3 30	7 2.01	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Meningkatnya Volume Pedagang	2500 Pelaku Usaha	76.666.667
3 31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan IKM		100 IKM	1.211.709.592 986.559.892						5.156.850.624 2.741.850.624
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		4 Dokumen	986.559.892						2.741.850.624
3 31	2 2.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Paramata Salama (Salama Jama)		- Donald	,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			456.975.104
3 31	2 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Perceputan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			456.975.104
3 31	2 2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			456.975.104
3 31	2 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				516.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			456.975.104
3 31	2 2.01	S Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				470.559.892	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			456.975.104
3 31	2 2.01	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			456.975.104
3 31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB (dalam		1.748.139 Juta	150.149.700						632.500.000
2 21	3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan		2 Kali	150.149.700						632.500.000
3 31	3 2.01	(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembangunan Industri		- 1	130.137.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB (dalam Juta)	1722304,26 Rupiah	316.250.000
3 31	3 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				150.149.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB (dalam Juta)	1722304,26 Rupiah	316.250.000
3 31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pembinaan Industri yang dapat dipantau perkembangannya		3 Industri	75.000.000						1.782.500.000
3 31	4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri		3 Dokumen	75.000.000						1.782.500.000
3 31	4 2.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Pembinaan Industri yang dapat dipantau perkembangannya	2 Industri	594.166.666
3 31	4 2.01	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas				25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Pembinaan Industri yang dapat dipantau perkembangannya	2 Industri	594.166.667
3 31	4 2.01	Pernantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Pembinaan Industri yang dapat dipantau perkembangannya	2 Industri	594.166.667
		UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah				1.929.940.727						445.400.000
2 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.929.940.727						445.400.000
2 17	1 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.614.300.727						

					1 anun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		ioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 17	1 2.01	Il Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.500.000	Dans Touries Haven Dans Dani	Nasional	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertaniar dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Tolok Ukur Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 17	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				125.381.000						
2 17	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				125.381.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.575.700						
2 17	1 2.06	l Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor				47.955.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertaniar dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
2 17	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.999.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	_
2 17	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultari SKPD				163.621.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				817.431.027						
2 17	1 2.08	I Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.712.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertaniar dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				57.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Penalatan dan Perlengkapan Kantor				21.434.233	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				733.284.794	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Capaian Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran *	92 %	
2 17	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				374.913.000						
	1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				374.913.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertaniar dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
2 17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Aktif		0,88 %	315.640.000						445.400.000
	7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,				315.640.000						445.400.000
2 17	7 2.01	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Peningkatan dan Pertumbuhan UMKM yang baru dan Menurunnya jumlah UMKM yang macet/bermasalah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Kecamatan	315.640.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertaniar dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Persentase UMKM Aktif	0,88 %	445.400.000
							1					
4		UPT. Metrologi Legal				500.000.000						
1 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				500.000.000						
											DIDAN Pancangan A	I-bi- DKDD 2022 K-bt K-t-i

					1 ahun 2023	Caj	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Ko	ode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
					1			Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3 30 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				285.424.600						
3 30 1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.696.000						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			42.696.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 30 1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				161.246.600						
3 30 1	2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			32.223.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 30 1	2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			129.023.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 30 1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.482.000						
3 30 1	2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			41.482.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 30 1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000						
3 30 1	2.09 9	Pemeliharsan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 30 6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang		6 UTTP/Tera	214.575.400						
3 30 6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Junian Alat OTTF yang di Tera/Tera Olang			214.575.400						
3 30 6		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perfengkapan Ditera Ulang			214.575.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
		UPT. Pasar				500,000,000						
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				500.000.000						
3 30 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				500.000.000						
3 30 1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				470.600.000						
	2.06 1	l Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan			
3 30 1	2.06 2								Pariwisata yang berkelanjutan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			142.142.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pariwisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 30 1	2.06 4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			142,142,000 159,594,400	Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan			
	2.06 4		Disediakan				Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan			
3 30 1	2.06 5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang			159.594.400 60.000.000 103.863.600	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komodina unggulan lokal melalui pengelohan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komodina sengulan lokal melalui pengelohan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komodina unggulan lokal melalui pengelohan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan dalam arti luas, UMKM, dan Madam arti luas, UMKM, dan			
	2.06 5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor S Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelengganaan Rapat Koordinasi dan			159.594.400 60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Parivisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Parivisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan lokal medalui pengelolan disal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan pertanian dalam arti luas, UMKM, dan pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan puntunkan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d			
3 30 1 3 30 1 3 30 1	2.06 S 2.06 S 2.08 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelengganaan Rapat Koordinasi dan			139 594 400 60 000 000 103 863 600 14 400 000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Parivisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Parivisata yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan lokal medalui pengelolan disal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan medalui pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan pertanian dalam arti luas, UMKM, dan pengelolan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan puntunkan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d			
3 30 1 3 30 1 3 30 1	2.06 S 2.06 S 2.08 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyedenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya			159.594.400 60.000.000 103.863.600 14.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengeloan sekor pertania dalam arti taus, UMKM, dan Parivissta yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengeloan sekor pertania dalam arti taus, UMKM, dan Parivissta yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti taus, UMKM, dan Parivissta yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti taus, UMKM, dan Parivissta yang berkelanjutan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti taus, UMKM, dan Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti taus, UMKM, dan medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan medalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan metalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan metalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan metalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan metalui pengeloan sekor pertanian dalam arti kus, UMKM, dan dan dan arti kus, UMKM, dan dan dan dan arti kus, UMKM, dan			

					Tahun 2023	Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	icana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas			oaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3 30	1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	industri kom melalui pen dalam arti lu	gan sentra-sentra oditas unggulan lokal telolaan sektor pertanian as, UMKM, dan ang berkelanjutan	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
				,								
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				12.399.300.234						14.741.500.000
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				12.399.300.234						14.741.500.000
2 18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang		100%	10.130.800.234						10.776.500.000
2 18	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi		100%	225,000,000						312.500.000
- 10	12.01	Terestantini, Tenganggaran, dan 27maan tenerja Termigan Darim	kinerja PD	Semua Kab/Kota, Semua	10070	225.000.000		Pemantapai	Tata Kelola			512,500,000
2 18	1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	2 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintaha Akuntabel	n yang Baik, Bersih dan Tata Kelola			52.500.000
2 18	1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintaha Akuntabel	n yang Baik, Bersih dan			12.500.000
2 18	1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintaha Akuntabel	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			12.500.000
2 18	1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapar Pemerintaha Akuntabel	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			12.500.000
2 18	1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			12.500.000
H	1 1		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Semua Kab/Kota, Semua					Tata Kelola			
2 18	1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel	n yang Baik, Bersih dan			60.000.000
2 18	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	105.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			150.000.000
2 18	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan PD		100%	5.453.322.530						5.408.500.000
2 18	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39 Orang/Bulan	5.313.322.530	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			5.200.000.000
2 18	1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			12.000.000
2 18	1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			12.000.000
2 18	1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	l Dokumen	32.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapar Pemerintaha	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			35.000.000
2 18	1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintaha	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			55.000.000
2 18	1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	l Dokumen	10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintaha	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			12.000.000
2.10	1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	141	27 500 000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			65.000.000
210	1 2.02	Koorumasi uan Fenyusunan Lajoran Keuangan Duranan Hiwumanar Sentestean SKI D	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	14 Laporan	27.300.000	Hasil	Akuntabel	Tata Kelola			03.000.000
2 18	1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintaha Akuntabel	n yang Baik, Bersih dan			17.500.000
2 18	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada PD		100%	25.000.000						72.000.000
2 18	1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			20.000.000
2 18	1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			22.000.000
2 18	1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapar	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			30.000.000
2 18	1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewengangan		100%	20.000.000		- acaitate				52.000.000
2 18	1 2.04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintaha	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			22.000.000
2 18	1 2.04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	4 Laporan	10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintaha	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			30.000.000
2 19		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian PD	Kelurahan	100%	286.944.600	Hasil	Akuntabel				150.000.000
2 18	1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		135 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintaha	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			130.000.000
2 18	1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	10.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintaha	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			15.000.000
2 18	1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	35.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			35.000.000
2 18	1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja Pegawai Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kelurahan	8 Orang		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapar	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			100.000.000
1			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Hasil	Akuntabel	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
2 18	1 2.06 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan administrasi umum PD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	534.500.000 10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			686.500.000 15.000.000
2 18	1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	l Paket	200.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapar	Tata Kelola n yang Baik, Bersih dan			257.000.000
Ш		<u> </u>	disediakan	Kelurahan			Hasil	Akuntabel				

					Tahun 2023	Con	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:	an			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
к	ode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	I	rioritas		apaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 18 1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Nasional	Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 45.000.000
+				Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua			Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
2 18 1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	1 Paket	27.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			27.000.000
2 18 1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			12.500.000
2 18 1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			40.000.000
2 18 1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			250.000.000
2 18 1	2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPI	Semua Kab/Kota, Semua	1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			40.000.000
2 18 1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	recitional	100%	3.436.033.104	4 151,514		ricultuoci			3.865.000.000
2 18 1	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.000.000
2 18 1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang disediakan	C V-b/V-t- C	1 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			25.000.000
2 18 1	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Laporan	18.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.000.000
2 18 1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Laporan	3.393.033.104	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			3.800.000.000
2 18 1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD	Kelurahan	100%	150.000.000	Hasil		Akuntabel			230.000.000
2 18 1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			80.000.000
2 18 1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			100.000.000
2 18 1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			50.000.000
2 18 2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Berinvestasi *	Kelurahan	25 %	266.500.000	Hasil		Akuntabel		1	450.000.000
2 18 2		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan penanaman modal yang tersusun		2 Dokumen	106.500.000						170.000.000
2 18 2	2.01	l Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	71.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	1		100.000.000
2 18 2	2.01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan Usaha	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	ı		70.000.000
2 18 2	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi		1 Dokumen	160.000.000)					280.000.000
2 18 2	2.02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	ı		130.000.000
2 18 2	2.02	Penyediaan Peta Potersi dan Peluang Usaha Kabupaten Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	ı		150.000.000
2 18 3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Promosi Penanaman Modal dan Investasi *		75%	247.000.000)					200.000.000
2 18 3	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan promosi penanaman modal dan investasi		75%	247.000.000						200.000.000
2 18 3	2.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	87.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	ı		30.000.000
	2.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	ı		170.000.000
2 18 4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan		83 Nilai 94 %	1.301.000.000						2.600.000.000 2.600.000.000
	2.01	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	sesuai SP Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 % 210 Pelaku Usaha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertaniar dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.5 Nilai	2.600.000.000 650.000.000
2 18 4	2.01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	369.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertaniar dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.5 Nilai	520.000.000

_					Tahun 2023				1	
						Cap	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	an Prioritas		encana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 18	4 2.01	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	211.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melahi pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMK M, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Nilai Indeks	320.000.000
2 18	4 2.01	d Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan Usaha	332.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertania dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Nilai Indeks a Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.110.000.000
2 18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor berskala Nasional		239 Pelaku Usaha	248.000.000				400.000.000
2 18	5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		70 %	248.000.000				400.000.000
2 18	5 2.01	l Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	55.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertania dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	1	130.000.000
2 18	5 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Pelaku Usaha	113.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertania dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	1	135.000.000
2 18	5 2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan Usaha	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertania dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	1	135.000.000
2 18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi *		100 %	206.000.000				315.000.000
2 18	6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan data dan informasi perizinan dan		100 %	206.000.000				315.000.000
2 18	6 2.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	non perizinan yang terintegrasi Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfiaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	206.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertania dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	1	315.000.000
								1		
X		Dinas Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				10.218.833.983				14.524.513.504
2 19	+		Prosentase pelayanan perangkat daerah yang			10.218.833.983				14.524.513.504
2 19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dilaksanakan dengan baik		100 %	7.630.833.983				7.679.513.504
2 19	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5 dokumen	402.694.600				259.735.000
2 19	1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lancarnya Penyusunan Renstra Dan Renja Perangkat Daerah		2 Dokumen	27.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		30.000.000
2 19	1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		30.000.000
2 19	1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		30.000.000
2 19	1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD		1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		30.000.000
2 19	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan	35.694.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		39.735.000
2 19	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah		12 Bulan	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		100.000.000
2 19	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketertiban Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan	3.959.527.704		DO RAMINAS		4.106.767.266
2 19	1 2.02	l Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN, BPJS PNS, JKK, Dan JKM		12 Bulan	3.695.569.304	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang		3.033.907.266
2 19	1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	203.770.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Berkualitas Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		990.860.000
2 19	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Sistem Pelaporan Keuangan		2 Dokumen	40.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang		41.000.000
2 19	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		12 Bulan	19.688.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Berkualitas Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		41.000.000
2 10	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketertiban Administrasi Kepegawaian Perangkat		12 bulan	50.811.600		Berkualitas		35.000.000
2 19	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Daerah Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur tentang Tupoksi		10 Orang	50.811.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang		35.000.000
2 10		Administraci Umum Parandrat Daarah	Kotartihan Administraci Ilmum Barangket Decemb		12 bulan	759.604.454		Berkualitas		364.135.500
2 19	1 2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketertiban Administrasi Umum Perangkat Daerah			/59.004.454	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pengingkatan Kapabilitas Sumber		364.135.500
2 19	1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor		1 Paket 12 Bulan	71.446.815	Hasil	Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		89.499.200
Ш	1 1			1			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pengingkatan Kapabilitas Sumber		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Dan Kebersihan Kantor	<u> </u>	1 Tahun		Hasil	Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas		
2 19	1 2.06	4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	72.477.894				75.841.000
			Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat Tersedianya Makanan Dan Minuman Tamu	 	1 Tahun 12 Bulan	-				4
ш	1	1		1		1	<u> </u>	t	1 1	1

					Tahun 2023	Co	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın .			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kod	le	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		oaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 19 1 2.	.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	17.084.27	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
+++			Tersedianya Buku Buletin Informasi Tentang Pemuda Dan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pengingkatan Kapabilitas Sumber			
2 19 1 2.	.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Olahraga Pada Dinas		1 Tahun	34.593.150	Hasil		Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			35.500.000
			Tersedianya Dokumentasi Kegiatan DISPORA Tersedianya Jasa Informasi Dan Promosi		12 Bulan 1 Tahun							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat		12 Bulan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang			
2 19 1 2.	.06 9		Daerah Rapat Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Keluar Daerah		1 Tahun	555.000.000	Hasil		Berkualitas			141.997.30
2 19 1 2.	.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dan Tertatanya Arsip		12 Bulan	9.002.32	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			8.298.000
2 19 1 2.	.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		12 bulan	2.247.833.08	7		Deixuantas			2.771.577.66
2 19 1 2.	.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat		550 Surat Masuk-Keluar	9.880.110	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			11.000.000
2 19 1 2.	.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air Dan Daya Listrik Untuk Kantor		12 Bulan	94.096.58	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang			270.000.00
2 19 1 2.	.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor		1 Tahun	2.143.856.39	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Berkualitas Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			2.490.577.668
2 19 1 2.	.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang		12 bulan	210.362.53	8		Berkuantas			142.298.070
2 19 1 2.	.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan	Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	6.660.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang			6.600.000
$\dagger\dagger$		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 Tahun		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Berkualitas Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang			
2 19 1 2.	.09 2	Lapangan	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas		1 Tahun	183.993.15	5 Hasil		Berkualitas			115.929.820
2 19 1 2.	.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor		1 Paket	6.660.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang			6.600.000
2 19 1 2.	.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		12 Bulan	13.049.38	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Berkualitas Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang			13.168.250
2 19 2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Berprestasi		94 Pemuda	500.000.000)		Berkualitas			4.745.000.000
2 19 2 2.	.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuia, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda dalam kategori Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader, paskibraka dan pemuda berprestasi		138 Orang	500.000.000						2.605.000.000
2 19 2 2.	.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	JUmlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Sainnya		10 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			105.000.000
2 19 2 2.	.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Sainnya		20 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			200.000.000
2 19 2 2.	.01 7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan		24 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			400.000.000
2 19 2 2.	:.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Diseleksi Sebagai Pasukan Pengibar Benderadan Diberikan Pelatih		600 Orang	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			1.900.000.000
2 19 2 2.	.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah presentase oragnisasi pemuda yang aktif		55 Organisasi				Pengingkatan Kapabilitas Sumber			2.140.000.000
2 19 2 2.	.02 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader Yang Terfasilitasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha		6 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			500.000.000
2 19 2 2.	.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		4 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			1.640.000.000
2 19 3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan	Cakupan pembinaan olahraga		26 Cabor 40 sarana dan prasarana	2.088.000.000						2.100.000.000
2 19 3 2.	.01	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga meningkat		olahraga	1.668.000.000			Pengingkatan Kapabilitas Sumber			300.000.000
2 19 3 2.	.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan		20 Unit	1.668.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			300.000.000
2 19 3 2.	.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perolehan medali emas dalam Kejuaraan olahraga meningkat		35 Medali emas	150.000.000	9					150.000.000
2 19 3 2.	.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggara Kejuaraan Multi Event dar Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			150.000.000
2 19 3 2.	.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		30 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			
2 19 3 2.	.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina dan diberikan penghargaan		130 orang	70.000.00	0					950.000.000
2 19 3 2.	.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		50 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			250.000.000
2 19 3 2.	.03 4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan		100 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			550.000.000
2 19 3 2.	.03 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga Yang Tersedia dan Termanfaatkan		5 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			150.000.000
2 19 3 2.	.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah dokumen organisasi olahraga yang dibina dan diberikan penghargaan		11 Dokumen							300.000.000
2 19 3 2.	.04 1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan		8 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			150.000.000
2 19 3 2.	.04 4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan Yang Menerima Penghargaan		3 Organisasi		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			150.000.000
2 19 3 2.	.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen olahraga rekreasi yang dibina		9 Dokumen	200.000.000			DOKUGINGS .			400.000.000

							Сар	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Renca	
	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional P	Prioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	Capaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 19	3 2.05	2 Per	mberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		2 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasionai	Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang	1000K UKdP	rarget	250.000.000
2 15	3 2.05	5 Per	manfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional Di Masyarakat		3 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pengingkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			150.000.000
									т				
- 12			nas Arsip dan Perpustakaan RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				7.345.194.087 7.095.194.087						12.888.680.200 11.381.260.200
2 24			RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pelayanan perangkat daerah yang		000/	7.095.194.087 6.886.786.087						11.381.260.200
				dilaksanakan dengan baik Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi		9876							
2 24	1 2.01	Per	rencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kinerja PD	K I K ('B) (C	98%	30.000.000			D . T. V.I.I			154.650.000
2 24	1 2.01	1 Per	nyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			18.000.00
2 24	1 2.01	2 Ko	oordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ı		16.000.00
2 24	1 2.01	3 Ko	oordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			16.000.00
2 24	1 2.01	4 Ko	oordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ı		16.000.000
2 24	1 2.01	5 Ko	oordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		16.000.00
2 24	1 2.01	6 Ko	oordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Laporan	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			14.000.000
2 24	1 2.01	7 Ev	raluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	,	- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		58.650.00
2 24	1 2.02	Ad	lministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan PD	0 818 - 0	98%	3.729.367.971			D . T. KII			5.700.500.00
		Per	nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	28 orang/14 bulan		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	1		
2 24	1 2.02	1		umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Orang/12 Bulan	3.694.367.971			Akuntabel			5.580.000.00
2 24	1 2.02	2 Per	nyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		18.000.00
2 24	1 2.02	3 Pel	laksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		18.000.00
2 24	1 2.02	4 Ko	oordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		18.500.0
2 24	1 2.02	5 Ko	oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		18.000.00
2 24	1 2.02	6 Per	ngelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		15.000.00
2 24	1 2.02	7 Ko	oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		16.000.00
2 24	1 2.02	8 Per	nyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		17.000.00
2 24	1 2.03	Ad	lministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada PD		98%							76.500.00
2 24	1 2.03	1 Per	nyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		11.500.0
2 24	1 2.03	2 Per	ngamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kelurahan	2 Dokumen		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		14.500.0
2 24	1 2.03	3 Ko	oordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		11.500.0
2 24	1 2.03	4 Per	mbinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		11.500.00
2 24	1 2.03	5 Rei	ekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		11.500.00
2 24	1 2.03	6 Per	natausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		9.500.0
2 24	1 2.03	7 Per	manfaatan Barang Milik Daerah SKPD dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		6.500.00
2 24	1 2.05	Ad	lministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Kepegawaian PD	Kab. Kutai Barat, Semua	98%	81.592.000			Pemantapan Tata Kelola	_		304.977.10
2 24	1 2.05	1 Per	ningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	1 unit	-	- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			8.827.1
2 24	1 2.05	2 Per	ngadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan, Semua Kecurahan Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	100 paket		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			68.000.00
	1 2.05	3 Per	ndataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	,	- Dana Perimbangan		Pemantapan 1 ata Ketota Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1		16.500.00
2 24				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan	Kab. Kutai Barat, Semua	<u> </u>				Pemantapan Tata Kelola	+	+	

					Tahun 2023	Car	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaar				Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan				Pı	rioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 24	1 2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			19.500.000
2 24	1 2.05	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	l orang		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			3.000.000
2 24	1 2.05	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 orang		Dana Perimbangan		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			2.500.000
2 24	1 2.05		Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	0				Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
2 24	++	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
2 24	1 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	8 orang		Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			78.650.000
2 24	1 2.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	40.000.000	Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			41.000.000
2 24	1 2.05 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 orang	41.592.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			44.000.00
2 24	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum PD		98%	75.875.000						190.710.000
2 24	1 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 paket		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			6.500.000
2 24	1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	I paket		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			11.400.000
2 24	12.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	l paket		Dana Perimbangan		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			11.900.00
				Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			·		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
2 24	1 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	1 paket		Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			11.150.000
2 24	1 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket		Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			8.550.000
2 24	1 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l paket		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			12.420.000
2 24	1 2.06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			10.200.000
2 24	1 2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			8.800.00
2 24	1 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	75.875.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			101.740.00
2 24	1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			8.050.000
2 24	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah		98%				Akumabei			637.000.00
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Kutai Barat, Semua					Pemantapan Tata Kelola			
2 24	1 2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit		Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			450.000.00
2 24	1 2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit kursi & meja		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			42.000.00
2 24	1 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			45.000.00
2 24	1 2.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			30.000.00
2 24	1 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 ruang arsip		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
2 24	1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 unit pc		Dana Perimbangan		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			55.000.00
2 24	1 2.07 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 unit		Dana Perimbangan		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			15.000.00
2 24	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kelurahan Kelurahan	98%	2.861.413.116			Akuntabel			2.997.468.100
2 24	1 2.08	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	2.001.415.110	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			8.321.000
2 24	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 Laporan	200.000.000	Dana Perimbangan		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			150.000.000
2 24	1 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan		Dana Perimbangan		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			11.577.10
2 24			Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua					Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
2 24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	yang Disediakan cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan		Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.827.570.000
2 24	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Uursan Pemerintah Daerah		98%	108.538.000						36.700.00
2 24	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit mobil		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.000.000
2 24	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit mobil	108.538.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.000.000
2 24	1 2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			3.250.000
2 24	1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	I unit		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			3.450.000
_	$\perp \perp \perp$		l	Kelurahan	l		l l		Akuntabel	L		

Target 2023 Pagu Indikatif (Rn.) Sumber Dana					Tahun 2023		ogian Kinoria dan Kl B '				Probinger Main P	nana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan					ioritas	Target Ca		ana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
No.		9			Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional				Pagu Indikatif (Rp.)
The content of the	2 24 1 2.09 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan, Semua	1 unit		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
Mary	2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			20 %	138.408.00						887.755.000
Part	2 24 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			17%	81.488.00						468.280.000
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Kecamatan, Semua	2500 Berkas		Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			150.000.000
	2 24 2 2.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			65 Berkas		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			85.000.000
	2 24 2 2.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua	10 Laporan	81.488.00	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			233.280.000
1	2 24 2 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Arsip Statis yang dikelola	recumum	16%	20.000.00			- Communication of the Communi			120.000.00
1	2 24 2 2.02	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Kecamatan, Semua	5 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
Company	2 24 2 2.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kecamatan, Semua	85 Arsip	20.000.00	Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			120.000.00
	2 24 2 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi akses dan layanan		17%	36.920.00)					299.475.00
1	2 24 2 2.03	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			80 Pengguna		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			149.737.50
Part	2 24 2 2.03	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan, Semua	20 Laporan	36.920.00	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			149.737.50
Part	2 24 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Kelurahan	95,30 %	60.000.00)		Akuntabel			280.000.00
1		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10				60.000.00						280.000.00
10 10 10 10 10 10 10 10	2 24 3 2.01	, same	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	Kecamatan, Semua	150 Arsip	20.000.00	Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			150.000.00
10 10 10 10 10 10 10 10	2 24 3 2.01	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	150 Berkas	40.000.00	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			130.000.00
10 10 10 10 10 10 10 10	2 24 3 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			12 %							
	2 24 3 2.02			Kecamatan, Semua	50 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1	2 24 3 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Cakupan Penyelamatan Arsip yang bernilai		11 %							
1	2 24 3 2.03	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan	Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah		180 Daftar		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1	2 24 3 2.03		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan		150 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1	2 24 3 2.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		Kecamatan, Semua Kelurahan	100 arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1			Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kecamatan, Semua	85 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1	2 24 3 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Cakupan arsip statis yang di alih mediakan	Common Vals Water Common	12 %				Demonton Tata Kalala			
2	2 24 3 2.04	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
Part	2 24 3 2.04	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	Kecamatan, Semua	100 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
2	2 24 3 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Cakupan Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang tercatat		15 %		-					
Part	2 24 3 2.05	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		Kecamatan, Semua	50 Arsip		Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 24 3 2.05	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	50 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	_		
2 d v 2 D Pelayanan Izin Pengamaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kahupaten Kota Pelayanan Izin Pengamaan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Daftar dan Penedapan Kadesan Kenamaan Kenamaan Kelarahan Bandar Penedapan Izin Pengamaan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih Daftar Arsip Hasil Pepeplanan Arsip yang Bersifat Tertutup Immih D	1 1 1 1 1			Kecamatan, Semua	1 Arsip		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
Second Companies Second Comp			Cakupan data dan informasi penggunaan arsip *)					15.000.00
Pengelmann Arisip yang Bersifit Tertutup Ezin Penggunaan Penggunaan Arisip yang Bersifit Tertutup Ezin Penggunaan Penggunaan Penggunaan Arisip yang Bersifit Tertutup Ezin Penggunaan			tertutup				Draw Berlinkerson					15.000.00
PROGRAM PERBUNAAN PERPUSTAKAAN Mulha Pengembangan Koleki Bahan Perpustakaan Sol Eksemplar Sol Eksempla			Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		1 AISIP		Dana Perimbangan					15.000.00
2 3 2 201 Pengerbangan dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupateru/Kota Dana Perpustakaan Daerah Kabupateru/Kota Dana Perminbangan Mendejan Mandejenen Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengam Mandejenen Layanan TIK Berbasis Siciosofo (TiSM - Information Telemdogs) Service Management) Dana Perimbangan Mandejenen Layanan Perpustakaan Daerah Mahupateru/Kota Pengembangan dan Peneliharaan Layanan Perpustakaan Daerah Mahupateru/Kota Pengembangan Perpustakaan di Nijakat Daerah Kabupateru/Kota Penantapan Tata Kelola Penantapan Tata Kelola	2 23											1.507.420.00
Jumbh Layunan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan pelaktronik disabapaten Layanan Tis Berbasis Kecamatan, Semua Kab-Kota, Semua K	23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Inmish Pengambangan Kakdadi Patau Panang		550 Ukramplar							1.173.920.000
Reduction Support Su			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis			130.000.00	- Dana Perimbangan					777.170.00 37.500.00
Pepustakaan du Muhyah Kabupaten Kota Sesuai Keuranaannya Ze 22 2 2 2 0 1 3 Pengembangan Kekhasan Kolesi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Kolesi Perpustakaan Kabo Darah Tingkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Kolesi Perpustakaan Kabupaten Kota Jumlah Kolesi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota Kelurahan Kelurahan Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Kelurahan Penminanan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Jumlah Perpustakaan dalam Mewajudikan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Permantanan Standar Daerah Tingkat Daerah Manusah Pendidikan Daerah Tingkat Daerah Ting			Management) Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua					Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			100.000.00
Pembinana Pengustakan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Statuan Pendidikan	+++		Kewenangannya	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua					Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
2 23 2 20.0 4 Common Projection P	2 23 2 2.01		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	-		·		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			51.000.00
LAMPIRAN Rancangan Akhir RKPD 2023 Ka	2 23 2 2.01		yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar	Kecamatan, Semua	25 Perpustakaan	30.000.00	Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			135.000.000

_						Tahun 2023							
							Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Prakiraan Maju Reno	
	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
							g (- - p-)		Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2 23	2 2.01	1 5 F	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perpustakaan		Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			35.000.000
2 23	2 2.01	1 6 F	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	20.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			85.000.000
2 23	2 2.01	1 7 F	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkat Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 layanan	10.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			90.000.000
2 23	2 2.01	1 8 F	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Eksemplar	30.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			150.000.000
2 23	2 2.01	1 9 F	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Eksemplar	20.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			43.670.000
2 23	2 2.01	1 10 F	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			50.000.000
2 23	2 2.02	2 1	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kunjungan Perpustakaan Keliling ke Satuan		35 %	90.000.000						396.750.000
2 23	2 2.02	2 1 5	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pendidikan dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	80 Lokus	20.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			20.750.000
2 23	2 2.02	2 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kelurahan			- Dana Perimbangan		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			37.500.000
2 23	2 2.02	2 3 F	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Orang	40.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			270.000.000
2 23	2 2.02	2 4 F	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Perpustakaan	30.000.000	Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			41.500.000
2 23	2 2.02	2 5 F	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		6 Orang		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			27.000.000
2 23	3		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang		80 Koleksi	30.000.000						333.500.000
2 22	3 2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	dilestarikan *		8 dokumen	30,000,000						58,500,000
2 23	3 2.01	'	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan Naskah Kuno yang terkelola Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam	Semua Kab/Kota, Semua	8 dokumen	30.000.000			Pemantapan Tata Kelola			58.500.000
2 23	3 2.01	1 1 F	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota. Semua	7 Orang		- Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantanan Tata Kelola			27.000.000
2 23	3 2.01	_	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan lan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah konten Eksemplar Budaya Etnis Nusantara	Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Eksemplar	30.000.000	Dana Perimbangan		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			31.500.000
2 23	3 2.02	2 E	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	vang di olah		600 eksemplar		-					275.000.000
2 23	3 2.02	2 1 5	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Eksemplar		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			125.000.000
2 23	3 2.02	2 2 F	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Eksemplar		- Dana Perimbangan		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			150.000.000
ш			Dinas Perikanan				21.804.292.516						2.900.000.000
3 25		ι	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				21.048.292.516						2.900.000.000
3 25	1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang		100 %	10.580.942.516						
3 25	1 2.01	ı	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik * Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Efektif dan Terarah, Terukur dan Tenat Waktu		100 %	268.266.600						
3 25	1 2.01	1 1 F	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	114.931.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.01	1 21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	21.979.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.01	1 31	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20,529,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.01	l 4 i	Coordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	21.130.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.01	1 51	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	l Dokumen	25.109.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.01	l 61	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	21.063.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	

					1 ahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Priori Nasional	Daerah (Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
3 25	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Duerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	43.522.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daeran	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	11arget	ragu indikatif (kp.)
3 25	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat		100 %	5.209.486.432						
3 25	1 2.02	l Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	31 Orang	4.944.648.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Dokumen	113.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.02	3 Pelaksanaan Penutausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	103 Dokumen	24.871.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Laporan	55.455.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Dokumen	24.280.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	25.290.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	21.780.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 tahun	102.375.000						
3 25	1 2.05	II Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	102.375.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	460.901.500						
3 25	1 2.06	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	2 Paket	121.986.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	I Paket	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	4 Paket	155.915.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06	S Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	4 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	24 Dokumen	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06	9 Penyelenggarnan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	155.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	4.350.912.984						

					Tahun 2023	Con	-i Vii- d Vb- Bd	_			Prakiraan Maju Ren	T-h 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana: T		rioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
	Koue	Orusan/ Bidang Orusan/ Program/ Regiatan/ Sub Regiatan	indikator rrogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3 25	1 2.08	l Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	500 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daeran	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan	100 %	ragu munkatu (R.D.)
3 25	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Laporan	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dengan baik Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	12 Laporan	4.300.912.984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah									
3 25	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 %	189.000.000	1					-
3 25	1 2.09	l Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	8 Unit	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	-
3 25	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	8 Unit	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laimya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	49 unit	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	I Unit	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		l Unit	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.09	II Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	54 Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)		1602 ton	6.971.350.000						2.900.000.000
	3 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Tersedianya Data dan Informasi serta Sarana dan		100 %	5.568.100.000						2.900.000.000
3 25	3 2.01	dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prasarana Perikanan Tangkap		100 %	5.568.100.000					1	2.900.000.000
3 25	3 2.01	l Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	1552 Ton/Tahun	
3 25	3 2.01	2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kelurahan	312 Unit	4.783.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	1552 Ton/Tahun	2.900.000.000
3 25	3 2.01	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	60 Unit	650.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	1552 Ton/Tahun	
3 25	3 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan			15.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3 25	3 2.02	3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya			15.250.000	(PAD)			<u> </u>		
3 25	3 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaran TPI		100 %	1.268.000.000						
3 25	3 2.03	l Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Serta Pembangunan TPI Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	5 Dokumen	1.108.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	1552 Ton/Tahun	
3 25	3 2.03	2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Layanan	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	1552 Ton/Tahun	
3 25	3 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Laimya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	yag Menjadi Kewenangan Kab/Kota		100 %	120.000.000				Meningkatnya		
3 25	3 2.06	l Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaflaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Dokumen	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	1552 Ton/Tahun	-
3 25		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah	Meningkatnya Perikanan Budidaya (ton/tahun) Tersusun Jumlah Rekomendasi Yang Berhasil		2600 ton	3.206.000.000						
3 25	4 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun Jumlah Rekomendasi Yang Berhasil Ditetapkan		100 %	175.000.000						
3 25	4 2.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaba Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, daniatan Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam I (satu) Daerah Kabupateri Kota yang Mengganakan Icknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing daniatau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan'atau Manfata tatu Dampak Negatifiya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yan Menggunakan Teknologi Sederhan, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan'atau Tensaa Kerja Asia.	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Rekomendasi	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Budi Daya (ton/tahun)	2400 Ton/Tahun	
ш		1		I	1		l .	l .	l .	L	l	

						aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren		
ŀ	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
2 25	42.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		100 %	515 260 000		Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3 25	4 2.02			Kab. Kutai Barat. Semua	100 %	515.260.000				Meningkatnya		
3 25	4 2.02	1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kecamatan, Semua	1 Kelompok	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
++	_			Kelurahan Kab. Kutai Barat. Semua			`			Daya (ton/tahun)		
3 25	4 2.02	2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kecamatan, Semua	5 Kelompok	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
\mathbf{H}			Wengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelurahan			(FAD)			Daya (ton/tahun)		
200	4 2 02	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan,	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan Semua	4 Kelompok	460 260 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Meningkatnya Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
3 25	4 2.02	Pendidikan dan Pelatihan	Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Кеютрок	460.260.000	(PAD)			Dava (ton/tahun)	2400 I on/I anun	•
			Tersusunnya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi							, ,		
3 25	4 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daya Ikan Kecil (TDPIK)		100 %	100.000.000						•
		, Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan	Kab. Kutai Barat, Semua			PENDAPATAN ASLI DAERAH			Meningkatnya		
3 25	4 2.03	(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Rekomendasi	25.000.000	(PAD)			Perikanan Budi Daya (ton/tahun)	2400 Ton/Tahun	
++	-		Ditetapkan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi	Kab. Kutai Barat, Semua						Meningkatnya		
3 25	4 2.03	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan	Kecamatan, Semua	50 Rekomendasi	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
1			Kabupaten/Kota	Kelurahan	*****		(FAD)			Daya (ton/tahun)		
3 25	4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Usaha Budidaya Perikanan	Kab. Kutai Barat. Semua	100 %	2.415.740.000				Meningkatnya		
3 25	4 2.04	1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua	1 Dokumen	52.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
\vdash			()	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			(1712)			Daya (ton/tahun)		
3 25	4 2.04	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua	360 Unit	2.045.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
\mathbf{H}			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)	Kelurahan			()			Daya (ton/tahun)		
3 25	4 2.04	4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan	Kecamatan, Semua	1 Dokumen	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Meningkatnya Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
${f H}$	+		Kesehatan Ikan	Kelurahan						Daya (ton/tahun)		
3 25	4 2.04	5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	50 Orang	68.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ì	Meningkatnya Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
لتلا			Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelurahan		00.000.000	(PAD)			Daya (ton/tahun)		
3 25	4 2.04	6 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Ha	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Meningkatnya Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
			Dilindungi	Kelurahan		70.000.000	(PAD)			Daya (ton/tahun)		
2 25	4 2 04	7 December of the December of December of the Air control December 1 to 1 December 1	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan,	Kab. Kutai Barat, Semua	50 O	90,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Meningkatnya Perikanan Budi	2400 Ton/Tahun	
2 23	4.04	7 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	90.000.000	(PAD)	<u> </u>	<u> </u>	Perikanan Budi Daya (ton/tahun)	2400 10H/1anun	
3 25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Penetapan SK Kawasan Konservasi		1 SK	140.000.000						
3 25	5 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah SK yang Berhasil Ditetapkan		1 SK	140.000.000						
\Box			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya	Kab. Kutai Barat, Semua						Jumlah Penetapan		
3 25	5 2.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Kecamatan, Semua	1 Dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SK Kawasan	1 SK	
		dapat Dusanakan dalam Kabupaten/Kota	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kelurahan			(FAD)			Konservasi		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan	Kab. Kutai Barat, Semua						Jumlah Penetapan		
3 25	5 2.01	2 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	Kecamatan, Semua	1 Dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SK Kawasan	1 SK	
Ш			Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kelurahan			()			Konservasi		
3 25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Ketersediaan Ikan (Ton/th) Tingkat Konsumsi Ikan (kg/KP/tn)		5650 Ton 41 Kg/KP	150.000.000						
3 25	6 2 01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terjalinnya Kemitraan dengan Pihak ketiga		50 ton	75,000,000						
3 23	0 2.01		(Pengusaha/Investor, Penampung Produk Olahan) Jumlah data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	Kab. Kutai Barat, Semua	30 ton	75.000.000				Meningkatnya		
3 25	6 2.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan	Kecamatan, Semua	4 Dokumen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Ketersediaan Ikan	5600 Ton/Tahun	
\vdash	-		Risiko Terjalinnya Kemitraan dengan Pihak ketiga	Kelurahan			(FAD)			(Ton/th)		
3 25	6 2.02	Kecil	(Pengusaha/Investor, Penampung Produk Olahan)		100%	75.000.000						-
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Kab. Kutai Barat, Semua								
3 25	6 2.02	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	10 Unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Meningkatnya Ketersediaan Ikan	5600 Ton/Tahun	
		Mikro dan Kecil	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala	Kelurahan			(PAD)			(Ton/th)		
1 1 1	1 1	l I	Usaha dan Risiko	l .		Ī		1	Į.	<u> </u>	l .	ļ
		IJPT. Balai Benih Ikan (BBh Mentiwan				756,000,000						
ш						100000000						
3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				756.000.000 259.500.000						
3 25	1 2 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				259.500.000 30.000.000						
3 23	2.01	retencanaan, renganggaran, uan Evanuasi Kinerja Ferangkat Daeran				30.000.000				Parcenter -	I	
\prod			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	K 1 K . ' B			new partition and a second		Ì	Persentase Pelayanan		
3 25	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	100 %	-
			SKPD				,		1	Yang dilaksanakan dengan baik		
H+	+							 	1	-		
\prod									Ì	Persentase Pelayanan		
3 25	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	1 Dokumen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Perangkat Daerah	100 %	,
\prod				MCIAK UIU			(LAD)		Ì	Yang dilaksanakan		
	10.00									dengan baik		
3 25	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000					ı	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan						1	Persentase pelayanan		
3 25	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	1 Laporan	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ì	perangkat daerah	100 %	
\prod			Tahun SKPD	MCIAK UIU			(LAD)		Ì	yang dilaksanakan dengan baik *		
${f H}$	+									uengan baik *		
\prod									Ì	Persentase		
3 25	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Kab. Kutai Barat, Melak,	18 Laporan	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelayanan perangkat daerah	100 %	
	-		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Melak Ulu	x	30.000	(PAD)		Ì	yang dilaksanakan		
ш	\perp									dengan baik *		
3 25	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				114.000.000						

							Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Prakiraan Maju Ren	
	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
3 25	1 2.06	2 P	enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	2 Paket	30.000.000	DENIDA DATANI ASI I DAEDAH	Nasional	Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3 25	1 2.06	3 P	enyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	l Paket	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06	4 P	enyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	4 Paket	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06	5 P	enyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	4 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.06		enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	24 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	
3 25	1 2.08	P	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.000.000						
3 25	1 2.08	1 P	enyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Melak, Empas	5 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.08	2 P	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	a Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	3 Laporan	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.08		enyedisan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	12 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.09	P	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.500.000						
3 25	1 2.09	6 P	emeliharaun Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	10 Unit	17.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.09	9 P	emeliharaun/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	l Unit	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	1 2.09	10 P	emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	1 Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	
3 25	4	P	ROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Perikanan Budidaya (ton/tahun)		2800 Ton	496.500.000						
3 25	4 2.04	P	engelolaan Pembudidayaan Ikan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			496.500.000						
3 25	4 2.04		enyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	3 Unit	496.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Perikanan Budi Daya (ton/tahun)	2400 Ton/Tahun	
2 2 2			inas Pariwisata RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				15.665.789.840 15.665.789.840						32.205.835.777
3 26				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang									32.205.835.777
3 26	1		ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dilaksanakan dengan baik		100 %	10.098.449.102						14.953.835.777
3 26	1 2.01	P	erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun		100 %	85.000.000						160.500.000
3 26	1 2.01	1 P	enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			110.500.000
3 26	1 2.01	6 K	oordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			10.000.000
3 26	1 2.01	Ш	valuasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			40.000.000
3 26	1 2.02	A	dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan		100 %	4.410.466.643						7.741.555.301

					1 ahun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaai	1			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	ioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
П							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Nasional	Daerah Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3 26	1 2.02	l Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/bulan	4.400.466.643	Umum		melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			7.721.555.301
3 26	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		I Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			10.000.000
3 26	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			10.000.000
3 26	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		100 %	127.780.642						400.000.000
3 26	1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		I Paket	56.786.642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			300.000.000
3 26	1 2.05	II Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	70.994.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			100.000.000
3 26	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilayani		100 %	202.491.180						630.000.000
3 26	1 2.06	l Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			10.000.000
3 26	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			30.000.000
3 26	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		34 Paket	19.991.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			30.000.000
3 26	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			10.000.000
3 26	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			550.000.000
3 26	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan		100 %	100.000.000						350.000.000
3 26	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 jenis	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			350.000.000
3 26	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan		100 %	5.092.798.097						5.461.780.476
3 26	1 2.08	l Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	7.494.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			10.000.000
3 26	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12 Laporan	53.731.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			103.927.200
3 26	1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	9.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			15.000.000
3 26	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	5.021.591.997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			5.332.853.276
3 26	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan		100 %	79.912.540						210.000.000
_		<u> </u>										

					Tanun 2023	Ca	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Ren	
ь	Code	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
3 26	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan	Totok Ukur	Target	Fagu Indikatif (Kp.)
3 26	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.999.44(Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			20.000.000
3 26	1 2.09	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	9.913.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			30.000.000
3 26		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah ODTW yang Dikembangkan Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata		8 ODTW 100 %	1,220,000,000						5.125.000.000 530.078.000
3 26	2 2.01	l Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		7 Lokasi		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			298.231.000
3 26	2 2.01	2 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 26	2 2.01	3 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		2 Lokasi	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			110.000.000
	2 2.01	4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangar Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		12 Dokumen	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			121.847.000
3 26	2 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										1.104.422.000
3 26	2 2.02	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupasten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			999.790.000
	2 2.02	5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			104.632.000
3 26	2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				450.000.000			_			2.920.500.000
3 26	2 2.03	l Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		1 Lokasi		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			110.000.000
3 26	2 2.03	2 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		4 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			1.750.000.000
3 26	2 2.03	Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabuputen Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		7 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			
3 26	2 2.03	S Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		10 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			210.500.000
3 26		6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		7 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			850.000.000
3 26	2 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				315.000.000			n i			570.000.000
3 26	2 2.04	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			320,000.000
3 26	2 2.04	2 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pencrbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan sentra-sentra industri komoditas unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan Pariwisata yang berkelanjutan			50.000.000

					Tanun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa			Prakiraan Maju Ren		
The color	Ь	Code	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
The content of the	26	2 2.04	3 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata		l Laporan	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan sentra-senti industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arit luas, UMKM, da	lokal ertanian	rarget	Fagu Huikatti (Kp.)
	26	2 2.04		Pariwisata		2 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		150.000.000
The content of the	26	3										
Part	26	3 2.01		Jumlah Dokumen Pemasaran Pariwisata		8 Dokumen	647.340.738					3.370.000.000
Part	26	3 2.01	l Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar		3 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		1.050.000.000
Part	26	3 2.01	2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		3 Laporan	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		1.000.000.000
Part	26	3 2.01	3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik		2 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		610.000.000
Part	26	3 2.01	4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	127.340.738	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		410.000.000
The content of the	26	3 2.01		Pengembangan Pemasaran Pariwisata		1 Dokumen			industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		300.000.000
Part	26	4				2 HAKI	150.000.000					507.000.000
Part	26	4 2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi	Jumlah Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang		1 Unit	150,000,000					507,000,000
The control of the co	26	4 2.01							industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		507.000.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya jumlah sertifikasi kompetensi SDM		150 Orang	3,550,000,000				1	8.250.000.000
Sala				Jumlah Orang yang Melaksanakan Peningkatan								
Let 2.10 Programbages Kompetents SDM Pairwise das Basenis Kreaf Tinglat Dear Distributed Some Exceptions of Dark Paper Seas Askers of Dark Paper Sea	26	5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		73 Orang	3.550.000.000					8.250.000.000
In part of the properties of the present Series Mayureket dalian Pregendengen Kentiran Pervisual Mayureket Mahasar Mayureket Mahasar Mayureket dalian Pergendengen Kentiran Pervisual Mayureket Mahasar Mayureket Mahasar Mayureket Mahasar Maha	26	5 2.01	l Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat		20 Orang	200.000.000		industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		300.000.000
Politikan Daar SDM Kepatrivistan bagi Mayaraka, Guru dan Pelajar (Mahasiwa danitan Siwa) Politikan Daar SDM Kepatrivistan bagi Mayaraka, Guru dan Pelajar (Mahasiwa danitan Siwa) Politikan Mahasiwa danitan Siwa) Politik	26 :	5 2.01	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		32 Orang	350.000.000		industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		1.100.000.000
4 Striffkasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5 20 Tang 20 Orang 20 O	26 :	5 2.01	3 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar		15 Orang	150.000.000		industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		250,000,000
2 5 2 0 1 5 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Dumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Dumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Dumlah SDM Ekonomi Kreatif Dumlah SDM Ekonomi Kreatif Dumlah SDM Ekonomi Kreatif Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Dumlah SDM Ekonomi Kreatif	26	5 2.01	4 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			20 Orang	200.000.000		industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		
ke	26	5 2.01	5 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			15 Laporan	2.550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		5.325.000.000
Program Personanan Penganggaran dan Evalusi Kinerja Persugkat Daerah Penganggaran dan Evalusi Kinerja Penga	26	5 2.01	6 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		10 Orang	100.000.000		industri komoditas unggular melalui pengelolaan sektor dalam arti luas, UMKM, da	lokal ertanian		1.275.000.000
Program Personanan Penganggaran dan Evalusi Kinerja Persugkat Daerah Penganggaran dan Evalusi Kinerja Penga			Dinas Postanian				(0.502.410.540					75 (70 50 027
ry PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pekayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	27											75.679.586.027
77 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.000.000	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik (%)		100%	32.260.104.082					32.535.986.027
LAMADIDANI December Albi- DVDD 2022 Vehicuster V	27	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				700.000.000					600.000.000

				Tahun 2023	Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	1			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Cap Tolok Ukur	aian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	20 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	NASIONAL	Daeran	1 010K UKUF	rarget	Pagu Indikatif (Rp.) 250.000.000
3 27 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kelurahan	10 Dokumen	160.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					50.000.000
3 27 1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
3 27 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Returanan	10 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					50.000.000
3 27 1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Has Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		10 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
3 27 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					75.000.000
3 27 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					75.000.000
3 27 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	18.567.053.776						20.978.169.527
3 27 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	18.172.053.776	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.623.169.527
3 27 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11 Laporan	275.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					225.000.000
3 27 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					75.000.000
3 27 1 2.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					55.000.000
3 27 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100%	95.000.000						65.000.000
3 27 1 2.03	4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
3 27 1 2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000
3 27 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	890.000.000						1.405.000.000
3 27 1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 Pegawai	360.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					900.000.000
3 27 1 2.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
3 27 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Pegawai	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
3 27 1 2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000
3 27 1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
3 27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.449.999.720						1.536.000.000
3 27 1 2.06	l Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l PAket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000
3 27 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					365.000.000
3 27 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l paket	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					116.000.000
3 27 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	55.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					55.000.000
3 27 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		l Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					30.000.000
3 27 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					250.000.000
3 27 1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
3 27 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	514.999.720	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					650.000.000
3 27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	358.000.000						729.000.000
3 27 1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					520.000.000
3 27 1 2.07	4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1.000.000
3 27 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
3 27 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua	2 Unit	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					8.000.000
3 27 1 2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	9.710.050.586	Description Description					6.942.816.500
3 27 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					55.000.000
3 27 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang Disediakan	ra	3 Laporan	188.701.390	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000

				Tahun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				.,5	120.000.000
3 27 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	9.396.349.196	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.617.816.500
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah		100%	490.000.000						280.000.000
3 27 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	93 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
3 27 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	115.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000
3 27 1 2.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000
3 27 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)		74 %	10.275.000.000						18.485.000.000
3 27 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	Kab. Kutai Barat, Semua		6.450.000.000					1	12.135.000.000
3 27 2 2.01	l Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		16 Laporan	2.010.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1.213.500.000
3 27 2 2.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	4.440.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.921.500.000
3 27 2 2.05	dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kutai Barat, Semua	1850 Ekor	1.250.000.000					T	1.800.000.000
3 27 2 2.05	5 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan	1850 Ekor	1.250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1.800.000.000
3 27 2 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	Kab. Kutai Barat, Semua	435 Ekor	2.575.000.000						4.550.000.000
3 27 2 2.06	l Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Kecamatan, Semua Kelurahan	435 Ekor	2.575.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					4.550.000.000
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan Prasarana Pertanian (%)		72 %	17.920.000.000						9.665.000.000
3 27 3 2.01 3 27 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian 2 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan		I dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Jumlah Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan (Meter)		2400 Meter	17.520.000.000						9.315.000.000
3 27 3 2.02	l Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi . dan Dipelihara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 Unit	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					500.000.000
3 27 3 2 02	2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi	Kelurahan	1 unit	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
3 27 3 2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	dan Dipelihara Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		10 Unit	10.672.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					3.550.000.000
3 27 3 2.02	8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipadibara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1.700.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1.200.000.000
3 27 3 2.02	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	Keitranan	10 Unit	4.448.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					4.065.000.000
3 27 3 2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum		10 Hektar		Hasii					350.000.000
3 27 3 2.04	l Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	LuasLahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 Ha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
3 27 3 2.04	2 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	10 Ha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	Kelurahan	70 %	1.565,000,000					<u> </u>	1.490.000.000
2 27 42 01	VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan		4490 Ekor	1.175,000,000						1.175.000.000
3 27 4 2.01	Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan		16 Laporan	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					800.000.000
3 27 4 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	10 Laporan	375.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					375.000.000
3 27 4 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan	Kelurahan	38 Kali	165.000.000	Hasıl					165.000.000
3 27 4 2.02	l Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Keamanan Produk Hewan Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	16 Laporan	165.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					165.000.000
3 27 4 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produk Hewan	Kelurahan		75,000,000	riasii					
3 27 4 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daeran Kabupaten/Kota Pengediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		1 laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
3 27 4 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk		10 Laporan Pengawasan	150.000.000	Hasıl					150.000.000
3 27 4 2.04	2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	10 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT Pertanian (%)	Kelurahan	94 %	360.000.000	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					870.000.000
3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan OPT		30 Lokasi	360.000.000						870.000.000
3 27 5 2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertanian (Lokasi) Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	7 Ha	360.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					570.000.000
3 27 5 2.01	2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dikendalikan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	16 Ha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000
3 27 5 2 01		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan,		16 Ha		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			+		150.000.000
3 27 3 2.01	3 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kecamatan, Semua Kelurahan	10 118		Hasil					150.000.000

	Tahun 2023											
						Сар	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Rencana Tahun 2024	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
200		BROCK M BENEFIT LITTLY BENEFALLY	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Lapangan		80 %	4.012.000.000		Nasional	Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	(%)			4.812.000.000	,				12.633.600.000	
3 27	7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Lapangan		8946 Kali	4.812.000.000					12.633.600.000	
3 27	7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Unit	2.550.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1.905.600.000	
3 27	7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Unit	1.802.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9.340.000.000	
3 27	7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	16 Unit	360.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1.088.000.000	
3 27	7 2.01 4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300.000.000	
			L	Kelurahan	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>		
		UPT. Revitalisasi Perkebunan				605.319.962	2				757.000.000	
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				605.319.962					757.000.000	
3 27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				347.000.000)				347.000.000	
3 27	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Kutai Barat, Semua		20.000.000	0				20.000.000	
3 27	1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10.000.000	
3 27	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10.000.000	
3 27	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.000.000					15.000.000	
3 27	1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1 Laporan	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7.500.000	
3 27	1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	6 Laporan	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7.500.000	
2 27	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Kelurahan		50.000.000					50.000.000	
3 21	1 2.05		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
3 27	1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 orang	50.000.000	Hasil				50.000.000	
3 27	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				65.000.000				1	65.000.000	
3 27	1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25.000.000	
3 27	1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	l paket	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20.000.000	
3 27	1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kelurahan	1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi				5.000.000	
2 22	1206 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		2 Laporan	15.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi				15.000.000	
3/2/	12.00		Konsultasi SKPD		2 Laporan		Hasil					
3 21	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Kutai Barat, Semua		148.500.000					148.500.000	
3 27	1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	4 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2.000.000	
3 27	1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	13.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13.000.000	
3 27	1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3.500.000	
3 27	1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	130.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				130.000.000	
3 27	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.500.000					48.500.000	
3 27	1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5.000,000	
3 27	1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	28.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28.500.000	
3 27	1 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15.000.000	
3 27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	recitiranan	76%	98.319.962					250.000.000	
	2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				98.319.962					250.000.000	
3 27	2 2.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanjan		1 Laporan	98.319.962	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250.000.000	
3 27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT		96%	160.000.000					160.000.000	
3 27	5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pertanian (%)			160.000.000					160.000.000	
3 27	5 2.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Ha	160.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				160.000.000	
			DIACIRGIIKAII	peciuranan								
		UPT. Agrobisnis Pertanian Empas				794.994.696					1.303.125.000	
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				794.994.696 390.244.696					1.303.125.000 504.500.000	
3 27		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				390.244.696					504.500.000 4.000.000	
-		The same of the sa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			5.000.000					4.000.000	
3 27	1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4.000.000	
3 27	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	London Language All The County	Val. Varia D . C		6.000.000					10.000.000	
3 27	1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5.000.000	
							_					

					Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Prakiraan Maju Ren	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional F	rioritas Daerah	Target C: Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000
3 27 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				48.000.000	0					70.000.000
3 27 1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		1 Paket	18.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000
3 27 1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					50.000.000
		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan			Hasil					
3 27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan			104.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi				1	127.000.000
3 27 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan	K I K · 'D · C	1 Paket	6.000.000	Hasil					8.000.000
3 27 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	18.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					22.000.000
3 27 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	13.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					16.000.000
3 27 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					8.000.000
3 27 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000
3 27 1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000
3 27 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Keitrianan	12 Laporan	41.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					48.000.000
3 27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Konsultasi SKPD		r···	22.750.000	Hasil					58,500,000
3 27 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					50.000.000
2 27 1 2 27	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		+	6 Unit	12.750.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	1	1	1	1	8.500.000
3 27 1 2.07		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit		Hasil					
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.194.690	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					160.000.000
3 27 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	3.000.000	Hasil					5.000.000
3 27 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang Disediakan	3	12 Laporan	34.994.696	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					18.000.000
3 27 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					7.000.000
3 27 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	88.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					130.000.000
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang Disediakan			75,000,000	Hasil				<u> </u>	75.000.000
3 27 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000
3 27 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000
3 27 1 2.09	12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					30.000.000
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Keitrianan	76%	300.000.000)					155.625.000
3 27 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)			300,000,000						155.625.000
0 27 2 2.01		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi					
3 27 2 2.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pertanian	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	300.000.000	Hasil					155.625.000
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan Prasarana Pertanian (%)		76%	104.750.000)					643.000.000
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Fenyediaan Frasarana Fertaman (70)			104.750.000						643.000.000
3 27 3 2.02	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	104.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					643.000.000
		Diferabilitasi dan Dipermara	1			Hasii	1	I.	l	ı	
Ш	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				8.774.265.042	2					23.211.591.662
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.559.265.042	2					19.167.749.162
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	8.131.265.042	2					10.501.489.612
2 7 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi		100 %	94.000.000	D					209.120.500
2 7 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			51.005.000
2 7 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			51.005.000
2 7 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			66.306.500
2 7 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			40.804.000
2 7 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	4.359.954.490			Akuntabel			4.617.064.990
2 7 1 2.02	I Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4.309.954.490	Dana Tananéra Limona - Dana Bani		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			4.509.954.490
2 7 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.502.500
2 7 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1		15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			30.603.000
2 7 1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan			10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.502.500
шш		Tindak Lanjut Pemeriksaan	L			Hasii	I	Akuntabel			

				Tahun 2023	Co	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın			Prakiraan Maju Renc	ana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	T 2022				ioritas	Target Ca	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
				Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			25.502.50
7 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang semakin sistematis		100 %		-					204.020.00
7 1 2.05 1	l Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			204.020.00
7 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	292.000.00	nasii		Akuntabel			976.663.13
1 2.00				100 /0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
7 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			150.000.00	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			670.633.13
7 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			35.703.50
7 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			15.301.50
7 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			110.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			255.025.00
7 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	3.385.310.55	2					4.188.591.00
7 1 2.08	l Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.502.5
7 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayı Air dan Listrik yang Disediakan	3		80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			86.708.50
7 12.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan			20.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemarintahan yang Baik Barrih dan			306.030.00
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
7 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	yang Disediakan			3.284.310.55	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			3.770.350.00
7 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %							306.030.00
7 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			306.030.0
7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi * Besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat * Besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kewirausshama *		21 % 19 % 11 %	143.000.000			Akumaoca			3.912.593.5
7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		30%		-					3.208.214.5
7 3 2.01	l Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			3.208.214.5
7 3 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		30%	72.000.00	D					51.515.0
7 3 2.02	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			72.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			51.515.0
7 3 2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		25	15.000.00	Hasii		Akuntabel			474.346.5
7 3 2.04		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi		35 orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
7 3 2.04	l Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Peningkatan Produktivitas		20 Perusahaan	15.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			474.346.5
7 3 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terukurnya Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		8 kecamatan	56.000.000	0					178.517.5
7 3 2.05	l Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	ı		56.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			178.517.5
7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		16 %	71.000.00	D					2.091.205.0
7 4 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan		93,28 %	25.000.000	0		Pemantapan Tata Kelola			484.547.5
7 4 2.01	l Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			153.015.0
7 4 2.01	2 Pelayanan antar Kerja				-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			178.517.50
7 4 2.01	3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bugi Pencari Kerja					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			76.507.5
7 4 2.01	4 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			76.507.5
7 4 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Lembaga Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		93,28 %	25.000.00	D					229.522.5
7 4 2.02	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			76.507.5
7 4 2.02	2 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku			25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			153.015.00
7 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Inforrmasi Pasar Kerja		93,28 %							382.537.5
7 4 2.03	l Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		_			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			153.015.0
7 4 2.03	2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			102.010.0
7 42.02	3 Job Fair/Bursa Kerja					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			127.512.50
/ 412.03											

					Tanun 2023	Ca	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana:	n			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional F	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
2 7 4 2.0	4 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel	1010K UKUP	Target	Ради Indikatii (кр.) 76.507.500
2 7 4 2.0	4 2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			76.507.500
2 7 4 2.0	4 3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			76.507.500
2 7 4 2.0	5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		93,28 %	21.000.000			Akuntaner			765.075.000
2 7 4 2.0	П	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			765.075.000
			Persentase Pemeriksaan Perusahaan		269/		114311		Akuntabel			
2 7 5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		26% 26%	214.000.000						2.662.461.000
2 7 5 2.0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		66,66 %	101.500.000						918.090.000
2 7 5 2.0	1 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			153.015.000
2 7 5 2.0	1 2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			10.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			255.025.000
2 7 5 2.0	1 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			71.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			510.050.000
2 7 5 2.0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		66,66 %	112.500.000						1.744.371.000
2 7 5 2.0	2 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			36.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			510.050.000
2 7 5 2.0	2 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			36.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			357.035.000
2 7 5 2.0	2 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				10.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			387.638.000
2 7 5 2.0	2 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			489.648.000
3 32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				215.000.000			Akuntabei			4.043.842.500
3 32 2	_	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Ketersediaan kawasan Transmigrasi		25 %	70.000.000						1.861.682.500
3 32 2 2.0	1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan RKT		4 Kecamatan	70.000.000						1.861.682.500
3 32 2 2.0	1 1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			714.070.000
3 32 2 2.0	1 2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			714.070.000
3 32 2 2.0	1 3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			433.542.500
3 32 2 2.0	1 4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
3 32 3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Transmigrasi yang menetap		14 %	85.000.000						1.417.085.000
3 32 3 2.0	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6 Kecamatan	85.000.000						1.417.085.000
3 32 3 2.0	1 2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)		0 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			550.000.000
3 32 3 2.0	1 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			85.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			255.025.000
3 32 3 2.0	1 6	Pelatihan Transmigrasi					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			306.030.000
3 32 3 2.0	1 7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			306.030.000
3 32 4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Kawasan Pemukinan yang di kembangkan		21 %	60.000.000						765.075.000
3 32 4 2.0	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap		10 %	60.000.000						765.075.000
3 32 420	, ,	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kemandirian Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			255.025.000
3 32 4 2.0	1 2	Penguatan SDA datan tangsa Kemanunan Sauan Pemasinan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Copus Comaga rumatingtan yang Divind			00.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			510.050.000
3 32 412.0	1 2	s enguasan minasuskur Susiai, Ekonomi uan Kelemuggan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman					Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	<u> </u>		510.050.000
		SEKRETARIAT DAERAH				94.843.823.255						152.165.308.481
4 1		Bagian Umum				27.208.541.107						48.355.175.304
4 1 1			Persentase Cakupan Administrasi Umum Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			27.208.541.107						48.355.175.304
4 1 1 2.0.	П	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			111.394.500 15.913.500
4 1 1 2.0	o 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-				Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
4 1 1 2.0	5 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		Hasil	l	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.913.500

					Tahun 2023	Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaai	1			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
4 1	1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 15.913.500
4 1	1 2.03 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			15.913.500
4 1	1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			15.913.500
4 1	1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			15.913.500
4 1	1 2.03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			15.913.500
4 1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Kepegawaian		100%	155.985.313	S		Akuntabel			3.166.383.850
4 1	1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Perangkat daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		I Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			128.899.350
4 1	1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.913.500
4 1	1 2.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			106.090.000
4 1	1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.913.500
4 1	1 2.05	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		2 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.522.500
4 1	1 2.05 7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.522.500
4 1	1 2.05 8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		2 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.522.500
4 1	1 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			1.944.500.000
4 1	1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		177 Orang	55.985.31	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			875.500.000
4 1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tertata Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100%	2.281.320.000	9					6.918.676.128
4 1	1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		l Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			300.000.000
4 1	1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			356.232.428
4 1	12.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian PBJ Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Tahun 1 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			100.000.000
4 1	12.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	30,000,000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			2.688.825.482
4 1	12.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		1 Paket	139,000,000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			875.718.922
4 1	12.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		1 Dokumen	12.000.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			5.881.630
4 1	12.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.750.000
4 1	12.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			106.090.000
H		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		12 Laporan		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			100.070.000
4 1	1 2.06		Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Bagian PBJ		1 Tahun	2.070.320.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			2.094.727.666
4 1	1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			15.450.000
4 1	1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem		2 Dokumen		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			350.000.000
	112.07		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang			122 62-	Hasii		Akuntabel			
4 1	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah		100%	122.000.000	Dana Transfer Limum, Dana Pari		Pemantapan Tata Kelola			2.206.000.000
4 1	1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			400.000.000
4 1	1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit		Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			600.000.000
4 1	1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		15 Unit	122.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			1.000.000.000
4 1	1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	22.172.727.229	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			206.000.000 27.602.830.412
4 1	1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	13.964.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			14.852.600
ᄔ	$\sqcup \!\!\! \perp \!\!\!\! \perp$	1	l .	L			. I		Akuntabel			

Kode	ie	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan									
ПП		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas		ipaian Kinerja	Kebutuhan Dana
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		12 Laporan	1 ng. 1 (Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Nasional Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4 1 1 2.0	.08 2		Air dan Listrik yang Disediakan "Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Bulan	2.354.719.198	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da			5.731.010.487
4 1 12	.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik" Bagian PBJ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan			494.006.260	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da			532.288.752
4 1 123	.08 3		Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2 Laporan	494.006.200	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			332.268.732
4 1 1 2.0	.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	yang Disediakan Terbayarnya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Laporan	19.310.037.771	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	n		21.324.678.573
$\bot \bot \bot$			Bagian PBJ Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 bulan		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		
4 1 1 2.0	.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah		100%	497.050.682		Pemantapan Tata Kelola		1	5.787.538.914
4 1 1 2.0	.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		31 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		3.078.258.000
4 1 1 2.0	.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		58 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		500.000.000
4 1 1 2.0	.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		8 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		20.600.000
4 1 1 2.0	.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		20.600.000
4 1 1 2.0	.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		756.538.611
4 1 1 2.0	.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		57 Unit	493.050.682	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		1.411.542.303
4 1 1 2.	.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	779.457.878					1.002.351.500
4 1 1 2.	.11 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		24 orang/bulan	193.607.878	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		317.291.500
4 1 1 2.	.11 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		95 Paket	80.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		105.060.000
4 1 1 2.	.11 3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		24 orang/bulan	105.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		120.000.000
4 1 12.	.11 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		24 orang/bulan	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		460.000.000
4 1 1 2.	.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat daerah yang Terlayani dengan baik sesuai dengan Prosedur		100%	1.200.000.000					1.560.000.000
	.12 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		l RT	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		620.000.000
4 1 12.	.12		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12 Bulan	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		620.000.000
4 1 12.	.12 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Dacrah yang Disediakan		1 RT	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		520.000.000
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Bulan						
4 1 12	.12 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1 RT	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		420.000.000
	3		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		12 Bulan	300.000.000		Akumater			420.000.000
4 1		Bagian Kesejahteraan Rakyat				34.730.028.890					44.137.164.022
4 1 2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				34.730.028.890					44.137.164.022
4 1 2 2.0	.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				34.730.028.890				1	44.137.164.022
4 1 2 2.0	.02 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			197.439.346					270.449.557
4 1 2 2.0	.02 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahlenan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			34.442.589.544	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih di Akuntabel	n		39.391.715.623
	.02 3	Pelaksanaan Kebijukan, Evaluasi, dan Cupaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		4.474.998.842
4 1 1		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1.000.000.000					7.724.738.607
4 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.000.000.000					7.724.738.607
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1.000.000.000					7.724.738.607
	, .	Fasilitasi Keprotokolan	Adanya Pendampingan Kegiatan Pimpinan Daerah Baik Diluar Maupun Didalam Daerah		467 kali	200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		20
4 1 12.	.14 1		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Koordinasi dan Peningkatan Kinerja		1 Laporan 233 acara	200.000.000					302.056.842
+++	-H		Keprotokolan		acutu			Pemantapan Tata Kelola	1	-	<u> </u>
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		9 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		

						Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					rakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Prioritas	Target Capaia		Kebutuhan Dana
\vdash	11		Sinergitas KOPIM secara berjenjang di lini pemerintah se		2			Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			provinsi Kaltim		3 orang							
			Sinergitas Tupoksi KOPIM di seluruh jajaran Pemda, BUMN dll		3 orang							
			Terawatnya sarana fasilitasi penunjang komunikasi		6 unit							
			Terlaksananya fasiltasi komunikasi pimpinan		12 bulan							
			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring fungsi PROKOPIM diseluruh jajaran		19 kegiatan							
			Terlaksananya pembuatan artikel yang memuat			1						
			penyelenggaraan pemerintah kabupaten Kutai Barat melalui		620 artikel							
			program pemerintah dan seluruh stakeholdersnya			COO 000 000						5 000 777 200
4	1 1 2.14		Terlaksananya peningkatan SDM KOPIM melalui kegiatan BIMTEK/WORKSHOP/ON JOB		2 orang	600.000.000						5.899.766.390
			TRAINING/PELATIHAN/DIKLAT									
			Terpublikasikannya penyelenggaraan pemerintah daerah		318 kali							
			Tersampaikannya seluruh informasi pembangunan melalui website setdakab Kutai Barat		310 artikel online							
			Tersedianya honorarium KPA/PPK, PPTK, PSIPD, PPBJS,									
			Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Pengelola Barang		12 bulan							
			Tersedianya layanan Galeri Informasi Setdakab Kubar		5 kegiatan							
			Tersedianya layanan langganan e-paper		5 media e-paper							
			Tersedianya peningkatan sarana fasiltasi komunikasi pimpinan		4 unit							
			Tersedianya referensi penyusunan naskah sambutan		424 naskah							
\vdash			Tersedianya sarana ATK Pada bagian PROKOPIM	1	1 Tahun	1		1	Pemantapan Tata Kelola	ļ .		
4	1 1 2.14	3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		26 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			1.522.915.375
ш				L	L	1		I	Akuntabel	<u> </u>		
4	1	Bagian Organisasi				1.000.000.000						1.768.000.000
4	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.000.000.000						1.768.000.000
4	1 1 2.13	Penataan Organisasi				1.000.000.000			D . T . V . I	1		1.768.000.000
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
			Jabatan				Hasii		Akuntabel			
4	1 1 2.13		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		12 dokumen	300.000.000						450.000.000
- 1 1	1 12.13	i i	Persentase Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang Dibentuk		0.97 persen	300.000.000						430.000.000
			Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		0.97 persen							
			Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Telah dilakukan Analisis Jabatan		0.47 persen							
Ħ	11		Dokumen Peta Proses Bisnis Kabupaten Kutai Barat Sesuai				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ketentuan Yang Berlaku		1 dokumen		Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
			Indesk Kepuasan Masyarakat		0.79 persen							
			Innovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah		3 inovasi							
4	1 1 2.13		Jumlah fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata		1 dokumen	300.000.000						350.000.000
	1 12.13		Laksana		1 dokumen	300.000.000						330.000.000
			Presentase Dokumen Standar Operasional Prosedur Perangkat Deerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku		0.68 persen							
			Presentase Perangkat Daerah yang memiliki standar		0.68 persen							
			pelayanan sesuai sesuai ketentuan yang berlaku Presentase standar pelayanan yang difasilitasi informasi		1 Laporan							
H	++-		pelayanan Publik Melalui SIPP		Laporar				Pemantapan Tata Kelola			
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks RB		56		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
4	1 1 2.13	3	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi	1	2 delemen	300.000.000			Akuntabel			685.000.000
			Birokrasi	ļ	2 dokumen	4				ļ		
+	+	 	Nilai AKIP	-	00			 	Pemantapan Tata Kelola	-		
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi Ketatalaksanaan (Tata Naskah Dinas, Jam Kerja, Pakaian Dinas)		3 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian	+		1			Akuntabel			
			Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Penilaian Kepatuhan OMBUDSMAN, Penilaian Panji Pelayanan		3 Dokumen							
4	1 1 2.13	4	Publik, Adi Bakti Tani)			50.000.000						108.000.000
]	112.13		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian		1 Dokumen	50.000.000						100.000.000
			Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1						
			Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1	1 kali							
			Persentase ketersediaan koordinasi pelayanan publik dan		0.65 persen	1						
H	+		tata laksana sesuai kebutuhan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	+			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	†	Pemantapan Tata Kelola			
4	1 1 2.13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		2 Dokumen	50.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			175.000.000
]			Persentase penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah		97 persen	50.000.000			, wallace			173.000.000
ш		<u> </u>	Tepat Waktu	1	paraem	<u> </u>	l .	1	1			
4	1	Bagian Perekonomian				1.000.000.000						3.020.806.660
Ħ			Persentase Kinerja Perusda/Perumda/BUMD dan			1100000						211231030100
			BLUD yang Semakin Meningkat Berkaitan Dengan									
			Monitoring yang Intensif Serta Terbentuknya BUMD dan BLUD Kabupaten Kutai Barat									
			Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan		90 %							
4	1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Kinerja Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		89 % 100 %	1.000.000.000						3.020.806.660
			Persentase pengawasan SPBU, Agen dan Pangkalan									
			LPG bersubsidi serta perencanaan dan pengawasan peningkatan pengembangan usaha mikro melalui									
			keikutsertaan promosi									

					Tahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendana	an	Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4	3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan		20%	1.000.000.000		Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.) 3.020.806.660
1	3 2.01	гетакзапаан Кенфакан гетекопоннан	Peraturan Perundangan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,		2076	1.000.000.000		Pemantapan Tata Kelola		3.020.800.000
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD		4 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		
			dan BLUD Koordinasi dan Konsultasi dengan Provinsi dan Pusat		2 Perusda			Akuntabel		
4	3 2.01	1	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD		13 Kecamatan	333.333.400				922.983.000
			Pelatihan Kemampuan Direksi dan Pegawai dari BUMD		2 Perusda					
			dan BLUD Sosialisasi BUMD dan BLUD (Peraturan dan Kegiatan)		6 Kecamatan					
\vdash			Sosialistis Bosto dan Beob (Feliatan dan Regiatan)		o recumum			Pemantapan Tata Kelola		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Evaluasi Kinerja TPID Kabupaten Kutai Barat		92		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	ı	
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah		16 Kecamatan			Akuntabei		
4	3 2.01		Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian		10 Rakor	333.333.300				1.060.900.000
			Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan		16 Kecamatan					
			Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi		 					
Ш			Perekonomian		4 laporan					
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		5 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		
			Konsultasi dan Koordinasi Rapat-Rapat Subbagian				Hasii	Akuntabel		
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		100 persen					
			Pemantauan LPG Bersubsidi di wilayah Kabupaten Kutai		16 Kecamatan					
4	3 2.01	3	Pengawasan dan Perencanaan Pengembangan Usaha Mikro		100 persen	333.333.300				941.442.660
			di Kabupaten Kutai Barat		1				 	
			Pengawasan Pendistribusian Premium dan Solar Bersubsidi		16 Kecamatan					
			Perencanaan Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil Event Promosi Mengikuti Pameran / expo Di Luar Daerah		100 persen					
H								Pemantapan Tata Kelola		
4	3 2.01	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	ı	42.436.000
H	++-		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
4	3 2.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		1 Dokumen	-	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel		53.045.000
				,				ļ		
4	<u> </u>	Bagian Hukum	T	1		1.000.000.000				2.151.959.500
4	1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase-Jumha Realisasi penyaluran Bantuna sosial Kepada Kelompok Mayarakat dan Individu Sesuai Undang-ubdan dan Kebijakan yang Berlaku Persentase Jamha Realisasi penyaluran Hibah Kepada Badan, Lembaga, Yayasan dan Organisasi Sesuai Undang-undang dan Kebijakan yang Berlaku Persentase penembaha Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyekegaraan Pemerintahan Daerah Persentase penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan, Lembaga, Yayasan dan Organisasi Sesuai Undang-undang dan Kebijakan yang Berlaku Tingkat Cakupan Peningkatan kualitas Kehidupan Religius antar umat beragama		92 % 92 % 70 % 92 % 92 %	1.000,000,000				2.151.959.500
	Ш									
4	2 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		220 Dokumen	1.000.000.000		Pemantapan Tata Kelola		2.151.959.500
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		185 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		
			Terlaksananya evaluasi peraturan kampung		10 Perkam			Akuntabel		
			Terlaksananya evaluasi perda		10 Perda					
			Terlaksananya fasilitasi, konsultasi dan evaluasi rancangan		10 Dokumen					
			Terlaksananya fasilitasi, konsultasi dan evaluasi rancangan		15 Dokumen					
4	2 2.03		perda Terlaksananya harmonisasi, pembulatan dan pemantapan		1	451.838.000			 	972.205.500
			konsepsi rancangan perbup		10 Dokumen					
			Terlaksananya harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda		10 Dokumen					
			Terlaksananya penyusunan peraturan daerah		10 Perda					
			Terlaksananya penyusunan peraturan dan keputusan Bupati	<u> </u>	100 SK					
			Terlaksananya program pembentukan peraturan derah (Propemperda)		10 Dokumen					
П		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		20 dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		
			Terlaksananya bantuan hukum oleh tim advokasi	1	3 Perkara			Akuntabel		
			penanganan perkara Pemkab Kutai Barat Terlaksananya harmonisasi perda		4 Perda					
4	2 2.03		Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan penyelesaian		3 Perkara	407.201.000				876.451.000
			perkara Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan		1					
			Ranham		4 Laporan					
	Ш		Terlaksananya penyelesaian masalah hukum dan penanganan keamanan masyarakat		16 Kecamatan					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		15 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	
			Terlaksananya desiminasi produk hukum daerah		5 Kecamatan			- AN ARMADA		
			Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum		4 SDM					
4	2 2.03	3	Terlaksananya pembinaan kampung sadar hukum	İ	4 Kampung	140.961.000				303.303.000
			Terlaksananya pendataan dan penetapan kampung sadar hukum dan keluarga sadar hukum		5 Kecamatan					
1.1		1 1	покот оап кенагда запаг покит	1	1		1	1		ı İ

The content of the						Tahun 2023					
March Marc			F (N) F (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N)	7 The B. (17 to 16 to 17			Cap	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa I	h.iis		
March Marc		Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sun Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
Miles	П			Terlaksananya penyuluhan dan penerangan hukum terpadu		3 Kecamatan					
				Terlaksananya penyusunan dan penjilidan lembaran daerah,							
	Ш			himpunan peraturan dan keputusan bupati	l	15 Dokumen					
The content of the	4 1		Bagian Tata Pemerintahan				1.000.000.000				3.287.890.000
March Marc	4 1										3.287.890.000
Part Part	4 1	2 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				1.000.000.000		Pemantanan Tata Kelola		3.287.890.000
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Antar Instansi Vertikal dan Daerah	4	12 kali		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		
1				Fasilitasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan		12 kali			Akuntabei		
				Daerah di Kabupaten Kutai Barat Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi			4				
Part	4 1	2 2.01	1	Pemerintahan		3 dokumen	333.500.000				901.765.000
				Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan		3 Dokumen					
Page Page				Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan		3 dokumen					
Part Part	Ħ							Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola		
Part Part			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Camat		I Perkada		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		
Part Part						1 Kecamatan					
1				Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah Antara							
				Berbatasan		o organen Batas	_				
						3 Kecamatan					
	4,	2 2 01	2	Fasilitasi Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas		35 Segmen batas	222 000 000				1.326.125.000
A	" '	2,2,01		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi			333.000.000				1.320.123.000
Martin Control As Discovery Mart				Kewilayahan Kajian dan Peraturan Bupati tentang Batas							
Marriage of the following Exchange (Seption Marriage (Seption Marriage (Seption Marriage) (Marriage) (Marria				Kampung/Kelurahan dan Kecamatan		5 Dokumen					
Marriage of the control of the con						4 Kelurahan					
Parties Part											
				Pembuatan Pilar Batas Kelurahan/Kampung dan Kecamatan		15 Pilar Batas					
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		16 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			
								riasii			_
Section Sect				Daerah		6 dokumen					
Processing April 1997 Processing Polymorphism (See Val. Processing Polymorphism (See Val. Processing Polymorphism (See Val. Processing Polymorphism (See Val. Polymorphism (See Val	4 1	2 2.01	3			3.6 Nilai I PPD	333.500.000				1.060.000.000
						3.0 Mar La 1 D					
				Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		7 Perangkat Daerah					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						3 Lanroan					
1 10 10 10 10 10 10 10	Ш				1	7			1	l	
Section Processing Proces	4 1										2.650.000.000
Substitution Subs	4 1	3 2 02									2.650.000.000
Pendangsan Breath Constituted in Knowless Problemgenes Describ Constituted in Knowless Problemgenes and su subconsists place house of the Vision of the Visi	4 1	3 2.02		lumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			1.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi			2.030.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pembangunan Daerah		2 Dokumen		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2				Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Daerah		12 kali					
Persistandia di Postante Agrico Persistandia di Postante Republica del Postante Republica del Postante Republica del Postante Republica del Postante Republica del Postante Republica del Postante del P	11.	212.02		"Pemantauan dan sinkronisasi pelaksanaan Musrenbang"		14 Kecamatan	222 222 400				1 000 000 000
Rapat Lordinasi produpangama denerbi se-Kalima Liali Delamin	4 1	312.02	1				333.333.400				1.000.000.000
Tim Monitories Terpular Perchangunan De bain Debam Deb											
Pengendulan dan Evaluasi Program Pembangunan Indonesa sayan Koholyutan Kotali Basit Indonesa					1						
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanganan Fastisas dan Kotomian Pengendalian dan Evaluasi Program Pendenganan Jamiah Laporan Haril Pregendalian dan Evaluasi Program Pendenganan Mengkan Didan Bimerk Teknis Bidang Analisis Pengendalian Program Pembanganan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanganan Mengkan Didan Bimerk Teknis Bidang Analisis Pengendalian Program Pembanganan Pengendalian Pengendalian Program Pembanganan Pengendalian Pengendalian Program Pembanganan Pengendalian Pengendalian Pengendalian delan Pelaporan Pengendalian Pengendalian Pengendalian delan Pelaporan Pengendalian Pengendalian Pengendalian delan Pelaporan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian delan Pelaporan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian delan Pelaporan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian delan Pelaporan Pengendalian Pengenda											
A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Program	1	1 laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			
Perpendagnam Perp					ļ	-1	_	Hasil	Akuntabel		
Name				Pembangunan		4 Dokumen					
Pengedalan Data Pengendalan Penbanguan Penbanguan Penbanguan Penbanguan Pengendalan Pengam Penbanguan I Iaporan Pengendalan Pengam Penbanguan I Iaporan Sestaman Penbanguan I Iaporan Pengendalan Pengam Penbanguan I Iaporan Sestaman Penbanguan I Iaporan Pengendalan Pengam Penbanguan I Iaporan Pengam Penbanguan I Iaporan Pengendalan Pengam Penbanguan I Iaporan Pengen	4 1	3 2.02	2	Mengikuti Diklat/ Bimtek Teknis Bidang Analisis	1	10 orang	333.333.350				825.000.000
Pengendalan Pogram Pembangunan Funjanganan				Pengolahan Data Pengendalian Program Pembangunan		1 laporan]				
Sosialsasi dan FGD Julnis / Kebijaan Bidang 1 Iaporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Iaporan Junilah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Iaporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Iaporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Iaporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Iaporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Iaporan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Pemaritahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Dokumen DAFAAH 1 Iaporan 1 Iaporan 2 Iaporan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Pemaritahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemaritahan yang Ba				Penyusunan Juknis / Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan		1 laporan				i I —	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Pementindahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pementindahan yang Baik, Bersi				Sosialisasi dan FGD Juknis / Kebijakan Bidang		1 Iaporan	1				7
Pelaksanaan Pembangunan 2 inpotal Hasil Pemerintahan yang Bair, Bersin dan Akuntabel A	H	+			1			Dana Transfer Umum - Dana Ragi			
4 1 3 2 2 3 MONTORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 1 Dokumen 1 Dokumen 333.333.250			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan	1	2 Iaporan		Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		
4 1 3 202 3 PENYIUSINAN LAFORAN PERBANGUNAN DAERAH 1 dokumen 333.333.250						1 Dokumen				İ	
RAPAT PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN I Dokumen (RADALOK) ITME VALUASI PENGAWASAN REALISASI APBD I dokumen (TEPRA) Bagian Sumber Daya Alam 2.466.500	4 1	3 2.02	3	PENYUSUNAN LAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH		1 dokumen	333.333.250				825.000.000
(RADALOK) 1 DOGUMEN THE WALLIASI PENGAWASAN REALISASI APBD 1 dokumen TEPRA) 1 dokumen 2.466.500				RAPAT PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN	 		1			 	\dashv
				(RADALOK)	 		-			 	=
	Ш				Ĺ	1 dokumen					
	4 1		Bagian Sumber Dava Alam				1.000.000 000				2.406.500.000
	4 1										2.406.500.000

					Tahun 2023							
		n (n) n (n				Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendana		rioritas		Prakiraan Maju Ren	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional P		Target Capa Tolok Ukur		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
4 1	3 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				1.000.000.000		nasional	Daerah	1 Olok UKUr	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 2.406.500.000
4 1	3 2.04	remantauan Kebijakan Sumber Daya Atam				1.000.000.000	,			1		2.406.500.000
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanjan Pangan, Kehutanan.				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,		4 Dokumen		Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
4 1	3 2.04	1	KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			333.333.000	o		Akuntabei			720.000.000
			Perbup CSR Sawit		1 Dokumen							
			Sosialisasi regulasi Perikanan		8 Kecamatan	1						
			terbentuk lokasi lembo		25 Kampung							
			"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan						Pemantapan Tata Kelola			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan,	a	4 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
			Statistik, Persandian"				******		Akuntabel			
4 1	3 2.04	2	Kampung Binaan CSR di Sekitar Tambang		14 Kampung	333.334.000	D .					1.596.500.000
			Menurun Kerusakan Lingkungan di Wilayah Pertambangan		25 persen							
			Tersalurnya Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan ke Kas							-		
ш			Daerah		150 M							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan		4 dokumen		Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
4 1	3 2.04	3	Kawasan Permukiman,Pertanahan			333.333.00	o e		Akuntabel			90.000.000
			Kampung yang Mendapatkan PLTS Terpusat		1 Kampung							
			Kampung yang sudah teraliri Listrik PLN		9 kampung							
ш	<u> </u>		Perbup untuk air bersih	L	1 Dokumen		L	<u> </u>	i	LL		
4 1		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				1,000,000,00						3.568.462.000
4 1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1		1.000.000.000						3.568.462.000
4 1	3 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.000.000.000						3.568.462.000
П			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola	I		
4 1	3 2.03	l Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jasa		1 Dokumen	641.550.000	Hasil	İ	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.102.320.600
H	H —		Jumlah Dakuman Haril Laurens Berendere Con-	1	 		Dana Transfar Un D D	 	Pemantapan Tata Kelola	† †		
4 1	3 2.03	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		14 Dokumen	6.316.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	İ	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			466.946.600
H	\vdash			1	+	1	 	+	Akuntabel Pemantanan Tata Kelola	+ +		
4 1	3 2.03	3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		2 orang	352.134.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			999.194.800
Ш			rengadaan Barang dan Jasa				nasii	ļ	Akuntabel			
4 1		Bagian Kerjasama				1.000.000.00						3.013.265.000
4 1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				1.000.000.000	,					3.013.265.000
4 1	2 2.04					1.000.000.000)					3.013.265.000
П							Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	i	52 Dokumen		Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
			Jumlah Dokumen kerjasama antar daerah melalui						Akuntabel	-		
4 1	2 2.04	1	FORSESEDASI		5 Dokumen	400.000.000						901.765.000
111	212.04		Jumlah Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri		20 Naskah Kerjasama	400.000.00						701.703.000
			Jumlah Naskah Kerjasama daerah dengan pemerintah /daerah lainnya		6 Dokumen							
			Jumlah Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat		15 Naskah Kerjasama							
H	-		Daerah dg Pihak ketiga		15 Maskan recipisana				Pemantapan Tata Kelola	1		
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		8 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
							Hasii		Akuntabel			
4 1	2 2.04	2	jumlah dokumen jaringan		2 Dokumen	200.000.000	D.					583.495.000
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan kerjasama daerah luar negeri		10 Dokumen							
			jumlah Naskah kerjasama daerah pemerintah dan luar negeri		8 Dokumen							
Н	-		junian ruskan kerjasana daeran penterman dan dan dan deger		o Dokumen				Pemantapan Tata Kelola	<u> </u>		
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi Dan pelaporan Kerjasama daerah	h	2 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
							114511		Akuntabel			
			Jumlah dokumen Evaluasi Kerjasama dalam hal Bantuan Hibah kepada Lembaga, Badan dan Yayasan		99.9 persen							
	1 1		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Kebijakan	İ	İ	1		İ	Ì			
	1 1		Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Daerah Lain Dengan	1	2 Laporan			İ	Ì			
	1 1		daerah Lain dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga		Ī .			İ	1			
	1 1		Jumlah Dokumen koordinasi dan konsultasi bidang	1	3 Iaporan	1		İ	1			
	1 1		kerjasama lingkup OPD	ļ	,	1		İ	1			
4 1	2 2.04	3	Jumlah Dokumen pendampingan unsur pimpinan pada bagian kerjasama		2 laporan	400.000.000	D	İ	Ì			1.528.005.000
	1 1		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	<u> </u>	29 laporan]		İ	Ì			
	1 1		Persentase penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kepada]		İ	Ì			
	1 1		Badan, Lembaga, Yayasan dan Organisasi Sesuai Undang- undang dan Kebijakan yang Berlaku		0.92 persen			İ	Ì			
	1 1		Persentase penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kepada	1	i.	1		İ	Ì			
			Badan, Lembaga, Yayasan dan Organisasi Sesuai Undang-		92 persen			1	1			
	1 1		undang dan Kebijakan yang Berlaku Persentase Penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan	†	0.02	1		İ	Ì	 		
	1 1		Peraturan Perundangan	ļ	0.92 persen			İ	Ì			
	1 1		Persentase Penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan		92 persen			İ	Ì			
				•	•	•	•	•	•			
4 1		Bagian Perencanaan dan Keuangan				23.905.253.250						30.081.347.388
4 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.905.253.250						30.081.347.388
4 1	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				523.671.98	5			ļ .		880.000.000
4 1	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	175.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	İ	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			552.000.000
			-		ORGINGII	175.000.00	Hasil		Akuntabel	<u> </u>		332.000.000
4 1	1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil		12 Dokumen	50.000.000	0					50.000.000
H	\vdash		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1			Dana Tanandar Umuma Dana Bani	 	Pemantapan Tata Kelola	 		
4 1	1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-		12 Dokumen	50.000.00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	İ	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	1		50.000.000
ш			SKPD	1	1	l	1	Į.	Akuntabel			

					Tahun 2023							
	ada -	Umrean/Bidang Umrean/Pressure/Variation/Salt Variation	Indikator Program/V-sistes/Cab V-sis	Lokosi Outsut Vani			oaian Kinerja dan Kerangka Pendana: I		rioritas	Torget C	Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
K	Code	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
4 1 1	1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		12 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	THE POPULATION OF THE POPULATI	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	TOOK CRUI	Tanget	50.000.000
4 1 1	1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	12 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			50.000.000
4 1 1	1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		l Laporan	73.426.120	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			75.000.000
4 1 1	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Duerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	75.245.865	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			53.000.000
4 1 1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.381.581.273			Akuntabei			29.201.347.388
4 1 1	1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	22.905.253.258	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.232.217.966
4 1 1	1 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	42.930.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.200.000.000
4 1 1	1 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	86.304.020	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			94.934.422
4 1 1	1 2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		24 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			220.000.000
4 1 1	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporar Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			50.000.000
4 1 1	1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12 Dokumen	87.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			96.195.000
4 1 1	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	77.885.486	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			260.000.000
4 1 1	1 2.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Laporan	31.758.51	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			48.000.000
							-	•	•			
4		SEKRETARIAT DPRD				57.094.965.459						107.578.689.558
4 2 1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *		100 %	47.354.947.459						74.946.539.558
4 2 1	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi		100%	18.000.000						147.000.000
4 2 1	1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan	100 %	42.000.000
4 2 1	1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			dengan baik * Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	15.000.000
4 2 1	1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	30.000.000
4 2 1	1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	15.000.000
4 2 1	1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	15.000.000
4 2 1	1 2.01	Fevaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	30.000.000
4 2 1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan dalam Peningkatan Fungsi Pelayanan Tugas DPRD		100%	6.590.694.947						9.742.607.230
4 2 1	1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 ASN	6.469.074.947	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	6.500.000.000
4 2 1	1 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	103.620.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	3.092.607.230
4 2 1	1 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	42.000.000
4 2 1	1 2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntasnsi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	24.000.000
4 2 1	1 2.02	S Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	24.000.000
4 2 1	1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	12.000.000
4 2 1	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran SKDP dan laporan koordinasi penyusunan laporan keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan	100 %	24.000.000
				1	l	I	J	L	l	dengan baik *	1	

					Tahun 2023	Cor	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:	in .			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
,	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	T. (2022				Prioritas	Target C:	paian Kinerja	Kebutuhan Dana
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4 2	1 2.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	24.000.000
4 2	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Guna Menunjang Perencanaan dan Evaluasi dalam pelaksanaan Fungsi		100%	21.000.000						213.750.000
4 2	1 2.03	l Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	78.750.000
4 2	1 2.03	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	24.000.000
4 2	1 2.03	3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan has koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	l Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	24.000.000
4 2	1 2.03	4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	24.000.000
4 2	1 2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik * Presentase	100 %	24.000.000
4 2	1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Duerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	24.000.000
4 2	1 2.03	7 Pemanfiatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	15.000.000
4 2	1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen data Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	3.000.000)					5.500.000
4 2	1 2.04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	5.500.000
4 2	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangka Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan fungsi DPRD	t	100%	35.000.000						1.106.500.000
4 2	1 2.05	I Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	90.000.000
4 2	1 2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	300.000.000
4 2	1 2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	90.000.000
4 2	1 2.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	90.000.000
4 2	1 2.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerj pegawai	Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik * Presentase	100 %	24.000.000
4 2	1 2.05	6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik * Presentase	100 %	25.000.000
4 2	1 2.05	7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah laporan hasil pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Kelurahan	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	25.000.000
4 2	1 2.05	8 Pemindahan Tugas ASN	jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik * Presentase	100 %	12.500.000
4 2	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik * Presentase	100 %	132.000.000
4 2	1 2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik * Presentase	100 %	186.000.000
4 2	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	132.000.000
4 2	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Daerah guna Menunjang Tugas Pelayanan terhadap		100%	50.389.985	5					2.860.500.000
H			fungsi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua						Presentase		
4 2	1 2.06	I Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	1 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik * Presentase	100 %	280.500.000
4 2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	600.000.000

					1 anun 2023	Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:	ın			Prakiraan Maju Rei	ncana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pr Nasional	ioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	npaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
4 2	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	DACIAII	Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	300.000.000
4 2	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	20.389.985	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	390.000.000
4 2	1 2.06	S Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	240.000.000
4 2	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	360.000.000
4 2	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	30.000.000
4 2	1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	300.000.000
4 2	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	300.000.000
4 2	1 2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	30.000.000
4 2	1 2.06	11 Dukungan Peluksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	30.000.000
4 2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Rangka mendukung Pelayanan terhadap Tugas dan fungsi DPRD		100%	7.000.000						6.867.267.128
4 2	1 2.07	l Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	240.000.000
4 2	1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	1.072.484.600
4 2	1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	1.500.000.000
4 2	1 2.07	7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	30.000.000
4 2	1 2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	1.844.782.528
4 2	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	1.700.000.000
4 2	1 2.07	II Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	480.000.000
4 2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Rangka peningkatan Pelayanan Terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD		100%	15.141.862.527	,					14.358.339.200
4 2	1 2.08	l Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	42.000.000
4 2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik yang Disediakan	a Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Laporan	1.513.616.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	1.816.339.200
4 2	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	13.626.746.527	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	12.500.000.000
4 2	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah sehingga dapat digunakan dalam menunjang fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani tugas pokok dan fungsi DPRD		100%	17.000.000						2.527.600.000
4 2	1 2.09	l Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	165.000.000
4 2	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	550.000.000
4 2	1 2.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	36.000.000
4 2	1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	132.000.000
						1	4		1		IRAN Rancangan Ak	-bi- DKDD 2022 K-bt Kt-i D

							Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendanas	in		Prakiraan Maju Ren	
		Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
	4 2	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan, Semua	4 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		dilaksanakan		
Part Part	4 2	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kecamatan, Semua	4 unit	1.000.000			pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	120.000.000
1	4 2	1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Kecamatan, Semua	4 unit	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		pelayanan yang dilaksanakan	100 %	900.600.000
1	4 2	1 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	dalam rangka menunjang Tugas Pokok Dan fungsi		100%	21.000.000.000					25.762.500.000
	4 2	1 2.15	l Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			25 Orang	20.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		pelayanan yang dilaksanakan	100 %	24.000.000.000
	4 2	1 2.15	2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kecamatan, Semua	2 Paket	850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	1.500.000.000
	4 2	1 2.15	3 Pelaksanan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kecamatan, Semua	25 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		pelayanan yang dilaksanakan	100 %	262.500.000
	4 2	1 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD dalam rangka menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD		100%	4.471.000.000	P				11.354.976.000
	4 2	1 2.16	l Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kecamatan, Semua	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		pelayanan yang dilaksanakan	100 %	674.976.000
	4 2	1 2.16	2 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kecamatan, Semua	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Presentase pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	300.000.000
	4 2	1 2.16	3 Fasilitsi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.115.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		pelayanan yang dilaksanakan dengan baik *	100 %	8.640.000.000
Variable Variable	4 2	1 2.16	4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Kecamatan, Semua	3 Rumah Dinas	1.350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		pelayanan yang dilaksanakan	100 %	1.740.000.000
Variable Variable	4 2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi		100%	9.740.018.000	9				32.632.150.000
a la la la la la la la la la la la la la	4 2	2 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang		100%	15.000.000)				1.566.000.000
Series Medicine, Some Schreibung Premium Dernit Perspiration Derni	4 2	2 2.01	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Kecamatan, Semua	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	100 %	126.000.000
4 2 2 10 1 2 Peryelenggaraan Kajian Perundang-Indangan Ambih Dokamen Hasi Peryasuanan Penjelasan Kerangan dan intau Nakah Akademik Kerangan dan Perundang-Indangan Ambih Dokamen Hasi Peryasuanan Penjelasan Kerangan dan intau Nakah Akademik Kerangan dan Perundang-Indangan Kerangan dan Perundang-Indangan Ambih Dokamen Hasi Peryasuanan Penjelasan Kerangan dan intau Nakah Akademik Kerangan dan Perundang-Indangan Ambih Dokamen Hasi Peryasuanan Penjelasan Kerangan dan intau Nakah Akademik Kerangan dan Perundang-Indangan Ambih Dokamen Hasi Peryasuanan Penjelasan Kerangan dan intau Nakah Akademik Kerangan dan Perundang-Indangan Kerangan dan Perundang-Indangan Ambih Dokamen Hasi Peryasuanan Penjelasan Kerangan dan intau Nakah Akademik Kerangan dan Perundang-Indangan Kerangan dan Perundang-Indangan Kerangan dan Perundang-Indangan Kerangan dan Perundang-Indangan Kerangan dan Perundang-Indangan dan Perundang-Indangan dan	4 2	2 2.01	2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Kecamatan, Semua	5 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	100 %	660,000,000
Variable Variable	4 2	2 2.01	3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		5 Dokumen	3.000.000			Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	100 %	564,000,000
4 2 1 2 1 2 1 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	4 2	2 2.01	4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Kecamatan, Semua	5 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	100 %	156.000.000
	4 2	2 2.01	5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	"Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun"	Kecamatan, Semua	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	100 %	60.000.000
	4 2	2 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas dan		100%	18.000.000)		DPRD		429,000.000

						Сар	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Prakiraan Maju Ren	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pi Nasional	ioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
4 2	2 2.02	l Pembahasan KUA dan PPAS	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen		Dana Tananfar Umum, Dana Dani	Nasional	Daerah	Tolok Ukur Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 71.500.000
4 2	2 2.02	2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.02	3 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.02	4 Pembahasan APBD Perubahan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.02	5 Pembuhasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.02	6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pembahasan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Bidang		100%	24.000.000						559.000.000
4 2	2 2.03	l Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.03	2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Junlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.03	3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kessjahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.03	4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000
4 2	2 2.03	S Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.500.000

					1 ahun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pri Nasional	oritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	npaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
4 2	2 2.03	6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		. The can	Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	65.000.000
4 2	2 2.03	7 Pengawasan Penggunaan Anggaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	71.590.000
4 2	2 2.03	8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	100 %	65.000.000
4 2	2 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Orientasi DPRD sebagai Proses Pengenalan Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Sebagai		100%	1.615.318.000						7.852.150.000
4 2	2 2.04	l Orientasi DPRD	Unsur Penyelenggaraan "Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD'	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	132,000,000
4 2	2 2.04	2 Pendalaman Tugas DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kali	1.102.318.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	4.440.000.000
4 2	2 2.04	3 Publikasi dan Dokumentusi Dewan	"Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumentasi	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	2.000.000
4 2	2 2.04	4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	"Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	550.550.000
4 2	2 2.04	5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	498.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	597.600.000
4 2	2 2.04	6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	66.000.000
4 2	2 2.04	7 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	66.000.000
4 2	2 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan		100%	4.637.220.000						10.266.000.000

					1 ahun 2023	Сар	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	1			Prakiraan Maju Rene	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pasional	rioritas		apaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4 :	2 2 2.05	I Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Laporan	2.800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Dacrah	Tolok Ukur Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 6.720.000.000
4 :	2 2 2.05	2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	"Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	66.000.000
4 :	2 2 2.05	3 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1.834.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	100 %	3,480,000,000
4 :	2 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Data Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100%	6.000.000						504.000.000
4	2 2 2.06	I Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	300,000,000
4 :	2 2 2.06	2 Pengawasan Kode Etik DPRD	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	204,000,000
4 :	2 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah		100%	6.000.000						240.000.000
4 :	2 2 2.07	I Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	"Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	120.000.000
4 :	2 2 2.07	2 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	"Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Cakupan Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	120.000.000
4 :	2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD Yang di Fasilitasi		100%	3.418.480.000				Londob Donordo		11.216.000.000
4 :	2 2 2.08	1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	10.400,000,000
4 :	2 2 2.08	2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	"Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	66.000.000
4	2 2 2.08	3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badat Musyawarah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Jumlah Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	100 %	342.000.000

1 ABUN 2023 Capaian is			oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n	Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024				
Kod	ie	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4 2 2 2	2.08 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	312.480.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional Daerah	Tolok (Kur Target) Junish Raperda yang di jadikan Produk Hukum Daerah dan Peneniasa Feneniasa Pengamasan Pengamasan Pengamasan Pengamasan Pengamasan	Pagu Indikatif (Rp.) 408.000.000
		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				25.193.015.888				27.231.476.285
5 1		PERENCANAAN				23.943.015.888				25.981.476.285
5 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Pelayanan Administrasi BP3D *			17.083.015.850				17.312.511.685
5 1 1 2	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua	100%	167.000.000	D. T. (11 D. D.)	Pemantapan Tata Kelola		235.000.000
5 1 1 2	2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	2 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	ın	50.000.000
5 1 12	2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	17.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	60.000.000
5 1 12	2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın e	125.000.000
5 1 1 2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat		100%	11.624.912.860				12.481.314.285
Ш			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	14 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	ın	
5 1 112	2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan	60 orang	10.536.831.090	Omum	Akuntabel		10.223.314.285
5 1 1 2	2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	928.081.770	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntahel	n	2.098.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Returanan	60 orang			Akumaci		
5 1 12	2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kali	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	25.000.000
5 1 1 2	2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	50.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 kali					
5 1 12	2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	25.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 kali					
5 1 12	2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	l kali	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	n	25.000.000
			Tanggapan Pemeriksaan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	4 kali		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	_	
5 1 12	2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kelurahan	6 Dokumen	35.000.000	Hasil	Akuntabel		35.000.000
5 1 1 2	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat		7.9/	175,000,000				100,000,000
3 1 12	2.05	Ашшимгам кередаманан гегандкаг Баетан	Daerah	Semua Kab/Kota, Semua	7 70	175.000.000		Pemantapan Tata Kelola		100.000.000
5 1 12	2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Set		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
HH			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua	137 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola		
5 1 12	2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	12 Orang	125.000.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	ın .	50.000.000
5 1 1 2	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	50.000.000
5 1 1 2	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.577.940.090				1.104.000.000
5 1 12	2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Gedung	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	20.000.000
5 1 1 2	2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	329.940.090	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	250.000.000
5 1 1 2	2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın e	
5 1 1 2	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Tahun	268.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	n	268.000.000
5 1 1 2	2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	n	50.000.000
5 1 1 2	2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Tahun	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	ın	16.000.000
5 1 1 2	2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	n	50.000.000
5 1 1 2	2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Tahun	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	n	350.000.000
5 1 1 2	2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	6 Berita	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da	n	100.000.000
	0.07	Boundary Bound Mills Darrock Boundary University		Kelurahan	1009/			Akuntabel		
3 1 1 2	L.U/	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%					

				Tahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	in.			Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
1 1 2.07	7 I Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Nasional	Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
-		binas Jabatan	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua			Hasii		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	-		
1 1 2.07	7 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan P	engadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
1 1 2.07	7 5 Pengadaan Mebel P	engadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Set		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	,		•
1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah T	erlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	2.882.197.400						2.882.197
1 1 2.08	8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat T	erlaksananya administrasi Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	6.991.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			6.991
1 1 2.08	8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik T	ersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	169.856.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			169.856.
1 1 2.08	8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor T	erlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	2.705.350.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel			2.705.350
1 1 2.09	9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah C	akupan pemeliharaan Aset Kantor		100%	655.965.500						510.000
1 1 2.09	9 I Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	erlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan ajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			235.000
1 1 2.09		erlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak an Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	485.965.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			150.000
1 1 2.09	9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya T	erlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			45.000
1 1 2.09	9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya d	erlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor an Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Gedung	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
1 1 2.09	9 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung antor atau Bangunan Lainnya"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Gedung	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			80.000.
1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH U	enjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam KKPD *, Terselanya dokumen perecanaan RPJPD ang telah ditetapkan dengan PERDA *, Tersedianya kokumen RKPP yang telah ditetapkan dengan ERKADA *, Tersedianya Dokumen RPJMD yang lahd ditetapkan dengan PERDA/PERKADA *		98 %, 98 %, 1 Dokumen, 2 Dokumen, 1 Dokumen	2.900.000.038						2.655.000
1 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan T	ersusunnya data Perencanaan dan Pendanaan		9 Dokumen	1.800.000.038						1.180.000.
1 2 2.01	I I Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	umlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	600.000.038	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD *	98 %	100.000
1 2 2.01		umlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan aerah Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD *	98 %	150.000.
1 2 2.01	I 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	umlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD *	98 %	100.000
1 2 2.01	4 Koordinasi Pelaksunaan Forum SKPD/Lintas SKPD	umlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD *	98 %	80.000
1 2 2.01	1 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	umlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Berita Acara	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD *	98 %	250.000
1 2 2.01	I 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah abupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	600.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD *	98 %	500.000
1 2 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah P	ersedianya data/hasil Analisis Data dan Informasi emerintahan Daerah Bidang Perencanaan embangunan Daerah		3 Dokumen	700.000.000						825.000
1 2 2.02	2 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	erinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan embangunan Daerah		1 Masukan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			225.000
1 2 2.02	2 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD P.	erbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam emanfaatan Data dan Informasi Perencanaan embangunan	Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Orang	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			425.000
1 2 2.02	2 3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota T	ersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah abupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Buku	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			175.000
1 2 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	ersedianya data/hasil Pengendalian, Evaluasi dan daporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen	400.000.000						650.000
1 2 2.03	3 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota P	umlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan elaksanaan Pembangunan		1 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			200.000
1 2 2.03	3 2 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	umlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan elaksanaannya		3 Kerja Sama	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			200.000
1 2 2.03	3 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	umlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			250.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	leningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA , Meningkatnya Perencanaan Bidang Infrastruktur an Kewilayahan *, Meningkatnya Perencanaan Bidang		90 %, 90 %, 90 %	3.960.000.000						6.013.964
1 3	P	emerintahan dan Pembangunan Manusia * ersedianya data dan informasi perencanaan Bidang									

					1 ahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaar	1			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		ioritas	Target C:	ıpaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2025	тади пинкані (кр.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5 1	3 2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	278.300.000
5 1	3 2.01 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	221.768.800
5 1	3 2.01 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	252.018.800
5 1	3 2.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	175.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	213.516.600
5 1	3 2.01 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87%	315.967.300
5 1	3 2.01 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencunaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87%	353.017.500
5 1	3 2.01 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	506.118.800
5 1	3 2.01 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	358.256.800
5 1	3 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya data dan informasi perencanaan Bidang		16 Dokumen	1.135,000,000				and special		1.515,000,000
5 1	3 2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ekonomi dan SDA Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	190.000.000
5 1	3 2.02 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		3 Perangkat Daerah	142.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	142.500.000
5 1	3 2.02 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Perangkat Daerah	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	190.000.000
5 1	3 2.02 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	l Laporan	175.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	235.000.000
5 1	3 2.02 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	l Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	190.000.00
5 1	3 2.02 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Perangkat Daerah	142.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	142.500.00
5 1	3 2.02 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	3 Perangkat Daerah	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	190.000.00
5 1	3 2.02 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	l Laporan	175.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	235.000.00
5 1	3 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya data dan informasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan		10 Dokumen	1.050.000.000						2.000.000.00
5 1	3 2.03 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	450.000.00
5 1	3 2.03 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	2 Perangkat Daerah	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	150.000.000
5 1	3 2.03 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evalussi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perangkat Daerah	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	150.000.00
5 1	3 2.03 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	300.000.00
5 1	3 2.03 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD: RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	350.000.00
5 1	3 2.03 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencunaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	I Perangkat Daerah	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	150.000.00
5 1	3 2.03 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	I Perangkat Daerah	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	150.000.00
5 1	3 2.03 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	1 Laporan	175.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA *	87 %	300.000.00
5 5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.250.000.000				, and the s		1.250.000.000

					Tahun 2023	Car	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	an .			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		apaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5 5 2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan *, Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		40 %, 10 %, 20 %	1.250.000.000	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 1.250.000.000
			*, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah * Tersedianya data/hasil Penelitian dan Pengembangan									
5 5 2 2.0)1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya data/nasii Penentian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota. Semua	2 Dokumen	450.000.000			Pemantapan Tata Kelola			400.000.000
5 5 2 2.0	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik		1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			200.000.000
5 5 2 2.0)1 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			200.000.000
5 5 2 2.0)2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya data hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		2 Dokumen	350.000.000						325.000.000
5 5 2 2.0)2 4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			150.000.000
5 5 2 2.0)2 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			-
5 5 2 2.0	02 6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			-
5 5 2 2.0)2 9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			175.000.000
5 5 2 2.0)3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya data hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1 Dokumen							200.000.000
5 5 2 2.0)3 1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
5 5 2 2.0)3 4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			200.000.000
5 5 2 2.0)3 5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			-
5 5 2 2.0	04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data hasil pengembangan inovasi dan teknologi		2 Dokumen	450.000.000						325.000.000
5 5 2 2.0	04 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			250.000.000
5 5 2 2.0)4 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 PD	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			-
5 5 2 2.0)4 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kali		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			75.000.000
		Badan Keuangan dan Aset Daerah				488.729.737.382						552.781.601.583
5 2		KEUANGAN				488.729.737.382						552.781.601.583
5 2 1	\perp	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.183.003.098						73.623.601.583
5 2 1 2.0	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dan Tersedianya Penyusunan Dokumen, Perencanaan Penganggaran dan Pelapora	•	100%	300.000.000						600.000.000
5 2 1 2.0	01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	100.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat *	100 %	150.000.000
5 2 1 2.0	01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen (RKA SKPD)	25.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat *	100 %	100.000.000
5 2 1 2.0	01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen (DPA SKPD)	50.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat *	100 %	100.000.000
5 2 1 2.0	01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	50.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat *	100 %	100.000.000
5 2 1 2.0	01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	75.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat *	100 %	150.000.00
5 2 1 2.0)2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	41.874.421.270						60.416.500.000
5 2 1 2.0)2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 (Orang ASN/Bulan)	41.269.421.270	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	30.000.000.000

						Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Reno	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pr Nasional	ioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
5 2	1 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya	100 %	30.000.000.000
5 2	1 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	150.000.000
5 2	1 2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	50.000.000
5 2	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya	100 %	50.000.000
5 2	1 2.02	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	16.500.000
5 2	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya	100 %	100.000.000
5 2	1 2.02	S Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	50,000,000
5 2	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100%							19.792.420
5 2	1 2.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	6.599.300
5 2	1 2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	6.595.820
		S Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		Duna Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	6.597.300
5 2	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	240.000.000						626.697.030
5 2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	264 (Unit ID Card)	10,000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	15.125.550

					1 ahun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pri	ritas		apaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5 2	1 2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Į.	Daerah Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Tolok Ukur Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5 2	1 2.05	5 Monitoring, Evalussi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	li i	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	10.241.780
5 2	1 2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang/3 Bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	i i	Pemantapan Tata Kelola temerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	300.000.000
5 2	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang/3 Bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Į.	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan ukuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	291.085.700
5 2	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.160.000.000						1.252.114.835
5 2	1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	I	Pemantapan Tata Kelola temerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	51.570.000
5 2	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	I	Pemantapan Tata Kelola temerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	117.817.540
5 2	1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	li i	Pemantapan Tata Kelola temerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	20.836.000
5 2	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	175.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	I	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	99.996.490
5 2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Į.	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	22.612.500
5 2	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	15,000,000	Duna Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	15.000.000
5 2	1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	i i	Pemantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	24.997.060

					Tahun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n		Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
	Kode	le Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
	П				1 arget 2023	Pagu Indikatif (кр.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Indek Kepuasan Perangkat	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5 2	1 2.06	.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	umlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya I terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	99.285.745
5 2	1 2.06	06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Consultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	500,000,000
5 2	1 2.06	.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD J	umlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPE	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	99,999,500
5 2	1 2.06	Uo II Dukungan Petaksanaan Sistem Pemerinanan Berosisi Elektronik pada SKPD	uunlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem emerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya	100 %	200.000.000
5 2	1 2.07	.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ferlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%						3.250.000.000
5 2	1 2.07	1.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntahel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	750.000.000
5 2	1 2.07		umlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya Iterhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	2.500.000.000
5 2	1 2.08	.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ferlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	7.308.581.828					7.158.497.298
5 2	1 2.08		umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	9,593,310
5 2	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayi kir dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	19.497.160
5 2	1 2.08	J. D. S. 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor p. P. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perfengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	80.825.000
5 2	1 2.08	4) renyediaan Jasa retayanan Umum Kantor y	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	7.048.581.828	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya I terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	100 %	7.048.581.828
5 2	1 2.09	.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ferlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100%	300.000.000					300.000.000
J 2	1 2.09	p	Penunjang Urusan Pemerintah daerah		10070	500.000.000					300.000.

				Tahun 2023	Caj	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		I	Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasjonal Daerah	Target Capa Tolok Ukur	ian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
5 2 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya	741 get 00 %	150,000,000
5 2 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Indek Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/I nstansi Lainnya	00 %	150.000.000
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				431.200.734.284	4		(BKAD)		476.608.000.000
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Perencanaan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua	85%	3.825.000.000		Pemantanan Tata Kelola	Persentase		6.758.000.000
5 2 2 2.01	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerinahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel		5 %	2.508.000.000
5 2 2 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Persentase	5 %	700.000.000
5 2 2 2.01	3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Keuangan Daerah	5 %	700.000.000
5 2 2 2.01	4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	K L K L D . G	94 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Keuangan Daerah	5 %	700.000.000
5 2 2 2.01	5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akutabel	Keuangan Daerah	5 %	250.000.000
5 2 2 2.01	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	94 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	Keuangan Daerah	5 %	300.000.000
5 2 2 2.01	7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	5 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Keuangan Daerah	5 %	150.000.000
5 2 2 2.01	8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	Persentase Pengelolaan 85 Keuangan Daerah Persentase	5 %	200.000.000
5 2 2 2.01	9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	4 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		5 %	200.000.000
5 2 2 2.01	10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	2 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		5 %	200.000.000
5 2 2 2.01	11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua	2 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		5 %	500.000.000
5 2 2 2.01	12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	2 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		5 %	100.000.000
5 2 2 2.01	13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Pengelolaan 85 Keuangan Daerah	5 %	250.000.000
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	2.475.000.000	0				2.500.000.000
5 2 2 2.02	I Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1704 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	500.000.000
5 2 2 2.02	2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	100.000.000
5 2 2 2.02	3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	250.000.000
5 2 2 2.02	4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	100.000.000
5 2 2 2.02	S. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Laimnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	250.000.000
5 2 2 2.02	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8707 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	100.000.000
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	200.000.000
5 2 2 2.02	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang da Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	200.000.000
5 2 2 2.02	g Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		3 Dokumen	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	450.000.000
5 2 2 2.02	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan 10 Keuangan	00 %	200.000.000
	<u> </u>		<u> </u>	l		L	1			

					Tahun 2023	C	i Vii- d Vd Bd	_			Bardinan Main Bar	T-b 2024
Ko	do	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		Ca	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa		rioritas	Target Co	Prakiraan Maju Ren paian Kinerja	cana 1 anun 2024 Kebutuhan Dana
K0	ue	Orusan/ Budang Orusan/ Program/ Regiatan/ Sub Regiatan	indikator Program/ Regiatan/ Sub Regiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5 2 2	2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	150.000.000
5 2 2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		100%	2.825.000.000						2.200.000.000
5 2 2	2.03 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	150.000.000
5 2 2	2.03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	275.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	150.000.000
5 2 2	2.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	200.000.000
5 2 2	2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	200.000.000
5 2 2		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawahan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawahan Pelaksanaan APBD Kabupatera Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	250.000.000
5 2 2	2.03 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	200.000.000
5 2 2	2.03 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	150.000.000
5 2 2	2.03 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	200.000.000
5 2 2	2.03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	150.000.000
5 2 2	2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	150.000.000
5 2 2	2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	200.000.000
5 2 2	2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	100.000.000
5 2 2	2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	100.000.000
5 2 2	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan		100%	420.700.734.284	4					464.450.000.000
5 2 2	2.04 7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Keuangan Daerah	75 %	450.000.000
5 2 2	2.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	305.700.734.284	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	"Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	75 %	450.000.000.000
5 2 2	2.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	115.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	"Persentase	75 %	14.000.000.000
5 2 2	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Reidianai	100%	1.375.000.000	9		Akumaber	Kedangan Daeran		700.000.000
5 2 2	2.05 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	"Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	75 %	200.000.000
5 2 2	2.05 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	70 Orang	1.075.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	"Persentase Pengelolaan	75 %	500.000.000
5 2 3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten/Kota	Kelurahan		6.346.000.000			Akuntabel	Keuangan Daerah		2.550.000.000
	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	"1. Persentase tertib administrasi BMD 2. Persentase aset tanah pemda yang bersertifikat 3. Presentase Aset yang terdata dengan baik, 4. Presentase Aset yang termanfaatkan.		100%	6.346.000.000						2.550.000.000
5 2 3	2.01 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel	Persentase Aset yang Terdata dengan Baik	82 %	300.000.000
5 2 3	2.01 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Persentase Aset	82 %	400.000.000
5 2 3	2.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Persentase Aset yang Terdata dengan Baik	82 %	100.000.000
5 2 3	2.01 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Persentase Aset	82 %	200.000.000
5 2 3	2.01 5	Penatausahaan Barung Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Persentase Aset yang Terdata dengan Baik	82 %	50.000.000
5 2 3	2.01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	435.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Persentase Aset yang Terdata dengan Baik	82 %	400.000.000

Process Proc						Tahun 2023	Car	oaian Kinerja dan Kerangka Pendana:	an .	Prakira	an Maju Rencana Tahun 2024
		Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	T 2022					
					V V 'D 0	rarget 2023	ragu munkam (Kp.)	Sumber Dana			arget Pagu Indikatif (Rp.)
	5 2	3 2.01	7 Pengamanan Barang Milik Duerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	yang Terdata 82 % dengan Baik	350.000.000
Part Part	5 2	3 2.01	8 Penilaian Barang Milik Daerah		Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	yang Terdata 82 %	100.000.000
State Stat	5 2	3 2.01	9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kecamatan, Semua	1 Laporan	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	yang Terdata 82 %	100.000.000
	5 2	3 2.01	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Kecamatan, Semua	1 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	yang Terdata 82 %	100,000.000
	5 2	3 2.01	II Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			2 Laporan	125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	yang Terdata 82 %	200.000.000
Part	5 2	3 2.01	12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kecamatan, Semua	1 Laporan	16.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Persentase Aset yang Terdata 82 %	100.000.000
Note 10 Note	5 2	3 2.01	13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kecamatan, Semua	20 Orang	4.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	yang Terdata 82 %	150.000.000
Note 10 Note				1	recuman				12 teaminoci	uciigan izane	
	5 2										
Part Part	5 2	1			1	100%					
	5 2	1 201									
1	5 2	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kah Kutai Barat Barong	16 Laporan	175.000.000		Pemantanan Tata Kelola		730.000.000
	5 2	1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tongkok, Barong	16 Dokumen	40.000.000		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		210.000.000
	5 2	1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Tongkok, Barong	1 Laporan	135.000.000		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		210.000.000
1	5 2	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tongkok, Barong	1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		310.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 2	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		2 Laporan	12.595.655.618				13.438.000.000
	5 2	1 2.02	l Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tongkok, Barong Tongkok	60 Orang	12.560.655.618		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		13.000.000.000
	5 2	1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tongkok, Barong Tongkok	67 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		320.000.000
	5 2	1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Tongkok, Barong	1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		58.000.000
	5 2	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tongkok, Barong	18 Laporan	20.000.000		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		60.000.000
	5 2	1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6 Laporan	15.000.000				81.000.000
Part Part	5 2	1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tongkok, Barong	6 Laporan	15.000.000		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		81.000.000
Part Part	5 2	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15 Orang	26.000.000				580.000.000
Sample Process Proce	5 2	1 2.05		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tongkok, Barong	252 Paket	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		210.000.000
Section Control Cont	5 2	1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	15 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		210.000.000
Part Part	5 2	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	15 Orang	25.000.000		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		160.000.000
Part Part	5 2	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		- ugava	12 Laporan	213.005.796		Asunate		732.000.000
Post Forestein	5 2	1 2.06		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Tongkok, Barong				Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		110.000.000
k	5 2	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	l Paket	30.000.000	(Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		81.000.000
S 2 1 2.06 6 Penyedian Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan Junilah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan Junilah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan Junilah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan Junilah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Penyedengaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Junilah Lapran Pengelagaran Lainnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedum Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah Unit Sarana dan Prasarana Gedumg Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedumg Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedumg Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedumg Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedumg Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedumg Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedumg Kantor atau Bangunan Lainnya Nang disidakan Junilah	5 2	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	l Paket	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		160.000.000
Society of the properties of	5 2	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Kutai Barat, Barong	120 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola		71.000.000
Togkok (PAD) Akuntabel (PAD) A	5 2	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Tongkok, Barong	12 Laporan	153.005.796	(PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		310.000.000
S 2 12 07 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangaan Penmatapan Taua Kelola Penmatapan Taua Taua Taua Taua Taua Taua Taua Ta	5 2	1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung		2 Unit	2.000.000	(PAD)			2.870.000.000
s 2 12 07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengadikan dan prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengadikan Tongokok Panda dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengadikan Tongokok Panda Panda Bangunan Lainnya mengadikan Tongokok Panda Panda Bangunan Lainnya mengadikan Tongokok Panda P	5 2	1 2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tongkok, Barong			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.500.000.000
5 2 1 2 07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mang Disediakan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kant	5 2	1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tongkok, Barong	4 Unit	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		210.000.000
	5 2	1 2.07	II Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong	2 Unit	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		160,000,000
	5 2	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	6.534.528.288	,			7.271.000.000

						Cap	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa		Prakiraan Maju Ren	
	Code	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
				Kab. Kutai Barat, Barong				Nasional Daerah Pemantapan Tata Kelola	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5 2	1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tongkok, Barong	12 Laporan	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		11.000.000
+++				Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tongkok, Barong	12 Laporan	119.999.808	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		160.000.000
H				Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tongkok, Barong		6.406.528.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		7.100.000.000
-	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung	Tongkok	4 unit	54,000,000	(PAD)	Akuntabel		430.000.000
5 2	1 2.09	Pemeunaraan Barang Milik Daeran Penunjang Urusan Pemerintanan Daeran	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Barong	4 unit	54.000.000		Pemantanan Tata Kelola		430.000.000
5 2	1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tongkok, Barong	11 Unit Roda 4	12.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		110.000.000
ш		Jaoatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tongkok, Barong	11 Unit Roda 4	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		110.000.000
H	-	- Apungun		Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tongkok, Barong	2 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		70.000.000
H	+-+			Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tongkok, Barong	2 Unit	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		70.000.000
H	+			Tongkok Kab. Kutai Barat. Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tongkok, Barong	4 Unit	4.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		70.000.000
5 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tercapainya Target PAD	Tongkok	125.918.307 Rp	2.025.000.000	(PAD)	Akuntabel		8,106,000,000
	4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan		16 Laporan	2.025.000.000				8,106,000,000
	7 2.01	recginian rengeronan pendapatan baccan	Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Barat. Barong	То гароган	2.025.000.000		Pemantapan Tata Kelola		0.100.000.000
5 2	4 2.01 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Tongkok, Barong	12 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		670.000.000
H				Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Tongkok, Barong	11 Dokumen	190.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		410.000.000
H	+			Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tongkok, Barong	16 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		466.000.000
H	+			Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	Tongkok, Barong Tongkok	1 Unit	+	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		260.000.000
H			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obiek	Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	Tongkok, Barong	16 Laporan	150.004.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		590.000.000
H			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tongkok, Barong	12 Laporan	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		640.000.000
Ħ		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan		Tongkok Kab. Kutai Barat, Barong			(PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 7	Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Tongkok, Barong Tongkok	30500 Objek Pajak	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.640.000.000
Ħ				Kab. Kutai Barat, Barong				Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Tongkok, Barong Tongkok	900 Dokumen	107.623.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		210.000.000
H				Kab. Kutai Barat, Barong			(FAD)	Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tongkok, Barong Tongkok	16 Kali Pelayanan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		560.000.000
Ħ			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	Kab. Kutai Barat, Barong		İ	,	Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi	Tongkok, Barong Tongkok	12 Dokumen	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		350.000.000
Ш			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	Kab. Kutai Barat, Barong			(1710)	Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Daerah	Tongkok, Barong Tongkok	200 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		360.000.000
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak	Kab. Kutai Barat, Barong			,	Pemantapan Tata Kelola		
5 2	4 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Daerah	Tongkok, Barong Tongkok	13 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		410.000.000
П			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	Kab. Kutai Barat, Barong				Pemantapan Tata Kelola		
5 2	412.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengawasan Pajak Daerah	Tongkok, Barong Tongkok	16 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		330.000.000
	40.01		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Barat, Barong		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola		210.000.000
3 2	412.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah	Tongkok, Barong Tongkok	16 Laporan		(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		210.000.000
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				12.627.052.809			<u> </u>	18.741.667.161
5 3		KEPEGAWAIAN	Persentase pelayanan perangkat daerah yang		loo or	10.127.052.809				12.991.667.161
5 3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dilaksanakan dengan baik		89 %	8.892.144.545				8.502.449.791
5 3	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		83 %	14.095.400				21.446.590
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				Dana Transfer Lime D D-	Pemantapan Tata Kelola		
5 3	2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		12 Laporan	14.095.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel		21.446.590
ш	\vdash		SKPD Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat					Akuntabei		
5 3	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah		100 %	6.180.078.857				4.506.670.917
5 3	2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	12 Bulan	6.157.137.497	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		4.465.418.497
	2.02 1			Kelurahan		0.157.137.497	Hasil	Akuntabel		4.403.410.497
5 3	2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	14 Laporan	11.538.830	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		19.799.890
	2.02 3		Tahun SKPD	Kelurahan		11.538.630	Hasil	Akuntabel		17.799.890
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1.		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola		
5 3	2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	11.402.530	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		21.452.530
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	reconstituti				Akullatei		
5 3	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Daerah		83 %					200.000.000
5 3	2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya]]	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		
μ	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Val. Variable 10			riasii	Akuntabel		
5 3	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	5 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		200.000.000
Ш		<u>l</u>	implementasi relaturan relundang-Undangah	Kelurahan	1		114511	Akuntabel		

					Tahun 2023	Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	n			Prakiraan Maju Renca	ana Tahun 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		oritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
5 3 1 2.06	(A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		83 %	128.539.250		Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 652,500,000
3 3 1 2.00	, A	Administrasi C mum i erangkat Daeran		Kab. Kutai Barat, Semua	83 /6	128.337.230	D T 6 H D D 1	P	Pemantapan Tata Kelola			032.300.000
5 3 1 2.06	5 2 P	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	9.118.850	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			200.000.000
5 3 1 200	5 4 P	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Paket	28.692.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			100.000.000
444	++			Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Hasil	Al	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
5 3 1 2.06	5 P	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3.351.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			20.000.000
5 3 1 206	n	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan. Semua	12 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pe	Pemantapan Tata Kelola			20.000.000
3 3 1 2.00	3 O F	enyediaan Banan Bacaan dan Feraturan Ferundang-undangan	Undangan yang Disediakan	Kelurahan	12 Dokumen		Hasil	Al	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			20.000.000
5 3 1 2.06	5 9 P	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	87.376.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			300.000.000
1111				Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
3 3 1 2.06	5 10 P	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPE	Kelurahan	12 Dokumen		Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			12.500.000
5 3 1 2.08	8 P	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		83 %	2.422.036.149						2.821.832.284
5 3 1 2.08	8 1 P	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	1.815.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			10.000.000
+++-	+		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	1		
5 3 1 2.08	3 2 P	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	131.596.020	Hasil	Al	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			175.000.000
5 3 1 2.08	3 P	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	10.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pi Pi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			70.000.000
+++	+			Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Dans Tarrefor Univers Dans Basi	Al Po	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		.——	
5 3 1 2.08	8 4 P	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2.278.474.329	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.566.832.284
5 3 1 2.09	P	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83 %	147.394.889						300.000.000
5 3 1 2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	6 Unit	74,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			100.000.000
+++-	$+\Gamma$	abatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Hasil	Al	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
5 3 1 2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau apangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	72.415.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			100.000.000
5 3 1 200	9 P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit	959.889	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	P	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			100.000.000
3 3 1 2.0	+		Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan			Hasil	A	Akuntabel			
5 3 2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan		66.77 %	1.234.908.264						4.489.217.370
5 3 2 2.01	I P	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Informasi Kepegawaian ASN	K I K + 'B + C	84%	411.622.754			D . T. V.I.I			1.684.098.270
5 3 2 2.01	1 3 K	Coordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	9438 Dokumen	161.622.754	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			466.500.000
1111	. .	evaluasi Pemberhentian ASN		Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
5 3 2 2.01	1 7 E	valuasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Dokumen	50.000.000	Hasil	Al	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			112.199.080
5 3 2 2.01	1 8 F	asilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Lembaga	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			850.399.190
+++	+		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	1		
5 3 2 2.01	1 10 P	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepegawaian	Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Dokumen	80.000.000	Hasil	Al	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			180.000.000
5 3 2 2.01	1 11 P	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	100 Dokume	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pe	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			75.000.000
5 3 2 2.02	2 N	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Kelurahan	83%	308.747.067	i	Al	Akuntabel			2.104.373.800
5 3 2 200	TT	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	210 Dokumen	102.915.689	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			675.000.000
		Congression of the Congression o	dan Mutasi ASN antar Daerah	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	210 Dokumen	102,513,005	Hasil	Al	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			073.000.000
5 3 2 2.02	2 2 P	engelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kecamatan, Semua Kelurahan	1250 Dokumen	102.915.689	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			250.000.000
5 3 2 20	2 3 10	Pengelolaan Promosi ASN	Peningkatan kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	122 Dokumen	102.915.689	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Po	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			1.179.373.800
2 2 2.02			fungsional dan diklat teknis;	Kelurahan			Hasil	A ⁱ	Akuntabel			
		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Peningkatan kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kab. Kutai Barat, Semua	83%	102.915.689	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			225.000.000
5 3 2 2.03	3 4 P	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis;	Kecamatan, Semua Kelurahan	102 Orang	102.915.689	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			225.000.000
5 3 2 2.04	4 P	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		83%	411.622.754						475.745.300
5 3 2 2.04	4 2 P	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	32 Dokumen	225.650.430	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	P ₁ P ₂	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			295.745.300
+++	++		Kinerja Aparatur	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua			Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Al	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	 		
5 3 2 2.04	4 4 P	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			30.000.000
5 3 2 2.04	4 5 P	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	150 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	P- Pr	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	İ		35.000.000
+++-	+			Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	-		Hasii	Al	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	\vdash		
5 3 2 2.04	4 7 P	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			50.000.000
5 3 2 2.04	4 8 P.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	8 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			50.000.000
1111111	ΨÏ		Pelanggaran Disiplin ASN	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	<u> </u>	00.000.000	Hasil	Al	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			30.000.000
5 3 2 2.04	4 9 P	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	15.972.324	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	Pemantapan Tata Ketota Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.000.000
5 4	P	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Keitranan		2.500.000.000		Al	Aumati			5.750.000.000
صب ب			Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan		11,81 %					4		5.750.000.000

					Tahun 2023	C	rajan Kineria dan Karanaka Bandaan	n	Prakiraan Maju Rei	icana Tahun 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	_		oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n Prioritas	Prakiraan Maju Rei Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5 4 2 2.01	1 P	engembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis		11.81 %	602.470.000				1.100.000.000
5 4 2 2.01	1 3 Po	enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi enyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	602.470.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	1.100.000.000
4 2 2.02	2 S	ertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		9.60 %	1.897.530.000				4.650.000.000
4 2 2.02	2 3 Pe	elaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224 Orang	1.897.530.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	4.650.000.000
	Lle	NSPEKTORAT DAERAH				18.517.587.159				20.077.857.571
1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintah		100%	16.973.121.459				17.909.794.074
5 1 1 2.01	1 P	erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah Kabupaten/Kota * Terpenuhinya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	20.000.000				24.200.000
5 1 1 2.01	1 6 K	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Laporan		12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın e	12.100.000
5 1 1 2.01	1 7 E	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	12.100.000
1 1 2.02	2 A	dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinyakegiatan administrasi keuangan		100%	13.615.332.701		Akuntabei		13.081.046.703
5 1 1 2.02		venyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	perangkat daerah Jumlah Pengeluaran Rutin Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Laporan	13.575.332.701	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	13.032.646.703
1 1 2.02	2 3 Po	elaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan Keuangan		12 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	24.200.000
5 1 1 2.02	2 7 K	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	12.100.000
1 1 2.02	2 8 P	enyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	12.100.000
1 1 2.05	5 A	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	685.000.000				514.250.000
1 1 2.05	5 4 K	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				135.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	90.750.000
1 1 2.05	5 9 Pe	endidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan LKjIP		1 Laporan	550.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	423.500.000
5 1 1 2.06	6 A	dministrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100%	811.304.938				638.864.270
1 1 2.06	6 1 Pe	renyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			24.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	5.929.000
1 1 2.06	6 2 P	enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			103.317.938	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	121.000.000
5 1 1 2.06	6 4 P	enyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	108.900.000
1 1 2.06	6 5 Pe	enyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			25.087.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	30.355.270
1 1 2.06	6 6 P	enyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	9.680.000
1 1 2.06	ш	enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			550.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	363.000.000
5 1 1 2.07	7 P	engadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	323.052.460				451.393.477
1 1 2.07	7 6 P	engadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			223.052.460	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	269.893.477
5 1 1 2.07	7 9 P	engadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n	121.000.000
1 1 2.07	7 11 P	engadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in	60.500.000
5 1 1 2.08	8 P	'enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1.278.352.391				2.966.606.424
1 1 2.08	8 1 Pe	enyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim			7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in .	8.470.000
5 1 1 2.08	8 2 P	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			189.659.971	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in .	229.794.004
		enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Kerja Kontrak			1.081.692.420	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	in .	2.728.342.420
5 1 1 2.09	9 P	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	240.078.969				233.433.200
5 1 1 2.09		enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau apangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			125.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	151.250.000
5 1 1 2.09	9 6 Pe	emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			71.078.969	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	48.303.200
5 1 1 2.09	9 9 P	emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			44.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın	33.880.000
		ROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Kebijakan		100%					

					Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana				Prakiraan Maju Rene	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional P	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
6 1 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan		100%	771.168.000		. vasional	south dir	TOTOK UKUI	get	1.199.313.280
- - - - -		Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
6 1 2 2.01	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Daerah			225.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			272.250.000
6 1 2 2.01	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	.	j	90.750.000
+		Daeran				nasii		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		 	
6 1 2 2.01	3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	j	30.250.000
6 1 2 201	4 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			30.250.000
0 1 2 2.01	- Terra Eupotan Redaingan	Januar Lapotan Hash Revia Lapotan Redaingan			50.000.000	Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	ļ!		30.230.000
6 1 2 2.01	5 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	. F	j !	60.500.000
(1 2 201					50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			484.000.000
6 1 2 2.01	6 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			50.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	<u> </u>		484.000.000
6 1 2 2.01	7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil			271.168.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		j	231.313.280
		Pemeriksaan APIP Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan						Akuntabel			
6 1 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	112.000.000						179.080.000
6 1 2 2.02	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		2 Laporan	28.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		j !	89.540.000
+++-1		yang Ditangani				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	 		
6 1 2 2.02	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		10 Laporan	84.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	j !	89.540.000
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP yang selesai		90%	661.297.700)					789.670.217
6 1 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										50.000.000
6 1 3 2.01	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		j	25.000.000
+++-						Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	 		
6 1 3 2.01	2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		į į	25.000.000
6 1 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		100%	661.297.700	,					739.670.217
6 1 3 2.02	1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan		74 OPD	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	1		60.500.000
		dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		11.00		Hasil		Akuntabel Pemantanan Tata Kelola	ļ!		-
6 1 3 2.02	2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		50 OPD	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	l l	j	24.200.000
(1 2 202		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta		477	427 202 700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			517 627 427
6 1 3 2.02	3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 Kegiatan	427.303.700	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			517.037.477
6 1 3 2.02	4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		15 perangkat daerah	113.994.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		j	137.932.740
			l					Akuntabel			
7	KECAMATAN JEMPANG		1	I	4.913.865.472						6.420.612.851
7 1 1 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan		65 %	4.500.235.002 19.964.660						5.849.037.787 23.957.592
7 1 1 2.01	7 Evaluasi Kincrja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	19.964.660	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	<u> </u>	,	23.957.592
/ 1 1 2.01	/ Evaluasi Kincija Perangkat Daeran	Junian Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeran		12 Laporan	19.904.000	Hasil		Akuntabel	<u> </u>	<u> </u>	23.931.392
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2.313.800.964			D. T. K.I.I			3.468.680.357
7 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		19 Orang	2.282.080.964	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		j	2.740.953.221
+++-						Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	├ ───		
7 1 1 2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	27.720.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			721.728.000
7 1 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	.	j	5.999.136
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah		70 %	30.000.000	nasii		Akuntabel			75.000.000
						Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
7 1 1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis		4 Orang	30.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		<u> </u>	75.000.000
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	286.776.600			Pemantapan Tata Kelola			434.765.812
7 1 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	j	179.979.492
7 1 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	64.851.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			77.821.920
/ 1 1 2.00	4 Penyeuraan Banan Logistik Kantoi			i raket	04.831.000	Hasil		Akuntabel	ļ!	<u> </u>	77.821.920
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	1.925.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		j	2.310.000
+++-		Jumlah Laporann Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	 		
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD		9 Laporan	120.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		<u> </u>	174.654.400
				70 %	1.808.856.878	3					1.777.630.946
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		70 70							
7 1 1 2.08						Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		ļ <u> </u>	1,600,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			1.600.000
7 1 1 2.08						Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			1.600.000 143.962.692
7 1 1 2.08 7 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		12 Laporan	1.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			

				Tahun 2023	Caj	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	ın		Prakiraan Ma	ju Rencana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pri Nasional	oritas Daerah	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	40.835.900		714307411		Total Target	69.003.080
7 1 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya		1 Unit	13.922.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		36.707.480
7 1 1 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	12.096.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		14.515.200
7 1 1 2.09 1	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		24 Unit	14.817.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		17.780.400
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		82 %	413.630.470					571.575.064
7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintah di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan		100 %	44.828.320			Pemantapan Tata Kelola		54.612.484
7 1 2 2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan		2 Laporan	29.928.320	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		35.913.984
7 1 2 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Dokumen	14.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		18.698.500
7 1 2 2.02	ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Masyarakat		100 %	368.802.150					516.962.580
7 1 2 2.02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan		2 Dokumen	22.890.380	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		476.268.456
7 1 2 2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	9.971.770	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		11.966.124
7 1 2 2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	335.940.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		28.728.000
7	KECAMATAN MUARA PAHU				5,163,202,633					5,357,990,023
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor SAKIP SKPD		вв	4.885.306.913					4.813.300.703
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.760.600					
7 1 1 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.760.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.309.928.623			Domenton on Tata V shale		3.100.364.943
7 1 1 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.102.078.62	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.100.364.943
7 1 1 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			207.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	. II.O. W. T.CR.II. T.L.			114.890.000	D T 6 H D 411 1		Pemantapan Tata Kelola		125.550.000
7 1 1 2.05 1	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			114.890.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		125.550.000
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				291.704.600					338.488.910
7 1 1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			98.620.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		75.991.480
7 1 1 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			75.764.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		85.980.230
7 1 1 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			19.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		25.981.200
7 1 1 2.06 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			97.820.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		150.536.000
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				988.138.460			Pemantapan Tata Kelola	I	1.007.122.950
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5.250.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		6.000.000
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			127.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		150.992.358
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			855.888.160	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		850.130.592
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.884.630	D T 6 H = 1111		Pemantapan Tata Kelola		241.773.900
7 1 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.168.630	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		56.186.900
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola		150.979.000
7 1 1 2.09 1 7 1 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	20.716.000 277.895.720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		34.608.000 544.689.320
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		100 %	242.380.000					63.693.600
7 1 2 2.01 7 1 2 2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegataan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkati	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat			40.180.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		44.995.100
7 1 2 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			202.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		18.698.500
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat		100 %	35.515.720			Akuntabel		480.995.720
7 1 2 2.02	ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			35.515.720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		480.995.720
	1	1						ланивост		
7 1 1	KECAMATAN BONGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor SAKIP SKPD		90 %	4,380.818.440 3,887.251.440					6.478.000.000 5.750.000.000

No. Process						Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana				Prakiraan Maju Ren	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
	1 1 2.01 P	erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya sarana Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	61.744.734		AMMORAL	enti ali	- Olok UKUI	· m. get	32.000.000
	1 1 2.01 1 Pe	enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.874.734	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
Value Valu	1 1 2.01 7 E	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	31.870.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			32.000.000
1	1 1 2.02 A	administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pendanaan Aparatur ASN		28 Orang	3.216.766.906			Akuntabei			5.014.500.000
	1 1 2.02 1 Po	enyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25 orang	2.475.794.590	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			4.100.000.000
	1 1 2.02 2 Po	renyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			24 dokumen	716.708.416	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			910.000.000
	1 1 2.02 7 K	Goordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		3 dokumen	24.263.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			4.500.000
	1 1 205 A	administrasi Kenegawajan Perangkat Daerah			7 Orang	83 430 000			rikumuoci			83.500.000
							Dana Transfer Ilmum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
		·	, , , ,		-		Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			3.500.000
No.	1 1 2.05 11 B	Simbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 orang	80.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			80.000.000
	1 1 2.06 A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi dan Sarana Perangkat		3 Paket	321.116.000						342.000.000
Value Valu		·	Jumish Paket Peralatan dan Perlengkanan Kantor yang				Dana Transfer Ilmum - Dana Bagi					
			Disediakan				Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			40.000.000
	1 1 2.06 4 Pe	enyediaan Bahan Logistik Kantor			2 paket		Hasil		Akuntabel			85.000.000
	1 1 2.06 5 Pe	enyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3 paket	16.889.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			17.000.000
	+						Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			200.000.000
	1 1 2.08 P	'enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana penunjang Urusan Pemerintahan		12 Laporan	54.995.300						61.000.000
Variable Variable	1 1 2.08 1 Po	enyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			7.000.000
	1 1 2.08 2 Pe	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	49.995.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			54.000.000
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 2.09 P	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah		80 %	149.198.500						217.000.000
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 unit	44.975.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			45.000.000
1 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 1 2.09 6 Pe	remeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 unit	43.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			60.000.000
Template Section Property Representation of Timples Keromates Property Representation Property December of Property Representation Property December of Property Representation Property December of Property D	1 1 2.09 9 Pe	emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	60.423.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			112.000.000
Part Part		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82 %							515.000.000
1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 2 2.01 K	Goordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		29 Laporan	83.867.000						84.000.000
To 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2			Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat		12 Laporan	69.929.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			70.000.000
Value Valu	1 2 2.01 2 Pe				17 Laporan	13.938.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			14.000.000
Percentana Kegutan Pelayanan kepada Masyarakar di Kecamatan Percentanan Kegutan Pelayanan kepada Masyarakar di Kecamatan Percentanan Kegutan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Percentanan Kegutan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Percentanan Kegutan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Percentanan Pelayanan Minimal di Wilayah	1 2 2.02 Po	enyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang da di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat		33 Dokumen	296.200.000						431.000.000
2 2 2 2 Fasilitasi Perceptian Penceptian Randar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan S000000 India transict Untum - Dana Bagi Permitipan Tata Kelola Pe						291.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			426.000.000
7 1 2 202 3 Pengkatan Eléktifias Pelaksanaan Pelayanan kepada Mayarakat di Wilayah Kecamatan	1 2 2.02 2 Fa	asilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			5.000.000
Variable Variable	1 2 2.02 3 Pe	eningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
7 1 3 291 Noordinasi Kegistan Pemberdayaan Desa Fernantapan Tata Kelola Pemberdayaan Desa Fernantapan Tata Kelola Pemberdayaan Desa Pemantapan Tata Kelol	1 3 P	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas SDM Desa dan Kelurahan		75 %	52.600.000						138.000.000
7 1 3 20 3 Penningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayan Masyarakat di Wilayah Kecamatan S2600000 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Pennantapan Tata Kolola Pen			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		16 Laporan	52.600.000						138.000.000
7 1 5 201 5 Feungaani Felectius Regional Federation Regional Federation Regional Regions (Restrict to the Performance of the Performance						53 600 000						138.000.000
7 1 6 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Ferlaksananya Pengawasan Pembangunan Desa Kekurah						52.600.000						138.000.000
Desa/Kebarahan Desa/K		NOGELIA I EMBLICE, DALVI EMBLICATA I EMERICATA INC.	тиско периняни геригиси		74 %	60.900.000						75.000.000
I I Second Fernanguan Kawasan regesan di Winyan Keematan Hasii Akuntabel Akunt			Desa/Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Raik Bersih dan			75.000.000 75.000.000
7 I I V PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA 7 I I V 201 Perencanaan, Penganggaran, daa Evalusui Kinerja Perangkat Daerah 7 I I V 201 Perencanaan, Penganggaran, daa Evalusui Kinerja Perangkat Daerah 8 Junlah Laporan Evalusui Kinerja Perangkat Daerah 9 Junlah Laporan Evalusui Kinerja Perang			Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			00.700.000	Hasil		Akuntabel	<u> </u>		73.000.000
7 I V 201 V Perneaman, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 I V 1 V 1 V 201 V Pendangan Fundang Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan Fundang Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Penantapan Tata Kelola Pengentahan yang Baik, Bersih dan Akumtabel 1 Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengantapan Tata Kelola Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran Kinerja Pengangkat Daerah Penganggaran Kinerja Pengangkat Daerah Penganggaran Kinerja Pengangkat Daerah Penganggaran Kinerja Pengangkat Daerah Penganggaran Kinerja												7.240.971.384 6.252.237.284
7 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Duerah												6.252.237.284 185.000.000
raumay.1			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Long Iram, Semua Kelurahan	4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			185.000.000
7 l l 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel 95 % 2.515.849.524	1 1 2.02 A	administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel		95 %	2.515.849.524			***************************************			4.645.612.339

					Tahun 2023		raine Minaria dan M	 		Decline at 15 ' F	T-b 2024
	Kodo	Urusan/Ridang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegistan/ Sub Kegistan	Lokasi Output Kogistan				ioritas	Target Co		
	Rode	Otusani Diuang Otusani Hugianii Regiatani Sun Regiatani	Indikator Frogram Registan/ Sub Registan	Lonasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	 			
March Marc	7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18 Orang/bulan	2.510.849.524	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			4.639.612.339
No. Continue	7 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Kutai Barat, Long Iram, Semua Kelurahan	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			6.000.000
	7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			95 %	60.000.000					146.500.000
1	7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		15 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			65.000.000
	7 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			7 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			81.500.000
1	7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya jasa pelayanan umum kantor		95 %	148.027.600					90.500.000
	7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 Paket	44.027.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			75.500.000
1	7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
	7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3 Paket	14.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			15.000.000
1	7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang kantor kecamatan		95 %	1.520.299.624					1.184.624.945
1	7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.500.000
1	7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2 Laporan	71.271.480	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			60.000.000
			yang Disediakan				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			1.122.124.945
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82 %	449.421.413					540.234.100
	7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kemasyarakatan di lingkup kecamatan		90 %	47.500.000					59.750.000
1	7 1 2 2.01 1		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat		11 Laporan	37.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			41.250.000
No.	7 1 2 2.01 2		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			18.500.000
	7 1 2 2.02				95 %	401.921.413					480.484.100
	7 1 2 2.02 1		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada		11 Dokumen	374.231.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			439.484.100
	7 1 2 2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Kab. Kutai Barat, Long Iram, Semua Kelurahan	2 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			14.500.000
	7 1 2 2.02 3				6 Laporan	15.690.413	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			26.500.000
	7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			75 %						350.000.000
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2	7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			90 %		-				163.000.000
1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3	7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3 Lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			13.000.000
1 2 2 3 Possighan Efficiency Keynor Lendong Newsynakana Tughai Keenadan Possighan Efficiency And Possighan Ef	7 1 3 2.01 2		Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah		11 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			30.000.000
Variable Variable	7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			120.000.000
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									187.000.000
1 2 2 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5	7 1 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			22 Lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			45.000.000
Part Part	7 1 3 2.03 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			11 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			55.000.000
Solid Soli	7 1 3 2.03 5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Guna		3 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			87.000.000
Variage Vari	7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Aparatur, Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Kebijakan Akuntansi		95 %, 74 %						98.500.000
The continue of the continue	7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			95 %						98.500.000
Permatapan Tata Kelola Permatapan Tata Kel	7 1 6 2.01 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			11 Dokumen			Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			35.000.000
Aurah Dokumen Penanganan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengasan Batas Desa Aurah Dokumen Pengasan	7 1 6 2.01 4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			11 Laporan			Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			45.000.000
	7 1 6 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta		11 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			18.500.000
I I 20 I Perunanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan So % So.042.800 Perunangan Tata Kelola Perunangan Tata Ke											15.745.989.621
7 l 1 l 2 0 l 1 Penyasunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jambah Jambah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jambah Jambah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jambah Jambah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jambah Jambah Jambah Jambah Jambah Jambah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jamb					BB						15.240.989.621
To a la la la la la la la la la la la la l	7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	P. I. P. J. P	50 %	56.042.800	D T 4 11	Pemantapan Tata Kelola	CI CATO		112.253.856
7 1 1 20.1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Laporan 24.41.7800 Jumlah 1. Lap	7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	2 Dokumen	31.625.000	Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	SKPD	В	32.257.500
LAMPIRAN Rancangan Akhir RKPD 2023 Kabupaten Ku	7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	24.417.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	SKPD	B	79.996.356

		T	Tahun 2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju						T. 1. 2024	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan				Prioritas	Prakiraan Maju Re Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
				g	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu		70 %	8.047.015.855				10.601.024.580
7 1	1 2.02	l Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	85 85 Orang / Bulan	8.035.644.715	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		10.589.198.594
7 1	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	2 Laporan	11.371.140	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		11.825.986
7 1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Bimtek Pegawai		66 %	98.740.000				163.892.799
7 1	1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Barat, Melak,	9 Orang	98.740.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Skor SAKIP B	163.892.799
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kelurahan	70 %	754.416.304	Hasıl	Akuntabel	SKPD	
7 1 7 1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	1 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Skor SAKIP SKPD B	839.841.172 327.916.357
7 1	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	l Paket	335.457.604	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Skor SAKIP SKPD B	189.166.756
7 1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kab. Kutai Barat, Melak,	l Paket	48.885.270	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Skor SAKIP B	49.862.975
7 1	1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Melak,	12 doku	5.164.530	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	SKPD B	52.678.206
7 1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Melak,	330 Dokumen	349.908.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	SKPD B Skor SAKIP B	220.216.878
Ш			Konsultasi SKPD	Semua Kelurahan			Hasıl	Akuntabel	SKPD	
7 1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa administrasi perkantoran		76 %	3.469.985.973		Pemantapan Tata Kelola		3.378.631.376
7 1	1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	37 Laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		1.530.000
7 1	1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	93 Laporan	137.900.673	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		139.279.679
7 1	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.330.585.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.237.821.697
7 1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Gedung Kantor		72 %	87.198.300		D T. V.I.I		145.345.838
7 1	1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	14 Unit	55.091.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		56.193.228
7 1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	8 Unit	25.962.720	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		26.481.974
7 1	1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	1 Unit	6.144.180	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		62.670.636
7 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	292.400.000				370.000.000
7 1	2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten		86 %	292.400.000				370.000.000
7 1	2 2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	21 Laporan	130.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan 80 % Kecamatan	40.000.000
7 1	2 2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	32 Laporan	162.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan 80 % Kecamatan	330.000.000
7 1		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi		75 %					55.000.000
7 1	3 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Operasi Yustisi di Kecamatan		65 %			Demontors Tele Value		55.000.000
7 1	3 2.05	1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan l	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	12 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		55.000.000
7 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasaan Aparatur Terlaksananya pembuatan Rekomendasi dan		74 %	20.000.000				80.000.000
7 1	6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		74 %	20.000.000		D		80.000.000
7 1	6 2.01	15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur 72 %	80.000.000
7 1		KELURAHAN MELAK ULU				5,000,000				647,500,000
7 1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1		5.000.000				647.500.000
7 1	3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.000.000				647.500.000
7 1	3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	30 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas 70 % Administrasi	647.500.000
7 1	3	KELURAHAN MELAK ILIR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	1	1	5.000.000 5.000.000				647.500.000 647.500.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.000.000				647.500.000
7 1	3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ilir	6 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas 70 % Administrasi	647.500.000
				•	•					
7		KECAMATAN DAMAI				6.109.477.482				7.320.554.314
7 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.647.023.782 7.600.000				6.565.554.314 43.057.815
, 1				Kab. Kutai Barat, Damai,			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola		
7 1	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	4 Laporan	7.600.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		43.057.815
7 1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.849.856.550		Pemantapan Tata Kelola		4.947.366.159
7 1	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	30 orang/bulan	3.844.685.511	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		4.942.039.989
7 1	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	4 Laporan	5.171.039	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		5.326.170

					Tahun 2023	Car	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
ı	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas	Target Ca	ipaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					1 arget 2025		Sumper Dana	Nasional Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.218.000		Pemantapan Tata Kelola			21.854.540
7 1	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	4 orang	21.218.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	l l	1 '	21.854.540
7 1 1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Seman Returnan		252.876.515	()	Akuntabel			315.501.450
, , ,			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab. Kutai Barat, Damai,			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola	<u> </u>		
7 1	2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disediakan	Semua Kelurahan	3 Paket	12.000.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	l l	1 '	30.105.722
++			1	Kab. Kutai Barat, Damai,			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			
7 1 1	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kelurahan	3 Paket	26.181.336	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	l l	1 '	26.966.776
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kab. Kutai Barat, Damai,			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			
7 1	2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disediakan	Semua Kelurahan	2 Paket	7.701.179	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	l l	1 '	7.932.215
7 1	2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Kutai Barat, Damai,	12 Laporan	206.994.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			250.496.737
/ 1			Konsultasi SKPD	Semua Kelurahan	12 Laporan	200.994.000	(PAD)	Akuntabel	l	<u> </u>	230.490.737
7 1 1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				113.440.524					104.486.468
7 1 1	2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	4 Unit	113.440.524	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	ŀ	1 '	104.486.468
				Semua Kelurahan			(PAD)	Akuntabel			
7 1 1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.347.235.936		Pemantapan Tata Kelola			1.094.357.624
7 1	2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	2 Laporan	10.184.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	ŀ	1	10.490.179
++	+ +				 		` ′	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	 		
7 1	2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	a Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	3 Laporan	41.480.256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		, '	42.724.664
+	+		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Damai,	 		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
7 1	2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.295.571.040	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		, '	1.041.142.781
7 1 1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.796.257		Akuntabei			38.930.258
	2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kab. Kutai Barat, Damai,	3 Unit	16.805.972	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			17.310.151
7 1 1	2.09 2	Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kelurahan	3 Unit	16.805.972	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	1	17.310.151
				Kab. Kutai Barat, Damai,			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			
7 1 1	2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kelurahan	4 Unit	22.500.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	1	10.815.113
	2.09 10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kab. Kutai Barat, Damai,	2 Unit	15.490.285	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			10 804 994
/ 1	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kelurahan	2 Unit	15.490.285	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	1	10.804.994
7 1 2	!	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	126.000.000					525.000.000
7 1 2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah		82 %	46.000.000	1				28.000.000
	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kab. Kutai Barat, Damai,			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			
7 1 1 2	2.01 1	Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Semua Kelurahan	3 Laporan	22.000.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	1	16.500.000
_ . .			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Kab. Kutai Barat, Damai,		24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			11.500.000
7 11 2	2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Semua Kelurahan	4 Dokumen	24.000.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	1	11.500.000
7 1 2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat		100 %	80.000.000					497.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Kah Kutsi Basat Dawai			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			
7 1 2	2.02 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Masyarakat di Kecamatan	Semua Kelurahan	12 Dokumen	20.000.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	l l	1 '	440.000.000
\top			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Kab. Kutai Barat. Damai.			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			
7 1 2	2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Semua Kelurahan	3 Laporan	26.000.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ŀ	1	26.000.000
++			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kab. Kutai Barat. Damai.			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola			
7 1 2	2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Semua Kelurahan	2 Laporan	34.000.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	l l	1 '	31.000.000
7 1 3	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi		75 %	294.843.700		- Technology			150.000.000
7 1 3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan		100 %	283.173.700					100.000.000
т			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	mKah Kutai Barat Damai			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola	Meningkatnya		
7 1 3	2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Semua Kelurahan	3 Lembaga/Kampung	5.973.700	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel	Kualitas Administrasi	70 %	45.000.000
_	1		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	Kab. Kutai Barat, Damai,			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola	Meningkatnya	[
/ [1]	2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Semua Kelurahan	2 Laporan	277.200.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Kualitas Administrasi	/0 %	55.000.000
7 1 3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Mutu Lembaga Kemasyarakatn		80 %	11.670.000					50.000.000
7 1	2.03 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Kab. Kutai Barat, Damai,	l Laporan	11.670.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			50.000.000
ш			Masyarakat	Semua Kelurahan	1		(PAD)	Akuntabel			
7 1 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Essilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasaan Aparatur		74 %	41.610.000					80.000.000
/ 1 (2.01	Fasintasi, Kekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Aparatur Tingkat Desa		74 %	41.610.000		Pemantapan Tata Kelola			80.000.000
7 1 6	2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	17 Dokumen	12.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		1 '	24.000.000
+	+	+		+	 		DESIGNATION ACCUPATION	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	 		
7 1 6	2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	17 Laporan	14.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		, '	16.000.000
+	++		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan	Kab. Kutai Barat, Damai,	 		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola	\vdash		
7 1 6	2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Damai, Semua Kelurahan	17 Laporan	15.000.000	(PAD)	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel		, '	40.000.000
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	Akuntabel			
7		KECAMATAN PENYINGGAHAN				4.701.926.981					5.450.000.000
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor SAKIP SKPD		BB Skor	4.539.883.836					4.950.000.000
7 1 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Kah Kutai Barat	100 %	170.409.020		Pemantanan Tata Kelola			176.000.000
7 1	2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua	2 Laporan	170.409.020	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		, '	176.000.000
	2.07			Kelurahan	100.0/		Hasil	Akuntabel			
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana	Kab. Kutai Barat.	100 %	2.926.297.500		Pemantapan Tata Kelola			2.861.000.000
7 1 1		•									
7 1 1	2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyinggahan, Semua Kelurahan	21 orang/bulan	2.916.538.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor Sakip SKPD	B Skor	2.850.000.000

					Tanun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendana			Prakiraan Maju Ren	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Target C Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
7 1	1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	9.759.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel			11.000.000
7 1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan		100 %	37.788.000					58.000.000
7 1	1 2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	21 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n Skor Sakip SKPD	B Skor	26.000.000
7 1	1 2.05	l Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 orang	37.788.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n Skor Sakip SKPD	B Skor	32.000.000
7 1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana		100 %	155.316.440					232.500.000
7 1	1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	55.120.490	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n Skor Sakip SKPD	B Skor	100.000.000
7 1	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	1 Paket	39.175.950	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n Skor Sakip SKPD	B Skor	50.000.000
7 1	1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	1 Paket	5.550.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n Skor Sakip SKPD	B Skor	20.000.000
7 1	1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	55.470.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n Skor Sakip SKPD	B Skor	62.500.000
7 1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	1.219.613.300					1.552.500.000
7 1	1 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	86.680.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntahel	n Skor Sakip SKPD	B skor	125.000.000
7 1	1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	5 Laporan	1.132.933.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n Skor Sakip SKPD	B skor	1.427.500.000
7 1	1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor		100 %	30.459.576					70.000.000
7 1	1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	2 Unit	18.495.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	В	20.000.000
7 1	1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	1 Unit	5.964.076	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	В	13.000.000
7 1	1 2.09	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	1 Unit	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntahel	Skor SAKIP SKPD	В	37.000.000
7 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	162.043.145	11031	radination			270.000.000
7 1	2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		82 %	143.163.145					45.000.000
7 1	2 2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	12 Laporan	19.587.441	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın		35.000.000
7 1	2 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	123.575.704	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın		10.000.000
7 1	2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		82 %	18.880.000					225.000.000
7 1	2 2.02	I Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	3 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın		190.000.000
7 1	2 2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	12 Laporan	8.890.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	n		20.000.000
7 1	2 2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Penyinggahan, Semua Kelurahan	2 Laporan	9.990.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	ın		15.000.000
7 1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi		75 %						150.000.000
7 1	3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa		75 %						95.000.000
7 1	3 2.01	I Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Meningkatnya in Kualitas Administrasi	70 %	55.000.000
7 1	3 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Meningkatnya	70 %	40.000.000
1	3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Semua	75 %			Pemantapan Tata Kelola	Meningkatnya		55.000.000
1	3 2.03	4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel		70 %	55.000.00
7 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasaan Aparatur		74 %						80.000.00
1	6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanannya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		74 %						80.000.00
1	6 2.01	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	17.500.00
7 1	6 2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	<u> </u>	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	17.500.000
7 1	6 2.01	9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	27.500.000
7 1	6 2.01	5 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih da Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	17.500.000
							ı				
		KECAMATAN BARONG TONGKOK				11.328.021.822					12.365.123.804
7 1	1 201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Paten Tercapainya Perencanaan Perangkat Daerah		80 %	9.705.451.123 50.000.000					10.969.987.965 20.716.860
/ 1	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	rercapainya Perencanaan Perangkat Daerah		100 %	50.000.000					20.716.860

				Tahun 2023							
V- '	U(Bidon-U(Bas, (V.)) (C.) V.)	Indilates December / K. 1997	Labori Out		Caj	paian Kinerja dan Kerangka Pendana: T		ioritas	T+ C	Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	naian Kinerja Target	Rebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil		1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Nasional	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	1000k Ukur	Target	10.716.860
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15 000 000	Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			10.000.00
7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah		100 %	6.078.821.900	,		Pemantapan Tata Kelola			7.023.392.99
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		70 ASN	5.990.581.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			6.844.353.252
7 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 12 Dokumen	78.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			165.059.07
7 1 1 2.02 7	Keordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			13.980.668
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat		100 %	30.000.000)					85.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran						Pemantapan Tata Kelola			
7 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		10 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			85.000.000
1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Perlengkapan Kantor		100 %	318.186.635	5					415.933.470
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		l Paket	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			135.457.280
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			46.996.220
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		l Paket	21.191.633	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			23.486.970
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		1 Laporan	166.995.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			209.993.000
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Konsultasi SKPD Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	3.081.367.588	Hasil		Akuntabel			3.266.970.717
		Daerah						Pemantapan Tata Kelola			
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			4.483.000
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	94.192.288	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			112.995.981
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.983.675.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			3.149.491.736
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Aset Kantor		100 %	147.075.000						157.973.920
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	77.075.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			104.993.360
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			30.981.760
1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		61 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			21.998.800
1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				738.500.000)		Akumuoci			895.135.839
1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya data Perencanaan dan Pendanaan		83 %	78.500.000						54.928.678
1 2 2.01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	33.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			37.000.000
7 1 2 2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			17.928.678
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Jumlah Pelaporan Dokumen pada Unit Kerja yang ada di Kecamatan		83 %	660.000.000	nasii		Akuntaoei			840.207.161
7 1 2 2.02 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	540.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			775.198.890
1 2 2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar		1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			35.008.950
7 1 2 202 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan		1 Laporan		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			29.999.321
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		i Laporan	70.000.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			500.000.000
1 0		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan									
1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	desa		21 Kelurahan dan Desa				Pemantapan Tata Kelola			500.000.000
1 6 2.01 4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan		1 Laporan		-Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			500.000.000
	ETT UN THE NAME TO VOLVOV										
	KELURAHAN BARONG TONGKOK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				415.631.699 278.632.079						1.097.600.000 747.600.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.500.000						65.000.000
1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			65.000.000
1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.451.000	Hasil		Akuntabel			90.000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			90.000.00
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keuangan Bulanan/1 riwulanan/Semesteran SKPD			30.000.000	riasii)		Akuntabel			160.000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			160.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	imprementasi Peraturan Perundang-Undangan			75.681.990	Hasil		Akuntabel			220.000.000
											22500.000

						Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	in		Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Donnel		paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1 2.0	.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Nasional Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.) 160.000.000
7 1 1 2.0	.06 4 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	24.999.996	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			40.000.000
7 1 1 2.0	.06 5 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		l Paket	9.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			20.000.000
7 1 1 2.6	.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.000.000	nasii	Akumaber			142.600.000
7 1 1 2.0	$\neg \Box$	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12 Laporan	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			40.000.000
7 1 1 2.0	.08 4 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	97.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			102.600.000
7 1 1 2.0	.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.999.089					70.000.000
7 1 1 2.0	.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	6.999.969	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			10.000.000
7 1 1 2.0	.09 9 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			20.000.000
7 1 1 2.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			40.000.000
7 1 3 7 1 3 2.0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.999.620 136.999.620					350.000.000 350.000.000
	$\neg \Box$	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	136.999.620	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			350.000.000
				1			110311	Akuntabel			
7 1 1		KELURAHAN SIMPANG RAYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				468.439.000 368.439.000					669.230.824 369.230.824
7 1 1 2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.500.000					30.000.000
7 1 1 2.0		ëvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	12.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			30.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 Laporan	3.966.000 3.966.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			5.000.000
7 1 1 2.0	.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000					
7 1 1 2.0		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
7 1 1 2.0	.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				84.868.400					96.000.00
7 1 1 2.0	.06 2 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	49.055.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			50.000.000
7 1 1 2.0	.06 4 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		l Paket	19.927.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			28.000.000
	.06 5 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		l Paket	15.885.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			18.000.000
7 1 1 2.0	.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.620.000		Pemantapan Tata Kelola			190.730.82
7 1 1 2.0	.08 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			5.000.000
7 1 1 2.0	.08 2 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12 Laporan	19.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			18.000.00
7 1 1 2.0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	169.920.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			167.730.824
7 1 1 2.0	$\neg \Box$	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gadung Kantor dan Program Lainnan			45.484.600		Pemantapan Tata Kelola			47.500.00
7 1 1 2.0	.09 9 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	29.996.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			32.000.00
7 1 1 2.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	15.488.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.500.000 300.000.000
7 1 3 2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000					300.000.000
	.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			300.000.000
						-					
7 1 1		KECAMATAN MUARA LAWA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Sakip SKPD		ВВ	4.409.988.943 4.066.512.543					5.905.991.766 5.325.991.766
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan		2 Laporan	167.450.000					178.740.171
7 1 1 2.0	$\neg \neg$	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Sakip SKPD	В	35.000.000
7 1 1 2.0	.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Sakip SKPD	В	30.000.000
7 1 1 2.0	.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Duerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Laporan	122.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Sakip SKPD	В	113.740.171
2 1 1 2/	.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun		4 Laporan	2.138.626.975					3.515.812.763
/ 1 1 2.6			1	Kab. Kutai Barat. Muara	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	1			

				Tahun 2023		. 10 . 1 10 . 1 10 . 1				n 1: 14: n	T 1 2024
V-d-	Umana / Bidana Umana / Baranana / Vanistan / Cale Vanistan	In dilutus Danamar/ Vaniatas/ Sub-Vaniatas	Labari Outrot Vaniston		Caj	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa T		Prioritas	Target C	Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	4 Laporan	6.185.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	6.164.000
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedia dan Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 Persen	87.500.000						176.250.000
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	70.000.000
7 1 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	2 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	50.000.000
7 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	4 Orang	37.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	56.250.000
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia dan Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Paket	291.099.627	1					257.466.208
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	3 Paket	188.830.727	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	154.359.558
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	2 Paket	8.941.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	8.943.650
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	3 Paket	60.707.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	61.543.000
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Laporan	32.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	32.620.000
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				77.999.73					<u> </u>	
7 1 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2 Unit	77.999.73	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
7 1 1 200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		17 Laporan	1.032.736.204	(PAD)					1.135.072.624
/ 1 1 2.08	renyediaan Jasa Fendijang Ordsan Femerintanan Daeran	Daerah		17 Laporan	1.032.730.204					ı	1.133.072.024
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	2 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	13.000.000
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lawa, Semua Kelurahan	3 Laporan	79.758.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	60.000.000
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	12 Laporan	942.978.204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	1.062.072.624
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah		9 Unit	271.100.000)					62.650.000
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	3 Unit	60.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	42.650.000
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	10.000.000
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	5 Unit	10.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Skor Sakip SKPD	В	10.000.000
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	200.100.000						350.000.000
7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen		-					20.000.000
7 1 2 2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	80 %	20.000.000
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	200.100.000	,					290.000.000
7 1 2 2.02 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	"Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Dokumen	186.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	80 %	275.000.000
7 1 2 2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Pendidikan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Laporan	13.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	80 %	15.000.000
7 1 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1 Dokumen							40.000.000
7 1 2 2.03 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	80 %	40.000.000
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi		75 %	73.536.400						150.000.000
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa		3 Laporan	73.536.400	,					150.000.000
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	2 Lembaga	23.536.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Administrasi	70 %	50.000.000
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	3 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Administrasi	70 %	100.000.000
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasaan Aparatur		74 %	69.840.000						80.000.000
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		8 Laporan	69.840.000	,					80.000.000
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	4 Laporan	18.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	30.000.000
7 1 6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			1 Dokumen	9.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
7 1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	4 Laporan	20.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	30.000.000
7 1 6 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan	4 Laporan	20.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	20.000.000
				l .	l	<u>[* * * * * * * * * * * * * * * * * * * </u>	l	Akuntabel	1.	1	

						Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendana:				Prakiraan Maju Ren	
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Target C Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	4.485.984.723						6.276.934.739 5.429.234.739
1 2.01	1 P	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah		1 Laporan	25.000.000						160.000.000
1 2.01	1 1 P	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	4 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			10.000.000
1 2.01	1 7 E	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DAerah	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	3 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			150.000.000
1 2.02	2 A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		2 Laporan	3.027.482.339						3.526.634.739
1 2.02	2 1 P	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	23 Orang	3.022.482.339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			3.522.282.339
1 2.02	2 7 K	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangar Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.352.400
1 2.05	15 A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek		5 Orang	12.000.000						35.000.000
1 2.05	5 2 P	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	50 Stel		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			
1 2.05	11 E	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 Orang	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			35.000.000
1 2.06	16 A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	305.500.000						517.500.000
1 2.06	1 P	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Paket	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	100 %	6.500.000
1 2.06	16 2 P	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disedia	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	100 %	85.000.000
1 2.06	16 3 P	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	100 %	15.000.000
1 2.06	6 4 P	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	100 %	100.000.000
1 2.06	16 5 P	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 Paket	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	100 %	11.000.000
1 2.06	16 9 P	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 Laporan	194.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	100 %	300.000.000
1 2.07	7 F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Di Sediakan		5 Unit	80.000.000						50.000.000
1 2.07	7 5 P	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			50.000.000
1 2.07	7 6 P	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	4 Paket	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			-
1 2.07	7 9 P	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			-
1 2.08	8 F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan		12 Laporan	793.102.384						967.100.000
1 2.08	1 P	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 Paket	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.500.000
1 2.08	18 2 P	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang sediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	36 Laporan	33.607.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			100.600.000
1 2.08	18 3 P	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			10.000.000
1 2.08	8 4 P	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	12 Laporan	756.495.264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			852.000.000
1 2.09	9 F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara Dan Rehabilitasi		2 Unit	35.000.000						173.000.000
1 2.09	9 2 P	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			32.000.000
1 2.09	9 6 P	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	3 paket		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			5.000.000
1 2.09	9 9 P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			26.000.000
1 2.09	9 10 P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			5.000.000
1 2.09	9 11 P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabbilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Unit	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			5.000.000
1 2.09	9 12 P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah yang dilakukan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 Ha		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			100.000.000
2	P	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan, Presentase Pemenahan Urusan Pemerintahan Yang Di Limpahkan Presentase Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat, Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pinna Di Kecamatan, Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan		82 %, 65 %, 65 %, 65 %, 70 %	20.000.000						270.000.000
	1 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan		1 Dokumen							60.000.000

				Tahun 2023	Cap	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	n	Prakiraan Maju Re	ncana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7 1 2 2.01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	19 laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar	Tolok Ukur Target	Pagu Indikatif (Rp.) 30.000.000
7 1 2 2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dan instansi vertikal terkait Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintaan di tingkat Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	30.000.000
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efpetifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat		19 Laporan	20.000.000		Akuntabel		90.000.00
7 1 2 2.02 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	12 dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar	1	30.000.000
7 1 2 2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian Standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar	1	30.000.00
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	19 Iaporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	30.000.00
7 1 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi Dengan Perangka daerah Dan Atau Intansi Pertikal terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	t	2 Dokumen			Akunawi		30.000.00
7 1 2 2.03 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dar Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	30.000.00
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Lain yang Di Limpahkan		1 Laporan					90.000.00
7 1 2 2.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	I dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	30.000.00
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan nonperizinan pada urusan Pemerintahan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	30.000.00
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	30.000.00
1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi		75 %	37.500.000)	Akuntaoci		212.500.00
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan		9 Laporan	7.500.000				52.500.00
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpastisifasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 Lembaga	7.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	18.750.00
7 1 3 2.01 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	16.875.00
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 Iaporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	16.875.00
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		9 Laporan	30.000.000				60.000.00
7 1 3 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselnggarakan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 lembaga		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	15.000.00
7 1 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 lembaga	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	15.000.00
7 1 3 2.03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediankan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	15.000.00
7 1 3 2.03 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	15.000.00
1 3 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan		1 Dokumen					100.000.0
1 3 2.05 1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pencegahan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	100.000.00
1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasaan Aparatur, Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan desa		74 %, 70 %	150.400.000		Akuinatei		365.200.0
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan		9 Laporan	150.400.000				365.200.00
7 1 6 2.01 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunai peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	18 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	4.400.00
7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administras tata pemerintahan desa	si Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	18 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	4.400.0
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desadan pendayagunaan aset desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	18 dokumen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	4.400.00
7 1 6 2.01 4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	3 laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	4.400.00
7 1 6 2.01 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	4.400.00
7 1 6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	3 dokumen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dat Akuntabel	1	
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Badan permusyawaratan desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	4.400.00
7 1 6 2.01 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	3 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	
7 1 6 2.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	4.400.00
7 1 6 2.01 1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen Fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dar Akuntabel	1	4.400.00
	1	1	1	1		1	AKURBUCI	LAMBIRAN Rancangan Al	l hir RKPD 2023 Kabupaten Kutai

					Tahun 2023		naine Kinnels dan K				Deschione No. 1	T-h 2024
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			paian Kinerja dan Kerangka Pendana:		rioritas	Target C	Prakiraan Maju Ren apaian Kinerja	cana Tahun 2024 Kebutuhan Dana
					Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 6 2.0	1 11 F	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	12 Dokumen	140.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			300.000.000
7 1 6 2.0	1 12 F	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban kelembagaan kemsyarakatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	5 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.400.000
7 1 6 2.0	1 13 F	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	6 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ı		4.400.000
7 1 6 2.0	1 14 F	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	2 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.400.000
7 1 6 2.0	1 15 F	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penataan, Pemnfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta Penetanan dan penggasan batas desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ı		4.000.000
7 1 6 2.0	1 16 F	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel	ı		4.400.000
7 1 6 2.0	1 17 F	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan desa diwilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntahel	ı		4.000.000
7 1 6 2.0	1 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kelurahan	9 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	ı		4.400.000
	- 1 - 1			1				I	Akundoci	1	I	
7 1 1		KECAMATAN LINGGANG BIGUNG	In	1	lo- e	5.327.325.280						6.835.282.338
7 1 1 2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor SAKIP SKPD Tersedianya perencanaan,penganggaran,dan evaluasi		85 % 58 %	4.938.147.600 5.534.110						6.275.282.338
/ 1 1 2.0	1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kinerja perangkat daerah	Kab. Kutai Barat,	58 %	5.534.110			Pemantapan Tata Kelola		1	30.197.475
7 1 1 2.0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi)	Linggang Bigung, Semua Kelurahan	6 Laporan	5.534.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	80 %	30.197.475
7 1 1 2.0	2 /	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah		Tepat waktu 12 Bulan	2.881.753.700)					4.219.135.239
7 1 1 2.03	2 1 F	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji23 orang)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	14 Bulan	2.875.243.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	80 %	4.212.440.859
7 1 1 2.03	2 7 B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	6 Laporan	6.510.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	80 %	6.694.380
7 1 1 2.0	5 /	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80 %	68.966.000						109.080.300
7 1 1 2.0:	5 8 F	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	3 Orang	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Skor SAKIP SKPD	80 %	1.455.300
7 1 1 2.0	5 11 E	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	9 Orang	67.766.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	107.625.000
7 1 1 2.00	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Paket	243.215.771						324.955.384
	F	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Kursi Kerja)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	1 Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	
7 1 1 2.00	6 2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Lemari Besi) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		1 Paket	34.744.355	5					63.878.202
			disediakan (Meja Kerja) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Printer Epson)		1 Paket							
	F	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan (BBM)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua	1 Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	
7 1 1 2.00	6 4		Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan (Makan Minum Jamuan Tamu	Kelurahan	1 Paket	99.803.616	5					71.941.543
			Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan (Makan Minum Rapat)		1 Paket							
	F	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Baliho)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	1 Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	
7 1 1 2.00	6 5		Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Fotocopy)		1 Paket	6.887.800						17.580.024
			Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Penjilidan)		1 Paket							,
			Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Spanduk)		l Paket							
7 1 1 2.00	6 9 F	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	96 Dokumen	101.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	171.555.615
7 1 1 2.08	8 I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		49 Laporan	1.601.761.496	i i					1.331.695.386
7 1 1 2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat Masuk)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.459.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	1.515.938
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat Keluar)		1 Laporan							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik (Laporan Jasa Komunikasi)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	12 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	
7 1 1 2.00	8 2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik (Laporan Jasa Listrik)	ra .	12 Dokumen	72.888.348	3					96.037.794
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik (Laporan Jasa Sumber Daya Air)	ra	12 Dokumen							
7 1 1 2.03	8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Pembayaran Gaji, Uang Makan,BPJS,JKK,JKN)		10 Laporan	1.527.413.748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	1.234.141.654
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Pembayaran THR)		1 Laporan							
7 1 1 2.09	9 I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah		9 Unit	136.916.529						260.218.554
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kab. Kutai Barat,			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Skor SAKIP	L	
7 1 1 2.09		tenyetiaan sasa tentennaraan, maya tentennaraan, rajak, uan retzinan Kendaraan zinas Operasionaraud Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Linggang Bigung, Semua Kelurahan	1 Unit	102.089.055	Umum			SKPD	80 %	161.308.362

					1 ahun 2023	Cap	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	in			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024
К	ode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		ipaian Kinerja	Kebutuhan Dana
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Gedung Kantor Lama dan Kantor	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua	2 Unit	(-17	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Nasional	Daerah	Tolok Ukur Skor SAKIP	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1	2.09 9	a circular activities a vectorig tenno, can sunguian cannya	Baru) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang	Kelurahan	1 Unit	24.525.474	Umum			SKPD	00 70	91.148.592
			dipelihara/direhabilitasi (Gedung Sporthall) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang		1 Unit							
+++			dipelihara/direhabilitasi (Rumah Dinas)	Kab. Kutai Barat.	I Unit							
7 1 1	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Linggang Bigung, Semua Kelurahan	4 Unit	10.302.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Skor SAKIP SKPD	80 %	7.761.600
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Keturanan	82 %	119.117.434						330.000.000
7 1 2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		78 %	56.729.620						132.000.000
Ш		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua	1 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Pelayanan	80 %	
7 1 2	2.01 1		Kecamatan) Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (SPJ Ke Kampung-	Kelurahan	11 Laporan	11.490.000				Kecamatan		66.000.000
$\perp \downarrow \downarrow$			kampung)									
7 1 2	2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	20 Dokumen	45.239.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	80 %	66.000.000
7 1 2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		78 %	62.387.814						198.000.000
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua	72 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Meningkatnya Pelayanan	80 %	
7 1 2	2.02 1		Masyarakat di Kecamatan (PATEN) Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Kelurahan	4 Dokumen	36.180.916	Umum	-		Kecamatan		66.000.000
HH			Masyarakat di Kecamatan (Trantib) Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Kab. Kutai Barat,			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Meningkatnya		
7 1 2	2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (ATK) Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Linggang Bigung, Semua Kelurahan	2 Laporan		Umum Umum			Pelayanan Kecamatan	80 %	66.000.000
			Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (SPJ)	Kab. Kutai Barat.	30 Laporan					Meningkatnya		
7 1 2	2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Linggang Bigung, Semua Kelurahan	2 Laporan	26.206.898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Kecamatan	80 %	66.000.000
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya peran dan partisipasi masyarakat dalam			32.960.246						150.000.000
7 1 3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	pembangunan desa		85 %	26.963.686						30.000.000
7 1 3	2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	2 Lembaga	26.963.686	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Administrasi	70 %	30.000.000
7 1 3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		2 Lembaga Kemasyarakatan							90.000.000
7 1 3	2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyakatan yang dilaksanakan (Lembaga Kemasyarakatan Perempuan)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	1 Lembaga		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Administrasi	70 %	30.000.000
7 1 3	2.03 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan Kepumdaan)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	1 Lembaga		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Administrasi	70 %	30.000.000
7 1 3	2.03 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	12 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Administrasi	70 %	30.000.000
7 1 3	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		80 %	5.996.560						30.000.000
7 1 3	2.05 1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Monitoring ke Kampung-kampung Tim Satzas Covid)	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.996.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Administrasi	70 %	30.000.000
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (TPMT ke sekolah-sekolah)		1 Dokumen							
7 1 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasaan Aparatur		74 %	237.100.000						80.000.000
7 1 6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Aparatur	Val. Vatai Danet	80 %	237.100.000					1	80.000.000
7 1 6	2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	4 Dkumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	11.428.571
7 1 6	2.01 4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	12 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	11.428.571
7 1 6	2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	11.428.571
7 1 6	2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	4 Dokumen	207.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	11.428.571
7 1 6	2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	4 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	11.428.571
7 1 6	2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	4 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	11.428.571
7 1 6	2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Linggang Bigung, Semua Kelurahan	4 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasaan Aparatur	72 %	11.428.571
											•	
7 1 1		KECAMATAN NYUATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor SAKIP SKPD		BB	4.820.239.365 4.562.239.365						6.330.002.365 5.954.002.365
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	168.000.000						168.000.000
7 1 1	2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			168.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan	Skor SAKIP	В	168.000.000
]	l		Hasil	l	Akuntabel	SKPD		

				Tahun 2023	Cu	paian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	in .			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	T. (2022			Prior	ritas	Target C	apaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	v v v	• •		Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	3.941.034.365	ş					5.132.972.337
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Nyuatan, Semua Kelurahan	22 Orang/Bulan	2.625.247.601	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Skor SAKIP SKPD	В	3.715.453.153
7 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji TKK dan Honor Kegiatan	Kab. Kutai Barat, Nyuatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.300.786.764	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Skor SAKIP SKPD	В	1.401.399.184
7 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Persemester		2 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Skor SAKIP SKPD	В	16.120.000
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	110.000.000)					240.000.000
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedian Pakaian untuk ASN dan TKK		60 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			120.000.000
7 1 1 2.05 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Aparatur kecamatan yang memiliki sertifikat Bimbingan dan Pelatiha		6 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			120.000.000
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		4 Paket	146.205.000						148.116.800
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DSCUIARAII			59.499.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			71.616.800
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dar kuntabel			29.000.000
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		4 Paket	9.500.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P Po	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	1		15.500.000
7 1 1 2.06 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.205.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dar kuntabel			32.000.000
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		35 Unit	75.000.000						122.020.000
7 1 1 2.07 1	0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dar kuntabel			48.520.000
7 1 1 2.07 1	l Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			73.500.000
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	32.000.000						33.700.000
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	c	4 Laporan	32.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			33.700.000
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	90.000.000			Kumuo.			109.193.228
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			56.193.228
7 1 1 2.09 1	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	P Po	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	1		35.000.000
7 1 1 2.09 1	l Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			18.000.000
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	258.000.000						376.000.000
7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Dokumen	224.000.000)					32.000.000
7 1 2 2.01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaa		4 Lapoaran	28.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po A	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Kecamatan	80 %	16.000.000
7 1 2 2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan		4 Dokumen	196.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	80 %	16.000.000
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	34.000.000	,					344.000.000
7 1 2 2.02 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksanannya Peningkatan kesaadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kab. Kutai Barat, Nyuatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po A	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	ı		312.000.000
7 1 2 2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan pendidikan		4 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po A	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	1		16.000.000
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan		4 Laporan	14.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	ı		16.000.000
7	KECAMATAN SILUQ NGURAI				4.268.650.311						5.781.591.733
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pembinaan dan konsultasi		100 %	3.841.053.511						5.036.591.733
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya sarana Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	158.017.532	2					192.064.500
7 1 1 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Semua Kelurahan	4 Laporan	158.017.532	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel	1		192.064.500
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pendanaan Aparatur ASN		100 %	2.499.387.904		l p	emantapan Tata Kelola			3.353.584.232
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Semua Kelurahan	22 Orang/Bulan	2.497.538.174	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Po A	emerintahan yang Baik, Bersih dar kuntabel			3.351.634.232
7 1 1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koodinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Semua Kelurahan	4 Laporan	1.849.730	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pe	emantapan Tata Kelola emerintahan yang Baik, Bersih dan kuntabel			1.950.000
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas Pegawai		100 %	54.482.324						98.350.000
	-										

No.	a Tahun 2024
	Kebutuhan Dana
Part	Pagu Indikatif (Rp.) 23.604.0
1	74.746.0
	228.420.0
	53.532.0
	120.214.6
	7.959.6
	46.713.6
	22.818.0
	22.818.0
	1.110.455.
	4.000
Value Valu	34.975.0
Part	1.071.480.0
	30.900.
	9.900.
1 10 10 10 10 10 10 10	12.000.
Second Processing Confession of Processing Confession Office Confession of Processing Confession Office Confession of Processing Confession Confession Office Confession of Processing Confession Confession Office Confession Offi	9.000
Part Part	515.000.
2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	32.419.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8.500.
2 20 2 2 2 2 2 2 2 2	23.919.
Part Part	482.581.
2 20 2 Feedback Proception Mexical of Wileyah Keematan Membrany Appearance M	438.733.
2 2 2 3 Penightana Eskirian Pelasanan Penjaman Sepada Manyankan di Walyah Kecamatan Penjaman Kepada Manyankan di Walyah Kecamatan Penjaman Kepada Manyankan Manyan	10.920
S S PROPERTING NATURES AND SETTING A	32.928.
200 201 10 Foodinary Production of Accordance (Appendicular Confusion) Confusion of Accordance (Ap	150.000
2 20 3 Percentan Sarana dan Penasarana Lembaga Kemasyarakatan Sarana Lembaga Kemasya	150.000
3 203 5 Facilitasi Penandatan Teknologi Tepat Guna Dinan Lipotan Fasilitasi Penandatan Teknologi Tepat Guna Penerimhanyang Baik, Bernih dan Akuntabel Akuntabel	75.000
Tertaksana kegitata Pasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tertaksana kegitata Pasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tertaksana kegitata Pasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tertaksana kegitata Pasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan paga Baik, Bersih dan Roordinasi Pendampingan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pematapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Kegistan Tersedianya Anggaran Pelaksana	75.000
Social Performance Social	80.000
6 201 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Pendangingan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Pendangingan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Pendangingan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Pendangingan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pingelolaan Pendangingan Desa dan Penda	80.000
Continuation Cont	24.000
6 201 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecumatan Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Akuntahan yang Baik, Bersih dan Akuntahan	16.000
1 201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Skor SAKIP SKPD B 4.168.216.388 S 3.600.000	40.000
1 201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA Skor SAKIP SKPD B 4.168.216.388 S 3.600.000	5.874.597
I I 2 Jul 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Sumah Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Sumah Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Sumah Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Sumah Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Sumah Sumah Penganggaran, dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Sumah	5.874.597. 4.969.638
1 1 201 2 Koordinasi dan Penyusuana Dokumen RKA-SKPD dan Iaporasi Koordinas penyusuana Dokumen RKA-SKPD Dania Iranster Umum - Dania Hagi Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Kelulahan yang Baik, Bersih dan kelulahan yang Bai	32.080
I I DI DI I DI I DI I DI I DI I DI I D	2.200
lumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Skah Kutai Barat, Mook Mamara Balatan, Semual I Dokumen Dana Transfer Umum - Dana Bagi Pemerintahan yang Baik, Bersih da Hasil Akuntabel	2.200.0
La La La La La La La La La La La La La L	2.200.0

				Tahun 2023	Cor	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa	m.		Probin	raan Maju Rencana Tahun 2024	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan					rioritas	Target Capaian Kir		uhan Dana
				Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Tolok Ukur T	Target Pagu Indil	dikatif (Rp.)
7 1 1 2.01	1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.200.00
7 1 1 2.01	1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDlisasi kinerja SKPD dal laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.200.00
7 1 1 2.01	1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			21.080.00
7 1 1 2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Tepat waktu		85 %	2.797.134.400						3.034.926.26
7 1 1 2.02	2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	23 Orang	2.792.905.340	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			3.030.697.20
7 1 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan Keuangan	4.229.060	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.229.06
7 1 1 2.05	5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pengadaan seragam dan pindah tugas pegawai serta persentase pegawai sesuai yang sudah mengikuti bimtek		75 %	57.450.000						69.514.50
7 1 1 2.05	5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian beserta atribut kelengkapan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	54 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			15.000.00
7 1 1 2.05	5 8 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	2 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			2.000.00
7 1 1 2.05 1	5 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	57.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			52.514.50
1 1 2.06	6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum		85 %	232.765.732						352.222.20
7 1 1 2.06	6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 paket	40.819.987	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			106.458.30
7 1 1 2.06	6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 paket	52.548.485	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			63.605.46
7 1 1 2.06	6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l paket	9.137.260	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			11.056.13
7 1 1 2.06	6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 laporan	130.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			171.102.30
7 1 1 2.08	8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa administrasi perkantoran		80 %	995.809.216						1.455.456.47
7 1 1 2.08	8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan	10.081.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			18.148.58
7 1 1 2.08	8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 laporan	9.738.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			10.029.6
7 1 1 2.08	8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 laporan	975.989.716	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			1.427.278.28
1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan gedung kantor		80 %	18.457.040						25.439.29
1 1 2.09	9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 unit	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			13.000.00
1 1 2.09	9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	2 unit	9.897.360	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.491.76
7 1 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 unit	6.559.680	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			7.947.53
1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	119.443.220						754.959.13
1 2 2.01	I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam musrenbang kabupaten		80 %	59.917.660						184.621.3
1 2 2.01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan	55.110.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			172.582.3
1 2 2.01	1 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.807.660	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			12.039.0
1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik dikecamatan		80 %	59.525.560						570.337.8
1 2 2.02	2 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37.756.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			536.756.20
1 2 2.02	2 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayah kecamatan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen	14.399.360	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			17.423.2
1 2 2.02	2 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.370.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			16.158.3
1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi	Returanan	75 %				Akuntaoci			100.000.0
1 3 2.01	I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kampung berkembang	Not Kind D . M .	7 Kampung				Domestown Total V. 1.1			40.000.0
1 3 2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan	2 lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			20.000.0
1 3 2.01	1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	2 lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			20.000.00
1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat		80 %							60.000.0
7 1 3 2.03	3 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarankan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	2 lembaga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			10.000.00
								Pemantapan Tata Kelola			

					Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerang		n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	
7 1	3 2.03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Buku		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Totok Okui Target	10.000.000	
7 1	3 2.03 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		15.000.000	
7 1	3 2.03 5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua	l Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan		15.000.000	
7 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasaan Aparatur	Kelurahan	74 %	268.720.000)	Akuntabel		50.000.000	
7 1	6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembuatan rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		74 %	268.720.000				50.000.000	
7 1	6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.800.000	
7 1	6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.800.000	
7 1	6 2.01 4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.800.000	
7 1	6 2.01 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.800.000	
7 1	6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		2.800.000	
7 1	6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen	249.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lemabga kemasyarakatan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetanan dan penegasan batas desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen	4.120.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	1 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	6 2.01 1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan diwilayah kecamatan	Kab. Kutai Barat, Mook Manaar Bulatn, Semua Kelurahan	l Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		3.000.000	
7 1	1	KECAMATAN TERING PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai		100 %	5.551.243.810 5.204.881.884				7.926.750.321 7.259.072.189	
7 1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3,296,792,818				5.034.806.874	
7 1	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.292.927.876	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		5.030.632.737	
7 1	1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Keluranan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.864.942	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		4.174.137	
7 1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keiuranan	100 %	161.789.960		Pkumaber		171.145.487	
7 1	1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Serta Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Dalam Daerah	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Kampung	94.759.960	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		118.485.487	
7 1	1 2.05 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	67.030.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		52.660.000	
7 1	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	recturarian	100 %	289.792.730		PAKUMADEI		271.833.307	
7 1	1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Perlengkapan Alat Listrik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	5.351.442	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		5.779.559	
7 1	1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersdianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	103.566.745	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		119.875.851	
7 1	1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	61.817.542	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		66.762.946	
7 1	1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	l Paket	14.735.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		15.913.802	
7 1	1 2.06 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	104.322.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		63.501.149	
7 1	1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.427.290.470	· ·			1.729.207.495	
		•									

					Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Renc	ana Tahun 2024
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	P	rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Kab. Kutai Barat, Semua				Nasional	Daerah Pemantapan Tata Kelola	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	3.232.224	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			3.490.8
1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya air, listrik, dan Internet	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	21.891.540	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			35.813.5
1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.402.166.712	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			1.689.903.
1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	29.215.900						52.079.
1 1 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	3 Unit	15.343.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			17.897.
1 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Kantor	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	2 Unit	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			25.000.
1 1 2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Perkantoran	Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	4 Unit	7.872.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			9.181.
1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Kelurahan	100 %	338.543.926			Akuntabel			656.478.
1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		100 %	25.814.063						27.879.
2 201	, Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kampung dan	Kab. Kutai Barat, Semua	16.16	25.814.063	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			27.879
1 2 2.01	Vertikal Terkait	Monitoring Pembinaan Lembaga Kampung Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang	Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Kampung	25.814.063	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			27.879
2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Semua	100 %	312.729.863			Pemantapan Tata Kelola			628.598.
1 2 2.02	1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua	12 Bulan	42.124.110	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			586.776.
2 2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Supervisi Kasi Pendidikan dan Kesehatan	Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	11.605.753	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			12.534.
2 2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	259.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			29.287
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasaan Aparatur Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi		100 %	7.818.000						11.200.
6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	7.818.000						11.200
6 2.01	15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Batas Kampung	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kampung	7.818.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			11.200
					1		1				
	KECAMATAN SEKOLAQ DARAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang	1	100 %	5.419.091.233 5.042.725.453						6.287.771. 5.800,974.
1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dilaksanakan dengan baik Nilai SAKIP Kecamatan		50 %	30.069.710						84.669
1 2.01			Kab. Kutai Barat, Sekolaq			Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola			
1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq	2 Dokumen	6.529.710	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			23.948
1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Darat, Semua Kelurahan	3 Dokumen	23.540.000	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.250.160
1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu	K I K . 'B . G I I	100 %	3.467.070.055	D T (U D D)		Pemantapan Tata Kelola			
1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Terbayarkan	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	14 Bulan	3.463.990.385	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			4.245.778
1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Keuangan tepat waktu	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	18 Dokumen	3.079.670	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			4.388
1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Bimtek Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kab. Kutai Barat, Sekolaq	100 % 57 Paket	115.380.850 58.179.550	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			99.731 59.179
2.05	1111	·	Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq		57.201.300	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola			
1 1 2.06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Cakupan Layanan Administrasi Umum	Darat, Semua Kelurahan	5 Orang 1 Tahun	284.931.872	Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel			40.552 274.554
1 1 2.06								Pemantapan Tata Kelola			91.138
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	1 Paket	100.923.320	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik		1 Paket 3 Paket	100.923.320 105.560.110	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			98.939
1 2.06			Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq			Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			
1 2.06 1 2.06 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq	3 Paket	105.560.110	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementapan Tata Kelola Pementapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan			37.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	3 Paket I Paket	105.560.110 29.880.542 1.944.360	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemaritapan Tata Kelola Pemeritahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemaritapan Tata Kelola Pemeritahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemaritaban yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemaritahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemaritahan yang Baik, Bersih dan Pemeritahan yang Baik, Bersih dan Pemaritapan Tata Kelola Pemaritapan yang Baik, Bersih dan			37.000 2.744
1 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Bahan Bacaan Koran Kaltim Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq	3 Paket 1 Paket 1 Dokumen 72 Iaporan	105.560.110 29.880.542 1.944.360 46.623.540	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pementapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola			37.000 2.744 44.731
1 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Bahan Hacaan Koran Kaltim	Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq	3 Paket 1 Paket 1 Dokumen	105.560.110 29.880.542 1.944.360	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola			37.000 2.74 44.73] 995.54(
1 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Bahan Bacaan Koran Kaltim Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan jasa administrasi perkantoran	Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Sekolaq	3 Paket 1 Paket 1 Dokumen 72 Iaporan 1 Tahun	105.560.110 29.880.542 1.944.360 46.623.540 1.862.859.616	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerinahan yang Baik, Bersih dan Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola			37.000 2.744 44.731 995.540 3.770
1 1 2.06 1 1 2.08 1 1 2.08	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Tenediannya Bahan Bacaan Koran Kaltim Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan jasa administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber	Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Sema Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semaa Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semaa Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semaa Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semaa Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semaa Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semaa Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Abarat, Semaa Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Abarat, Semaa Kelurahan	3 Paket 1 Paket 1 Dokumen 72 Iaporan 1 Tahun 2 Iaporan	105.560.110 29.880.542 1.944.360 46.623.540 1.062.059.616 5.770.900	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Femantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Pementahan yang Baik, Bersih dan Pementahan yang Baik, Bersih dan			37,000 2,744 44,731 995,540 3,770 78,377
1 1 2.06 1 1 2.08 1 1 2.08 1 1 2.08 1 1 2.08	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penguandaan 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Bahan Bacaan Koran Kaltim Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan jasa administrasi perkantoran Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan	3 Paket 1 Paket 1 Dokumen 72 Iaporan 1 Tahun 2 Iaporan 3 Iaporan 4 Iaporan	105.560.110 29.880.542 1.944.360 46.623.540 1.062.099.616 5.770.900 66.699.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola Pemantapan Tata Kelola			37,000 2,744 44,731, 995,540, 3,770 78,377, 913,391,
1 1 2.06 1 1 2.08 1 1 2.08 1 1 2.08 1 1 2.08 1 1 2.08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Bahan Bacaan Koran Kaltim Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan jasa administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Sema Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Darat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Abarat, Semua Kelurahan Kah Kutai Barat, Sekolag Abarat, Semua Kelurahan	3 Paket 1 Paket 1 Dokumen 72 Iaporan 1 Tahun 2 Iaporan 3 Iaporan	105.560.110 29.880.542 1.944.360 46.623.540 1.062.099.616 5.770.900 66.699.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Akuntabel Femantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Pemantapan Tata Kelola Pementahan yang Baik, Bersih dan Pementahan yang Baik, Bersih dan Pementahan yang Baik, Bersih dan			98.939. 37.000. 2.744. 44.731. 995.540. 3.770. 78.377. 913.391.

					1 anun 2023	Сар	aian Kinerja dan Kerangka Pendanaa			Rencana Tahun 2024
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
7 1	1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau Kantor yang dipelihara atau direhabilitasi	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	18 Unit	34.998.980	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasionai Daeran Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel		48.173.700
7 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		82 %	376.365.780		Akuntabel		486.796.676
7 1	2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan		70 %	45.509.750		B		62.811.410
7 1	2 2.01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	1 laporan	30.510.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel	ersih dan	45.856.610
7 1	2 2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	14.999.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel	ersih dan	16,954.800
7 1	2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten		86 %	330.856.030				423.985.266
7 1	2 2.02 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	294.856.150	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel	ersih dan	372.606.526
7 1	2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di tingkat Kecamatan	Kab. Kutai Barat, Sekolaq Darat, Semua Kelurahan	4 laporan	35.999.880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel	ersih dan	51.378.740
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				13.890.757.930				24,779,024,182
8 1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				13.890.757.930				24.779.024.182
8 1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.565.757.930				14.179.024.182
8 1	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Evaluasi		100%	164.999.190				275.000.000
8 1	1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah yang di susun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	70.999.920	Dana Transfer Umum - Dana Bagi			90.000.000
0 1	1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil		2 Dokumen	10.555.520	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi			20.000.000
0 1	1 2.01 2	Kooluhasi dan Penyusuhan Dokumen KKA-SKFD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan		2 Dokumen		Hasil			20.000.000
8 1	1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15.000.000
8 1	1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			20.000.000
8 1	1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20.000.000
8 1	1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		18 Dokumen	32.999.460	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30.000.000
8 1	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	60.999.810	Dana Transfer Umum - Dana Bagi			80.000.000
8 1	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5,558,767,550	riasii			7.147.608.242
8 1	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang	5.534.768.080	Dana Transfer Umum - Dana Bagi			7.092.608.242
0 1	+		James Orang yang secretain dayi dan ranjangan 10.1		50 Orang	3.334.700.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi			1.072.000.272
8 1	+	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi			
8 1	1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan				Hasil			
8 1	1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	11.999.790	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20.000.000
8 1	1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	11.999.680	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20.000.000
8 1	1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15.000.000
8 1	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan		100%					77.000.000
8 1	1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Penawai		1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			12.000.000
8 1	1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			5.000.000
8 1	1 2.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			15.000.000
8 1	1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		3 Dokumen		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	+	+ +	15.000.000
9 1	1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		5 Orang		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi			30.000.000
0 1	+-+		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis				Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi			30.000.000
8 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	781,100,000	Hasil			939.000.000
8 1		Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Umum yang dilayani Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		l Paket	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi			12.000.000
0 1	+		Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			84.100.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	+		
0 1	1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disediakan		4 Paket	84.100.000	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi	 		165.000.000
8 1	+	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi			10.000.000
8 1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	195.000.000	Hasil			170.000.000
8 1	2.00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			62.000.000
8 1	1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15.000.000
8 1	1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			15.000.000
8 1	1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			20.000.000
8 1	1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	440.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi			445.000.000
8 1	+	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi			10.000.000
8 1	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem		1 Dokumen		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi			15.000.000
8 1	_	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Yang		100%		Hasil			1.000.000.000
0 1	2.07	r engannan Darindg stillik Daeran Fellunjang erusan Fellerintan Daeran	Dilaksanakan		100.0					1.000.000.000

						Caj	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
К	ode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional F	rioritas Daerah	Target Ca Tolok Ukur	apaian Kinerja Target	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
8 1 1	2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					500.000.000
8 1 1	2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi					400.000.000
8 1 1	2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					50.000.000
8 1 1	2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					30.000.000
8 1 1	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					20.000.000
8 1 1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3.744.989.850	Hasil					4.291.415.940
8 1 1	2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					20.000.000
8 1 1	2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		12 Laporan	99.999.900	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					120.000.000
8 1 1	2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		2 Laporan		Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					15.000.000
9 1 1	2.00 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporaan	3 644 989 950	Hasil Dana Transfer Umum - Dana Bagi					4.136.415.940
0 1 1	2.08 4	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang Disediakan Persentase Pemeliharaan Barang yang dilaksanakan		12 Laporaan	315,901,340	Hasil					449.000.000
0 1 1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	0. 0			313.701.340	Dana Tanasia Ulaura Dana Basi					
8 1 1	2.09 1	Penyediaan Jasa Pemelinaraan, Biaya Pemelinaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	156.001.340	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000
8 1 1	2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		9 Unit	74.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					90.000.000
8 1 1	2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		2 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000
3 1 1	2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					15.000.000
8 1 1	2.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					10.000.000
8 1 1	2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					12.000.000
8 1 1	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 Unit	85.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi					120.000.000
8 1 1	2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		Dana Transfer Umum - Dana Bagi					12.000.000
8 1 2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan dan penguatan Idieologi		79 %	275,000,000	Hasii					1.133.000.000
,		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan pemantapan									
3 1 2	2.01	Kebangsaan	pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		940 Peserta	275.000.000						1.133.000.000
8 1 2	2.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000
8 1 2	2.01 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rebangsaan yang Distasan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.000.000
8 1 2	2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	yang Disusun Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Seiarah Kebangsaan		100 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000
8 1 2	2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jamlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		820 Orang	275.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					780.000.000
8 1 2	2.01 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		16 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					45.000.000
8 1 2	2.01 6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		100 Keluarga		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000
8 1 3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Berdemokrasi.		79,25 %	1.327.000.000						4.298.000.000
8 1 3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Eting Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Esalitiasi Kelembagan Pemerintahan, Perwaklian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1406 Peserta	1.327.000.000						4.298.000.000
8 1 3	2.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakitan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serti Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kechanbagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusum		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000
8 1 3	2.01 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, seria Pemantanan Situasi Politik Di Duerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Dacrah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dacrah yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.000.000
			Fasilitasi Pemilukada Atau Pemilu Serentak		4 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
8 1 3	2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerinahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah, serti Pemantauan Situan Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilistis Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1055 Orang	1.145.000.000						3.950.000.000
			Jumlah Partai Politik yang Mendapatkan Bantuan Keuangan		10 Parpol							

						Сај	oaian Kinerja dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan Maju Rei	
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		rioritas		paian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 2.01	4 h	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serti Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		245 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1 3 2.01		Pelaksanaan Monitoring, Esuluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Deerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jamlah Laporan Hasil Monitoring, Evalusai dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Eitka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		16 Laporan	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					240.000.000
1 4	I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berkinerja baik		75 %	190.000.000						750.000.000
1 4 2.01	I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		480 Peserta	190.000.000						750.000.000
1 4 2.01	1 E	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendatlaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.000.000
1 4 2.01		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaflaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.000.000
1 4 2.01	3 F	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaflaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					185.000.000
1 4 2.01	4 F	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		300 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000
1 4 2.01		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		32 Laporan	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					253.000.000
1 5	I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 %	663.000.000						2.061.000.000
1 5 2.01	I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1040 Peserta	663.000.000						2.061.000.000
1 5 2.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Berngama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000
1 5 2.01		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Berngama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					4.000.000
1 5 2.01		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		800 Orang	298.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1.235.000.000
1 5 2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Berngama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		225 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					380.000.000
1 5 2.01		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		64 Laporan	165.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					440.000.000
1 6	I	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang di selesaikan		100%	870.000.000						2.358.000.000
1 6 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				870.000.000						2.358.000.000
1 6 2.01	1 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000
1 6 2.01	2 /	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Teraga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.000.000
1 6 2.01	3 /	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, seria Penangaana Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		200 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					195.000.000
1 6 2.01	4 /	Pedaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja, Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jamlah Orang yang Mengikui Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		502 Orang	420.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					915.000.000
1 6 2.01	. 5 (Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Omang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		53 Laporan		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					560.000.000
1 6 201	6 F	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	ĺ	12 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1		680.000.000